

BUMN

Hadir untuk negeri



PT PELNI (PERSERO)



110101 001001 001010

110101 001001 001010

110101 001001 001010

001001 100010

110101 001001 001010 100110 010010 101010

10100 100010 001010

001 001010 100110

110101 001001 001010

110101 001001 001010 100110 010010 101010 110100 100010 010101

00



STRENGTHENING POSITION THROUGH SINERGY & DIGITALIZATION

Memperkuat Posisi Melalui Sinergi dan Digitalisasi

Laporan Tahunan 2018 Annual Report





Strengthening Position through Synergy & Digitalization

Memperkuat Posisi melalui Sinergi dan Digitalisasi

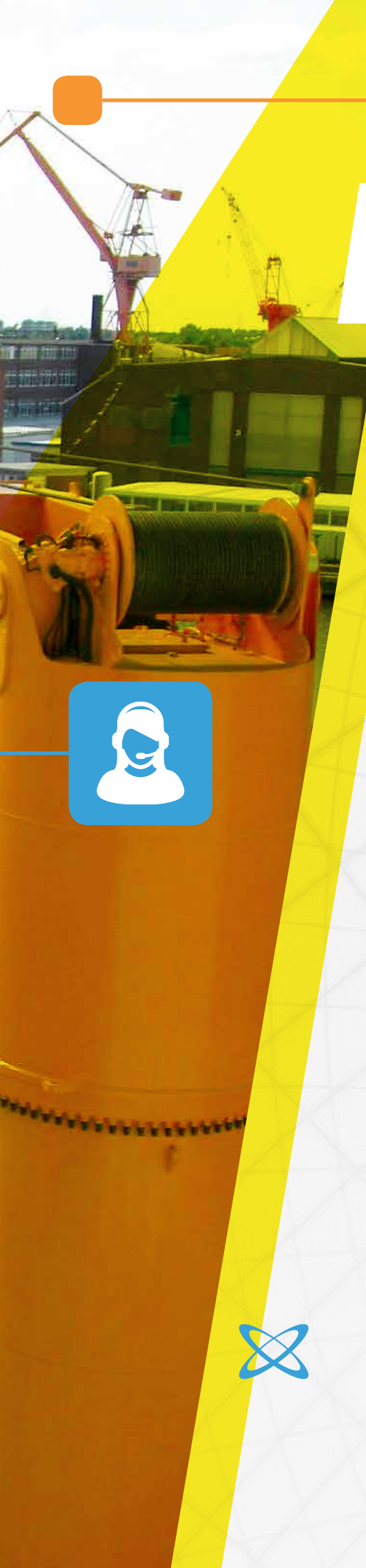


Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. Tak hanya ramai jadi perbincangan dunia, tapi gaungnya juga telah sampai di Indonesia. PT PELNI (Persero) sebagai pihak yang ditunjuk sebagai badan penyelenggara Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation* - PSO) dan angkutan barang di laut menyadari pentingnya kemampuan beradaptasi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk terus dapat mengukuhkan posisinya.

Tahun 2018, PT PELNI (Persero) berada dalam fase GROWTH yakni fase terakhir dari *roadmap* transformasi PT PELNI (Persero). Dimana dalam fase ini perusahaan mengambil langkah strategis berupa sinergi BUMN dan sistem operasi berbasis digital. Dengan melakukan sinergi BUMN dan penerapan sistem operasi berbasis digital, PT PELNI (Persero) optimis dapat mengukuhkan posisinya menjadi yang terdepan sebagai penyedia jasa transportasi laut serta mampu berkontribusi nyata untuk negeri.

In the midst of New Industry Digitalization initially named Industrial Revolution 4.0. It has become a Spotlight in the globe and especially in Indonesia. PT PELNI (Persero) appointed as an Public Service Obligation organizer and Sea Freight Transportation considering the importance of adaptability and taking the concrete steps to continue to strengthen its position.

In 2018, PT PELNI (Persero), was in the GROWTH phase, which is the last phase of PT PELNI (Persero) transformation roadmap. The Company took the positive steps to integrate State-owned Enterprises with Digital - Base Operating System. PT PELNI (Persero) is committed to strengthening its position as a leader of Sea transportation provider and actively contributing for the Nation.





Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2018

Strengthening Position through Sinergy & Digitalization

Memperkuat Posisi melalui Sinergi dan Digitalisasi



2017

Transform, Innovate and Grow for Sustainable Growth

Bertransformasi, Berinovasi, Bertumbuh untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan





Kesinambungan Tema Theme Continuity



2016
Transformasi Menuju
Pertumbuhan Kinerja
Transformation Towards
Higher Growth



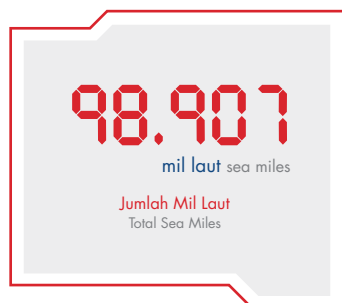
2015
Perjalanan untuk
Perubahan dengan
Membangun Budaya Kerja
Journey to Change, Building
the Work Culture





Highlight 2018

2018 Highlights





Testimoni

Testimony

"Selalu siap dan adaptasi dengan era perubahan zaman yang sangat cepat ini, adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan untuk PT PELNI (Persero) dan rekanannya. Terima kasih."

"Always ready and adjusting to rapid changes, is the key to achieve the success for PT PELNI (Persero) and its partners. Thank you."

PT SMI



"Digitalisasi jangan sampai memutuskan tali silaturahmi"

"Digitalization could not ignore the relationship"

PT GMMU

"Agar hubungan baik antara PT PELNI (Persero) & Rekanan dapat terus terjalin"

"For continuous good relationship between PT PELNI (Persero) & its Partners"

PT SDA



"PT PELNI (Persero) sudah jauh lebih baik dan semakin lebih baik lagi kepada semua rekanan/supplier"

"PT PELNI (Persero) is the best Company for all partners / suppliers"

PT SP

"Terima kasih atas kerjasamanya."

"Thank you for the cooperation."

PT PNJ





Daftar Isi

Table of Content

03	Cover Story Cover Story	128	Pejabat Eksekutif per 31 Desember 2018 Executives Officer as of December 31, 2018	181	Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektabilitas Piutang Perusahaan Ability to Pay Loans and Collectability of Company Receivables
04	Kesinambungan Tema Theme Continuity	131	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	183	Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy
06	Highlight 2018 2018 Highlights	131	Kronologi Pencatatan Saham Shares Listing Chronology	184	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal The Material Commitments for Investment of Capital Investment
07	Testimoni Testimony	131	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology	184	Investasi Barang Modal The Capital Investment
08	Daftar Isi Table of Content	132	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure	186	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2018 serta Proyeksi untuk Tahun Mendatang Comparison Between Target and Realization in 2018 also Projection for The Next Year
01	Ikhtisar Pencapaian 2018 2018 Performance Highlights	133	Entitas Anak & Asosiasi Subsidiary & Association	188	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Information and Facts Material Happened after the Date of Accountant Report
12	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	136	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Stock Market Supporting Institution and Professions	188	Kebijakan Dividen Dividend Policy
14	Ikhtisar Usaha Operating Highlights	138	Peta Wilayah Operasi Jaringan Trayek Kapal Penumpang Passenger Ship Route Network Operational Area	188	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (MSOP) Employee Stock Ownership Program (MSOP)
16	Peristiwa Penting 2018 2018 Significant Event	140	Jaringan Trayek Tol Laut Tahun 2018 The Tol Laut Route Sea 2018	188	Informasi Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Sifat Transaksi dengan Pihak Afiliasi Transaction Information Containing Conflict of Interest and Transactions with Affiliation Parties
18	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification	142	Jaringan Trayek Nasional Kapal Perintis Tahun 2018 National Ship Perintis Route 2018	188	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Amendment of Regulatory Regulations and its Impact on Company
02	Laporan Manajemen Management Report	144	Rute Kapal Ternak 2018 Cattle Ship Route 2018	188	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Public Offering Funds Uses Realization
24	Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners	146	Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office	189	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Amendment of Accounting Policies and its Impact on Company Financial Statements
32	Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Profile	149	Informasi pada Website Perusahaan Information at Company Website	191	Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information
38	Laporan Direksi Report from Board of Directors	04	Analisa & Pembahasan Manajemen Management Discussion & Analysis	193	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
52	Profil Direksi The Board of Directors' Profile	154	Tinjauan Makro Ekonomi Macro Economic Review	196	Prospek Usaha dan Strategi Perusahaan Business Prospects and Strategies of the Company
03	Profil Perusahaan Company Profile	155	Tinjauan Industri Pelayaran Shipping Industry Review		
60	Identitas Perusahaan Corporate Identity	156	Kinerja Operasi Per Segmen Usaha Per Business Segment Operation Overview		
62	Riwayat Singkat Perusahaan Company Brief History	165	Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan The Company Financial Performance Reviews		
64	Jejak Langkah Perusahaan The Company Milestones	158	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position Statements		
66	Bidang Usaha Line of Business				
67	Produk dan Jasa Product and Services				
72	Visi, Misi, Tata Nilai, Budaya Perusahaan & Perilaku Vision, Mission & Corporate Culture & Behavior				
76	Struktur Organisasi Organization Structure				
80	Sumber Daya Manusia Human Resources				
105	Teknologi Informasi Information Technology				
124	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Governance				



Daftar Isi Table of Content

05	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance	302	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
200	Pendahuluan Introduction	303	Profil Sekretaris Perusahaan Profile of Corporate Secretary
223	Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholders Informations	304	Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)
224	Struktur Organ GCG Perusahaan Coporate GCG Structure	310	Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit Profile
225	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	311	Auditor Eksternal External Auditor
236	Dewan Komisaris Board of Commissioners	312	Manajemen Risiko Risk Management
243	Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Secretary	352	Etika Bisnis Business Ethics
244	Profil Sekretaris Dewan Komisaris Profile of Board of Commissioners Secretary	356	Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan Litigation Involving the Company
245	Komisaris Independen Independent Commissioner	357	Akses Informasi dan Data Perusahaan Corporate Data and Information Access
246	Direksi Board of Directors	358	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System
251	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners and Directors Meeting Attendance Frequency	363	Pengendalian Gratifikasi Gratification Prevention
263	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Directors	06	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
269	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners' and Directors' Composition Diversity	368	Pendahuluan Introduction
270	Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Board of Commissioners' and Directors' Performance Assesment	371	Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup Social Responsibility in Environment
278	Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Affiliation between the Board of Commissioners, Directors and Shareholders	374	Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects
279	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Shares Ownership	380	Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social Responsibility in Community and Society Development Sector
280	Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Dual Position	387	Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan Social Responsibility to Customers
281	Komite Audit Audit Committee	393	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2017 PT PELNI (Persero) Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability for the Annual Reports 2017 of PT PELNI (Persero)
290	Profil Anggota Komite Audit Profile of Audit Committee Member	397	Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company
293	Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee	413	Kriteria Annual Report Award 2018 2018 Annual Report Award Criteria
298	Profil Anggota Komite Kebijakan Risiko Profile of Risk Policy Committee Member	435	Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Report
301	Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi Nomination and/or Remuneration Function		

Sangkalan dan Batas Tanggung Jawab Disclaimer

Laporan Tahunan ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

This annual report contains financial condition, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company's objectives, which is classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing laws, excluding historical matters.

Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif yang memiliki risiko dan ketidakpastian serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang tertulis dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang dari Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa segala tindakan yang telah diambil untuk memastikan keabsahan dokumen ini akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that the entire valid document presented will bring specific results as expected.

Laporan ini juga memuat kata "Perusahaan", "Perseroan", PELNI atau "PT PELNI (Persero)" yang didefinisikan sebagai PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero).

This annual report contains the words "Company", "The Company," PELNI or "PT PELNI (Persero)", hereinafter referred to as PT PELAYARAN INDONESIA (Persero).



01

Ikhtisar Pencapaian 2018

2018 Performance Highlights





Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Uraian (dalam jutaan) Description (in million)	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	2.970.314	3.853.628	4.244.615	4.394.845	4.593.313
Beban Pokok Usaha Operating Expenses	(2.713.914)	(3.293.408)	(3.445.001)	(3.652.044)	(4.010.772)
Laba Kotor Gross Profit	256.400	560.220	799.614	742.801	582.542
Laba Usaha Operating Profit	56.901	147.007	260.413	262.280	75.111
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit for the Current Year Attributable to:	4.194	98.643	248.547	276.881	204.174
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	4.396	98.931	248.177	276.419	203.631
Pemilik Non Pengendali Non-Controlling Interest	(202)	(288)	370	462	543
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(27.377)	2.079	(33.627)	(37.429)	(14.757)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income in the Current year	31.571	100.722	214.920	239.452	189.417
Laba Bersih Per Saham Dasar Basic Earnings Per Share	4.809	14.297	35.127	39.125	28.822
Jumlah Aset Total Assets	5.335.868	5.892.895	6.211.091	6.432.064	6.561.838
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.249.003	1.205.241	747.847	728.416	668.786
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.086.865	4.687.654	5.463.795	5.703.648	5.893.052

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Rasio Keuangan

Financial Ratio

Uraian Description	2014	2015	2016	2017	2018	Satuan Units
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio						
Rasio Lancar Current Ratio	155,31	256,71	430,8	525,6	648,92	%
Rasio Kas Cash Ratio	38,02	107,71	196,27	293,37	399,34	%
Rasio Cepat Quick Ratio	103,63	184,98	150,05	254,45	342,16	%
Rasio Leverage Leverage Ratio						
Rasio Kewajiban atas Aset Liabilities to Assets Ratio	23,41	20,45	12,04	11,32	10,19	%
Rasio Kewajiban atas Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	30,56	25,71	13,69	12,77	11,35	%
Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas Long-term Liabilities to Equity Ratio	9,46	8,59	2,89	3,55	3,8	%



Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Uraian Description	2014	2015	2016	2017	2018	Satuan Units
Rasio Aktivitas Activity Ratio						
Rasio Perputaran Persediaan Inventory Turnover Ratio	0,15	0,15	0,11	0	0	Kali Times
Rasio Perputaran Aset Asset Turnover Ratio	55,67	65,39	69,81	70,94	73,89	%
Rasio Penagihan Rata-rata Average Collection Ratio	14	18	23	17	20	Kali Times
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio						
Imbalan terhadap Ekuitas Return to Equity	0,1	2,15	4,12	4,41	3,33	%
Imbalan terhadap Investasi Return to Investment	1,5	2,49	6,61	7,07	10,33	%
Marjin Laba Kotor atas Penjualan Gross Profit on Sales	8,63	14,54	18,84	16,9	12,68	%
Marjin Laba Bersih atas Penjualan Net Profit on Sales	1,92	3,81	5,74	6,14	4,23	%
Rasio EBITDA atas Aset EBITDA on Asset Ratio	7,06	7,94	6,61	7,07	10,33	%

Arus Kas Cashflow

Uraian Description	2014	2015	2016	2017	2018	Satuan Units
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	(51.514)	121.629	788.812	439.262	456.688	Rp Juta Million Rupiah
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(19.819)	(90.809)	(54.065)	(323.426)	(355.792)	Rp Juta Million Rupiah
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	19.851	437.756	27.760	(13.087)	84.539	Rp Juta Million Rupiah
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas Increase Cash and Cash Equivalent	(51.483)	468.576	762.507	102.748	185.436	Rp Juta Million Rupiah
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning	421.998	370.415	839.091	1.601.598	1.704.346	Rp Juta Million Rupiah
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at Ending	370.515	839.091	1.601.599	1.704.346	1.889.782	Rp Juta Million Rupiah



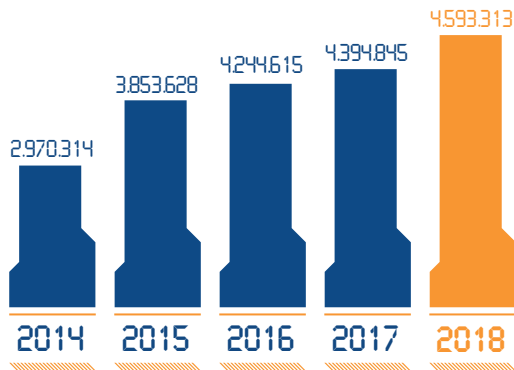
Ikhtisar Usaha

Operating Highlights

Pendapatan Usaha Bersih

Net Operating Revenue

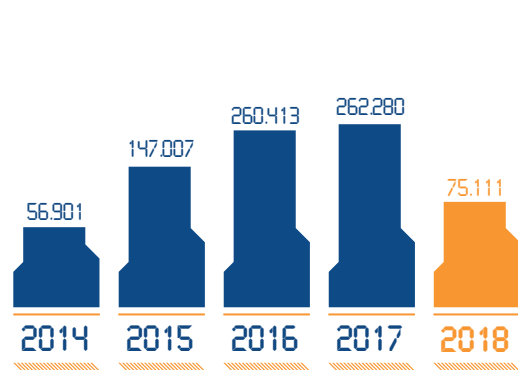
dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Laba Usaha

Operating Profit

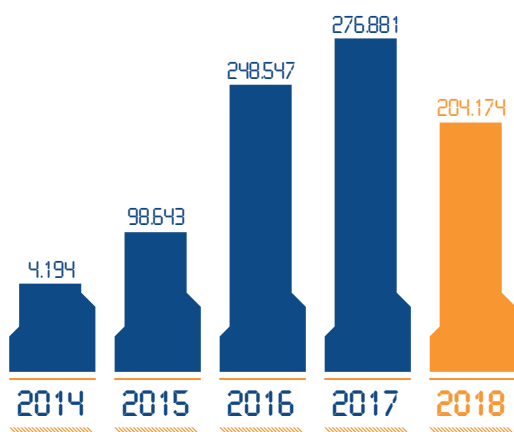
dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Laba Tahun Berjalan

Profit for the Current Year

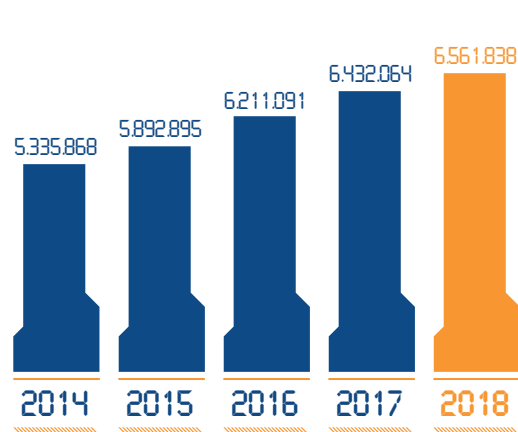
dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Jumlah Aset

Total Assets

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

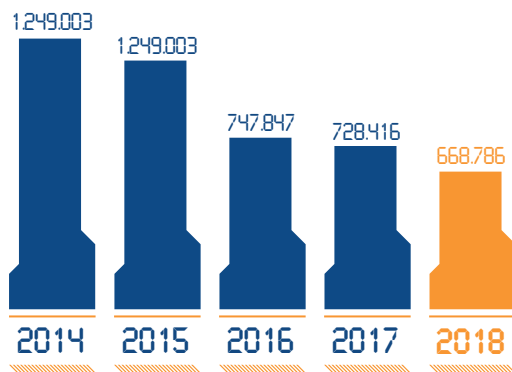




Ikhtisar Usaha Operating Highlights

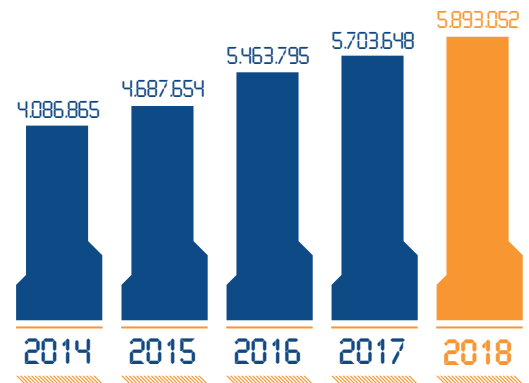
Jumlah Liabilitas Total Liabilities

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



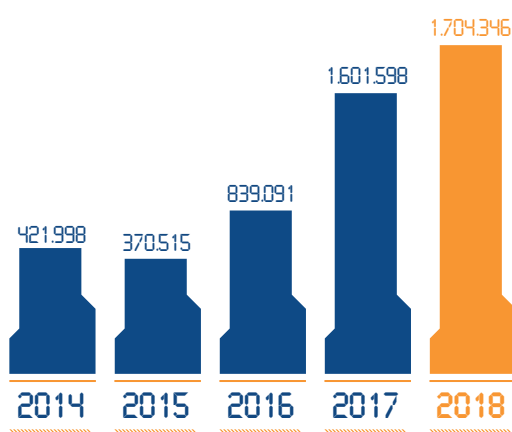
Jumlah Ekuitas Total Equity

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



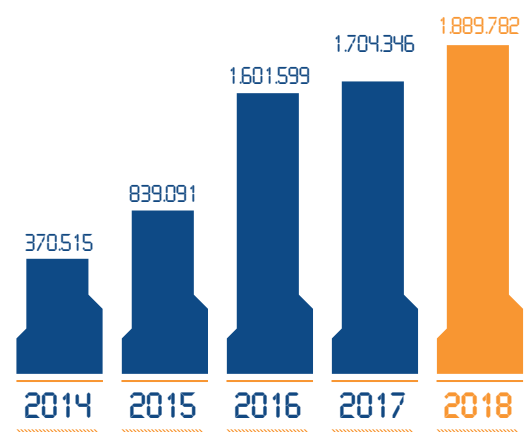
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at Ending

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah





Peristiwa Penting 2018

2018 Significant Event



03 Januari 2018 | January 03, 2018
 Townhall Meeting Semester I
 Townhall Meeting 1st Semester



04 Januari 2018 | January 04, 2018
 Launching Aplikasi Kargo
 Cargo Application Launching



11 Januari 2018 | January 11, 2018
 Peresmian KM Lognus 4
 MV Lognus 4 Inauguration



04 Februari 2018 | February 04, 2018
 Rapat Pimpinan Bandung
 Bandung Executive Meeting



12 Februari 2018 | February 04, 2018
 Launching Transformasi Budaya Perusahaan
 Corporate Culture Transformation Launching



28 Februari 2018 | February 28, 2018
 Tanda Tangan PSO 2018
 PSO 2018 Assignment



02 Maret 2018 | March 02, 2018
 MOU Sinergi BUMN
 SOE Sinergy MOU



09 Maret 2018 | March 09, 2018
 Pisah Sambut Komisaris Utama
 President Commissioner Farewell



28 Maret 2018 | March 28, 2018
 Tanda Tangan PKS PELNI – TNI
 PELNI - TNI Working Program Agreement



20 April 2018 | April 20, 2018
 Launching Klinik Heritage
 Heritage Clinic Launching



28 April 2018 | April 28, 2018
 Peringatan HUT 66
 66th Anniversary Ceremony



05 Mei 2018 | May 05, 2018
 HUT Family Gathering
 Family Gathering Anniversary



11 Mei 2018 | May 11, 2018
 MOU PELNI – LEN
 PELNI - LEN MOU



24 Mei 2018 | May 24, 2018
 Tanda Tangan PKS PELNI - Garuda Indonesia
 PELNI - Garuda Indonesia Working Program Agreement



05 Juni 2018 | June 05, 2018
 MOU PELNI – Jamdatun
 PELNI - Jamdatun MOU



Peristiwa Penting 2018 2018 Significant Event



09 Juni 2018 | June 09, 2018
Mudik Bareng BUMN
Homecoming With SOE



20 Juli 2018 | July 20, 2018
Peresmian KM Lognus 5
MV Lognus 5 Inauguration



29 Juli 2018 | July 29, 2018
Siswa Mengenal Nusantara
Archipelago Knowledge for Student



04 Agustus 2018 | August 04, 2018
Pameran di SMA 28 Jakarta
Exhibition in 28 Jakarta Senior High School



14 Agustus 2018 | August 14, 2018
MOU PELNI – Universitas Pertamina
PELNI - Pertamina University MOU



15 Agustus 2018 | August 15, 2018
Launching Redpack
Redpack launching



17 Agustus 2018 | August 17, 2018
Perayaan HUT RI di Medan
Indonesia Independence Day in Medan



04 September 2018 | September 04, 2018
Perayaan Hari Pelanggan Nasional
National Customer Day Ceremony



05 September 2018 | September 05, 2018
Townhall Meeting Semester II
2nd semester townhall meeting



12 September 2018 | September 12, 2018
Pameran Logistik
Logistic Exhibition



17 September 2018 | September 17, 2018
Pameran Hari Perhubungan Nasional
National Transportation Day Exhibition



12 November 2018 | November 12, 2018
Serah Terima Sertifikat ISO Galangan
Surya Surabaya
Surya Surabaya Dock ISO Certificate Handover



28 November 2018 | November 28, 2018
Pameran Aquatica Asia 2018
Asia Aquatic 2018 Exhibition

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

Penghargaan

Awards



26 September 2018
 September 26, 2018

Infobank - Infobank 9th BUMN Awards
 "BUMN Berpredikat 'SANGAT BAGUS' atas
 Kinerja Keuangan Selama Tahun 2017"
 Infobank - Infobank 9th BUMN Awards
 "SOE with 'VERY GOOD' Predicate for Financial
 Performance in 2017"

27 September 2018
 September 27, 2018

Politeknik Maritim Negeri Indonesia
 "Sebagai Perintis dan Pengembang
 Transportasi Laut"
 Indonesian State Maritime Polytechnic
 "As a Pioneer and Developer of
 Maritime Transportation"

Sertifikasi

Certification

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikasi Garis Muat Load Line Certificate		
		Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date	
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Time
1	KM CIREMAI	27455	29/11/2018	01/08/2023
2	KM DOBONSOLO	27026	05/10/2018	10/03/2023
3	KM G DEMPO	26683	31/08/2018	20/06/2023
4	KM KELUD	00996-CG	08/11/2018	07/04/2019
5	KM LEUSER	27074	16/10/2018	28/05/2023
6	KM Caraka JN III-22	26720	03/09/2018	12/11/2022
7	KFC JET LINER	00228-MS	30/11/2018	28/02/2019
1	KM CAMARA NUSANTARA 1	011808	02/01/2018	23/11/2020
2	KM CAMARA NUSANTARA 3	012826	16/10/2018	09/03/2023
3	KM KENDHAGA NUSANTARA 1	012479	16/07/2018	29/11/2022
4	KM LOGISTIK NUSANTARA 1	25184	10/01/2018	24/04/2021
5	KM LOGISTIK NUSANTARA 2	26286	04/07/2018	16/09/2022
6	KM LOGISTIK NUSANTARA 3	25868	03/04/2018	15/04/2019
7	KM LOGISTIK NUSANTARA 4	26293	05/07/2018	04/06/2023
8	KM LOGISTIK NUSANTARA 5	0217-SP	19/10/2018	18/03/2019



Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification



Sertifikasi Lambung Hull Certificate			Sertifikasi Mesin Machine Certificate			Lembaga Klasifikasi Classification Institution
Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date		Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Time		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Time	
41587	29/11/2018	01/08/2023	27041	29/11/2018	01/08/2023	PT BKI
40937	05/10/2018	10/03/2023	26610	05/10/2018	10/03/2023	PT BKI
40449	31/08/2018	20/06/2023	26683	31/08/2018	20/06/2023	PT BKI
00996-CG	08/11/2018	07/05/2019	00996-CG	08/11/2018	07/05/2019	PT BKI
41031	16/10/2018	28/05/2023	26669	16/10/2018	28/05/2023	PT BKI
40508	03/09/2018	12/11/2022	26326	03/09/2018	12/11/2022	PT BKI
00228-MS	30/11/2018	28/02/2019	00228-MS	30/11/2018	28/02/2019	PT BKI
038180	02/01/2018	23/11/2020	024818	02/01/2018	04-Feb-20	PT BKI
041015	16/10/2018	09/03/2023	026656	16/10/2018	08-Dec-19	PT BKI
039972	16/07/2018	29/11/2022	025950	16/07/2018	25-Mar-20	PT BKI
38306	10/01/2018	24/04/2021	24885	10/01/2018	17-May-20	PT BKI
39898	04/07/2018	16/09/2022	25895	04/07/2018	08-Jun-21	PT BKI
39326	03/04/2018	15/04/2019	25533	03/04/2018	28-May-18	PT BKI
39911	05/07/2018	04/06/2023	25906	05/07/2018	25-Mar-19	PT BKI
0217-SP	25/05/2018	24/05/2019				PT BKI



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang

Passenger Ship Safety Certification

No	Nama Kapal Ship Name	Nomor Sertifikasi Certification Number	Diterbitkan Published	Masa Berlaku Period	Dikeluarkan Oleh Certified by
1	KM. KELIMUTU	PK.001/5/7/KSO-Cbn-2018	28 Februari 2018	27 Februari 2019	KSOP CIREBON
2	KM. AWU	PK.001/9/14/ KSO-Cbn-2018	12 April 2018	09 April 2019	KSOP CIREBON
3	KM. AWU	PK.001/93/12/SBY zpr 2017	06 Oktober 2017	08 Januari 2018	KSOP SURABAYA
4	KM. SANGIANG	PK.001/III.4/15/KSOP.BTG.18	12 Juli 2018	11 Januari 2019	KSOP BITUNG
5	KM. SANGIANG	PK.001/III.1/8/KSOPBTG.18	25 Januari 2019	24 April 2018	KSOP BITUNG
6	KM. SANGIANG	PK.001/33/02/SYB.MKS.2018	11 April 2018	10 Juli 2018	KSOP MAKASSAR
7	KM. SANGIANG	PK.001/34/01/KSOP.ABN-2017	25 Oktober 2017	24 Januari 2018	KSOP AMBON
8	KM. TATAMAILAU	PK.001/18/01/SYB.MKS.18	5 Maret 2018	4 September 2018	KSOP MAKASSAR
9	KM. TATAMAILAU	PK.001/III.1/5/KSOPBTG.17	17 November 2017	21 Februari 2018	KSOP BITUNG
10	KM. TIDAR	PK.001/22/18/SYB.Tpr.18	28 November 2018	25 Februari 2019	KSOP SURABAYA
11	KM. TIDAR	PK.001/07/13/KSOP.TG.EMAS-2017	29 November 2017	24 November 2018	KSOP SEMARANG
12	KM. LAWIT	PK.001/2/14/KSOP-Cbn-2018	06 Februari 2018	03 Februari 2019	KSOP CIREBON
13	KM. LAWIT	B.4790/PK.001/SYBTPK-17	21 Desember 2017	02 Februari 2018	KSOP TG. PRIOK
14	KM. BUKIT RAYA	01795-TP/D1.S-PS/2018	07 Desember 2018	19 Februari 2019	PT BKI
15	KM. BUKIT RAYA	0384-TP/D1.S-PS/2018 Perp.II	15 Oktober 2018	14 Desember 2018	PT BKI
16	KM. BUKIT RAYA	00384-TP/D1.S-PS/2018	14 Maret 2018	13 Juni 2018	PT BKI
17	KM. BUKIT RAYA	B.2015/PK.001/33/SYBTPK-17	10 Agustus 2017	20 Februari 2018	KSOP TG. PRIOK
18	KM. KELIMUTU	PK.001/5/7/KSOP-Cbn-2018	28 Februari 2018	27 Februari 2019	KSOP CIREBON
19	KM. KELIMUTU	PK.001/07/12/KSOP.TG. EMAS-2017	24 November 2017	29 Januari 2018	KSOP SEMARANG
20	KM. KELUD	PK.001/8/16/SYB.BLW-2018	08 Mei 2018	07 November 2018	KSOP BELAWAN
21	KM. KELUD	PK.B.4412/PK.001/42/SYBTPK-17	10 November 2017	07 Mei 2018	KSOP TG. PRIOK
22	KM. BINAIYA	PK.001/63/13/KSOP.BNA-18	18 September 2018	17 Desember 2018	KSOP BENOA
23	KM. BINAIYA	PK.001/04/06/KSOP.TG.EMAS-2018	12 Juni 2018	17 September 2018	KSOP SEMARANG
24	KM. BINAIYA	PK.001/27/07/SYB.Tpr.18	19 Maret 2018	17 Juni 2018	KSOP SURABAYA
25	KM. BINAIYA	PK.001/14/01/SYB.MKS-17	17 Maret 2017	13 Maret 2018	KSOP MAKASSAR
26	KM. NGGAPULU	PK.001/1/13/KSOP.Btn-18	06 Februari 2018	29 Januari 2019	KSOP BANTEN
27	KM. NGGAPULU	PK.001/145/06/SYB.TPR.2018	04 Maret 2018	27 September 2018	KSOP SURABAYA
28	KM. NGGAPULU	PK.001/59/04/SYB.MKS.17	21 November 2017	25 Februari 2018	KSOP MAKASSAR
29	KM. JETLINER	PK. 001/44/03/SYB.MKS.18	04 Juni 2018	3 Desember 2018	KSOP MAKASSAR
30	KM. JETLINER	PK.001/13/148/KSOP.KDI.17	28 November 2017	27 Februari 2018	KSOP KENDARI
31	KM. UMSINI	0167-CG/D1.S-PS/2019	06 Maret 2019	05 May 2019	PT BKI
32	KM. UMSINI	01729-TP/D1.S-PS/2018	28 November 2018	19 Februari 2019	PT BKI
33	KM. UMSINI	0296-CG/D1.S-PS/2018	18 April 2018	17 September 2018	PT BKI
34	KM. UMSINI	02019-TP/D1.S-PS/2017	21 November 2017	21 Maret 2018	PT BKI
35	KM. DOBONSOLO	01277-TP/D1.S-PS/2018	03 September 2018	03 Desember 2018	PT BKI
36	KM. DOBONSOLO	0801-TP/D1.S-PS/2018	08 Juni 2018	07 September 2018	PT BKI



Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification

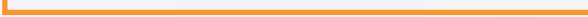
No	Nama Kapal Ship Name	Nomor Sertifikasi Certification Number	Diterbitkan Published	Masa Berlaku Period	Dikeluarkan Oleh Certified by
37	KM. DOBONSOLO	00193-CG/D1.S-PS/2018	10 Maret 2018	09 Juni 2018	PT BKI
38	KM. DOBONSOLO	00156-TP/D1.S-PS/2018	25 Januari 2018	09 Maret 2018	PT BKI
39	KM. LEUSER	PK.001/119/04/SYB.ZPR.2018	14 November 2018	26 Mei 2019	KSOP SURABAYA
40	KM. LEUSER	PK. 001/63/01/SYB.ZPR.2018	31 Mei 2018	26 November 2018	KSOP SURABAYA
41	KM. TILONGKABILA	PK.001/19/06/SYB.ZPR.2018	22 Februari 2018	14 Agustus 2018	KSOP SURABAYA
42	KM. TILONGKABILA	PK.001/52/03/SYB.MKS.17	06 November 2017	09 Februari 2018	KSOP MAKASSAR
43	KM. SIRIMAU	PK.001/31/01/18	11 November 2018	30 April 2019	KSOP AMBON
44	KM. SIRIMAU	PK.001/41/03/SYB.MKS.18	11 Mei 2018	10 November 2018	KSOP MAKASSAR
45	KM. CIREMAI	01505-TP/D1.S-PS/2018	15 Oktober 2018	30 November 2018	PT BKI
46	KM. CIREMAI	0400-CG/D1.S-PS/2018	21 Mei 2018	20 Agustus 2018	PT BKI
47	KM. CIREMAI	02061-TP/D1.S-PS/2017	29 November 2017	29 April 2018	PT BKI
48	KM. CIREMAI	01505-TP/D1.S-PS/2018	20 Agustus 2018	15 Oktober 2018	PT BKI
49	KM. GUNUNG DEMPO	01381-TP/D1.S-PS/2018	24 September 2018	01 November 2018	PT BKI
50	KM. GUNUNG DEMPO	00159-SM/D1.S-PS/2018	04 Mei 2018	03 Oktober 2018	PT BKI
51	KM. GUNUNG DEMPO	00008/tp/D1.S-PS/2018	03 Januari 2018	18 Mei 2018	PT BKI
52	KM. GUNUNG DEMPO	01778-TP/D1.S-PS/2017	05 Oktober 2017	05 Januari 2018	PT BKI
53	KM. LABOBAR	PK.001/121/01/SYB.tpr.18	21 November 2018	14 Mei 2019	KSOP SURABAYA
54	KM. LABOBAR	PK. 001/88/11/SYB.zpr.2018	20 Agustus 2018	20 November 2018	KSOP SURABAYA
55	KM. LABOBAR	PK.001/03/18/KSOP.TG.EMAS-2018	23 Mei 2018	20 Agustus 2018	KSOP SEMARANG
56	KM. LABOBAR	PK.001/112/12/SYB.zpr.2017	20 November 2017	20 Mei 2018	KSOP SURABAYA
57	KM. DOROLONDA	01526-TP/D1.S-PS/2018	19 Oktober 2018	30 November 2018	PT BKI
58	KM. DOROLONDA	01203-TP/D1.S-PS/2018	21 Agustus 2018	20 Oktober 2018	PT BKI
59	KM. DOROLONDA	00419-CG/D1.S-PS/2018	23 Mei 2018	22 Agustus 2018	PT BKI
60	KM. DOROLONDA	00052-TP/D1.S-PS/2018	12 Januari 2018	25 Mei 2018	PT BKI
61	KM. DOROLONDA	01794-TP/D1.S-PS/2017	14 Oktober 2017	14 Januari 2018	PT BKI
62	KM. EGON	PK.001/61/16/SYB.tpr.18	24 Mei 2018	19 November 2018	KSOP SURABAYA
63	KM. EGON	PK.001/110/16/SYB.zpr.2017	22 November 2017	22 Mei 2018	KSOP SURABAYA
64	KM. WILIS	PK.001/67/04/SYB.MKS-18	11 Oktober 2018	11 November 2018	KSOP MAKASSAR
65	KM. WILIS	PK.001/46/03/SYB.MKS.18	08 Juni 2018	03 September 2018	KSOP MAKASSAR
66	KM. WILIS	PK.001/20/02/SYB.MKS.18	08 Maret 2018	07 Juni 2018	KSOP MAKASSAR
67	KM. SINABUNG	PK.001/111/06/SYB.zpr.2018	23 Oktober 2018	25 April 2019	KSOP SURABAYA
68	KM. SINABUNG	PK.001/42/05/SYB.zpr.2018	02 Mei 2018	25 Oktober 2018	KSOP SURABAYA
69	KM. SINABUNG	PK.001/96/16/SYB.zpr.2017	14 Desember 2017	22 Maret 2018	KSOP MAKASSAR
70	KM. BUKIT SIGUNTANG	PK.001/32/04/SYB.zpr.2018	04 April 2018	25 Maret 2019	KSOP SURABAYA
71	KM. PANGRANGO	PK. 001/13/10/KSOP.ABN-18	04 Mei 2018	03 Agustus 2018	KSOP AMBON
72	KM. PANGRANGO	PK.001/05/05/KSOP.ABN-18	06 Februari 2018	05 Mei 2018	KSOP AMBON



02

Laporan Manajemen

Management Report





Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners



01 Bambang Prihartono
Komisaris Utama
President Commissioner

04 Sudarto
Komisaris
Commissioner

02 Satya Bhakti Parikesit
Komisaris
Commissioner

05 Johanes Widodo Hario Mumpuni
Komisaris Independen
Independent Commissioner

03 Raldi Hendro Koestoer
Komisaris
Commissioner

06 Danang Parikesit
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan puji dan syukur kepada-Nya karena kami dapat menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang diamanatkan kepada kami selaku Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

Atas nama Dewan Komisaris, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi selama tahun 2018. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan telah mengacu kepada strategi bisnis yang telah ditetapkan, dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan penilaian terhadap kinerja Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan, Pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha dan rencana kerja yang disusun oleh Direksi untuk tahun 2019, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), perubahan komposisi Dewan Komisaris, frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi atas pencapaian kinerja Perseroan yang positif di tahun 2018. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah mampu menghadapi tantangan perekonomian dan industri serta mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada Perusahaan ditengah tantangan perekonomian dan industri, hal ini dapat dilihat baik dalam aspek operasional maupun aspek keuangan.

Secara umum, kami merasa bangga dan mengapresiasi berbagai pencapaian PT PELNI (Persero), sebagai hasil kerja seluruh Manajemen, meliputi Direksi beserta segenap jajaran karyawan PT PELNI (Persero). Pada tahun 2018 Perusahaan berhasil memperoleh pencapaian positif, penilaian berdasarkan pencapaian pada aspek operasional dan keuangan.

Dear our valued Shareholders and Stakeholders,

Our praise and gratitude to the God Almighty for his tremendous blessing given to us, so we can carry out our duties of supervisory and management functions as the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero)

On behalf of the Board of Commissioners, we hereby present a report for the implementation of our supervisory and advisory functions throughout 2018. Our duties and responsibilities have been referred to the Company's Articles of Association and legislations. We ensured that the Company's activities operate based on Business objectives, Professional Management - and meet the interest of Shareholders and other Stakeholders.

In this report, we state the performance of the Board of Directors in managing the Company, oversee the implementation of business strategy, business prospect and work plans of which prepared by the Board of Directors for 2019, and we also apply good corporate governance (GCG), change in our composition of the Board of Commissioners, elaborate our frequency and method to provide advice to the Board of Directors.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND ITS BASIS OF ASSESSMENT

We proudly present our highest appreciation to the Directors for the positive performances of the Company throughout 2018. We assume that the Directors has been able to face the economic and industrial challenges and has been giving the strength contribution to the Company in the midst of economic and industrial challenges, recognizing from both our operational and financial aspects.

Generally, we are very proud and appreciating some outstanding performances of PT PELNI (Persero) as the working result of entire Management, and the Directors – as well as our employees of PT PELNI (Persero). In 2018, the Company succeeded to achieve the positive performances, this assessment based on the achievements of operational and financial aspects.



Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

Dasar penilaian dari sisi keuangan dapat terlihat dari pencapaian Perseroan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada sisi Keuangan. Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil mencatatkan peningkatan secara kinerja dari sisi keuangan dengan mencatatkan pencapaian laba konsolidasi sebesar Rp204,17 miliar atau 60,05% dari RKAP 2018 yang sebesar Rp340,01 miliar. Dan realisasi margin laba kotor Perseroan tahun 2018 sebesar 12,68%, atau 67,01% dari RKAP 2018 yang sebesar 19,19%. Pencapaian margin laba bersih tahun 2018 adalah sebesar 4,23% atau pada tingkat 117,83% dari RKAP 2018 yang berada pada tingkat 3,59%.

Dilihat dari pertumbuhan kinerja keuangan tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, Perseroan mencatatkan pertumbuhan yang cukup positif. Sepanjang tahun 2018 PT. PELNI (Persero) berhasil membukukan pendapatan usaha bersih sebesar Rp4,61 triliun, jumlah ini meningkat sebesar 4,38% dibanding dengan penjualan tahun 2017 yang sebesar Rp4,39 triliun.

Dasar penilaian dari sisi operasional dapat terlihat dari pencapaian Perseroan terhadap RKAP Tahun 2018 pada sisi Operasional dan Produksi. Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil mencatatkan peningkatan secara kinerja dari sisi operasional dan produksi dengan mencatatkan pencapaian jumlah kapal beroperasi yakni Kapal Penumpang, Perintis, Ternak, Tol Laut, Kapal Barang/Komersil, Kapal Wisata, dan Kapal Tanker adalah sebanyak 83 kapal atau sebesar 95% dari RKAP 2018 yang sebanyak 87 kapal.

Dari aspek operasional, pencapaian positif dapat dilihat dari volume pengguna kapal PT PELNI (Persero) secara keseluruhan di tahun 2018 mencapai 3,62 juta orang, atau naik 2,70% jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana jumlah pelanggan PT PELNI (Persero) yakni sebanyak 3,52 juta orang. Sementara angkutan barang tercapai ton 100.633 m³, jumlah ini meningkat sebesar 34,72%. Angkutan kontainer 15.440 teus atau naik 4,45%, dan kendaraan sebanyak 8.511 unit yang mengalami kenaikan sebesar 23,08%.

The basis of assessment in the financial aspect can be seen from the Company's achievements in the Company Work and Budget plan (RKAP) of 2018. We considered that the Directors managed to record an increase in performance from the financial aspect by recording a consolidated profit of Rp204.17 billion or 60.05% in the Company's work and budget plan of 2018 which amounted to Rp340.01 billion. And the realization of the Company's gross profit margin in 2018 was 12.68%, or 67.01% of the Company's Work and Budget plan which amounted to 19.19%. This achievement of the 2018 net profit margin was 4.23% or at the level of 117.83% of the Company's Work and Budget plan which was at the level of 3.59%.

From the growing performance of financial in 2017 compared to the year of 2016, the Company recorded an prestigious performance. Throughout 2018, PT PELNI (Persero) succeeded to book the net profits of Rp4,61 trillion, this figure was increasing by 4,38% compared to the sales in 2017 which was amounted to Rp4.39 trillion.

The evaluation basis of the operational aspect can be seen from the Company's achievements in the Company Budget Plan of 2018 on the Operational and Production aspects. The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors managed to record an increasing performance in terms of operations and production by recording the achievement of the number of operating Ships, namely Passenger Ships, Perintis Ships, Cattle Ships, Tol Laut Ships, Freight/Commercial Ships, Marine Tourism Ships, and Tanker Vessels realized as much as 83 ships or 95% from the Company Budget Plan of 2018 is 87 ships.

From the operational aspect, we seen a positive achievement in the volume of customers of PT PELNI (Persero) in 2018 reaching at 3,62 million or increased by 2,70% compared to 3,52 million of customers in 2017. Meanwhile, freight or cargo transports reached at 100.633 m³, or showed an increase of 34.72%. And container transport was at 15.440 units or increasing by 4,45% and vehicle was at 8.511 units increasing by 23,08%.



Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan secara aktif memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas pengelolaan Perseroan oleh dewan Direksi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Sesuai dengan *Roadmap* Transformasi PT PELNI (Persero) yang dimulai sejak tahun 2015, tahun 2018 merupakan fase pertumbuhan atau GROWTH bagi PT PELNI (Persero). Dengan mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan yakni *Market Developmet, New Business Development, Culture Strenghtening, Production Facility Improvement, Operational Excellence*, dan *Holding Implementation* Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan tugas-tugasnya dengan optimal. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada Direksi agar terus memperkuat strategi yang mencakup pada optimasi pendapatan. Dewan Komisaris secara periodik telah melakukan rapat bersama jajaran Direksi untuk memberikan nasihat atas perkembangan strategi yang diterapkan Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI DAN DASAR PERTIMBANGANYA

Sesuai dengan *Roadmap* Transformasi PT PELNI (Persero), tahun 2019 masih merupakan tahun Pertumbuhan atau GROWTH bagi PT PELNI (Persero) dan kami berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi PT PELNI (Persero) beserta strategi-strateginya dalam melanjutkan fase Pertumbuhan ini telah mampu menjawab tantangan dan menangkap peluang bisnis untuk tercapainya target Perseroan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dewan komisaris juga berpendapat bahwa Perseroan harus terus mengevaluasi lebih lanjut apakah inisiatif strategis yang telah diterapkan pada tahun 2018 masih bisa ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Evaluasi ini dirasa perlu dilakukan secara periodik dengan tetap mengelola risiko yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang, dengan terus memperhitungkan efisiensi dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION

During 2018, the Board of Commissioners has conducted supervising the management of the Company that carried out by the Board of Directors and actively provided advices and inputs to the Directors. This is in accordance with the Board of Commissioners functions as supervisors of the management of the Company so that they are always in accordance with the provisions of the Articles of Association and GMS Decisions, as well as the Legislation that applies to the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

In accordance with the PT PELNI (Persero) Transformation Roadmap that began in 2015, the year of 2018 is a development or "GROWTH" phase for PT PELNI (Persero). By implementing the predetermined strategies, namely Market and New Business Development, Strengthening Corporate Culture, Production Facilities Improvement, Operational Excellence, and Holding Implementation. We consider that the Board of Directors has performed their duties optimally, and we has also provided advices to continue strengthening strategies which includes revenue optimization. We hold meeting periodically with the Board of Directors to provide development advices of strategies implemented by the Board of Directors in managing the Company.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECT AND ITS BASIC CONSIDERATION THAT ARRANGED BY THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the PT PELNI (Persero) Transformation Roadmap, the year of 2019 will be a "GROWTH" year for PT PELNI (Persero) and we assume that the business prospect and its strategies compiled by the Board of Directors to continue the Growth phase that has been able to face the challenges and gain the business opportunities in both short or long term achievements of the Company.

We also believe that the Company must continue to evaluate the implemented strategy initiatives in 2018 which can be improved to more valuable level. This evaluation is conducted periodically to manage the existing risks in the future and is continuously taking into account its efficiency and always paying attention to occupational health and safety.



Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik tetap menjadi fokus dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab kepada hasil atau tujuan yang dicapai tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terkait dengan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dibantu oleh Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan beberapa isu kunci dalam penerapan GCG seperti manajemen risiko dan *corporate social responsibility*. Hal ini sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan. Praktik manajemen risiko yang memadai diperlukan agar mampu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul. Atas hal ini, Dewan Komisaris memantau dan memberikan saran atas risiko yang dikelola oleh Perseroan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menganggap bahwa Perseroan telah membangun sistem pemantauan risiko dan menerapkan pedoman tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang baik. Dewan Komisaris bersama Direksi mempunyai komitmen untuk terus menerus memperbaiki implementasi GCG yang dalam pelaksanaannya diwujudkan secara konsisten.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi PT PELNI (Persero) telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, hal ini terbukti dari capaian atas penilaian GCG yang pada tahun 2018 dengan skor 81,56 dengan predikat BAIK berdasarkan *self assessment* untuk periode 2018. Nilai ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 80,448 dengan predikat BAIK. Dengan demikian dapat terlihat bahwa dari seluruh aspek penilaian (Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi serta Aspek lainnya) berada pada pencapaian Baik.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance remains as the focus of our duties and responsibilities with the Directors. In carrying out our supervisory function, we are neither responsible for the results and objectives but also constantly monitoring the processes to achieve the expecting results. In the practices of Good Corporate Governance (GCG), we are assisted by the Audit and Risk Policy Committee.

In addition, the Board of Commissioners also pays attention to several key issues in the implementation of GCG such as risk management and corporate social responsibility. This is in line with the development of the Company's business activities. The competent risk management practices are needed to be able to identify potential risks that may occur. For this matter, the Board of Commissioners monitors and provides advice on risks that managed by the Company. Overall, the Board of Commissioners considers that the Company has built a risk monitoring system and applied good corporate governance, risk management and internal control systems. The Board of Commissioners and Directors are committed to continually improving GCG implementation, which is consistently implemented.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors of PT PELNI (Persero) has implemented Good Corporate Governance, the achievement of GCG assessment in 2018 is as an evidence with a 81,56 score with GOOD predicate based on the self assessment for the 2018 period. This value was increased when compared to the previous year of 80,448 with GOOD predicate. Thus, it can be seen from all aspects of the assessment (Commitment to the implementation of good corporate governance in a sustainable manner, shareholders and AGMS, Board of Commissioners, Directors, Information Disclosure, Transparency and other Aspects) is in Good achievement.



Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Efektivitas pelaksanaan *whistleblowing system* (WBS) juga menjadi perhatian utama Dewan Komisaris. Perseroan telah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perseroan.

Pandangan Dewan Komisaris atas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) di Perseroan, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi WBS di Perseroan sudah sangat baik. Disamping itu, Dewan Komisaris juga memberikan arahan agar efektivitas pelaksanaan WBS terus ditingkatkan, agar kedepannya WBS semakin efektif.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Salah satu cara Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi adalah dengan mengadakan Rapat Gabungan secara berkala dengan Dewan Direksi. Pelaksanaan rapat gabungan ini juga merupakan bentuk kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan OJK No.33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur tentang pelaksanaan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tingkat kehadiran 100%. Dalam agenda rapat tersebut, Dewan Komisaris dapat mengetahui secara jelas terkait segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan, seperti strategi bisnis, rencana usaha, hingga kendala yang dihadapi Perseroan selama menjalankan kegiatan bisnis. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi-rekomendasi dan arahan kepada Direksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The effectiveness implementation of a whistleblowing system (WBS) is also a major concern of the Board of Commissioners. The Company has a Whistleblowing System that has function as a means of preventing and disclosing violations or fraud in the Company.

The view of the Board of Commissioners on the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in the Company, the Board of Commissioners considers that the WBS implementation in the Company has been very good conducted. In addition, the Board of Commissioners also provided direction so that the effectiveness of the WBS implementation should be improved, so that the WBS would be more effective in the future.

THE FREQUENCY AND WAY OF GIVING ADVICES TO THE BOARD OF DIRECTORS

One of the ways for the Board of Commissioners performing its supervisory function on the Board of Directors performance is by holding regular Joint Meetings with the Board of Directors. The joint meeting is also a form of the Company's compliance with OJK Regulation No.33/ POJK.04/2014 concerning The Board of Commissioners and Directors of Issuers or Public Companies which regulates the implementation of joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Throughout 2018, the Board of Commissioners has conducted 7 (times) joint meetings with the Board of Directors with attendance rate of 100%. In the meeting agenda, the Board of Commissioners could know clearly related to all matters relating to the Company's management activities, such as business strategies, business plans, and the obstacles that faced by the Company while carrying out business activities. The Board of Commissioners provides recommendations and direction to the Board of Directors in accordance with the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners.



Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris yang tertuang pada SK- 48/MBU/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan bergabungnya Bapak Bambang Prihartono sebagai Komisaris Utama dan Bapak Danang Parikesit sebagai Komisaris Independen PT PELNI (Persero). Kami berharap kehadiran mereka dapat meningkatkan nilai tambah pada kompetensi dan kapabilitas jajaran Dewan Komisaris Perseroan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Omo Dahlan dan Bapak Wolter B. Hesegem atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tahun buku 2017:

Komisaris Utama President Commissioner	H. Leon Muhamad
Komisaris Independen Independent Commissioner	Johanes Widodo Hario
Komisaris Commissioner	Sudarto
Komisaris Commissioner	Raldi Hendro Koestoer
Komisaris Commissioner	Satya Bhakti Parikesit

Setelah terjadi perubahan, maka susunan anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama President Commissioner	Bambang Prihartono
Komisaris Independen Independent Commissioner	Johanes Widodo Hario
Komisaris Independen Independent Commissioner	Danang Parikesit
Komisaris Commissioner	Sudarto
Komisaris Commissioner	Raldi Hendro Koestoer
Komisaris Commissioner	Satya Bhakti Parikesit

CHANGES ON THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBER

In 2018, there was a change in the composition of the Board of Commissioners member as stated in SK- 48/MBU/02/2018 dated February 19, 2018 with the joining of Mr. Bambang Prihartono as President Commissioner and Mr. Danang Parikesit as Independent Commissioners of PT PELNI (Persero). We hope that their presence could increase added values for the competencies and capabilities of the Board of Commissioners of the Company.

We also express our deepest appreciation to Mr. Omo Dahlan and Mr. Wolter B. Hesegem for their contributions that given during his tenure as a member of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

The composition of The Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) in 2017 were as follows:

After a changes on the composition of the Board of Commissioners member of PT PELNI (Persero) until the end of 2018 are as follows:



Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

Diharapkan melalui perubahan anggota Dewan Komisaris ini dapat membantu Direksi dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja dan mempercepat terwujudnya visi Perseroan.

APRESIASI

Mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan kepada PT PELNI (Persero). Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh jajaran manajemen serta pegawai Perseroan, berkat dedikasi dan kerja kerasnya, Perseroan mampu menghasilkan kinerja yang positif di tahun 2018.

It is expected through this changes in the Board of Commissioners member could help the Directors in improving the performance growth and accelerating the vision of the Company.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Commissioners, we express our gratitude for the support and trust given to us. We also express our appreciation to the the Board of Directors and all level of management and our employees. We thank to their dedication and hard work, so the Company can achieve an outstanding performance in 2018.

Jakarta, 30 Mei 2019
Jakarta, May 30, 2019

Atas Nama Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
On Behalf of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero)

Bambang Prihartono
Komisaris Utama
President Commissioner



Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Profile



Bambang Prihartono
Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Medan, Tahun 1960
Medan, on 1960

Usia | Age
58 tahun per 31 Desember 2018
58 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan SK Menteri BUMN No SK-48/MBU/02/2018
Appointed as President Commissioners based on SOE's Decision Letter No. SK-48/MBU/02/2018

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1996	Pascasarjana Teknik Sipil Carnegie Mellon University Master Degree of Civil Engineering Carnegie Mellon University	1987	Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung Bachelor Degree of Civil Engineering Bandung Technology Institute
------	---	------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2018 - Sekarang (Present)	Komisaris Utama PT PELNI (Persero) President Commissioner of PT PELNI (Persero)	2017 - Sekarang (Present)	Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan Specialized Staff for Technology, Environment, and Transportation Energy
2017 - Sekarang (Present)	Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Head of Transportation Management of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi	2016 - 2017	Fungsional perencana madya, ke deputian bidang sarana dan prasarana Bappenas Middle functional planner, deputy for facilities and infrastructure in Bappenas

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
Head of Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ)

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners Profile



Satya Bhakti Parikesit
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Cimahi, Tahun 1972
Cimahi, on 1972

Usia | Age
46 tahun per 31 Desember 2018
46 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 17 November 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-232/MBU/11/2015.
Appointed as Commissioners since November 17, 2015 based on SOE's Decision Letter No. SK-232/MBU/11/2015.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2000	Ph.D of International Law University of Nottingham, Inggris Ph.D of International Law University of Nottingham, England	1999	Magister Hukum Universitas Padjajaran Master Degree of Law Universitas Padjajaran
1995	Sarjana Hukum Universitas Indonesia Bachelor Degree of Law Universitas Indonesia		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2015 - Sekarang (Present)	Komisaris PT PELNI (Persero) Commissioner of PT PELNI (Persero)	2015	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Expert Staff in Legal and International Relation
2011	Deputi Kemaritiman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Deputy of Maritime in Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Deputy of Economic in Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia

Ketua Komite Kebijakan Risiko
Head of Risk Policy Committee

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Profile



Raldi Hendro Koestoer

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Jakarta, Tahun 1958
Jakarta, on 1958

Usia | Age
60 tahun per 31 Desember 2018
60 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 08 Januari 2014 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-01/MBU/2014.
Appointed as Commissioners since January 08, 2014 based on SOE's Decision Letter No. SK-01/MBU/2014.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1992	Philosophy of Doctor Environmental Planning Griffith University, Australia Philosophy of Doctor Environmental Planning Griffith University, Australia	1986	Master of Science dalam Bidang Regional Science, University of Queensland, Australia Master Degree of Science in Regional Science from University of Queensland, Australia
1982	Sarjana Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Alam Universitas Indonesia Bachelor Degree of Science Faculty of Math and Natural Science Universitas Indonesia		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2014- Sekarang (Present)	Komisaris PT PELNI (Persero) Commissioner of PT PELNI (Persero)	2006-2013	Staf Ahli Menko Perekonomian Republik Indonesia bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup Expert Staff for The Republic of Indonesia Coordinative Minister of Economics in Technology and Environment sector
--------------------------------	--	-----------	---

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Senior Principal Policy Analyst Kementerian Koordinator Perekonomian
Senior Principal Policy Analyst of the Minister of Economic Coordinator

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Profil Dewan Komisaris



Sudarto
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Madiun, Tahun 1969
Madiun, on 1969

Usia | Age
49 tahun per 31 Desember 2018
49 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-218/MBU/2014.
Appointed as Commissioners since October 17, 2014 based on SOE's Decision Letter No. SK-218/MBU/2014

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2018	Doctor of Philosophy University of New South Wales, Australia Doctor of Philosophy University of New South Wales, Australia	2001	Master of Business Administration International University of Japan Master of Business Administration International University of Japan
1996	Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia Bachelor Degree of Economics Universitas Indonesia		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2012- Sekarang (Present)	Komisaris PT PELNI (Persero) Commissioner of PT PELNI (Persero)	2018	Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan Minister of Finance Expert Staff for Organization, Bureau- cracy and Information Technology, Ministry of Finance
2013-2015	Direktur Transformasi Perbendaharaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Director of Treasury Transformation at Treasury General Directorate, Ministry of Finance Republic of Indonesia		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan
Minister of Finance Expert Staff for Organization, Bureaucracy and Information Technology, Ministry of Finance

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Profile



Johanes Widodo Hario Mumpuni

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Yogyakarta, Tahun 1957
Yogyakarta, on 1957

Usia | Age
61 tahun per 31 Desember 2018
61 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 08 Desember 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-264/MBU/12/2017
Appointed as Independent Commissioners since December 08, 2017 based on SOE's Decision Letter No. SK-264/MBU/12/2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1993	Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary's University of Halifax, Nova Scotia, Canada Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary's University of Halifax, Nova Scotia, Canada	1983	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Bachelor Degree of Economy, Economic Faculty, Accounting Major, Gajah Mada University, Yogyakarta
------	--	------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2014 - Sekarang (Present)	Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat. Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) Expert Staff of Central Government Finance Field.	1984 - Sekarang (Present)	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.
2007 - 2009	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.	2009 - 2014	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III. Main Auditor (Tortama) State Finance III.
2005 - 2007	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Ketua Komite Audit
Head of Audit Committee

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners Profile



Danang Parikesit
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Yogyakarta, Tahun 1965
Yogyakarta, on 1965

Usia | Age
53 tahun per 31 Desember 2018
53 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan SK No KEP-04DK/VIII-2018
Appointed as Independent Commissioners based on Decision Letter No KEP-04DK/VIII-2018

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1996	Doktor Teknologi dari Vienna University of Technology Doctor Technology from Vienna University of Technology	1990	Master Sains dari Insitute of Transport Studies, Leeds University Master of Science from Institute of Transport Studies, Leeds University
1988	Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Bachelor Degree of Civil Engineering from Gadjah Mada University		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2018 - Sekarang (Present)	Komisaris Independen PT PELNI (Persero) Independent Commissioner of PT PELNI (Persero)	2014 - 2017	Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2010 - 2014	Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Special Staff of The Minister of Public Works	2009	Ketua LPPM UGM Chairman of LPPM Gajah Mada University
2006	Guru Besar Fakultas Teknik UGM Professor of Faculty of Engineering Gajah Mada University		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Ketua Komite Teknis Transportasi Dewan Riset Nasional
Chairman of the Transportation Technical Committee of the National Research Council

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Laporan Direksi

Report from the Board of Directors



01 Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director

04 Muhamad Tukul Harsono
Direktur Armada
Director of Fleet

02 Tri Andayani
Direktur Keuangan
Director of Finance

05 Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Business Transportation

03 Ganefi
Direktur SDM & Umum
Director of Human Capital & General Affairs

06 Harry Boediarto Soewarto
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut
Director of Freight & Tol Laut



Laporan Direksi Report from the Board of Directors

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Tahun 2018 memberikan tantangan dan peluang yang cukup signifikan pada pertumbuhan PT PELNI (Persero). Namun, kami bersyukur karena Perseroan mampu melalui tahun 2018 dengan pencapaian-pencapaian yang membanggakan. Suatu kehormatan bagi saya atas nama Direksi untuk menyajikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Setelah dua tahun mengalami ekspansi yang solid, kondisi perekonomian dunia pada awal 2018 masih melaju cukup baik namun kehilangan lajunya memasuki kuartal ke-dua sampai tutup tahun, bahkan tren perlambatan ini diprediksi akan masih berlangsung di tahun 2019. Bank dunia memprediksi perekonomian global masih akan berada di angka 3,7%.

Memasuki kuartal akhir 2018, IMF memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya dari yang mereka prediksi di awal tahun sebesar 3,9% menjadi 3,7%, hal ini dilakukan menyusul kenaikan tarif perdagangan antara Cina dan AS yang masih belum jelas akan berapa lama konflik tersebut berlangsung. IMF juga menyoroti melemahnya sentimen di pasar keuangan global dan kontraksi di Turki yang sekarang diproyeksikan lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 5,17%, kenaikan ini menunjukkan tren yang membaik jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar 5,07% dan tahun 2016 sebesar 5,03%. Ditengah tantangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 ini merupakan pencapaian yang cukup baik. Kinerja ini dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang membaik dan ekspor barang dan jasa yang terjaga, meskipun impor barang dan jasa masih tinggi.

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur pertumbuhan perekonomian sebuah negara adalah tingkat pertumbuhan yang merata dan stabil antar wilayah. Ketersediaan jasa transportasi di seluruh wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan karena fungsi strategis transportasi ikut menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan. Indonesia sebagai

Dear our valued Shareholders and Stakeholders,

The year of 2018 presents significant challenges and opportunities for the growth of PT PELNI (Persero). However, we are grateful that the Company was able to pass through 2018 with an outstanding achievements. It is an honor for me on behalf of the Board of Directors to present the Company's Annual Report for fiscal year 2018.

GLOBAL AND INDONESIA ECONOMIC DEVELOPMENT

After two years experiencing solid expansion, the world's economic conditions in early 2018 was still well advanced but lost their rates into the second quarter until the close of the year, even the weakening trend is predicted to continuing in 2019. The world bank predicts that the global economy will be at 3.7%.

Entering the final quarter of 2018, the IMF duducts its global growth forecast from they predicted at the beginning of the year by 3.9% to 3.7%, this is because of increasing trade tariff between China and the US which is still unclear on how long the conflict took place. The IMF also highlighted to weakening sentiment on global financial markets and contractions in Turkey which are now deeply projected than previous consideration.

Based on data from the Central Bureau of Statistics, Indonesia's economy in 2018 was able to grow by 5.17%, this increase showed an improving trend when compared to 2017 which was 5.07% and 5.03% in 2016. Amidst the challenges of the global economy, Indonesia's economic growth in 2018 is an outstanding achievement. This performance is influenced by improving public consumption and maintaining exports of goods and services, eventhough imports of goods and services are still high.

The One of indicator that becomes a benchmark for a country's economic growth is the level of equal and stable growth between regions. The availability of transportation services in all regions is absolutely necessary because the strategic function of transportation contributes to creating stability and sustainability of community activities and the government. Indonesia as a maritime country has a



Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

negara maritim memiliki potensi industri maritim yang besar jika dilihat dari luas laut Indonesia yakni 5,8 juta km² dengan jumlah pulau sebesar 17.508 pulau. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti pengadaan transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, serta pengembangan tol laut guna penyerataan harga komoditas.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2018, Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk distribusi barang dan mobilitas manusia serta menunjang dan mengembangkan Tol Laut dengan target pembangunan pelabuhan laut dan pembangunan kapal perintis.

Untuk mendukung penyelenggaraan program tol laut tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan 58 (lima puluh delapan) pelabuhan singgah dan 3 (tiga) pelabuhan pangkal/muat. Serta melihat hasil evaluasi penyelenggaraan program tol laut di tahun 2017, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penambahan trayek tol laut menjadi 15 trayek dan pelabuhan singgah di tahun 2018 dengan mengoptimalkan rute trayeknya menggunakan skema pengumpul dan pengumpan (*hub and spoke*). Hal ini diharapkan mampu meningkatkan potensi maritim Indonesia.

ANALISIS KINERJA TAHUN 2018

PT PELNI (Persero) merupakan pihak yang ditunjuk sebagai badan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation* - PSO) angkutan barang di laut. Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2015.

Tujuan Perpres tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat. Selain itu kebijakan tersebut juga difungsikan untuk kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dalam mendukung pelaksanaan Tol Laut.

Terhitung sejak tahun 2016 hingga 2018 armada PT PELNI (Persero) mengalami pertumbuhan, dari 80 unit di tahun 2016 menjadi 83 unit di tahun 2018. Terdiri kapal penumpang 26 unit, 47 unit kapal perintis, 2 unit kapal ternak, 7 unit kapal tol laut, dan 1 unit kapal barang/komersil. Penugasan operasional kapal perintis ke daerah terpencil, tertinggal,

potential large maritime industry when considering from the width of the Indonesian sea, which is 5.8 million km² with a total island of 17,508 islands. With its potential, Indonesia must be supported by a reliable transportation system such as the procurement of sea transportation, the construction and maintenance of goods port ships, and the development of Tol Laut to equalizing commodity prices.

In order to encourage economic growth in 2018, the Government through the General Directorate of Sea Transportation of Ministry of Transportation continues to increase goods distribution and human mobility services, to support and to develop Tol Laut with the aims of developing ports and building Perintis Ship.

To support the implementation of Tol Laut program in 2018, the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation prepares 58 (fifty eight) transit ports and 3 (three) main / loading ports. As well as viewing the results of evaluating the implementation of Tol Laut program in 2017, the Directorate General of Sea Transportation has added Tol Laut routes to 15 routes and ports in 2018 by optimizing its route using the hub and spoke scheme. This is expected to increase Indonesia's maritime potential.

ANALYSIS ON THE WORKING PERFORMANCE OF 2018

PT PELNI (Persero) is appointed as the organizer of Public Service Obligation of sea cargo transportation. This assignment was stated in the Presidential regulation No.106 of 2015, concerning the implementation of Public Service Obligation of sea cargo transportation that signed by Mr. Joko Widodo as a President of Republic of Indonesia on October 01, 2015.

The purpose of The Presidential Decree is to guarantee the availability of goods and reduce price disparities for the community. In addition, the policy is also used to continue the service of carrying out goods transportation to underdeveloped, province, outermost and border areas in supporting the implementation of Tol Laut program.

Since 2016 until 2018, PT PELNI (Persero)'s fleets has been increasing from 80 units in 2016 to 83 units in 2018. Consist of 26 passenger ships, 47 perintis ships, 2 cattle ships, 7 Tol Laut ships and 1 freight/commercial ship. The assignment of Perintis Ship operations to province, underdeveloped, frontier and border areas (T3P) makes PT PELNI (Persero)



Laporan Direksi Report from the Board of Directors

terdepan dan perbatasan (T3P) menjadikan PT PELNI (Persero) dapat melayani masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Hal ini merupakan bentuk nyata komitmen PT PELNI (Persero) terhadap tugas yang diberikan oleh pemerintah.

Seiring dengan penugasan tersebut, PT PELNI (Persero) menunjukkan kinerja positif pada tahun 2018. Volume pengguna kapal Pelni secara keseluruhan di tahun 2018 mencapai 3,62 juta orang, atau naik 2,70% jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana jumlah pelanggan Pelni yakni sebanyak 3,52 juta orang. Sementara angkutan barang tercapai 100.633 ton m3, jumlah ini meningkat sebesar 34,72%. Angkutan kontainer 15.440 teus atau naik 4,45%, dan kendaraan sebanyak 8.511 unit yang mengalami kenaikan sebesar 23,08%.

Pencapaian kinerja PT PELNI (Persero) yang cukup membanggakan ini tidak lepas dari kinerja Direksi dan segenap Manajemen yang telah mengimplementasikan strategi transformasi baik dalam aspek bisnis maupun operasional guna meningkatkan kinerja Perseroan. Selain implementasi kebijakan yang bersifat transformasional, Manajemen juga terus melakukan efisiensi di segala bidang guna mendukung kebutuhan pengembangan bisnis dan usaha Perseroan.

Hasil dari penerapan strategi yang dijalankan sepanjang tahun 2018 terbukti dari naiknya jumlah volume pengguna kapal, selain itu tercermin dari meningkatnya kinerja keuangan Perseroan, hal ini terbukti dengan kemampuan Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 4,38% atau meningkat sebesar Rp193,54 miliar menjadi Rp4,61 triliun. Dan mencatatkan laba tahun berjalan Rp204,17 miliar pada tahun 2018.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGI

Direksi menyadari bahwa untuk mencapai kinerja operasional dan keuangan yang baik, diperlukan perencanaan strategis dan upaya-upaya untuk memastikan keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan. Sejak 2015 *Roadmap* Transformasi PT PELNI (Persero) telah dimulai sebagai formulasi bisnis yang dijadikan pedoman bagi Perusahaan. Pada tahun 2018, Perseroan memasuki fase Pertumbuhan (*Growth*), fase ini merupakan kelanjutan dari fase Konsolidasi dan Pertumbuhan (*Consolidation and Growth*) di tahun 2017, dimana pada tahun 2018 Perusahaan diharapkan mampu mengukuhkan posisinya untuk dapat terus bertumbuh. Sepanjang tahun 2018 upaya strategis yang telah dilakukan oleh PT PELNI (Persero) dalam mendukung pencapaian kinerja adalah:

able to serve the community to all corners of the Nation. This is a real form of PT PELNI (Persero)'s commitment to the tasks that given by the government.

In line with this assignment, PT PELNI (Persero) showed an outstanding performance in 2018. The whole number of Pelni's customers in 2018 reached at 3,62 million. or an increase of 2,70% compared to 2017 of 3,52 million. Moreover, freight transportation was at 100.633 ton m3, this number experienced an increase of 34,72%. Container transportation was at 15.440 units or increasing to 4,45%, and vehicle was amounting to 8.511 units had an increase of 23,08%

This outstanding achievement of PT PELNI (Persero) is due to from the performance of the Board of Directors and all Management who have implemented transformation strategies in both business and operational aspects to improve the Company's performance. In addition to the implementation of transformational policies, Management also continues to make efficiency in all aspects to support the operational and business development needs of the Company.

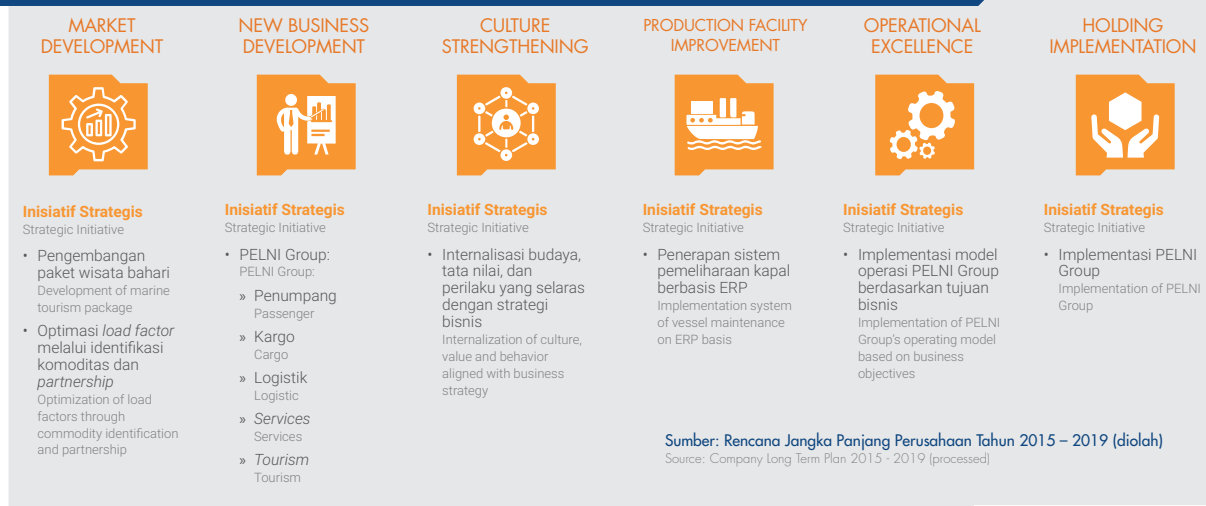
The results of the strategies implementation that conducted throughout 2018 are from the increase in the volume of ship users, in the other side it is reflected in the increase of the Company's financial performance, as stated in the Company's ability recorded the growth of net revenues amounting to 4,38% or increasing by Rp193,54 billion to Rp4,621 trillion. and booked the current year's profit amounted to Rp204,17 billion in 2018.

STRATEGY AND POLICY STRATEGY

The Board of Directors realizes that to achieve good operational and financial performance, strategic planning and efforts are to ensure the success of achieving the targets. Since 2015, the PT PELNI (Persero) Transformation Roadmap has begun as a business formulation that becoming a guideline for the Company. The Company entered the Growth phase during 2018, this phase is a further Consolidation and Growth phase applied in 2017, where the Company is expected to be able to strengthen its position for growth. Throughout 2018, the strategic efforts that have been made by PT PELNI (Persero) in supporting performance achievement are as follows:

Laporan Direksi Report from the Board of Directors

GROWTH – 2018, 2019



Market Development

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Perusahaan dalam fase Pertumbuhan ini adalah *Market Development* dimana inisiatif strategis yang dikembangkan adalah pengembangan paket wisata bahari dimana sepanjang 2018 PT PELNI (Persero) melakukan penambahan destinasi paket wisata bahari yakni Karimun Jawa, Bandaneira, Raja Ampat, Pulau Komodo, dan Wakatobi. Destinasi ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk menjadikan wisata bahari sebagai pilihan yang dapat diperhitungkan. Inisiatif strategis lainnya adalah optimalisasi *load factor* (*return cargo* dan *reefer cargo*) melalui identifikasi komoditas dan *partnership*.

New Business Development

PT PELNI (Persero) berinisiatif menetapkan kebijakan strategis *New Business Development* dalam semua lini pelayanan, baik dalam pelayanan kapal penumpang, kargo, logistik, *services*, dan *tourism*. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan Perusahaan secara optimal.

Market Development

One of the strategies applied by the Company in this Growth phase is Market Development where the developing strategic initiative is the marine tourism packages which PT PELNI (Persero) has added destinations to marine tourism packages throughout 2018 namely Karimun Jawa, Bandaneira, Raja Ampat, Komodo and Wakatobi islands. This destination is expected to be able to attract people to make maritime tourism as a viable option. Other strategic initiatives are load factor optimization (return cargo and reefer cargo) through the identification of commodities and partnerships.

New Business Development

PT PELNI (Persero) took the initiative to determine a new business development of strategic policy in all services lines of passenger, cargo, logistic and tourism ship services. This is expected to boost the growth of the Company's revenue optimally.



Laporan Direksi Report from the Board of Directors

Culture Strengthening

Dalam strategi bisnis *Culture Strengthening* inisiatif strategis yang berusaha diwujudkan oleh perusahaan ialah dengan melakukan internalisasi budaya, tata nilai, dan perilaku yang selaras dengan strategi bisnis yang ditetapkan perusahaan.

Production Facility Improvement

Untuk mendukung peningkatan produktivitas armada kapal yang dimiliki, diperlukan adanya sistem pemeliharaan yang terorganisir, karena alasan itulah Perseroan menetapkan *Production Facility Improvement* sebagai salah satu strategi bisnis yang wajib diterapkan. Untuk mendukung strategi bisnis ini perusahaan memberlakukan sistem pemeliharaan kapal berbasis ERP (*Enterprise Resource Planning*).

Operational Excellence

Untuk dapat mewujudkan *Operational Excellence*, PT PELNI (Persero) melakukan implementasi model operasi PELNI Group berdasarkan tujuan bisnis masing-masing anak perusahaan.

Holding Implementation

Manajemen merasa bahwa melakukan implementasi PELNI Group diharapkan mampu menunjang Perusahaan dalam fase pertumbuhan di tahun 2018 ini.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Perseroan menetapkan target pencapaian kinerja setiap tahunnya dengan tetap melakukan evaluasi dalam setiap pencapaiannya. Secara keseluruhan, kinerja Perseroan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat membanggakan. Hasil ini diperoleh melalui implementasi strategi Perseroan yang dijalankan sepanjang tahun 2018. Perbandingan hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perseroan untuk tahun buku 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Culture Strengthening

In Culture Strengthening business Strategy of strategic initiatives tries to realize by internalizing culture, values, and behavior which are along with the business strategy that set by the company.

Production Facility Improvement

To support the increase in the productivity of the fleet, an organized maintenance system is needed. For this reason, the Company has established an Production Facility Improvement as one of the business strategies that must be applied. To support this business strategy, the Company applies an ERP (Enterprise Resource Planning) ship maintenance system.

Operational Excellence

To be able to create Operational Excellence, PT PELNI (Persero) implements PELNI Group operating model based on the business objectives of each subsidiary.

Holding Implementation

Management realizes that implementing the PELNI Group is expected to be able to support the Company this phase of growth in 2018.

THE COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

The Company sets a target for achieving performance every year by evaluating each of its achievements. Overall, the Company performance in 2018 experienced a very encouraging increase. This result is obtained through the implementation of the Company's strategies that has carried out throughout 2018. Comparison of results achieved by the Company for fiscal year 2018 can be seen in the following table:



Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Uraian Description	RKAP 2018 2018 CBP	Realisasi 2018 2018 Realization	%
Operasional Operational			
Kapal Milik owned ship			
Kapal Penumpang Passenger Ship	26	26	100%
Kapal Perintis Perintis Ship	47	47	100%
Kapal Ternak Cattle Ship	3	2	67%
Kapal Tol Laut Tol Laut Ship	9	7	78%
Kapal Barang/Komersil Cargo/Commercial Ship	0	1	∞
Kapal Wisata Cruise ship	1	0	0%
Kapal Tanker Tanker ship	1	0	0%
Jumlah Kapal Beroperasi Number of Ships Operated	87	83	95%
Produksi Production			
Angkutan Penumpang Passenger Transportation	3.614.988 Penumpang Passenger	3.616.904 Penumpang Passenger	101,15%
Angkutan Barang Goods Transportation	140.627 Ton/M3	100.663 Ton/M3	69,07%
Container Container	23.083 Teus	15.440 Teus	66,89%
Kendaraan Vehicle	6.028 Unit	8.511 Unit	141,19%
Ternak Animal	36.000 Ekor Animals	15.448 Ekor Animals	42,91%
Keuangan Finance			
Laba Konsolidasi Consolidated Profit	Rp0 juta million	Rp203.631 juta million	N/A
Kondisi Kesehatan Health Condition	Sehat A healthy A	Sehat AA healthy AA	-
Commission Day* Commission Day	28.284 Hari days	20.472 Hari days	72,38%
Gross Profit Gross Profit	5.624.137 juta million	4.601.783 juta	81,82%
Net Profit Net Profit	414.374 juta million	83.581 juta	20,17%

* Commission Day : Jumlah hari layar
Commission Day : Total Sailing day

Secara operasional, semua target yang dicanangkan Perseroan terealisasi 93% yaitu berhasil mengoperasikan sebanyak 83 kapal di tahun 2018 dari target sebanyak 87 kapal.

Dari segi permintaan pelanggan di tahun 2018, angkutan penumpang dan angkutan barang masing-masing terealisasi sebesar 101% dan 69%, yaitu sebanyak 6,61 juta orang dan 100,66 ribu ton/m3. Untuk kontainer dan kendaraan teralisasi 66,89% dan 141,19%, yaitu sebesar 23,08 ribu teus dan 15,44 ribu unit kendaraan. Sedangkan untuk ternak terealisasi sebesar 42,91% yaitu sebanyak 15,45 ribu ekor ternak.

All of the operational targets that announced by the Company were realized 93%, i.e successfully operating 83 ships in 2018 compared to the target of 87 ships.

In terms of customer demand in 2018, passenger and cargo transportation each realizable by 101% and 69%, contained of 6,61 million people and 100,66 ton/m3. For containers and vehicles, realized to 66,89% and 141,19%, which was 23,08 thousand units and 15,44 thousand vehicles. While the cattle ship realized to 15,45 thousand cattle ships.



Laporan Direksi Report from the Board of Directors

Untuk tahun 2018, Perseroan berhasil mencatatkan laba konsolidasi sebesar Rp203,61 miliar dari target tanpa laba di awal tahun 2018. Dari kondisi kesehatan, Perseroan berhasil mendapat predikat 'Sehat A', sesuai dengan target yang dituangkan dalam RKAP. *Gross profit margin* dan *net profit margin* Perseroan, masing-masing berada pada level 81,82% dan 20,17% dari target RKAP.

KENDALA (TANTANGAN) YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA

Sepanjang tahun 2018, keberhasilan Perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kendala (tantangan) dan berbagai solusi yang telah diambil. Adapun kendala dan tantangan yang masih menjadi isu besar bagi perusahaan adalah transportasi udara yang masih menjadi *lifestyle business* bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Untuk dapat mengimbangi tantangan tersebut Perusahaan berusaha meningkatkan kualitas armada kapal serta pelayanan didalam kapal, menambah pilihan paket destinasi wisata, serta memberlakukan pelayanan berbasis *online*.

Digitalisasi menjadi salah satu hal penting yang terus dikembangkan oleh perusahaan untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Perusahaan terus berinovasi untuk dapat memberikan pelayanan dari hulu ke hilir secara *digital*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi laut serta meningkatkan efisiensi bagi perusahaan.

PROSPEK USAHA 2019

Meskipun kondisi global tetap menantang, para pelaku pasar memprediksi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2019 akan membaik. Berbagai tekanan yang mewarnai tahun 2018 pun mulai berkurang. Situasi ekonomi dan geopolitik global diprediksi akan lebih mendukung kembalinya arus modal asing masuk ke Indonesia. Kondisi ini pun akan memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

Untuk dapat mengoptimalkan peluang tersebut salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah ialah menetapkan capaian pembangunan pada sektor perhubungan laut, bahkan hal ini menjadi target rencana strategis yang menjadi prioritas nasional. Hal ini seiring fase transformasi PT PELNI (Persero) 2018 – 2019 yakni fase *Growth*.

In 2018, the Company has succeeded to book consolidated revenues amounting to Rp203,61 billion compared to the target at the beginning of 2018 which is no revenues. From the Company's healthy, successfully earned "Sehat A", was in accordance with the Company's budget plan target. Gross Profit and net profit margin of the Company were respectively at the level of 81,82% and 20,17% from the Company's budget plan.

THE CHALLENGES FACED BY THE COMPANY AND ITS MANAGEMENT

Throughout 2018, the Company's succeeded in achieving its predetermined targets that was because of the obstacles (challenges) and various solutions which had been taken. Those obstacles and challenges have been becoming a big issue for companies is air transportation, which is still a lifestyle business for most Indonesian people.

To be able to compensate for this challenge, the Company strives to increasing the quality of the fleet and service on board, developing the choices of tourist destination package, and enforcing online-based services.

Digitalization is one of the important things that continues to develop by the Company to be able to face the exist challenges. The company strives to innovate to be able to provide services from upstream to downstream digitally. This is expected to increase its comfort for users of sea transportation services and improve efficiency for the company.

BUSINESS PROSPECT 2019

Although global condition remains challenging, marketers predict that Indonesia's economic conditions in 2019 will improve. The various pressures characterizing 2018 have begun diminishing. The global economic and geopolitical situations are predicted to support the return of foreign capital into Indonesia. These conditions will also affect the economic condition in Indonesia.

To be able to optimize these opportunities, one of the steps taken by the government is to determine the achievement of developing the sea transportation sector, and even this is the target of strategic plans that become national priorities. This is in line with the transformation phase of PT PELNI (Persero) 2018 - 2019, namely the Growth phase.



Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Sebagai pihak yang ditunjuk sebagai badan penyelenggara Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation* - PSO) angkutan barang di laut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, PT PELNI (Persero) terus berupaya untuk dapat memenuhi penugasan tersebut secara optimal. Sesuai dengan RJPP Transformasi PT PELNI (Persero) dimana tahun 2018 – 2019 merupakan tahun Pertumbuhan maka PT PELNI (Persero) masih akan melanjutkan inisiatif strategis yang sudah dijalankan di tahun 2018 dan berupaya melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Strategi yang dimaksud ialah :

Market Development

- Pengembangan paket wisata bahari;
- Optimasi *load factor* melalui identifikasi komoditas dan partnership.

New Business Development

- Penumpang;
- Kargo;
- Logistik;
- Services;
- Tourism.

Culture Strengthening

- Internalisasi budaya, tata nilai dan perilaku yang selaras dengan strategi bisnis.

Production Facility Improvement

- Penerapan sistem pemeliharaan kapal berbasis ERP.

Operational Excellence

- Implementasi model operasi PELNI Group berdasarkan tujuan bisnis.

Holding Implementation

- Implementasi PELNI Group.

Dengan demikian, PT PELNI (Persero) optimis menghadapi tahun 2019 dengan melihat prospek usaha di masa yang akan datang dan dapat mencapai target yang ditentukan di awal tahun 2019, yaitu mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha Perseroan sebesar 4,38% dari Rp4,42 triliun di tahun 2017 menjadi Rp4,62 triliun di tahun 2018.

As the party that appointed as the organizer of the Public Service Obligation (PSO) of sea freight transportation which is stated in Presidential Regulation No.106 of 2015, concerning the Implementation of Public Service Obligations for freight Transportation, PT PELNI (Persero) strives to fulfill the assignment optimally. In accordance with the RJPP of PT PELNI (Persero) Transformation where 2018 - 2019 is a growth year, PT PELNI (Persero) will continue its strategic initiatives that have been implemented in 2018 and strived to making improvements in their implementation. Those strategies are as follows:

Market Development

- Marine tourism packages development;
- Load factors optimization through identification of commodities and partnerships.

New Business Development

- Passenger;
- Cargo;
- Logistic;
- Services;
- Tourism.

Culture Strengthening

- Internalization of culture, values and behavior that are in line with business strategy.

Production Facility Improvement

- Implementation of ERP-based ship maintenance systems.

Operational Excellence

- The implementation of the PELNI Group operating model based on business objectives.

Holding Implementation

- PELNI Group implementation.

Thus, PT PELNI (Persero) is optimistic in facing 2019 by looking at business prospects in the future and can achieve the targets at the beginning of 2019, namely recording the growth of the Company's Business revenues of 4,38 compared to Rp4,42 trillion in 2017 to Rp4,62 trillion in 2018.



Laporan Direksi Report from the Board of Directors

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

PT PELNI (Persero) meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) memiliki relevansi dengan kinerja perusahaan. Karena bukti nyata keberhasilan implementasi GCG adalah meningkatnya kinerja serta citra perusahaan. Penerapan GCG di PT PELNI (Persero) dilakukan pada semua level organisasi dengan mengacu pada aturan dan ketentuan terkait penerapan GCG untuk perusahaan.

Komitmen Perusahaan terhadap GCG direalisasikan melalui pembentukan organ-organ Perseroan sesuai dengan kaidah dan landasan GCG di Indonesia baik Organ Utama seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi maupun Organ Pendukung seperti Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan *Whistleblowing System* (WBS).

Pada tahun 2018, Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG dalam lingkungan Perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari penilaian tersebut menunjukkan pencapaian skor 81,55 dan predikat BAIK. Hasil ini meningkat dari hasil yang dicapai tahun 2017.

Selain melalui GCG *Assessment*, Perseroan juga telah melaksanakan evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan mengadopsi "Malcolm Baldrige *Criteria for Performance Excellence*" dan merujuk pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Pada Badan Usaha Milik Negara. Untuk tahun 2018, PT PELNI (Persero) memperoleh skor 498,25.

Segecap Manajemen dan Insan PELNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perseroan dan mencapai skor evaluasi penerapan GCG yang semakin baik di masa yang akan datang.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) di PT PELNI (Persero) merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan

THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

PT PELNI (Persero) believes that the application of good corporate governance (GCG) has relevance to the company's performance. Because the real evidence of the success of GCG implementation is the increasing performance and corporate image. The implementation of Good Corporate Governance at PT PELNI (Persero) is carried out at all levels of the organization by referring to the rules and regulations related to the implementation of GCG for companies.

The Company's Commitment to GCG is realized through the formation of the Company's organs in accordance with the principles and foundation of GCG in Indonesia, both Main Organs such as the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Directors or Supporting Organ such as committees, Corporate Secretary, Internal Audit and Whistle Blowing System (WBS).

In 2018, the Company has evaluated the implementation of GCG within the Company in collaboration with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The results of the assessment indicated the achievement of 81.55 scores and GOOD predicates. These results was increasing from the results when achieved in 2017.

In addition to through GCG *Assessment*, the Company has also carried out an evaluation of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) by adopting the "Malcolm Baldrige *Criteria for Performance Excellence*" and referring to the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. S-08/S.MBU/2013 concerning Submission of *Key Performance Indicators* (KPI) Guidelines and Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) in State-Owned Enterprises. For 2018, PT PELNI (Persero) earned 498.25.

All of Management and PELNI Personnel are committed to continuously improving the quality of Good Corporate Governance in the Company and achieving better evaluation scores on GCG implementation in the future.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The policy of implementing Corporate Social Responsibility (CSR) at PT PELNI (Persero) refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2016 dated July 3, 2016 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program and have the latest changes in accordance with Minister of State Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/07/2017 July 5, 2017 concerning the



Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), PT PELNI (Persero) percaya bahwa implementasi CSR dalam jangka panjang akan memberikan banyak manfaat bagi Perusahaan, terutama pada aspek peningkatan kepercayaan, menciptakan harmoni dan meningkatkan reputasi yang pada akhirnya memiliki implikasi untuk menciptakan nilai tambah yang mendorong stabilitas dan pertumbuhan bisnis yang lancar.

Kegiatan-kegiatan Pengembangan Masyarakat dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan terus dilakukan PT PELNI (Persero) secara berkesinambungan. Program-program ini difokuskan pada bidang pendidikan, sarana dan prasarana umum, bantuan bencana alam, serta upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pada tahun 2018, PT PELNI (Persero) membelanjakan Rp1,5 miliar untuk program Bina Lingkungan, penyaluran dana untuk program kemitraan mencapai Rp2,93 Miliar.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup

PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya. Komitmen Perusahaan untuk tetap menjaga dan mempertahankan sekaligus pelestarian lingkungan merujuk pada dokumen Kedinasan di lingkungan PT PELNI (Persero) No. 01/HK.02.01/Dir.SDM dan Umum/VII/2013. Selain itu PT PELNI (Persero) juga memiliki Surat Edaran No. 07/SE/Dir.SDM dan UM/VI.2013.

Program tanggung jawab terhadap lingkungan PT PELNI (Persero) bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai bagian dari program efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut, PT PELNI (Persero) menyadari bahwa ekosistem laut juga menjadi faktor keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pada tahun 2018, PT PELNI (Persero) kembali memberikan kontribusi dalam melestarikan lingkungan laut. PT PELNI (Persero) melakukan kerjasama dengan Yayasan Terumbu Rupa untuk memberikan bantuan pelestarian lingkungan dengan dilakukannya Revitalisasi Terumbu Karang di Pulau Sepa, Kep Seribu, DKI Jakarta.

Second Amendment to SOE Ministry Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership Program and Community Development Program.

Through Corporate Social Responsibility activities, PT PELNI (Persero) believes that the implementation of Corporate Social Responsibility in the long term will provide many benefits for the Company, especially in the aspect of increasing trust, creating harmony and enhancing reputation which ultimately has implications for creating added value that driving stability and smooth business growth.

Community Development activities and the Partnership and Community Development program continue to be carried out by PT PELNI (Persero) on a sustainable basis. These programs are focused on the fields of education, public facilities and infrastructure, natural disaster assistance, and efforts to conserve nature and the environment. In 2018, PT PELNI (Persero) spend Rp1.5 billion for the Community Development program, while distribution of funds for the Partnership program reached Rp2.93 billion.

Corporate Social Responsibility on Environment

PT PELNI (Persero) is committed to carrying out corporate social responsibility on the environment in order to reduce the environmental impact of the Company and human activities in general. The Company's commitment is to conserve and maintain environmental preservation at the same time referring to the official documents within PT PELNI (Persero) No. 01/HK.02.01/Dir.SDM dan Umum/VII/2013. In addition, PT PELNI (Persero) also has Circular Letter No. 07/SE/Dir.SDM and UM/VI.2013.

PT PELNI (Persero) responsibility program on the environment aims to create an environmentally friendly of work environment to preserve the environment as well as part of a sustainable resource efficiency program.

As a company engaging in sea transportation, PT PELNI (Persero) realizes that marine ecosystems are also a long-term business sustainability factor. In 2018, PT PELNI (Persero) contributed to preserving the marine environment. PT PELNI (Persero) collaborated with the Terumbu Rupa Foundation to provide environmental conservation assistance by carrying out Coral Reef Revitalization in Sepa Island, Seribu Islands, DKI Jakarta.



Laporan Direksi Report from the Board of Directors

Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT PELNI (Persero) bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan setiap karyawannya. PT PELNI (Persero) juga menjamin kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan mulai dari tahap perekrutan, pengembangan karir hingga evaluasi kinerja. PT PELNI (Persero) tidak mengakui adanya diskriminasi berdasarkan *gender* maupun karakter lain seperti agama maupun etnis di mana kebijakan dan keputusan dalam aspek ketenagakerjaan sepenuhnya mempertimbangkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Praktik kesetaraan gender di PT PELNI (Persero) juga tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 09.30/5/SK/HKO.01/2015 tentang Pola Pengembangan Karir Jabatan Pegawai PT PELNI (Persero).

Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja, program peningkatan kualitas dan profesionalisme, evaluasi kinerja, serta program kesejahteraan dilakukan oleh Perusahaan secara rutin sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Salah satu bentuk tanggung jawab Perusahaan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja adalah melakukan Inspeksi dan Sosialisasi SMK3-LH terhadap Kantor PT PELNI (Persero) Pusat dan cabang.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

PT PELNI (Persero) menyadari keberlangsungan bisnis Perusahaan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pencapaian kinerja Perusahaan, menuntut PT PELNI (Persero) untuk memberikan imbal balik manfaat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sepanjang tahun 2018 Perusahaan telah merealisasikan program kemitraan dan Bina Lingkungan. Untuk program kemitraan, perseroan telah berhasil menyalurkan dana kepada para petambak di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara untuk program Bina Lingkungan, Perseroan telah merealisasikan beberapa kegiatan antara lain pembuatan Kampung Pelni Barokah di Batulicin sebagai tempat pengelolaan sampah menjadi barang bernilai jual. Selain itu Perseroan juga melakukan kegiatan revitalisasi terumbu karang di Pulau Bangka, Sulawesi Utara.

Corporate Social Responsibility on Occupational, Health and Safety

PT PELNI (Persero) is responsible to occupational, health and safety, and the welfare of every employee. PT PELNI (Persero) always guarantees equal equality and job opportunities for all employees from the recruitment phase, career development until performance evaluation. PT PELNI (Persero) does not recognize discrimination based on gender or other characters such as religion or ethnicity where labor policy and decisions fully considering the performance of the employee concerned. The practice of gender equality at PT PELNI (Persero) is also listed in Directors Decree No. 09.30/5/SK/HKO.01/2015 concerning the Pattern of Position Career Development of PT PELNI (Persero) Employees.

Some of various occupational safety and health programs, quality and professionalism improvement programs, performance evaluations, and welfare programs are carried out regularly by the Company as in the previous years. One form of corporate responsibility in terms of occupational health and safety is conducting an inspection and socialization of SMK3-LH towards the Headquarter and branches of PT PELNI (Persero).

Corporate Social Responsibility on Social and Community Development

PT PELNI (Persero) realizes that the Company's business sustainability is because of community participation. Community participation and support for the achievement of the Company's performance requires PT PELNI (Persero) to provide benefits for the community. This can be seen as a form of social responsibility. As a State-Owned Enterprise, the implementation of corporate social responsibility is conducted through the Partnership and Community Development Program (PKBL). Throughout 2018, the Company has realized a community development and partnership program. For the partnership program, the company has successfully channeled funds to farmers in the Central Java and East Java. While for the Community Development program, the Company has conducted several activities, among others, the making of Pelni Barokah Village in Batulicin as a place for recycling waste into selling goods. In addition, the Company also performed coral reef revitalization activities on Bangka Island, North Sulawesi.



Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Perlindungan Pelanggan

PT PELNI (Persero) menempatkan kepuasan pelanggan sebagai hal yang fundamental dalam usaha. Hal ini didasari keyakinan bahwa pelanggan atau pengguna jasa sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berperan menjamin keberlangsungan usaha. Karenanya pelanggan merupakan mitra utama dalam mengembangkan usaha kini dan di masa depan.

PT PELNI (Persero) telah menjalankan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Kepada pelanggan selama tahun 2018 meliputi Bidang *Service Quality Assurance*, Bidang *Food & Beverages*, Bidang *Hospitality*, Bidang Layanan Pelanggan. Selain itu guna mendukung pelayanan kepada pelanggan, PT PELNI (Persero) juga menyediakan layanan *contact center*.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Direksi pada tahun buku 2018. Kami berharap susunan yang ada dapat mewujudkan tugas serta tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

Susunan anggota Direksi PT PELNI (Persero) sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama President Director	Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Keuangan Director of Finance	Tri Andayani
Direktur SDM dan Umum Director of Human Capital & General Affairs	Ganefi
Direktur Armada Director of Fleet	Muhamad Tukul Harsono
Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Business Transportation	Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	Harry Boediarto Soewarto

The Partnership and Community Development Program (PKBL) refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2016 dated July 3, 2016 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program and has the latest changes in accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/07/2017 July 5, 2017 concerning Second Amendment to SOE Minister Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program.

Corporate Social Responsibility On The Costumers Protection

PT PELNI (Persero) believes that customer satisfaction as a fundamental in running its business. This is due to our belief that customers or service users are one of the stakeholders who have a role in ensuring business continuity. Therefore, customers are the main partners in developing businesses nowadays and in the future.

PT PELNI (Persero) has carried out its social responsibility activities on customers during 2018 covering the Field of Service Quality Assurance, Food & Beverages, Hospitality, Customer Service. In addition to supporting services for customers, PT PELNI (Persero) also provides contact center services.

THE CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

On this occasion, we convey that there was no changes in the composition of the Board of Directors in the 2018 financial year. We hope that the existing structure could realize their duties and responsibilities optimally for the Company.

The composition of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) until the end of 2018 are as follows:



Laporan Direksi Report from the Board of Directors

APRESIASI

Demikian, laporan tugas Direksi atas pelaksanaan usaha Perseroan selama tahun 2018. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja keras untuk mencapai tujuan Perseroan. Atas kerja keras dari tim manajemen dan seluruh pegawai, Perseroan mampu meningkatkan kinerjanya di 2018.

Atas arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Arahan Dewan Komisaris sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan, sehingga mampu meningkatkan kinerja Perseroan di 2018. Juga tidak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada pemegang saham, mitra kerja Perseroan dan pelanggan atas kepercayaannya terhadap PT PELNI (Persero). Dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam menjelajah serta tumbuh di tahun-tahun yang penuh tantangan di masa depan.

APPRECIATION

Thus, the Board of Directors report on the implementation of the Company's business during 2018. We give the highest appreciation for the trust and cooperation of all Stakeholders, especially for the management team and all employees who have worked hard to achieve the Company's goals. For their hard work, the Company was able to improve the performance in 2018.

We give the deepest appreciation for the direction given by the Board of Commissioners, because of it greatly contributes to achieve the Company's performance, so we could improve our performance in 2018. And we also do not forget to express our gratitude to the Shareholders, the Company's partner and our customers for their trust given to PT PELNI (Persero). Their support and trust are an essential immune to struggle and to grow in the challenging years for the success of the Company in the future.

Jakarta, 30 Mei 2018
Jakarta, May 30, 2018

Atas Nama Direksi PT PELNI (Persero)
On Behalf of the Board of Directors of PT PELNI (Persero)

Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director



Profil Direksi

The Board of Director's Profile



Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Bandung, Tahun 1965
Bandung, on 1965

Usia | Age
53 tahun per 31 Desember 2018
53 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 26 September 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-210/MBU/09/2017.
Appointed as President Director since September 26, 2017 based on Minister of State-Owned Enterprises decision Letter No. SK-210/MBU/09/2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1988	Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bachelor Degree of International Relation Universitas Padjajaran
------	---

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur Utama PT PELNI (Persero) President Director PT PELNI (Persero)	2016 – 2017	Direktur SDM dan Umum PT PELNI (Persero) Director of HR and General Affairs PT PELNI (Persero)
2015 – 2017	Komisaris PT Pertamina Internasional Eksplorasi & Produksi Commiissioner of PT Pertamina Internasional Eksplorasi & Produksi	2012 - 2016	SVP HR Development PT Pertamina (Persero) SVP HR Development PT Pertamina (Persero)
2011 - 2015	Komisaris Pertamina EP Cepu Commissioner Pertamina EP Cepu	2010 - 2012	VP People Management PT Pertamina (Persero) VP People Management PT Pertamina (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Profil Direksi The Board of Director's Profile



Tri Andayani
Direktur Keuangan
Director of Finance

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Jakarta, Tahun 1973
Jakarta, on 1973

Usia | Age
45 tahun per 31 Desember 2018
45 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 03 April 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN RI No. SK-62/MBU/04/2017.
Appointed as Director of Finance since April 03, 2017 based on SOE's Decision Letter No. SK-62/MBU/04/2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1992	Sarjana Bidang Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta Bachelor Degree in Accounting Perbanas School of Economics, Jakarta	1998	Pasca Sarjana Magister Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Magister of Human Resource Management Gajah Mada University, Yogyakarta
------	--	------	---

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2000 - 2015	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2015 - 2016	Direktur Keuangan & SDM PT LEN Industri (Persero) Director of Finance & Human Resource PT Len Industri (Persero)
2016 - 2017	Direktur Operasi I PT LEN Industri (Persero) Director of Operation I PT Len Industri (Persero)	2017 - Sekarang (Present)	Direktur Keuangan PT PELNI (Persero) Director of Finance PT PELNI (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris PT SBN
Commissioner of PT SBN

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

Profil Direksi

The Board of Director's Profile



Ganefi
Direktur SDM & Umum
Director of Human Capital & General Affairs

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
55 tahun per 31 Desember 2018
55 years old as of December 31, 2018

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Jakarta, Tahun 1963
Jakarta, on 1963

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur SDM & Umum sejak tanggal 26 September 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-210/MBU/09/2017.
Appointed as Director of Human Capital & General since September 26, 2017 based on Minister of State-Owned Enterprises decision Letter No. SK-210/MBU/09/2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1994	Magister Banking & Finance Monash University Master of Banking & Finance Monash University	1989	Sarjana Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Bachlors Degree of Fiscal Administration Indonesia University
------	---	------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur SDM dan Umum PT PELNI (Persero) Director of HR and General Affairs PT PELNI (Persero)	2016 – 2017	Direktur Komersial PTPN VII Director of Commercial PTPN VII
2015 – 2016	Chief Auditor Jakarta BRI Jakarta Chief Auditor BRI	2012 – 2015	Kepala Divisi HC BRI Head of Human Capital Division BRI

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

2018	Integrated Talent Management System (ITMS) a Leader Create Leaders Integrated Talent Management System (ITMS) a Leader Create Leaders	2018	Sharing Session III FHCI "Talent Mobility & People Analytic in Implementation" Sharing Session III FHCI "Talent Mobility & People Analytic in Implementation"
2018	Sharing Session III FHCI "Digital Leadership" Sharing Session III FHCI "Digital Leadership"		

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris Utama PT RS PELNI
President Commissioner of PT RS PELNI

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Profil Direksi The Board of Director's Profile



Muhamad Tukul Harsono
Direktur Armada
Director of Fleet

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Demak, Tahun 1967
Demak, on 1967

Usia | Age
51 tahun per 31 Desember 2018
51 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
Demak, Indonesia
Demak, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Direksi sejak tanggal 01 Desember 2016 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-263/MBU/12-2016 dan sesuai dengan SK No. 62/MBU/04/2017 tentang perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi, diangkat sebagai Direktur Armada.

Appointed as member of the Board of Director since December 01, 2016 based on SOE's Decision Letter No. SK-263/MBU/12-2016 and accordance with Decree No. 62/MBU/04/2017 about the changes of the position nomenclature, assignment and appointment of members of the Board of Directors, appointed as Director of the Fleet.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2017	Magister Manajemen Bisnis Universitas Dr. Soetomo Master of Business Management Dr. Soetomo University	2010	S1 Profesi Kepelautan Universitas Al-Anwar Bachelor Degree of Marine Al-Anwar University
2007	Master Mariner Universitas BP3IP Master of Mariner BP3IP University	2007	Ahli Nautika Tingkat 1 Universitas BP3IP Nautical Expert 1 BP3IP University

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur Armada PT PELNI (Persero) Director of Fleet PT PELNI (Persero)	2016 - 2017	Direktur Operasi dan Pelayanan PT PELNI (Persero) Director of Operations and Services PT PELNI (Persero)
2016	Direktur PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Director of Dock & Vessels at Kodja Bahari	2014 - 2016	Direktur Utama PT PIDC (Anak Perusahaan PT PELNI (Persero)) President Director of PIDC (Subsidiary of PT PELNI (Persero))

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

Profil Direksi

The Board of Director's Profile



Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Business Transportation

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
59 tahun per 31 Desember 2018
59 years old as of December 31, 2018

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Ciamis, Tahun 1959
Ciamis, on 1959

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Usaha Angkutan Penumpang sejak tanggal 03 April 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-62/MBU/04/2017.
Appointed as Director of Passenger Business Transportation since April 03, 2017 based on Minister of State-Owned Enterprises decision letter No. SK-62/MBU/04/2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1984	Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Republik Indonesia Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Republic of Indonesia
------	---

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang Present)	Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero) Director of Public Business Transportation PT PELNI (Persero)	2012 - 2017	Direktur Armada & Teknik PT PELNI (Persero) Director of Fleet & Technical PT PELNI (Persero)
2011 - 2012	Senior Manager Pengadaan Senior Manager of Procurement	2010 - 2011	Senior Manager Pemasaran & Pengembangan Usaha Senior Manager of Marketing & Business Development

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris Utama PT PIDC
President Commissioner of PT PIDC

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Profil Direksi The Board of Director's Profile



Harry Boediarto Soewarto
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut
Director of Freight & Tol Laut

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
62 tahun per 31 Desember 2018
62 years old as of December 31, 2018

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Bandung, Tahun 1956
Bandung, on 1956

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Direksi sejak tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-148/MBU/08/2015 dan sesuai dengan SK 62/MBU/04/2017 tentang perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi, diangkat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut.

Appointed as Member of the Board of Directors since August 21, 2015 based on Minister of State-Owned Enterprises decision letter No. SK-148/MBU/08/2015 Decree No. 62/MBU/04/2017 about the changes of the position nomenclature, assignment and appointment of members of the Board of Directors, appointed as Director of Freight & Tol Laut.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1982	Sarjana Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung Bachelor Degree of Planology Engineering Institut Teknologi Bandung
------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut PT PELNI (Persero) Director of Freight & Tol Laut PT PELNI (Persero)	2015 – 2017	Direktur Komersial PT PELNI (Persero) Director of Commercial PT PELNI (Persero)
2014 – 2015	Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan. Director of Marine Transportation Traffic of Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation.	2015	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, BALITBANGHUB, Kementerian Perhubungan Director of Marine Transportation Reserach and Development, BALITBANGHUB, Ministry of Transportation
2012 – 2014	Kepala Pusat Kajian Kemitraan & Pelayanan Jasa Transportasi (PKKPJT). Partnership & Services Center of Transport Service (PKKPJT).	2011 – 2012	Direktur Kenavigasian, Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan. Director of Navigate Transportation Traffic of Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris Utama PT SBN
President Commissioner of PT SBN

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

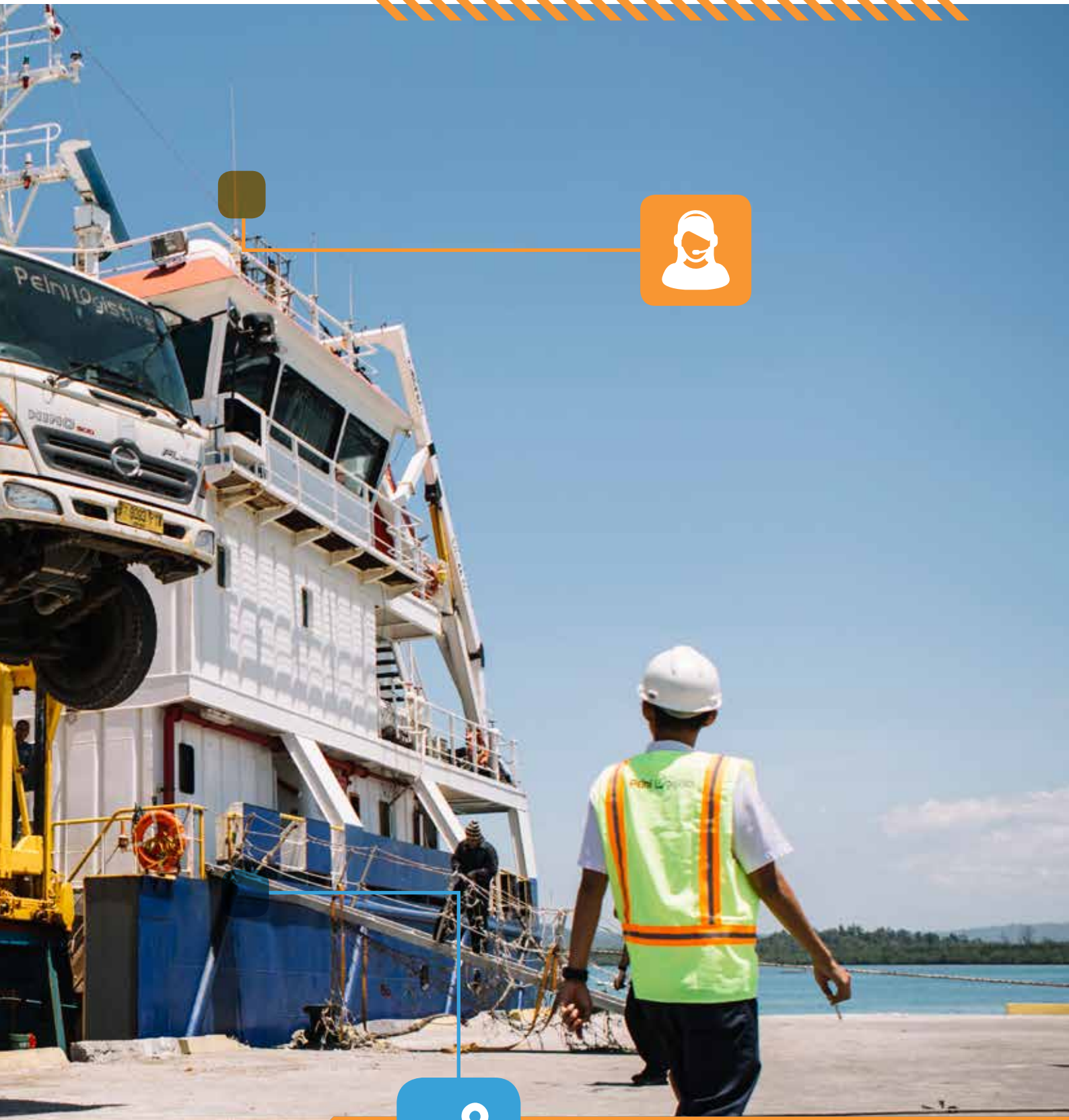
Tidak Ada
None



03

Profil Perusahaan

Company Profile





Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan

Company Name

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelayaran Nasional Indonesia



Bidang Usaha

Line of Business

Pelayaran
Shipping



Status Perusahaan

Company Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
State-Owned Enterprise (SOE)



Tanggal Operasi

Date of Operation

28 April 1952
April 28, 1952



Kepemilikan Saham

Shares Ownership

100% Pemerintah Indonesia
100% owned by The Republic of Indonesia Government



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Subscribed and Fully Paid-in Capital

Rp7.629.900.000.000



TDP

TDP

09.05.1.50.37082.



Jumlah Karyawan

Total Employees

4.436 (2017) / 4.379 (2018)



Nama Panggilan

Called Name

PELNI



Badan Hukum

Legal Entity

Perseroan Terbatas
Limited Liability Company



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

28 April 1952
April 28, 1952



Dasar Pendirian

Establishment Deeds

Akta pendirian No. 92 tanggal 28 April 1952 yang dibuat dihadapan Raden Kadiran Notaris di Jakarta. Establishment Deeds No. 92 dated April 28, 1952 drafted before Raden Kadiran Notary in Jakarta.



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp13.000.000.000.000



NPWP

NPWP

01.001.637.6-093.000



SIUP

SIUP

01.001.637.6-093.000



Alamat Perusahaan

Company Address

Jl. Gajah Mada No. 14
Jakarta Pusat 10130
T. (021) 6334342
F. (021) 63854130
E. infopelni162@pelni.co.id
www.pelni.co.id





Riwayat Singkat Perusahaan

Company Brief History



Sejarah berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Latar belakang pendirian Yayasan PEPUSKA diawali dari penolakan pemerintah Belanda atas permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di Indonesia, N.V. K.P.M (*Koninklijke Paketvaart Matschappij*) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM dalam menjalankan operasi pelayarannya di perairan Indonesia menggunakan bendera Merah Putih. Pemerintah Belanda dengan tegas menolak semua permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

Establishment history of PT PELNI (Persero) was initiated after the issuance of Joint Decree between Minister of Transportation and Minister of Public Works on September 5, 1950 declaring establishment of Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Background of PEPUSKA Foundation establishment was begun when the Government of Netherlands rejected request from Indonesia to change status of N.V. K.P.M (*Koninklijke Paketvaart Matschappij*), a Netherlands shipping company operated in Indonesia into a Perseroan Terbatas (PT)/ Limited Liability Company. The Government of Indonesia also wished the vessels of KPN to use Red and White flag during their shipping operations in Indonesian water territory. The Government of Netherland firmly rejected all appeals submitted by the Republic of Indonesia Government.



Riwayat Singkat Perusahaan Company Brief History

Dengan modal awal 8 (delapan) unit kapal dengan total *tonnage* 4.800 DWT (*death weight ton*), PEPUSKA berlayar berdampingan dengan armada KPM yang telah berpengalaman lebih dari setengah abad. Persaingan benar-benar tidak seimbang ketika itu, karena armada KPM selain telah berpengalaman, jumlah armadanya juga lebih banyak serta memiliki kontrak-kontrak monopoli. Akhirnya pada 28 April 1952 Yayasan PEPUSKA resmi dibubarkan.

Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Akta Notaris Nomor 92 tahun 1952.

Dalam perkembangannya, PT PELNI (Persero) tidak hanya melayani jasa transportasi kapal laut, Kami pun memberikan layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah laut dan pemandangan alam yang mengagumkan, seperti Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini.

Pada tahun 2015, PT PELNI (Persero) dipercaya Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Pada 2016, PT PELNI (Persero) meningkatkan kapasitas armadanya dengan mengoperasikan 80 (delapan puluh) kapal.

Pada tahun 2017, PT PELNI (Persero) menetapkan Tata Nilai (*Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive*), Budaya Perusahaan (Peduli, Ekselen, Inovasi) dan Perilaku "JUARA" (Jujur, Unggul, Adaptasi, Ramah, Akurat).

Sejak awal pendirian di tahun 1952 hingga 31 Desember 2017, PT PELNI (Persero) belum pernah melakukan pergantian nama.

Pada tahun 2018, PT PELNI (Persero) menerapkan strategi bisnis berupa sinergi BUMN dan sistem operasi berbasis digital.

With initial capital of 8 (eight) units vessel with total tonnage of 4,800 DWT (death weight ton), PEPUSKA sailed side to side with KPM fleets with more than half of century experience. At that time, this was such an unbalanced competition not only due to bigger fleets but also monopoly contracts. Finally on April 28, 1952, Pepuska Foundation was officially dismissed.

At the same time, PT PELNI (Persero) was established pursuant to Minsiter of Transportation Decree Number M.2/1/2 dated February 28, 1952 and Number A.2/1/2 dated April 19, 1952 and Notarial deeds Number 92 of 1952.

During its progress, PT PELNI (Persero) does not only provide marine vessels transportation service but also marine tourisme package to islands with beautiful underwater and landscape such as Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan and Tomini Islands.

In 2015, PT PELNI (Persero) was mandated by the RI Government to serve as operator for Perintis, Tol Laut and Cattle Ship which covering entire Indonesian territory.

In 2016, PT PELNI (Persero) increased fleets capacity by operating 80 (eighty) vessels.

In 2017, PT PELNI (Persero) established Value (*Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive*), Corporate Culture (*Care, Excellent, Innovation*) and Behavior "JUARA" (*Honest, Excellent, Adaptable, Friendly, Accurate*).

Since early establishment in 1952 up to December 31, 2017, PT PELNI (Persero) has never changed name of the Company.

in 2018, PT PELNI (Persero) applied SOEs synergy and operating system-digital base business strategies.



Jejak Langkah Perusahaan

The Company Milestones

1950

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Issuance of Joint Decree (SKB) between Minister of Transportation and Minister of Public Works dated September 5, 1950 declaring Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

1953

Perubahan status hukum PT PELNI (Persero) menjadi Perusahaan Negara (PN) dan menjadikan PT PELNI (Persero) sebagai Agen Pemerintah (*Government Agency*).

PT PELNI (Persero) legal entity was changed into Perusahaan Negara (PN)/State Company and brought PT PELNI (Persero) as Government Agency.

1981

Penyerahan pengelolaan pelayaran perintis kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 35 unit Kapal Perintis.

Delegation of Perintis shipping management to PT PELNI (Persero) by operating 35 units Perintis ship.

1952

PT PELNI (Persero) resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R. Djuanda No. 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952.

PT PELNI (Persero) was officially established under Minister of Transportation R. Djuanda Decree Number 2/1/2 dated February 23, 1952.

1975

Perubahan status hukum PN PELNI menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Maret 1973 dan Akta Notaris Nomor 31/1975.

PN PELNI legal entity was changed into Perusahaan Perseroan under Government Regulation Number March 17, 1973 and Notarial Deeds Number 31/1975.



Jejak Langkah Perusahaan The Company Milestones



Bidang Usaha

Line of Business

KEGIATAN USAHA PERSEROAN MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan yaitu untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan, kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh PT PELNI (Persero) adalah:

- Kegiatan usaha jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu.
- Kegiatan usaha jasa keagenan usaha pelayaran.
- Kegiatan usaha jasa pergudangan, angkutan rede dan ekspedisi/*forwarding*.
- Kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok/repairasi kapal.
- Kegiatan *charter* dan *broker* kapal.
- Kegiatan jasa konsultan, pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLE OF ASSOCIATION

Pursuant to Articles of Association, purpose and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting policy and program of the Government in economy sector and national development generally as well as development in domestic and overseas shipping business for passenger, cattle and cargo as liquid or dry bulk units by implementing Limited Liability Company.

BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

According to the purpose and objective of the Company's establishment, business activity that is operated by PT PELNI (Persero) is among others:

- Passenger and cargo transportation business with scheduled and on demand (*charter*) shipping network.
- Shipping agency service business.
- Warehouse, rede transportation and expedition/*forwarding* operation services.
- Vessels maintenance and ship docking/*reparation* services.
- Ship charter and broker services.
- Consulting, education, training and health services.





Produk dan Jasa

Products and Services

JASA PERKAPALAN

Kapal 2 in 1

Kapal jenis 2 in 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Werft dan dibangun di galangan Papenburg, Jerman. Kapal 2 in 1 ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

Kapal jenis 2 in 1 beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia bagian tengah dan timur seperti kebutuhan pokok masyarakat setempat.

Kapal Penumpang Serbaguna

Kapal jenis 3 in 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan kendaraan sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 in 1.

Kemampuan kapal 3 in 1 PT PELNI (Persero) dalam mengangkut kontainer dan kendaraan, secara langsung berkontribusi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok di wilayah Indonesia bagian timur yang dipasok dari kota-kota besar bagian barat seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Kapal Barang

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, kami menyediakan kapal barang untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

PT PELNI (Persero) memiliki 8 armada kapal barang yaitu 3 KM Caraka dan 5 kapal barang yang dibeli menggunakan dana PMN tahun 2015. Berikut ini merupakan spesifikasi 5 kapal yang dibeli PT PELNI (Persero) dengan menggunakan dana PMN:

1. Logistik Nusantara 1, dibangun pada tahun 1998 dengan 10822 DWT.
2. Logistik Nusantara 2, dibangun pada tahun 2006 dengan 3893 DWT.
3. Logistik Nusantara 3, dibangun pada tahun 2008 dengan 3901 DWT.
4. Logistik Nusantara 4, dibangun pada tahun 2007 dengan 3901 DWT.
5. Logistik Nusantara 5, dibangun pada tahun 2008 dengan 11184 DWT.

SHIPPING SERVICES

2 in 1 Ship

2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Werft and built at Papenburg Shipyard, Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid-2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knot.

This 2 in 1 ship operates to serve public needs in the middle and east areas of Indonesia such as basic needs for those local community.

Multipurpose Passenger Ship

The 3 in 1 ship type is multipurpose passenger ship with capacity to carry containers, passenger and Vehicle simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships which have been modified into 3 in 1 ship type.

Capacity of PT PELNI (Persero)'s 3 in 1 ships in carrying containers and vehicle contribute directly in distributing groceries to Eastern Indonesia that are supplied from western major cities such as Jakarta, Surabaya and Makassar.

Cargo Ship

For logistic distribution across Indonesian region, we provide cargo ship to carry large-volume cargo with excellent service and supported by professional personnel.

PT PELNI (Persero) has 8 cargo fleets namely 3 MV Caraka and 5 Freight ships which is bought using PMN fund of 2015. The following is the specification of 5 ships bought by PT PELNI (Persero) using PMN funds:

1. Logistik Nusantara 1, that was built in 1998 with 10822 DWT.
2. Logistik Nusantara 2, that was built in 2006 with 3893 DWT.
3. Logistik Nusantara 3, that was built in 2008 with 3901 DWT.
4. Logistik Nusantara 4, that was built in 2007 with 3901 DWT.
5. Logistik Nusantara 5, that was built in 2008 with 11184 DWT.



Produk dan Jasa

Products and Services

Kapal Tol Laut

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada:

- Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*).

Saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 7 (tujuh) armada Kapal Tol Laut yaitu KM Logistik Nusantara 1, KM Logistik Nusantara 2, KM Logistik Nusantara 3, KM Logistik Nusantara 4.

Jenis Muatan Kapal Tol Laut:

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kategorisasi muatan Kapal Tol Laut dijelaskan sebagai berikut:

Tol Laut Ship

Tol Laut Ship is operated referring to:

- Presidential Decree No. 70 of 2017 regarding Public Service Obligation Implementation for Marine Cargo.
- Presidential Decree No. 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Primary Need Goods and Valuable Goods.
- Minister of Transportation Regulation No. PM. 4 of 2016 as Amendment to Minister of Transportation Regulation No. PM 161 of 2015 regarding Public Service Obligation for Marine Cargo.
- Minister of Transportation Regulations No. 17 of 2017 regarding Marine Cargo Transportation Tariff in Public Service Obligation Implementation.

PT PELNI (Persero) currently operates 7 (seven) Tol Laut ships fleet, among others KM Logistik Nusantara 1, KM Logistik Nusantara 2, KM Logistik Nusantara 3, KM Logistik Nusantara 4.

Type of Tol Laut Ship Cargo:

Pursuant to Presidential Regulation Number 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Groceries and Valuable Goods, classification of Tol Laut cargo is explained below:

Barang Kebutuhan Pokok Groceries	Barang Penting Valuable Goods
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian : Agricultural groceries: 1. Beras Rice 2. Kedelai bahan baku tahu dan tempe Cabai Soy as material for tofu and soybean cake 3. Cabai Chili 4. Bawang Merah Onion	1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai Seeds, including rice, corn and soy 2. Pupuk Fertilizer 3. Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram Elpiji Gas 3 (three) kilogram 4. Triplek Plywood 5. Semen Cement 6. Besi baja konstruksi Construction Steel 7. Baja ringan Light steel
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri : Industrial groceries: 1. Gula Sugar 2. Minyak Goreng Oil 3. Tepung Terigu Wheat Flour	
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan: Livestock and Fisheries product groceries: 1. Daging Sapi Meat 2. Daging ayam ras Chicken 3. Telur ayam ras Eggs 4. Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/ cakalang Fresh fish, such as milkfish, mackarel and tuna/mackarel tuna/ skipjack tuna	

Sedangkan Sesuai Permendag No 38 tahun 2018 Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

In addition, pursuant to Ministry of Trading Regulation No. 38 in the year of 2018 regarding types of goods as stated in article 2 paragraph (1) letter b determined as follows:



Produk dan Jasa Products and Services

Barang Penting Lainnya Other Valuable Goods

a. Air mineral Mineral Water	k. Susu Milk	s. Alat tulis/peralatan sekolah Stationery and tools
b. Bawang Putih Garlic	l. Teh Tea	t. Gas elpiji 12 kg Elpiji Gas 12 kilogram
c. Garam Salt	m. Kopi Coffee	u. Pakan ternak atau pakan ikan Fish and Cattle food
d. Kacang hijau Mung bean	n. Ikan Kemasan Kaleng Canned Fish	v. Asbes/gypsum Asbestos/gypsum
e. Kacang Tanah Peanut	o. Biskuit Biscuit	w. Paku Nails
f. Margarin Margarine	p. Pakaian jadi Clothes	x. Seng Seng
g. Mie instan Noodles	q. Popok bayi dan dewasa Diapers for baby and adult	y. Aspal Bitumen
h. Minuman ringan Soft drink	r. Deterjen/sabun/pasta gigi Detergen/soap/toothpaste	
i. Obat-obatan Medicine		
j. Sayuran Vegetables		

Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 2 (dua) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara 1 dan KM Camara Nusantara 3 dengan rute Kupang – Waingapu – Tanjung Priok – Cirebon – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak. Dasar hukum pengelolaan Kapal Perintis, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/7/1/DJPL-15 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/18/DJPL-15 Tentang Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2016 Serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya Tanggal 30 November 2015.

Saat ini, PT PELNI (Persero) melayari 46 trayek dengan 52 kapal yang terdiri dari 46 kapal utama dan 6 kapal pengganti.

FASILITAS KAPAL

PT PELNI (Persero) menyediakan tenaga kerja profesional dan fasilitas terbaik demi kenyamanan penumpang dalam melakukan perjalanan menggunakan armada PT PELNI (Persero), meliputi:

Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 2 (two) Cattle Ship, KM Camara Nusantara 1 dan KM Camara Nusantara 3 with route of Kupang – Waingapu – Tanjung Priok – Cirebon – Kupang. The operation of cattle ship aims to help the Government implements lower meat price and increase welfare of the breeders in domestic cow breeding center.

Perintis Ship

Perintis ship fleet is part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Tol Laut and Cattle ships. Legal Frameworks of Perintis Ship management are among others:

1. Presidential Regulation Number 2 of 2016 regarding State-Owned Perintis Ship Public Service Obligation Implementation.
2. The Republic of Indonesia Minister of Transportation Regulation Number PM. 6 of 2016 regarding State-Owned Perintis Ship Public Service Obligation Implementation.
3. Marine Transportation General Directorate Decree Number AL.108/7/1/DJPL-15 as the Second Amendment on Marine Transportation General Directorate Decree Number AL.108/5/18/DJPL-15 regarding Route Network and Requirement for Perintis Shipping Vessel Budget year 2016 and Implementation Provisions dated November 30, 2015.

PT PELNI (Persero) currently navigates 46 routes with 52 ships consisting of 46 main ships and 6 replacement ships.

SHIP FACILITIES

PT PELNI (Persero) provides professional personnel and excellent facilities to ensure convenience of our passenger in using PT PELNI (Persero) fleets, among others:

Produk dan Jasa Products and Services



1. Fasilitas yang umum yang tersedia di kapal:
 - a. *Live Music;*
 - b. *Charging Spot;*
 - c. *Free Kasur Ekonomi;*
 - d. *Toilet;*
 - e. *Play Ground;*
 - f. *Mini Gym;*
 - g. *Jogging Track;*
 - h. *Mini Theatre;*
 - i. *Sun Bathing Area;*
 - j. *Mushola;*
 - k. *Klinik;*
 - l. *Cafeteria;*
 - m. *Wifi;*
 - n. *BTS on the ship;*
 - o. *Hot Water;*
 - p. *Cleaning Service;*
 - q. *TV.*

2. Fasilitas permakanan:
 - a. *Restoran (Ruang Makan);*
 - b. *Bread Toaster;*
 - c. *Combi Oven;*
 - d. *Menu Makan (bento box);*
 - e. *Additional Suplemen (Susu UHT, biskuit kemasan dan jus botol);*
 - f. *Air Minum dalam Kemasan Branding PELNI.*

3. *Event dalam kapal:*
 - a. *Meeting on Board;*
 - b. *Tour on the ship;*
 - c. *Entertainment;*
 - d. *New Year Eve's Party;*
 - e. *Solar Eclipse on Board;*
 - f. *Photo Shoot;*
 - g. *Event Charity;*
 - h. *Floating Hotel.*

1. General Ship Facilities:
 - a. *Live Music;*
 - b. *Charging Spot;*
 - c. *Free Economic Mattress;*
 - d. *Toilet;*
 - e. *Play Ground;*
 - f. *Mini Gym;*
 - g. *Jogging Track;*
 - h. *Mini Theatre;*
 - i. *Sun Bathing Area;*
 - j. *Mosque;*
 - k. *Clinic;*
 - l. *Cafeteria;*
 - m. *Wifi;*
 - n. *BTS on the ship;*
 - o. *Hot Water;*
 - p. *Cleaning Service;*
 - q. *TV.*

2. Dining Facility:
 - a. *Restaurant (Dining Room);*
 - b. *Bread Toaster;*
 - c. *Combi Oven;*
 - d. *Food menu (bento box);*
 - e. *Additional Supplements (UHT milk, biscuits and bottled juice).*
 - f. *Mineral Water in PELNI Branding Packaging.*

2. Event On Board:
 - c. *Meeting on Board;*
 - d. *Tour on the ship;*
 - e. *Entertainment;*
 - f. *New Year Eve's Party;*
 - g. *Solar Eclipse on Board;*
 - h. *Photo Shoot;*
 - i. *Charity Event;*
 - j. *Floating Hotel.*



Produk dan Jasa Products and Services

MANAJEMEN KESELAMATAN

- Regulasi IMO:
 - SOLAS 1974 Consolidated 2004 (Chapter IX: ISM Code)
 - MARPOL 78 Consolidated 2006
 - STCW 95 (KM. 70 tahun 1998, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan)
 - COLREG 72 (Collision Regulation tahun 72)
- International Load Line Convention (ILLC) 1966

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

Keagenan Kapal & Tour

- Jenis Layanan Keagenan:
 - Clearance in & out;
 - Bunker, Fresh Water, Provision Supply;
 - Crew & Guest Attendance;
 - Protecting Agent;
 - Custom & Immigration Clearance;
 - Layanan Sea Pollution; dan
 - Layanan Garbage Removal.
- Tour Paket Wisata Bahari:
 - Wisata Karimunjawa;
 - Wisata Banda Neira;
 - Wisata Pulau Komodo;
 - Wisata Raja Ampat;
 - Wisata Wakatobi;
 - Wisata Kepulauan Seribu;
 - Wisata Selat Lembeh (Coming Soon); dan
 - Wisata Derawan (Coming Soon).

Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

Galangan Surya Surabaya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PT PELNI (Persero) tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PT PELNI (Persero) Maintenance Facilities (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin space dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Bisnis Properti

Persewaan ruang kantor dari aset gedung PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PT PELNI (Persero) serta persewaan toko dan cafe di atas kapal.

SAFETY MANAGEMENT

- IMO Regulation:
 - SOLAS 1974 Consolidated 2004 (Chapter IX: ISM Code)
 - MARPOL 78 Consolidated 2006
 - STCW 95 (KM. 70 of 1998, PP No. 7 of 2000 on Marine)
 - COLREG 72 (Collision Regulation in 72)
- International Load Line Convention (ILLC) 1966

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

Ship Agency & Tour

- Type of Agency Services:
 - Clearance in & out;
 - Bunker, Fresh Water, Provision Supply;
 - Crew Attendance;
 - Protecting Agent;
 - Custom Immigration Clearance;
 - Sea Pollution Service; and
 - Garbage Removal Service.
- Marine Tourism Packages:
 - Karimunjawa Tours;
 - Banda Neira Tours;
 - Komodo Island Tours;
 - Raja Ampat Tours;
 - Wakatobi Tours;
 - Seribu Islands Tours;
 - Selat Lembeh Tours (Coming Soon); and
 - Derawan Tours (Coming Soon).

Bahtera Hotel

Hotel that has meeting and training center facilities equipped with meeting room facility that has capacity over 200 pax as well as other supporting facilities.

Surya Surabaya Shipyard

Established since May 20, 1996, the Shipyard handled 500-type PT PELNI (Persero) ships, such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PT PELNI (Persero) Maintenance Facilities (PMF), strategic projection to guarantee docking and repair space for all vessels (including large ships) that are operated by PT PELNI (Persero).

Property Business

Rent office space from PT PELNI (Persero)'s building assets spread across branch office of PT PELNI (Persero). In addition, the property business also includes onboard advertising space rental on PT PELNI (Persero) ships as well as onboard store and café rental.



Visi, Misi, Tata Nilai, Budaya Perusahaan & Perilaku

Vision, Mission, Values, Corporate Culture & Behavior

Penetapan Visi dan Misi

Visi dan Misi PT PELNI (Persero) telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 81A/HK0.01/DIR/VI-2010 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan, serta dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara periodik.

Establishment of Vision and Mission

Vision and Mission of PT PELNI (Persero) have been authorized by Board of Directors Decree No. 81A/HK0.01/DIR/VI-2010 about the Corporate Vision and Mission establishment, also being evaluated periodically by the Board of Commissioners.

Visi Vision

“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”

“To Become a Strong Shipping Company and Customers Preferred Choice”

Tangguh Integrity :

1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (*company's value growth*).
Maximum growth of the company (company's value growth).
2. *Center of Excellence* usaha pelayaran nasional: SDM, Produksi, Distribusi, Pelayanan, dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan.
Centre of excellence of national marine: human resources, productions, distributions, services, environment safety and health.
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal.
Having optimum archipelago's route networks.

Pilihan Utama Pelanggan Customer's preferred choice:

1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima.
Focus on customers, in order to give best services.
2. *Load Factor* Minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang.
Load factors, minimum 90% for passengers and 90% for Goods.

Misi Mission

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
Managing and developing marine transportation to ensure public accessibility to support the realization of National Outlook (Wawasan Nusantara).
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Raising revenue contribution for the country, employees, as well as taking part on the development of environment and public services.
3. Meningkatkan nilai Perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
Enhancing corporate value throughout creativity, innovation and human capital competency development.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (*Stakeholders*), dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
Operating fair business by promoting mutual beneficiary principle for all stakeholders and implementing the Good Corporate Governance (GCG).



Visi, Misi, Tata Nilai, Budaya Perusahaan & Perilaku Vision, Mission, Values, Corporate Culture & Behavior

Penetapan Tata Nilai, Budaya Perusahaan dan Perilaku

Tata Nilai, Budaya Perusahaan dan Perilaku Perseroan disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 11.30/02/SK/HKO.01/2017 Tentang Penetapan Tata Nilai Utama, Budaya Perusahaan dan Perilaku di Lingkungan PT PELNI (Persero).

Establishment of Values, Corporate Culture and Behavior

Values, Corporate Culture and Behavior of the Company is ratified in Director Letter Decree No. 11.30/02/SK/HKO.01/2017 On Stipulation of The Company's Main Values, Corporate Culture and Behavior at PT PELNI (Persero) environment.

Tata Nilai Values



Integrity Integritas

Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu bertindak jujur, disiplin, komitmen, konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan, berani menyatakan kebenaran dan dapat dipercaya sesuai ketentuan Perusahaan dan standar etika. Tata Nilai Utama **"Integrity"** diwujudkan dengan Perilaku **"Jujur"**.

Every member of PT PELNI (Persero) always act honestly, discipline, commitment, consistent between thoughts, words and actions, dare to declare the truth and be trustworthy in accordance with Company requirements and ethical standards. **"Integrity"** of Main Values is manifested by **"Honest"** Behavior.



Continuous Improvement Peningkatan Berkelanjutan

Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu semangat melakukan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan nilai tambah dan selalu menjadi yang terbaik. Tata Nilai Utama **"Continuous Improvement"** diwujudkan dengan Perilaku **"Unggul dan Adaptasi"**.

Every member of PT PELNI (Persero) always has the spirit to make continuous improvement for increasing the additional value and always do the best. The **"Continuous Improvement"** of Main Values is manifested by **"Excellence and Adaptation"** behavior.



Customer Focus Fokus pada Pelanggan

Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tata Nilai Utama **"Customer Focus"** diwujudkan dengan Perilaku **"Ramah"**.

Every member of PT PELNI (Persero) is always oriented to the interests of customers and committed to provide the best service for customers. The **"Customer Focus"** of Main Values is manifested by **"Friendly"** Behavior



Competitive Kompetitif

Setiap Insan PT PELNI (Persero) mampu berkompetisi dalam skala nasional maupun regional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. Tata Nilai Utama **"Competitive"** diwujudkan dengan Perilaku **"Akurat"**.

Every member of PT PELNI (Persero) is able to compete in national and regional scale, encourage growth through investment, and build a cost conscious culture and appreciating performance. The **"Competitive"** of Main Values is manifested by **"Accurate"** Behavior.

Visi, Misi, Tata Nilai, Budaya Perusahaan & Perilaku

Vision, Mission, Values, Corporate Culture & Behavior

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, maka ditetapkan Budaya Perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh Insan PT PELNI (Persero) agar menjadi karakter atau kebiasaan seluruh insan PT PELNI (Persero). Budaya Perusahaan PT PELNI (Persero) adalah "PELNI" yang terdiri dari :

To support the realization of the company's vision and mission, and has been settled that the Corporate Culture must be learned, understood, lived and implemented by all members of PT PELNI (Persero). The Corporate Culture of PT PELNI (Persero) is as its "PELNI" slogan which consists of:

Budaya Perusahaan Corporate Culture



Peduli Care

Setiap Insan PELNI mampu bekerja tuntas, cepat tanggap dan kepedulian tinggi terhadap keselamatan, kesehatan kerja di lingkungan internal & eksternal perusahaan, mampu untuk melayani dengan tulus dan ramah serta bersikap bijaksana dalam menghadapi keluhan pelanggan internal & eksternal perusahaan.

Every member of PELNI is able to work completely, quick response and high care towards Safety, occupational health at internally & external environment of the company, and is able to serving sincerely and kindly and being wise in dealing with internal & external complaints of the company.



Ekselen Excellent

Setiap Insan PELNI mampu bekerja keras, tepat, akurat & berintegritas tinggi dengan melaksanakan amanah yang memberikan manfaat dan kinerja yang terbaik, selalu mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang kompetitif, dapat diandalkan dengan mencapai standar kualitas produk & jasa yang berdaya saing tinggi melampaui harapan pelanggan.

Every member of PELNI is able to work hard, appropriate, accurate & high integrate by carrying out the trust that provides the best benefits and performance, always take decisions based on competitive business principles, reliable by achieving the product quality standard & high competitive services beyond customer expectations.



Inovasi Innovation

Setiap Insan PELNI selalu berinisiatif tinggi, bersifat kreatif dan proaktif mencari peluang-peluang baru dan tantangannya, bertanggung jawab penuh untuk selalu berupaya meningkatkan daya saing tinggi berkelanjutan terhadap diri, perusahaan, dan lingkungan agar menjadi Pemenang serta mampu bersinergi luas secara optimal.

Every member of PELNI always has high initiative, creative and proactive to find new opportunities and challenging, be responsible to make serious effort for improving high competitiveness to self, company and environment in order to be a Winner and able to synergize wide optimally.



Visi, Misi, Tata Nilai, Budaya Perusahaan & Perilaku Vision, Mission, Values, Corporate Culture & Behavior

Perilaku yang merupakan acuan bertindak yang harus dipatuhi seluruh Insan PT PELNI (Persero) dalam melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari, adalah sebagai berikut:

Behavior is a reference for action which must be obeyed by all members of PT PELNI (Persero) to daily working activities, are as follows:

Perilaku Behavior



Jujur | Honest



Unggul | Excellent



Adaptasi | Adaptable



Ramah | Friendly

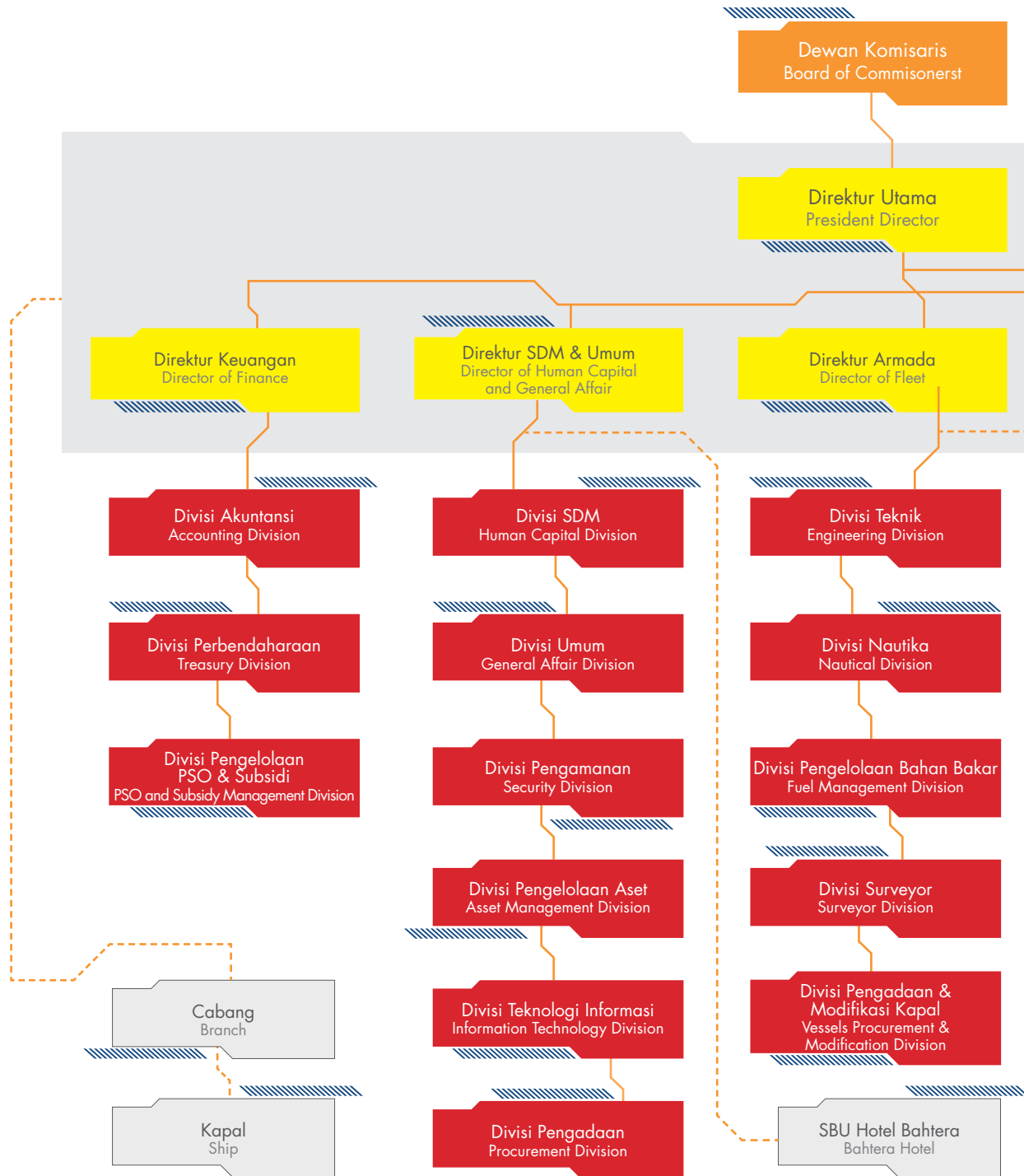


Akurat | Accurate

Struktur Organisasi

Organization Structure

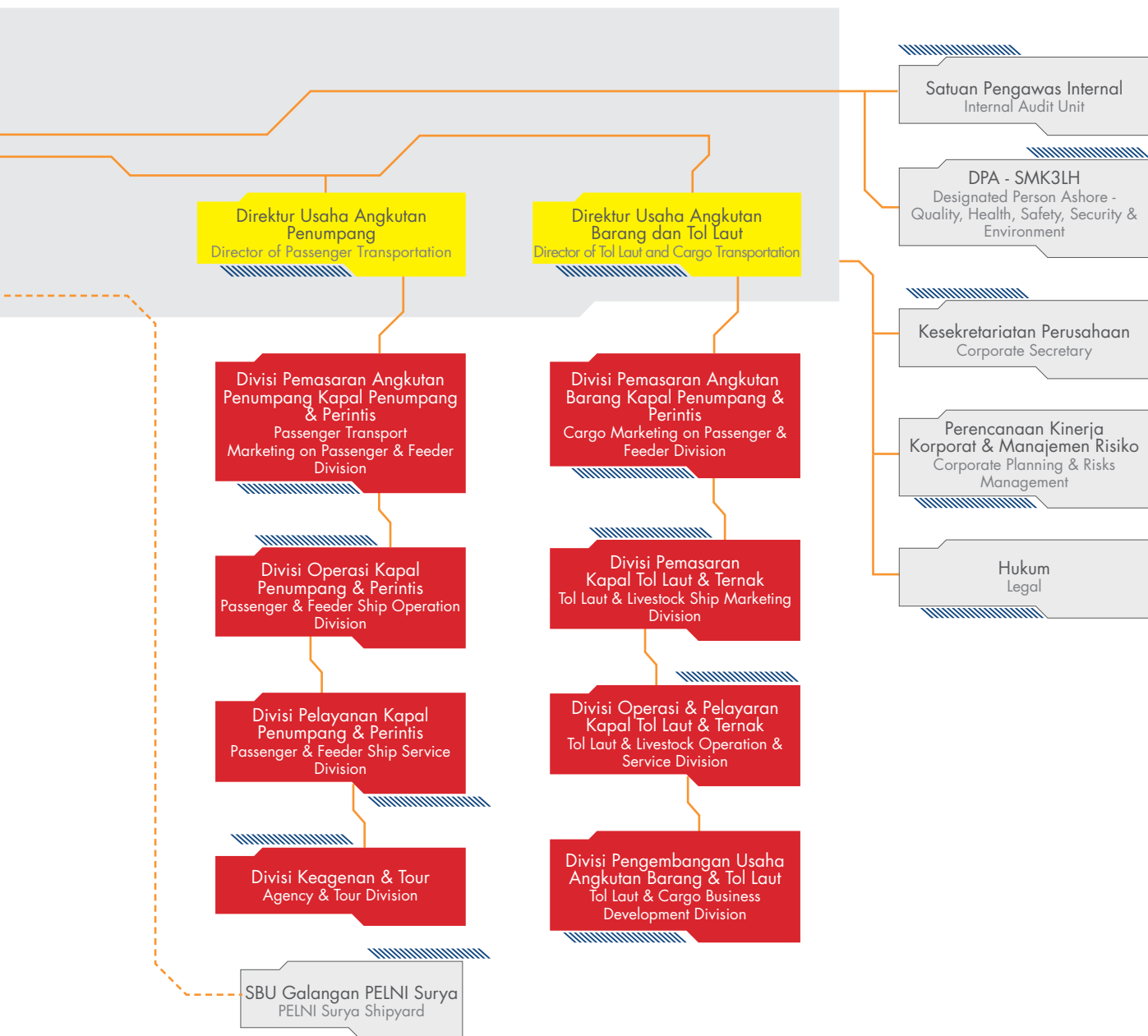
Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 11.06/01/SK/HKO.01/2017 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).





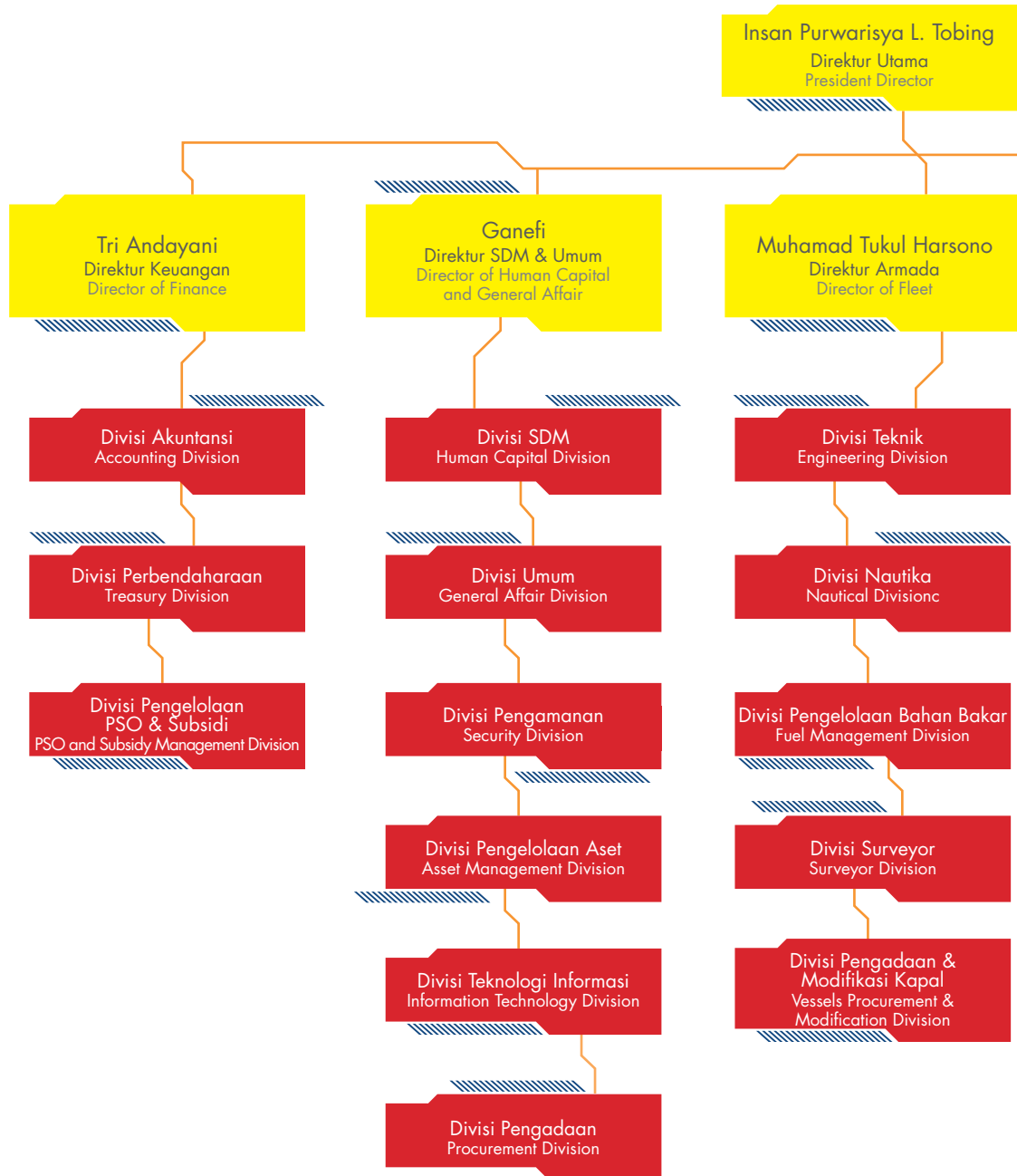
Struktur Organisasi Organization Structure

Organization structure is validated under Board of Directors Decree Number 11.06/01/SK/HKO.01/2017 as Amendment to Board of Directors Decree No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017 regarding Organization Structure, Main Duty and Function of (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.



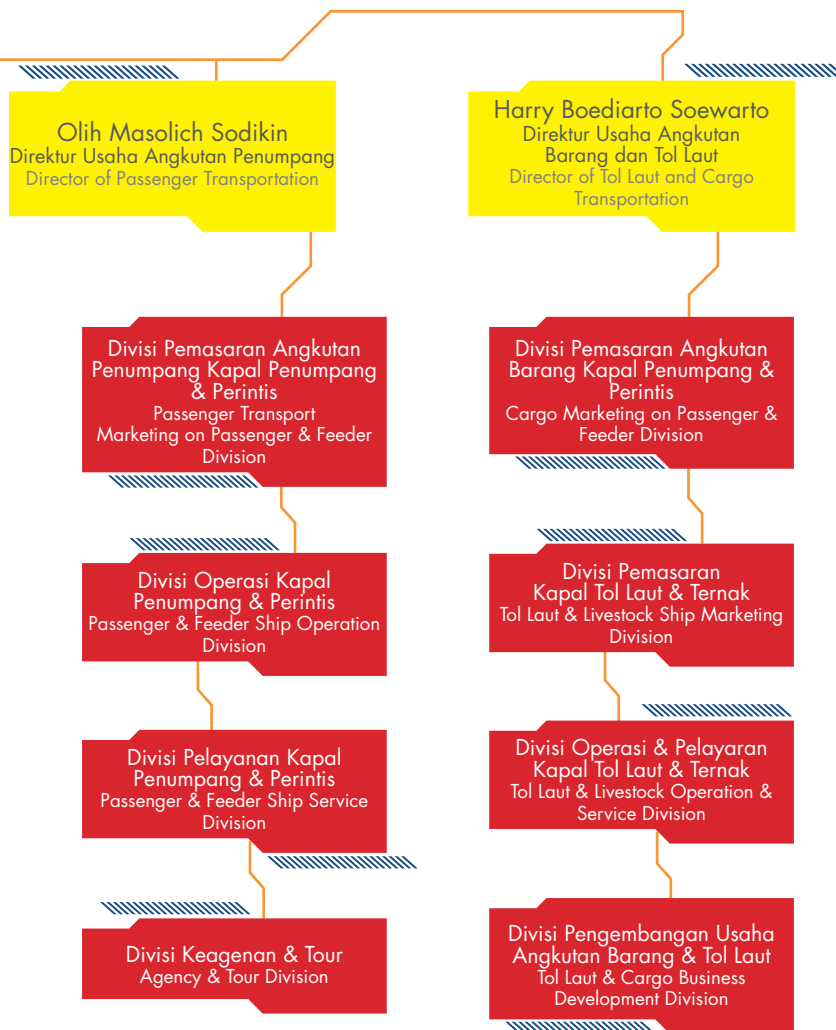
Struktur Organisasi

Organization Structure





Struktur Organisasi Organization Structure





Sumber Daya Manusia

Human Resources

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM 2018



HR MANAGEMENT POLICY 2018

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan di tahun 2018, PT PELNI (Persero) fokus pada *Culture Strengthening* di samping tetap menjalankan proses bisnis pengelolaan sumber daya manusia seperti tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan dilakukannya transformasi bisnis maka dilakukan tranformasi budaya untuk mendukung hal tersebut. Bersama dengan hal tersebut maka diterbitkan SK Direksi No. 11.30/02/SK/HKO.01/2017 tentang Penetapan Tata Nilai Utama, Budaya Perusahaan dan Perilaku di Lingkungan PT PELNI (Persero). Kebijakan-kebijakan baru di tahun 2018 yang telah ditetapkan untuk menunjang percepatan transformasi organisasi, bisnis, dan peningkatan kesejahteraan serta kompetensi pegawai, antara lain:

1. Penetapan SOP Pengelolaan Pengembangan Organisasi.
2. Penetapan SOP Pengelolaan Budaya Perusahaan.
3. Penetapan SK Pola Pengadaan Pegawai Darat.
4. Penetapan Surat Edaran Pengajuan Pelatihan dan Kontrak Pengembangan Kinerja.
5. Penetapan SK Tata Nilai, Budaya Perusahaan dan Perilaku Budaya Perusahaan PT PELNI (Persero).
6. Penetapan SK Pedoman Budaya Kerja PT PELNI (Persero).
7. Penetapan SK Pedoman *Change Leader, Change Agents* dan Tim Budaya.
8. Penetapan Surat Instruksi Penggunaan Media Sosial di Lingkungan PT PELNI (Persero).

Along with the Long-Term planning of the Company in 2018, PT PELNI (Persero) Focused on Culture Strengthening, which keeps conducting our business mplementation of human resources in the previous years. In order to support business transformation, the Company has been performed culture transformation. Then, issued Directors' Letter No. 11.30/02/SK/HKO.01/2017 regarding the determination of key values, Corporate Culture and Code of Ethics in PT PELNI (Persero) environment. New Policies have been applied in 2018 to support the advancing transformation of organization, business, and increasing employee welfare - and its competency:

1. The Determination of SOP on organization development.
2. The determination of SOP on Corporate Culture management.
3. The Stipulation of Decree letter of onshore employee recruitment processes.
4. The determination of Circular Training Submission and Performance development contract.
5. The issuance of decree letter regarding Value Management, Corporate Culture and Code of Ethics of PT PELNI (Persero).
6. The issuance of Corporate Culture Guidelines of PT PELNI (Persero).
7. The determination of decree letter related to Guidelines of Change Leader, Change Agents and Culture Team.
8. The determination of Instruction Letter regarding the Use of Social Media in PT PELNI (Persero).



Sumber Daya Manusia Human Resources



TRANSFORMASI BUDAYA

Seiring dengan transformasi bisnis dan budaya maka pada tanggal 12 Februari 2018 dilakukan *launching* budaya perusahaan. Hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan transformasi budaya adalah sebagai berikut:

1. Program internalisasi budaya perusahaan untuk agen perubahan sebanyak VI *batch* dengan total agen perubahan 247 dan *change leader* 149;
2. Pemutaran video budaya perusahaan di media informasi perusahaan (*lift* kantor pusat);
3. Pemutaran ucapan salam motivasi setiap pagi sebelum bekerja melalui *announcer* di Kantor Pusat;
4. Sosialisasi salam 4lways PELNI, Yel-yel dan Video Budaya oleh Agen perubahan *Batch* I - VI di lingkungan kerjanya;
5. Pencetakan *banner* dan pemasangan *banner* Budaya di seluruh lantai Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kapal serta sosialisasi budaya perusahaan sesuai Instruksi Direktur SDM & Umum No. 04.30/01/INS/HKO.03/2018 tentang Sosialisasi Budaya Kerja Perusahaan Melalui Media Cetak dan Elektronik di Lingkungan Perusahaan;

CULTURE TRANSFORMATION

With this business and culture transformation, on February 12, 2018 was launching Corporate Culture related to culture transformation as follows:

1. Internalizing program of corporate culture to change agent is as much as VI batch by the total change agent of 247 and change leader of 149;
2. Corporate culture socialization on information media of the Company (on elevator of Head Office);
3. Motivation greetings every morning before working through announcer in Head Office;
4. 4lways PELNI Greetings, Company's slogans, and Corporate Culture video socialitated by Change Agent Batch I to VI in their work field;
5. Banner printing and installation related corporate culture in Head Office, Branches and ships pursuant to the instruction of Director of Human Resources & Affairs No. 04.30/01/INS/HKO.03/2018 relating to corporate culture socialization through Magazine and Electronic Media in Company's Environment.



Sumber Daya Manusia

Human Resources

6. Pelaksanaan Lomba Ruangan Terjuara di Kantor Pusat;
7. Melakukan *monitoring* pelaksanaan sosialisasi oleh *Change Agent* melalui media sosial (whatsapp grup);
8. Pelaksanaan Program *Training For Trainer* (TFT) untuk Agen Perubahan dan Tim Budaya;
9. Melakukan sosialisasi tata nilai, budaya kerja, maskot budaya perusahaan dan perilaku juara melalui sosial media (instagram : 4lwayspelni);
10. Mensosialisasikan & mengawal kebijakan/sistem baru aplikasi SCM SIPARSEL melalui agen perubahan dengan membentuk WA Grup *Change Agents* – SCM dari 8 Divisi (Pengadaan, Umum, Teknik, Teknologi Informasi, PKPP, Akuntansi, BBM, Nautika);
11. Sosialisasi *Roadshow* SIPARSEL oleh Agen Perubahan dari 8 Divisi di Kantor Pusat;
12. *Monitoring* dan evaluasi kinerja *Change Agent batch I - VI*;
13. Pelaksanaan Survei Indeks Kesehatan Budaya Organisasi PT PELNI (Persero) dari tanggal 4-21 September 2018 dengan hasil indeks 16% (Kategori Kurang Sehat, memerlukan beberapa penyesuaian minor).
6. The implementation of "Ruangan Terjuara" (Champions Room) competition;
7. Monitoring the socialization by Change Agent through social media (Whatsapp Group);
8. The implementation of Training for Trainer programs for Change Agent and Culture Team;
9. Socializing values, work culture, corporate culture mascot and champion being through social media (Instagram:4lwayspelni)
10. Socializing and overseeing the policy/new system of "SCM SIPARSEL" through change agent by making Change Agents-SCM whatsapp group in 8 Division (Procurement, General Affairs, Technic, Information Technology, PKPP, Accounting, Fuel, Nautics);
11. Socializing SIPARSEL Roadshow by Change Agent from 8 Division in Head office;
12. Monitoring and evaluating the performance of Change Agent batch I to VI
13. The Implementation of PT PELNI (Persero) Organizational Culture Health Survey from September 4-21, 2018 with an index of 16% (Category Unhealthy, requiring some minor adjustments).

REKRUTMEN SDM

Sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor pelayaran, Perseroan memberikan kesempatan berkarir yang sama berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan unit kerja di Perseroan. Peluang berkarir di PT PELNI (Persero) memberlakukan asas kesetaraan tanpa adanya diskriminasi *gender*, agama, suku bangsa maupun hal lainnya.

Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selama tahun 2018, Perseroan melaksanakan 2 (dua) jenis program rekrutmen pegawai PT PELNI (Persero), antara lain:

EMPLOYEE RECRUITMENT

As Stated-owned Enterprise operates in shipping sector, the Company guarantees fair career opportunities based on competency and requirement standards for the Company needs. Career opportunities of PT PELNI (Persero) adapt the principle of fairness without any discrimination related to gender, religion, ethnicity and other aspects.

This recruitment system will be done transparently based on the needs of manpower planning to support the Company's short-term and long-term targets. Throughout 2018, the Company held 2 (two) employee recruitment programs, as follows:



Sumber Daya Manusia Human Resources

Rekrutmen Pegawai Darat

Rekrutmen pegawai darat dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk pelaksanaan psikotes secara *online* dan tes kesehatan. Proses rekrutmen dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 untuk jalur D3 dan S1 (*Management Trainee & Sales*) di 4 (empat) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, Jayapura, dan Balikpapan. Jumlah pegawai yang diterima sebanyak 138 untuk ditempatkan di Kantor Pusat dan Cabang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Posisi Position	2018
1	MT (<i>junior staff</i>) MT (<i>junior staff</i>)	60
2	<i>Junior Officer</i> <i>Junior Officer</i>	47
3	<i>Sales</i> <i>Sales</i>	31
Jumlah Total		138

Selanjutnya dilaksanakan pelatihan kewiraan dan orientasi perusahaan terhadap calon pegawai tersebut agar pada saat ditempatkan telah memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.

Rekrutmen Pegawai Laut

Rekrutmen pegawai laut pada tahun 2018 berfokus pada pemenuhan kebutuhan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal perintis dan tol laut.

Adapun rincian pegawai laut yang berhasil direkrut pada tahun 2018 adalah:

No.	Posisi Position	2018
1	<i>Officer</i> (Nakhoda, KKM, Mualim, Masinis) <i>Officer</i> (Captain, Chief Engineer, Officer, Engineering)	401
2	<i>Rating</i> (PUK, Ahli Listrik, Pelayan, dsb) <i>Rating</i> (Personal Unlocking Key, Electrician, servant, etc)	413
Jumlah Total		814

Ashore Employee Recruitment

Onshore employee recruitment is conducted in cooperation with external party for the psychological test and medical check-up. This recruitment process was begun on August until December 2018 for Diploma 3 and Strata 1 (*Management Trainee & Sales*) in 4 Big Cities of Indonesia, namely Jakarta, Makasar, Jayapura and Balikpapan. The employees have been accepted as much as 138 persons that placed in head office and branches, in detailed below:

Furthermore, the commissioned officer training and company orientation has been being conducted to having adequate knowledge and ability when they deployed.

Offshore Employee Recruitment

Offshore Employee Recruitment in 2018 focused on filling the needs of crew ships for Perintis and Tol Laut ships.

Offshore employee has recruited in 2018 in detailed below:



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Jumlah anggaran untuk proses rekrutmen karyawan tahun 2018

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2018 untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen pegawai adalah sebagai berikut:

Total Cost for Employee Recruitment Process 2018

Total costs distributed by the company in 2018 for employee recruitment activities as follows:

No.	Keterangan Description	Anggaran 2018 2018 Budget	Realisasi 2018 2017 Realization
1	Rekrutmen Pegawai Darat Ashore Employee Recruitment	Rp1.200.000.000	Rp583.925.550
2	Rekrutmen Pegawai Laut Offshore Employee Recruitment	Rp3.857.500.000	-
Jumlah Total		Rp4.057.500.000	Rp583.925.550

Sumber: Realisasi Anggaran Direktorat SDM & Umum tahun 2018
 Source: Budget Realization of the HR & General Directorate 2018

PROFIL SDM 2018

Per 31 Desember 2018, jumlah pegawai Perseroan adalah 4.379 orang atau sedikit menurun sebesar 1% dibandingkan jumlah pegawai pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.436. Penurunan jumlah pegawai tersebut disebabkan oleh pegawai pensiun dan keluar.

Perseroan memberikan perlakuan dan kesempatan pengembangan karir yang setara kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi.

Deskripsi profil SDM berdasarkan level jabatan, jenis kelamin, status kepegawaian, tingkat pendidikan dan usia pada tahun 2018, sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Berdasarkan level organisasi, didominasi oleh pegawai jenjang bintara dan tamtama (setara *staff*/ pelaksana) sebesar 48%. Hal ini sejalan dengan model bisnis Perseroan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja operasional di kapal.

HUMAN RESOURCES DEMOGRAPHY 2018

As of December 31, 2018, total employees of the Company were 4,379 persons or slightly decreasing 1 % when compared total employee in 2017 of 4,436 persons. This decrease of total employee was caused by pension and resigned employee.

The Company provides equal treatment and career development opportunities for all employees without discrimination relating to sex, ethnicity, religion, race or other discrimination.

The Description of Human Resources profile based on position level, gender, employment status, education level and age in 2018, as follows:

Total Employee Based on Organization Level

Based on Organizational level, it is dominated by 48 percent of non-commissioned officers and enlisted employees. This is in line with the Company's business model which absorbs more operational workforce on ships.



Sumber Daya Manusia Human Resources

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi Total Employee based on Organization Level

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2018 2018 Composition
Direksi Directors	6	6	(0)	0%
Pegawai Darat (Kantor Pusat & Cabang) Ashore Employee (Head & Branch Office)				
2 - 4 Upper Manager 2 - 4 Upper Manager	47	50	(6%)	1%
5 - 7 Middle Manager 5 - 7 Middle Manager	161	158	2%	4%
8 - 9 Lower Manager 5 - 9 Lower Manager	193	171	13%	4%
10 - 13 Staff & Officer 10 - 13 Staff & Officer	394	370	6%	9%
14 - 16 Admin Officer 14 - 16 Admin Officer	196	221	(11%)	4%
Jumlah Total	997	970	3%	23%
Pegawai Darat (Anak Perusahaan) Ashore Employee (Subsidiaries)				
2 - 4 Upper Manager 2 - 4 Upper Manager	16	22	(27%)	0%
5 - 7 Middle Manager 5 - 7 Middle Manager	28	34	(18%)	1%
8 - 9 Lower Manager 5 - 9 Lower Manager	50	55	(9%)	1%
10 - 13 Staff & Officer 10 - 13 Staff & Officer	336	383	(12%)	8%
14 - 16 Admin Officer 14 - 16 Admin Officer	112	152	(26%)	3%
Jumlah Total	542	646	(16%)	12%
Pegawai Laut Offshore Employee				
3 - 9 Perwira 3 - 9 Ship Commissioned Officer	728	716	2%	17%
10 - 12 Bintara 5 - 7 Ship Non-commissioned Officer	434	416	4%	10%
13 - 15 Tamtama 13 - 15 Ship Enlisted	1.696	1.658	1%	38%
Jumlah Total	2.858	2.790	2%	65%
Jumlah Pegawai Total Employee	4.379	4.436	(1%)	100%





Sumber Daya Manusia Human Resources

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

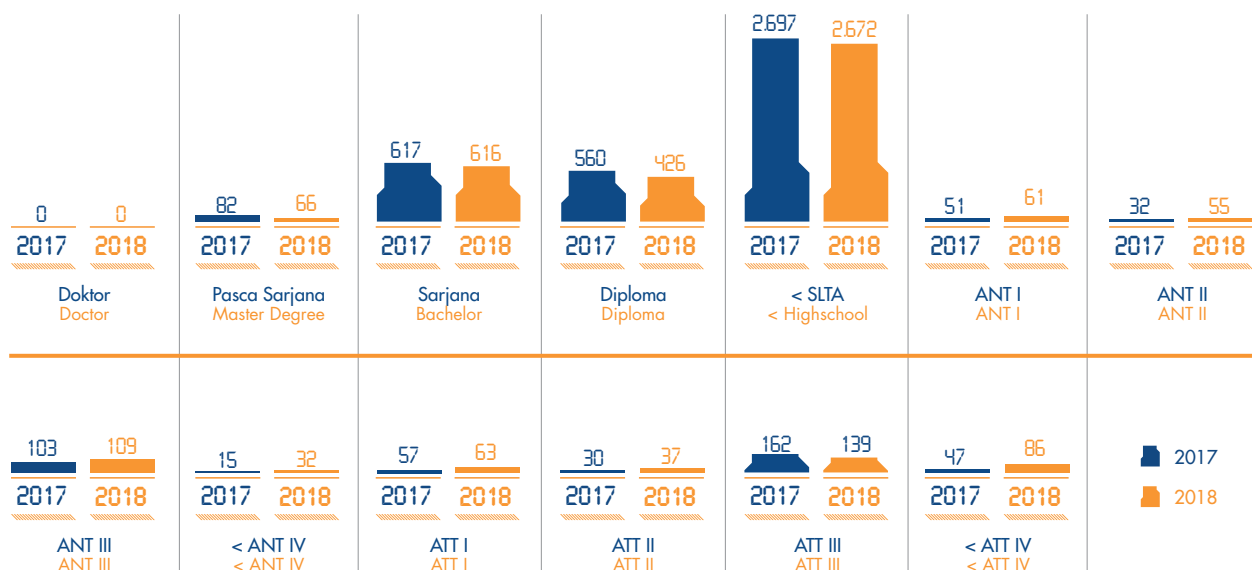
Berdasarkan jenjang pendidikan, 61% didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SMA. Hal ini sejalan dengan model bisnis Perseroan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja di cabang dan operasional kapal, namun demikian Perseroan tetap membekali pegawai dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan melalui pelatihan yang diberikan agar pegawai memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang dilakukan.

Total Employee Based on Education Level

Based on education level, 61% are dominated by high school level employees. This is in line with the business model of the Company that absorbs more workers in the branches and ship operations, however, the Company still provides employees with the required competencies through training provided so that employees have the necessary skills in the work performed.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Total Employee based on Education Level

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2018 2018 Composition
Pegawai Darat Ashore Employee				
Doktor Doctor	0	0	0%	0%
Pasca Sarjana Master Degree	66	82	(20%)	2%
Sarjana Bachelor	616	617	0%	14%
Diploma Diploma	426	560	(24%)	10%
< SLTA Highschool	2.672	2.697	(1%)	61%
ANT I ANT I	61	51	20%	1%
ANT II ANT II	55	32	72%	1%
ANT III ANT III	109	103	6%	2%
< ANT IV ANT IV	32	15	113%	1%
ATT I ATT I	57	63	(10%)	1%
ATT II ATT II	37	30	23%	1%
ATT III ATT III	162	139	17%	4%
< ATT IV ATT IV	86	47	83%	2%
Jumlah Pegawai Total Employee	4379	4.436	(1%)	100%





Sumber Daya Manusia Human Resources

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai, 82% didominasi oleh pegawai tetap yang biasa disebut pegawai organik. Adanya pegawai kontrak atau pegawai non organik karena masih terdapat beberapa pekerjaan yang sifatnya temporer.

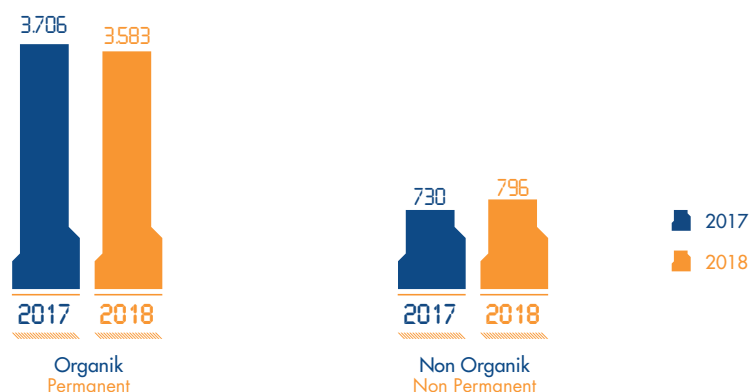
Total Employee Based on Employment Status

The composition of employees based on employment status, it is dominated by 82% of permanent employees who are usually called organic employees. There are contract employees or non-organic employees because temporary jobs available.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Total Employee based on Employment Status

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2018 2018 Composition
Organik Permanent	3.583	3.706	(3%)	82%
Non Organik Non Permanent	796	730	9%	18%
Jumlah Total	4.379	4.436	(1%)	100%



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, 87% didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan banyaknya pekerjaan yang lebih diminati dan sesuai untuk laki-laki, misalnya di cabang dan kapal, namun demikian Perseroan berkomitmen tetap memberlakukan kesetaraan *gender* dalam kesempatan berkarir di dalam Perseroan.

Total Employee Based on Gender

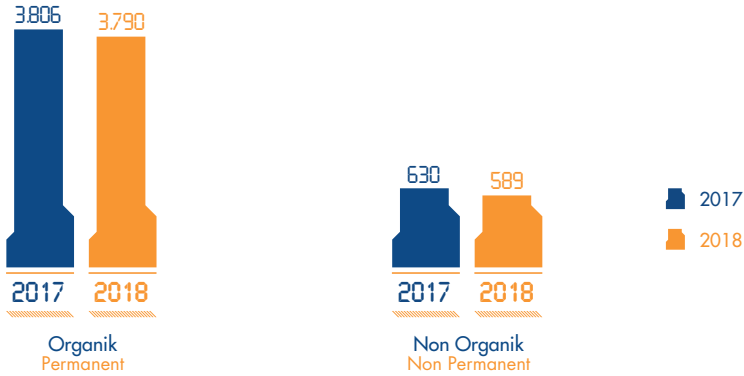
The composition of employees based on gender, it is dominated by 87% male employees which is due to the large number of jobs suitable for men such as at branches and ships, however the Company is committed to applying the equality of career opportunities.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Total Employee based on Gender

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2018 2018 Composition
Pria Male	3.790	3.806	0%	87%
Wanita Female	589	630	(7%)	13%
Jumlah Total	4.379	4.436	(1%)	100%

Sumber Daya Manusia Human Resources



Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan kelompok usia, komposisi pegawai pada kelompok umur 50-55 tahun dan 40-49 tahun masing-masing adalah 34%. Komposisi secara umum pada tahun 2018 menunjukkan bahwa perseroan masih memiliki pegawai yang produktif untuk menjalankan bisnis ke depan. Di sisi lain perlu mempersiapkan regenerasi secara cepat untuk menggantikan pegawai yang berusia lebih dari 50 tahun.

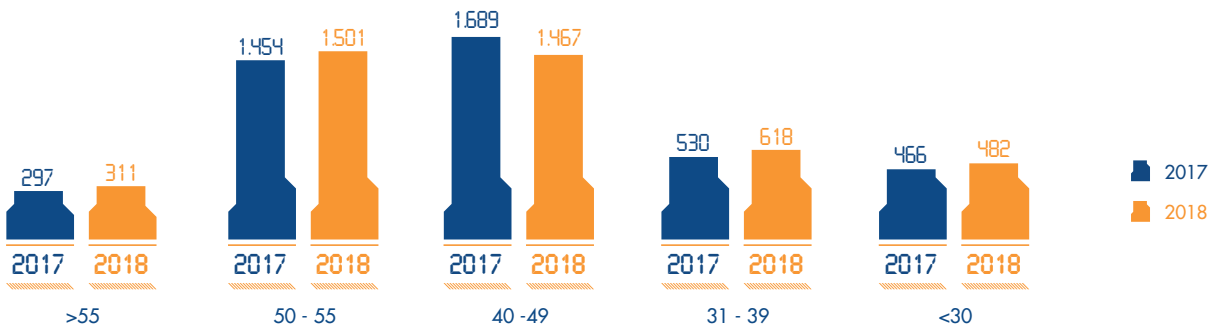
Total Employee Based on Age

The composition of employees based on age 50-55 and 40-49 years old are 34% respectively. This general composition in 2018 shown that the Company still has productive employees to conduct the business going forward. On the other hand, it is necessary to prepare quickly regeneration for replacing the employees more than 50 years old.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Total Employee based on Age

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2018 2018 Composition
>55	311	297	5%	7%
50-55	1.501	1.454	3%	34%
40-49	1.467	1.689	(13%)	34%
31-39	618	530	17%	14%
<30	482	466	3%	11%
Jumlah Total	4.379	4.436	(1%)	100%





Sumber Daya Manusia Human Resources

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Dalam rangka menjamin kelangsungan bisnis perusahaan yang berkesinambungan serta menghadapi era desruptif dengan persaingan bisnis yang semakin kompetitif, PT PELNI (Persero) senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan semangat belajar pegawai untuk siap bertransformasi dengan meningkatkan kualitas pegawai sebagai aset utama perusahaan. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan yang dilakukan secara berkala, dan dianggarkan untuk semua level pegawai, baik darat maupun laut sehingga setiap pegawai PT PELNI (Persero) akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni.

Program pelatihan di Tahun 2018 terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Diklat Orientasi

Pelatihan Orientasi diselenggarakan bagi calon pegawai agar mengenali ruang lingkup perusahaan, fungsi dan tugas jabatannya di lingkungan Perusahaan sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman, serta sikap-sikap dasar untuk beradaptasi dengan budaya perusahaan dan siap bekerja guna mendukung perwujudan visi dan misi Perusahaan.

2. Diklat Teknis

Pelatihan Teknis adalah pelatihan untuk jabatan-jabatan pelaksana dan staf pada fungsi-fungsi utama organisasi yang mendukung bisnis inti perusahaan, yang terdiri dari:

- a. Pelatihan Tingkat Dasar
 - Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat sederhana, teknis, dan berdasarkan *value chain* perusahaan.
 - Peserta pelatihan tingkat dasar adalah pegawai dengan kelas jabatan 15 dan 14.
- b. Pelatihan Tingkat Mula
 - Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat semi analisa, teknis, dan berdasarkan *value chain* perusahaan.
 - Peserta pelatihan tingkat mula adalah pegawai dengan kelas jabatan 13 dan 12.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

In order to guarantee the business continuity and face the disruptive era with high business competition, PT PELNI (Persero) always strives to improve employee learning coriuouscity that transformed by increasing the quality of employees as the main asset. This effort has been regularly implemented through training and education programs for all levels of employees, in both of onshore and offshore so every employee of PT PELNI (Persero) will meet qualifying knowledge and skills.

The training programs in 2018 have been divided into several types, including:

1. Orientation Training

Orientation training is held for prospective employees to recognize the scope, functions and duties in the Company's environment. So, they have knowledge, undertanding and basic attitudes to adapt with corporate culture and they are prepared to supporting the ralization of the Company's vision and mission.

2. Technical Training

Technical Training is a training for executive position and staffs with the main organization function is to support core business of the Company, consist of:

- a. Basic Level Training
 - This training must be followed by all of employees to optimally carrying out simple and technical position of their functions and duties based on "value chain" of the Company.
 - These basic training participants are the employees from 15 and 14 positions.
- b. First Level Training
 - This training must be followed by all of the employees to optimally conducting semi – analytical and technical position of their functions and duties based on "value chain" of the Company.
 - These first level training participants are the employees from 13 and 12 positions.



Sumber Daya Manusia

Human Resources

- c. Pelatihan Tingkat Lanjut
 - Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat analisa, teknis, dan berdasarkan *value chain* perusahaan.
 - Peserta pelatihan tingkat lanjut adalah pegawai dengan kelas jabatan 11 dan 10.

3. Diklat Manajerial;

Pelatihan Manajerial diselenggarakan bagi pejabat struktural/fungsional dalam mengembangkan diri dan organisasi agar mampu melaksanakan fungsi dan tugas pokok dari jabatan-jabatan manajerial, yang terdiri dari:

- a. Pelatihan Manajerial Tingkat Muda
Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat muda pada kelas jabatan 9 sampai 8.
- b. Pelatihan Manajerial Tingkat Madya
Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat madya pada kelas jabatan 7 sampai 5.
- c. Pelatihan Manajerial Tingkat Utama
Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat utama pada kelas jabatan 4 sampai 1.

4. Pelatihan Pengayaan

Pelatihan pengayaan bertujuan untuk membekali para pegawai dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap-sikap pegawai agar senantiasa dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan bisnis serta kemajuan teknologi informasi yang menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok pada jabatan yang didudukinya.

- c. Advanced Level Training
 - This training must be followed by all of the employees to optimally conducting semi – analytical and technical position of their functions and duties based on “value chain” of the Company.
 - These first level training participants are the employees from 13 and 12 positions.

3. Managerial Training

Managerial training is held for structural/functional officials to developing themselves and organization in order to perform their functions and duties of these managerial position, consist of:

- a. Beginner Managerial Training
This training must be followed by employees to optimally carrying out their functions and duties of beginner managerial positions from 9 to 8 class positions.
- b. Intermediate Managerial Training
This training must be followed by employees to optimally carrying out their functions and duties of intermediate managerial positions from 7 to 5 class positions.
- c. Advance Managerial Training
This training must be followed by employees to optimally carrying out their functions and duties of main managerial positions from 4 to 1 class positions.

4. Enrichment Training

Enrichment Training aims to give employees with knowledge, understanding, skills and attitudes. So they could anticipate and adjust to the development of business environment and advances of information technology that support the successful implementation of its main functions and duties in each position they occupied.



Sumber Daya Manusia Human Resources

Jenis pelatihan pengayaan dapat berupa lokakarya/*workshop*, seminar, konferensi, simposium, penyuluhan/sosialisasi yang dikemas dalam bentuk *inhouse training* maupun *public training*;

The type of enrichment training could be in the form of workshop, seminars, conferences, symposia, counseling/socialization that packaged in "Inhouse Training" and "Public Training".

5. Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi adalah program pemenuhan sertifikat kompetensi pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau ketentuan *International Maritime Organization* (IMO) yang berlaku dan bersifat *mandatory*. Sertifikasi profesi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Sertifikasi profesi pegawai darat
Sertifikasi pegawai darat adalah pelatihan dengan suatu penetapan yang diberikan oleh organisasi profesional tertentu terhadap pegawai darat untuk menunjukkan bahwa pegawai tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
- b. Sertifikasi profesi pegawai laut
Sertifikasi pegawai laut adalah pelatihan yang harus dilaksanakan oleh pegawai laut merujuk kepada ketentuan dari *Standards of Training, Certification and Watchkeeping* (STCW) sebagai prasyarat untuk dapat berlayar.

5. Professional Certification

Professional certification is a competency fulfillment program of the employee based on the prevailing mandatory of laws and regulations, Government regulations, or International Maritime Organization (IMO) regulations. Professional certification consist of 2 types, namely:

- a. Onshore employee professional certification
Onshore employee professional certification is a training with the determination that given by certain professional organizations to onshore employees to show that those employees are capable to conduct some duties and specific responsibilities
- b. Offshore employee professional certification
Offshore employees training is a training that must be carried out by offshore employees referring to the provisions of "Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW)" as a prerequisite for being able to sail.

6. Pelatihan Purnabakti

Pelatihan Purnabakti adalah pelatihan yang diselenggarakan guna membekali para pegawai yang hendak menjalani pensiun dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mental spiritual serta kewirausahaan untuk menghadapi masa pensiun agar siap dan mampu mandiri serta tetap produktif pada saat menjalani masa pensiunnya.

6. Post-Employee Training

Post-employee training is a training to equip all of employees that will be retired and fulfill them with knowledge, skills, mentally and spiritually attitudes, and also entrepreneurship to be ready facing their pension period independently and productively.

Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan

Sepanjang tahun 2018 PT PELNI (Persero) sudah mengirimkan sebanyak 2.400 orang melaksanakan pengembangan dan pelatihan guna memperkuat kompetensi inti pegawai. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tersebut dapat berupa seminar, *workshop* dan sertifikasi serta pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh perusahaan.

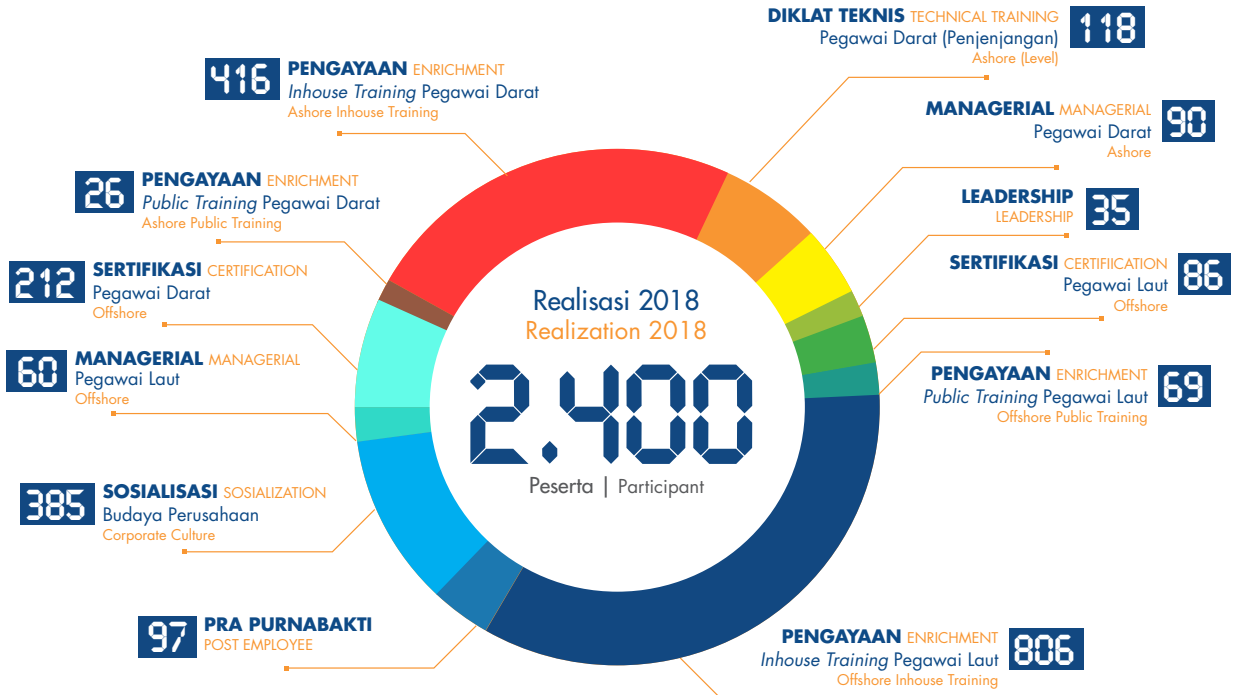
Total Trained Employees

Throughout 2018, PT PELNI (Persero) delegated 2,400 employees to participate the development and training programs strengthen core competency of the employees. These competencies building include seminar, workshop and certification as well as staging trainings provided by the Company.



Sumber Daya Manusia Human Resources

Realisasi Diklat 2018 (Jumlah Pegawai/Peserta) Training Realization 2018 (Total Employee/Participant)



Adapun kegiatan program pelatihan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Training programs conducted during 2018 as follows:

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
A Pegawai Laut Offshore Employee			
A.1	Perwira Kapal Ship Commissioned Officer	Diklat Managerial Perwira Kapal Angkatan II, Tanggal. 6-9 Maret 2018 di Hotel Bahtera Cipayung. Managerial Ship Officers Training II Force, Date March 6-9, 2018 at Cipayung Bahtera Hotel.	20
		Diklat Managerial Perwira Kapal Angkatan III, Tanggal 2-5 Oktober 2018. Managerial Ship Officers III Force, Date October 1-5, 2018.	20
		Diklat Managerial Perwira Kapal Angkatan IV, Tanggal 4-7 Desember 2018. Managerial Ship Officers IV Force, date December 4-7, 2018.	20
		Training of Trainer (TOT) IMO Model Course 6.09, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Tanggal 3-11 April 2018. Training of Trainer (TOT) IMO Model Course 6.90, Marine Transportation Education and Training Center dated April 3-11, 2018.	1
		Revalidasi ANT-1. Revalidation ANT-1.	1



Sumber Daya Manusia Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
A.2	Bintara Kapal Ship Non-commissioned Officer	<i>Electro Technical Officer (ETO)</i> , Tanggal 5 Februari - 23 April 2018 di BP3IP Jakarta. Electro Technical Officer (ETO) Training dated February 5 – April 23, 2018 at Jakarta Merchant Marine Institute.	10
		Diklat <i>Marine High Voltage (MHV)</i> Tanggal 5 Februari - 23 April 2018 di BP3IP Jakarta Marine High Voltage Training (MHV) dated on February 5 – April 23, 2018 at Jakarta Merchant Marine Institute.	10
		Diklat <i>Electro Tecnical Officer (ETO)</i> Pegawai Laut (Listrik) di BP3IP Sunter Jakarta Angkatan IV. Electro Technical Officer Training (ETO) for Onshore employee (Electricity) IV force at Jakarta Merchant Marine Institute, Sunter.	12
		Diklat <i>Marine High Voltage (MHV)</i> Pegawai Laut (Listrik) di BP3IP Sunter Jakarta Angkatan IV. Marine High Voltage (MHV) Training for Offshore employee (electricity) IV Force at Jakarta Merchant Marine Institute, Sunter.	12
		Diklat ETO Peserta 13 Pegawai Laut (Ahli Listrik) Gelombang V di BP3IP Sunter Jakarta. ETO Training for 13 Offshore employees (Electrician) Stages V at Jakarta Merchant institute, Sunter.	13
		Diklat MHV Peserta 13 Pegawai Laut (Ahli Listrik) Gelombang V di BP3IP Sunter Jakarta. MHV Training for 13 Offshore employees (Electrician) Stages V at Jakarta Merchant institute, Sunter.	13
		<i>Updating GMDSS.</i> Updating GMDSS.	1
A.3	Tamtama Kapal Ship Enlisted	<i>Training Sertifikasi Pengelasan Shield Metal Art Welding (SMAW)</i> tanggal 13-18 Agustus 2018 Angkatan I. Shield Metal Art Welding Certification 1 st Force on August 13-18, 2018.	7
A.4	Semua Level pada Bidang P2 (Pelayanan dan Perbekalan Kapal) All Level on P2 Field (Ship Supplies and Services)	Sertifikasi Jaminan Mutu Keamanan Pangan Tanggal 16 Agustus 2018. Food Safety Quality Assurance Certification dated August 16, 2018.	30
		Sertifikasi Jaminan Mutu Keamanan Pangan <i>Batch II</i> Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018. Food Safety Quality Assurance Certification Batch II 2018 dated October 26, 2018	42
		<i>Food Safety Training</i> Tanggal 13-16 Agustus 2018 Food Safety training August 13 – 16, 2018	30
		<i>Food Safety Training Batch II</i> Tanggal 22 - 25 Oktober 2018 Food Safety training Batch II Dated October 22 -25, 2018	42
A.5	Tenaga Kesehatan di Atas Kapal Medical Officers on Board	<i>Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS)</i> , Tanggal 22-26 Januari 2018 di Pro Emergency Cibinong. Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS) dated January 22-26, 2018 at Pro Emergency Cibinong.	10
		<i>Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS)</i> , Tanggal 19-23 Februari 2018 di Pro Emergency Cibinong. Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS) dated February 19-23, 2018 at Pro Emergency Cibinong.	5
		<i>Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS)</i> , Tanggal 16-20 Juli 2018 di Pro Emergency Cibinong. Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS) dated July 16-20, 2018 at Pro Emergency Cibinong.	2
		<i>Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS)</i> , Tanggal 27-31 Agustus 2018 di Pro Emergency Cibinong. Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS) dated August 27-31, 2018 at Pro Emergency Cibinong.	5
		<i>Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS)</i> , Tanggal 17-21 September 2018 di Pro Emergency Cibinong. Basic Trauma Kardiovaskular Life Support (BTCLS) dated September 17-21, 2018 at Pro Emergency Cibinong.	2



Sumber Daya Manusia

Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
A.6	Semua Level Jabatan All Positions Level	Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Change Agent</i> PT PELNI (Persero) - <i>Batch II</i> , Tanggal 12-13 April 2018 di The Grand Hill - Jalan Raya Puncak KM. 84, Cisarua, Tugu Utara, Bogor. Corporate Culture Socialization for Change Agent Team of PT PELNI (Persero) – Batch II dated April 12-13, 2018 at The Grand Hill – Raya Puncak KM.84, Cisarua, Tugu Utara, Bogor.	16
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Change Agent</i> PT PELNI (Persero) - <i>Batch III</i> , Tanggal 7-8 Mei 2018 di The Grand Hill - Jalan Raya Puncak KM. 84, Cisarua, Tugu Utara, Bogor. Corporate Culture Socialization for Change Agent Team of PT PELNI (Persero) – Batch III dated May 7-8, 2018 at The Grand Hill – Raya Puncak KM.84, Cisarua, Tugu Utara, Bogor.	16
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Change Agent</i> PT PELNI (Persero) - <i>Batch IV</i> , Tanggal 11-12 Juli 2018 di The Grand Hill - Jalan Raya Puncak KM. 84, Cisarua, Tugu Utara, Bogor. Corporate Culture Socialization for Change Agent Team of PT PELNI (Persero) – Batch IV dated July 11-12, 2018 at The Grand Hill – Raya Puncak KM.84, Cisarua, Tugu Utara, Bogor.	16
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Change Agent</i> PT PELNI (Persero) - <i>Batch V</i> Tanggal 29-30 Agustus 2018 di The Forest Resort Hotel. Corporate Culture Socialization for Change Agent Team of PT PELNI (Persero) – Batch V dated August 29-30, 2018 at The Forest Resort Hotel.	24
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Change Agent</i> PT PELNI (Persero) - <i>Batch VI</i> , Tanggal 24-25 Oktober 2018 di The Grand Hill - Jalan Raya Puncak KM. 84, Cisarua, Tugu Utara, Bogor. Corporate Culture Socialization for Change Agent Team of PT PELNI (Persero) – Batch VI dated October 24-25, 2018 at The Grand Hill – Raya Puncak KM.84, Cisarua, Tugu Utara, Bogor.	30
		Diklat AFF. AFF Training.	34
		Diklat MEFA. MEFA Training.	25
		Sertifikat BST. Basic Safety Training (BST) Certification.	1
		<i>In House Training Developing Service Communication & Attitude</i> KM. Sangiang 03-04 April 2018. In House Training Developing Service Communication & Attitude KM. Sangiang 03-04 April 2018.	30
		Program Motivasi untuk Pegawai Laut KM. Nggapulu. Motivation Seminar for Motor Ship (KM). Nggapulu Offshore employees	66
		Program Motivasi untuk Pegawai Laut KM Labobar - ESQ Management 26 September 2018. Motivation Seminar for Motor Ship (KM). Labobar offshore employees – ESQ Management September 26, 2018.	111
		Program Motivasi untuk Pegawai Laut KM. AWU - ESQ Management 26 September 2018. Motivation Seminar for Motor Ship (KM). AWU offshore employees – ESQ Management September 26, 2018.	70
		Diklat <i>Developing Service Comunication and Attitude (Hospitality)</i> KM. Bukit raya pada Tanggal 14 - 16 September 2018. Developing Service Comunication and Attitude (Hospitality) Training for (KM). Bukit raya on September 14 – 16, 2018	30
		Diklat Motivasi pegawai Laut (ESQ) KM Pangrango pada Tanggal 2 November 2018 di Makassar. Emotional and Spiritual Quotient Training for M.S Pangrango Offshore employees on November 2, 2018 in Makasar.	37
		Pelatihan Pra Purnabakti untuk 33 Pegawai Laut beserta Pasangan di Hotel Marbella Suites Bandung, 17 - 20 Juli 2018. Pre-Retirement Training for 33 Offshore Employee and their spouse at Marbella Suites Hotel, Bandung July 17-20, 2018.	33
Pelatihan Pra Purnabakti <i>Batch III</i> tahun 2018, pada tanggal 27-30 November 2018 di Bandung. Pre-retirement Training for Batch III in 2018, on November 27-30 2018 in Bandung	30		



Sumber Daya Manusia Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
B	Pegawai Darat Ashore Employee		
B.1	Staf KJ. 15-14 KJ. 15-14 Staff	Diklat Teknis Bidang Administrasi Bisnis Jasa Angkutan Laut Tingkat Dasar Angkatan VI pada Tanggal 29 Oktober - 2 November 2018. Technical Training in the Field of Business Administration for Marine Transport Services at the Basic Level of Class VI on October 29 - November 2, 2018.	38
B.2	Staf KJ. 13-12 KJ. 13-12 Staff	Diklat Teknis Bidang Administrasi Bisnis Jasa Angkutan Laut Tingkat Mula Angkatan VII, 23-27 April 2018 di Hotel Beleza Cipayung Bogor. Technical Training in the Field of Business Administration for Marine Transport Services the first Level of Class VII on October 29 - November 2, 2018.	40
B.3	Staf KJ. 11-10 KJ. 11-10 Staff	Diklat Teknis Bidang Adiministrasi Bisnis Jasa Angkutan laut Tingkat Lanjut Angk. VIII, Hotel Bahtera Cipayung 30 Juli - 3 Agustus 2018. Technical Training in the Field of Business Administration for Marine Transport Services at the advance Level of Class VI on July 30 - August 3, 2018 at Bahtera Hotel, Cipayung.	40
B.4	Supervisor Supervisor	Diklat Managerial Tingkat Muda Angkatan X pada tanggal 17-21 september 2018. First Level Managerial Training X force on September 17-21, 2018.	30
B.5	Manager Manager	Diklat Penjurangan Managerial Tingkat Madya Angkatan X pada Tanggal 12-16 November 2018. Middle Level Managerial Gap Training X Force on November 12-16, 2018.	30
		Sosialisasi Budaya Perusahaan Untuk <i>Change Leader Batch I</i> 25-27 September 2018 Corporate Culture Socialization to Change Leader Batch I on Sepetember 25-27, 2018.	60
		<i>Workshop Risk Management Batch II</i> , Tanggal 24-25 Juli 2018 di Hotel Ibis Harmoni Jakarta. Risk Management Workshop Batch II, at Ibis Harmoni Hotel, Jakarta on JJuly 24-25, 2018.	30
		<i>Workshop Risk Management Batch III</i> , Tanggal 26-27 Juli 2018 di Hotel Ibis Harmoni Jakarta. Risk Management Workshop Batch III, at Ibis Harmoni Hotel, Jakarta on July 26-27, 2018.	30
		<i>Balanced Scorecard Workshop for Manager Level Batch I</i> Tanggal 27-28 Agustus 2018. Balanced Scorecard Workshop for Manager Level Batch I on August 27-28, 2018.	39
		<i>Balanced Scorecard Workshop for Manager Level Batch II</i> Tanggal 3-4 September 2018. Balanced Scorecard Workshop for Manager Level Batch II on September 3-4, 2018.	31
		<i>Behavior Event Interview (BEI) for Recruitment and Selection for Manager Batch III</i> di Hotel Ibis Styles pada Tanggal 10 Oktober 2018. Behaviour Event Interview (BEI) for Recruitment and Selection for Manager Batch III, on Ibis Styles Hotel on October 10, 2018.	13
		<i>Behavior Event Interview (BEI) for Recruitment and Selection for Manager Batch IV</i> di Hotel Ibis Styles pada Tanggal 11 Oktober 2018. Behaviour Event Interview (BEI) for Recruitment and Selection for Manager Batch IV, on Ibis Styles Hotel on October 11, 2018.	11
B.6	Vice President Vice President	Diklat Managerial Tingkat Utama Angkatan VI pada Tanggal 08-12 Oktober 2018. Advanced Level Managerial Training VI Force on October 08-12, 2018.	30
		<i>Self Leadership</i> a.n Ridwan Mandaliko, Dirga Maulana, Niken Sekar Melathi dan Capt. Puji Asmoro pada tanggal 24-25 September 2018. Self Leadership Workshop participated by Ridwan Mandaliko, Dirga Maulana, Niken Sekar Melathi and Capt. Puji Asmoro on September 24-25, 2018.	4
		Pelatihan <i>Business Leader Upskilling for Great Performance</i> pada Tanggal 8-9 November 2018 di hotel Ibis Harmoni Jakarta. Business Leader Upskilling for Great Performance on November 8-9, 2018 at Ibis Hotel, Harmoni, Jakarta	31
		Sosialisasi Budaya Perusahaan Untuk <i>Change Leader Batch II</i> 6 Desember 2018. Corporate Culture Socialization to Change Leader Batch II on December 6, 2018.	90
		<i>Behavior Event Interview (BEI) for Recruitment and Selection for Vice President Batch I</i> di Hotel Ibis Styles pada Tanggal 13 September 2018. Behaviour Event Interview (BEI) for Recruitment and Selection for Vice President Batch I, on Ibis Styles Hotel on on September 13, 2018.	12
		<i>Behavior Event Interview (BEI) for Recruitment and Selection for Vice President Batch II</i> di Hotel Ibis Styles pada Tanggal 14 September 2018. Behaviour Event Interview (BEI) for Recruitment and Selection for Vice President Batch II, on Ibis Styles Hotel on on September 14, 2018.	10



Sumber Daya Manusia

Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
B.7	Level Staff-Supervisor Staff-Supervisor Level	Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Chance Agent</i> PT PELNI (Persero) di Jambu Luwuk Resort-Ciawi Bogor Tanggal 21-22 Maret 2018. Corporate Culture Socialization to Chance Agent Team of PT PELNI (Persero) at Jambu Luwuk Resort-Ciawi, Bogor on March 21-22, 2018	39
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Chance Agent</i> PT PELNI (Persero) - Batch II di The Grand Hill, Cisarua, Tugu Utara, Bogor Tanggal 12-13 April 2018. Corporate Culture Socialization to Chance Agent Team of PT PELNI (Persero) - Batch II at at The Grand Hill, Cisarua, Tugu Utara, Bogor on April 12-13, 2018 .	24
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Chance Agent</i> PT PELNI (Persero) - Batch III di The Grand Hill, Cisarua, Tugu Utara, Bogor Tanggal 7-8 Mei 2018. Corporate Culture Socialization to Chance Agent Team of PT PELNI (Persero) - Batch III at at The Grand Hill, Cisarua, Tugu Utara, Bogor on May 7-8, 2018.	23
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Chance Agent</i> PT PELNI (Persero) - Batch IV di The Grand Hill, Cisarua, Tugu Utara, Bogor Tanggal 11-12 Juli 2018. Corporate Culture Socialization to Chance Agent Team of PT PELNI (Persero) - Batch IV at at The Grand Hill, Cisarua, Tugu Utara, Bogor on July 11-12, 2018.	21
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Chance Agent</i> PT PELNI (Persero) - Batch V The Forest Resort Hotel Tanggal 29-30 Agustus 2018. Corporate Culture Socialization to Chance Agent Team of PT PELNI (Persero) - Batch V at at The Forest Resort Hotel on August 29-30, 2018.	14
		Sosialisasi Budaya Perusahaan untuk Tim <i>Chance Agent</i> PT PELNI (Persero) - Batch VI The Grand Hill, Cisarua, Tugu Utara, Bogor Tanggal 24-25 Oktober 2018. Corporate Culture Socialization to Chance Agent Team of PT PELNI (Persero) - Batch VI at at The Grand Hill, Cisarua, Tugu Utara, Bogor on October 24-25, 2018.	12
B.8	Seluruh Level Jabatan All Position Levels	Pelatihan Ahli K3 Umum, Tanggal 26 Februari - 10 Maret 2018 di Jakarta. General OSH Experts Training, on February 26 - March 10, on Jakarta.	3
		CSO-ISPS Code di Hotel Grand Diara Cisarua Bogor, BKI, 28 Februari - 2 Maret 2018. CSO - ISPS Code at Grand Diara Hotel, Cisarua, Bogor, BKI, on February 28 - March 2, 2018.	1
		Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah di PPM Managemen 24 - 29 September 2018. Government's Procurement Certification on PPM Management on September 24-29, 2018.	3
		Training CCNA Fast Track a/n Wasis Zakaria & Raihan Indra Putra pada Tanggal 3-7 September 2018. CCNA Fast Track Training participated by Wasis Zakaria & Raihan Indra Putra on September 3-7, 2018.	2
		Training TOGAF9 a/n Nelson & Maria Ulfah pada tanggal 3-7 September 2018. TOGAF9 Training participated by Nelson & Maria Ulfah on September 3-7, 2018.	2
		Training System Analysis Design Software Processes, UML and Design Pattern a/n Martin Marolop Panjaitan dan Ardy Wishdarianto pada Tanggal 3-5 September 2018. Analysis Design Software Processes System, UML and Design Pattern training participated by Martin Marolop Panjaitan and Ardy Wishdarianto on September 3-5, 2018.	2
		Training mastering IT project management (PMBOK V6 & IEEE Standards) a/n Rachmadi, Akhmad Fauzi, Prasidya Nur Windraya pada tanggal 4-7 September 2018. Mastering IT Project Management Training (PMBOK V6 & IEEE Standards) participated by Rachmadi, Akhmad Fauzi, Prasidya Nur Windraya on September 4-7, 2018.	3
		Pelatihan Ahli Kepabeanaan PPJK pada Tanggal 13 Agustus - 26 Oktober 2018 a/n Jeffri Firmansyah & Amrulloh. PPJK Customs Expert Training on August 13 - October 26, 2018 participated by Jeffri Firmansyah & Amrulloh.	2
		COBIT5 Foundation a/n Chairil Hidayar & Retno Sawitri Isnain pada Tanggal 17 - 19 September 2018. COBIT5 Foundation participated by Chairil & Retno Sawitri Isnain on September 17 - 19, 2018.	2
		Pelatihan First Aid Sertifikasi Kemnaker (P3K) a/n Heliana P Sinaga, Lili, & Ali Asman pada tanggal 12 -14 september 2018. Ministry of Labor First Aid Training Certification (P3K) participated by Heliana P Sinaga, Lili & Ali Asman on September 12 - 14, 2018	3
		System Analysis & Design: Software Process, UML and Design Pattern, Tanggal 3-5 September 2018. Analysis & Design System: Software Process, UML and Design Pattern, on September 3-5, 2018.	2
		CCNA Fast Track, Tanggal 29 Oktober - 2 November 2018. CCNA Fast Track, on October 29 - November 2, 2018.	2
		Computer Hacking Forensic Investigator V9 X a/n Chandra Mahendra pada Tanggal 12 - 16 November 2018. Computer Hacking Forensic Investigator V9 X participated by Candra Mahendra on November 12-16, 2018	1



Sumber Daya Manusia Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
		<i>Training business analysis foundation a/n</i> Asri Nur Maulina dan Milani Winangga pada Tanggal 07 - 09 November 2018. Business Analysis Foundation Training participated by Asri Nur Maulina and Milani Winangga on November 07 - 09, 2018	2
		<i>Mastering Android UI Design</i> , Tanggal 3-5 Desember 2018. Mastering Android UI Design, December 3-5, 2018.	3
		Pelatihan " <i>Designated Person Ashore</i> " a/n Aprisman Dedi, Wiwik Widarty, Heny Martini, Dewi Sartika, Dan Imas Rina pada tanggal 17 - 19 Oktober 2018. "Designated Person Ashore" Training participated by Aprisman Dedi, Wiwik Widarty, Heny Martini, Dewi Sartika, and Imas Rina on October 17-19 2018.	5
		Diklat Internal Auditor ISM - CODE pada Tanggal 1-3 Oktober 2018 di PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Internal Auditor ISM - Code Training on October 1-3, 2018 on PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).	26
		Internal Auditor ISPS - CODE pada Tanggal 3-5 Oktober 2018 di PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Internal Auditor ISM - Code Training on October 3 - 5, 2018 on PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).	20
		<i>Professional IT Audit & Governance: A Practical Approach</i> , Tanggal 10-13 Desember 2018. IT Audit & Governance professional: A Practical Approach, on December 10-13, 2018.	2
		Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Batch I</i> di Kantor Pusat PT PELNI (Persero) 28 Maret 2018. Procurement Planning Technical Guidance, Batch I at Head Office of PT PELNI (Persero) on March 28, 2018.	39
		Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Batch II</i> di Kantor Pusat PT PELNI (Persero) 29 Maret 2018. Procurement Planning Technical Guidance, Batch II at Head Office of PT PELNI (Persero) on March 29, 2018.	38
		<i>Training For Trainer</i> Sosialisasi Budaya Kerja Perusahaan PT PELNI (Persero), 20 Orang Pegawai, Hotel All Season Jakarta 9 Mei 2018. Training for Corporate Culture Socialization Trainer of PT PELNI (Persero), 20 Employees, at All Season Hotel, Jakarta, on May 09, 2018.	19
		<i>Sharing Session "Membangun Profesionalisme Pegawai PT. PELNI (Persero)"</i> , Auditorium Kantor Pusat PT PELNI (Persero) 3 Mei 2018. Sharing Session "Building Employee Professionalism", Head Office Auditorium of PT PELNI (Persero), on May 3, 2018.	115
		<i>Writing Skill Training Batch I</i> - Hotel Yello Harmoni, 11-12 Juli 2018. Writing Skill Training Batch I - Yello Harmoni Hotel, July 11-12, 2018.	25
		<i>Writing Skill Training Batch II</i> - Hotel All Season Gajahmada Jakarta, 25-26 Juli 2018. Writing Skill Training Batch II - All Season Gajahmada, Jakarta, July 25-26, 2018.	25
		Diklat <i>Integrating Balanced Scorecard & Risk Management</i> di Hotel Yello Harmoni pada tanggal 5-6 September 2018. Integrating Balanced Scorecard & Risk Management Training on Yello Harmoni Hotel on September 5-6, 2018.	24
		<i>Integrating Balanced Scorecard & Risk Management</i> di Auditorium PT PELNI (Persero) 15 Agustus 2018. Integrating Balanced Scorecard & Risk Management Training on Head Office Auditorium of PT PELNI (Persero) on August 15, 2018.	82
		Diklat <i>Infographics Design With PowerPoint</i> pada Tanggal 24 September 2018. Infographics Design with PowerPoint Training on September 24, 2018.	25
		Sosialisasi dan Simulasi Gempa Bumi Kuat di Gedung Bertingkat pada Tanggal 28 September 2018 di Auditorium PT.PELNI (Persero). Strong Earthquake in a Multi-storey Building Socialization and Simulation on September 28, 2018 at Auditorium of PT PELNI (Persero).	61
		<i>Training sales development program</i> pada Tanggal 26 - 30 November 2018 di Hotel bahtera Cipayung, Bogor. Sales Development Training Program on November 26-30, 2018 at Bahtera Hotel, Cipayung, Bogor.	34
		Sosialisasi dan <i>Sharing Session</i> terkait Transformasi Digital, Tanggal 3 Desember 2018 di Auditorium Kantor Pusat PT PELNI (Persero). Socialization and Sharing Session related to Digital Transformation on December 3, 2018 at Head Office Auditorium of PT PELNI (Persero).	143
		<i>Workshop</i> Implementasi PSAK 24 (Revisi 2014) tentang Imbalan Kerja serta Teknik Perhitungan dan Manfaat Aktuarial, Tgl. 18-19 Januari 2018 di Jakarta. PSAK 24 (Revised 2014) Implementation Workshop regarding Employee, Calculation and Benefits of Actuary Techniques, Date January 18-19, 2018 in Jakarta.	2



Sumber Daya Manusia

Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
		<i>Mastering the Art and Science of Project Execution</i> , Tanggal 23-25 Januari 2018 Mastering the Art and Science of Project Execution, on January 23-25, 2018	2
		Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan, Tanggal 19-23 Februari 2018 di Jakarta. Security Management System Socialization, on February 19-23, 2018 in Jakarta.	2
		<i>Executive Education & Strategic Discussion Forum "Optimizing The Future Role of Corporate Secretary"</i> , Tanggal 26-27 Maret 2018 di Jakarta. "Optimizing The Future Role of Corporate Secretary" Executive Education & Strategic Discussion Forum, on March 26-27, 2018 in Jakarta.	2
		<i>Workshop Penanganan Perkara di MK</i> , tgl 28-29 Maret 2018. Case Handling Workshop on MK, March 28-29, 2018.	2
		Diklat pelatihan Lokakarya Pariwisata Indonesia tanggal 7 Maret 2018 di Jakarta. Indonesia Tourism Workshop on March 7, 2018, in Jakarta.	3
		Diklat <i>Key Performance Indicators</i> , PPM Management, Peserta Bhakti Fahdiansyah, 14-15 Maret 2018. Key Performance Indicators, PPM Management, participated by Bhakti Fahdiansyah, on March 14 - 15, 2018.	1
		<i>Sharing Singapore's Urban Transportation Strategy & Blueprint</i> 26-30 Maret 2018 Singapore's Urban Transportation Strategy & Blueprint Sharing on March 26 - 30, 2018.	2
		<i>Analisis Laporan Keuangan di Graha Akuntan</i> 17-18 April 2018. Financial Statements Analysis on Graha Akuntan, April 17 - 18, 2018.	4
		Seminar Quo Vadis BUMN, 18-20 April 2018. Quo Vadis State-owned Enterprises Seminar, April 18 - 20, 2018.	2
		<i>Workshop Merger Akuisisi dan Holdingisasi</i> pada Tanggal 11-12 April 2018. Acquisition, Holding and Merger on April 11-12, 2018.	1
		<i>Workshop Optimalisasi Penerapan Sistem K3 dalam Proyek Konstruksi BUMN Karya dan Anak Perusahaan</i> pada tanggal 12-13 April 2018. "Optimizing the Implementation of OSH in State-owned Enterprises and Subsidiaries Construction Projects" Workshop, on April 12-13, 2018.	2
		<i>Workshop and Discussion "Penggunaan Laporan Auditor Internal"</i> sebagai alat bukti di Pengadilan pada Tanggal 7 April 2018. "Use of Internal Auditor Reports" as an evidence in the Court Workshop and Discussion on April 07, 2018.	1
		<i>Seminar & 3rd Gathering Indonesian Logistics Community</i> , Pondok Indah Golf, 6 April 2018. Seminar & 3 rd Gathering Indonesian Logistic Community, at Pondok Indah Golf, Jakarta on April 06, 2018.	1
		<i>Workshop Process & SOP Excellence Through Business Process Mapping & SOP Development</i> , Hotel Grand Mercure Jakarta, 11-12 April 2018. Process and SOP Excellence Through Business Process Mapping & SOP Development, at Grand Mercure Hotel, Jakarta on April 12-11, 2018.	1
		Pelatihan Ahli K3 Umum, ISC Learning Center, 16-28 April 2018. General OSH Expert training, on ISC Learning Center, on April 16-28, 2018.	2
		<i>Building Winning Sales Force in Unpredictable Markets</i> . Building Winning Sales Force in Unpredictable Markets.	3
		<i>Workshop Strategi Media Engagement di Era Ekosistem PR yang Baru</i> - 18-20 Juli 2018 - Ditto Pappilanda. Media Engagement Strategy in New-Ecosystem PR Era Workshop, on July 18-20, 2018 - Ditta Pappilanda .	1
		<i>Workshop Strategic Briefing on BUMN Network to China</i> a/n Andi Samsul Hadi Tanggal 7-12 Mei 2018. Strategic Briefing on State-owned Enterprises Network to China Workshop participated by Andi Samsul Hadi on May 7-12, 2018.	1
		<i>Workshop 8 test of organization structure effectiveness</i> a/n Syarif Hidayatullah pada Tanggal 14-15 Agustus 2018. 8 Tests of Organization Structure Effectiveness Workshop participated by Syarif Hidayatullah, on August 14 - 15, 2018.	1
		<i>Workshop Optimalisasi penerapan standar penilaian assessment GCG dengan pendekatan substantif</i> di BUMN dan anak perusahaan a/n Tenry Ita Isviyana pada Tanggal 09-10 Agustus 2018. Optimizing the Implementation standard of GCG Assessment by Substantive Approach against State-owned Enterprises and Subsidiaries Workshop participated by Tenry Ita Isviyana on August 09-10, 2018 .	1
		<i>Workshop sosialisasi dan bedah pasal Perpres No.16 a/n sdr. Alamsyah, Cahya Widi S, AAN Widyaningrum</i> pada Tanggal 01-03 Agustus 2018. President Regulation Article No.16 Socialization and Breakdowning participated by Alamsyah, Cahya Widi S, AAN Widyaningrum, on August 01-03, 2018.	4



Sumber Daya Manusia Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
		<i>Training Effective Communication & Lobbying a/n Adriana Asianna Sihite</i> pada Tanggal 27 - 29 Agustus 2018. Effective Communication & Lobbying Training participated by Adriana Asianna Sihite on August 27-29, 2018.	1
		Pelatihan <i>Strategic Tools a/n Tatang R Dasuki & Otto V.M</i> pada Tanggal 12-14 September 2018. Strategic Tools Training participated by Tatang R Dasuki & Otto V.M, on September 12-14, 2018.	2
		Pelatihan <i>Asset Management a/n Niken Sekar Melathi & Galih Pinardi</i> pada Tanggal 20-21 September 2018. Strategic Tools Training participated by Tatang R Dasuki & Otto V.M, on September 12-14, 2018	2
		<i>Training Organization Development a/n Syarif Hidayatullah & Refri Endinatama</i> pada Tanggal 24-25 September 2018. Strategic Tools Training participated by Tatang R Dasuki & Otto V.M, on September 12-14, 2018.	2
		Pelatihan <i>Membangun Relasi dengan Media bagi BUMN a/n Idayu Adi Rahajeng</i> pada Tanggal 27-28 September 2018. State-owned Enterprises Relation Expanding with Media Training, participated by Idayu Adi Rahajeng on September 27-28, 2018.	1
		Pelatihan <i>Mini MBA a/n Muhammad Hasan</i> pada Tanggal 17-19 September 2018. Mini Master of Business Administration Training participated by Muhammad Hasan, on September 17-19, 2018.	1
		Pelatihan <i>Humanizing Technology in Managing Tomorrow People a/n Capt. Slamet Wahyono, Mardiyanto dan Christina Devyanti</i> pada Tanggal 16-19 September 2018. Humanizing Technology in Managing Tomorrow People participated by Capt. Slamet Wahyono, Mardiyanto and Christina Devyanti, on September 16-19, 2018.	3
		<i>Training HCMC Modul 2: Acquisition and Develop the Right Employee</i> pada Tanggal 10-12 Oktober 2018 an Lanlan Ery Cahya. HCMC Module 2 Training: Acquisition and Developing the Right Employee, on October 10-12, 2018 participated by Lanlan Ery Cahya.	1
		<i>Training SPSE</i> pada Tanggal 13 - 14 November 2018 a/n Muhammad Luqman Al Hakim, Arif Firmansyah dan Anza Ansori. SPSE Training on November 13-14, 2018 participated by Muhammad Luqman Al-Hakim, Arif Firmansyah and Anza Ansori.	3
		<i>Training Talent 360 Valuable Practices from Industry Leaders in Encountering Toughest Business Challenges</i> pada Tanggal 12 Desember 2018 a.n Yuanita Reviyanti dan Lanlan Ery Cahya. Talent 360 Valuable Practices from Industry Leaders in Encountering Toughest Business Challenges Training, on December 12, 2018 participated by Yuanita Reviyanti and Lanian Ery Cahya.	2
		Seminar <i>THE 13th SEMINAR HR EXPO 2018</i> pada Tanggal 12-13 Desember 2018 a.n Slamet Wahyono dan Junarto. The 13 th SEMINAR HR EXPO 2018 on December 12-13, 2018 participated by Slamet Wahyono and Junarto.	2
		<i>International Certification in Data Center Infrastructure Foundation : Practical and Exam Prepparation Approach</i> , Tanggal 3-5 Desember 2018. International Certification in Data Center Infrastructure Foundation: Practical and Exam Preparation Approach, on December 3-5, 2018.	2
		<i>Workshop Aspek Hukum dan fungsi BUMN</i> , Tanggal 29-30 November 2018. Law aspect and State-owned Enterprises Function Workshop, on November 29-30, 2018.	2
		<i>ICLOS & Question of Artificial Island Beyond National Jurisdiction</i> , Tanggal 21-22 November 2018. ICLOS & Question of Artificial Island Beyond National Jurisdiction, on November 21-22, 2018.	1
		Seminar <i>Nasional Pajak BUMN</i> , Tanggal 19-22 Desember 2018 di Bali. National Taxes of State-owned Enterprises Seminar, on December 19-22, 2018 in Bali.	3
		Pelatihan <i>Pra Purnabakti Batch II (Pegawai Darat)</i> tahun 2018 Tanggal 16-19 Oktober 2018 di Haris Hotel Bandung. Pre-Retirement Training Batch II (Ashore Employee) 2018, on October 16-19, 2018 at Haris Hotel, Bandung.	34

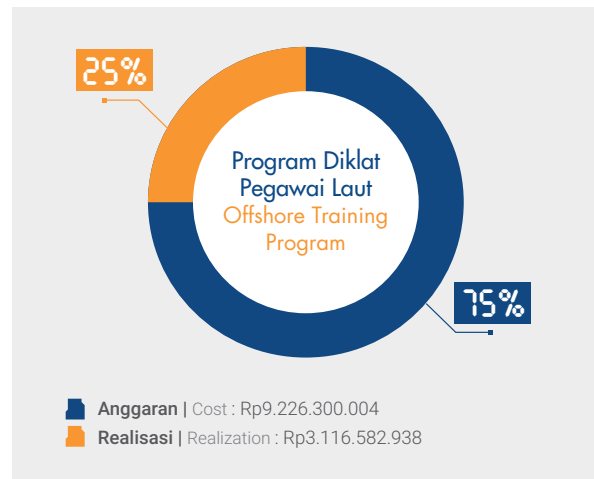
Sumber Daya Manusia Human Resources

Biaya pengembangan kompetensi Pegawai

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2018 untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan, seminar, *workshop*, sertifikasi dan beasiswa untuk pegawai laut dan darat adalah sebesar Rp9.537.357.793.

Employee Competency Development Budget

The Company spent the cost to implement competency development activities through education, training, seminar, workshop, certification and scholarship for offshore and onshore employees in 2018 was Rp9.537.357.793.



REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN SDM

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas pegawai terhadap Perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan telah menetapkan remunerasi pegawai yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja. Pemberian remunerasi pegawai Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait lainnya.

EMPLOYEE REMUNERATION AND WELFARE

To raise motivation and loyalty of the employee in the Company and to improve the employee's welfare, the Company has stipulated employee remuneration based on performance assessment result. The employee remuneration package has also complied with prevailing Laws and regulations, including Provincial Minimum Wage and Ministry of Man Power and Transmigration regulation.

Komponen remunerasi yang diberikan kepada pegawai Perseroan, antara lain gaji pokok, insentif prestasi serta berbagai tunjangan dan fasilitas. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 09.28/02/SK/HKO.01/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengupahan di Lingkungan PT PELNI (Persero), termasuk:

Remuneration component given is such as salary, performance incentives, welfare and other facilities. This is accordance with Decree No. 09.28/02/SK/HKO.01/2018 dated September 28, 2018 regarding payment:

1. Gaji Pokok;
2. Insentif Prestasi;
3. Tunjangan Tetap;
4. Tunjangan Struktural;
5. Tunjangan Fungsional;
6. Tunjangan Komando;
7. Tunjangan Profesi;
8. Tunjangan Telekomunikasi;
9. Tunjangan Perumahan; dan
10. Premi Tetap.

1. Basic salary;
2. Performance Incentives;
3. Permanent Benefits;
4. Structural Allowances;
5. Functional Allowances;
6. Command Benefits;
7. Professional Allowance;
8. Telecommunications Allowances;
9. Housing Allowances; and
10. Fixed Premium.



Sumber Daya Manusia Human Resources

Perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawai, antara lain:

1. Tunjangan Struktural diberikan kepada pegawai darat berdasarkan Jabatan, biasanya jabatan yang dalam rentang kelas jabatan 7 sampai kelas jabatan 2.
2. Tunjangan Komando diberikan kepada pegawai laut berdasarkan Jabatan dan tipe kapal.
 - a. Nakhoda dari tipe kapal 500 sampai dengan 2000.
 - b. KKM dari tipe kapal 500 sampai dengan 2000.
 - c. Mualim I dari tipe kapal 500 sampai dengan 2000.
 - d. Masinis I Sr dari tipe kapal 500 sampai dengan 2000.
3. Tunjangan Profesi diberikan kepada pegawai laut yang menjabat sebagai Dokter Kapal.
4. Tunjangan Telekomunikasi diberikan kepada pegawai:
 - a. Darat : Mulai dari Jabatan Kepala, Vice President, General Manager, Pengawas, Manager sampai Kepala Urusan.
 - b. Laut : Mulai dari Jabatan Nakhoda, KKM dan Mualim
5. Tunjangan Perumahan diberikan kepada pegawai kantor pusat berdasarkan Jabatan, biasanya jabatan yang dalam rantang kelas jabatan 7 sampai kelas jabatan 2 mulai dari Kepala, Vice President, Pengawas dan Manager Kantor Pusat.
6. Premi tetap awak kapal diberikan kepada pegawai laut yang berlayar. Pemberian premi berdasarkan jabatan yang diemban dan berdasarkan tipe kapal.
7. Pegawai yang menjabat sebagai Tim pendukung kinerja Direksi mendapat tambahan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan jabatan.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh pegawai organik PT PELNI (Persero), agar dapat menjamin kesejahteraan pegawai pada saat memasuki usia pensiun. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dana Pensiun PELNI (DPP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Adapun DPP diperuntukkan bagi pegawai organik yang bergabung/masuk sampai dengan tahun 2006, sedangkan DPLK diperuntukkan bagi pegawai organik yang bergabung dari tahun 2007 dan seterusnya.

The allowances given to the employees, among others:

1. Structural Allowances given to onshore employees based on Position, usually in the 7th up to 2nd position grades.
2. Command allowances given to employees based on positions and types of marine vessels.
 - a. The captain of the type of 500 to 2000 ships.
 - b. Chief engine room of types of 500 to 2000 ships.
 - c. First Deck Officer of type of 500 to 2000 ships.
 - d. Engineer I Sr of types of ships 500 to 2000.
3. Professional Allowances given to offshore employees who serve as Ship Doctors.
4. Telecommunication allowances provided to:
 - a. Onshore: Head, Vice President, General Manager, Supervisor, Manager and Operational Manager.
 - b. Offshore: Captain, Chief engine room and Engineer.
5. Housing Allowances given to employees in the head office based on Position, for 7th to 2nd position grades starting from Head, Vice President, Supervisor and Manager in Head Office.
6. The fixed premium given to offshore employees on board. Premium allocations based on positions and the type of ship.
7. Employees who serve as the performance support team of the Board of Directors receive additional benefits, the figures based on their position.

In addition, the Company also provided pension program for all organic employees of PT PELNI (Persero) to guarantee employee welfare when entering pension age. This program is in cooperation with PELNI Pension Funds (DPP) and Financial Institution Pension Funds (DPLK). PELNI Pension Funds is dedicated for organic employees who joined/ was hired up to 2006. However, DPLK is provided for organic employees joining since 2007 and onwards.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Perusahaan terus-menerus berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian fasilitas kepegawaian, antara lain:

1. Fasilitas pengobatan berdasarkan status kepegawaian:
 - a. Organik: Pegawai dan anggota keluarga (Istri dan 3 anak dalam batas umur 25 tahun) dapat mendapat pengobatan di RS PELNI dengan prosedur melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai data BPJS Kesehatan pegawai tersebut. Bagi pegawai dan anggota keluarga yang mengalami sakit tertentu, yaitu: jantung, kanker, paru-paru dan diabetes, maka dapat langsung berobat ke RS PELNI dengan Surat Jaminan dari Kantor Pusat.
 - b. Non Organik: Pegawai non organik berhak mendapatkan fasilitas pengobatan sebagaimana halnya yang diberikan kepada pegawai organik, namun terbatas pada diri pegawai saja (tidak termasuk anggota keluarga).
2. *Medical Check Up* (MCU), MCU dapat dilakukan oleh pegawai laut Organik maupun Non Organik sebagai syarat berlayar.
3. General Check Up.
 - a. Pegawai jabatan Staf/Kepala Terminal Point dapat melakukan GCU setiap 2 (dua) tahun sekali setelah 40 Tahun.
 - b. Pegawai jabatan *Supervisor*/Kepala Urusan ke atas dapat melakukan GCU setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Program Pensiun.
 - a. Organik : Pegawai Organik sebelum tahun 2007 mendapat Program Pensiun Manfaat Pasti melalui Dana Pensiun PELNI (DPP) sedangkan pegawai Organik tahun 2007 ke atas mendapat Program Pensiun Iuran Pasti melalui DPLK BRI. Bagi pegawai Organik sebelum tahun 2007 ingin mendaftarkan diri menjadi anggota program DPLK BRI, maka dapat mengikuti program tersebut dengan dipotong dari gaji pegawai sejumlah iuran yang disepakati.
 - b. Non Organik : Pegawai Non Organik tidak mendapatkan fasilitas dana pensiun.

The company continuously improves employee welfare through the provision of staffing facilities, among others:

1. Medical facility based on employment status:
 - a. Organic employees and their families (wife and 3 children on average 25 years) could get treatment from PELNI hospital (RS PELNI) through First Level Health facility according to their health insurance (BPJS kesehatan) data. For employees and family members who experience certain illnesses, namely: heart, cancer, lung and diabetes, then they can immediately go to PELNI Hospital with a Covering Letter from Head Office.
 - b. Non Organic: Non-organic employees have the right to get medical facilities as well as organic employees, but only covering Non-organic employees itself (not including family members).
2. Medical Check Up (MCU), MCU can be organized by permanent or non permanent - offshore employee for sailing requirement.
3. General Check Up.
 - a. Staff / Head of Terminal Points positions can get General Check Up (GCU) every 2 (two) years after exceeding 40 years old.
 - b. Supervisor / Operational manager can get General Check Up (GCU) once a year.
4. Pension Program.
 - a. Permanent : Permanent employees before 2017 can get the defined-benefits pension program through pension funds of PELNI (DPP). Meanwhile the Organic employees in and after 2007 received a Defined-Benefits Pension Program through BRI DPLK. For Organic employees before 2007 want to register as members of the BRI DPLK program, so they can take part in the program by deducting from the salary of an agreed number.
 - b. Non permanent : Non permanent employees do not receive a pension facility.



Sumber Daya Manusia Human Resources

5. BPJS Kesehatan: *Social Security Administrator*. Pegawai Organik maupun Non Organik berhak mendapat BPJS Kesehatan meliputi Istri dan Anak dalam batas usia 21 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 25 tahun apabila anak masih kuliah, belum menikah dan belum bekerja. Untuk penggolongan kelas dalam BPJS Kesehatan, pegawai organik memakai golongan sedangkan untuk pegawai Non Organik berdasarkan Upah.

SISTEM REWARDS AND PUNISHMENT PT PELNI (PERSERO)

Sebagai bagian dari sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan *Merit System* yang diterapkan oleh Perseroan, pengelolaan SDM juga dilengkapi oleh mekanisme *Reward and Punishment* di mana setiap pegawai yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan tingkat capaian dan, sebaliknya, bagi para pelaku pelanggaran yang terbukti dalam mekanisme yang sah, akan dijatuhkan hukuman.

Pada tahun 2018, PELNI memberikan penghargaan dedikasi kerja 30 tahun, 25 tahun dan 16 tahun dan 8 tahun kepada para pegawai di seluruh entitas kantor pusat, kantor cabang dan unit usaha Perseroan lainnya serta menjatuhkan 46 sanksi disiplin, dengan rincian sebagai berikut:

Penghargaan Pegawai PT PELNI (Persero) 2018

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) mengenai penghargaan yang diberikan kepada pegawai, maka jumlah pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan masa kerja dan tertuang dalam SK No: 04.27/01/SK/HKO.01/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja 30 tahun, 25 tahun, 16 tahun dan 8 tahun adalah berikut ini:

5. Health and Social Security Administrator (BPJS Kesehatan). Organic and non-organic employees have the right to get health and social security (BPJS Kesehatan) covering their wives and children on average 21 years old and can be extended to the age of 25 years if the child is still in college, unmarried and not working. For class classification in Social Security Administrator (BPJS Ketenagakerjaan), organic employees use leveling while for Non Organic employees based on Wages.

PT PELNI (PERSERO) REWARD AND PUNISHMENT SYSTEM

As part of performance-based HR management system and Merit System implemented in the Company, the HR management is also supported by Reward and Punishment mechanism where every outstanding employees will receive reward based on achievement, and also committed violation will be punished under legal mechanism.

In 2018, PELNI had awarded working dedication for 30, 25, 16 and 8 years of tenure in head office, branches and other business units and administered 42 discipline sanctions with detailed explanation as follows:

PT PELNI (Persero) Employee Reward 2018

According to Joint Working Agreement between PT PELNI (Persero) and PT PELNI (Persero) Workers Union on Employee Reward, total employees who received working period reward and stipulated in Decree Number SK No: 04.27/01/SK/HKO.01/2018 dated April 24, 2018 regarding Reward for 30, 25, 16, and 8 years of tenure period as follows:



Sumber Daya Manusia

Human Resources

No	Penghargaan Award	Pusat Head Office	Cabang Branch Office	ABK Crew	SBU SBU	Anak Perusahaan Subsidiaries	Jumlah Total
1	30 Tahun 30 Years	11	11	14	3	29	68
2	25 Tahun 25 Years	23	39	10	3	48	123
3	16 Tahun 16 Years	19	34	8	1	10	72
3	08 Tahun 08 Years	50	6	-	2	-	58

Sanksi Disiplin Pegawai PT PELNI (Persero) 2018

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) tentang pemberian sanksi disiplin untuk pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka berikut ini merupakan jumlah pemberian hukuman disiplin yang diberikan pegawai PT PELNI (Persero):

PT PELNI (Persero) Employee Discipline Sanction in 2018

According to Joint Working Agreement between PT PELNI (Persero) and PT PELNI (Persero) Workers Union regarding discipline sanction administration for employees who violates regulation that stipulated by regulations of the Company. Based on this provision, total discipline sanction for employees of PT PELNI (Persero) as follows:

No	Jenis Hukuman Type of Punishment	Pegawai Employee		Jumlah Total
		Darat Ashore	Laut Offshore	
1	Teguran Tertulis Written Warning	1	8	9
2	Peringatan Tertulis Written Warning	-	2	2
3	Peringatan Keras Strong Warning	1	12	13
4	Peringatan Keras Terakhir The Last Strong Warning	2	7	9
5	Skorsing Suspension	3	7	10
6	PHK Termination	2	1	3
Jumlah Total		9	37	46



Teknologi Informasi

Information Technology

PENDAHULUAN

Divisi Teknologi informasi adalah unit kerja pengelola teknologi informasi di PT PELNI (Persero) yang berada dibawah Direktur SDM & Umum. Berdasarkan No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017, Divisi Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja kesiapan pakai (*serviceability performance*) fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Teknologi Informasi memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana kerja (jangka panjang, menengah dan pendek) dan program kerja perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi;
2. Menyiapkan konsep peraturan kebijakan dan sistem prosedur dalam pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi yang menjamin dapat dicapainya kinerja kesiapan pakai (*serviceability performance*) dan kehandalan (*reliability performance*) fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal;
3. Menyenggarakan kegiatan penyediaan, perawatan, dan perbaikan untuk penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memantau, mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi di Kantor Pusat, Kapal, Kantor Cabang, dan SBU;
5. Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi;
6. Menyiapkan laporan berkala dan atau laporan khusus kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat (*hardware & software*) Teknologi Informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INTRODUCTION

Information technology division is a work unit of the Company that manages information through technology under supervised the Director of HR & General and has the functions to formulate policy, to implement, to review and to control the provision and preparation – the reliability of information technology facilities both software and hardware in accordance with the prevailing regulation based on No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017. So, serviceability performance of optimal facilities and information technology devices can be achieved. In performing its functions, Information technology division has the following main duties:

1. Preparing work plans (long, medium and short term) and work programs of the Company related to the management of providing and preparing the reliability of information technology facilities, equipment and devices.
2. Preparing regulatory and procedures to manage the provision of information – ready to use – and the reliability of facilities, equipment and information technology devices both software and hardware which guarantees serviceability and reliability performance of facilities, equipment and devices for optimal information technology of the Company.
3. Organizing the activities of providing, maintaining, and improving the preparation and the reliability of facilities, equipment and devices (*hardware & software*) of information technology in accordance with applicable regulations;
4. Monitoring, coordinating and controlling the provision of information – ready to use – and the reliability of facilities, equipment and information technology devices both software and hardware at the Head Office, Ships, Branch Offices and SBU;
5. Conducting risk management and mitigation for the provision of information – ready to use – and the reliability of facilities, equipment and information technology both software and hardware.
6. Preparing periodic reports and / or special reports on the provision of information – ready to use – and the reliability of facilities, equipment and information technology both software and hardware in accordance with applicable regulations.



Teknologi Informasi Information Technology

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Divisi Teknologi Informasi dalam menjalankan pekerjaannya di tahun 2018 didasarkan RKAP 2018 dan Kontrak Kerja Manajemen tahun 2018. Pada RKAP 2018, Divisi Teknologi Informasi menjalankan berbagai program kerja atau inisiatif kerja yang diamanatkan baik melalui Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) periode 2017-2021 maupun permintaan-permintaan dari unit-unit kerja yang ada. Sedangkan pada kontrak kerja manajemen tahun 2018, Divisi Teknologi Informasi dituntut untuk memenuhi *key performance indicator* (KPI) yang tertera pada *score card*.

EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018

Sesuai SK Direksi No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 tentang Prosedur Tata Kelola dan Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero), PT PELNI (Persero) memiliki roadmap pengembangan Teknologi Informasi perusahaan periode 2017-2021. Divisi Teknologi Informasi sebagai unit kerja pengelola teknologi informasi, menjalankan inisiatif-inisiatif yang telah diamanatkan dalam roadmap rencana strategis tersebut. Tabel berikut ini pencapaian inisiatif-inisiatif selama tahun 2018.

Tabel Pencapaian Inisiatif
Table of Initiative Achievement

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Description
Inisiatif Kerja Kategori Aplikasi/Sistem Informasi Application/Information System Category of Work Initiative			
1	Pengembangan aplikasi Oracle EBS SCM (SIPARSEL). Oracle EBS SCM (SIPARSEL) application development.	67%	Tahapan Implementasi aplikasi Oracle EBS SCM akan dilanjutkan pada tahun 2019 dengan penambahan modul produksi permakanan. The implementation stages of Oracle EBS SCM application will be continued in 2019 with the addition of food production modules.
2	Pengembangan aplikasi New BL. New BL application development.	77%	Pengembangan aplikasi New BL masih berlanjut di tahun 2019. New BL application development remains to continue in 2019.
3	Pengembangan aplikasi HRM: HRM application development: 1. Modul Manajemen HRM; PTS application development; 2. Modul <i>Career Plan</i> ; Career Plan Module; 3. Modul Manajemen Organisasi; Organizational Management Module; 4. Modul <i>Payroll</i> . Payroll Module.	35%	Pada tahun 2018 perencanaan pengembangan aplikasi HRM/HCM telah selesai dilakukan. Tahap pengembangan dan implementasi akan dilakukan pada tahun 2019. In 2018 HRM/HCM application development planning had been conducted. The development and implementation will be realized in 2019.

2018 PERFORMANCE ACHIEVEMENT

The Information Technology Division in carrying out its work in 2018 is based on the Company's work and budget plan and the Management Work Contract for fiscal 2018. The Information Technology Division carries out various work or initiative programs mandated through PT PELNI (Persero) Information Technology Strategic Plan 2017-2021 and appeal from existing work units as stated in the Company's work and budget plan for fiscal 2018. Whereas in the management work contract in 2018, the Information Technology Division is required to fulfill the key performance indicator (KPI) printed on the score card.

EVALUATION OF THE STRATEGIC PLAN ACHIEVEMENT 2018

In accordance with Directors Decree No. 07.28/02/SK/HKO.01/2017 concerning Governance Procedures and Information Technology Strategic Plan of PT PELNI (Persero), has a company's Information Technology development roadmap for the period of 2017-2021. The Information Technology Division, carries out initiatives that have been mandated in the strategic plan roadmap. The following table is the achievement of Initiatives in 2018.



Teknologi Informasi Information Technology

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Description
4	Pengembangan Aplikasi <i>Document Management</i> (e-office) The development of Document Management Application (e-office)	95%	Modul-modul aplikasi e-office yang sudah dikembangkan adalah: The Modules of e-office application that have been developed as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Nota Dinas/Surat Making of Official Memo/Letter • Surat Keluar Outgoing Mail • Surat Masuk Incoming Mail <p>Pada tahun 2019 akan dilakukan implementasi aplikasi e-office. In 2019 will be conducted the implementation of e-office application.</p>
5	Pengembangan aplikasi kapal Perintis. Perintis ship application development.	100%	Pengembangan aplikasi kapal perintis telah selesai dilaksanakan menggunakan aplikasi mobile berbasis android dan diimplementasikan di 51 kapal. Tahun 2019, akan dilakukan pengembangan untuk modul muatan kapal perintis. Perintis ship application has been available on mobile application with android base and installed on 51 Ships. In 2019 will be tested Cargo Module development for Perintis ship.
6	Pengembangan <i>Executive Dashboard Information System</i> . Executive Dashboard Information System Development.	30%	Aplikasi ini sudah mulai dibangun dan sudah mampu menampilkan <i>dashboard</i> jumlah produksi dan penghasilan angkutan penumpang. Pada tahun 2019, pengembangan aplikasi ini akan mencakup produksi/penjualan angkutan barang, serta konsolidasi anak perusahaan. This application has built and has been able to show the dashboard of the amount of production and income of passenger transportation. In 2019, this application development will include the production/sale of goods transportation, and consolidation subsidiaries.
7	Pengembangan Aplikasi <i>voyage account</i> . Voyage Account application development.	0%	Pada tahun 2018, inisiatif ini belum mulai dibangun. Aplikasi <i>Voyage Account</i> akan mulai dibangun setelah aplikasi-aplikasi penyuplai data seperti New BL telah mulai diimplementasikan. In 2018, this initiative has not been built, voyage account application will be installed after data supplier applications like New BL has been started to implement.
8	Penyesuaian <i>website</i> PELNI (<i>re-design</i>). PELNI Website re-design.	30%	Desain <i>website</i> sudah disetujui oleh manajemen dan user. Pihak pengembang sedang membuat integrasi dengan PTS untuk pemesanan tiket. Ditargetkan pada tahun 2019 inisiatif ini sudah selesai. Website design has been approved by management and user. the development party has been making the integration with PTS for ticket reservation. this initiative targeted that has been accomplished in 2019.
Inisiatif Kerja Kategori Jaringan/Infrastruktur Teknologi Informasi Information Technology Network/Infrastructure Category of Work Initiative			
1	Perbaikan Ruang <i>Server</i> PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) Server room improvement.	83%	Inisiatif ini berubah dari perbaikan ruang server menjadi pembangunan <i>data center</i> . Inisiatif ini dimulai pada bulan Oktober 2018 dan akan selesai pada Februari 2019. This initiative changes from server room improvement becoming data center construction. This initiative has been started on October 2018 and accomplished on February 2019.
2	Pemasangan VSAT Pada Kapal. VSAT Installation on ship.	100%	Hingga Desember 2018, pemasangan VSAT kapal sudah dilakukan di 26 kapal penumpang. VSAT installation has applied on 26 passenger ship.
3	Segmentasi Jaringan <i>Server Farm</i> dengan <i>User</i> . Server Farm Network Segmentation with User.	0%	Inisiatif ini belum dilaksanakan pada tahun 2018. Inisiatif ini akan dilakukan setelah pembangunan <i>data center</i> selesai pada tahun 2019. This initiative has not been implemented in 2018. and will be conducted after the accomplishment of data center construction in 2019.
4	<i>Upgrade Access Switch</i> . Upgrade Access Switch.	0%	Inisiatif ini belum dilaksanakan pada tahun 2018. Inisiatif ini akan dilakukan setelah pembangunan <i>data center</i> selesai pada tahun 2019. This initiative has not been implemented in 2018. and will be conducted after the accomplishment of data center construction in 2019.
5	Membuat <i>Centralized Access point</i> . Making of Centralized Access Point.	0%	Inisiatif ini belum dilaksanakan pada tahun 2018. Inisiatif ini akan dilakukan setelah pembangunan <i>data center</i> selesai pada tahun 2019. This initiative has not been implemented in 2018. and will be conducted after the accomplishment of data center construction in 2019.
6	Pembangunan DRC (Disaster Recovery Center). DRC (Disaster Recovery Center) Construction.	0%	Inisiatif ini belum dilaksanakan pada tahun 2018. Inisiatif ini akan dilakukan setelah pembangunan <i>data center</i> selesai pada tahun 2019. This initiative has not been implemented in 2018. and will be conducted after the accomplishment of data center construction in 2019.



Teknologi Informasi

Information Technology

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Description
Inisiatif Kerja Kategori Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance Category of Work Initiative			
1	Menjalankan <i>training</i> peningkatan kompetensi personil Teknologi Informasi sesuai spesialisasi perannya. Adjusting Organizational Structure of Information Technology with its specialization.	100%	Divisi Teknologi Informasi telah memberikan pelatihan/sertifikasi bagi para pegawai Divisi Teknologi Informasi untuk selama tahun 2018. IT Division given training/certification for their IT Division employee throughout 2018.
2	Pematangan tata kelola tahap 2 mengadopsi <i>best practice</i> tata kelola untuk sebagian proses. 2nd Governance maturation – adopting the best practice of some governance process.	100%	Beberapa proses <i>best practice</i> tata kelola telah dilakukan yaitu, pengelolaan perubahan (<i>change management</i>), pengelolaan insiden & layanan Teknologi Informasi, pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi, pengelolaan program & proyek Teknologi Informasi, pengelolaan kebutuhan layanan TI, desain & pengembangan layanan Teknologi Informasi, pengelolaan operasional, dukungan layanan, dan aset Teknologi Informasi, serta pengelolaan masalah (<i>problem management</i>). Several best practices of governance processes have been carried out, namely, change management, incident management & Information Technology services, Information Technology infrastructure management, Information Technology program & project management, Information Technology service needs management, IT service design & development, operational management, service support, and Information Technology assets, as well as problem management (problem management).
3	Kajian (<i>Assessment</i>) Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi. Assessment of Information Technology Governance maturation.	50%	Inisiatif ini sedang dilaksanakan November 2018 dan diperkirakan selesai pada awal tahun 2019. This initiative has been being conducted on November 2018 and will be accomplished on the beginning of 2019.
4	Mendorong setiap area Teknologi Informasi melakukan riset terhadap tren teknologi dan <i>best practice</i> yang relevan. Boosting each Information Technology Division has to discover on Technology trend and relevant best practice.	100%	Pada tahun 2018, Divisi Teknologi Informasi telah melakukan riset pengembangan aplikasi kapal perintis <i>mobile</i> reservasi tiket (android) dan <i>mobile</i> reservasi kargo berbasis tren teknologi saat ini. yaitu, aplikasi berbasis teknologi mobile dan <i>wireless</i> . In 2018, Information Technology Division reviewed the application development of perintis ship mobile reservation and cargo mobile reservation adopting currently technology trend (android), which is mobile technology and wireless – base.
5	Melakukan <i>survey</i> kepuasan Teknologi Informasi tahunan. Yearly Information Technology satisfaction survey	100%	Inisiatif ini bersifat rutin tahunan. Kuesioner telah dilaksanakan dengan hasil skor 3,6 (skala 1-5). Hasil tersebut akan dilaporkan kepada manajemen pada awal 2019. This initiative conducts in yearly term, and questionnaires has been resulting at 3,6 score (in scale of 1-5). This result will be submitted to management in the beginning of 2019.
6	Memberikan laporan periodik Teknologi Informasi ke manajemen. Submitting Information Technology periodic report to management.	100%	Laporan perkembangan Teknologi Informasi mingguan (<i>weekly progress report</i>) telah disampaikan kepada direksi. Laporan tahunan juga disampaikan kepada manajemen. Weekly progress report has been submitted to the directors. Yearly progress report has been also submitted to management.
7	Bersama dengan fungsi bisnis terkait, melanjutkan kerjasama sinergi. Along with relevant business function, continuing integrated cooperation.	100%	Inisiatif ini dilakukan beberapa sinergi bersama terkait dengan Teknologi Informasi, yaitu dengan Bank Mandiri (pembayaran melalui EDC) dan penyediaan jaringan internet dan PelniTV bagi penumpang di atas kapal dengan PT PIDC. This initiative is conducted some integration with IT partners namely Mandiri Bank (payed through EDC) and Web provider – and PelniTV for the passengers on board with PT PIDC.
8	Penyusunan dan pemutakhiran arsitektur dan standar Teknologi Informasi. Preparing and updating the architecture and Information Technology standards.	100%	Beberapa standar Teknologi Informasi terbaru di PT PELNI (Persero) yaitu dalam dunia teknologi informasi, seperti versi terbaru <i>database oracle 12c</i> , integrasi mesin EDC dengan Aplikasi EBS <i>Finance</i> . penerapan fiber optic sebagai backbone jaringan kantor pusat, penerapan <i>web services</i> untuk integrasi dengan aplikasi eksternal. Some Renewable Information Technology standard in Advanced Information Technology at PT PELNI (Persero) are New database version of Oracle 12c, EDC engine integration with EBS Finance application, fiber optic installation for backbone at head office, web service installation for integrating with external application



Teknologi Informasi Information Technology

Pencapaian lainnya yang cukup membanggakan adalah PT PELNI (Persero), yang diwakili oleh Divisi Teknologi Informasi, berhasil meraih tiga penghargaan TOP IT & TOP Telco 2018 yang diselenggarakan oleh Majalah It Works pada 6 Desember 2018. Tiga penghargaan tersebut adalah:

- TOP IT *Implementation on Sea Transportation*.
- TOP IT *Manager* (kepada VP Teknologi Informasi, Nelson Idris).
- TOP IT *Leadership* (kepada Direktur Utama, Bpk. Insan Purwarisya L. Tobing).

Penghargaan tersebut diraih melalui riset oleh tim panitia, pengisian kuesioner oleh Divisi Teknologi Informasi, dan presentasi dan penjurian final yang dinilai oleh tim juri yang terdiri dari beberapa tokoh Teknologi Informasi nasional. Berikut ini beberapa dokumentasi penghargaan TOP IT 2018.



The other proudly achievements are PT PELNI (Persero), represented by Information Technology Division, has succeeded to earn three TOP IT & TOP Telco 2018 awards with organized by It Works Magazine on December 06, 2018. Those three awards, among others:

- TOP IT *Implementation on Sea Transportation*.
- TOP IT *Manager* (to VP of Information Technology, Nelson Idris).
- TOP IT *Leadership* (to President Director, Mr. Insan Purwarisya L. Tobing).

These Awards earned through quisionnaires result research by the Committee team whose filling by Information Technology Division and final presentation and judging which were approved by judges that consisting of National Information Technology figures. Here is some documentation of TOP IT awards in 2018.

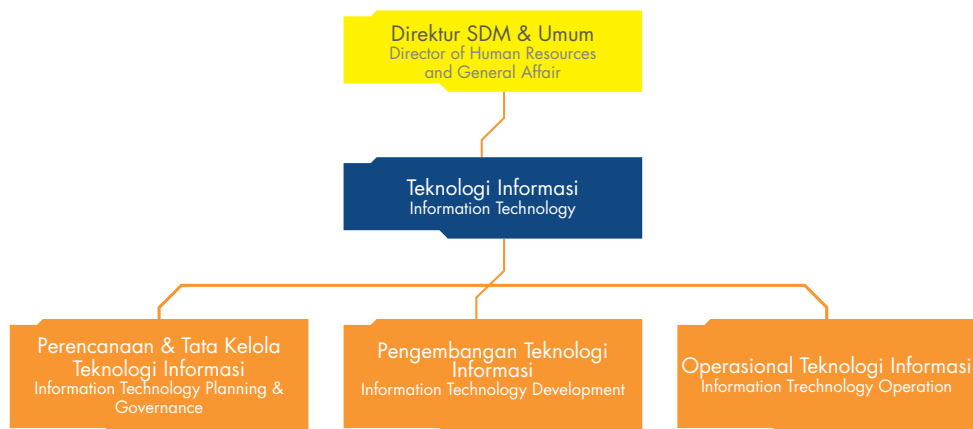


STRUKTUR ORGANISASI DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Divisi TI merupakan organisasi unit kerja pengelola teknologi informasi PT PELNI (Persero) yang berada di bawah Direktur SDM & Umum. Divisi TI terdiri dari tiga bidang yaitu, Perencanaan & Tata Kelola, Pengembangan, dan Operasional. Berikut ini gambaran struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) pada tahun 2018:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION

IT Division is an organization of information technology management work units of PT PELNI (Persero) which is under auspices of the Director of HR & General. IT Division consists of three, namely, Planning & Governance, Development, and Operations. The following is an overview of the organizational structure of IT Division in 2018:





Teknologi Informasi

Information Technology

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah pegawai Divisi Teknologi Informasi sebanyak 31 orang pegawai terdiri dari 25 pegawai organik, 5 pegawai *helpdesk*, dan 1 orang janitor. Selain itu, ada dua pegawai eksternal sebagai pendukung teknis, yaitu *Engineer on Site* (EoS), masing-masing dari Telkom dan Patrakom.

PELATIHAN & SERTIFIKASI PEGAWAI

Pada tahun 2018, Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan Divisi SDM berhasil melaksanakan sejumlah pelatihan dan sertifikasi keahlian di bidang teknologi informasi bagi para pegawai Divisi Teknologi Informasi. Pelatihan dan sertifikasi tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan kompetensi para pegawai Divisi Teknologi Informasi (mulai dari level *staf* hingga *Vice President*). Tabel berikut ini adalah daftar pelatihan dan sertifikasi Teknologi Informasi yang dilakukan selama tahun 2018:

TOTAL OF HUMAN RESOURCES

Until December 31, 2018, the number employee of information technology division is 31 employees consisting of 25 organic employees, 5 helpdesk employees and 1 janitor. In addition, there is two external employees as technical supporting, namely *Engineer on Site* (EoS), from Telkom and Patrakom.

EMPLOYEE TRAINING AND CERTIFICATION

In 2018, Information Technology Division collaborated with the HR Division managed to carry out a number of training and certification expertise in the scope of information technology for Information Technology Division employees. The training and certification are aimed to fulfill the needs of the Company in increasing the competency of Information Technology Division employees (from the staff level to the Vice President). The following table is a list of Information Technology training and certifications carried out during 2018:

No	Jenis Pelatihan Kind of Training	Sertifikasi Sertifikasi	Tanggal Pelatihan Date of Training
1	<i>System Analysis & Design</i> System Analysis & Design	Tidak sertifikasi No Certification	03 - 05 September 2018 September 03 - 05, 2018
2	TOGAF9 TOGAF9	Togaf 9.1 Certified Togaf 9.1 Certified	03 - 07 September 2018 September 03 - 07, 2018
3	CCNA Fast Track CCNA Fast Track	CISCO Certification CISCO Certification	03 - 07 September 2018 dan 29 Oktober - 02 November 2018 September 03 - 07, 2018 and October 29 - November 02, 2018
4	PMP 6 th Edition PMP 6 th Edition	<i>Project Management (2013) Certified</i> Project Management (2013) Certified	05 - 07 September 2018 September 05 - 07, 2018
5	COBIT5 Foundation COBIT5 Foundation	COBIT5 Foundation COBIT5 Foundation	24 - 28 September 2018 September 24 - 28, 2018
6	<i>Certified Hacker Forensic Investigation</i> Certified Hacker Forensic Investigation	<i>Certified Hacker Forensic Investigation</i> Certified Hacker Forensic Investigation	12 - 16 November 2018 November 12 - 16, 2018
7	<i>Business Analysis Foundation</i> Business Analysis Foundation	<i>Business Analysis Foundation</i> Business Analysis Foundation	07 - 09 November 2018 November 07 - 09, 2018
8	<i>Professional IT Audit & Governance</i> Professional IT Audit & Governance	Tidak sertifikasi No Certification	10 - 13 Desember 2018 December 10 - 13, 2018
9	<i>Mastering Android UI Design</i> Mastering Android UI Design	Tidak sertifikasi No Certification	03 - 05 Desember 2018 December 03 - 05, 2018
10	<i>Certified Data Centre Profesional</i> Certified Data Centre Profesional	Tidak sertifikasi No Certification	03 - 05 Desember 2018 December 03 - 05, 2018



Teknologi Informasi Information Technology

APLIKASI/SISTEM INFORMASI

Aplikasi-aplikasi dan sistem informasi yang ada di PT PELNI dibangun berdasarkan kebutuhan dari setiap unit kerja/ fungsi bisnis yang ada di Perusahaan. Berdasarkan RKAP 2018 dan roadmap inisiatif aplikasi/sistem informasi pada tahun 2018 yang tercantum dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi 2017-2021, ada beberapa aplikasi yang telah berhasil diimplementasikan dan ada beberapa aplikasi yang sudah masuk tahapan pembangunan. Berikut pencapaian pengembangan aplikasi-aplikasi/sistem informasi di PT PELNI (Persero).

Aplikasi PELNI *Ticketing System* (PTS)

Aplikasi PTS adalah bentuk kerja sama antara PT PELNI (Persero) dengan PT Peruri Digital Security (PDS) sesuai kontrak No. TH.3.2-01/SS/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang di-addendum per tanggal 27 September 2016. Hingga tahun 2018, Perseroan telah berhasil mengimplementasikan beberapa modul utama yaitu modul *Reservation Online, Payment Processing & Settlement, Departure Control System, Admin Kapal, dan payment* melalui EDC (*electronic data capturing*), sedangkan untuk modul Manajemen Bagasi telah selesai dibangun. Tahapan implementasi menunggu kesiapan user terkait formulasi tarif.

Selain pencapaian terkait modul-modul pada aplikasi tersebut, berikut beberapa pencapaian lainnya terkait dengan aplikasi PTS pada tahun 2018:

1. Perluasan/penambahan kanal-kanal penjualan tiket berskala nasional, yaitu pemesanan/pembelian tiket melalui mobile apps. Aplikasi mobile ini berbasis android dan dapat diunduh di Google Playstore. Ke depan aplikasi mobile ini akan dikembangkan untuk platform iOS;
2. Pembayaran tiket melalui EDC (*electronic data capturing*) Bank Mandiri;
3. Pembuatan modul untuk pembacaan file rekonsiliasi dari bank BNI (proses *top up* dan pembayaran tiket);
4. Tersedianya laporan utang asuransi penumpang, angkutan bandar dan pas pelabuhan.

Aplikasi *E-Business Suite Modul Finance*

Aplikasi *Oracle Enterprise Business Suite* (EBS) Modul *Financial* adalah aplikasi untuk manajemen akuntansi dan keuangan. Aplikasi ini terintegrasi dengan beberapa aplikasi/sistem *legacy* seperti aplikasi PTS, aplikasi BL, aplikasi SDM (*payroll*), dan nantinya dengan aplikasi *Supply Chain Management*, yang disebut juga dengan Siparsel. Aplikasi ini pun saling terintegrasi dengan sistem perbankan BRI dan Mandiri. Berikut ini arsitektur aplikasi Oracle EBS Modul *Financial* dan aplikasi-aplikasi yang berkaitan.

APPLICATION/INFORMATION SYSTEM

The applications and information systems at PT PELNI are built based on the needs of each work unit / business function in the Company. Based on the Company's budget plan 2018 and the application / information system initiative roadmap in 2018 listed in Information Technology Strategic Plan of 2017-2021, there are several applications that have been successfully implemented and there are several applications that have entered the development stage. The Following are the achievements of developing applications/information system at PT PELNI (Persero).

PELNI *Ticketing System* (Online Ticketing)

PTS application is in cooperation between PT PELNI (Persero) and PT Peruri Digital Security (PDS) under contract No. TH.3.2-01 / SS / 2015 dated January 30, 2015 with an addendum as of September 27, 2016. Until 2018, the Company has successfully implemented several main modules namely the Online Reservation, Payment Processing & Settlement module, Departure Control System, Ship Admin module. and payment through EDC (*electronic data capturing*), while the Baggage Management module has been completed. The implementation stage awaits the readiness of the user regarding the tariff formulation.

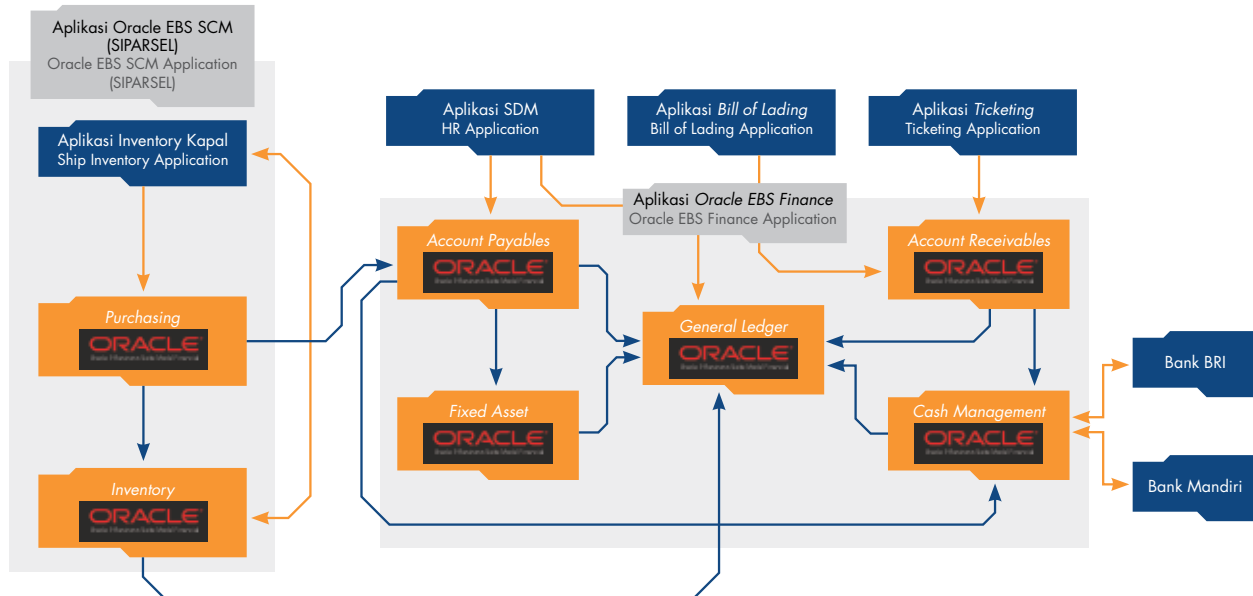
Besides the achievements related to modules on those applications, the following some of other achievements related to PTS application in 2018:

1. Expanding / adding national scale ticketing sales, namely ticket booking / purchase through mobile apps. This mobile application is based on Android and can be downloaded on Google Playstore. In the future this mobile application will be developed for the iOS platform;
2. Ticket payment through EDC (*electronic data capturing*) of Mandiri Bank
3. Making module for reading reconciliation files from BNI Bank (*top up* and ticket payment processes)
4. Availability of passenger, port transportation and facilities insurance debts reports.

E-Business Suite Modul Finance Application

Oracle Enterprise Business Suite (EBS) Application of the *Financial* Module is an application for accounting and financial management. This application is integrated with several legacy applications / systems such as PTS, BL, and HR applications (*payroll*), with this application of *Supply Chain Management*, also called Siparsel. This application is also integrated with BRI and Mandiri banking systems. The following is the Oracle EBS *Financial* Module application architecture and related applications.

Teknologi Informasi Information Technology



Aplikasi Portal PELNI

Aplikasi Portal PELNI beralamat di <https://portal.pelni.co.id> telah diimplementasikan dan digunakan oleh para pegawai PT PELNI (Persero) sejak tahun 2015. Aplikasi ini merupakan pintu masuk untuk mengakses semua aplikasi yang dikembangkan secara internal oleh Divisi Teknologi Informasi.

Aplikasi Portal PELNI dibangun berdasarkan kebutuhan Unit Kerja Pengguna. Adapun modul-modul aplikasi dari aplikasi Portal PELNI adalah sebagai berikut:

PELNI Portal Application

PELNI Portal application is at <https://portal.pelni.co.id> that has been implemented and used by employees of PT PELNI (Persero) since 2015. This application is the entrance to access all applications developed internally by the Information Technology Division.

PELNI Portal application is based on the needs of Work Unit Users. The application modules of PELNI Portal application are as follows:

No	Nama Modul Aplikasi Name of Module Application	Fungsi Function	Keterangan Description	Pengguna User
1	Human Resource Management (HRM) Human Resource Management (HRM)	Manajemen sumber daya manusia (SDM). Human Resources Management.	Aplikasi sudah diimplementasikan sebagian untuk <i>approval</i> perubahan data kepegawaian di ESS, namun masih dalam tahap pengembangan. The application has been partially implemented for the approval of the personnel data update in ESS, but is still under development.	Divisi SDM HR Division
2	Employee Self Services (ESS) Employee Self Services (ESS)	Manajemen layanan mandiri untuk informasi & data kepegawaian. Self services management for information & employment data.	Aplikasi sudah secara luas digunakan oleh para pegawai. Application was already widely used by employees.	Divisi SDM dan seluruh pegawai PT PELNI (Persero) HR Division and whole employees of PT PELNI (Persero)
3	Asset Management Asset Management	Manajemen aset milik PT PELNI (Persero) termasuk pencatatan, penyewaan dan pelaporan. PT PELNI (Persero)'s Asset Management include recording, leasing and reporting.	Aplikasi sudah digunakan oleh Divisi Pengelolaan Aset. Application has been already used by the Asset Management Division.	Divisi Pengelolaan Aset Asset Management Division



Teknologi Informasi Information Technology

No	Nama Modul Aplikasi Name of Module Application	Fungsi Function	Keterangan Description	Pengguna User
4	<i>Helpdesk Information Technology Ticketing System</i> Helpdesk Information Technology Ticketing System	Manajemen penanganan insiden dan layanan teknologi informasi. Management of incident handling and information technology services.	Aplikasi sudah digunakan oleh para pegawai <i>helpdesk</i> Teknologi Informasi PELNI. Application has been used by all helpdesk employees of PELNI's Information Technology.	Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division
5	Aplikasi Kapal Perintis Perintis Ship Application	Manajemen pemasaran dan penjualan tiket kapal perintis. Marketing management and ticket sales of Perintis Ships.	Aplikasi ini sudah diimplementasikan di 45 kapal perintis dan 38 cabang/ <i>terminal point</i> (hingga akhir 2018). This application has been implemented in 45 perintis ships and 38 branches / terminal points (until the end of 2018).	Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang Kapal Penumpang & Perintis Passenger Transportation Marketing Division of Passenger & Perintis Ships
6	<i>Document Management System</i> Document Management System	Manajemen kearsipan dokumen dan <i>workflow</i> PT PELNI (Persero). Document archive management and workflow of PT PELNI (Persero).	Aplikasi ini sudah digunakan sebagian oleh Biro Hukum untuk penyimpanan dokumen regulasi eksternal maupun internal dan pengelolaan salinan berkas. Aplikasi ini dalam persiapan untuk penerapan e-office di tahun 2019. This application has been partially used by the Legal Bureau for the storage of external and internal regulatory documents and the management of scrap copies. This application is in preparation for the implementation of e-office in 2019.	<i>Corporate Secretary</i> , Biro Hukum Corporate Secretary, Legal Bureau
7	<i>Dashboard Management</i> Dashboard Management	<i>Dashboard</i> untuk manajemen terkait produksi dan penghasilan PT PELNI (Persero). Dashboard for management related to PT PELNI (Persero) production and revenues.	Aplikasi ini sudah digunakan namun masih dalam perbaikan dan pengembangan. This application has been already used but still in repairment and development.	Divisi Nautika (<i>Ship Monitoring</i>), Direksi Nautika Division (Ship Monitoring), The Board of Director
8	<i>Operation Monitoring</i> Operation Monitoring	Manajemen untuk <i>monitoring</i> operasional kapal-kapal PT PELNI (Persero) (terkait posisi, haluan, kecepatan, <i>noon positon</i>). Management for operational monitoring of PT PELNI (Persero) ships (related to position, bow, speed, noon positon).	Aplikasi ini sudah digunakan oleh bagian <i>Ship Monitoring</i> (Divisi Nautika) sejak tahun 2015. This application has been used by Ship Monitoring (Nautica Division) since 2015.	Divisi Nautika (<i>Ship Monitoring</i>) Nautica Division (Ship Monitoring)
9	Wiki PELNI Wiki PELNI	Manajemen pengetahuan yang terkait dengan PT PELNI (Persero). Knowledge management related to PT PELNI (Persero).	Aplikasi ini diperuntukkan bagi Divisi SDM pada departemen Pengembangan SDM, namun belum sepenuhnya digunakan. This application is for Human Resource Division in Human Resources Development department, but has not been fully used.	Divisi SDM HR Division
10	<i>Project Management</i> Project Management	Pengelolaan dan pengawasan terhadap proyek-proyek yang ada di PT PELNI (Persero). Management and supervision of the projects in PT PELNI (Persero).	Aplikasi ini merupakan permintaan dari Komisaris dan Direksi untuk mengawasi kinerja proyek-proyek yang ada di PT PELNI (Persero). This application is a request from the Board of Commissioners and the Board of Directors for supervising the performance of projects in PT PELNI (Persero).	<i>Corporate Secretary</i> , <i>Corporate Planning & Risk Management</i> , Direksi Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management, The Board of Director
11	<i>Logistic Management</i> Logistic Management	Pengelolaan proses pengadaan, mulai dari pembuatan paket pengadaan hingga dokumen hasil negosiasi/klarifikasi. Procurement management processes, from procurement packages to negotiated/clarification documents.	Aplikasi ini tidak jadi diimplementasikan karena PT PELNI (Persero) berencana menggunakan Oracle EBS SCM. This application is not implemented because PT PELNI (Persero) plans to use Oracle EBS SCM.	Divisi Pengadaan Procurement Division
12	<i>Master Data</i> Master Data	Manajemen dan <i>master</i> terkait dengan aplikasi-aplikasi di dalam Portal. Management and master associated with the applications within the Portal.	Aplikasi ini telah digunakan untuk mendukung pengelolaan data-data. This application has been used to support data management	Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division



Teknologi Informasi

Information Technology

No	Nama Modul Aplikasi Name of Module Application	Fungsi Function	Keterangan Description	Pengguna User
13	Agency Management Agency Management	Pengelolaan transaksi keagenan kapal-kapal eksternal. Agency transactions management of external ships.	Aplikasi ini sedang dalam tahap pengembangan. This application is currently under development.	Divisi Keagaenan & Tur Agency & Tur Division
14	CMS Mobile Reservasi (CMS Mobile Reservation) Agency Management	Pengelolaan konten untuk aplikasi mobile reservasi tiket kapal penumpang. Content management for passenger ship mobile reservation application.	Aplikasi ini telah digunakan sejak mulainya implementasi aplikasi PELNI Mobile reservasi tiket pada April 2018. This application has been used since the implementation of PELNI Mobile Ticket reservation on April 2018	Divisi Pemasaran Kapal Penumpang Passenger Ship Marketing Division

Aplikasi Kapal Perintis

Aplikasi Kapal Perintis merupakan inisiatif dari Divisi Teknologi Informasi untuk mendukung proses bisnis pemasaran dan penjualan serta operasional kapal-kapal perintis yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero). Aplikasi ini dibangun secara internal oleh Divisi Teknologi Informasi mulai akhir tahun 2016 dan mulai diimplementasikan pada triwulan kedua tahun 2017. Sebagai hasil pengembangan internal Divisi Teknologi Informasi PT PELNI (Persero), aplikasi Kapal Perintis ini telah didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai Hak Cipta milik PT PELNI (Persero) dengan nomor 000125490. Ada tiga modul yang menjadi bagian dari modul ini. Tabel berikut ini menjelaskan modul-modul yang ada di aplikasi Kapal Perintis.

Perintis Ships Application

The Perintis Ship application is an initiative of the Information Technology Division to support the marketing and sales business processes and operations of pioneer ships operated by PT PELNI (Persero). This application was built internally by the Information Technology Division at the end of 2016 and began to be implemented in the second quarter of 2017. As a result of the internal development of IT Division of PT PELNI (Persero), the Perintis Ship application was registered with the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights as a Copyright number 000125490. There are three modules that contain in this module. The following table describes the modules in the Perintis Ship application.

No	Modul Aplikasi Module Application	Keterangan Description	Pengguna User
1	Modul Administrasi Pusat Central Administration Module	Modul aplikasi ini berada di dalam aplikasi Portal PELNI yang berfungsi untuk mengelola master data seperti, kapal, pelabuhan, rute, jadwal/emplooi, dan tarif. This application module is inside the PELNI Portal application that serves for managing data master such as ship, port, route, schedule/emplooi, and tariff.	Kantor Pusat: Head Office: <ul style="list-style-type: none"> Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang Kapal Penumpang & Perintis. Passenger Transportation Marketing Division of Passenger & Perintis Ships. Divisi Operasi Kapal Penumpang & Perintis. Passenger & Perintis Ship Operations Division.
2	Modul Administrasi Kapal Ships Administration Module	Modul aplikasi ini di-install di server kapal yang berfungsi untuk mengelola <i>upload data</i> penghasilan/penumpang, <i>download data master</i> , dan pelaporan daftar penumpang serta penghasilan kapal. This application module is installed on the ship server that serves for managing the upload data of revenues / passenger, download master data, and reporting passenger list and ship income.	Kapal Ships
3	Modul Mobile Mobile Module	Modul aplikasi ini bersifat <i>mobile</i> dan di-install di <i>smartphone</i> android. Modul ini berfungsi untuk melakukan penjualan dan <i>check-in</i> / pemeriksaan tiket penumpang. This application module is mobile and installed on android smartphone. This module serves for conducting sales and check-in / checking passenger tickets.	Kapal Ships

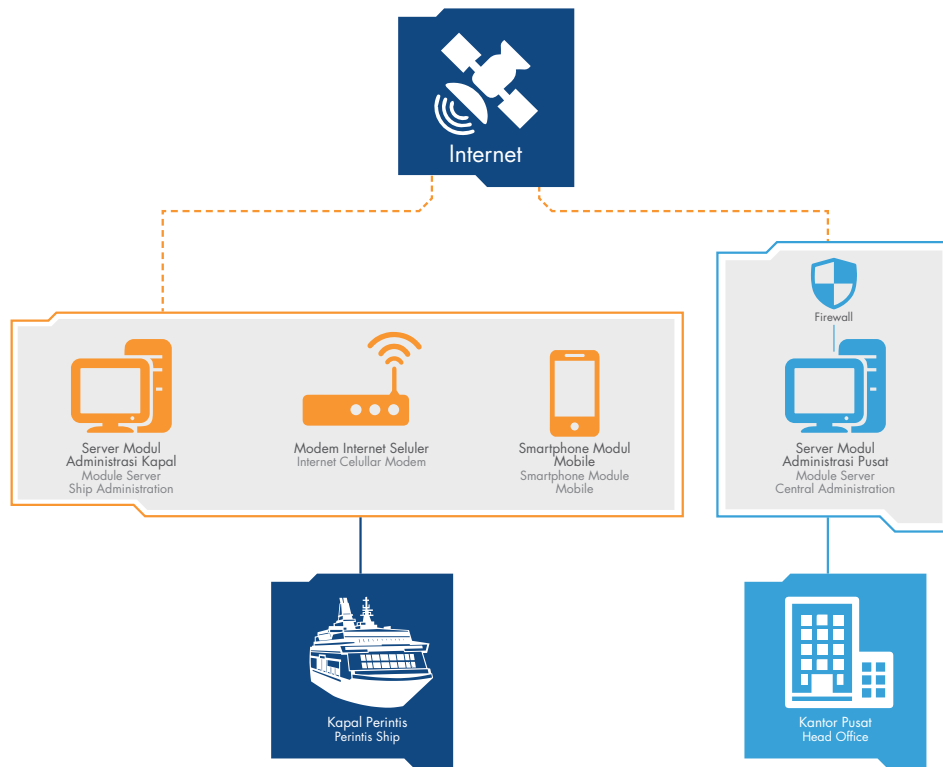
Teknologi Informasi Information Technology

Spesifikasi dan Arsitektur Aplikasi Kapal Perintis

Secara gambaran umum berikut ini arsitektur aplikasi Kapal Perintis:

Specification and Architecture of Perintis Ship Application

General overview on the architecture of Perintis Ship application:



Server modul Administrasi Kapal melakukan *download* data-data *master* dan *upload* data penumpang dan penjualan dengan memanfaatkan modem internet seluler. Modem internet seluler menggunakan kartu SIM dan terhubung dengan internet. Rute kapal-kapal perintis melalui daerah pelosok seluruh Indonesia yang memiliki konektivitas kurang baik. Oleh karena itu, proses *download* dan *upload* pada modul Administrasi Kapal dilakukan secara otomatis jika sinyal telekomunikasi seluler terdeteksi/tersedia. Modul *mobile* aplikasi Kapal Perintis melakukan *download* data-data master dan *upload* data penumpang dan penjualan dari modul Administrasi kapal dan ke modul Administrasi Kapal melalui jaringan *wireless LAN* yang tersedia di modem internet seluler. Pada modul Administrasi Pusat, proses *upload* data-data master ke kapal dan *download* data-data penumpang dan penjualan dilakukan melalui jaringan internet.

Ship administration module server downloads master data and uploads the passengers and sales data by empowering a cellular modem. The cellular modem uses a SIM card and is connected to Internet. Routes of Perintis ship through remote areas in Indonesia that have weak connectivity. Therefore, the download and upload processes in ship administration module is carried out automatically if the cellular telecommunication signal is detected/available. Perintis ship mobile application module downloads master data and uploads passenger and sales data from Ship Administration module to Ship Administration module via a wireless LAN network available on cellular internet modems. In Central Administration module, the processes of uploading master data to the ship and downloading passenger data and sales are through the network.

Teknologi Informasi Information Technology

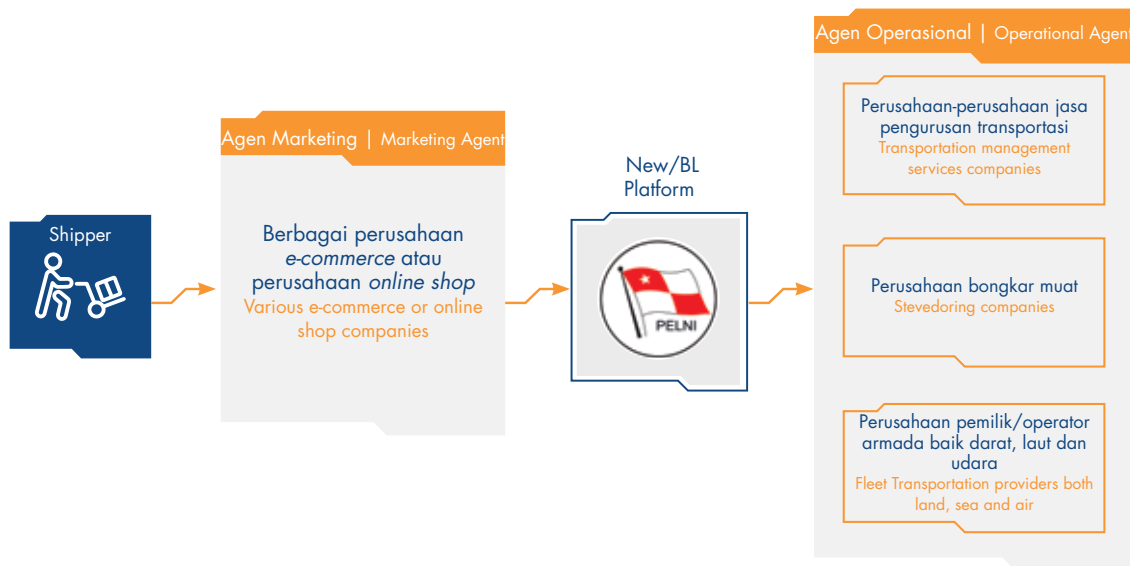
Implementasi Aplikasi Kapal Perintis

Pada tahun 2018, aplikasi Kapal Perintis berhasil diimplementasikan di 40 kapal dan 37 cabang/sub cabang/*terminal point*. Saat ini, aplikasi Kapal Perintis belum terintegrasi dengan aplikasi Oracle EBS Finance sehingga data penghasilan penjualan dari aplikasi Kapal Perintis masih dimasukkan secara manual ke aplikasi Oracle EBS Finance. Pada tahun 2019, pengembangan akan difokuskan pada integrasi kedua aplikasi tersebut.

Aplikasi New Bill of Lading (New BL)

Berdasarkan roadmap perusahaan yaitu, PT PELNI (Persero) saat ini mulai mengubah fokus bisnis dari angkutan penumpang ke angkutan barang (total logistik). Oleh karena itu, menanggapi kemajuan pesat teknologi informasi dan kebutuhan logistik yang terus meningkat, manajemen berinisiatif untuk membangun aplikasi New BL yang dimaksudkan untuk mengganti aplikasi BL (lama) baik dari sisi teknologi maupun proses bisnis. Aplikasi New BL akan menggunakan teknologi *open source* dan berfungsi sebagai *platform* terbuka untuk semua perusahaan bisnis yang bergerak di bidang logistik.

Berikut ini gambaran arsitektur bisnis pada aplikasi New BL:



Berikut ini progress pengembangan aplikasi New BL pada tahun 2018 :

The Implementation of Perintis Ship Application

In 2018, Perintis Ship application was successfully implemented in 40 ships and 37 branches/sub branches/*terminal points*. Currently, the Pioneer Ship application is not yet integrated with Oracle EBS Finance application, so the sales of revenue data from Perintis Ship application is still manually entered into Oracle EBS Finance application. In 2019, the development will focus on the integration of two applications.

New Bill of Lading Application

Based on the Company's roadmap, PT PELNI (Persero) is currently changing business focus from passenger transport into cargo transport (total logistic). Therefore, in responding to the rapid progress of information technology and increasing logistical needs, management took an initiative to build a New BL application that was intended to replace BL (old) application in both technology and business processes. The New BL application will use open source technology and function as an available platform for all of logistic business companies.

The following is business architecture in New BL Application:

The development progress of New BL Application in 2018 can be seen in the table below:



Teknologi Informasi Information Technology

No	Aktivitas Activity	Progress Progress	Keterangan Description
1	Pembuatan BRS (<i>Business Requirement Specification</i>). The Making of BRS (Business Requirement Specification).	100%	Pengumpulan dan analisis proses-proses bisnis New BL. Collecting and analyzing the processes of New BL Business.
2	Pengembangan Aplikasi: Application Development: <ul style="list-style-type: none"> Modul Master, <i>Core Engine</i>, <i>Front End Marketing</i>, Operasional, <i>Dashboard Report</i>, dan <i>Web Service</i> Module Master, Core Engine, Front End Marketing, Operational, Dashboard Report, and Web Service. Integrasi <i>EBS Finance</i>, Mitra B2B, dan <i>Payment Point</i> akan diimplementasikan di tahun 2019 EBS Finance Integration, B2B Partnership, and Payment Point will be perform in 2019. 	100% 0%	Pengembangan aplikasi terkait integrasi akan dilakukan di tahun 2019. Application development related to integration will be conducted in 2019.
3	Sistem Integrasi <i>Testing</i> . Testing Integrated System.	14%	Dimulai pada Desember 2018 dan dilanjutkan di 2019. Started on December 2018 and will be continued in 2019.
4	<i>User Acceptance Testing</i> : User Acceptance Testing: Modul Master, <i>Core Engine</i> , <i>Front End Marketing</i> , Operasional, <i>Dashboard Report</i> , dan <i>Webservice</i> . Module Master, Core Engine, Front End Marketing, Operational, Dashboard Report, and Webservice	14%	Dimulai pada Desember 2018 dan dilanjutkan di 2019. Started on December 2018 and will be continued in 2019.
5	<i>Setup</i> . Setup.	14%	Dimulai pada Desember 2018 dan dilanjutkan di 2019. Started on December 2018 and will be continued in 2019.
6	Pelaporan. Reporting.	100%	-

Aplikasi Oracle EBS Supply Chain Management

Aplikasi Oracle EBS Supply Chain Management (SCM) adalah inisiatif manajemen dalam rangka pengembangan sistem-sistem informasi *best practice* yang berkaitan dengan *enterprise resource planning* (ERP). Kebutuhan aplikasi ini dikarenakan aplikasi ILMS, yang mendukung proses pembelian/pengadaan dan pergudangan, telah tertinggal dalam hal teknologi, sehingga sangat riskan untuk terus diimplementasikan/digunakan di masa depan.

Pembangunan aplikasi Oracle EBS SCM menggunakan konsep yang sama dengan pembangunan aplikasi Oracle EBS Finance. Ada tiga tahapan yang akan dilalui yaitu, perencanaan, pengembangan, dan implementasi. Untuk mendukung pembangunan aplikasi tersebut, manajemen membentuk Tim Implementasi Aplikasi Oracle EBS SCM sesuai SK No.03.21/03/SK/HKO.01/2017, kemudian mengalami perubahan SK No.08.24/02/SK/HKO.01/2017 dan pada tahun 2018 terjadi perubahan SK No. 05.22/03/SK/HKO.01/2018 yang terdiri dari para pegawai lintas direktorat.

Oracle EBS Supply Chain Management Application

Oracle EBS Supply Chain Management application is management initiative to develop the best practices of information technology system related to enterprise resource planning (ERP). This needs of application is due to ILMS application which supports the purchasing/procurement and warehousing business processes that has been technologically inferiority, so it has a risk to continue to be implemented/used in the coming years.

The development of Oracle EBS SCM application uses same concept with Oracle EBS Finance application development. There are three stages, among others; planning, developing, and implementing. To support the development of this application, so management formed Oracle EBS Supply Chain Management Application Implementation team according to circular letter of Director No.03.21/03/SK/HKO.01/2017, than underwent a change in Decree No.08.24/02/SK/HKO.01/2017 and in 2018 there was a change in Decree No.05.22/03/SK/HKO.01/2018 regarding employees across directorates.

Teknologi Informasi Information Technology

Aplikasi Oracle EBS SCM ini dikembangkan bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia sebagai konsultan implementor dan PT Equine Global sebagai konsultan pengawas mulai April 2018.

Pada tahun 2018, Tim Implementasi Aplikasi Oracle EBS SCM juga telah menyelenggarakan beberapa lomba yang diikuti oleh seluruh pegawai untuk membangun budaya dan kesadaran atas implementasi aplikasi Siparsel, yaitu Lomba Penamaan Aplikasi, Lomba Desain Logo Aplikasi, dan Lomba Tagline Aplikasi dengan hasil desain pemenang sebagai berikut:

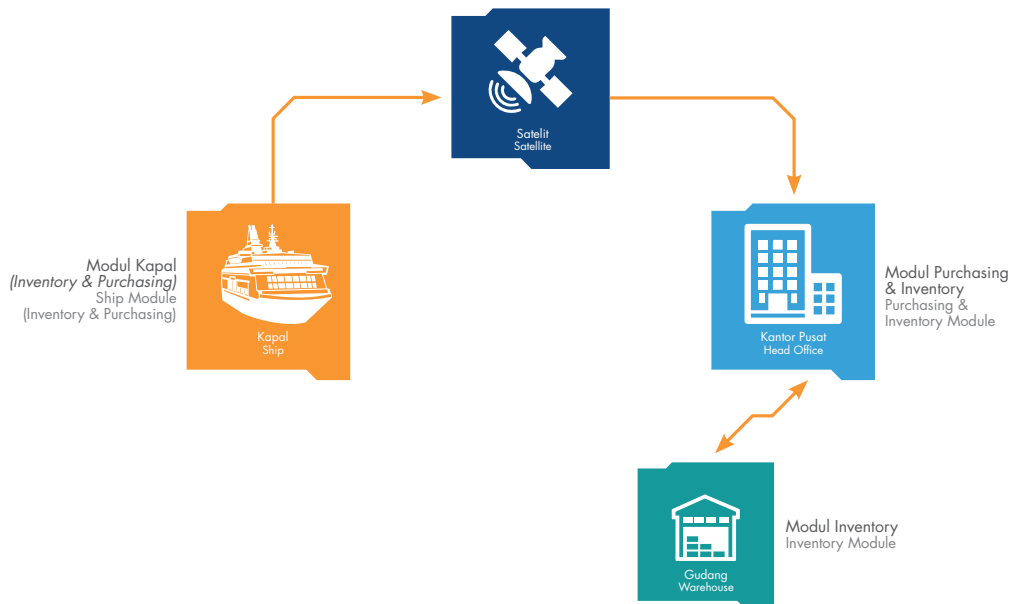


Aplikasi Siparsel terdiri dari beberapa modul yaitu, modul *purchasing* darat, modul *inventory* darat, modul kapal (*purchasing* dan *inventory*). Modul-modul darat akan digunakan oleh unit-unit kerja di kantor pusat dan cabang (gudang) sedangkan modul kapal akan digunakan oleh kapal-kapal penumpang PT PELNI (Persero). Berikut ini gambaran arsitektur aplikasi Oracle EBS SCM/Siparsel:

The Oracle EBS SCM application was developed in collaborating with PT Telkom Indonesia as a consultant and PT Equine Global as a supervisor consultant starting on April 2018.

In 2018, the Oracle EBS SCM Application Team has also held several competitions attended by all employees to build a culture and awareness of the implementation of the Siparsel application, namely Application Naming Competition, Application Logo Design Competition, and Application Tagline Competition with the following winning design results:

Siparsel application consists of several modules namely, land purchasing module, land inventory module, ship module (purchasing and inventory). The land modules will be used by work units in the head office and branches (warehouse) while the ship module will be used by PT PELNI (Persero) passenger ships. The following is an overview on the Oracle EBS SCM/Siparsel application architecture:



Berikut ini progress pengembangan aplikasi Siparsel pada tahun 2018:

The following is the progress of Siparsel application development in 2018:



Teknologi Informasi Information Technology

No	Aktivitas Activity	Progress Progress	Keterangan Description
1	Persiapan proyek. Project preparation.	100%	Aktivitas ini bertujuan untuk menentukan rencana pengelolaan dan eksekusi proyek. This is aimed to take management plan and to execute project.
2	<i>Business Requirement Analysis.</i> Business Requirement Analysis.	100%	Aktivitas ini ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisis proses bisnis yang ada. This is aimed to collect and analyze the existing business process.
3	Penyusunan <i>Future Process Model (FPM).</i> Making Future Process Model (FPM).	100%	Aktivitas ini ditujukan untuk merancang proses bisnis yang akan diterapkan di aplikasi. This is aimed to design business process that will be implemented in this application.
4	Pengembangan aplikasi (baik modul darat dan modul kapal). Application development (both land or ship modules).	100%	Aktivitas ini termasuk pengembangan <i>interface</i> dengan aplikasi kapal, kustomisasi, dan laporan-laporan. This activity includes interface development with ship application, customizing and reports.
5	<i>Conference Room Pilot (CRP).</i> Conference Room Pilot (CRP).	100%	Aktivitas ini ditujukan agar para <i>key user</i> memahami navigasi dan penggunaan aplikasi secara umum. This is aimed to explain navigation system for key user and general users of this application.
6	<i>System Integration Test (SIT)</i> System Integration Test (SIT).	100%	Aktivitas ini diikuti oleh Divisi Teknologi Informasi dan beberapa <i>key user</i> untuk memastikan integrasi antar modul aplikasi berjalan baik. This activity attended by Information Technology Division and some key users to ensure this integration between application modules is running well.

Tahapan-tahapan pengembangan selanjutnya, yaitu *User Acceptance Test (UAT)*, *End-User Training*, *Deployment Aplikasi*, dan *Go Live* akan dilaksanakan pada awal tahun 2019.

Subsequent of these development stages which are User Acceptance Test (UAT), End User Training, Deployment Application, and Go Live will be installed at the beginning of 2019

INFRASTRUKTUR & WORKSTATION

Infrastruktur Data Center

Pada tahun 2018, PT PELNI (Persero) memiliki beberapa tempat/lokasi penempatan perangkat keras *server (data center)* yaitu, Ruang Server Kantor Pusat dan *Co-Location Data Center* Telkom Sentul. *Server-server* yang ada di kedua lokasi tersebut dikelola dan merupakan tanggung jawab langsung Divisi Teknologi Informasi. Selain kedua lokasi ruang server tersebut, berdasarkan kerja sama dengan PT Peruri Digital Security (PDS), PT PELNI (Persero) juga memiliki *server-server* pendukung aplikasi PELNI *Ticketing System (PTS)* yang berlokasi di Gedung Cyber 2 Kuningan dan di Biznet Technovillage Cimanggis, yang dialokasikan untuk *server-server* mirroring aplikasi PTS. Namun, *server-server* aplikasi PTS tersebut sepenuhnya dikelola dan merupakan tanggung jawab PT PDS dengan tingkat ketersediaannya diatur dalam SLA.

INFRASTRUCTURE & WORKSTATION

Data Center Infrastructure

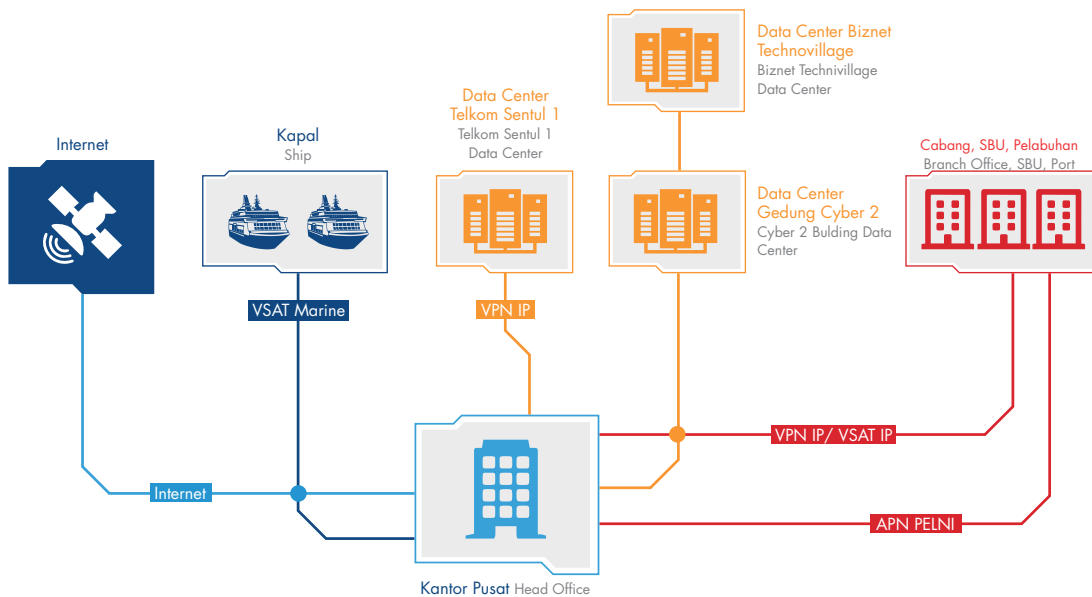
In 2018, PT PELNI (Persero) has several Server Base (data center) locations, namely, Head Office Server Room and Telkom Sentul Co-Location Data Center. The servers in these both locations are managed and charged directly to Information Technology Division. Between these two Server Base locations, as the results of cooperating with PT Peruri Digital Security PDS, PT PELNI (Persero) also has supporting servers for PELNI Ticketing system (PTS) application located in Cyber 2 Kuningan Building and Biznet Technovillage Cimanggis, which is allocated to mirroring servers of PTS application. However, those PTS application servers are fully managed and charged to PT PDS with the level of availability as stated in SLA.

Teknologi Informasi Information Technology

Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur jaringan PT PELNI (Persero) terdiri dari beberapa jenis konektivitas yang menghubungkan kantor pusat, kantor cabang/pelabuhan, dan beberapa kapal penumpang.

Berikut ini topologi secara umum infrastruktur jaringan PT PELNI (Persero):



Network Infrastructure

PT PELNI (Persero)'s network infrastructure consists of several types of connectivity that connect headquarters, branches / port offices, and several passenger vessels.

The following is the general topology of PT PELNI (Persero)'s network infrastructure:

Perangkat Workstation

Sejak tahun 2015, untuk penyediaan perangkat workstation (perangkat kerja) bagi para pegawai PT PELNI (Persero) dilakukan dengan metode sewa milik (*seat management*). Perangkat-perangkat yang dimaksud berupa *personal computer* (PC), laptop, *scanner*, *printer*, dan proyektor bagi Kantor Pusat, Kantor Cabang, Terminal Pelabuhan, Kapal Penumpang, Kapal Barang/Tol Laut, dan Kapal Perintis. Layanan tersebut diukur dan dijamin dalam bentuk *Service Level Agreement* (SLA) yang disepakati baik PT PELNI (Persero) maupun vendor dalam suatu kontrak.

Workstation Devices

Since 2015, for the provision of workstation equipment to employees of PT PELNI (Persero) has been carried out using the seat management method. Those devices are Personal Computer (PC), Laptop, Scanner, Printer, and projector for Head office, Branches, Port Terminal, Passenger Ship, Freight Ship/Tol Laut, and Perintis Ship. Those services has been measured and guaranteed into Service Level Agreement (SLA) that agreed by PT PELNI (Persero) and Vendor in a contract.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola Teknologi Informasi dan manajemen risiko Teknologi Informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan teknologi informasi di semua perusahaan. Tingkat kematangan tata kelola Teknologi Informasi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja dan kualitas dari layanan Teknologi Informasi yang dihasilkan, sedangkan manajemen risiko yang baik akan melindungi pengelolaan layanan Teknologi Informasi Perusahaan.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

Information Technology governance and risk management are an important part of managing information technology in all companies. The high level of maturity of Information Technology governance will affect the performance and quality of the Information Technology services produced, while good risk management will protect the management of the Company's Information Technology services.



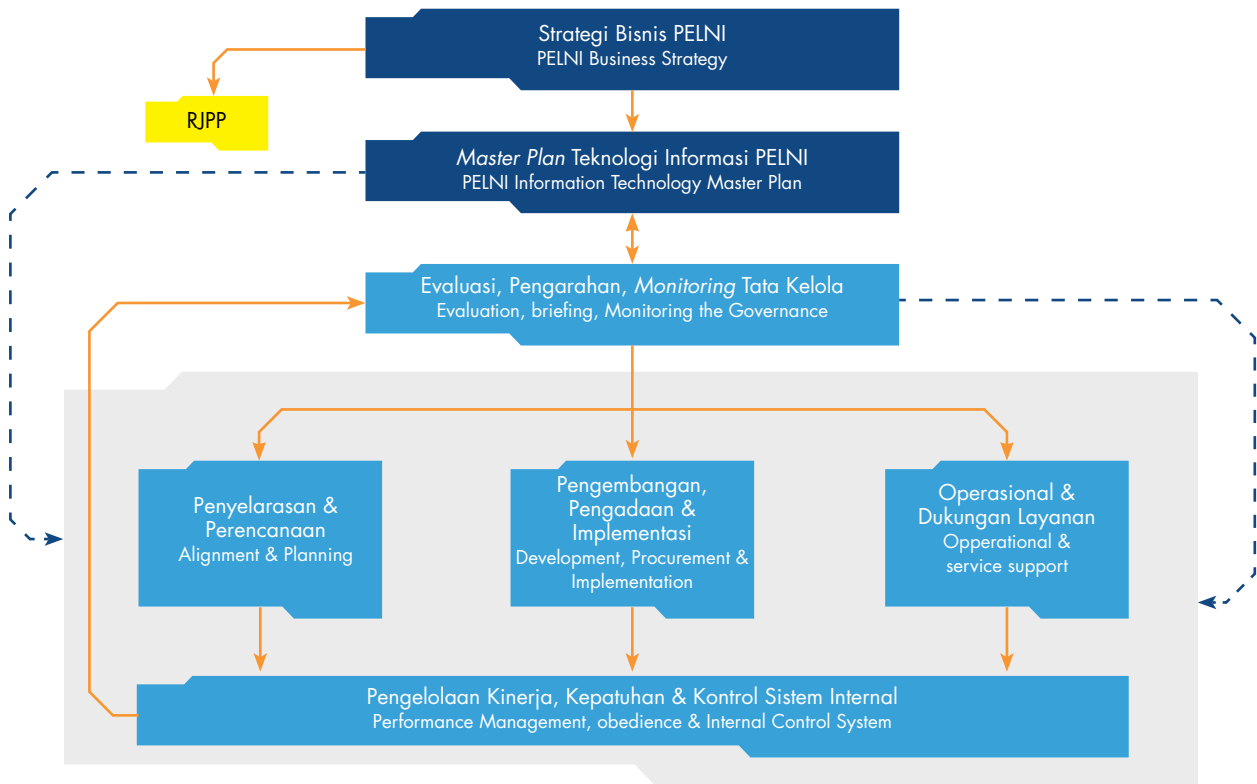
Teknologi Informasi Information Technology

Sesuai SK Direksi No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 dan Peraturan Menteri BUMN No.Per-02/MBU/2013 dan perubahannya No.PER-03/MBU/02/2018, tata kelola teknologi informasi PT PELNI (Persero) mengadopsi proses-proses yang ada pada *framework* (kerangka kerja) *best practice* COBIT (*Control Objective for Information and Related Technology*).

In accordance with the letter of Director's decree No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 and the Ministry of State-owned Enterprises' regulation No.Per-02/MBU/2013 and its amendment No.PER-03/MBU/02/2018, regarding Information Technology Governance of PT PELNI (Persero) adopts the existing processes in the best practice of COBIT (Central Objective for Information and Related Technology) framework

Gambar berikut ini merupakan kerangka kerja tata kelola Teknologi Informasi di PT PELNI (Persero):

Information Technology governance framework at PT PELNI (Persero) with the following picture:



Pada tahun 2018, Divisi Teknologi Informasi sebagai unit kerja pengelola teknologi informasi PT PELNI (Persero), telah melaksanakan beberapa proses best practice terkait pengelolaan teknologi informasi. Tabel berikut ini adalah daftar proses-proses pengelolaan Teknologi Informasi yang telah diterapkan di PT PELNI (Persero).

In 2018, Information Technology Division as an information technology management unit of PT PELNI (Persero), has carried out several best practice processes related to information technology management. The following table is a list of Information Technology management processes that have been implemented at PT PELNI (Persero).



Teknologi Informasi

Information Technology

No	Nama Proses Name of Process	Perangkat Penerapan Devices Installation
1	Pengelolaan perubahan. Management of changes.	Pengisian <i>form Information Technology Change Request</i> (ITCR) dan persetujuan perubahan/modifikasi pada aplikasi, server, maupun perangkat kerja. Fill out the Information Technology Change Request (ITCR) form and approval for changes / modifications to applications, servers, and work devices.
2	Pengelolaan insiden & permintaan layanan Teknologi Informasi. Accident Management & Information Technology Services Requirements.	Aplikasi <i>IT Helpdesk</i> untuk pencatatan tiket dan pelaporan insiden dan layanan teknologi informasi. IT Helpdesk Application for ticket registration and incident reporting and information technology services.
3	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi. Information Technology Infrastructure Management.	Pemetaan jaringan yang di kantor pusat, cabang, dan kapal serta peremajaan perangkat secara berkala. Pembangunan <i>data center</i> sebagai langkah memastikan keberlangsungan layanan Teknologi Informasi yang lebih baik lagi. Network mapping at head office, branches and ships and periodic device rejuvenation. The construction of a data center as a step to ensure the sustainability of Information Technology services is even better.
4	Pengelolaan program dan proyek Teknologi Informasi Information Technology Program and Project Management.	Setiap proyek yang akan diimplementasikan oleh Divisi Teknologi Informasi harus sesuai dengan alur proses yang terdapat pada SOP Pengelolaan Proyek Teknologi Informasi. Each Project will be implemented by Information Technology Division that must be in accordance with the process flow contained in SOP on the management of Information Technology Project.
5	Pengelolaan kebutuhan Layanan Teknologi Informasi. Information Technology services management.	Laporan serta SLA layanan <i>vendor</i> untuk semua aplikasi yang ditangani oleh pihak ketiga dan analisis dampak dari tiap aplikasi yang akan berjalan maupun yang sedang berjalan di PT PELNI (Persero) untuk mengetahui kapasitas pada <i>server</i> serta <i>storage</i> . Vendor service reports and SLA for all applications handled by third parties and an analysis of the impact of each application that will be running at PT PELNI (Persero) to determine the capacity of the server and storage.
6	Desain dan pengembangan layanan Teknologi Informasi. Information Technology service development and design.	Berita acara rilis dan <i>deployment</i> yang ditandatangani oleh Divisi Teknologi Informasi dan pemilik proses bisnis (<i>user</i>). Minutes of release and deployment signed by Information Technology division and user of business processes.
7	Pengelolaan operasional, dukungan layanan, dan aset Teknologi Informasi. Managing Operational, Services support and Assets of Information Technology	Pemeliharaan berkala aplikasi serta infrastruktur Teknologi Informasi dan aset Teknologi Informasi baik di pusat, cabang, dan kapal. Penyusunan laporan <i>risk register</i> dan <i>response plan</i> Divisi Teknologi Informasi setiap triwulan, serta melakukan penyusunan <i>DRP (disaster recovery plan)</i> untuk rencana pemulihan layanan Teknologi Informasi. Periodic maintenance of applications, Information Technology infrastructure and assets both at the center, branches and ships. Preparation of risk register reports and response plans Information Technology Division quarterly, and make <i>DRP (disaster recovery plan)</i> for the recovery of Information Technology service plans.
8	Pengelolaan Masalah. Problem management.	Setiap penyelesaian dan perbaikan masalah Teknologi Informasi harus tercatat dan <i>di-monitor</i> perkembangannya dalam <i>form Information Technology Problem Management</i> . In every accomplishment and improvement of IT problems must be recorded and monitored in Information technology Problem Management form.

Pada tahun 2018, Divisi Teknologi Informasi melakukan asesmen/penilaian tingkat kematangan tata kelola dan review rencana strategis Teknologi Informasi. Asesmen dan review tersebut dilakukan oleh konsultan eksternal yaitu, PT Equine Global. Berikut ini kesimpulan dari hasil asesmen dan review:

1. Penerapan tata kelola Teknologi Informasi PELNI telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil asesmen dari sebelumnya 2.04 pada tahun 2016 menjadi 2.66 pada Tahun 2018.
2. Pencapaian tingkat kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi berdasarkan COBIT 4.1 adalah 2.66. Menurut COBIT 4.1, tingkat ini didefinisikan sebagai *repeatable but intuitive*.
3. Hasil *review* atas rencana strategis Teknologi Informasi (RSTI) bahwa inisiatif-inisiatif Teknologi Informasi yang sudah dilakukan oleh PT PELNI (Persero) sudah sejalan dengan rencana strategis.

In 2018, Information Technology Division assessed the maturity level of governance and reviewed IT strategic plans. These assessment and review carried out by an external consultant, which is PT Equine Global. The following is the conclusions from those assessment and review results:

1. The implementation of Information Technology governance of PT PELNI (Persero) has been performed well. This is evidenced by the increase in assessment result score from 2.04 in 2016 to 2.66 in 2018.
2. Achievement of the maturity level of Information Technology Governance based on COBIT 4.1 is at 2.66. According to COBIT 4.1, this level is defined as repeatable but intuitive.
3. The result of a reviews on Information Technology strategic plan (RSTI) states that Information Technology initiatives have been performed by PT PELNI (Persero) which in line with the strategic plan.



Teknologi Informasi Information Technology

Transformasi Digital PT PELNI (Persero)

Pada tanggal 3 desember 2018, Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan Divisi SDM (Bagian Pengembangan SDM), melaksanakan sosialisasi transformasi digital pada seluruh pegawai kantor pusat. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran pegawai atas pentingnya penerapan transformasi digital; terhadap Peraturan BUMN No :03/MBU/2018 mengenai peningkatan transformasi digital di lingkungan BUMN.

PT PELNI (Persero) Digital Transformation

On December 3, 2018, Information Technology Division collaborated with the HR Division (HR Development Section), that carried out socialization of digital transformation to all of head office employees. This socialization aims to build employee awareness of the importance in implementing digital transformation; regarding to SOE's Regulation No: 03/MBU/2018 concerning improving digital transformation in State-owned Enterprise.



MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Manajemen risiko teknologi informasi dilakukan dengan mengikuti implementasi perusahaan berdasarkan SK Direksi No.10.06/2/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 di PT PELNI (Persero). Setiap unit kerja/cabang/SBU diminta menyampaikan laporan *risk register* dan *response plan* per triwulan kepada Biro Perencanaan Korporat & Manajemen Risiko untuk dilaporkan kepada manajemen (Direksi dan Komisaris). Sesuai laporan *Risk Register* TW IV pada tahun 2018, ada 3 risiko yang memiliki tingkat risiko sedang yang ada di Divisi Teknologi Informasi yaitu:

- Program ICT tidak efektif,
- Insiden Keamanan ICT, dan
- *Data Crash*.

Untuk pengendalian risiko yang dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi di antaranya meningkatkan dan menjaga kualitas jaringan Teknologi Informasi, memelihara dan meningkatkan kehandalan sistem secara berkala, *establish daily backup procedure*, dan penyusunan *disaster recovery plan*.

RISK MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

Risk Management of Information Technology is conducted by following the implementation of the Company based on Directors Decree No.10.06/2 /SK/HKO.01/2016 concerning Determination of ISO 31000-Base for Risk Management Guidelines at PT PELNI (Persero). Each work unit/branch/SBU is asked to submit a risk register report and quarterly response plan to the Corporate Planning & Risk Management Bureau to report to management (Directors and Commissioners). According to TW IV risk register report in 2018, there are 3 risks which has medium risk level of Information Technology Division, among others:

- ICT programs are not effective,
- ICT Security Incidents, and
- Crash data.

Risk control carried out by the Information Technology Division includes improving and maintaining the quality of IT networks, maintaining and increasing system reliability on a regular basis, establishing the daily backup procedure, and preparing disaster recovery plans.



Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement Governance

Transformasi bisnis proses dan operasional yang dilaksanakan oleh PT PELNI (Persero) selama tahun 2018 juga didukung oleh penguatan dan perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap tahap proses pengadaan barang dan jasa, PT PELNI (Persero) menerapkan etika dan prinsip-prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel) yang telah terkandung dalam kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Perseroan.

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa merujuk pada *Standard Operational Procedure* Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 29A/HKO.01/DIR/II-2012 dengan perubahan SK Direksi No.13/HKO.01/DIR/2014 dan SK kewenangan Direksi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau penggunaan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.17/3/SK/HKO.01/2017 telah memiliki jiwa yang sama dengan Peraturan Menteri BUMN terkait Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor Per-5/MBU/2008 dan Nomor Per-15/MBU/2012.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENGADAAN

Struktur Organisasi divisi Pengadaan PT PELNI (Persero) digambarkan sebagai berikut:

Business process and operational transformation that was done by PT PELNI (Persero) throughout 2018 was also supported by strengthening and improving the procurement procedure. This aims to ensure the procurement process has complied with Good Corporate Governance principles as well as other prevailing Law and regulation. In every procurement process, PT PELNI (Persero) adapts procurements ethics and principles (efficient, effective, transparent, competitive, fair and accountable) as contained in the Company procurement policy.

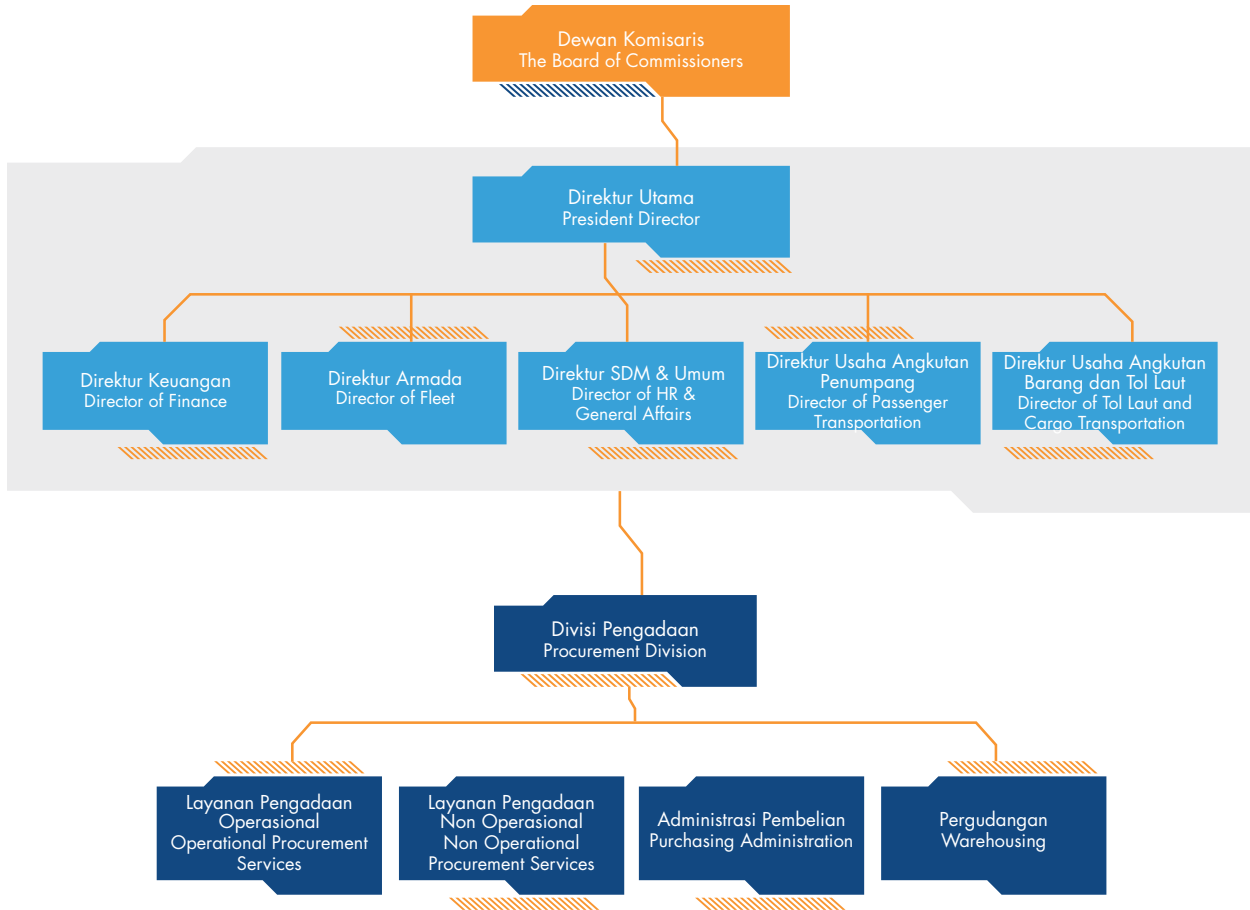
The implementation process of goods and services procurement implementation refers to prevailing Procurement Standard Operational Procedure at PT PELNI (Persero) that is stipulated under Board of Directors Decree Number 29A/HKO.01/DIR/II.2012 with changes in the Directors' Decree No.13 / HKO.01 / DIR / 2014 and the decree letter of Directors' authority regarding the procurement process of goods and services or use of the budget in accordance with Directors' Decree Number 01.17/3/SK/HKO.01/2017 with similar consent with Minister of SOE Regulation on Procurement under Regulation Number PER-5/MBU/2008 and Number PER-15/MBU/2012.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PROCUREMENT DIVISION

Procurement Division Organization Structure is illustrated below:



Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Governance



Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Perseroan berusaha mengoptimalkan sinergi BUMN sebagai upaya untuk pemberdayaan BUMN dengan prinsip saling menguntungkan. Pemilihan Penyedia telah dilakukan secara terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, Perseroan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleksitas dan bernilai tinggi, PT PELNI (Persero) menggunakan sarana SPSE untuk mengundang Penyedia berkompentensi melalui <http://lpse.pelni.co.id>. Perubahan dan perbaikan sistem terus dilakukan secara bertahap agar seluruh informasi mudah diakses oleh pihak manapun dan dapat cepat memperoleh informasi apabila dibutuhkan.

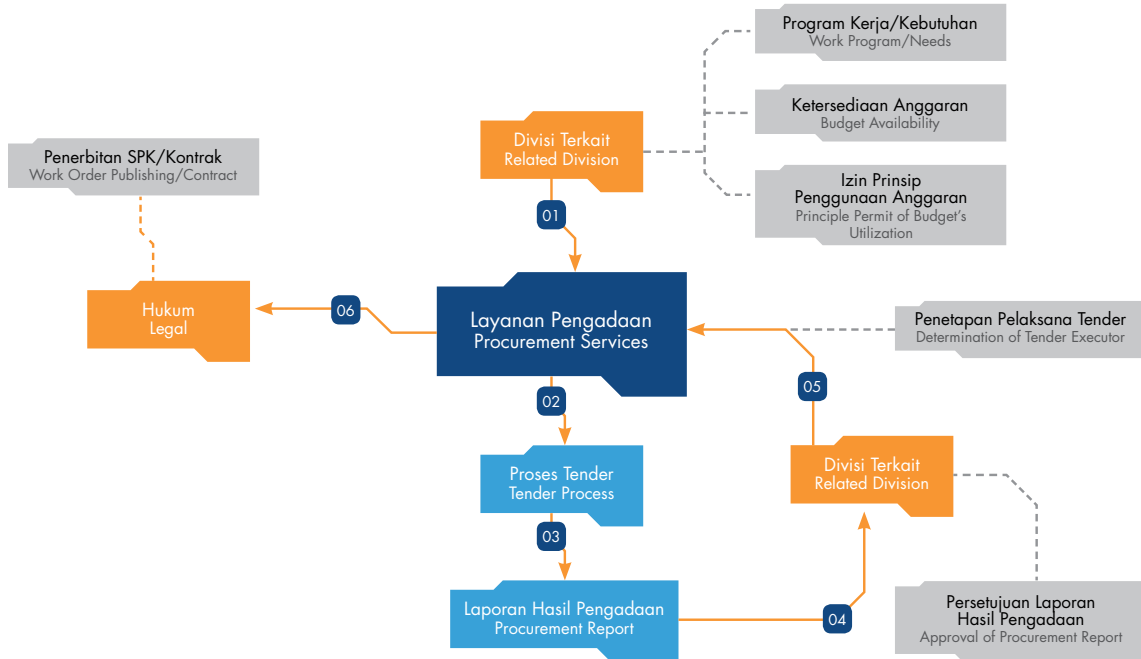
In the implementation of goods and services procurement, the Company strives to optimize SOE Synergy as an effort to empower SOE with mutual beneficiary principle. The vendor selection has been done transparently for parties who meet the requirements and implemented under fair competition. The entire procurement process was implemented according to clear and transparent procedures. The Company also has Owner Estimation (OW) price that is calculated based on expertise and accountable data. For complex and high-value projects, PT PELNI (Persero) applies SPSE channel to invite the vendor to compete via <http://lpse.pelni.co.id>. System revision and improvement are done continuously and gradually in order to ensure the information is accessible for every party to acquire necessary information quickly.

Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Governance

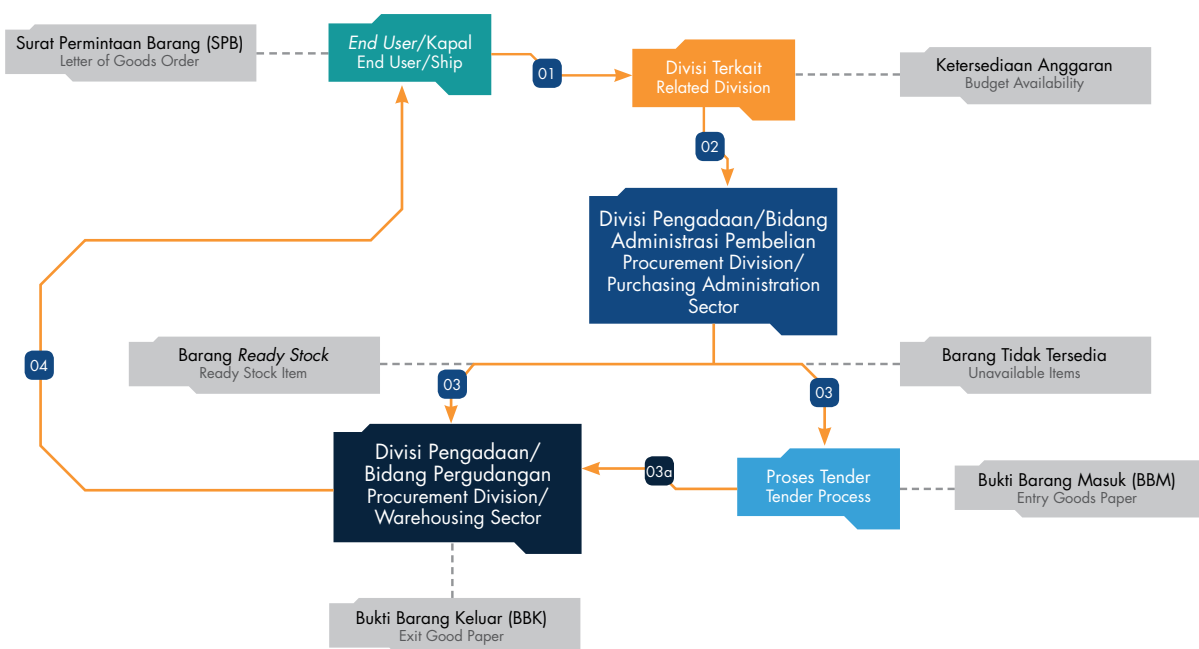
DIAGRAM ALUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PELNI (PERSERO)

FLOW CHART OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT OF PT PELNI (PERSERO)

Divisi Pengadaan Procurement Division



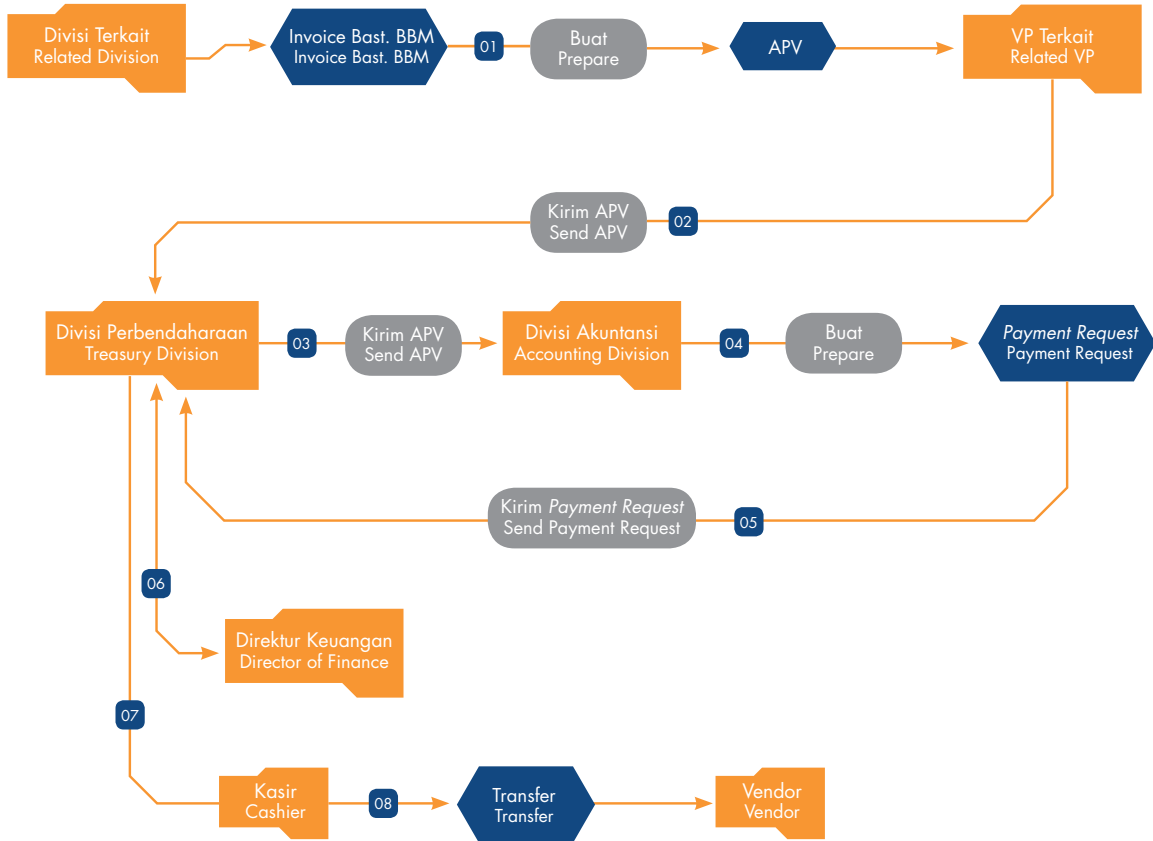
Permintaan Barang/Sparepart Goods/Sparepart Request





Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Governance

Sistem Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa PT PELNI (Persero) PT PELNI (Persero) Procurement of Goods and Services Payment System





Pejabat Eksekutif per 31 Desember 2018

Executives Officer as of December 31, 2018



Donni Rachmadi
Plh. Kepala SPI
Acting Head of Internal Control Unit



Yanto Duriyanto
Kepala DPA - Sistem Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Hidup
Head of DPA - Quality, Health, Safety, Security & Environment (SMK3)



Ridwan Mandaliko
Kepala Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretary



Andi Samsul Hadi
VP Perencanaan Korporat & Manajemen Risiko
VP of Corporate Planning & Risks Management



Lenggo Geni Arbi S.
VP Hukum
VP of Legal



Nelson
VP Teknologi Informasi
VP of Information Technology



Sukendra
VP Pemasaran Angkutan Penumpang Kapal Penumpang & Perintis
VP of Passenger Transportation & Perintis Ship Marketing



Jasa Priadi
VP Operasi Kapal Penumpang & Perintis
VP of Passenger & Feeder Ship Operation



Dirga Mulana
VP Pelayanan Kapal Penumpang & Perintis
VP of Passenger & Feeder Ship Services



Yahya Kuncoro
VP Keagenan & Tour
VP of Agency & Tour



Pejabat Eksekutif per 31 Desember 2018 Executives Officer as of December 31, 2018



Yuke Togas
VP Pemasaran Angkutan Barang Kapal
Penumpang & Perintis
VP of Cargo, Passenger & Perintis Marketing



Didik Dwi Prasetyo
VP Pemasaran Kapal Tol Laut & Ternak
VP of Tol Laut & Cattle Ship Marketing



Ahdiyati Andi Susanto
VP Operasi & Pelayanan Kapal Tol Laut
& Ternak
VP of Tol Laut & Cattle Ship Operation Services



Siswandi Kadir
VP Pengembangan Usaha Angkutan
Barang dan Tol Laut
VP of Tol Laut & Cargo Business Development



Didik Martono
VP Teknik
VP of Technic



Nurul Azhar
Plh. VP Nautika
Acting VP Nautical



Cahya Widi S
Plh VP Pengadaan dan Modifikasi Kapal
Acting VP of Procurement and Ship Modification



Aprisman Dedi
VP Surveyor
VP of Surveyor



Cahyono Rubiyanto
VP Pengelolaan Bahan Bakar
VP of Fuel Management



Slamet Wahyono
VP SDM
VP of Human Resources



Pejabat Eksekutif per 31 Desember 2018

Executives Officer as of December 31, 2018



A.A.N Budi Tresnawan
VP Umum
VP of General Affairs



Udjang Kerdjawan Agung
VP Pengamanan
VP of Security



Niken Sekar Melathi
VP Pengelolaan Aset
VP of Asset Management



Hefi Aprianto
VP Akuntansi
VP of Accounting



Suparno
VP Perbendaharaan
VP of Treasury



Alamsyah
VP Pengadaan
VP of Procurement



Wasman R.M
VP Pengelolaan PSO dan Subsidi
VP of PSO and Subsidy Management



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

PT PELNI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikannya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Per 31 Desember 2018, tidak ada Direktur dan Komisaris yang memiliki saham PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) whose shares are 100% owned by The Republic of Indonesia Government.

As of December 31, 2018, there was neither Board of Directors and Board of Commissioners with shares ownership of PT PELNI (Persero).

Kronologi Pencatatan Saham

Shares Listing Chronology

Per 31 Desember 2018, Perseroan belum melakukan melakukan penawaran saham kepada publik dan kepemilikan saham 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian informasi mengenai tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham dan tindakan korporasi serta nama bursa di mana saham dicatatkan tidak relevan untuk disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2018, the Company had not executed shares offering to public and the shares are 100% owned by The Republic of Indonesia Government. Therefore, information about shares listing year, total shares outstanding, shares par value, shares public offering and corporate action as well as name of stock exchange where the shares are listed are irrelevant to be presented in this Annual Report.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Per 31 Desember 2018, Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lainnya sehingga informasi mengenai nama efek, nilai penawaran, nama bursa tempat efek dicatatkan dan peringkat efek tidak relevan untuk disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2018, the Company had not listed other securities, therefore, information about name of securities, offering price, name of stock exchange where the securities are listed and securities rating are irrelevant to be presented in this Annual Report.

Struktur Grup Perusahaan

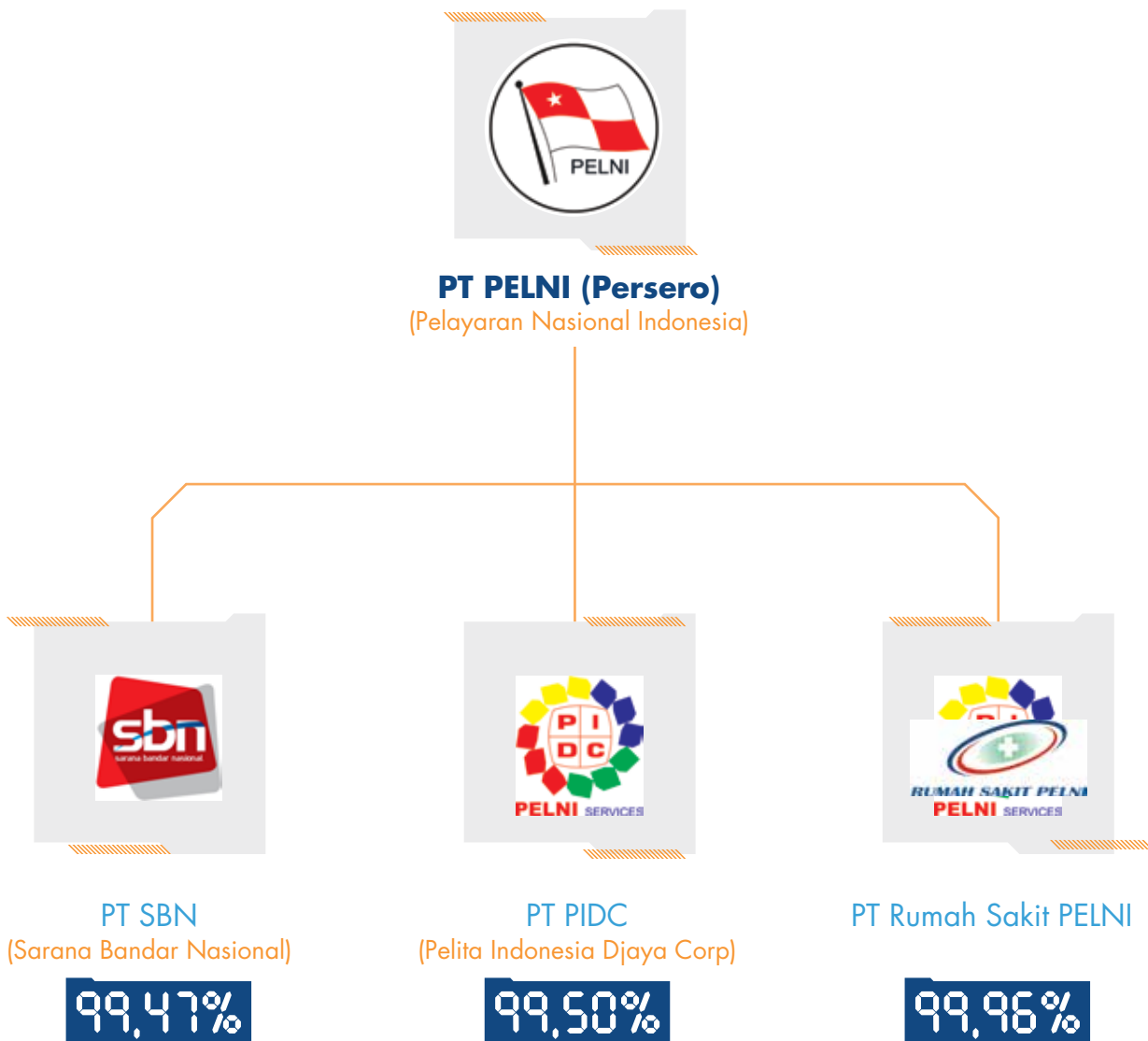
Corporate Group Structure

PT PELNI (Persero) memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) dengan kepemilikan saham 99,47%, PT Pelita Indonesia Djaya Grup (PIDC) dengan kepemilikan saham 99,50% dan PT Rumah Sakit PELNI dengan kepemilikan saham 99,96%.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Struktur Grup PT PELNI (Persero) sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) has 3 (three) subsidiaries that are PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) with 99.47% shares ownership, PT Pelita Indonesia Djaya Grup (PIDC) with 99.50% shares ownership and PT Rumah Sakit PELNI with 99.96% shares ownership.

As of December 31, 2018, Structure Group of PT PELNI (Persero) is as follows:





Entitas Anak & Asosiasi

Subsidiary & Association

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2018, subsidiaries of PT PELNI (Persero) are as follows:

No.	Nama Perusahaan Name of Company	Saham PELNI Shares of PELNI	Bidang Usaha Line of Business	Status Operasi Operating Status
1	PT Sarana Bandar Nasional (SBN)	99,47%	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, custom clearance, pedalaman depo. Transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.	Beroperasi Operating
2	PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)	99,50%	Jasa Kepengurusan Transportasi (JPT), Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), <i>cleaning service</i> , <i>bunkering</i> BBM, Jasa Pengawasan dan Pengamanan, Sewa Pergudangan, Sewa <i>Forklift</i> , Multimoda Transportasi, hotel dan restoran. Transportation Management Services (JPT), Customs Services Management Entrepreneurs (PPJK), cleaning services, Fuel bunkering, Surveillance and Security Services, Warehousing Rentals, Forklift Rentals, Multimodal Transportation, hotels and restaurants.	Beroperasi Operating
3	PT Rumah Sakit PELNI	99,96%	Rumah Sakit Hospital	Beroperasi Operating

Per 31 Desember 2017, PT PELNI (Persero) tidak memiliki entitas asosiasi.
As of December 31, 2017, PT PELNI (Persero) did not have associated entity.

INFORMASI MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Berikut adalah informasi mengenai anak perusahaan PT PELNI (Persero):

1. PT Sarana Bandar Nasional (SBN)

PT Sarana Bandar Nasional (SBN) merupakan anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang :

1. jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal milik induk perusahaan maupun kapal-kapal lainnya yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cardogoring*, *receiving delivery*. Wilayah usaha PT SBN meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan didukung oleh 56 kantor cabang dan sub-cabang yang beroperasi di pelabuhan besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan kantor pusat di Jakarta.
2. *Freight Forwarding*.
3. Pergudangan (*warehousing*).
4. Transportasi untuk mendukung muatan kapal PT PELNI (Persero)
5. *Trading* dan Retail

Pada tahun 2018, PT SBN membukukan laba sebesar Rp49,08 miliar atau meningkat sebesar 10,20% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp45,48 miliar.

INFORMATION ABOUT SUBSIDIARY

Information about PT PELNI (Persero) subsidiaries is described below:

1. PT Sarana Bandar Nasional (SBN)

PT Sarana Bandar Nasional (SBN) is a subsidiary of the Company engaged in:

1. Loading and unloading services from and to ship owned by the Parent Company and other ships, which includes; *stevedoring*, *cardogoring*, *receiving delivery*. The scope of work of PT SBN covers the entire sea territory of Indonesia, supported by 56 branch offices and sub-branches operating in large and small ports from Sabang to Merauke with Headquarter in Jakarta.
2. *Freight Forwarding*.
3. *Warehousing*.
4. Transportation to support the cargo of PT PELNI (Persero) ship.
5. *Trading* and Retail.

In 2018, PT SBN booked the profit of Rp49.08 billion or increased by 10.20% compared to the previous year which amounted to Rp45.48 billion.



Entitas Anak & Asosiasi

Subsidiary & Association

Susunan Manajemen SBN per 31 Desember 2018, sebagai berikut:

As of December 31, 2018, composition of SBN Management is as follows:

Komisaris Utama	Harry Boediarto	President Commissioner
Komisaris I & II	August Haris & Tri Andayani	Commissioner I & II
Direktur Utama	Suharyanto	President Director
Direktur Operasional	Murdiyoto	Director of Operations
Direktur Keuangan	Nofiyetti Edizar	Director of Finance
Alamat	Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-144, Cempaka Putih, Jakarta – 10510	Address
Telp	021- 4287 9000 Fax: 021-4287 8389	Phone
Email	info@pelnilogistics.co.id	Email
Web	www.pelnlogistics.co.id	Web

2. PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) merupakan anak Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Jasa Kepengurusan Transportasi (JPT), Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), *cleaning service*, *bunkering* BBM, Jasa Pengawasan dan Pengamanan, Sewa Pergudangan, Sewa Forklift, Multimoda Transportasi, hotel dan restoran.

2. PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) is subsidiary of Company that is operated in Transprotation Management Service (JPT), Custom Service Management (PPJK), cleaning sevice, Oil Fuel bunkering, Security Services, Warehouse Service, Forklift Service, Multi-modal Transportation, hotel and restaurant.

Pada tahun 2018, PT PIDC membukukan laba sebesar Rp33,77 miliar atau meningkat sebesar 45,38% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp23,23 mliar.

In 2018, PT PIDC booked the profit of Rp33.77 billion or increased by 45.38% compared to the previous year which amounted to Rp23,23 billion.

Susunan Manajemen PIDC per 31 Desember 2018, sebagai berikut:

As of December 31, 2018, composition of PIDC Management is as follows:

Komisaris Utama	Olich Masolich Sodikin	President Commissioner
Direktur Utama	Effendi	President Director
Direktur Operasi	Asiano Y. I. Lontoh	Director of Operations
Alamat	Ruko Cempaka Mas Blok Q No.5 Jl. Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat	Address
Telp	021- 42883740	Phone
Email	corporate@pidc.co.id	Email
Web	www.pidc.co.id	Web



Entitas Anak & Asosiasi Subsidiary & Association

3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI (RS PELNI) merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pelayanan dan pendidikan kesehatan, dengan bidang usaha secara khusus meliputi:

1. Pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan.
2. Pelayanan Kegiatan Penunjang Kesehatan Lainnya.
3. Pelayanan ASKES/BPJS dan konsultan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan.
5. Pelayanan Jasa Konsultan Manajemen Kesehatan.
6. Perdagangan Farmasi dan Peralatan Kesehatan.
7. Pelayanan Gizi Masyarakat dan konsultasi.
8. Pelayanan Kebugaran Kesehatan Masyarakat.

Pada tahun 2018, PT RS PELNI membukukan laba sebesar Rp37,41 miliar atau meningkat sebesar 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp37,02 miliar.

Susunan Manajemen RS PELNI per 31 Desember 2018, sebagai berikut:

3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI (RS PELNI) is subsidiary that operated in health services and education with particular business lines are including:

1. Health services and administration.
2. Other Health Support Activities Services.
3. ASKES / BPJS services and consultants.
4. Health Education and Training.
5. Management Consultant Services
6. Health.
7. Trade in Pharmacy and Health Equipment.
8. Community Nutrition Services and consultation.
9. Public Fitness Services.

In 2018, PT RS PELNI booked the profit of Rp37.41 billion or increased by 1.03% compared to the previous year which amounted to Rp37.02 billion.

As of December 31, 2018, Management composition of RS PELNI is as follows:

Komisaris Utama	Ganefi	President Commissioner
Komisaris	Darmansyah	Commissioner
Komisaris	Wibisono	Commissioner
Direktur Utama	Fathema Djan Rachmat	President Director
Direktur Administrasi & Keuangan	Mohamad Kartobi	Director of Administration & Financial
Direktur Operasional	Rooshardianti Suryandari	Director of Operational
Direktur Medis	Astari Mayang Anggarani	Director of Medical
Alamat	Jl. Aipda KS Tubun No. 92-94 Jakarta Pusat – DKI Jakarta 11410	Address
Telp	021-5306901	Phone
Email	pemasaran.rspelni@gmail.com	Email
Web	www.rspelni.co.id	Web



Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Stock Market Supporting Institution and Professions

KANTOR AKUNTAN PUBLIK**Djoko, Sidik & Indra****PUBLIC ACCOUNTANT FIRM****Djoko, Sidik & Indra**

Kantor Pusat	Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia	Head Office
Phone	62-21 39838734, 39838735	Phone
Fax	62-21 39832081	Fax
Website	kapdsi.comm	Website
Email	kapdsi.kpusat@gmail.com	Email
NIUKAP	959/KM.1/2014	NIUKAP
Biaya	Rp658.000.000	Fee
Jasa yang Diberikan	Jasa audit laporan keuangan yaitu jasa audit kepatuhan dan laporan kinerja Perseroan. Financial audit report services are compliance audit services and the company's performance reports.	Provided Service

NOTARIS:**Ida Adiningsih, S.H**

Alamat: Jl Kembang Raya No 15 A, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

NOTARY:**Ida Adiningsih, S.H**

Address: Jl Kembang Raya No 15 A, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Hasbullah Abdul Rasyid, S.H

Alamat: Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A. Jl. H.R. Rasuna S aidKav. C 20-2 Kuningan Jakarta Selatan

Hasbullah Abdul Rasyid, S.H

Address: Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A. Jl. H.R. Rasuna S aidKav. C 20-2 Kuningan Jakarta Selatan

KUASA HUKUM:**LQQ media Law Office**

Alamat: Gedung Citylofts Unit 10.12 Jl KH Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat

LEGAL ATTORNEY:**LQQ media Law Office**

Address: Gedung Citylofts Unit 10.12 Jl KH Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat

Kantor Advokat Deni Simorangkir SH MH

Alamat: Jl. Tebet Timur Dalam V K Nomor 3 Jakarta Selatan

Deni Simorangkir SH MH Advocate Office

Address: Jl. Tebet Timur Dalam V K Nomor 3 Jakarta Selatan

Dedy Kurniadi & CO

Alamat: Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor Jl. Raden Saleh Raya No 44 Jakarta Pusat

Dedy Kurniadi & CO

Address: Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor Jl. Raden Saleh Raya No 44 Jakarta Pusat



Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Stock Market Supporting Institution and Professions

Anggraeni & Partner

Alamat: Jl. Wolter Mongonsidi No 122-124 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

M & G Associates

Alamat: Senayan Trade Center Lt 5 No 17-22 Jl Asia Afrika
Gelora Senayan Jakarta Pusat

Effendy & Remy Attorney & Counselor at Law

Alamat: Gedung Lina 2nd Floor Suite 205 Jl. HR Rasuna
Said Kav B-7 Kuningan – Jakarta Selatan

Tekky Toreh & Partner

Alamat: Jl Pulomas Barat XI No. 22 Jakarta Timur

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Per 31 Desember 2017, Perseroan belum mencatatkan saham dan efek-efek sehingga belum menggunakan jasa Biro Administrasi Efek.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

Per 31 Desember 2017, Perseroan belum mencatatkan saham dan efek-efek sehingga belum menggunakan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek.

Anggraeni & Partner

Address: Jl. Wolter Mongonsidi No 122-124 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

M & G Associates

Address: Senayan Trade Center Lt 5 No 17-22 Jl Asia Afrika
Gelora Senayan Jakarta Pusat

Effendy & Remy Attorney & Counselor at Law

Address: Gedung Lina 2nd Floor Suite 205 Jl. HR Rasuna
Said Kav B-7 Kuningan – Jakarta Selatan

Tekky Toreh & Partner

Address: Jl Pulomas Barat XI No. 22 Jakarta Timur

SECURITIES REGISTRAR

As of December 31, 2017, the Company had neither listed shares nor securities, therefore, the Company did not hire any Securities Registrar.

RATING AGENCY

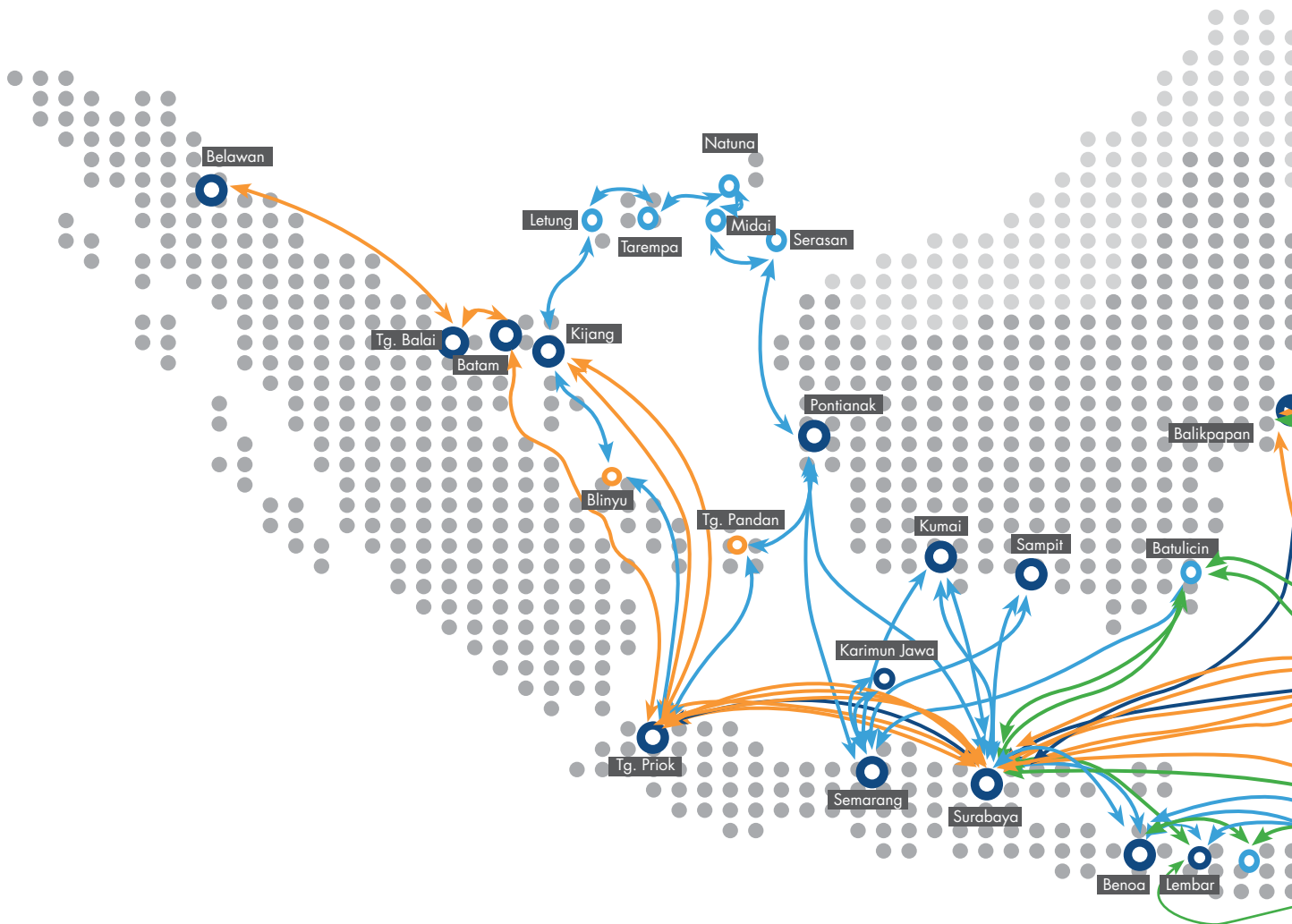
As of December 31, 2017, the Company had not listed had neither listed shares nor securities, therefore, the Company did not hire any Rating Agency.



Peta Wilayah Operasi Jaringan Trayek Kapal Penumpang

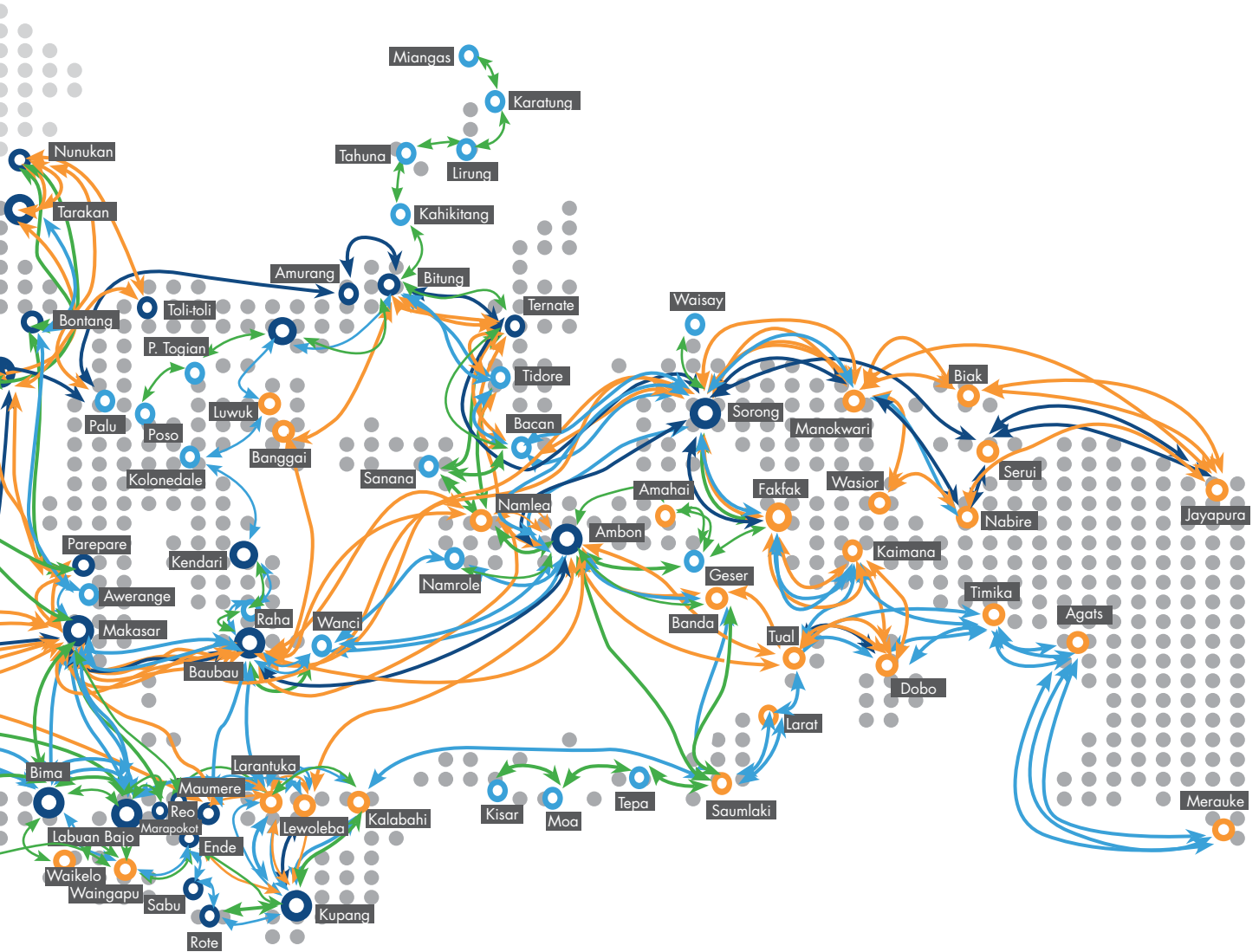
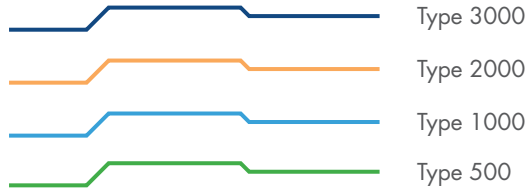
Passenger Ship Route Network Operational Area

- Jumlah Pelabuhan Singgah Tahun 2018 adalah 91 Pelabuhan
- Jumlah Kapal PSO tahun 2018 adalah 26 Kapal
- Jumlah Ruas Tahun 2018 adalah 1.200 ruas
- Total Mil tahun 2018 adalah 98.907 Mil Laut
- Total port of call in 2018 were 91 ports
- Total PSO Ship in 2018 were 26 Ships
- Total Lines in 2018 were 1.200 lines
- Total Mile in 2018 were 98.907 Sea Miles





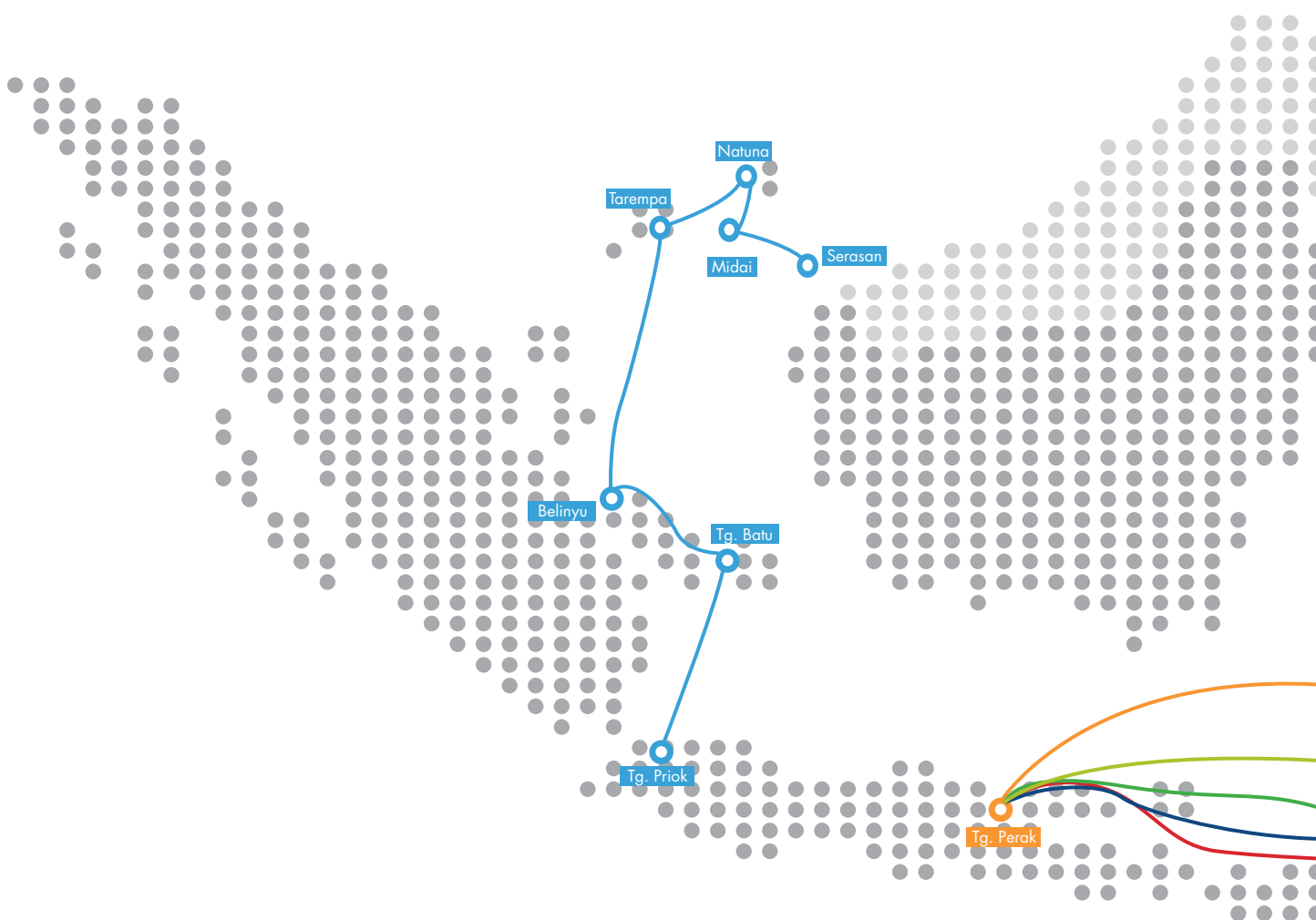
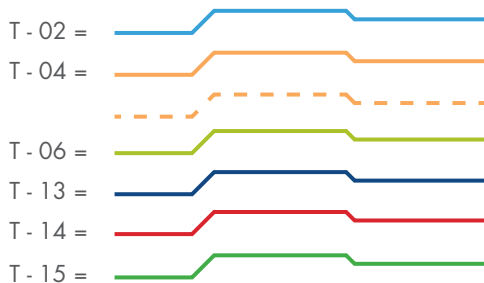
Peta Wilayah Operasi Jaringan Trayek Kapal Ship Route Network Operational Area





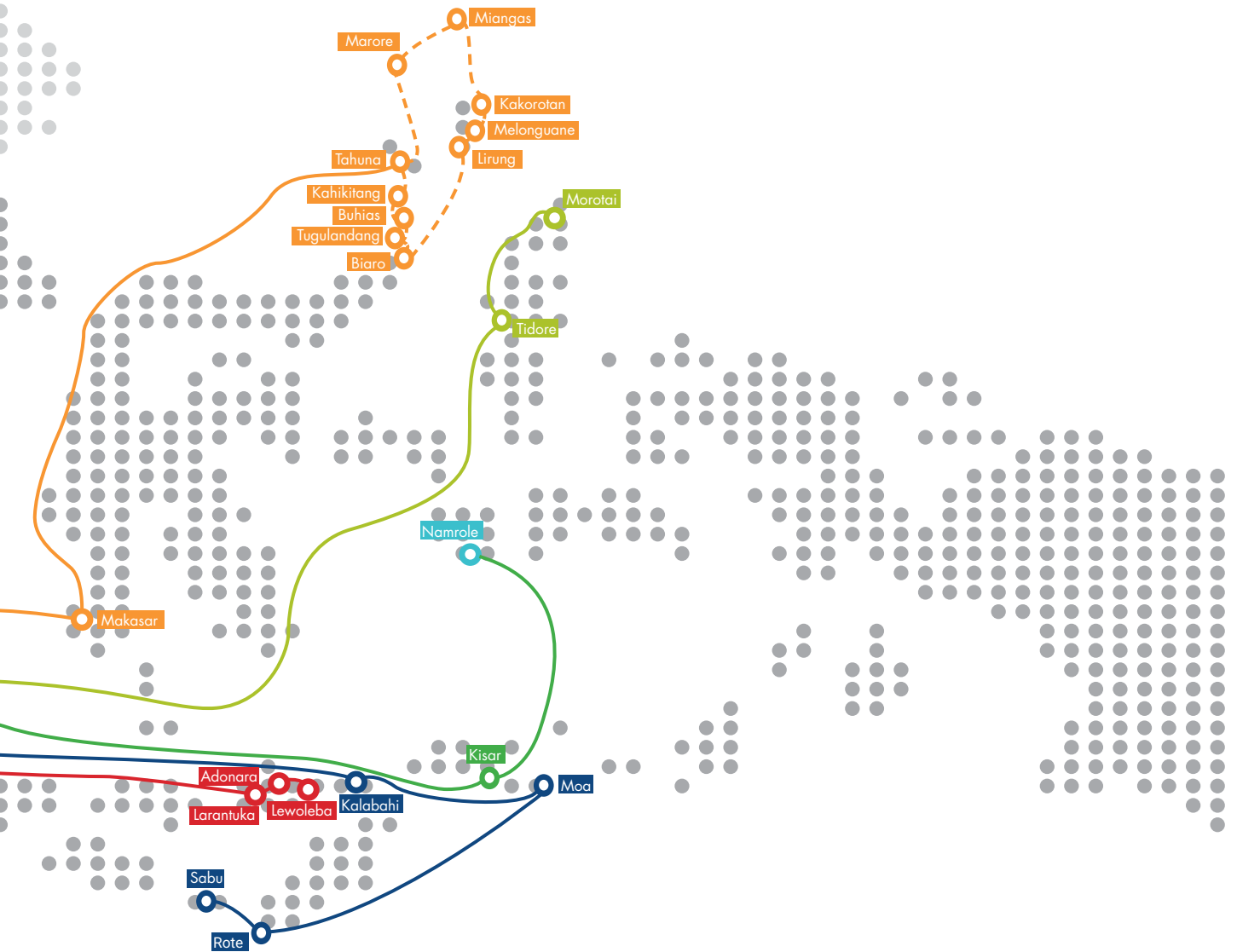
Jaringan Trayek Tol Laut Tahun 2018

The Tol Laut Route 2018





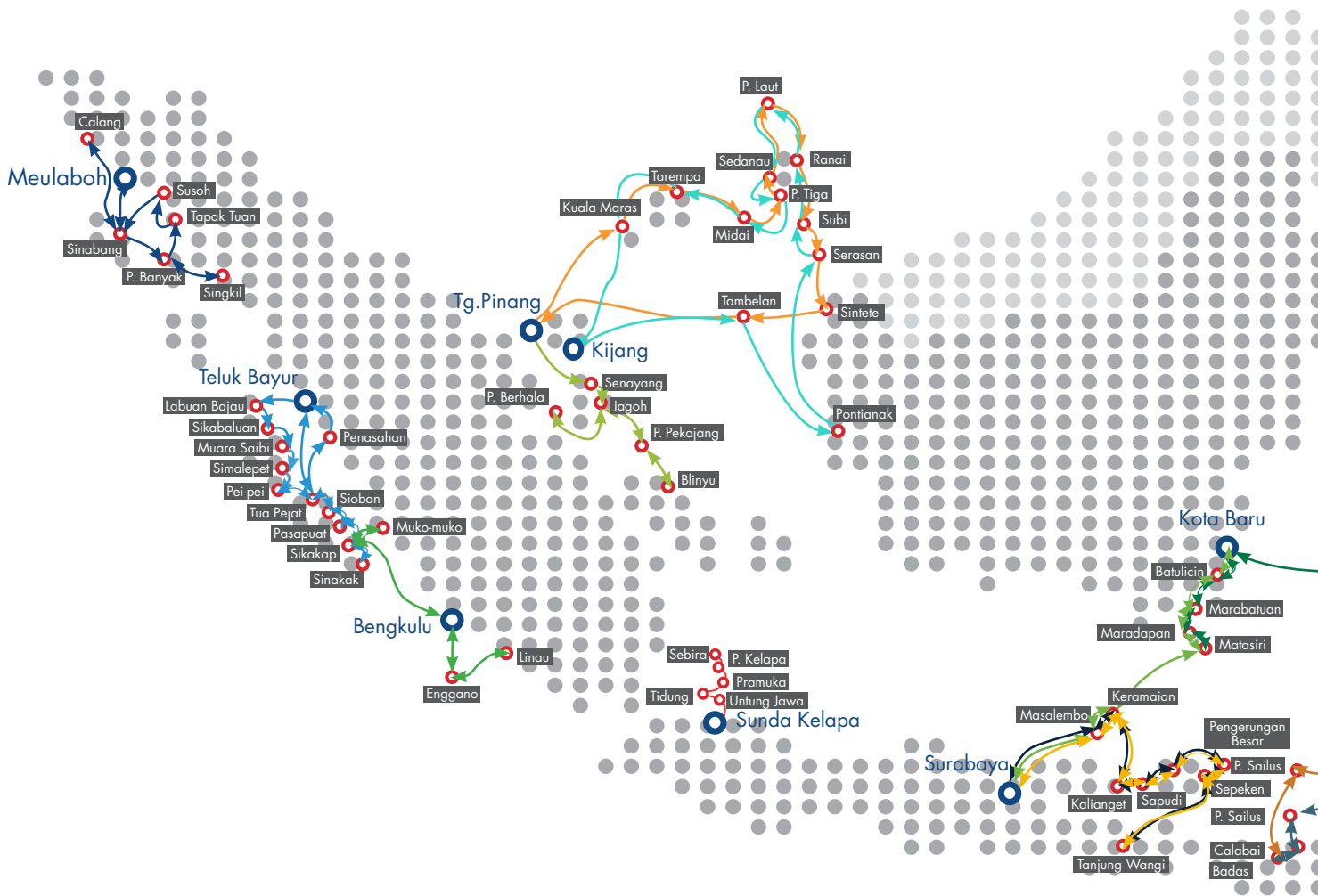
Jaringan Trayek Tol Laut Tahun 2018 The Tol Laut Network Sea 2018





Jaringan Trayek Nasional Kapal Perintis Tahun 2018

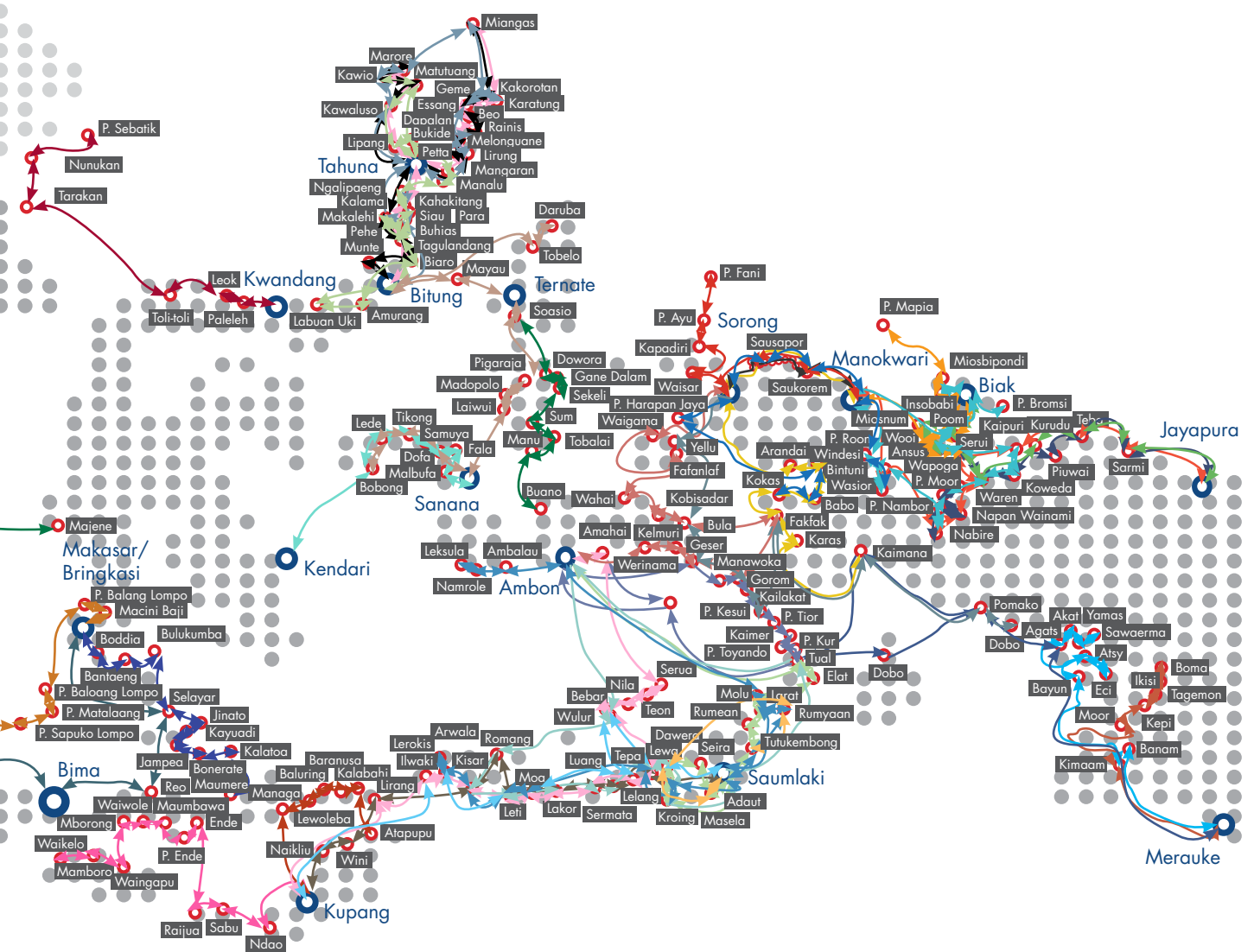
National Ship Perintis Route 2018





Jaringan Trayek Nasional Kapal Perintis Tahun 2018

National Route Network Ship Perintis 2018

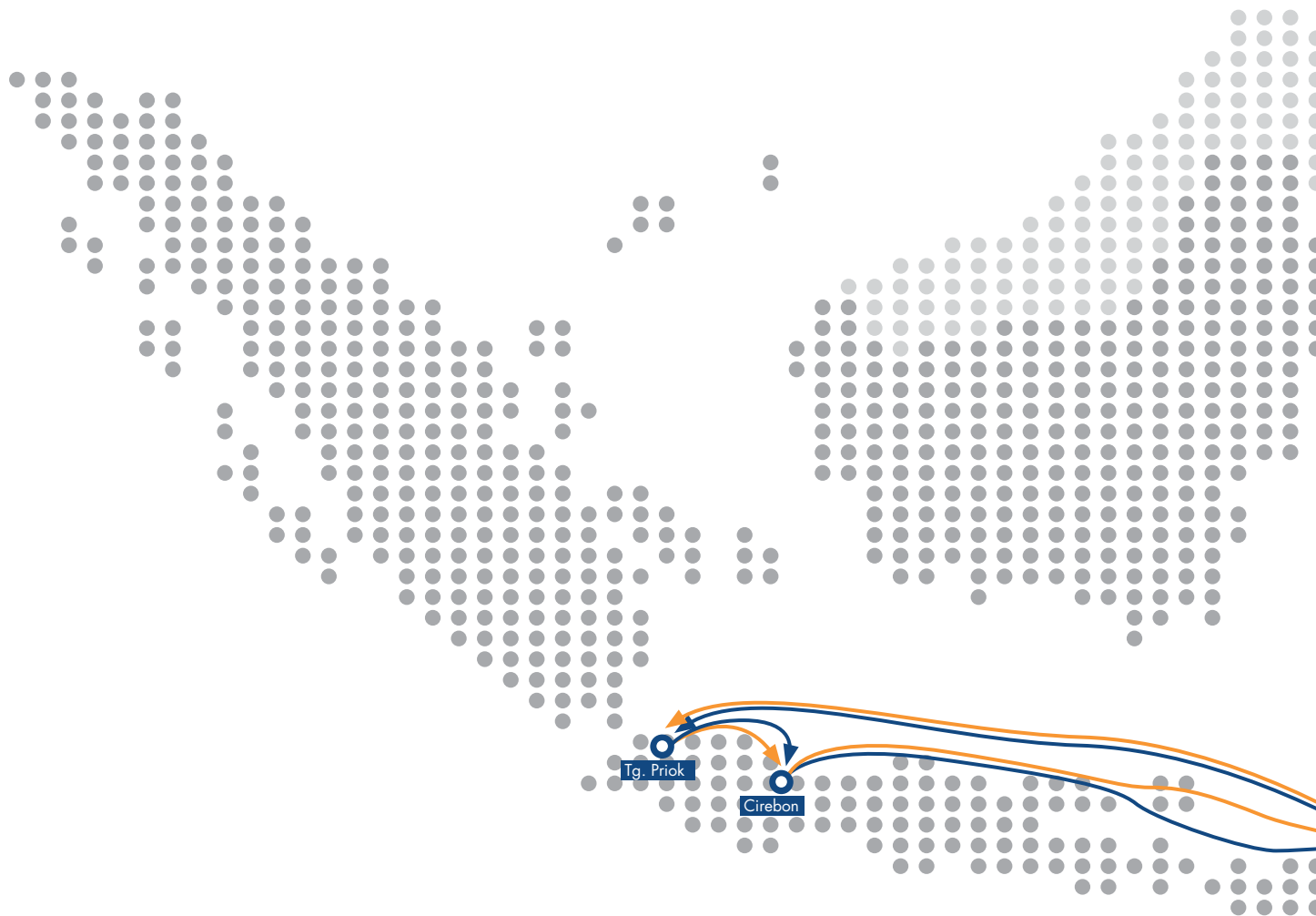




Rute Kapal Ternak 2018

Cattle Ship Route 2018

No.	Provinsi/ Pangkalan Province/Base	Kode Trayek Route Code	Jaringan Trayek dan Jarak Mil A network of Routes and distance Miles	Jumlah Jarak The Amount of Distance
1	Kupang, NTT	RT-1	Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tg. Priok - 150 - Cirebon - 1.063 - Kupang	2.256
2	Kupang, NTT	RT-3	Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tg. Priok - 150 - Cirebon - 1.063 - Kupang	2.256





Rute Kapal Ternak 2018 Cattle Ship Route 2017

RT - 1  KM. Camara Nusantara 1
RT - 3  KM. Camara Nusantara 3





Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telp. Phone Number	Fax Faximile	Email Email	Website Website
PT PELNI (Persero)					
Kantor Pusat Head Office	Jl. Gajah Mada No. 14, Jakarta 10130	+6221 6334 342	+6221 6385 4130	humas@pelni.co.id	www.pelni.co.id
Pemasaran Marketing	Jl. Gajah Mada No. 14, Jakarta 10130	+6221 6385 50962	-	divisi.pemasaran@ pelni.co.id	-
Anak Perusahaan Subsidiaries					
PT Sarana Bandar Nasional (SBN)	Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-144, Cempaka Putih, Jakarta -10510	+6221 4287 9000	+6221 4287 8389	info@ptsbn.co.id	www.ptsbn.co.id
Rumah Sakit PELNI Petamburan	Jl. Aipda Ks Tubun No. 92-94, Jakarta Pusat DKI Jakarta 11410	+6221 5306 901	+6221 5483 145	pemasaran@rspelni. net	www.rspelni.co.id
Pelita Djaya Indonesia Corporation (PIDC)	Ruko Cempaka Mas Jl. Suprpto Blok Q No. 5 Jakarta Pusat	+6221 4393 3184	+6221 4393 1623	pt.pidc@gmail.com	-
Strategic Business Units Strategic Business Units					
Galangan Surya Surabaya	Jl. Nilam Barat No. 39 Surabaya 60165	+6231 3291 909 +6231 3292 961	+6231 3291 909	galangan@pelni.co.id	-
Hotel Bahtera Cipayung	Jl. Raya Puncak Cipayung No. 256, Bogor	+6251 8254 251 +6251 8257 451	+6251 8256 663	hotelbahtera@ hotelbahtera-pelni. co.id	-
Cabang A Branch A					
Tg Priok	Jl. Palmas No. 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara	+6221 4393 3184	+6221 4393 1623	tg-priok@pelni.co.id	-
Makassar	Jl. Sawerigading No. 14, Makassar	+62411 3614 861	+62411 3631 395 +62411 3614 788	makassar@pelni.co.id	-
Surabaya	Jl. Pahlawan No.112-114, Surabaya	+6231 3293 197	+6231 3538 958 +6231 3293 195	surabaya@pelni.co.id	-
Cabang B Branch B					
Jayapura	Jl. Argapura No. 15, Jayapura Selatan, Papua	+62967 5332 70 +62967 5330 70 +62967 5314 12	+62967 5319 21 +62967 5333 70	jayapura@pelni.co.id	-
Sorong	Jl. Jend. A. Yani, Kompleks Pelabuhan, Sorong	+62951 3218 60	+62951 323873	sorong@pelni.co.id	-
Ambon	Jl. D.I. Panjaitan No. 19, Ambon	+62911 3482 19 +62911 3531 61 +62911 3423 28	+62911 3520 49	ambon@pelni.co.id	-
Semarang	Jl. Mpu Tantular 25-27, Semarang	+6224 3540 238 +6224 3546 722	+6224 3555 156	semarang@pelni.co.id	-
Bau-bau	Jl. Pahlawan No.1, Bau-bau Sulawesi Tenggara	+62402 2821 258 +62402 2821 905 +62402 2822 705	+62402 2821 188	bau-bau@pelni.co.id	-
Balikpapan	Jl. Yos Sudarso No. 1 Balikpapan	+62542 4241 71 +62542 4224 10	+62542 7350 09	balikpapan@pelni. co.id	-
Kupang	Jl. Pahlawan No.7 Kel. Fatufeto - Kec. Alak Kupang, NTT	+62380 8219 44 +62380 8238 98	+62380 8336 46	kupang@pelni.co.id	-
Bitung	Jl. Sam Ratulangi No. 7 Bitung, Bitung Kota - Sulawesi Utara	+62438 3635 2 +62438 3581 8	+62438 3358 8	bitung@pelni.co.id	-
Manokwari	Jl. Siliwangi No. 24 Manokwari, Papua Barat	+62986 2151 66 +62986 2151 67 +62986 2151 65	+62986 2151 68	manokwari@pelni. co.id	-
Tg. Pinang	Jl. Jend. A. Yani No. 06 Tg. Pinang Kepulauan Riau	+62771 2151 3 +62771 2193 3	+62771 2342 7	tg-pinang@pelni.co.id	-



Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telp. Phone Number	Fax Faximile	Email Email	Website Website
Cabang C Branch C					
Batam	Jl. DR Cipto Mangunkusumo No. 4, Tanjung Pinggir, Sekupang, Pulau Batam	+62778 3221 81 +62778 3210 70	+62778 3210 85 +62778 3255 86	batam@pelni.co.id	-
Pare-pare	Jl. Lasiming No. 44 Pare-pare, Sulawesi Selatan	+62421 2101 7 +62421 2470 9	+62421 2307 9	pare-pare@pelni.co.id	-
Nabire	Jl. Frans Kaisepo No. 14, Nabire, Papua	+62984 2285 0 +62984 2318 1 +62984 2507 2	+62984 2135 0	nabire@pelni.co.id	-
Ternate	Jl. Jend.A.Yani, Kompleks Pelabuhan, Ternate, Maluku Utara	+62921 3121 434 +62921 4124 434 +62921 3125 474	+62921 3121 276	ternate@pelni.co.id	-
Medan/Belawan	Jl. Gunung Krakatau No. 17A, Medan	+6261 4206 5268	+6261 4206 5267	belawan@pelni.co.id	-
Pontianak	Jl. St. Abdurahman No.12 Pontianak, Kalimantan Barat	+62561 7481 24 +62561 7481 29	+62561 7481 31	pontianak@pelni.co.id	-
Kumai	Jl. Sudirman, SH No. 16 Pangkalan Bun/Kumai, Kalimantan Tengah	+62532 2442 0	+62532 2407 3	kumai@pelni.co.id	-
Tarakan	Jl. Kusuma Bangsa No. 100, Gunung Lingkas, Tarakan Kota	+62551 5116 9 +62551 2544 0	+62551 21529	tarakan@pelni.co.id	-
Nunukan	Jl. A. Yani No. 11, Nunukan, Kalimantan Tenggara	+62556 2130 9 +62556 2298 4	+62556 2102 9	nunukan@pelni.co.id	-
Fak-fak	Jl. D.I. Panjaitan, Fak-fak Papua Barat	+62956 2323 0 +62956 2337 1	+62956 2255 6	fak-fak@pelni.co.id	-
Maumere	Jl. Don Juan No. 6 kota Uneng, Kab. Sikka, Flores NTT	+62382 2427 060	-	maumere@pelni.co.id	-
Serui	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Serui Yapen Papua	+62983 3230 9 +62983 3234 7	+62983 3155 2	serui@pelni.co.id	-
Biak	Jl. Jendral Sudirman No. 37, Biak	+62981 2325 5 +62981 2325 6	+62981 2222 5	biak@pelni.co.id	-
Sampit	Jl. Jendral A. Yani No. 70 Sampit, Kalimantan Tengah	+62531 2200 6 +62531 2399 4	+62531 2450 2	sampit@pelni.co.id	-
Bali/Denpasar	Jl.Raya Kuta No. 299 Kuta Badung, Denpasar - Bali	+62361 7622 63 +62361 7639 64	+62361 7639 64	denpasar@pelni.co.id	-
Larantuka	Jl. Basuki Rahmat No 60, Flores Timor	+62383 2115 5	+62383 2115 3	larantuka@pelni.co.id	-
Tual	Jl. Ahmad Yani No. 2 Lodar El, Kota Tual, Maluku Tenggara	+62916 2252 0 +62916 24092	+62916 2118 1	tual@pelni.co.id	-
Namlea	Jl. Bandar Angin, Namlea, Kepulauan Buru, Maluku	+62913 2127 2	-	namlea@pelni.co.id	-
Cabang D Branch D					
Palu	Jl. R.A. Kartini No. 96 Palu, Sulawesi Tenggara	+62451 4216 96	+62451 4232 37	palu@pelni.co.id	-
Timika	Jl. Kartini No. 5, Mimika Baru, Timika - Papua	+62901 3126 660	+62901 3211 06	timika@pelni.co.id	-
Ende	Jl. Kathedral No. 2, Ende, Flores NTT	+62381 2104 3	+62381 2141 9	pelniende@yahoo.co.id	-



Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office

Keterangan Description	Alamat Address	No. Telp. Phone Number	Fax Faximile	Email Email	Website Website
Kendari	Jl. Lakidende No.10, Kendari, Sulawesi Tenggara	+62401 3121 935	+62401 3122 156	kendari@pelni.co.id	-
Bima	Jl. Kesatria No. 2, Kota Bima, NTB	+62374 4204 6 +62374 4220 3	+62374 4262 5	bima@pelni.co.id	-
Waingapu	Jl. Hasanuddin No. 1 Waingapu	+62387 6102 8 +62387 6166 5	+62387 6102 7	waingapu@pelni.co.id	-
Kotabaru/Batulicin	Jl. Pelabuhan Samudera No. 125, Butulicin, Kotabaru	+62518 7082 2	+62518 7141 9	kotabaru@pelni.co.id	-
Dobo	Jl. Yos Sudarso No. 22 Dobo, Kepulauan Aru - Maluku	+62917 2130 0 +62917 2140 0	+62917 2150 0	doobo@pelni.co.id	-
Toli-toli	Jl. Yos Sudarso No. 399 Kel. Sidoarjo Kab. Toli- toli, Sulawesi Tengah	+62453 2321 0 +62453 2235 7	+62453 2137 6	toli-toli@pelni.co.id	-
Kaimana	Jl. Pelabuhan No. 4, Kaimana	+62957 2100 9	+62957 2146 4	kaimana@pelni.co.id	-
Tg. Balai Karimun	Jl. Mayjen MT. Haryono No. 11 Sei Ayam, Tebing Tg. Balai Karimun	+62777 3254 46	+6277 3254 60	tg-balai@pelni.co.id	-
Merauke	Jl. Sabang No. 318, Merauke Papua	+62971 33303 73	-	merauke@pelni.co.id	-
Luwuk	Jl. Sungai Danau Limboto No. 74 Luwuk, Sulawesi Tengah	+62461 2156 4 +62461 2301 3	+62461 2188 8	luwuk@pelni.co.id	-
Terminal Point Terminal Point					
Gorontalo	Jl. 23 Januari No. 182, Kelurahan Biawao, Kecamatan kota Selatan, Gorontalo	+62435 820 89	+62435 8211 45	gorontalo@pelni.co.id	-
Labuan Bajo	Jl. Trans Flores, pasar Baru Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat NTT	+62385 2440 304	-	labuan-bajo@pelni. co.id	-
Ampenan	Jl. Industri No 1 Ampenan, Mataram NTB	+62370 6372 12	+62370 6316 04	ampenan@pelni.co.id	-
Pangkalpinang	Jl. Hamidah No. 67 Pangkalpinang	+62717 4222 16, +62717 4331 6	+62717 4213 04	pk-pinang@pelni.co.id	-
Tahuna	Jl. Sudirman No. 35 Kota Tahuna, Kab. Kepulauan Sangie	+62432 2105 3	+6232 2256 6	-	-



Informasi pada Website Perusahaan

Information at Company Website



PT PELNI (Persero) memberikan kemudahan akses informasi secara transparan dan akurat kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui Website Perusahaan.

PT PELNI (Persero) provides transparent and accurate information access to all shareholders and stakeholders through the Company Website



Informasi pada Website Perusahaan

Information at Company Website

Situs web resmi Perusahaan www.pelni.co.id, telah memenuhi informasi yang meliputi:

1. Informasi Pemegang Saham;
2. Isi Kode Etik (Etika Bisnis);
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Laporan Keuangan Tahunan terpisah (5 tahun terakhir);
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

Selain informasi yang disebutkan di atas, Website PT PELNI (Persero) juga membuat informasi yang lebih spesifik, yaitu:

The Company's official website, www.pelni.co.id has fulfilled the following information:

1. Shareholders informations;
2. Code of Ethic (Business Ethic);
3. Information of General Meeting of Shareholders;
4. Annual Financial Report (AGMS);
5. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors
6. Board Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary and Audit Internal.

Other than the above information, Website of PT PELNI (Persero) also provides more specific information, such as:

Profil Profile	Direksi PT PELNI (Persero) Board of Directors PT PELNI (Persero)
	Kegiatan Usaha Business Activities
	Sejarah Perusahaan History of the Company
	Struktur Organisasi Organization Structure
	Sumber Daya Manusia Human Resources
	Tata Kelola Perusahaan PT PELNI (Persero) Good Corporate Governance PT PELNI (Persero)
	Tata Nilai Utama, Budaya Perusahaan dan Prilaku di Lingkungan PT PELNI (Persero) Primary Value, Company Culture and Behaviour in Environment of PT PELNI (Persero)
	Visi dan Misi PT PELNI (Persero) Vision and Mission of PT PELNI (Persero)
Promo & Produk Promotion & Product	Paket Wisata Tour Package
	Reservasi Online Angkutan Muatan Kapal PT PELNI (Persero) Online Reservation Freight Ship of PT PELNI (Persero)
	Tol Laut dan Angkutan Ternak Tol Laut and Cattle Ship
Tujuan Wisata Tourism Destination	Kepulauan Komodo Komodo Islands
	Kepulauan Raja Ampat Raja Ampat Islands
	Kepulauan Wakatobi Wakatobi Islands
Berita Informasi Information	Program CSR CSR Program
	Waspada Penipuan Bermodus Rekrutmen Alert for Fraud Recruitment
	Berita News
Kontak Kami Contact Us	Alamat Address
	Call Center Call Center
	Social Media Social Media





04

Analisa & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis



Tinjauan Makro Ekonomi

Macro Economic Review



Setelah dua tahun mengalami ekspansi yang solid, kondisi perekonomian dunia pada awal 2018 masih melaju cukup baik namun kehilangan lajunya memasuki kuartal ke-dua sampai tutup tahun, bahkan tren perlambatan ini diprediksi akan masih berlangsung di tahun 2019. Bank dunia memprediksi perekonomian global masih akan berada di angka 3,7%.

Memasuki kuartal akhir 2018, IMF memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya dari yang mereka prediksi di awal tahun sebesar 3,9% menjadi 3,7%, hal ini dilakukan menyusul kenaikan tarif perdagangan antara Cina dan AS yang masih belum jelas akan berapa lama konflik tersebut berlangsung. IMF juga menyoroti melemahnya sentimen di pasar keuangan global dan kontraksi di Turki yang sekarang diproyeksikan lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 5,17%, kenaikan ini menunjukkan tren yang membaik jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar 5,07% dan tahun 2016 sebesar 5,03%. Ditengah tantangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 ini merupakan pencapaian yang cukup baik. Kinerja ini dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang membaik dan ekspor barang dan jasa yang terjaga, meskipun impor barang dan jasa masih tinggi.

After two years has experienced an solid expansion, the global economic in the beginning of 2018 has been experiencing well growth despite of losted its position in the second quarter until the end of the year. Moreover this slowing trend stil continues to emerge in 2019. The world bank predicts the global economic that is at 3.7%.

Entering the final quarter of 2018, IMF changed its global growth of what they predicted at the beginning of the year by 3.9% to 3.7%, this taken because a war trade tariff between China and US which is still unclear how the conflict took place. IMF also highlighted the weakening sentiment on the global financial and contractions markets in Turkey which projected getting deeper than previous prediction.

Based on the Central Bureau of Statistics data, Indonesia's economic in 2018 was able to grow by 5.17%, this increase showed an positive trend compared to 2017 of 5.07% and in 2016 of 5.03%. in the midst of global economy challenges, Indonesia's economic growth in 2018 has had feasible achievement. This performance was influenced by improving public consumption and maintaining exports of goods and services, eventhough the import needs of goods and services has been still high on demand.



Tinjauan Industri Pelayaran

Shipping Industry Review

Tingkat pertumbuhan yang merata dan stabil antar wilayah adalah salah satu indikator yang menjadi tolak ukur pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Ketersediaan jasa transportasi di seluruh wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan karena fungsi strategis transportasi ikut menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi industri maritim yang besar jika dilihat dari luas laut Indonesia yakni 5,8 juta km² dengan jumlah pulau sebesar 17.508 pulau. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti pengadaan transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, serta pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2018, Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk distribusi barang dan mobilitas manusia serta menunjang dan mengembangkan tol laut dengan target pembangunan pelabuhan laut dan pembangunan kapal perintis.

Untuk mendukung penyelenggaraan program tol laut tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan 58 (lima puluh delapan) pelabuhan singgah dan 3 (tiga) pelabuhan pangkal/muat. Serta melihat hasil evaluasi penyelenggaraan program tol laut di tahun 2017, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penambahan trayek tol laut menjadi 15 trayek dan pelabuhan singgah di tahun 2018 dengan mengoptimalkan rute trayeknya menggunakan skema pengumpul dan pengumpan (*hub and spoke*). Hal ini diharapkan mampu meningkatkan potensi maritim Indonesia.

The level of equitable and stable growth between each region is one of indicator that becomes a benchmark for the country's economic growth. Transportation availability for all regions is an essential needs because the strategic function of transportation contributes to create stability and continuity of community and government activities. As a maritime country, Indonesia has a large maritime industry potential if viewed from the length of Indonesian sea territory, which is 5.8 million km² with 17,508 islands. By its potential, Indonesia must be supported with a reliable transportation system such as sea transportation procurement, the construction and maintenance of cargo ship and port, and the construction of Tol Laut to equalize the commodity prices.

In order to encourage the economic growth in 2018, the Government through the General Directorate of sea transportation of the Ministry of Transportation continues to improve the services for goods distribution and human mobility to support and develop Tol Laut with the target construction of ports and perintis ship.

To support the implementation of Tol Laut program in 2018, the General Directorate of Sea Transportation of the Ministry of Transportation has prepared 58 transit ports and 3 loading ports. Seeing the evaluation results of Tol Laut program in 2017, the General Directorate of Sea Transportation has added 15 routes and ports of Tol Laut in 2018 by its routes optimization using a collector and feeder scheme (*hub and spoke*). This is expected to increase Indonesia's maritime industry potential.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Per Business Segment Operation Overview

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya.

Untuk tujuan manajemen, Grup terbagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pelni membagi segmen usaha menjadi 6 (enam) segmen, yakni :

- Segmen Jasa pengangkutan;
- Segmen Jasa keagenan;
- Segmen Jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan Red dan ekspedisi/forwarding;
- Segmen Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal;
- Segmen Charter dan broker kapal; dan
- Segmen Jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan.

An operating segment is a component of an entity engaged in business activities of which it may earn revenues and incur expenses that operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision-maker to take the decisions about resources allocated to the segment and value of its performance.

For management purposes, these Groups are divided into several operating segments based on its products and services which independently managed by its responsible segment managers for the performance of each segment. These segment managers report directly to the management that regularly reviews the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance.

These business segments divided 6 (six), among others:

- Freight service segment;
- Agency service segment;
- Port operation, warehousing, expedition/forwarding carriage segment;
- Ship maintenance, and docking or reparation segment;
- Ship charter and broker segment; and
- Consultancy, Training, health services and hospitality business segment.

Kinerja Segmen Usaha PT PELNI (Persero) Tahun 2018

Business Segment Performance of PT PELNI (Persero) in 2018

Uraian Description	2018	2017	Δ		Kontribusi Description
			Nominal Nominal	%	
Segmen Jasa pengangkutan Freight Services Segment					
Penugasan Pemerintah Government Assignments	2.403.998	2.461.770	(57.772)	(2,35%)	
Tambang Pasasi Ticketing	950.638	889.395	61.243	6,89%	
Tambang Muatan Cargo	330.609	320.479	10.130	3,16%	
Usaha Perkapalan Lainnya Other Shipping Business	48.402	35.137	13.265	37,75%	
Jumlah Total	3.733.647	3.706.781	26.866	0,72%	81,00%
Segmen Jasa Keagenan Agency Services Segment					
Usaha Keagenan Agency Business	3.661	4.633	(972)	(20,98%)	
Usaha Wisata Bahari Marine Tourism Business	1.277	67	1.210	1805,97%	
Jumlah Total	4.938	4.700	238	5,06%	0,11%

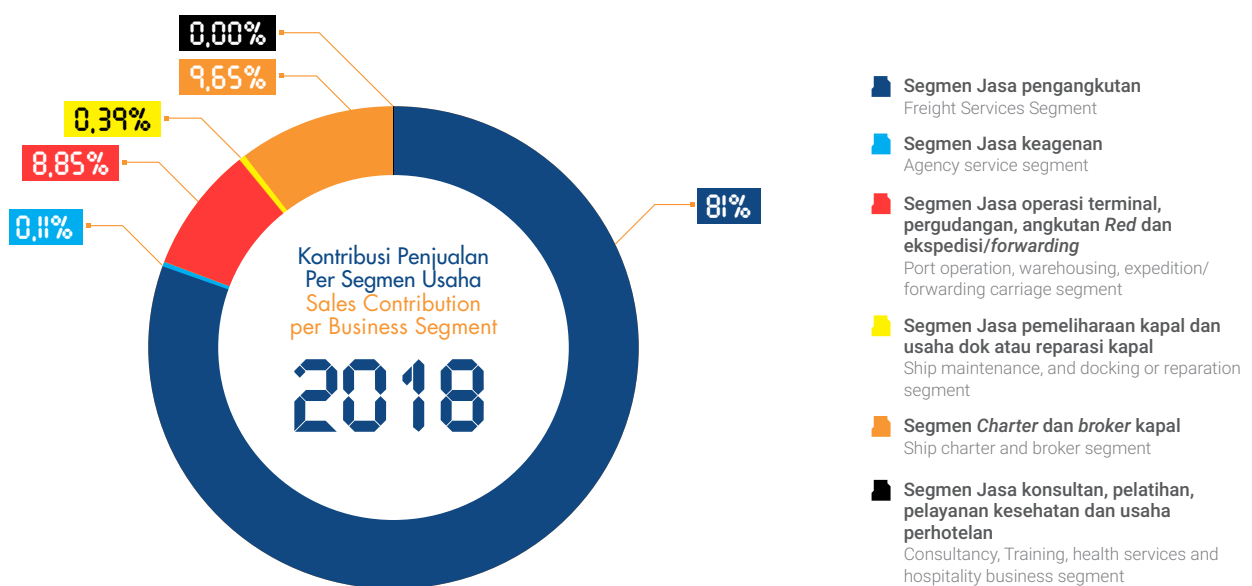


Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Per Business Segment Operation Overview

Uraian Description	2018	2017	Δ		Kontribusi Description
			Nominal Nominal	%	
Segmen Jasa Operasi Terminal, Pergudangan, Angkutan Red dan Ekspedisi/Forwarding Segment of Terminal operation, warehouse, Red transportation, and expedition/forwarding services					
Usaha Penunjang Lainnya Other Supporting Enterprises	407.889	240.756	167.133	69,42%	
Jumlah Total	407.889	240.756	167.133	69,42%	8,85%
Segmen Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal Segment of Ship maintenance and dock business or ship reparation services					
Usaha Perbengkelan Workshop Business	18.099	16.956	1.143	6,74%	
Jumlah Total	18.099	16.956	1.143	6,74%	0,39%
Segmen Charter dan broker kapal Segment of Ship Charter and Broker					
Charter dan Broker Kapal Ship Charter and Broker	0	0	0	-	
Jumlah Total	0	0	0	-	0,00%
Segmen Jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan Segment of Consultant, Training, Health Care Services, and Hospitality Business					
Layanan Kesehatan Health services	439.089	441.409	(2.320)	(0,53%)	
Usaha Perhotelan Hospitality Business	5.573	5.090	483	9,49%	
Jumlah Total	444.662	446.499	(1.837)	(0,41%)	9,65%
Jumlah Pendapatan Total Revenue	4.415.692	4.255.264	160.428	3,77%	100%

dalam jutaan Rupiah
(in million Rupiah)

Kontribusi Penjualan per Segmen Usaha PT PELNI (Persero) Tahun 2018 Sales Contribution per Business Segment of PT PELNI (Persero) in 2018





Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Per Business Segment Operation Overview

SEGMENT USAHA JASA PENGANGKUTAN.

Segmen jasa pengangkutan terdiri dari beberapa kegiatan yang melaksanakan kegiatan berupa penyedia pelayanan jasa angkutan baik berupa jasa angkut penumpang maupun muatan barang tertentu. Pendapatan segmen usaha jasa pengangkutan berasal dari pendapatan yang berasal dari kegiatan dibawah ini:

Penugasan Pemerintah

Segmen usaha penugasan pemerintah merupakan aktivitas usaha PT PELNI dalam penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation - PSO*) yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan – Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang meliputi:

1. Angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
2. Kegiatan pengoperasian kapal ternak;
3. Angkutan barang di laut (Tol laut);
4. Kapal perintis milik negara; dan
5. Kapal rede.

Tambang Pasasi

Segmen usaha Tambang Pasasi melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dimana Pendapatan tambang pasasi sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang pasasi (B60A). Tambang Pasasi terdiri dari Tambang pasasi Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Pasasi Kelas Wisata dan Tambang Pasasi Kelas Ekonomi.

Tambang Muatan

Segmen usaha Tambang Muatan melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dimana Pendapatan tambang muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang daftar tambang muatan (B60). Tambang muatan terdiri dari Tambang Muatan Palka, Muatan *Dry Container* dan Muatan *Reefer Container*.

Usaha Perkapalan Lainnya

Segmen usaha perkapalan lainnya mencakup usaha pelayanan jasa yang diberikan perseroan dengan beberapa jenis kapal seperti Kapal Perintis yang menyediakan pelayanan transportasi ke bagian-bagian wilayah Republik Indonesia bagian timur. Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

FREIGHT SERVICES SEGMENT.

Freight services segment consists of several business activities those are freight carriage services both passenger or certain goods transportation. Freight business revenues originated from several activities below:

Government Assingment

Government Assignment business segment is an business activity of PT PELNI in performing Public Service Obligation (PSO) that given by the Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation – the General Directorate of Sea Transportation which includes:

1. Sea transportation for economy class passengers;
2. Cattle ship operation;
3. Cargo transportation (Tol Laut);
4. State-owned Perintis ships; and
5. Rede ship.

Ticketing

Ticketing business segment performs the transportation activities in the form of certain goods in accordance with specified specification, which managed by Head of PT PELNI (Persero) where ticketing revenues is in accordance with the level of services completion on the basis of pasasi mining revenues list (B60A). The Ticketing consists of class I, class II, class III, class IV and pasasi tour class and ekonomi class.

Cargo

Cargo business segment carries out transportation activities in the form of certain goods in accordance with specified specification, managed by Head of PT PELNI (Persero) where Cargo revenues is recognized according to the level of services completion on the revenues list of cargo mining (B60). The Cargo consists of loading holds mining, dry container and reefer container load.

Other Shipping Business

Other shipping business segments include business services that provided by the Company with several types of ship such as Perintis ship that provides transportation services for the eastern region of Republic of Indonesia. Cattle ship aims to help the government suppressing the meat prices and to improve the welfare of domestic cattle farming.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Per Business Segment Operation Overview

Kapasitas produksi Segmen Usaha Jasa Pengangkutan

Production Capacity of Freight Business Segment

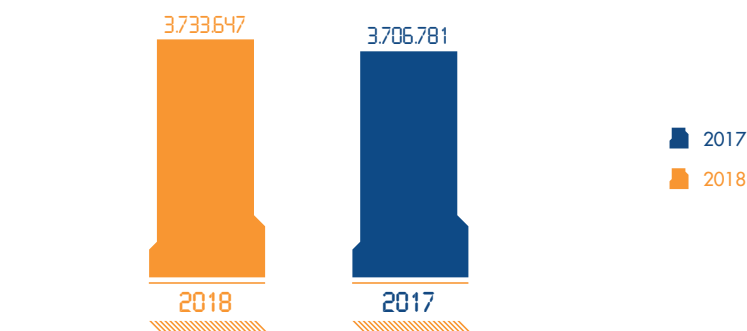
Jenis Kapal Type of Ship	Unit Unit	Frekuensi Frequency	Jumlah Muatan Total Load				
			Penumpang Passenger Orang Person	Barang Cargo Ton/M3	Kontainer Container Teus	Kendaraan Vehicles Unit	Ternak Cattle Ekor Tail
Kapal Penumpang Passenger Ship	26	622	3.614.988	56.154	9.911	8.511	-
Kapal Perintis Perintis Ship	47	1235	310.519	25.719	-	-	-
Kapal Tol Laut Tol Laut Ship	9	131	-	58.754	13.172	-	-
Kapal Ternak Cattle Ship	3	72	-	-	-	-	36.000

Pendapatan Segmen Usaha Jasa Pengangkutan

Jumlah pendapatan segmen usaha jasa pengangkutan di tahun 2018 adalah sebesar Rp3,73 triliun meningkat sebesar 0,72% dari pendapatan yang dihasilkan dari tahun 2017 yang sebesar Rp3,70 triliun. Nilai pendapatan segmen usaha jasa pengangkutan terdiri dari Rp2,40 triliun dari penugasan pemerintah, Rp950,64 miliar dari tambang pasasi, Rp330,61 miliar dari tambang muatan, dan sisanya sebesar Rp48,40 miliar dari usaha perkapalan lainnya. Segmen Jasa pengangkutan ini berkontribusi sangat besar terhadap total pendapatan PT PELNI (Persero) yakni sebesar 81,00% selama tahun 2018.

Freight Services Business Segment Revenues

The total revenue originating from the carriage service business segment in 2018 was Rp3.73 trillion, showing an increase of 0.72% compared to the revenue generated from 2017 amounted to Rp.3.70 trillion. The carriage business segment revenue consisted of Rp2.40 trillion from government assignment, Rp950.64 billion from the pasasi mining, Rp330.61 billion from cargo mining and the remaining Rp48.40 billion from other shipping business. The carriage service segment contributed greatly to PT PELNI (Persero)'s total revenues of 81.00% throughout 2018.



dalam jutaan Rupiah
(in million Rupiah)

Profitabilitas Segmen Usaha Jasa pengangkutan

Tingkat profitabilitas tidak dapat disajikan per-segmen usaha dikarenakan beban usaha dicatat secara konsolidasi.

Freight Services Business Segment Profitability

Profitability rate could not be mentioned per business segment due to business expense recorded consolidately.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Per Business Segment Operation Overview

SEGMENT USAHA JASA KEAGENAN

Pendapatan segmen usaha jasa keagenan meliputi 2 (dua) kegiatan yakni :

Usaha Keganan

Segmen Usaha keagenan dan angkutan bandar merupakan salah satu usaha andalan PT. PELNI yang dimulai sejak tahun 1960 yang meliputi jasa keagenan kapal-kapal baik domestik maupun luar negeri. Jenis kapal yang dioperasikan untuk mendukung segmen usaha ini meliputi:

1. Clearance in 7 out;
2. Bunker, Fresh Water, Provision Supply;
3. Crew Attendance;
4. Protecting Agent;
5. Custom Clearance;
6. Layanan Sea Pollution; dan
7. Layanan Garbage Removal.

Usaha Wisata Bahari

Salah satu jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan pada segmen jasa keagenan adalah Usaha Wisata Bahari yang menyediakan paket-paket wisata bahari ke berbagai destinasi di tanah air.

Kapasitas Produksi Segmen Usaha Jasa Keagenan

Jenis Kapal Type of Ship	Unit Unit	Frekuensi Frequency	Jumlah Penumpang Total Passengers	Destinasi Destination
Kapal Wisata Tourism Ship	1	8	1.667	Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini. Raja Ampat Islands, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan and Tomini.

Pendapatan Segmen Usaha Jasa Keagenan

Jasa keagenan sepanjang tahun 2018 berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,94 miliar meningkat sebesar 5,06% dari penjualan yang dihasilkan dari tahun 2017 yang sebesar Rp4,70 miliar. Nilai penjualan segmen usaha jasa keagenan terdiri dari Rp3,66 miliar yang berasal dari usaha jasa keagenan dan Rp1,28 miliar yang berasal dari usaha wisata bahari. Segmen jasa keagenan berkontribusi sebesar 0,11% dari total pendapatan usaha perusahaan sepanjang tahun 2018.

SEGMENT OF AGENCY SERVICES

Agency business segment divided into 2 (two) activities, namely:

Agency Business

Agency and port carriage business segments are one of prime business for PT PELNI that has been begun since 1960 including domestic or abroad ship agency. The types of ship operate to support business segment which includes:

1. Clearance in 7 out;
2. Bunker, Fresh Water, Provision Supply;
3. Crew Attendance;
4. Protecting Agent;
5. Custom Clearance;
6. Sea Pollution Services; and
7. Garbage Removal Services.

Marine Tourism Business

One type of services provided by the Company in the agency services segment is marine tourism business that provides marine tourism packages voyaging to various destinations in the Nations.

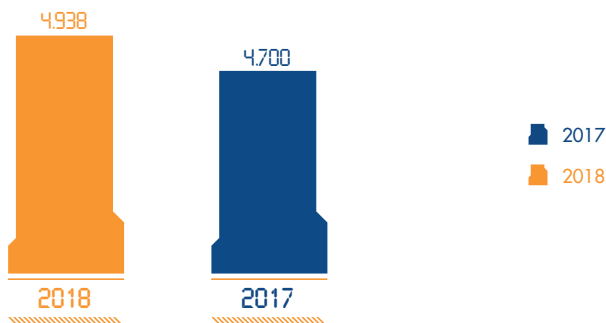
Capacity Production of Agency Services Business Segment

Agency Services Business Segment Revenues

Throughout 2018, agency services managed to record revenues of Rp4.94 billion, increased by 5.06% of sales generating from 2017 amounted to Rp4.70 billion. The sales value of the agency services business segment originating from Rp3.66 billion of agency services and Rp1.28 of marine tourism business. The agency services segment contributed by 0.11% of the Company's total operating revenues.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Per Business Segment Operation Overview



dalam jutaan Rupiah
(in million Rupiah)

Profitabilitas Segmen Usaha Jasa keagenan

Tingkat profitabilitas tidak dapat disajikan per-segmen usaha dikarenakan beban usaha dicatat secara konsolidasi.

SEGMENT USAHA JASA OPERASI TERMINAL, PERGUDANGAN, ANGKUTAN RED DAN EKSPEDISI/FORWARDING

Segmen usaha ini memperoleh pendapatan dengan menyediakan jasa penunjang lainnya seperti operasi terminal, pergudangan dan ekspedisi muatan kapal laut. Kegiatan usaha yang juga tercakup di dalam segmen usaha ini adalah penyediaan alternatif terkait Jasa Pengiriman Barang murah ke seluruh kota-kota di Indonesia yang berbentuk Kepulauan. Dengan menggunakan Armada Pelayaran Kapal Laut, setiap pengirim diuntungkan karena dapat melakukan pengiriman barang dalam jumlah tonase dan volume yang besar serta dapat melakukan pengiriman barang yang dilarang melalui jalur *cargo* udara.

Kapasitas produksi Segmen Usaha Jasa Operasi Terminal, Pergudangan, Angkutan Red dan Ekspedisi/Forwarding

Secara total, produksi dari segmen usaha jasa operasi terminal, pergudangan, dan ekspedisi/forwarding sepanjang tahun 2018 adalah senilai Rp407,89 miliar.

Pendapatan Segmen Usaha Jasa Operasi Terminal, Pergudangan, Angkutan Red dan Ekspedisi/Forwarding

Sepanjang tahun 2018 segmen usaha ini berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp407,89 miliar meningkat cukup signifikan yakni sebesar 69,42% atau senilai dengan Rp167,13 miliar dari penjualan yang dihasilkan dari tahun 2017 yang sebesar Rp240,76 miliar. Dari total pendapatan perusahaan Segmen Jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan Red dan ekspedisi/forwarding berkontribusi sebesar 8,85%.

Agency Services Business Segment Profitability

Profitability rate could not be mentioned per business segment due to business expense recorded consolidately.

SEGMENT OF TERMINAL OPERATION, WAREHOUSE, RED TRANSPORTATION, AND EXPEDITION/FORWARDING SERVICES.

This business segment earned revenues by providing other supporting services such as terminal operations, warehousing and expedition/forwarding ship services. Its business activity is also included the alternative provisions related to cheap freight forwarding services to all cities of the islands in Indonesia. By using the ship fleet, each shipper has the advantage of being able to deliver goods in large tonnage and volume or can deliver goods which prohibited by air lines cargo.

Business Production Capacity of Terminal Operations, Warehousing, Red Transportation and Expedition/Forwarding.

In total, the business segments production of terminal operations, warehousing and shipping / forwarding services was at Rp407.89 billion throughout 2018.

Business Segment Revenues of Terminal Operations, Warehousing, Red Transportation and Expedition/forwarding

Throughout 2018, this business segment managed to record revenues of Rp407.89 billion, significant increasing by 69.42%, or Rp167.13 billion of sales generated from 2017 which amounted to Rp240.76 billion. The total Company's revenue from the terminal operations, warehousing, Red transportation and expedition/forwarding accounted to 8.85%.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Per Business Segment Operation Overview



dalam jutaan Rupiah
 (in million Rupiah)

Pendapatan Segmen Usaha Jasa Operasi Terminal, Pergudangan, Angkutan Red dan Ekspedisi/Forwarding

Tingkat profitabilitas tidak dapat disajikan per-segmen usaha dikarenakan beban usaha dicatat secara konsolidasi.

Business Segment Revenues of Terminal Operation, Warehousing, Red Transportation and Expedition/Forwarding

Profitability rate could not be mentioned per-business segment due to business expense recorded consolidately.

SEGMENT USAHA JASA PEMELIHARAAN KAPAL DAN USAHA DOK ATAU REPARASI KAPAL

Segmen usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal bergerak dalam usaha perbengkelan yang dilakukan oleh anak perusahaan PT PELNI (Persero) yakni Galangan "Pelni Surya" yang Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin space dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

SHIP MAINTENANCE AND DOCK BUSINESS OR SHIP REPAIRATION SERVICES BUSINESS SEGMENT

The business segment of ship maintenance and dock or ship repairation services is carried out by a subsidiary of PT PELNI (Persero) namely "Pelni Surya" Shipyard which was established on May 20, 1996 and has built 500 ship type of PELNI, among others MV Sangiang, MV Pangrango, MV Wilis . PELNI Maintenance Facilities (PMF), is a strategic projection that can guarantee dock space and repair all ships (including large vessels) operated by PT PELNI (Persero).

Kapasitas produksi Segmen Usaha Jasa Pemeliharaan Kapal dan Usaha Dok atau Reparasi Kapal

Secara total, produksi dari segmen usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal sepanjang tahun 2018 adalah senilai Rp Rp18,10 miliar.

Business Production Capacity of Ship Maintenance Services and Dock or Ship Repairation

In total production of the ship maintenance and docking business or ship repairation services was at Rp.18.10 billion throughout 2018.

Pendapatan Segmen Usaha Jasa Pemeliharaan Kapal dan Usaha Dok atau Reparasi Kapal

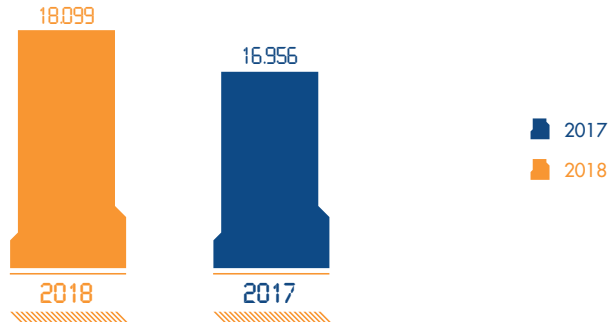
Segmen usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal berhasil memperoleh pendatan usaha sebesar Rp18,10 miliar selama tahun 2018, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 6,74% dari tahun 2017 yang sebesar Rp16,96 miliar. Segmen usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal berkontribusi sebesar 0,39% dari total pendapatan usaha perusahaan.

Business Segment Revenues of Ship Maintenance and Dock Business or Ship Repairation

The ship maintenance and dock or ship repairation services managed to obtain the business revenues of Rp. 18.10 billion during 2018, this value increased by 6.74% from 2017 which amounted to Rp. 16.96 billion. The business segment of ship maintenance and dock or ship repairation services contributed to 0.39% of the company's total operating revenues.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Per Business Segment Operation Overview



dalam jutaan Rupiah
(in million Rupiah)

Profitabilitas Segmen Usaha Jasa Pemeliharaan Kapal dan Usaha Dok atau Reparasi Kapal

Tingkat profitabilitas tidak dapat disajikan per-segmen usaha dikarenakan beban usaha dicatat secara konsolidasi.

SEGMENT USAHA CHARTER DAN BROKER KAPAL

PT PELNI (Persero) memiliki segmen usaha menyediakan jasa *charter* dan *broker* kapal.

Kapasitas produksi Segmen Usaha Jasa Charter dan Broker Kapal

Kapasitas produksi atas segmen usaha jasa *charter* dan *broker* kapal tidak dapat disajikan, karena sepanjang tahun 2018 segmen ini tidak beroperasi.

Pendapatan Segmen Usaha Charter dan Broker Kapal

Segmen usaha charter dan broker kapal sepanjang tahun 2018 belum mencatatkan adanya pendapatan usaha sehingga segmen usaha ini belum dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan.

Profitabilitas Segmen Usaha Charter dan Broker Kapal

Tingkat profitabilitas tidak dapat disajikan per-segmen usaha dikarenakan beban usaha dicatat secara konsolidasi.

SEGMENT USAHA JASA KONSULTAN, PELATIHAN, PELAYANAN KESEHATAN DAN USAHA PERHOTELAN

Segmen usaha jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan bergerak dalam kegiatan usaha yang meliputi:

Business Segment Profitability of Ship Maintenance and Dock or Ship Repairation Services.

Profitability rate could not be mentioned per-business segment due to business expenses recorded consolidately.

SHIP CHARTER AND BROKER BUSINESS SEGMENT

PT PELNI (Persero) has business segment to provide ship charter and broker services.

Production of Capacity of Ship Charter and Broker Services Business Segment

The business production capacity of the charter and broker services cannot be presented, because throughout 2018 this segment did not operate.

Revenues of Ship Charter and Broker Services Business Segment

Ship charter and broker business segment did not record the business revenues throughout 2018 due to this business segment has not contributed to the Company's revenues.

Profitability of Ship Charter and Broker Services Business Segment

Profitability rate could not be presented per-business segment due to business expenses recorded consolidately.

CONSULTANT, TRAINING, HEALTH CARE SERVICES, AND HOSPITALITY BUSINESS SEGMENT

Business segment of consultancy, training, health services and hospitality engaged in business activities which includes:

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Per Business Segment Operation Overview

Layanan Kesehatan

Segmen usaha Layanan kesehatan melaksanakan kegiatan berupa pelayanan jasa kesehatan yang dilaksanakan oleh perusahaan anak PT PELNI (Persero) yakni PT RS PELNI yang berlokasi di Jakarta Barat. Layanan kesehatan yang diberikan oleh RS PELNI diantaranya adalah Konsultasi Dokter, Rawat Jalan serta Rawat inap.

Perhotelan

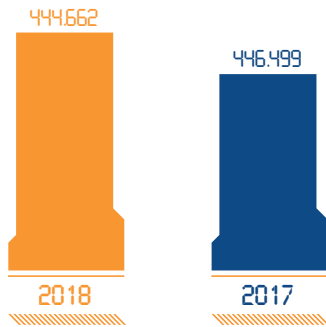
Segmen sewa ruang wisma dilakukan oleh anak perusahaan PT PELNI (Persero) yakni Hotel Bahtera Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

Kapasitas produksi Segmen Usaha Jasa Konsultan, Pelatihan, Pelayanan Kesehatan dan Usaha Perhotelan

Secara total, produksi segmen usaha konsultan, pelatihan, pelayanan dan usaha perhotelan sepanjang tahun 2018 adalah senilai Rp444,66 miliar.

Pendapatan Segmen Usaha Jasa Konsultan, Pelatihan, Pelayanan Kesehatan dan Usaha Perhotelan

Segmen jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp444,66 miliar, jumlah ini mengalami sedikit penurunan sebesar 0,41% dari tahun 2017 yang sebesar Rp446,50 miliar. Segmen ini berkontribusi sebesar 9,65% dari total pendapatan usaha Perusahaan.



dalam jutaan Rupiah
(in million Rupiah)

Profitabilitas Segmen Usaha Jasa Konsultan, Pelatihan, Pelayanan Kesehatan dan Usaha Perhotelan

Tingkat profitabilitas tidak dapat disajikan per-segmen usaha dikarenakan beban usaha dicatat secara konsolidasi.

Health Services

The health services business segment provides health services carried out by a subsidiary of PT PELNI (Persero) namely Pelni Hospital, located in West Jakarta. Health services include Doctor's Consultation, Outpatient Care and Hospitalization.

Hospitality

The Homestay rental room segment is carried out by a subsidiary of PT PELNI (Persero) namely Bahtera Hotel equipped by meeting rooms and training centers facilities that can accommodate more than 200 people with other supporting facilities.

Production Capacity of Consultancy, Training, Hospitality and Health Services Business Segment

In the total production of the consulting, training, health services and hotel business segments throughout 2018 was at IDR 444.66 billion.

Revenues of Consultancy, Training, Hospitality and Health Services Business Segment

Business segment of consultancy, training and hospitality and health services managed to record the business revenues of Rp444.66 billion, these number has suppressed by 0.41% from 2017 which amounted to Rp446.50 billion. This segment contributed by 9.65% of the Company's total business revenues.

■ 2017
■ 2018

Profitability of Consultancy, Training, Hospitality and Health Services Business Segment

Profitability rate can not be presented per-business segment due to business expenses recorded consolidately.



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra. Laporan tersebut telah memperoleh opini "Wajar" dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan PT PELNI (Persero) dan Entitas Anaknya disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Bahasan serta analisis tentang kondisi keuangan ini disajikan dalam empat bagian sebagai berikut:

1. Kinerja Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian;
2. Kinerja Posisi Keuangan Konsolidasian;
3. Kinerja Arus Kas Konsolidasian; dan
4. Kinerja Rasio Keuangan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Posisi keuangan secara konsolidasian per 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa total aset dan total ekuitas Perusahaan mengalami peningkatan masing-masing tumbuh sebesar 2.02% dan 2,38%. Sedangkan total liabilitas mengalami penurunan sebesar 8,19%.

This management discussion and analysis is based on information obtained from the Consolidated Financial Statements of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries for the year ended on December 31, 2018 and the year ended on December 31, 2017 which has been audited by Djoko, Sidik & Indra public accounting firm. The report has obtained "Fair" opinion in all material aspects, the consolidated financial position of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries on December 31, 2018, and its financial performance and consolidated cash flows for the year ended, based on the Accounting Standards Finance in Indonesia.

The discussion of the financial performance of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries is conveyed by taking into account the explanations in the minutes of the Consolidated Financial Statements which are an integral part of this Annual Report. Discussions and analysis of financial conditions are presented in four sections as follows:

1. Consolidated Profit and Loss and Comprehensive Income;
2. Consolidated Financial Position performance;
3. Consolidated Cash Flow Performance; and
4. Financial Ratios Performance.

CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION STATEMENTS

The consolidated financial position as of December 31, 2018 showed that the Company's total assets and total equity increased respectively by 2.02% and 2.38%. While the total liabilities decreased by 8.19%.

Uraian Description	2018	2017	Δ	
			Nominal Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	2.886.301	2.765.448	120.853	4,37%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	3.675.537	3.666.616	8.921	0,24%
Jumlah Aset Total Assets	6.561.838	6.432.064	129.774	2,02%
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	444.787	526.146	(81.359)	(15,46%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	223.999	202.270	21.729	10,74%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	668.786	728.416	(59.630)	(8,19%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	5.893.052	5.703.648	140.288	2,38%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

Aset

Nilai aset PT PELNI (Persero) mengalami kenaikan baik pada aset lancar sebesar 4,37% dan aset tidak lancar tumbuh sebesar 0,24%. Nilai aset lancar tahun 2018 adalah sebesar Rp2,89 triliun dan nilai aset tidak lancar adalah sebesar Rp2,68 triliun. Komposisi Aset Perusahaan di 2018 terdiri dari 43,99% Aset Lancar dan 56,01% Aset Tidak Lancar.

Assets

The asset values of PT PELNI (Persero) experienced a increase in both current assets of 4.37% and non-current assets of 0.24%. The current assets value in 2018 was Rp2.89 trillion and non-current assets value was Rp2.68 trillion. The composition of the Company's Assets in 2018 consisted of 43.99% Current Assets and 56.01% Non-Current Assets.

Uraian Description	2018	Komposisi Composition	2017	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	2.886.301	43,99%	2.765.448	42,99%	120.853	4,37%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	3.675.537	56,01%	3.666.616	57,01%	8.921	0,24%
Jumlah Aset Total Assets	6.561.838	100%	6.432.064	100%	129.774	4,61%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Aset Lancar

Aset Lancar Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2,89 triliun, nilai ini meningkat sebesar 4,37% atau senilai dengan Rp120,85 miliar jika dibandingkan dengan nilai aset lancar pada periode yang sama tahun 2017 yang yakni sebesar Rp2,77 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan kas dan setara kas pada tahun 2018 berkontribusi dalam naiknya nilai aset lancar pada tahun 2018, dimana jumlah kas dan setara kas pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1,52 triliun, kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah deposito milik Perseroan dan entitas anak.
- Kenaikan jumlah piutang usaha perusahaan juga ikut mempengaruhi naiknya total aset lancar perusahaan pada tahun 2018, nilai piutang usaha milik Perseroan tahun 2018 adalah sebesar Rp254,31 miliar meningkat sebesar 24,18% dari tahun 2017 yang sebesar Rp204,29 miliar. Kenaikan piutang usaha ini terjadi pada entitas anak, sedangkan piutang usaha pada entitas induk mengalami penurunan.
- Nilai pajak dibayar dimuka Perseroan tahun 2018 adalah sebesar Rp49,31 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 48,27% dari tahun 2017 yang sebesar Rp33,26 miliar. Kenaikan pajak dibayar dimuka pada entitas induk terjadi pada pajak lainnya sedangkan pada entitas anak terjadi pada Pajak Pertambahan nilai.

Current Asset

The company's current assets as of December 31, 2018 was amounted to Rp2.89 trillion, this value increased by 4.37% or equivalent to Rp120.85 billion compared to the current assets value in the same period of 2017 which amounted to Rp.2.77 billion. This increase was mainly due to:

- The increase in cash and cash equivalents in 2018 contributed to the increase of current assets in 2018, where the amount of cash and cash equivalents as of December 31, 2018 was Rp1.52 trillion, this increase was mainly due to the increase in the deposits of the Company and subsidiaries.
- The increase of accounts receivable also affected the increase in total current assets of the company in 2018, the value of the Company's accounts receivables in 2018 was Rp254.31 billion, increasing by 24.18% from 2017 which amounted to Rp204.29 billion. The increase of accounts receivable occurred in subsidiaries, while accounts receivable of the parent entity decreased.
- The value of the Company's prepaid tax in 2018 was Rp49.31 billion, this number has increased by 48.27% from 2017 which amounted to Rp33.26 billion. The increase of prepaid tax on the parent entity occurred in other taxes, while in the subsidiary, it occurred in Value Added Tax.



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan The Company Financial Performance Reviews

- Nilai uang muka sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 53,73% dibandingkan dengan tahun 2017, dimana nilai uang muka yang dicatatkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp65,97 miliar.
- The value of advances payment throughout 2018 increased by 53.73% compared to 2017, where the value of advances payment recorded at Rp 65.97 billion.

Uraian Description	2018	Komposisi Composition	2017	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	1.521.887	52,73%	1.338.781	48,41%	183.106	13,68%
Piutang Usaha Accounts Receivables	254.309	8,81%	204.787	7,41%	49.522	24,18%
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other current financial assets	490.899	17,01%	649.901	23,50%	(159.002)	(24,47%)
Persediaan Inventories	474.550	16,44%	473.078	17,11%	1.472	0,31%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	49.309	1,71%	33.257	1,20%	16.052	48,27%
Uang Muka Advances Payment	65.968	2,29%	42.912	1,55%	23.056	53,73%
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	29.379	1,02%	22.732	0,82%	6.647	29,24%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	2.886.301	100%	2.765.448	100%	120.853	4,37%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Aset Tidak Lancar

Perseroan membukukan jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3,68 triliun, sedikit meningkat dari tahun 2017 yang sebesar Rp3,67 triliun kenaikan yang terjadi hanya sebesar 0,24% atau sebesar Rp8,92 miliar. Perubahan nilai aset tidak lancar dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Naiknya nilai properti investasi yang signifikan dari Rp22,09 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp108,37 miliar di tahun 2018 ini, disebabkan karena Perseroan melakukan pencatatan atas properti investasi sesuai dengan kebijakan akuntansi properti investasi bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 dan seterusnya Perseroan memilih menggunakan model nilai wajar yang berlaku prospektif atas nilai properti investasi tanah dan bangunan dengan pertimbangan sedang dilakukan upaya untuk optimalisasi aset tersebut, dimana pada akhir tahun sebelumnya masih disajikan sebesar nilai buku karena menggunakan model biaya perolehan. Properti Investasi dengan nilai wajar per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.366.500.000 sesuai dengan laporan penilai independen nomor 087/SKR/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

Non-Curent Assets

The company recorded Non-Current Assets as of December 31, 2018 amounting to Rp3.68 trillion, had slightly increase compared to 2017 which amounted to Rp3.67 trillion, an increase occurred by 0.24% or Rp8.92 billion. Changes in the value of non-current assets was influenced by the following things:

- A significant increase of investment properties values from Rp 22.09 billion in 2017 to Rp 108.37 billion in 2018, which was due to the Company registering investment properties in accordance with accounting policies states that as of December 31, 2018 and beyond the Company chose to use the model fair value that applies prospectively to the property value of land and building investment considering as an effort that was being made to optimize the asset, of which in the previous year was still presented at the book value because it used the acquisition cost model. Investment properties with fair value as of December 31, 2018 amounting to Rp 108,366,500,000 in accordance with the independent assessment report number 087/SKR/IV/2019 dated April 22, 2019.



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

- Nilai alat produksi mencatatkan penurunan nilai sebesar Rp156,81 miliar di tahun 2018 ini, dimana nilai aset produksi menjadi Rp3,05 triliun di tahun ini menurun dari tahun 2017 yang sebesar Rp3,21 triliun. Penurunan ini terjadi karena adanya reklasifikasi aset dalam konstruksi.
- The production equipment value recorded a decline of Rp156.81 billion in 2018, where the production assets value experienced a decrease of Rp3.05 trillion this year compared to 2017 which amounted to Rp3.21 trillion. This decline occurred due to the reclassification of assets under construction.

Uraian Description	2018	Komposisi Composition	2017	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Properti Investasi Investment Properties	108.366	2,95%	22.088	0,60%	86.278	390,61%
Alat Produksi Production Equipment	3.048.366	82,94%	3.205.175	87,42%	(156.809)	(4,89%)
Asset Tetap Fixed Assets	438.700	11,94%	365.254	9,96%	73.446	20,11%
Asset Tidak Berwujud Intangible Assets	28.436	0,77%	21.690	0,59%	6.746	31,10%
Aset Tidak Lancar lainnya Other Non Current Assets	306	0,01%	1.216	0,03%	(910)	(74,84%)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	51.363	1,40%	51.192	1,40%	171	0,33%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	3.675.537	100%	3.666.615	100%	8.922	0,24%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Liabilitas

Total Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 8,19% dari Rp728,42 miliar per tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp668,79 miliar per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai Liabilitas jangka pendek sebesar Rp81,36 miliar. Walaupun nilai liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan Rp21,73 miliar namun kenaikan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada nilai liabilitas jangka pendek. Secara komposisi liabilitas terdiri dari 72,23% liabilitas jangka pendek dan 27,77% liabilitas jangka panjang.

Liabilities

The Company's total liabilities decreased by 8.19% from Rp728.42 billion as of December 31, 2017 to Rp.668.79 billion as of December 31, 2018. This decrease was mainly due to a decrease in the value of short-term liabilities of Rp81.36 billion. Although long-term liabilities increased by Rp21.73 billion, this increase was smaller compared to the decline in the value of short-term liabilities. The composition of liabilities consisted of 72.23% short-term liabilities and 27.77% long-term liabilities.

Uraian Description	2018	Komposisi Composition	2017	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	444.787	66,51%	526.146	72,23%	(81.359)	(15,46%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	223.999	33,49%	202.270	27,77%	21.729	10,74%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	668.786	100%	728.416	100%	(59.630)	(8,19%)

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan The Company Financial Performance Reviews

Liabilitas Jangka Pendek

Nilai Liabilitas Jangka Pendek Perseoran di tahun 2018 adalah sebesar Rp444,79 miliar turun sebesar 15,46% dari Rp526,15 miliar per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan pada liabilitas jangka pendek diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

- Turunnya beban akrual yang sangat signifikan menjadi salah satu penyebab turunnya nilai liabilitas jangka pendek, dimana beban akrual menurun sebesar 62,72% atau sebesar Rp107,52 miliar menjadi Rp63,90 miliar di tahun 2018 dari Rp171,42 miliar di tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena turunnya beban akrual yang sangat signifikan pada usaha perkapalan entitas induk.
- Penurunan pada liabilitas keuangan lainnya juga turut memengaruhi turunnya nilai liabilitas jangka pendek, dimana liabilitas keuangan lainnya mengalami penurunan sebesar 11,55% di tahun 2018 menjadi Rp46,31 miliar dari Rp52,36 miliar di tahun 2017.

Short term Liabilities

The value of the Company's Short-Term Liabilities in 2018 was Rp.444.49 billion, a decrease of 15.46% compared to Rp526.15 billion as of December 31, 2017. The decrease in short-term liabilities in further detailed below:

- A very significant decrease in accrued expenses was one of the causes of the decrease in the value of short-term liabilities, where accrued expenses decreased by 62.72% or Rp107.52 billion to Rp63.90 billion in 2018 compared to Rp.171.42 billion in 2017. This decrease was due to a very significant decrease in accrued expenses in the shipping business of the parent entity.
- The decrease of other financial liabilities also affected the value of short-term liabilities, where other financial liabilities decreased by 11.55% in 2018 to Rp.46.31 billion compared to Rp52.36 billion in 2017.

Uraian Description	2018	Komposisi Composition	2017	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Utang Usaha Accounts Payable	165.434	37,19%	155.769	29,61%	9.665	6,20%
Beban Akrual Accrued Expenses	63.899	14,37%	171.423	32,58%	(107.524)	(62,72%)
Utang Pajak Tax Payable	63.382	14,25%	63.471	12,06%	(89)	(0,14%)
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang Current Portion of Long term Liabilities	54.377	12,23%	33.571	6,38%	20.806	61,98%
Pendapatan Diterima Dimuka/Deposit/Uang Jaminan Perpaid Revenues/Deposit/Deposit Guarantee	51.383	11,55%	49.554	9,42%	1.829	3,69%
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short-term Financial Assets	46.311	10,41%	52.357	9,95%	(6.046)	(11,55%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	444.787	100%	526.145	100%	(81.359)	(15,46%)

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang naik sebesar 10,74% menjadi Rp224 miliar per tanggal 31 Desember 2018 dari Rp202,27 miliar per tanggal 31 Desember 2017. Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang berkontribusi terhadap naiknya nilai liabilitas jangka panjang, dimana akun ini naik sebesar 124,96% menjadi Rp67,13 miliar pada tahun 2018.

Total Long-Term Liabilities

Long-term liabilities increased by 10.74% to Rp224 billion as of December 31, 2018 compared to Rp202.27 billion as of December 31, 2017. Long-term financial institution and bank loan contributed to the increase in the value of long-term liabilities, where this account rose by 124.96% to Rp67.13 billion in 2018.

Uraian Description	2018	Komposisi Composition	2017	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Utang Non Usaha Jangka Panjang Long-Term Non Operating Payables	31.114	13,89%	37.687	18,63%	(6.573)	(17,44%)
Utang Bank dan Lembaga Keuangan jangka panjang Long-Term Financial Institution and Bank Loan	67.131	29,97%	29.841	14,75%	37.290	124,96%
Liabilitas Imbalan Paska Kerja Jangka panjang Long Term Employee Benefits	125.754	56,14%	134.742	66,61%	(8.988)	(6,67%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	223.999	100%	202.270	100%	21.729	10,74%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Ekuitas

Total ekuitas Perseroan naik sebesar 3,32% dari Rp5,70 triliun per tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp5,89 triliun per tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya dana cadangan sebesar Rp276,42 miliar atau sebesar 67% yang menjadi Rp689,01 miliar pada tahun 2018 ini. Dana cadangan merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari laba setelah pajak yang belum ditentukan peruntukannya.

Equity

The Company's total equity rose by 3.32% from Rp5.70 trillion as of December 31, 2017 to Rp5.89 trillion as of December 31, 2018. This increase was caused by an increase in reserve funds of Rp276.42 billion or 67% to Rp689,01 billion in 2018. Reserve funds are formed based on the General Meeting of Shareholders of profit after tax that has not been determined.

Uraian Description	2018	Komposisi Composition	2017	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Modal Saham Capital Stock	7.065.092	119,89%	7.065.092	123,87%	0	0,00%
Penyertaan Modal Pemerintah Government Equity	564.951	9,59%	564.951	9,91%	0	0,00%
Cadangan Reserves	689.012	11,69%	412.593	7,23%	276.419	67,00%
Saldo Laba (Rugi) Retained Earnings (Deficits)	(2.323.632)	-39,43%	(2.250.844)	(39,46%)	(72.788)	3,23%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Component Equity	(104.756)	-1,78%	(89.999)	(1,58%)	(14.757)	16,40%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	2.385	0,04%	1.855	0,03%	530	28,57%
Jumlah Ekuitas Total Equity	5.893.052	100%	5.703.648	100%	189.404	3,32%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

LAPORAN LABA RUGI KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

STATEMENTS OF CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2018	2017	Δ	
			Nominal Nominal	%
Pedapatan Usaha Operating revenue	4.609.235	4.415.692	193.543	4,38%
Reduksi Pendapatan Usaha Reduction in Operating Revenues	(15.922)	(20.847)	(4.925)	(23,62%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenue	4.593.313	4.394.845	198.468	4,52%
Beban Pokok Usaha Operating Expenses	(4.010.771)	(3.652.044)	358.727	9,82%
Laba Kotor Gross Profit	582.541	742.801	(160.260)	(21,58%)
Beban Pemasaran dan Distribusi Distribution and Marketing Expenses	(35.518)	(23.152)	12.366	53,41%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(471.912)	(457.369)	14.543	3,18%
Laba Usaha Operating Profit	75.111	262.280	(187.169)	(71,36%)
Pendapatan Non Usaha Bersih Non Operating Income - Nett	215.535	95.047	120.488	126,77%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	290.646	357.327	(66.681)	(18,66%)
Manfaat (Beban) Pajak Tax Benefit (Expense)				
Beban Pajak Kini Current Tax Expense	(86.591)	(85.431)	1.160	1,36%
Manfaat Pajak Tanggahan Deferred Tax Benefit	118	4.986	(4.868)	(97,63%)
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expenses	(86.473)	(80.445)	6.028	7,49%
Laba Tahun Berjalan Profit for Current Year	204.174	276.881	(72.707)	(26,26%)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Pos-pos yang tidak Dapat Direklasifikasikan ke Laba Rugi Items That Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit Or Loss:				
Keuntungan (Kerugian) Akturia Actuarial Gain (Loss)	(14.757)	(37.429)	22.672	(60,57%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income of the Current Year	189.417	239.452	(50.035)	(20,90%)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit for the Current Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	203.631	276.419	(72.788)	(26,33%)
Pemilik Non Pengendali Non-Controlling Interest	543	462	81	17,53%
Laba Tahun Berjalan Profit for Current Year	204.174	276.881	(72.707)	(26,26%)
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	188.874	238.990	(50.116)	-20,97%
Pemilik Non Pengendali Non-Controlling Interest	543	462	81	17,53%
Jumlah Laba Komprehensif Total Comprehensive Income	189.417	239.452	(50.035)	(20,90%)
Laba Bersih Per Saham Dasar Basic Earnings Per Share	28.822	39.125	(10.302)	(26,33%)

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2018 tercatat sebesar Rp4,61 triliun mengalami kenaikan 4,38% jika dibandingkan dengan pendapatan di 2017 yaitu sebesar Rp4,42 triliun. Diantara komposisi pendapatan bersih tahun 2017, Kenaikan pendapatan usaha juga disebabkan karena:

- Kontribusi terbesar terhadap tumbuhnya pendapatan usaha Perseroan sepanjang 2018 adalah kenaikan usaha penunjang lainnya yakni sebesar Rp167,13 miliar atau sebesar 69,42% menjadi Rp407,89 miliar di tahun 2018 dari Rp240,76 miliar pada tahun 2017.
- Usaha wisata bahari mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan pendapatan usaha yang berhasil dicatatkan kegiatan usaha yang lain. Usaha wisata bahari menunjukkan prospek yang sangat baik dimana kenaikannya 1805,97% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pendapatan usaha yang berhasil diperoleh dari usaha wisata bahari adalah sebesar Rp1,28 miliar dari tahun lalu hanya sebesar Rp67 juta.

Operating Revenues

The operating revenues in 2018 recorded at Rp.4.61 trillion, that had an increase of 4.38% compared to revenue in 2017 amounting to Rp.4.42 trillion. Amongst the composition of 2017 net income, the increase in operating revenues was also due to:

- The largest contribution to the growth of the Company's operating revenues throughout 2018 was the increase in other supporting businesses, which amounted to Rp167.13 billion or 69.42% to Rp407.89 billion in 2018 compared to Rp240.76 billion in 2017.
- Marine tourism business experienced a very significant increase compared to the increase in operating revenues that was successfully recorded by other business activities. The marine tourism business showed a very positive prospect, which increased by 1805.97% compared to 2017. The operating revenues obtained from the maritime tourism business which was Rp1.28 billion compared to the last year with only Rp.67 million.

Uraian Description	2018	2017	Δ	
			Nominal Nominal	%
Penugasan Pemerintah Government Assignments	2.403.998	2.461.770	(57.772)	(2,35%)
Tambang Pasasi Ticketing	950.638	889.395	61.243	6,89%
Layanan Kesehatan Health services	439.089	441.409	(2.320)	(0,53%)
Tambang Muatan Cargo	330.609	320.479	10.130	3,16%
Usaha Perkapalan Lainnya Other Shipping Business	48.402	35.137	13.265	37,75%
Usaha Perbengkelan Workshop Business	18.099	16.956	1.143	6,74%
Usaha Perhotelan Hospitality Business	5.573	5.090	483	9,49%
Usaha Keagenan Agency Business	3.661	4.633	(972)	(20,98%)
Usaha Wisata Bahari Marine Tourism Business	1.277	67	1.210	1805,97%
Usaha Penunjang Lainnya Other Supporting Enterprises	407.888	240.756	167.132	69,42%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Revenue	4.609.234	4.415.692	193.542	4,38%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan The Company Financial Performance Reviews

Reduksi Pendapatan Usaha

Reduksi pendapatan usaha adalah diskon atau potongan tarif penumpang atau muatan. Reduksi pendapatan usaha Perusahaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp15,92 miliar atau menurun 23,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,85 miliar.

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih merupakan peroleh pendapatan usaha setelah dikurangi reduksi pendapatan usaha. Pada tahun 2018, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp4,59 triliun atau mencatat pertumbuhan sebesar Rp198,47 miliar atau 4,52% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp4,39 triliun. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha dan menurunnya reduksi pendapatan atas tiket penumpang sepanjang 2018.

Reduction in Operating Revenues

Reduction in operating revenues is a discount on passenger or cargo tariff. The Company's reduction in operating revenues in 2018 was at Rp 15.92 billion or decreased by 23.62% compared to the previous year which was Rp 20.85 billion.

Net Operating Revenue

Net Operating Revenue is derived from operating revenues after deducting reduction in operating revenues. In 2018, the Company posted a net income of Rp. 4.59 trillion or recorded a growth of Rp. 188.47 billion or 4.52% compared to 2017 which amounted to Rp. 4.39 trillion. This growth was due to the increase in operating revenues and a decrease in reduction revenues from passenger tickets throughout 2018.

Beban Pokok Usaha

Operating Expenses

Uraian Description	2018	2017	Δ	
			Nominal Nominal	%
Perkapalan Shipping	1.548.961	1.432.966	115.995	8,09%
Pegawai Employee	1.029.694	839.200	190.494	22,70%
Pemeliharaan dan Perbaikan Maintenance and Repair	418.657	384.945	33.712	8,76%
Penyusutan dan Amortisasi Amortization and Depreciation	342.930	362.848	(19.918)	(5,49%)
Penumpang Passenger	321.866	306.731	15.135	4,93%
Pelayanan Kesehatan Health services	246.860	172.122	74.738	43,42%
Asuransi Insurance	56.230	56.987	(757)	(1,33%)
Muatan Ternak Animal Cargo	20.372	4.733	15.639	330,42%
Perbengkelan Workshop	11.872	12.299	(427)	(3,47%)
Kendali Mutu Pelayanan Quality Service Control	8.503	6.473	2.030	31,36%
Perhotelan Hospitality	2.876	12.500	(9.624)	(76,99%)
Sewa Rent	969	58.267	(57.298)	(98,34%)
Pajak dan Retribusi Taxes and Levies	216	1.851	(1.635)	(88,33%)
Beban Pokok Lainnya Other Cost of Revenues	766	122	644	527,87%
Jumlah Beban Pokok Usaha Total Operating Expenses	4.010.772	3.652.044	358.728	9,82%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

Secara keseluruhan beban pokok usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 9,82%. Beban usaha meningkat sebesar Rp358,73 miliar menjadi Rp4,01 triliun dari Rp3,65 triliun, kenaikan ini terutama disebabkan oleh hal-hal dibawah ini:

- Komponen beban pokok usaha yang mengalami kenaikan terbesar adalah beban usaha terkait pegawai yakni sebesar 22,70% atau sebesar Rp190,49 miliar, dimana beban usaha terkait pegawai yang dibukukan oleh perusahaan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp1,03 triliun.
- Beban usaha perkapalan di tahun 2018 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp116 miliar yakni menjadi Rp1,55 triliun.
- Beban usaha pelayanan kesehatan juga berkontribusi atas naiknya jumlah beban pokok usaha Perseroan selama tahun 2018, dimana beban usaha terkait pelayanan kesehatan adalah sebesar Rp246,86 miliar, meningkat sebesar 43,42% dari tahun 2017 yang sebesar Rp306,73 miliar.

Laba Kotor

Jumlah laba kotor per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 21,58% dari tahun 2017 yang sebesar Rp742,80 miliar menjadi Rp582,54 miliar di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena naiknya beban pokok usaha lebih besar dari kenaikan pendapatan usaha, dimana beban pokok usaha mengalami kenaikan sebesar 9,82% dan pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar 4,38%.

Laba Usaha

Laba usaha di tahun 2018 tercatat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana laba usaha di tahun 2017 adalah sebesar Rp262,28 miliar dan laba usaha tahun 2018 adalah sebesar Rp75,11 miliar. Hal ini disebabkan karena nilai laba kotor yang menurun dari tahun sebelumnya dan juga naiknya jumlah beban pemasaran dan distribusi juga naiknya jumlah beban umum dan administrasi.

Pendapatan Non Usaha - Bersih

Perseroan mencatat pendapatan non usaha bersih sebesar Rp215,54 miliar, jumlah ini mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan non usaha bersih yang diperoleh tahun sebelumnya yang

Overall, the Company's total operating expenses increased by 9.82%. Operating expenses raised by Rp358.73 billion to Rp4.01 trillion from Rp3.65 trillion, this increase was mainly due to the following matters:

- The component of operating expenses experienced an increase was operating expenses related to employees, i.e amounting to 22.70% or Rp190.49 billion, of which the operating expenses related to employees booked by the company during 2018 amounted to Rp1.03 trillion.
- Shipping business expenses in 2018 also experienced a significant increase of Rp.116 billion to Rp1.55 trillion.
- health services expenses also contributed to the increase in the Company's total operating expenses during 2018, where operating expenses related to health services amounted to Rp246.86 billion, had an increase of 43.42% compared to 2017 which amounted to Rp306.73 billion.

Gross Profit

The total gross profit as of December 31, 2018 decreased by 21.58% compared to 2017 which amounted to Rp742.80 billion to Rp582.54 billion in 2018. This was due to an increase in operating expenses which was greater than the increase in operating revenues, where the operating expenses has increased by 9.82% and operating revenues increased by 4.38%.

Operating Profit

Operating Profit in 2018 recorded to decrease from the previous year, where operating profit in 2017 was Rp262.28 billion and in 2018 was Rp75.11 billion. This was caused by the value of gross profit decreased from the previous year and also the increase in the amount of marketing expenses as well as an increase in the general and administrative expenses.

Non Operating Income - Nett

The Company recorded a non operating income - nett of Rp215.54 billion, this number experienced a significant increase compared to the amount of net-non operating income obtained in the previous year which amounted to



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan The Company Financial Performance Reviews

sebesar Rp95,05 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya keuntungan perubahan nilai wajar aset non keuangan atas properti investasi tanah dan bangunan sebesar Rp99,73 miliar, serta perusahaan juga mencatat adanya Pemulihan iuran program dana pensiun merupakan kelebihan iuran program manfaat pasti dana pensiun yang telah dibayarkan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya berdasarkan perhitungan aktuarial sebesar Rp25,25 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Pada tahun 2018, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 290,65 miliar, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah laba sebelum pajak tahun 2017 yang sebesar Rp357,33 miliar.

Jumlah Beban Pajak

Beban pajak yang dicatat Perseroan sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp86,47 miliar meningkat dari tahun 2017 yang sebesar Rp80,45 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya beban pajak final pada entitas induk serta naiknya beban pajak kini pada entitas anak.

Laba Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2017, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp276,88 miliar, namun pada tahun 2018 jumlah laba tahun berjalan yang dicatatkan perusahaan menurun sebesar 26,26% menjadi sebesar Rp204,17 miliar. Penurunan laba tahun berjalan terutama disebabkan oleh naiknya jumlah beban pokok usaha serta beban umum dan administrasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah pendapatan usaha yang dibukukan oleh Perusahaan.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan yang berhasil diperoleh Perusahaan adalah sebesar Rp189,42 miliar, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 20,90% dari tahun 2017 yang sebesar Rp239,45 miliar.

Rp95.05 billion. This increase was mainly due to the benefit of the change in the fair value of non-financial assets on land and building investment properties amounting to Rp99.73 billion, and the company also noted the recovery of pension funds was an excess of the defined benefit plan paid by the Company for pension plans compared with the obligation that should be based on an actuarial calculation of Rp25.25 billion.

Profit Before Tax

In 2018, the Company posted the profit before tax of Rp 290.65 billion, this has a decreasing in amount compared to the amount of profit before tax in 2017 which amounted to Rp 357.33 billion.

Total Tax Expenses

The tax expense recorded by the Company throughout 2018 was Rp86.47 billion, had an increase from 2017 which amounted to Rp80.45 billion. This increase was mainly due to the increase in the final tax burden on the parent entity and the increase in the current tax burden on subsidiaries.

Profit For the Current Year

As of December 31, 2017, the Company booked profit for the current year of Rp276.88 billion, but the profit for the current year listed by the company in 2018 suppressing by 26.26% to Rp204.17 billion. The decline in profit for the current year was mainly due to the increase in the number of operating expenses and general and administrative expenses which were greater than the increase in the amount of operating revenues recorded by the Company.

Comprehensive Income of the Current Year

The comprehensive income of the current year successfully obtained by the Company was at Rp.189.42 billion, this amount decreased by 20.90% compared to 2017 which amounted to Rp239.45 billion.



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2018 Perseroan mencatat Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas sebesar Rp185,44 miliar, meningkat 80,48% dibandingkan Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas di 2017 sebesar Rp102,75 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya arus kas dari aktivitas operasi sebesar 3,97% dan naiknya arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 745,98% yang lebih besar dari penurunan yang terjadi pada arus kas dari aktivitas investasi.

STATEMENTS OF CONSOLIDATED CASH FLOWS

As of December 31, 2018, the Company recorded an increase in Net Cash and Cash Equivalents amounting to Rp185.44 billion, had an increase of 80.48% compared to the Increase in Net Cash and Cash Equivalents in 2017 of Rp.102.75 billion. The increase was due to an increase in cash flows from operating activities by 3.97% and an increase in cash flows from financing activities amounting to 745.98% which was greater than the decrease in cash flows from investing activities.

Uraian Description	2018	2017	Δ	
			Nominal Nominal	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	456.688	439.262	17.426	3,97%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(355.792)	(323.426)	(32.366)	(10,01%)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	84.539	(13.087)	97.626	745,98%
Peningkatan Bersih Kas dan Setara Kas Increase In Cash and Cash Equivalent	185.436	102.748	82.688	80,48%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning	1.704.346	1.601.598	102.748	6,42%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at Ending	1.889.782	1.704.346	185.436	10,88%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan di tahun 2018 ini menjadi sebesar Rp456,69 miliar dari Rp439,26 miliar per 31 Desember 2017. Kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan jumlah penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi lebih besar dari jumlah pembayaran yang dilakukan terkait aktivitas operasi Perseroan, yakni seperti:

- Jumlah penerimaan kas dari pelanggan meningkat sebesar Rp302,75 miliar dari tahun 2017 yang sebesar Rp2,25 triliun menjadu Rp2,55 triliun di tahun 2018.

Cash Flows from Operating Activities

The Company's net cash flows from operating activities increased to Rp456.69 billion in 2018 from Rp.439.26 billion as of December 31, 2017. The increase in net cash flow from operating activities was mainly due to the amount of cash flows obtained from operating activities was greater than the amount of payment related to the Company's operating activities, such as:

- The amount of receipt from customers increased by Rp302.75 billion compared to 2017 which amounted to Rp2.25 trillion to Rp2.55 trillion in 2018.



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan The Company Financial Performance Reviews

- Jumlah pembayaran kepada pemasok mengalami penurunan sebesar Rp70,51 miliar, menjadi Rp3,62 triliun. Selain itu pembayaran biaya operasional juga mengalami penurunan yang berkontribusi terhadap naiknya arus kas bersih dari aktivitas operasi, pembayaran biaya operasional pada tahun 2018 adalah sebesar Rp782,39 miliar turun 58,01% atau senilai Rp287,23 miliar dari tahun 2017.
- Total payments to suppliers decreased by Rp. 70.51 billion, to Rp. 3.62 trillion. In addition, payment of operating expenses also decreased which contributed to the increase in net cash flow from operating activities, payment of operating expenses in 2018 amounted to Rp782.39 billion, down 58.01% or Rp.287,23 billion from 2017.

Uraian Description	2018	2017	Δ	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan Receipt from Customer	2.554.353	2.251.600	302.753	13,45%
Penerimaan dari <i>Public Service Obligation</i> dan subsidi Receipt from <i>Public Service Obligation</i> and Subsidy	2.403.998	2.461.770	(57.772)	(2,35%)
Pembayaran Kepada Pemasok Payment to Suppliers	(3.615.028)	(3.685.537)	(70.509)	(1,91%)
Penerimaan Kas Lain-lain Others Cash Receipt	90.134	58.865	31.269	53,12%
Pembayaran Biaya Operasional Payment of Operating Expenses	(782.390)	(495.157)	(287.233)	(58,01%)
Pembayaran Biaya <i>Overhead</i> Payment of <i>Overhead</i> Expense	(76.777)	(21.903)	(54.874)	(250,53%)
Pembayaran Biaya Lain-lain Payment of Others Expenses	(16.043)	(64.075)	48.032	74,96%
Penerimaan Uang Jaminan dari Pelanggan Receipt of Cash Collateral from Customer	3.823	3.938	(115)	(2,92%)
Pembelian Persediaan Purchase of Supplies	(13.536)	(5.929)	7.607	128,30%
Penerimaan Bunga Interest Receipt	27.171	42.694	(15.523)	(36,36%)
Pembayaran Bunga Pinjaman Payment of Interest Loan	(4.636)	(3.399)	1.237	36,39%
Pembayaran Pajak Tax Payment	(114.381)	(103.606)	10.775	10,40%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows from Operating Activities	456.688	439.262	17.426	3,97%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas pendanaan meningkat sangat signifikan di tahun 2018, dimana arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah sebesar Ro84,54 miliar, meningkat 745,98% atau senilai Rp97,63 miliar dari tahun 2017 yang sebesar minus Rp13,09 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman bank/pihak ketiga sebesar Rp97,05 miliar.

Cash Flows from Financing Activities

The Company's net cash flow from financing activities increased very significantly in 2018, where net cash flows from investment activities amounted to Ro84.54 billion, had an increase of 745.98% or Rp.97.63 billion from 2017 which was minus Rp13.09 billion. This was caused by the receipt of bank loans / third parties amounting to Rp97.05 billion.

Uraian Description	2018	2017	Δ	
			Nominal Nominal	%
Hasil Penjualan Aset Tetap Sale of Fixed Assets	0	11.818	(11.818)	N/A
Perolehan Aset Sewa Guna Usaha Purchase of Leases for Assets	(4.081)	0	4.081	N/A
Perolehan Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	(279.199)	(255.875)	23.324	9,12%
Perolehan Aset dalam Konstruksi Construction in Progress	(57.681)	(70.412)	(12.731)	-18,08%
Perolehan Aset tak Berwujud Purchase of Intangible Assets	(14.589)	(5.404)	9.185	169,97%
Pembelian Aset Lain-lain Purchase of Other Assets	(242)	(3.554)	(3.309)	(93,11%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flows from Investment Activities	(355.792)	(323.427)	(32.365)	(2,70%)

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas pendanaan meningkat sangat signifikan di tahun 2018, dimana arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah sebesar Ro84,54 miliar, meningkat 745,98% atau senilai Rp97,63 miliar dari tahun 2017 yang sebesar minus Rp13,09 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman bank/pihak ketiga sebesar Rp97,05 miliar.

Cash Flows from Financing Activities

The Company's net cash flow from financing activities increased very significantly in 2018, where net cash flows from investment activities amounted to Ro84.54 billion, had an increase of 745.98% or Rp.97.63 billion from 2017 which was minus Rp13.09 billion. This was caused by the receipt of bank loans / third parties amounting to Rp97.05 billion.

Uraian Description	2018	2017	Δ	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan (Pembayaran) Utang Bank Receipt (Payment) Bank Loan	97.048	0	97.048	N/A
Pembayaran Deviden Payment of Dividend	(1.435)	0	(1.435)	N/A
Pembayaran Utang Bank Payment of Bank Loan	(11.074)	(13.087)	(2.013)	(15,38%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows from Financing Activities	84.539	(13.087)	97.626	745,98%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan The Company Financial Performance Reviews

RASIO KINERJA PERUSAHAAN

RATIO OF CORPORATE PERFORMANCE

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Current Ratio	%	648,92	525,6
Rasio Kas Cash Ratio	%	399,34	293,37
Rasio Cepat Quick Ratio	%	342,16	254,45
Rasio Leverage Leverage Ratio			
Rasio Kewajiban atas Aset Debt to Asset Ratio	%	10,19	11,32
Rasio Kewajiban atas Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	11,35	12,77
Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas Long Term Debt to Equity	%	3,8	3,55
Rasio Aktivitas Activity Ratio			
Rasio Perputaran Persediaan Inventory Turnover Ratio	kali Times	0	0
Rasio Perputaran Aset Asset Turnover Ratio	%	73,89	70,94
Rasio Penagihan Rata-rata Average Collection Ratio	hari days	20	17
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio			
Imbalan terhadap Ekuitas Return on Equity	%	3,33	4,41
Imbalan terhadap Investasi Return on Investment	%	10,33	7,07
Marjin Laba Kotor atas Penjualan Gross Profit on Sales	%	12,68	16,90
Marjin Laba Bersih atas Penjualan Nett Profit on Sales	%	4,23	6,14
Rasio EBITDA atas Aset EBITDA Ratio on Asset	%	10,33	10,82

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dalam posisi likuiditas mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, hal ini tercermin dari peningkatan rasio lancar semula 525,60% menjadi 648,92%; rasio cepat dari 293,37% menjadi 399,34%; dan rasio kas dari 254,45% menjadi 342,16%.

Liquidity Ratio

Liquidity ratios is measurement to calculate the company's ability to meet its short term liabilities. The Company's liquidity position increased by 2018 compared to 2017, the current ratio decreased from 525,60% to 648,92%; quick ratio from 293,37% to 399,34%; and cash ratio from 254,45% to 342,16%.



Tinjauan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Company Financial Performance Reviews

Rasio Leverage

Rasio leverage adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya apabila saat ini perusahaan dilikuidasi.

Tingkat kemampuan PT PELNI (Persero) tahun 2018 dalam memenuhi seluruh kewajiban apabila dilakukan likuidasi pada saat ini mengalami peningkatan dibanding dengan capaian tahun 2017, hal ini tercermin dari penurunan rasio total liabilitas terhadap total aset dari 11,32% menjadi 10,19%, rasio total liabilitas terhadap ekuitas dari 12,77% menjadi 11,35% dan meskipun rasio liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas mengalami peningkatan dari 3,55% menjadi 3,80%.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya.

Dibandingkan dengan tahun 2017, tingkat efektivitas Perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya relatif mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari rasio perputaran aset dari 70,94% menjadi 73,89%, meskipun rasio penagihan rata-rata piutang meningkat dari 17 hari menjadi 20 hari dan rasio perputaran persediaan stabil.

Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas atau rasio kemampulabaan perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pada tahun 2018, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya secara umum mengalami penurunan, hal ini terlihat dari hasil imbalan (return) terhadap ekuitas menurun dari 4,41% menjadi 3,33%, rasio imbalan terhadap investasi meningkat dari 7,07% menjadi 10,33%, margin laba kotor menurun dari 16,90% menjadi 12,68%, margin laba bersih menurun dari 6,14% menjadi 4,23%, dan rasio EBITDA terhadap aset meningkat dari 7,07% menjadi 10,33%.

Leverage Ratio

Leverage ratios is a measurement to calculate the company's ability to meet all current liabilities if the company liquidated.

The capability of PT PELNI (Persero) in 2018 to fulfill all obligations if liquidated at this time has increased compared to the achievement in 2017, this is reflected by the decrease of total liabilities ratio to total assets from 11,32% to 10,19% the ratio of total liabilities to equity from 12,77% to 11,35% and although the ratio of long-term liabilities to equity increased from 3,55% to 3,80%.

Activity Ratio

Activity ratio is a measure used to calculate the effectiveness of the company in utilizing all available resources in its control.

Compared to the year 2017, the level of effectiveness of the Company in utilizing the relative resources increased, this is reflected in the asset turnover ratio from 70,94% to 73,89%, although the average collection ratio of accounts receivable increased from 17 days to 20 days and the stable ratio inventory turnover.

Profitability Ratio

Profitability ratios is a measure of corporate profitability used to calculate the net outcome of various policy and management decisions that will provide a final answer about the effectiveness of management in managing the company.

In 2018, the level of effectiveness of the use of resources in general has decreased, as seen from the return on equity increased from 4.41% to 3,33%, the ratio of return on investment increased from 7,07% to 10,33%, gross profit margin decreased from 16,90% to 12,68%, net profit margin decreased from 6,14% to 4,23%, and the EBITDA to asset ratio increased from 7,07% to 10,33%.



Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektabilitas Piutang Perusahaan

Ability To Pay Loans and Collectability of Company Receivables

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Rasio kemampuan membayar pinjaman terefleksikan dalam rasio lancar dan rasio kas. Di akhir tahun 2018, Perusahaan dalam posisi likuiditas mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017, hal ini tercermin dari peningkatan rasio lancar semula 525,60% menjadi 648,92%; rasio cepat dari 293,37% menjadi 399,34%; dan rasio kas dari 254,45% menjadi 342,16%.

PT PELNI (Persero) melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. PT PELNI (Persero) juga mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal. Tanggal jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain dan pinjaman bank jangka pendek adalah kurang dari satu tahun, kecuali untuk liabilitas keuangan seperti utang obligasi dan pinjaman investasi.

ABILITY TO PAY DEBT

The solvability ability ratio is reflected in the current ratio and cash ratio. At the end of 2018, the Company in the liquidity position has increased compared to 2017, this is reflected in the increase in the original current ratio of 525.60% to 648.92%; fast ratio was from 293.37% to 399.34%; and the cash ratio of 254.45% to 342.16%.

PT PELNI (Persero) manages liquidity risk by monitoring the loan maturity profile and funding sources, maintaining sufficient cash and securities balances and readiness to maintain market position. PT PELNI (Persero) also maintains its ability to finance loans owned by finding various sources of binding financing facilities from reliable lenders. The contractual maturity dates of financial liabilities such as trade payables, accrued expenses, other payables and short-term bank loans are less than one year, except for financial liabilities such as bonds payable and investment loans.

Uraian Description	Satuan Unit	2018	2017
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Current Ratio	%	648,92	525,6
Rasio Kas Cash Ratio	%	399,34	293,37
Rasio Cepat Quick Ratio	%	342,16	254,45



Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektabilitas Piutang Perusahaan

Ability To Pay Loans and Collectability of Company Receivables

TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung dengan mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa PELNI tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

Pada tahun 2018 analisis umur piutang Perseroan dapat dilihat pada tabel dibawah ini, tercatat 80% piutang usaha Perseroan berumur kurang dari 1 tahun tergolong dalam kategori lancar yakni sebesar Rp210,62 miliar. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kolektabilitas piutang Perseroan masih dalam kategori lancar sehingga dapat mendukung kegiatan modal kerja lainnya.

COLLATERAL RATE OF RECEIVABLES

The collateral rate of receivables and other receivables are reviewed regularly. Receivables are well-known to be uncollectible written off directly by reducing their carrying value. An allowance account is used when there is objective evidence that PELNI cannot collect all outstanding values in accordance with the initial requirements of the accounts. Significant financial difficulties experienced by the debtor, the likelihood of debtors being declared bankrupt or financial reorganization and defaults or delinquent payments are indicators that are deemed to indicate a decline in the value of receivables.

In 2018, the aging analysis of the Company's trade receivables can be seen in the table below. It recorded 80% of the Company's trade receivables aged less than 1 year belong to the current category of Rp210.62 billion. This proves that the collectability level of the Company's trade receivables was still in the current category so that it could support other working capital activities.

Analisis Umur Piutang
The Aging Analysis of Trade Receivable

	2018	2017
Kurang dari 1 tahun Less than 1 year	210.616	159.666
1 - 2 tahun 1 - 2 years	20.171	32.254
2 - 3 tahun 2 - 3 years	19.268	5.351
3 - 4 tahun 3 - 4 years	2.498	0
4 - 5 tahun 4 - 5 years	1.107	12.242
Di atas 5 tahun Over 5 years	8.548	0
Jumlah Total	262.208	209.513



Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

STRUKTUR MODAL

Selama tahun 2018, rincian struktur modal yang dimiliki oleh Perusahaan adalah 10,19% berasal dari utang dan 89,81% berasal dari ekuitas. Struktur modal ini tidak mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 11,32% berasal dari utang dan 88,68% berasal dari ekuitas.

CAPITAL STRUCTURE

During 2018, the details of the capital structure held by the Company were 10.19% from debt and 89.81% from equity. This capital structure did not experience many changes compared to 2017, namely 11.32% came from debt and 88.68% came from equity.

Komposisi Struktur Modal Capital Structure Composition	2018	Komposisi Composition	2017	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	444.787	66,51%	526.146	8,18%	(81.359)	(15,46%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	223.999	33,49%	202.270	3,14%	21.729	10,74%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	668.786	10,19%	728.416	11,32%	(59.630)	(8,19%)
Ekuitas Equity	5.893.052	89,81%	5.703.648	88,68%	189.404	3,32%
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	6.561.838	100%	6.432.064	100%	129.774	2,02%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

PT PELNI (Persero) menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perseroan. Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

PT PELNI (Persero) established an optimal capital structure policy in order to maximize the value of the Company. Management policy on capital structure is based on protecting the Company's ability to maintain business continuity so that it can continue to provide returns to shareholders and benefits to other stakeholders and maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

PT PELNI menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perseroan. Berikut dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal:

1. Senantiasa berupaya menetapkan target struktur modal yang optimal.
2. Penggunaan proporsi utang yang lebih besar (dari ekuitas) dapat dilakukan bila risiko usaha lebih kecil
3. Struktur modal senantiasa ditinjau dengan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.
4. Struktur modal diusahakan memberi kontribusi optimal dengan mengatur kombinasi hutang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan.

BASIS OF MANAGEMENT POLICY SELECTION ON CAPITAL STRUCTURE

PT PELNI established an optimal capital structure policy in order to maximize the Company's value. The following is the basis for selecting management policies on capital structure:

1. Always strive to set an optimal capital structure target.
2. The use of a larger proportion of debt (from equity) can be done if the business risk is smaller.
3. Capital structure is always reviewed by considering the balance between financial risk and the rate of return in an effort to increase the value of the company.
4. Capital structure is sought to make optimal contributions by regulating the combination of debt and equity (equity) that can maximize the value of the Company.



Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

The Material Commitments for Capital Investment

Perseroan tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Investasi barang modal dilakukan secara langsung dengan menganggarkan sejumlah dana yang berasal dari kas internal.

The Company has no material commitments related to Capital Investment, which made directly with the amount of funds from internal cash.

Investasi Barang Modal

The Capital Investment

Sepanjang tahun 2018 Perseroan telah mengalokasikan dana untuk penambahan aset berupa properti tanah dan gedung serta alat produksi, hal ini dilakukan guna menunjang operasional Perseroan.

Troughout 2018, the Company has allocated funds for the addition of assets in the form of land and building properties as well as production equipment, this is done to support the Company's operations.

Dalam RKAP 2018 perusahaan menganggarkan dana investasi sebesar Rp529,25 miliar.

In the 2018 RKAP, the company budgeted an investment fund of Rp.529.25 billion.

JENIS INVESTASI BARANG MODAL

investasi Barang Modal yang dilakukan pada tahun 2018:

THE TYPES OF CAPITAL INVESTMENT

Capital expenditure has conducted in 2018:

Investasi Barang Modal The Capital Expenditure	2018	2017
Alat Produksi Production Equipment		
Kapal Ship		
Kapal Tongkang Barge Ship	0	0
Kapal Barang Cargo Ship	0	258.444
Kapal Penumpang Passenger Ship	0	0
Pengadaan/Modifikasi Kapal Procurement/Ship Modification	219.731	0
Kapal Wisata/Phinisi Tourism/Phinisi Ship	0	0
Alat Kesehatan Health Tools	11.079	13.611
Bangunan Rumah Sakit Hospital Construction	-	11.883
Container Container	140.000	7.530
Alat bongkar Muat Loading Equipment	38.539	12.605
Alat Perbengkelan Workshop Equipment	0	0
Alat Perhotelan Hospitality tool	0	0
Perluasan Gedung Building Expanding	16.906	0
Total Investasi Alat Produksi Total Investment of Equipment Production	426.255	304.073



Investasi barang Modal The Capital Investment

Investasi Barang Modal The Capital Expenditure	2018	2017
Sarana Penunjang Supporting Facilities		
Bangunan Kantor Office Building	28.154	5.736
Tanah Land	32.028	983
Sertifikat Tanah Land Certification	0	0
Kendaraan Bermotor Vehicle	11.707	6.564
Mesin Kantor Office Tool	6.182	5.785
Komputerisasi Computerize	20.853	10.193
Investasi Kantor Office Investment	4.072	3.333
Total Investasi Alat Produksi Total Investment of Production Equipment	102.996	32.594
Total Total	529.251	336.667

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal bertujuan untuk pengembangan dan optimalisasi produksi perusahaan.

Nilai Investasi Barang Modal yang Dikeluarkan Pada Tahun 2018

Total investasi barang modal yang di tahun 2018 adalah sebesar Rp529,25 miliar, investasi barang modal dikelompokkan menjadi 2 jenis investasi yakni investasi alat produksi sebesar Rp426,25 miliar dan investasi sarana penunjang sebesar Rp103 miliar.

The Capital Investment Purpose

Capital investment is aimed to develop and optimize the Company's production.

The Capital Investment Value issued in 2018

Total capital investment in 2018 was Rp.529.25 billion, capital investment is grouped into 2 types of investment, namely investment in production equipment of Rp.426.65 billion and supporting facilities of Rp103 billion.



Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2018 Serta Proyeksi Untuk Tahun Mendatang

Comparison Between Target, Realization In 2018 and Projection for the Next Year

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Setiap periode operasional, Perseroan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil operasional yang dicapai pada tahun buku. Ukuran kinerja berdasarkan Realisasi dibandingkan dengan target atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan di awal tahun anggaran.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

Every operational period, the Company evaluates the operational results achieved in the financial year. The performance measure is based on Realization compared to the target or Corporate Work and Budget Plan that set at the beginning of the fiscal year.

Uraian Description	RKAP 2018 2018 CBP	Realisasi 2018 2018 Realization	%
Operasional Operational			
Kapal Milik owned ship			
Kapal Penumpang Passenger Ship	26	26	100%
Kapal Perintis Perintis Ship	47	47	100%
Kapal Ternak Cattle Ship	3	2	67%
Kapal Tol Laut Tol Laut Ship	9	7	78%
Kapal Barang/Komersil Cargo/Commercial Ship	0	1	∞
Kapal Wisata Cruise ship	1	0	0%
Kapal Tanker Tanker ship	1	0	0%
Jumlah Kapal Beroperasi Number of Ships Operated	87	83	95%
Produksi Production			
Angkutan Penumpang Passenger Transportation	3.614.988 Penumpang Passenger	3.616.904 Penumpang Passenge	101,15%
Angkutan Barang Goods Transportation	140.627 Ton/M3	100.663 Ton/M3	69,07%
Container Container	23.083 Teus	15.440 Teus	66,89%
Kendaraan Vehicle	6.028 Unit	8.511 Unit	141,19%
Ternak Animal	36.000 Ekor Animals	15.448 Ekor Animals	42,91%
Keuangan Finance			
Laba Konsolidasi Consolidated Profit	Rp0 juta million	Rp203.631 juta million	N/A
Kondisi Kesehatan Health Condition	Sehat A healthy A	Sehat AA healthy AA	-
Commission Day* Commission Day	28.284 Hari days	20.472 Hari days	72,38%
Gross Profit Gross Profi	5.624.137 juta million	4.601.783 juta	81,82%
Net Profit Net Profit	414.374 juta million	83.581 juta	20,17%

* Commission Day : Jumlah hari layar
Commission Day : Total Sailing day

TARGET TAHUN 2019

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP 2019 disusun sebagai pedoman kerja dan alat pengendalian serta untuk memenuhi ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perusahaan. Materi dan sistematika

2019 TARGET

The preparation of the 2019 Company Work and Budget plan is structured as work guidelines and control tools and to fulfill the provisions of Article 21 of the Company's Articles of Association. The material and systematic



Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2018 serta Proyeksi untuk Tahun Mendatang

Comparison Between Target, Realization in 2018 And Projection for the Next Year

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Menteri BUMN tanggal 31 Agustus 2018 Nomor : S-564/MBU/2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal tahun 2019 untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang sangat mempengaruhi perkembangan bisnis Perseroan di tahun 2019.

preparation of the Company's Work and Budget plan in 2019 refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number: KEP-101 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 concerning the Preparation of State-Owned Enterprises' Corporate Work and Budget plan and Minister of State-owned Enterprises Letters dated on August 31, 2018 Number: S-564 / MBU / 2018 concerning Aspirations of Shareholders / Owners of Capital in 2019 for Preparation of Company Work and Budget plan.

The preparation of the Company's Work and Budget plan is carried out by considering external and internal climate that greatly affect the Company's business development in 2019.

Uraian Description	RKAP 2019 2019 CBP
Operasional Operational	
Kapal Milik owned ship	
Kapal Penumpang Passenger Ship	26
Kapal Perintis Perintis Ship	52
Kapal Ternak Cattle Ship	2
Kapal Tol Laut Tol Laut Ship	6
Kapal Barang/Komersil Cargo/Commercial Ship	20
Kapal Wisata Cruise ship	8
Kapal Tanker Tanker ship	2
Jumlah Kapal Beroperasi Number of Ships Operated	116
Permintaan Pelanggan Customer Requests	
Angkutan Penumpang Passenger Transportation	3.927.174 orang Person
Angkutan Barang Goods Transportation	1.726.621 Ton/M3
Container Container	30.133 Teus
Kendaraan Vehicle	5.059 Unit
Ternak Animal	19.200 Ekor Animals
Keuangan Finance	
Laba Konsolidasi Consolidated Profit	Rp437.850 juta million
Kondisi Kesehatan Health Condition	Sehat AA healthy AA
Commission Day* Commission Day	19.299 Hari days
Gross Profit Margin Gross Profit	19,58%
Net Profit Margin Net Profit	7,54%

* Commission Day : Jumlah hari layar
Commission Day : Total Sailing day



Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Information and Facts Material Happened After the Date of Accountant Report

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

There is no information and material fact happened after the date of accountant report.

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Untuk Periode tahun buku 2018, Manajemen menetapkan Kebijakan Dividen yaitu 100% dividen dialokasikan sebagai cadangan modal.

For the fiscal year of 2018, Management determined a Dividend Policy, namely 100% dividends allocated as capital reserves.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (MSOP)

Employee Stock Ownership Program (EMSOP)

Pada tahun 2018 PT PELNI (Persero) tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan.

In 2018, PT PELNI (Persero) did not have Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program.

Informasi Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaction Information Containing Conflict of Interest and Transactions with Affiliation Parties

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama, sehingga perusahaan melakukan transaksi secara wajar tanpa adanya benturan kepentingan.

The Company engaged in transactions with related parties that conducted under mutually agreed terms and conditions, so that the Company transacts fairly without any conflict of interest.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Amendment of Regulatory Regulations and Its Impact on Company

DAMPAK PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN

Penerapan Peraturan Pelaksana PP No. 1/2017 tidak berdampak material atau signifikan terhadap kinerja Perusahaan, baik secara kuantitatif dan atau kualitatif.

THE IMPACT OF LEGAL CHANGES FOR THE COMPANY

The Implementation of Predint Regulation No. 1/2017 has no material or significant impact on the Company's performance, either quantitatively or inqualitatively.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Public Offering Funds Uses Realization

Perseroan tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

The Company has not had information on public offering funds uses realization



Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan

Amendment of Accounting Policies and Its Impact on Company Financial Statements

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

- a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018:
 - PSAK 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".
 - PSAK 13 (Amandemen 2017), "Properti Investasi: tentang Pengalihan Properti Investasi".
 - PSAK 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
 - PSAK 16 (Amandemen 2015), "Aset Tetap: tentang penambahan paragraf yang terkait dengan Aset Agrikultur".
 - PSAK 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi".
 - PSAK 53 (Amandemen 2017), "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham".
 - PSAK 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain".
 - PSAK 69 (2015), tentang "Agrikultur".
- b. Interpretasi Standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:
 - ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka".
 - ISAK 34, "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".
- c. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, relevan namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:
 - PSAK 15 (Amandemen), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK").

- a. The Amendments and Interpretations of PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants which are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018:
 - PSAK 2 (Amendment 2016), "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative".
 - PSAK 16 (Amendment 2017), "Investment Property: Transfers of Investment Property".
 - PSAK 15 (Improvement 2017), "Investments in Associates and Joint Ventures".
 - PSAK 16 (Amendment 2015), "Fixed Asset: regarding Adding Paragraphs related to Agricultural Assets".
 - PSAK 46 (Amendment 2016), "Taxation; Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses".
 - PSAK 53 (Amendment 2017), "Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions".
 - PSAK 67 (Improvement 2017), "Disclosures of Interest in Other Entities".
 - PSAK 69 (2015), regarding "Agricultural".
- b. Standard Interpretation issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, but has only been effective for the financial year beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted:
 - ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration".
 - ISAK 34: "Uncertainty Over Income Tax Treatments".
- c. Standard and Amendment Standards issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, that are relevant but only effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted:
 - PSAK 15 (Amendment), "Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures".



Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan

Amendment of Accounting Policies and Its Impact on Company Financial Statements

- PSAK 62 (Amandemen), "Kontrak Asuransi: Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi".
- PSAK 71 (Amandemen 2017), "Instrumen Keuangan".
- PSAK 72 (Amandemen 2017), "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK 73, "Sewa".
- PSAK 62 (Amendment), "Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts".
- PSAK 71 (Amendment 2017), "Financial Instruments".
- PSAK 72 (Amendment 2017), "Revenue from Contract with Customers".
- PSAK 73, "Leases".

ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan. Dan alasan terjadinya perubahan pada Kebijakan Akuntansi yang berlaku adalah untuk dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang berimplikasi pada dunia akuntansi.

DAMPAK SECARA KUANTITATIF TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Saat penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian ini, manajemen belum menentukan dampak restrospektif, jika ada dari adopsi dimasa yang akan datang dari standar terkait, pada posisi keuangan. Perseroan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak SAK baru tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian grup.

REASONS FOR CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The Financial Accounting Standards Statement issued by the Indonesian Institute of Accountants regulates overall accounting treatment for various business activities of companies in Indonesia. These standards are not only intended to regulate accounting treatment from the beginning to the end of a year, namely for reporting to users, these standards also include guidelines for accounting treatment starting from the acquisition, the use, and the time of deletion for each of accounting elements. The standards also regulate the recognition, measurement, presentation and reporting of company finances. And the reason for the changes in the applicable Accounting Policy is to be able to accommodate changes that have implications for the accounting patterns.

QUANTITATIVE IMPACT ON FINANCIAL STATEMENTS

When presenting these Consolidated Financial Statements, management has not determined the retrospective impact, if there is any future adoption of the related standard, in the financial position. The Company is evaluating and has not yet determined the impact of the new SAK on the consolidated financial statements.



Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN PADA TAHUN 2018

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan tentu menghadapi beberapa tantangan dan dari semua tantangan tersebut terdapat beberapa hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku 2018 diantaranya adalah:

1. Risiko keselamatan kapal dan penumpang (Armatek, Operasi, *Designed Person Ashore*).
2. Risiko *public service obligation*;
3. Risiko *pax factor* kapal penumpang;
4. Risiko subsidi kapal barang tol laut; dan
5. Risiko kenaikan BBM.

Asesmen manajemen atas hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun 2018

Asesmen manajemen atas hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000 yang menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Dalam menyikapi perubahan konteks eksternal secara berkala atau periode triwulanan dilakukan pembahasan risiko-risiko yang ada terhadap pengelolaan Perusahaan antara unit manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi.

Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan asesmen

Dalam penyusunan RKAP 2018 PT PELNI (Persero) salah satu acuannya berdasarkan Risk Based Budgeting, dalam ini penyusunan anggaran berdasarkan risiko-risiko yang telah terpetakan.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan Perseroan berkaitan dengan kelangsungan usaha PT PELNI (Persero) di masa yang akan datang diantaranya adalah kondisi makroekonomi, kondisi industri maritime dan perkapalan nasional serta kebijakan Pemerintah. Adapun data asumsi tersebut sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,30%.
2. Tingkat inflasi adalah sebesar 3,50%.
3. Tingkat suku bunga adalah sebesar 5,30%.
4. Kurs 1USD = Rp14.400.
5. Harga BBM adalah sebesar Rp5.360/liter.
6. Harga minyak pelumas Rp36.500/liter.
7. Jaringan (Pola) Trayek tahun 2019.
8. Dengan rata-rata frekuensi 23 *voyage*.

THINGS THAT HAVE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S CONTINUITY BUSINESS IN 2018

In conducting its business, the Company certainly faces several challenges, from all these challenges there are some potentially influential things significant to the company's business continuity in the fiscal year 2018 as follows:

1. Ship and passenger safety risks (Armatek, Operation, *Designed Person Ashore*);
2. Public service obligation risk;
3. Passenger ship *pax factor* risk;
4. Subsidizing Tol Laut carriages risk; and
5. Rising fuel prices risk.

Management Assessment on things that have potential to significantly affect the company's continuity business in 2018

Management assessment on the matters affect the business continuity of the Company significantly, PT PELNI (Persero) implements risk management system based on ISO 31000 framework resulting the widely perspectives, easy to understand and measurable of risk management practices to support each unit coordination and integration in the Company.

in responding the external changing context periodically and quarterly has been discussed the existing risks on the Company management between risk management unit, the Board of Commissioners and Directors.

Assumptions that used by management in conducting assessment

In preparing PT PELNI (Persero) 2018 work and budget plan, based on Risk Based Budgeting, in this form of budgeting based on risks mapped.

The assumptions used by the Company relating to the business continuity of PT PELNI (Persero) in the future include macroeconomic climate, the national maritime conditions and shipping industry and Government policies. The assumptions are as follows:

1. Economic growth is 5.30%.
2. The inflation rate is 3.50%.
3. The interest rate is 5.30%.
4. 1USD rate = Rp. 14,400.
5. The fuel price is IDR 5,360/litre
6. Price of lubricant oil is IDR 36,500/litre
7. Route Network (Pattern) in 2019.
8. With an average frequency of 23 *voyage*.



Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information

Asumsi tersebut juga didukung oleh peran PT PELNI (Persero) dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Infrastruktur Negara

PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi publik antar pulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang) termasuk angkutan transmigrasi dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

2. Agen Pembangunan

PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi publik ke wilayah pulau terpencil dan terluar guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis, seperti: Miangas, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Nunukan.

3. Sistem Logistik

PT PELNI (Persero) mengangkut kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat seluruh Indonesia termasuk di pulau-pulau terpencil dan terluar guna stabilisasi harga antara daerah dan pusat.

4. Kedaulatan NKRI

PT PELNI (Persero) menyediakan akses untuk keperluan sosial politik Negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan regular antar pulau.

5. Tanggap Darurat

PT PELNI (Persero) menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat dan handal ke seluruh pelosok Nusantara untuk kondisi darurat nasional.

KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan juga melakukan penghitungan kelangsungan usaha dengan menggunakan metode *Z-score* model yakni model yang dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum *go-public* oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

$$Z - \text{Score} = \frac{6,56 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak}}{\text{Jumlah Aset}} + \frac{6,56 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak}}{\text{Jumlah Aset}} + \frac{1,05 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak}}{\text{Jumlah Kewajiban}} + \frac{6,72 \times \text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Jumlah Kewajiban}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Z-score model tahun 2018 diperoleh score 59,08 sedangkan score tahun 2017 sebesar 52,27 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas 'tidak pailit' atau diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya **sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.**

The assumptions are also supported by role of PT PELNI (Persero) in several aspects, as follows:

1. State Infrastructure

PT PELNI (Persero) provides inter islands public transportation access (developed and developing regions) including transmigration and TKI (Indonesian Workers).

2. Agent of Development

PT PELNI (Persero) provides public transportation access to remote and border islands to accelerate development and eliminate geographical isolation, such as: Miangas, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Nunukan.

3. Logistic System

PT PELNI (Persero) carries groceries and other essentials for society across Indonesian territory including in remote and border islands to stabilize price between rural and urban (central) area.

4. NKRI Sovereignty

PT PELNI (Persero) provides access for national social and political needs as well as national security through inter-island regular visit.

5. Emergency

PT PELNI (Persero) provides large-capacity, fast and reliable fleets nationwide for national emergency condition.

REVIEW OF THE BUSINESS CONTINUITY

The company also calculates business continuity using Z-score model, a model developed by a combination of several financial ratio analysis formula for companies that have not been publicly listed by Altman Edwards with the following formula:

Based on the results of the 2018 Z-score calculation, obtained a score of 59.08 while the 2017 score was 52.27 so it indicated that it was lengthly above the 'not bankrupt' limit or interpreted tha the Company and its subsidiary entities were essentially **able to maintain the continuity of their business.**



Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

STRATEGI PEMASARAN

Pada tahun 2018, Perseroan merealisasikan sasaran strategis di bidang pemasaran, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penjualan angkutan penumpang di kapal penumpang dan kapal perintis;
2. Meningkatkan penjualan angkutan barang di kapal tol laut, kapal penumpang dan perintis;
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan; dan
4. Mengembangkan program dan kegiatan *lifestyle bussiness*, yakni :
 - A. *MICE ON BOARD*
 - *Meeting on Board.*
 - *Study in Board.*
 - *Tour on Board.*
 - *Venue on Board.*
 - *Weekend Diving Course.*
 - B. *WISATA BAHARI*
 - Karimun Jawa
 - Banda Neira
 - Pulau Seribu

PT PELNI (Persero) menyediakan wisata bahari ini melalui 3 cara yakni :

1. Sesuai trayek.
2. Kapal stay.
3. *Charter.*

MARKETING STRATEGY

In 2018, the Company had implemented strategic objectives of marketing sector, as follows:

1. Increasing the sales of passenger transport on passenger ships and perintis ships;
2. Increasing the sales of goods transport on Tol Laut, passenger and perintis ships;
3. Improving the customer satisfaction; and
4. Developing the program and lifestyle business activities, among others:
 - A. *MICE ON BOARD*
 - Meeting on Board
 - Study on Board
 - Tour on Board
 - Venue on Board
 - Weekend Diving course
 - B. *MARINE TOURISM*
 - Karimun Jawa
 - Banda Neira
 - Pulau Seribu

PT PELNI (Persero) has 3 kinds of marine tourism

1. Based on route.
2. Stay ship.
3. *Charter.*



Buka puasa CAAIP 250 orang
CAAIP Breaking Fast attended by 250 persons

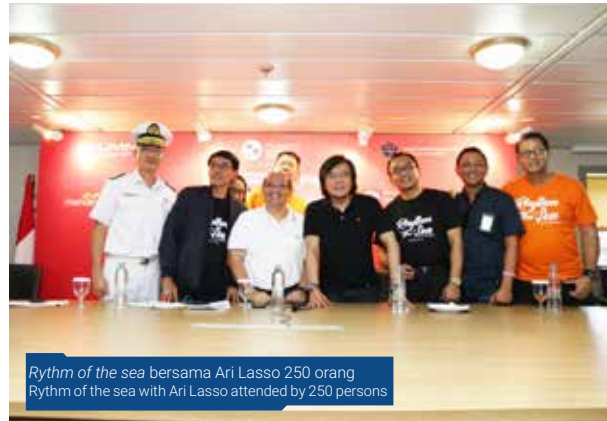


Gathering Pensiunan Indosat 47 orang
Indosat Postemployee Gathering attended by 47 persons

Aspek Pemasaran Marketing Aspect



Lip BUMN 365 orang
 BUMN Lip attended by 365 persons



Rythm of the sea bersama Ari Lasso 250 orang
 Rythm of the sea with Ari Lasso attended by 250 persons



Mewarnai dan Tour on Ship 550 anak
 Coloring and Tour on Ship Events for 550 Kids

Adapun langkah strategis atau rencana kerja yang akan dilakukan sejalan dengan sasaran strategis di bidang pemasaran, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan penjualan angkutan penumpang di kapal penumpang dan kapal perintis.
 - a. Pengembangan New PELNI *Ticketing System*.
 - b. Optimalisasi produktivitas melalui penjualan kegiatan *on board*.
 - c. Penerbitan emplooi 3 bulan ke depan.

The strategic steps or work plans will be carried out aligned with the strategic objectives in the marketing, which includes:

1. Increase the passenger transport slaes on passenger ships and perintis ships.
 - a. New PELNI *Ticketing System* development.
 - b. Productivity optimization through on-board sales activities.
 - c. Emplooi publishing for the next 3 months.



Aspek Pemasaran Marketing Aspect

2. Meningkatkan penjualan angkutan barang di kapal tol laut, kapal penumpang dan perintis.
 - a. Kerjasama muatan dengan PT Pos Indonesia dan Bank Indonesia.
 - b. Pengembangan aplikasi transaksi dan pelaporan angkutan barang.
 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
 - a. Implementasi SOP Makan berdasarkan ISO 22000
 - b. Implementasi sistem pengendalian catering berbasis IT.
 - c. Pengembangan sarana *contact center*.
 - d. Standarisasi sarana toilet siap pakai.
 4. Mengembangkan bisnis keagenan dan wisata
 - a. Pembelian/ modifikasi kapal wisata
 - b. Otomatisasi sistem online booking
 - c. Otomatisasi sistem pelayanan wisata
 - d. Mengembangkan aplikasi keagenan
 - e. Pengembangan paket wisata bahari
2. Increase the freight transport sales on Tol Laut, passenger and perintis ships.
 - a. Collaboration with PT Pos Indonesia and Bank Indonesia.
 - b. Development of transaction applications and freight transportation reporting.
 3. Increase customer satisfaction
 - a. Implementation of Eating SOPs based on ISO 22000.
 - b. Implementation of IT-base catering control systems.
 - c. Contact center facilities development.
 - d. Standardization of toilet facilities ready to use.
 4. Develop agency and tourism business
 - a. Purchase / modification of tour boats
 - b. Online booking systems automation
 - c. Tourism service systems automation
 - d. Agency applications development
 - e. Marine tourism packages development

Pangsa Pasar

Pangsa pasar PT PELNI (Persero) didominasi oleh karakter penumpang menengah ke bawah dengan barang bawaan (kargo) yang signifikan serta penumpang yang tinggal atau menuju daerah tanpa adanya layanan transportasi udara. Pangsa pasar Perseroan lainnya adalah *shipper* yang membutuhkan alat angkut terjadwal.

Market Share

Market share of PT PELNI (Persero) is dominated by characteristic of middle-low passenger with significant cargo as well as passengers who stays or departs to several areas without aircraft transportation service. Another market share of the Company is the shipper with regular transportation needs.



Prospek Usaha dan Strategi Perusahaan

Business Prospect and Strategies of the Company

PROSPEK USAHA

Meskipun kondisi global tetap menantang, para pelaku pasar memprediksi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2019 akan membaik. Berbagai tekanan yang mewarnai tahun 2018 pun mulai berkurang. Situasi ekonomi dan geopolitik global diprediksi akan lebih mendukung kembalinya arus modal asing masuk ke Indonesia. Kondisi ini pun akan memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

Untuk dapat mengoptimalkan peluang tersebut salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah ialah menetapkan capaian pembangunan pada sektor perhubungan laut, bahkan hal ini menjadi target rencana strategis yang menjadi prioritas nasional. Hal ini seiring fase transformasi PELNI 2018 – 2019 yakni fase *Growth*.

Sebagai pihak yang ditunjuk sebagai badan penyelenggara Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation* - PSO) angkutan barang di laut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, PT PELNI (Persero) terus berupaya untuk dapat memenuhi penugasan tersebut secara optimal. Sesuai dengan RJPP Transformasi PT PELNI (Persero) dimana tahun 2018 – 2019 merupakan tahun Pertumbuhan maka PT PELNI (Persero) masih akan melanjutkan inisiatif strategis yang sudah dijalankan di tahun 2018 dan berupaya melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

STRATEGI PERUSAHAAN TAHUN 2018

Sesuai dengan RJPP Transformasi PT PELNI (Persero) dimana tahun 2018 – 2019 merupakan tahun Pertumbuhan maka PT PELNI (Persero) masih akan melanjutkan inisiatif strategis yang sudah dijalankan di tahun 2018 dan berupaya melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Strategi yang dimaksud ialah:

BUSINESS PROSPECTS

Although global conditions remain challenging, marketers predict Indonesia's economic conditions will improve in 2019. The various pressures characterize 2018 that has been diminished. The global economic and geopolitical situation are predicted to support the return of foreign capital into Indonesia. This condition will also affect the economic condition of Indonesia.

To optimize those possibilities, one of the steps taken by the government is to determine the developing achievement on sea transportation, moreover those become a national strategic objective plan priority, along with Growth stage of PELNI transformation in 2018-2019.

As the appointed organizer of the public service obligation for sea carriage transportation that stated in Presidential Regulation No. 106 of 2015, regarding the implementation of public service obligation for sea carriage transportation, PT PELNI (Persero) continues to meet the assignment optimally in accordance with long-term planning of PT PELNI (Persero) transformation in 2018-2019 is a growth year, PT PELNI (Persero) continues its strategic initiatives implemented in 2018 and strive to make an implementation improvement.

THE COMPANY STRATEGIES IN 2018

In accordance with the long-term planning of PT PELNI (Persero) Transformation in 2018 - 2019 is a growth year, so PT PELNI (Persero) will continue its strategic initiatives and strive to make an implementation improvements. The following strategies are as follows:



Prospek Usaha dan Strategi Perusahaan Business Prospect and Strategies of the Company

GROWTH – 2018, 2019



1. *Market Development*
 - Pengembangan paket wisata bahari.
 - Optimasi load factor melalui identifikasi komoditas dan partnership.
2. *New Business Development*
 - Penumpang.
 - Kargo.
 - Logistik.
 - *Services*.
 - *Tourism*.
3. *Culture Strengthening*
 - Internalisasi budaya, tata nilai dan perilaku yang selaras dengan strategi bisnis.
4. *Production Facility Improvement*
 - Penerapan sistem pemeliharaan kapal berbasis ERP.
5. *Operational Excellence*
 - Implementasi model operasi PELNI Group berdasarkan tujuan bisnis.
6. *Holding Implementation*
 - Implementasi PELNI Group.

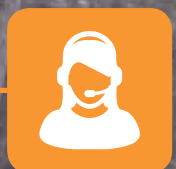
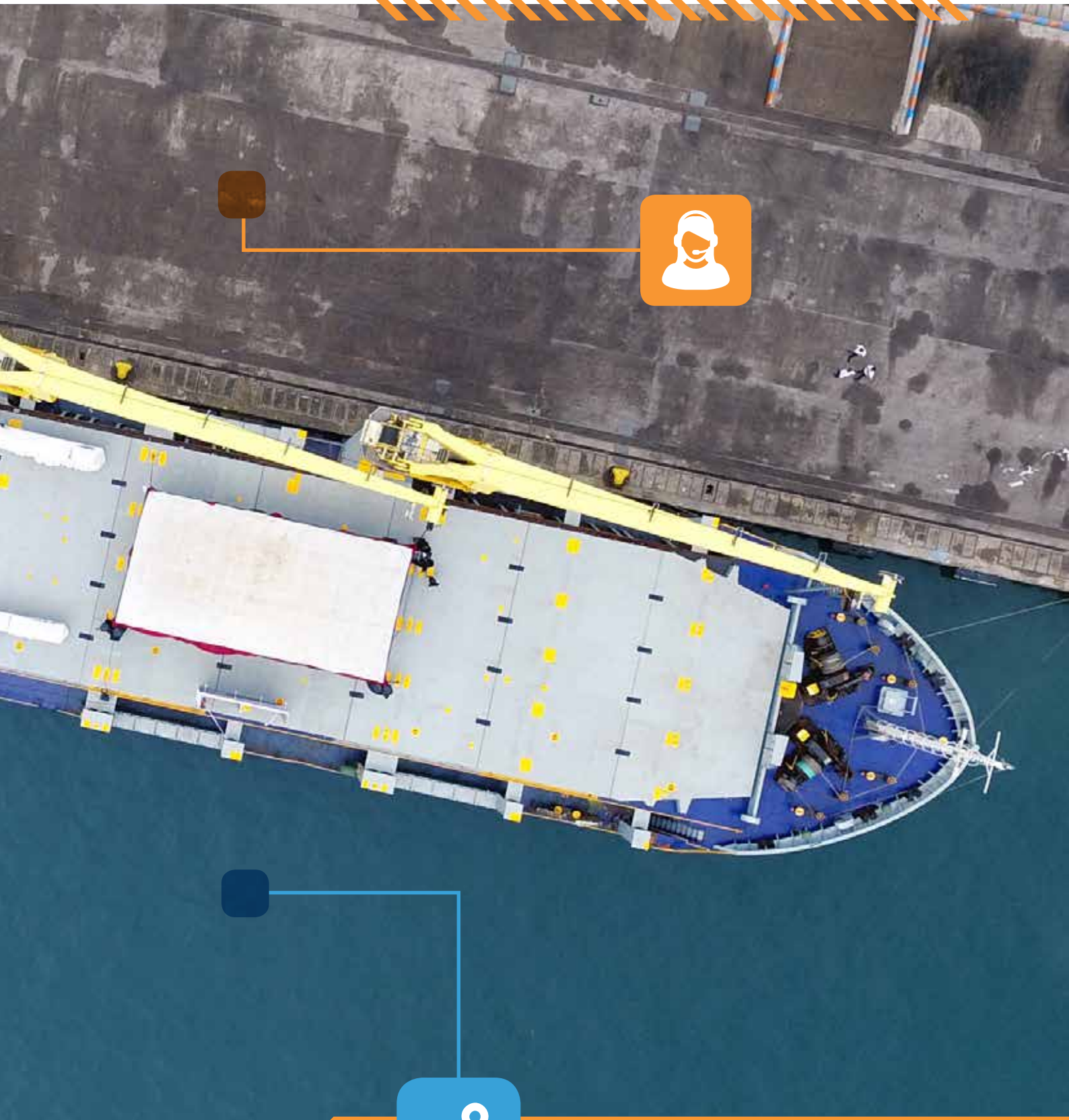
1. Market Development
 - Marine tourism packages development.
 - Load factors optimization through commodities and partnerships identifications.
2. New Business Development
 - Passengers.
 - Cargo.
 - Logistics.
 - Services.
 - Tourism.
3. Culture Strengthening
 - Internalization of culture, values and behavior in line with business strategy.
4. Production Facility Improvement
 - Implementation of ERP-based ship maintenance systems.
5. Operational Excellence
 - Implementation of the PELNI Group operating model based on business objectives.
6. Holding Implementation
 - PELNI Group implementation.



05

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance





Pendahuluan

Introduction

Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

The Company implements GCG structure and mechanism aiming to operate process and structure to achieve performance target and accountability of the Company to generate added value for the Shareholders and Stakeholders by considering interests of other Stakeholders.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) practice at PT PELNI (Persero) refers several prevailing Laws in Indonesia, among others, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company and Minister of State-Owned Enterprise Decree No. Kep-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise (SOE)

IMPLEMENTASI PRINSIP GCG PT PELNI (PERSERO)

IMPLEMENTATION OF PT PELNI (PERSEO) GCG PRINCIPLE

Prinsip Principle	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
<i>Transparency</i> Transparansi	<p>Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perseroan. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perseroan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan.</p> <p>The principle of transparency is openness in implementing the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the Company. The Company shall comply with laws and regulations governing information disclosure issues applicable to the Company. Transparency also includes matters relevant to the information required by the public in relation to the Company's products and operational activities that potentially influence stakeholder behavior.</p>	<p>Melaksanakan aktivitas keterbukaan informasi melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Pemegang Saham, dan melalui pelaporan keuangan dan melalui media komunikasi resmi.</p> <p>Perform information disclosure activity by fulfilling reporting obligation to the Shareholders as well as financial reporting and through official communication media.</p>
<i>Accountability</i> Akuntabilitas	<p>Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.</p> <p>The principle of accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Company's Organs which enable the Company's management effectively implemented.</p> <p>Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perseroan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.</p> <p>Accountability relates to the execution of duties and authorities owned by a person or work unit in carrying out the responsibilities imposed by the Company. This accountability includes explanations of the performance of duties and authorities, reporting on the execution of duties and authorities, and accountability for activities in performing these duties and authorities.</p>	<p>Memiliki struktur tata kelola perusahaan yakni organ utama yang saling menunjang terciptanya pelaksanaan tugas yang transparan dan independen. Perseroan juga telah melengkapi pedoman-pedoman yang berfungsi untuk menjadi panduan penerapan tata kelola perusahaan.</p> <p>Having corporate governance structure including main structures that are supports implementation of transparent and independent duty. The Company also has equipped manuals that are functioned as corporate governance implementation guideline.</p>



Pendahuluan Introduction

Prinsip Principle	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
<i>Responsibility</i> Pertanggungjawaban	Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The principle of accountability is the suitability in the management of the Company with the prevailing laws and regulations and the principles of sound corporations.	Menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang bersifat <i>cross check</i> untuk memastikan tanggung jawab dari masing-masing fungsi struktur tata kelola perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya tanpa benturan kepentingan dan intervensi. Implementation of cross-check corporate governance mechanism to ensure responsibility of each function of the corporate governance structure to exercise their duty and responsibility properly without conflict of interest and intervention.
<i>Independency</i> Kemandirian	Prinsip kemandirian yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The principle of independence is the state in which the Company is professionally managed without conflict of interest and influence / pressure from any party that is inconsistent with the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.	Perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun intervensi dan dominasi dari pihak manapun. The Company is managed professionally without conflict of interest and intervention from any party.
<i>Fairness</i> Kewajaran	Prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The principle of fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under the applicable laws and regulations.	Perseroan menerapkan kesetaraan kepada segenap pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. The Company implements fairness principle to all stakeholders in accordance with prevailing law and regulation.

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN GCG

Perseroan menempatkan GCG sebagai landasan penting untuk menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan dengan penguatan struktur dan mekanisme pengelolaan secara internal yang didukung oleh kepatuhan eksternal terhadap seluruh perangkat peraturan perundang-undangan. Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Pedoman GCG PT PELNI (Persero)
2. Pedoman *Code of Conduct* PT PELNI (Persero)
3. Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
4. Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT PELNI (Persero)
5. Pakta Integritas PT PELNI (Persero)
6. Pedoman Penanganan Gratifikasi PT PELNI (Persero)
7. Pedoman dan Sistem Manajemen Risiko PT PELNI (Persero)
8. Tata Kelola Teknologi Informasi PT PELNI (Persero)
9. Pedoman *Whistle Blowing System* PT PELNI (Persero)
10. Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT PELNI (Persero)

COMMITMENT ON GCG IMPLEMENTATION

The Company places GCG as fundamental aspect to create sustainable growth through management structure and management consolidation internally that is also supported with external compliance with all regulatory frameworks. GCG implementation commitment in the Company is manifested as several manual books related with GCG implementation and GCG integrity pact signing by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

1. PT PELNI (Persero) Code of GCG
2. PT PELNI (Persero) Code of Conducts
3. PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners
4. PT PELNI (Persero) Conflict of Interest
5. PT PELNI (Persero) Integrity Pact
6. PT PELNI (Persero) Anti-Gratification Manual
7. PT PELNI (Persero) Risk Management Guideline and System
8. PT PELNI (Persero) Information Technology governance
9. PT PELNI (Persero) Whistleblowing System Manual
10. PT PELNI (Persero) Annual Report

Pendahuluan

Introduction

ROADMAP GCG

Sebagai sebuah sistem yang membutuhkan komitmen dalam penerapan penegakan secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan, maka tantangan terbesar dalam implementasi GCG adalah memberikan kesadaran (*awareness*), kepemilikan bersama (*ownership*), serta keterlibatan (*involvement*) seluruh insan Perseroan.

Menghadapi tantangan implementasi tersebut, dibutuhkan suatu "peta jalan" atau *Road Map* GCG yang menjadi pedoman bagi seluruh unit dan insan Perseroan dalam memberikan dukungan dan kontribusi bagi terciptanya GCG yang efektif secara sistemik dan sistematis.

Implementasi GCG membutuhkan komitmen dan kemauan kuat, keyakinan terhadap visi dan misi Perseroan, didukung kerja keras semua lini dan seluruh insan Perseroan. Top manajemen dituntut merumuskan tahapan implementasi, tata nilai, etika bisnis, budaya dan tujuan akhir Perseroan yang akan dicapai melalui dedikasi dan keyakinan terhadap manfaat penerapan GCG.

GCG ROADMAP

As a system that requires commitment in the implementation of planned, systemic and sustainable enforcement, the biggest challenges in implementing GCG are awareness, ownership, and involvement of all Company's Personnel.

Facing such challenge in the implementation, a "roadmap" or GCG Road Map is a guide for all units and Company's personnel in providing support and contribution to the creation of systemically and systematically effective GCG.

Implementation of GCG requires commitment and strong will, confidence in the vision and mission of the Company, supported by Company's personnel hard work. Top management is required to formulate the stages of implementation, values, business ethics, culture and corporate end-goals to be achieved through dedication and confidence in the benefits of GCG implementation.



ASESMEN GCG

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG (*GCG Assessment*) secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Untuk periode tahun buku 2018, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP dengan capaian skor 81,56 atau predikat BAIK dengan rincian sebagai berikut:

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ASSESSMENT

The Company evaluated the practices of GCG through periodically assessment on GCG to measure the quality implementation of GCG in each of the Company's organs. For fiscal year of 2018, GCG assessment was conducted by Centre of Maritime Safety Technology with a score of 81.56 or "GOOD" predicate in detailed below:



Pendahuluan Introduction

Ringkasan Hasil GCG Self Assessment PT PELNI (Persero) 2018 PT PELNI (Persero) GCG Self Assessment Result Summary in 2018

No.	Penjelasan Kriteria Criteria Explanation	Bobot Weight	Capaian Tahun 2018 2018 Achievement		Predikat Predicate
			Skor Score	Persentase Percentage	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan. Commitment on Sustainable Corporate Governance	7,000	5,99	85,51	Baik Good
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owner	9,000	8,26	91,78	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	30,29	86,54	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35,000	30,13	86,09	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	6,89	76,56	Cukup Baik Fair
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0,00	0,000	-
Skor Keseluruhan Total Score		100,000	81,56		Baik Good

REALISASI REKOMENDASI SELF ASSESSMENT GCG 2017

Pada tahun 2017, PT PELNI (Persero) melaksanakan *self Assessment* dengan pedamping dari BPKP DKI Jakarta. Hasil skor *self assessment* GCG untuk praktek tahun 2017 menunjukkan hasil dengan cukup baik dengan capaian skor 80,448 atau predikat "BAIK," dengan rincian sebagai berikut :

RECOMMENDATION REALIZATION OF GCG SELF ASSESSMENT 2017

In 2017, PT PELNI (Persero) conducted a self assessment that supported by BPKP DKI Jakarta. GCG self assessment in 2017 resulted good predicate with a score of 80.448 or "GOOD" predicate in detailed below :

Ringkasan Hasil GCG Self Assessment PT PELNI (Persero) 2017 PT PELNI (Persero) GCG Self Assessment Result Summary in 2017

No.	Penjelasan Kriteria Criteria Explanation	Bobot Weight	Capaian Tahun 2017 2017 Achievement		Predikat Predicate
			Skor Score	Persentase Percentage	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan. Commitment on Sustainable Corporate Governance	7,000	5,795	82,79	Baik Good
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owner	9,000	8,301	92,23	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	29,764	85,04	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35,000	29,290	85,43	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	6,688	74,32	Cukup Baik Fair
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0,000	0,00	-
Skor Keseluruhan Total Score		100,000	80,448	80,448	Baik Good



Pendahuluan

Introduction

Status tindak lanjut usulan rekomendasi penilaian GCG tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Follow-up Status on Recommendation of GCG self assessment 2017, is as follows:

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
Aspek I Aspect I			
1	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The Company measured the implementation of good corporate governance.	Disarankan kepada Direksi penanggung jawab GCG agar melakukan evaluasi (<i>review</i>), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian. It is suggested to the responsible Director of GCG to conduct an evaluation (<i>review</i>), that are the programs to describe the follow-up implementation and application of GCG in the Company that the suggestion will be implemented in the coming years after an assessment.	Sudah dilakukan evaluasi tindak lanjut AOI kepada PIC dengan mengundang pembahasan Tindak Lanjut dengan PIC pada tanggal 1 Oktober 2018. Has been evaluated the follow-up AOI with invited PIC regarding the discussion on its follow-up on October 1, 2018.
2	Koordinasi pengelolaan dan administrasi LHKPN. Coordinating the implementation and administration of wealth reporting of state official	a. Disarankan kepada Direksi, untuk menginstruksikan kepada penyelenggara Negara supaya dalam menyusun LHKPN dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. It is recommended to the Directors, to instruct the state administrators in preparing the wealth reporting of state official can be conducted in timely manner based on the applicable laws and regulations.	Sudah dibuatkan SK nomor 03.21/01/SK/HKO.01/2018 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan di lingkungan PT PELNI (Persero) dan instruksi LHKPN dan instruksi dengan nomor 12.22/01/INS/HKO.01/2017 tentang Penyampaian LHKPN kepada KPK. Has made the letter of decree Number: 03.21/01/SK/HKO.01/2018 on the wealth reporting guidelines of state officials in PT PELNI (Persero) and wealth reporting of state officials instruction by Number: 12.22/01/INS/HKO.01/2017 regarding wealth reporting of state officials submission to Corruption Eradication Commission.
		b. Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada petugas pengelola LHKPN untuk meningkatkan pelaporan secara berkala kepada KPK tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN. It is recommended to the Directors, to instruct the wealth reporting of state officials management officers to increase periodic reporting to Corruption Eradication Commission regarding the progress in meeting the obligation to submit the wealth reporting of state officials.	Instruksi LHKPN dan instruksi dengan nomor 12.22/01/INS/HKO.01/2017 tentang Penyampaian LHKPN kepada KPK. Untuk implementasi tahun 2018 sudah diterapkan oleh KPK untuk pelaporan LHKPN dengan menggunakan e-LHKPN sehingga untuk pelaporannya dilakukan oleh masing - masing personal. The wealth reporting of state officials instruction by Number: 12.22/01/INS/HKO.01/2017 regarding the wealth reporting of state officials submission to Corruption Eradication Commission. The wealth reporting of state officials using e-LHKPN, so can be reported by each personnel.
		c. Disarankan kepada Direksi untuk memberikan teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. It is recommended to the Directors to give warning/ sanction for the official who does not yet submit the wealth reporting of state officials in accordance with the applicable laws and regulations.	Sudah diterapkan aturan yang berlaku, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi. Has been implemented the applicable regulation, instead of the implementation does not fully implement.
3	Pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing system</i> . The policy implementation of whistleblowing system.	a. Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada petugas pengelola WBS untuk melakukan sosialisasi kepada karyawan perusahaan & <i>stakeholder</i> . It is suggested to the Directors, to instruct WBS management officers for socializing the employees and Stakeholders of the Company.	Sudah di Instruksikan dengan nomor 04.13/01/INS/HKO.03/2018 tentang kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran (WBS) di Lingkungan PT PELNI (Persero) dan untuk sosialisasi telah dilakukan melakukan milis pegawai. Has been instructed with Number: 04.13/01/INS/HKO.03/2018 regarding the policy on reporting the implementation of WBS in PT PELNI (Persero)'s environment and socializing through e-mail.



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>b. Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada petugas pengelola WBS untuk melakukan penanganan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima perusahaan. It is suggested to the Directors, to instruct WBS management officer to manage the follow-up for the complaints came in the Company.</p>	<p>Sudah di Instruksikan dengan nomor 04.13/01/INS/HKO.03/2018 tentang kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran (WBS) di Lingkungan PT PELNI (Persero). Has been instructed by Number 04.13/01/INS/HKO.03/2018 regarding the policy on conducting WBS violation reporting in PT PELNI (Persero)'s environment.</p>
		<p>c. Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada petugas pengelola WBS untuk membuat pelaporan atas pengaduan yang diterima perusahaan. It is recommended to the Directors, to instruct WBS management officer to report the complaints in the Company.</p>	<p>Pelaporan sudah dilakukan oleh pengelola WBS kepada Direktur penanggung jawab GCG yaitu Direktur SDM & Umum dengan nota dinas nomor 10.08/02/ND/093/2018 tentang pelaporan WBS di Lingkungan PT PELNI (Persero) periode 01 Mei - 01 Oktober 2018. The reporting has been conducted by WBS management officer to the responsible Directors of GCG which is Director of Human Resources and General Affairs with a official note Number: 10.08/02/ND/093/2018 regarding WBS reporting in PT PELNI (Persero)'s environment on May 01 – October 01, 2018.</p>
		<p>d. Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada petugas pengelola WBS untuk melakukan evaluasi atas pengaduan yang diterima Perusahaan. It is suggested to the Directors, to instruct WBS management officer to evaluate the complaints in the Company.</p>	<p>Sudah dilakukan evaluasi dan pelaporan WBS kepada Direktur penanggung jawab GCG yaitu Direktur SDM & Umum dengan nomor surat: 10.08/02/ND/093/2018 terkait Pelaporan WBS di Lingkungan PT PELNI (Persero). Has been evaluated and WBS reporting to the responsible Director of GCG which is Director of Human Resources and General Affair with the letter number: 10.08/02/ND/093/2018 regarding WBS reporting in PT PELNI (Persero)'s environment.</p>
Aspek II Aspect II			
1	<p>Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. Director participated in sustainable training/education.</p>	<p>a. Melaksanakan program pengenalan Direksi sesuai <i>Board Manual</i>, diantaranya program pengenalan dilakukan oleh Sekper berkoordinasi dengan Direksi. Materi yang disampaikan sesuai pedoman <i>Board Manual</i> dan melengkapinya dengan daftar hadir. Conducting the Director introduction program based on Board manual including this introduction in coordination between Corporate Secretary and the Directors. The Material presented according to Board Manual guidelines and completing with attendance list.</p>	<p>Untuk tahun 2018 tidak ada perubahan struktur Direksi sehingga tidak ada program pengenalan Direksi. In 2018, there is no changes in the composition of the Board of Directors and there is no the introduction program.</p>
		<p>b. Merealisasikan kegiatan program peningkatan kapabilitas Direksi sesuai rencana serta membuat laporan kegiatan. Realizing a capabilities development program for the Directors in accordance to the planning and making its report.</p>	
2	<p>Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. The Directors divided the Duties/ authority and responsibility functions clearly.</p>	<p>a. Kepada Direksi agar menyusun prosedur penyusunan SOP. The Directors prepare the procedure for SOP preparation.</p>	<p>Telah disusun SK Direksi nomor 02.09/01/SK/HKO.01/2018. Tentang pedoman manajemen proses bisnis PT PELNI (Persero). Has prepared the Director's letter Number: 02.09/01/SK/HKO.01/2018 regarding management guidelines for the business process of PT PELNI (Persero).</p>
		<p>b. Kepada Direksi agar menindaklanjuti rekomendasi audit terkait kurang patuhan terhadap SOP. The Directors follow up the audit recommendation related SOP non-compliance.</p>	



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>c. Kepada Direksi agar melakukan <i>review</i> dan pemutakhiran SOP secara berkala, setidaknya setiap 3 tahun dilakukan <i>reviu</i> dan evaluasi. The Directors review and update SOP periodically, at least reviewed and evaluated once in 3 years.</p>	<p>1. Pembaruan, pengembangan dan evaluasi SOP secara berkala sudah dilakukan. Regular SOP update, development and evaluation have been carried out.</p> <p>2. Telah dilakukan pembaharuan pembaharuan SOP di Perbendaharaan yaitu SK Direksi Nomor 07.04/02/SK/HKO.01/2017 Tentang SOP Pengelolaan Sumber Dana dan Keuangan PT PELNI (Persero) dan SK Direksi Nomor 05.02/01/SK/HKO.01/2017 Tentang SOP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PELNI (Persero). An updated SOP in the Treasury has been carried out, namely Directors Decree Number 07.04/02/SK/HKO.01/2017 Concerning the SOP on Financial and Financial Source Management of PT PELNI (Persero) and Directors Decree Number 05.02/01/SK/HKO.01/2017 on the SOP of PT PELNI (Persero) Partnership and Community Development Program.</p>
		<p>d. Kepada Direksi agar menyempurnakan mekanisme pengambilan keputusan Direksi belum memuat pengaturan mengenai standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dan standar waktu kesegeraan untuk mengomunikasikan keputusan Direksi kepada tingkatan organisasi dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut. The Directors improve the decision-making mechanism of the Board of Directors and in time standard to communicate the Directors' decision with the relevant organization under the Board of Directors related to the decision.</p>	<p>Dalam proses <i>review</i> pedoman <i>soft structure</i> 2018. Soft structure guidelines 2018 In review process.</p>
3	<p>Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan. The Board of Directors play a role in fulfilling the Company's performance target.</p>	<p>a. Kepada Direksi agar melakukan sosialisasi RJPP kepada seluruh karyawan. The Directors socialize the long-term plan of the Company to the entire employees</p>	<p>Belum dilaksanakan karena RJPP belum disahkan secara tertulis oleh Kementerian BUMN. Has not been implemented yet because the long-term plan of the Company not authorized yet by the Ministry of State-owned Enterprises.</p>
		<p>b. Kepada Direksi agar menyampaikan rencana promosi dan mutasi jabatan satu level di bawah Direksi belum seluruhnya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan dari Dewan Komisaris. The Board of Directors state the promotion and mutation plan at one level under the Board of Directors that has not been entirely presented to the Board of Commissioners for the advices.</p>	<p>Mengacu kepada Board manual dituangkan bahwa yang membutuhkan perijinan Dewan Komisaris adalah Kepala Satuan Internal dan Kepala Kesekretariatan Perusahaan dan hal ini sudah dilakukan. Referring to the Board Manual as stated that needs the Board of Commissioners permission i.e Internal Head Unit and corporate secretariat and all of these have been implemented.</p>
		<p>c. Kepada Direksi agar menyusun mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/ anggota Direksi/Dewan Komisaris. The Directors arrange the Board of Directors' mechanism for responding the business opportunities proposal from management under the Board of Directors/ Director Members/ the Board of Commissioners The Directors arrange the Board of Directors' mechanism for responding the business opportunities proposal from management under the Board of Directors/ Director Members/ the Board of Commissioners.</p>	<p>Masih dalam proses evaluasi dan pembahasan. In evaluation and discussion process.</p>



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>d. Kepada Direksi agar menyusun ketentuan/kebijakan bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan.</p> <p>The Directors prepare the regulation and the policy for the Directors to discuss the latest issues relating to the changes in the business environment and the critical problems that will impact the business and performance of the Company.</p>	Masih dalam proses evaluasi dan pembahasan. In evaluation and discussion process.
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan. The Board of Directors have a role in completing the performance target of the Company.	<p>a. Kepada Direksi agar melakukan pemutalhiran untuk standar penilaian individu dan kelompok yang terintegrasi dengan target kinerja perusahaan.</p> <p>The Directors update the assessment standard for an Individual and organization that integrated with the performance target of the Company.</p> <p>b. Kepada Direksi agar menindaklanjuti setiap unit yang belum mencapai target KPI kelompoknya/unitnya.</p> <p>The Directors are recommended to follow up each unit that has not reached Key Performance Indicator target of the group/unit.</p> <p>c. Kepada Direksi agar sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer.</p> <p>The Directors are recommended to digitize the measurement system through computer application.</p>	<p>1. Sejak tahun 2013, metode <i>balanced scorecard</i> diterapkan untuk menilai kinerja dari setiap unit kerja (kelompok). Since 2013, <i>balanced scorecard</i> has been implemented to measure the performance of each unit (organization).</p> <p>2. Sasaran strategis dan parameter pada setiap unit kerja (kelompok) termasuk sistem penilaiannya telah selaras dengan target kinerja perusahaan yang tertera pada dokumen RKAP. Strategic and parameter objective in each work unit (organization) including assessment system has aligned with the Company's performance target that stated in the Company's work and budget plan document.</p> <p>3. Namun, standar penilaian individu belum terintegrasi dengan target kinerja perusahaan secara jelas (update informasi ke Divisi SDM). However, individual assessment standard has not been integrated yet obviously with the Company's performance target (updating the information to Human Resources Division).</p> <p>1. Dimulai sejak awal tahun 2018, PT PELNI (Persero) telah menggunakan <i>web-based performance dashboard</i> untuk mengelola kinerja Perusahaan. From the beginning of 2018, PT PELNI (Persero) has used a web-based performance dashboard to manage the Company's performance.</p> <p>2. QPR Metrics merupakan aplikasi yang menyajikan status kinerja (<i>dashboard</i>), baik capaian indikator kinerja dan realisasi program kerja, dari level korporat sampai dengan level divisi. QPR Metrics is an application that presents performance status (<i>dashboard</i>), both performance indicator and work program realization, from corporate level to division level.</p> <p>1. Setiap bulan dilaksanakan pertemuan guna membahas kinerja direktorat (capaian indikator kinerja dan realisasi program kerja) dengan Direksi dan pimpinan Divisi beserta jajarannya. Every month The meeting is held to discuss the performance of the directorate (indicators achievement and realization of work programs) with Directors and Division leaders with their staff.</p> <p>2. Namun, belum ada parameter untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pertemuan dimaksud, sehingga belum diketahui apakah hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti oleh peserta pertemuan. However, there are no parameters to measure the effectiveness of the meeting, so it is not known yet whether the results of the meeting were followed up by meeting participants</p>



Pendahuluan

Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>d. Kepada Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan komisaris/Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja masing - masing Direktorat berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen sebagai kinerja masing - masing Direksi.</p> <p>The Directors are recommended to compile and submit to the Board of Commissioners / Supervisory Board regarding the performance of each Directorate based on the targets in the management contract as the performance of the Directors.</p>	<p>1. Setiap bulan dilaksanakan pertemuan guna membahas kinerja perusahaan (capaian finansial, operasional dan realisasi program kerja) oleh Dewan Komisaris dengan Direksi beserta jajarannya.</p> <p>The meeting is held to discuss the company's performance (financial performance, operational and work program realization) by the Board of Commissioners with the Directors and their staff in every month.</p> <p>2. Namun, belum ada parameter untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pertemuan dimaksud, sehingga belum diketahui apakah hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti oleh peserta pertemuan.</p> <p>However, there are no parameters to measure the effectiveness of the meeting, so it is not known yet whether the results of the meeting were followed up by meeting participants.</p>
		<p>e. Kepada Direksi agar Kebijakan pengadaan barang dan jasa di-upload ke website sehingga dapat diakses oleh pemasok maupun calon pemasok.</p> <p>The Directors are recommended to upload the procurement policy in website so can be accessed by suppliers or competitive suppliers.</p>	<p>Informasi terkait Pengadaan yang akan di-upload pada website masih dalam bentuk draft.</p> <p>Information related the procurement that will be uploaded as a draft in the Company's website.</p>
		<p>f. Kepada Direksi agar merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan Perusahaan.</p> <p>The Directors are recommended to plan an optimum procurement based on the needs of the Company.</p>	<p>Instruksi Direktur SDM & Umum nomor:19.17/01/INS/HKO.03/2018 tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2018 yang ditujukan kepada Yth Kepala SPI, Kepala DPA/SMK3, VP, Manager & SPV Kantor Pusat. Rencanan Umum Pengadaan Tahun 2019 disampaikan paling lama 30 November 2018.</p> <p>Director of HR & General Affairs Instruction number: 19.17/01/INS/HKO.03/2018 concerning 2018 General Procurement Plan (RUP) addressed to the Head of Internal Control Unit, Head of DPA / SMK3, VP, Manager & SPV Head Office. In 2019, General Procurement Plan is submitted no later than November 30, 2018.</p>
		<p>g. Kepada Direksi agar menginstruksikan kepada divisi pengadaan untuk mengikuti kebijakan/prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.</p> <p>The Directors are recommended to direct the procurement division to follow the service policy/procedure that has been stated by the Company.</p>	<p>Sosialisasi Pengadaan melalui LPSE oleh LKPP akan dilaksanakan pada Nopember 2018 Direktur SDM & Umum telah memberikan persetujuan terhadap Nota Dinas VP Pengadaan Nomor :10.24/03/ND-B/045/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa PT PELNI (Persero). Rencananya kegiatan ini akan dihadiri Oleh Direksi PT PELNI (Persero), Direksi Anak Perusahaan, VP & Manager Kantor Pusat serta Rekanan/Mitra PT PELNI (Persero).</p> <p>Procurement Dissemination through electronic procurement services by LKPP will be held in November 2018 The Director of Human Resources & General Affairs has given an approval to VP Memorandum Number: 10.24/03/ND-B/045/2018 dated October 24, 2018 concerning PT PELNI (Persero) Procurement of Goods/Services Socialization) It is planned that this activity will be attended by the Directors of PT PELNI (Persero), Directors of Subsidiaries, VP & Head Office Managers and Partners/PT PELNI (Persero) Partners.</p> <p>Namun untuk tahun 2018 belum terlaksana sosialisasi, karena hingga akhir tahun belum ada waktu yang tepat antara PT PELNI (Persero) dan KPK.</p> <p>In 2018 was not conducted an socialization because time cases between PT PELNI (Persero) and Corruption Eradication Commission.</p>



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>h. Kepada Direksi agar mempercepat penyelesaian SK pengembangan pegawai kemudian segera disahkan oleh pejabat terkait. The Directors are recommended to the letter of decree completion related the employee development and authorized by relevant official.</p>	
		<p>i. Kepada Direksi agar melakukan perhitungan <i>return of training investment</i> dari pelaksanaan program pengembangan berhasil yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator keberhasilan (ada evaluasi dan kriteria keberhasilannya). The Directors are recommended to calculate the return of training investment from the implementation of successful development programs as indicated by the achievement of the target indicators (there are evaluations and criteria for its success)</p>	<p>1. Evaluasi pelatihan saat ini masih dalam tahapan evaluasi pelaksanaan pelatihan terkait tempat pelaksanaan dan pemberi materi. Training evaluation is still in the discussion stage related the place and the material presenters.</p> <p>2. Pelatihan dilaksanakan diprogramkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing divisi. The training conducted based on the needs of each division.</p> <p>3. Evaluasi perilaku masih dalam proses perumusan. Behavior evaluation still in the formulation process.</p>
		<p>j. Kepada Direksi agar mempercepat penyelesaian pemutakhiran kebijakan reward dan punishment yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The Directors are recommended to accelerate the updating reward and punishment regulation in accordance the applicable regulations.</p>	<p>1. Salah satu aturan <i>reward</i> yang sudah dituangkan dalam ND Nomor : 09.27/040/2018 tentang Kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap. One of reward regulation that mentioned in ND Number: 09.27/040/2018 regarding the rise of the salary and fixed allowances.</p> <p>2. Untuk pemberian punishment SK masih dalam pembahasan. For the punishment, the letter of decree still in discussion progress.</p>
5	<p>Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Directors control the operational and the financial on the implementation of the Company's policy and strategy.</p>	<p>a. Kepada Direksi agar melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal untuk tingkat entitas, sehingga perusahaan menerbitkan <i>internal control report</i> yang menyatakan efektivitas <i>internal control</i> diperusahaan. The Directors are recommended to evaluate the Internal Control Unit effectiveness for the entity level, so the Company issued internal control report that states internal control effectiveness of the Company.</p>	
		<p>b. Kepada Dir eksi agar menginstruksikan kepada <i>Head of internal Audit</i> untuk memantau setiap tindak lanjut hasil pemeriksaan baik oleh SPI maupun auditor eksternal (KAP dan BPK). The Directors are recommended to instruct a Head of Internal Audit unit to monitor every follow-up assessment result by Internal Control Unit or External Auditor (Public Accountant office and Financial Service Authority).</p>	<p>Sudah dilakukan <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada masing-masing PIC setiap triwulan dan sudah di laporkan kepada Komite Audit setiap triwulan. Has been conducted the follow-up monitoring of PIC assessment result and has been reported to Audit Committee quarterly.</p>
6	<p>Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i>. The Directors has relation that gives added values for the Company and Stakeholders.</p>	<p>a. Kepada Direksi agar menyusun rencana tindak lanjut hasil <i>survey</i> kepuasan pelanggan dan memantau progres pelaksanaannya. The Directors are recommended to plan the follow-up results of costumer satisfaction survey and monitor its implementation progress.</p>	<p>Melakukan rapat koordinasi kepada unit terkait untuk menindaklanjuti hasil <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan Tahun 2017. Organizing the coordinaton meeting with the relevant unit to follow up the result of costumer satisfaction survey in 2017.</p>
		<p>b. Kepada Direksi agar melakukan <i>Assessment</i> pemasok secara berkala berdasarkan QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>). The Directors are recommended to assess the Vendors periodically based on QCDS (quality, cost, delivery, service).</p>	<p>Untuk <i>spare part</i> sudah dilakukan penilaian berdasarkan QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>). Setiap tahun ada penilaian kinerja <i>vendor</i>. Has assessed spare part based on QCDS (quality, cost, delivery, service) in each year for Vendor performance assessment.</p>



Pendahuluan

Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>c. Kepada Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengenai perlindungan hal dan kepentingan kreditur sesuai perjanjian, pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman, <i>covenant</i> yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur.</p> <p>The Directors are recommended to arrange and determine the policies concerning the protection of creditors interest in accordance with the agreement, information disclosure in a transparently, accurately and timely manner, both at the time request and the use of loan, and the covenant that is a guarantee of the company to do or not do something to protect the creditor interests.</p>	<p>Unit Pengelolaan Dana dan Investasi belum menyusun dan menetapkan Kebijakan perlindungan kreditur dalam suatu SK Direksi, namun terkait perlindungan hal dan kepentingan kreditur sudah diatur dalam SPPK dan/atau PK dimana PT PELNI (Persero) telah mengirimkan data dan laporan secara transparan, akurat dan tepat waktu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kreditur. Selain itu, PT PELNI (Persero) memberikan jaminan hak tanggung kepada kreditur sebagai salah satu bentuk perlindungan kreditur, meskipun kreditur sudah mengetahui rencana penerimaan PSO dan Subsidi dari Pemerintah.</p> <p>The Fund and Investment Management Unit has not compiled and established a creditor protection policy in the letter of Directors' Decree, but the protection of creditor interests has been regulated in loan agreement letter and / or credit agreement where PT PELNI (Persero) has sent data and reports transparently, accurately and timely in accordance with the conditions specified by the creditor. In addition, PT PELNI (Persero) guarantees the rights of responsibility to creditors as a form of creditor protection, even though the creditor already known the plan for receiving PSO and subsidies from the Government.</p>
		<p>d. Kepada Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukkan dan pelunasannya.</p> <p>The Directors are recommended to arrange and determine the policies relating the use of long-term loan in accordance to the purpose and its repayment.</p>	<p>Masih dalam proses dibuatkan kebijakannya.</p> <p>In making the policy process.</p>
		<p>e. Kepada Direksi agar menginstruksikan bagian keuangan agar melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>The Directors are recommended to instruct the financial department to pay tax obligations carried out in accordance with the provisions.</p>	<p>Sudah tertuang pada SK Direksi Nomor 07.04/02/SK/HKO.01/2017 Tentang SOP Pengelolaan Sumber Dana dan Keuangan PT PELNI (Persero), dimana PPh 21, 22 23, 4 ayat 2, 25, 26 harus dibayar sebelum tgl 10 bulan berikutnya, PPN WAPU sebelum tgl 15 bulan berikutnya, PPN PKP sebelum akhir bulan, sedangkan PPh Badan sebelum tgl 30 April tahun berikutnya</p> <p>As stated in the Letter of Directors' Decree Number: 07.04/02/SK/HKO.01/2017 regarding SOP for fund sources and finance management of PT PELNI (Persero), where income tax of 21, 22, 23, 4 paragraph 2, 25, 26 must be paid before 10 date of the next month, VAT Collector before 15 date of the next month, Taxable Entrepreneur for VAT Purposes before the end of the month, and independent income tax before April 30 in the next year.</p>
		<p>f. Kepada Direksi agar mengatur kebijakan terkait hal-hal apa saja yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya.</p> <p>the policy related the things that must be communicated to the employees and the type of the policies involving the employees in formulation.</p>	<p>1. Penyusunan kebijakan yang melibatkan karyawan adalah penyusunan PKB melalui rapat Bipartit dan tim penyusun PKB.</p> <p>The policy formulation involving the employees is the preparation of collective labor agreement through Bipartite meetings and the collective labor agreement drafting team.</p> <p>2. Tahun 2018 ada ketentuan peraturan jam kerja, dalam penetapannya sudah di komunikasikan kepada seluruh pegawai dengan menyebar poling jam kerja.</p> <p>In 2018, there is the provision of working hour regulations. It has been communicated to all employees with the spread of working hours polling.</p>



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>g. Kepada Direksi agar menyusun laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil survei kepuasan pegawai, sehingga dapat diketahui progres dari TL yang telah dilakukan oleh perusahaan. The Directors are recommended to prepare the result report of the employee satisfaction survey, so can be discovered the TL progress conducted by the Company.</p>	<p>Laporan hal-hal yang ditindaklanjuti sudah disusun tetapi belum disebarkan ke masing-masing divisi. The followed-up reports have been arranged but have not been given to each division.</p> <p>Untuk tindak lanjut yang dilakukan adalah hal-hal yang terkait dengan SDM. For the follow-up material conducted is the material things related Human Resources.</p>
		<p>h. Kepada Direksi agar mengupayakan penurunan tunggakan program kemitraan. The Directors are recommended to depress the arrears of partnership program.</p>	<p>Unit PKBL telah melakukan beberapa kegiatan dengan tujuan penurunan tunggakan Program Kemitraan maupun pencegahan piutang macet yaitu :</p> <p>The partnership and community development unit conducted some activities with the aims to reduce the arrears of partnership program and to prevent bad debts, among others:</p> <p>a. Melakukan <i>monitoring</i> dan penagihan secara berkala. Periodically monitoring and billing.</p> <p>b. Membentuk <i>cluster</i> mitra binaan untuk memudahkan <i>monitoring</i> dan pencegahan piutang macet. Grouping the partners to ease monitoring and managing the bad debt.</p> <p>c. Bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan Program Kemitraan dimulai dari penjaringan mitra binaan sampai dengan membantu melakukan penagihan. Cooperating with the Ministry of Marine and Fisheries in conducting partnership program started from filtering the partners and helping to collect the bill.</p>
7		<p>a. Kepada Direksi agar menyempurnakan substansi tata tertib rapat Direksi. The Directors are recommended to complete substantial code of conduct of the Board Directors' meeting.</p>	<p>Belum terlaksana Not implemented</p>
		<p>b. Kepada Direksi agar menyusun kebijakan terkait pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. The Directors are recommended to arrange the policy related follow-up evaluation of the previous meeting result</p>	<p>Belum terlaksana Not implemented</p>
		<p>c. Kepada Direksi agar menyusun kebijakan terkait pembahasan tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait usulan Direksi. The Directors are recommended to formulate the policy regarding the follow-up discussion of the Board of Commissioners decision related the Directors' recommendation.</p>	<p>Belum terlaksana Not implemented</p>
		<p>d. Kepada Direksi agar menyusun dan melengkapi agenda rapat dalam rencana jadwal rapat Direksi. The Directors are recommended to prepare and complete the meetings agenda in the Board of Directors' meeting.</p>	<p>Belum terlaksana Not implemented</p>



Pendahuluan

Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>e. Kepada Direksi agar menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk memuat didalam risalah rapat secara eksplisit mengenai pembahasan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai.</p> <p>The Directors instruct a Corporate Secretary to enclose the minutes of meetings explicitly regarding an evaluation on the implementation of the previous meeting decision that was unfinished.</p>	Belum terlaksana Not implemented
8	<p>Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.</p> <p>The Directors realize the effective and accountable function of Corporate Secretary.</p>	<p>a. Kepada Direksi agar Sekretaris Perusahaan membuat secara tersendiri laporan pelaksanaan tugasnya yang menyampaikan secara berkala (triwulan dan tahunan kepada Direktur Utama).</p> <p>A Corporate Secretary makes its implementation report separately that submitted periodically (quarterly and annually) to President Director.</p>	Sudah ada pelaporan kinerja sekretaris perusahaan kepada Direktur Utama dengan nomor surat : 10.22/03/ND-B/093/2018 perihal laporan kinerja Kesekretariatan Perusahaan pada tanggal 22 Oktober 2018. <p>There was Corporate Secretary reporting to President Director with the letter number: 10.22/03/ND-B/093/2018 regarding Corporate Secretariat Performance report on October 22, 2018.</p>
		<p>b. Kepada Direksi agar risalah rapat Direksi memuat atau mencantumkan secara eksplisit evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.</p> <p>The minutes of the Directors meeting contain and enclose an evaluation on the implementation of the previous meeting decision explicitly.</p>	Belum terlaksana Not implemented
Aspek III Aspect III			
1	<p>Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.</p> <p>New member of the Board of Commissioners attends an Introducing program held by the Company</p>	<p>Melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru dengan mengacu pada <i>Board Manual</i> dan mendokumentasikan dokumen pendukungnya.</p> <p>Conducting the Introducing program for new member of the Board of Commissioners refers to Board Manual and documenting the supporting documents.</p>	<p>a. Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris buku Board Manual dll.</p> <p>The board manual and etc has submitted to the Board of Commissioners.</p> <p>b. Telah dilaksanakan kunjungan kapal sebagai salah satu program pengenalan Dewan Komisaris di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2018.</p> <p>Has visited the ship in Surabaya on October 03, 2018 as one of the introducing program of the Board of Commissioners.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinjauan KM Sinabung dan tatap muka dengan Anak Buah Kapal (ABK). MV Sinabung Check up, Meet and Greet with the crews. Tinjauan ke Galangan Surya. Surya Docking Check up. <p>c. Kunjungan lapangan Komut ke Kantor PT PELNI (Persero) Cabang Singapura.</p> <p>President Commissioner visited to PT PELNI (Persero) Branch Office in Singapore.</p>
2	<p>Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.</p> <p>The Board of Commissioners holds the training programs in order to improve the competency of the Board of Commissioners as needed.</p>	<p>a. Disarankan agar Dewan Komisaris melaksanakan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners is suggested to hold training for the members of Board of Commissioners which is suitable with the work plan of the Board of Commissioners.</p> <p>b. Disarankan agar Dewan Komisaris menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners is suggested to prepare the report about the training result organized by the Board of Commissioners.</p>	<p>a. Jakarta, 2 Agustus 2018 <i>Workshop Integrated Talent Management System</i> (Bp. Raldi Hendro Koestoer). Integrated Talent Management System (Mr. Raldi Hendro Koestoer) on Jakarta, August 02, 2018.</p> <p>b. Surakarta, 2 November 2018 <i>Outlook Economic 2019</i> (Bp. Danang Parikesit). Outlook Economic 2019 (Mr. Danang Parikesit) on Surakarta, November 02, 2018.</p>



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
3	<p>Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/ Pemilik Modal.</p> <p>The Board of Commissioners prepares the yearly work plan containing the objectives/target of the achievements and submit to GMS/Share owner writtenly.</p>	<p>a. Agar Dewan Komisaris menginstruksikan Sekdekom untuk mendokumentasikan kelengkapan RKA Dewan Komisaris dengan Anggarannya.</p> <p>The Board of Commissioners instructs the Secretary of the Board of Commissioners to document the work plan and budget completeness of the Board of Commissioners.</p> <p>b. Agar Dewan Komisaris melengkapi RKA Dewan Komisaris dengan KPI.</p> <p>The Board of Commissioners apply the work plan of the Board of Commissioners guided by the key performance Indicators (KPI).</p> <p>c. Agar Dewan Komisaris mengikutsertakan peran aktif Komite Dekom dalam penyusunan RKA Dekom.</p> <p>The Board of Commissioners engages the Committee of the Board of Commissioners in preparing the work plan of the Board of Commissioners.</p> <p>d. Agar Dekom dalam memberikan tanggapan atas RKAP mencantumkan kesimpulan mengenai keselarasan RKAP dengan RJPP.</p> <p>The Board of Commissioners responses the Company's budget plan and attaches the conclusion to ensure the suitability between the Company's budget plan and long-term plan.</p>	<p>a. RKA Dewan Komisaris 2019 sebagaimana terlampir.</p> <p>The work plan 2019 of the Board of Commissioners attached.</p> <p>b. KPI Dewan Komisaris 2019 sebagaimana terlampir.</p> <p>The Key Performance Indicators 2019 of the Board of Commissioners attached</p> <p>c. Dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris pada Tanggal 24 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Organ Dekom (Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko).</p> <p>Discussed in Internal Meeting of the Board of Commissioners on October 24, 2018 that attended by the Board of Commissioners and its supporting organ (Secretary and staff of the Board of Commissioners, Audit Committee and Risk Policy Committee).</p> <p>d. Berdasarkan Undangan Dewan Komisaris Nomor: 63/DK/X-2018 tanggal 22 Oktober 2018.</p> <p>Based on the Board of Commissioners' Internal Meeting invitation No: 63/DK/X-2018 dated October 22, 2018.</p>
4	<p>Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.</p> <p>The Board of Commissioners gives the direction on the essential things regarding the changes in business operations that expected to has a large impact on the business operation and performance of the Company relevantly and timely.</p>	<p>Agar Dekom memenuhi kewajibannya terkait penetapan kriteria informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners meets the policies related to the determination of business operation information and its problems, which impacts on the business and performance of the Company as a concern of the Board of Commissioners.</p>	<p>Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis di tahun 2018.</p> <p>There is no changes in business operations in 2018.</p>



Pendahuluan

Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
5	<p>Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.</p> <p>The Board of Commissioners gives the direction on the essential things regarding the changes in business operations that expected to have a large impact on the business operation and performance of the Company relevantly and timely.</p>	<p>a. Agar Dewan Komisaris menginstruksikan Sekdekom untuk mendokumentasikan kelengkapan penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan <i>stakeholders</i> kepada Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners instructs the secretary of the Board of Commissioners to submit the presentation completeness of suggestions, hopes and complaints of Stakeholders to the Directors.</p> <p>b. Agar Dewan Komisaris mengikutsertakan peran aktif Komite Dekom dalam pembahasan terkait saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i>.</p> <p>The Board of Commissioners engages the active roles of the Board of Commissioners in discussing the suggestions, hopes, problems and its complaints from the Stakeholders.</p>	<p>Melalui Nota Dinas Ketua Komite Audit kepada Komisaris Utama Nomor: 17/K.Audit/III-2018 tanggal 7 Maret 2018 Hal Hasil Kunjungan Kerja Komite-Komite ke Kantor PT PELNI (Persero) Cabang Kupang dan Kapal KM Willis, KM Sabuk Nusantara 69 pada tanggal 1-3 Maret 2018. Antara lain dinyatakan oleh ABK KM Willis bahwa:</p> <p>Through Official Note of Head of Audit Committee to President Commissioners No: 17/K.Audit/III-2018 dated March 07, 2018 on the official work visit of the Committees to Kupang Branch office of PT PELNI (Persero), MV Willis, MV Sabuk Nusantara 69 on March 01-03, 2018. Stated by the Crews of MV Willis that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABK yang menangani mesin hanya 1 Only 1 Crew engine • Rotasi ABK kurang jelas Unclear Crews work shifting • Nahkoda belum mendapatkan cuti Captain of ship do not receive annual leave yet • Muallim 3 PKL sudah 3 tahun belum diangkat menjadi pegawai organik 3 of Steering Crews did not appointed to be organic employees yet.
6	<p>Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian internal Perusahaan.</p> <p>The Board of Commissioners gives the direction on the strengthening of Internal Control System of the Company.</p>	<p>a. Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan sistem pengendalian intern dan mengingatkan Direksi untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan membuat internal <i>control report</i>, dan menyampaikan kepada Dekom untuk selanjutnya dilakukan telaah oleh Dekom.</p> <p>The Board of Commissioners reviews the policies on internal control system and reminds the Directors to evaluate the effectiveness of internal control system in the level of entity and make internal control report and submit it to the Board of Commissioners for further evaluation.</p> <p>b. Agar Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaah atas tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners states the results of review on the effectiveness improvement of Internal Control System to the Directors.</p>	<p>Melalui surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor: 31/DK/V-2018 tanggal 31 Mei 2018 Hal Efektivitas Peran SPI.</p> <p>Through the letter of the Board of Commissioners to President Director Number: 31/DK/V-2018 dated May 31, 2018 regarding the effectiveness of Internal Control Unit Roles.</p>
7	<p>Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian internal Perusahaan.</p> <p>The Board of Commissioners gives the direction on the strengthening of Internal Control System of the Company.</p>	<p>a. Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan manajemen risiko dan seluruh aspek penerapan manajemen risiko perusahaan, termasuk analisis risiko atas rancangan RKAP, serta meningkatkan lagi peran aktif Komite Kebijakan Risiko</p> <p>The Board of Commissioners reviews the policies of risk management and the entire implementation aspects of risk management of the Company, including risk analysis on the preparation of the Company's budget plan, and increasing the active role of Risk Policy Committee.</p> <p>b. Agar Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaah atas kebijakan manajemen risiko kepada Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners submits the results of review on the policies of risk management to the Directors.</p>	<p>Melalui surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor: 30/DK/V-2018 tanggal 31 Mei 2018 Hal Tindak Lanjut Pengelolaan Risiko.</p> <p>Through the letter of the Board of Commissioners to President Directors Number: 30/DK/V-2018 dated May 31, 2018 on the follow-up implementation of risk management.</p>



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
8	<p>Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.</p> <p>The Board of Commissioners oversees and gives advises on the policies and implementation of information technology system.</p>	<p>Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan teknologi informasi dan meningkatkan lagi peran aktif Komite Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners reviews the policies of information technology and increases the active role of the Board of Commissioners' supporting committee.</p>	<p>a. Melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur SDM dan Umum tanggal 4 September 2018 yang antara lain membahas tata kelola IT dalam implementasi admin kapal.</p> <p>Through joint meeting between the Board of Commissioners, Director of HR and General Affairs dated September 04, 2018 which contains the discussion on IT Governance in the implementation of ship administration.</p> <p>b. Melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 1 Agustus 2018 yang antara lain disampaikan bahwa IT merupakan bagian penting dalam upaya pembenahan dan transformasi perusahaan, untuk itu perlu dijabarkan bagaimana rencana implementasi IT dalam akselerasi proses bisnis pada 6 bulan ke depan.</p> <p>Through joint meeting between the Board of Commissioners and Directors dated August 01, 2018 which includes the important roles of IT as an effort for the improvement and transformation of the Company, For this reason, needs to be elaborated how the implementation plan of IT in accelerating the business process for 6 month forward.</p>
9	<p>Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.</p> <p>The Board of Commissioners oversees and gives advises on the succession of management policies and its implementation.</p>	<p>Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan manajemen karir dan rencana suksesi serta meningkatkan lagi peran aktif Komite Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners reviews the policies of career development and the secession plans - and increase the active role of the Board of Commissioners' Committee.</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara assessor dengan Dewan Komisaris, suksesi manajemen 1 level di bawah Direksi merupakan kewenangan Direksi, namun ke depan Direksi dapat melaporkan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan dan pelaksanaan suksesi manajemen.</p> <p>Based on assessor interview results with the Board of Commissioners, the succession management of 1 level under the Directors is an authority of the Directors, but the Directors are able to submit the report to the Board of Commissioners regarding the policies and implementation of succession management.</p>
10	<p>Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</p> <p>The Board of Commissioners discusses the policies and its implementation of Procurement.</p>	<p>a. Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan lagi peran aktif Komite Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners conducts an overviews on the policies of procurement and increases an active role of the Board of Commissioners' Committee</p> <p>b. Agar Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa kepada Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners presents the results of review on the policies of procurement to the Directors.</p>	<p>Melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur Armada dan Direktur SDM dan Umum tanggal 8 Agustus 2018 yang antara lain: Pengadaan suku cadang sudah ada gambaran yang jelas dan anggaran sudah tersedia, sehingga tinggal menunggu negosiasi lebih lanjut, cepat direalisasikan karena dari tahun 2016 mengalami kegagalan untuk pengadaan suku cadang (MaK).</p> <p>Through Joint meeting between Fleet Director and Director of Human Resources and General Affairs dated August 08, 2018, among others: the clear procurement flows of sparepart and available budget, which is only preparing for further negotiation and is realized quickly, because of experiencing the failed procurement of spareparts</p>



Pendahuluan

Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
11	Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. The Board of Commissioners performs an overview on the policies of quality and service - and its implementation.	Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan dan meningkatkan lagi peran aktif Komite Dewan Komisaris. The Board of Commissioners reviews the policies of quality and service - and improves an active role of the Board of Commissioners' Committee.	Melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur Armada dan Direktur SDM dan Umum tanggal 8 Agustus 2018, yaitu pada: Through Joint meeting between Fleet Director and Director of Human Resources and General Affairs dated August 08, 2018, on: a. Pertanyaan Pak Raldi "memperhatikan gambaran risiko yang memprihatinkan (d.h.i. keselamatan kapal), dan kuncinya ada pada pengadaan suku cadang yang sejak tahun 2016 belum terlaksana, kapan pengadaan suku cadang dapat segera dilakukan?" dan dilanjutkan dengan; The question from Mr. Raldi "to pay attention to the views of apprehensive risks (d.h.i. of ship safety), and the answer is on the procurement of spareparts process that has not been managed yet since 2016, when the procurement of spare parts could be conducted?" and continued by; b. Arahan Pak Widodo "Pengadaan suku cadang sudah ada gambaran yang jelas dan anggaran sudah tersedia, sehingga tinggal menunggu negosiasi lebih lanjut, cepat direalisasikan karena dari tahun 2016 mengalami kegagalan untuk pengadaan suku cadang (MaK)". The Direction from Mr. Widodo "the procurement of spare parts was clearly planed and avaidability budgeted, so there has been only waiting negotiation process and has been realized due to not realized yet since 2016 for the procurement of spare parts.
12	Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. The Board of Commissioner oversees and monitors the obedience of the Directors in meeting the applicable laws and regulations - and the agreement with the third party.	a. Agar Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kepatuhan Direksi mencakup seluruh aspek hukum meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan perjanjian dengan pihak ketiga, mendokumentasikan hasil telaah tersebut, dan lebih meningkatkan lagi peran aktif Komite Dekom. The Board of Commissioners reviews the obedience of the Directors meeting the entire aspects of law, among others; the laws and regulations, the article of association and agreement with the third party, notes the results of that review and increases an active role of the Board of Commissioners' Committee. b. Agar Dewan Komisaris lebih meningkatkan lagi perannya dalam memberikan arahan kepada Direksi terkait kepatuhan Direksi terhadap ketentuan yang berlaku, anggaran dasar, dan perjanjian dengan pihak ketiga. The Board of Commissioners improve their positive role in providing the directions to the Directors related to the obedience of the Directors in the applicable regulation, article of association, and the agreement with third party.	a. Di setiap persetujuan Dewan Komisaris atas aksi korporasi Direksi, selalu disampaikan arahan Dekom agar Direksi selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, anggaran dasar dan perjanjian pihak ketiga In every approval of the Board of Commissioners on the Directors' corporate action, is always mentioned the direction of the Board of Commissioners in order to the Directors' meet the applicable regulations, the article of association and the agreement with third party. b. Di setiap persetujuan Dewan Komisaris atas aksi korporasi Direksi, selalu disampaikan arahan Dekom agar Direksi selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, anggaran dasar dan perjanjian pihak ketiga In every approval of the Board of Commissioners on the Directors' corporate action, is always mentioned the direction of the Board of Commissioners in order to the Directors' meet the applicable regulations, the article of association and the agreement with third party



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
		<p>c. Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan terkait kesesuaiannya dengan RJPP dan mendokumentasikannya The Board of Commissioners conducts the review on the obedience of the Directors in managing the Company related to the suitable with the Company's long-term plan and write it off.</p> <p>d. Agar Dekom meningkatkan lagi peran aktif Komite Dekom dalam mendukung tugas Dekom melakukan telaah atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan perjanjian dengan pihak ketiga The Board of Commissioners a positive performance of the Board of Commissioners' Committee to support the duties in conducting the review on the obedience of the Directors in meeting the laws and Regulations, the article of associations, and the agreement with third party.</p>	
13	<p>Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS. There is the authority or recommendation of the Board of Commissioners for the transaction and action of the Board of Director in the scope of the authority of the Board of Commissioners and the GMS.</p>	<p>Agar Dekom meningkatkan lagi peran aktif Komite Dekom dalam pemberian persetujuan Dekom atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS. The Board of Commissioners increase the positive role of the Board of Commissioners' Committee to give the approval of the Board of Commissioners regarding the transaction or action in the scope of the authority of the Board of Commissioners and the GMS.</p>	<p>Di setiap persetujuan Dewan Komisaris atas aksi korporasi Direksi, selalu disampaikan arahan Dekom agar Direksi selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, anggaran dasar dan perjanjian pihak ketiga. In every approval of the Board of Commissioners regarding the Directors' corporate action, is always mentioned the direction from the Board of Commissioners in order to meet the prevailing regulations, the articles of association and the agreement with third party.</p>
14	<p>Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners ensures the external and internal audit performing effectively and reviews the complaints related to State-owned Enterprises accepted by the Board of Commissioners.</p>	<p>a. agar Dekom lebih meningkatkan lagi peran aktif Komite Audit dalam mendukung peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal dan mendokumentasikannya. The Board of Commissioners increase the positive role of Audit Committee in supporting the improving effectiveness of Internal and External Audit and write it down on the minutes.</p> <p>b. Agar Dewan Komisaris mendokumentasikan penyampaian hasil telaah atas efektivitas audit internal dan audit eksternal kepada Direksi. The Board of Commissioners submits the results of the review on the effectiveness of Internal and External Audit to the Directors</p>	<p>Baru dilakukan untuk efektivitas audit internal, yaitu melalui surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor: 31/DK/V-2018 tanggal 31 Mei 2018 Hal Efektivitas Peran SPI. Only done for the effectiveness of internal audits, through a letter of the Board of Commissioners to President Director Number: 31 / DK / V-2018 dated 31 May 2018 on Effectiveness of the Role of the Internal Audit Unit.</p>
15	<p>Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners conducts discussions on the policy of managing a subsidiary/joint venture company and its implementation.</p>	<p>Agar Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kesesuaian pengelolaan dan kinerja anak perusahaan dikaitkan dengan visi pengembangan usaha PT PELNI (Persero), mendokumentasikan seluruh proses evaluasi atas pengelolaan anak perusahaan, dan meningkatkan peran aktif Komite Dekom. The Board of Commissioners evaluates the suitability of the management and performance of subsidiaries associated with the vision of PT PELNI (Persero)'s business development, documenting the entire evaluation process for the management of subsidiaries, and increasing the active role of its Committee.</p>	<p>Melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi RS PELNI tanggal 14 September 2018. Through the Board of Commissioners' Meeting with the Directors of PELNI Hospital on September 14, 2018.</p>



Pendahuluan

Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan. The Board of Commissioners/ Supervisory Board proposes prospective members of the Board of Directors to Shareholders / Capital Owners according to the policies and selection criteria.	Agar Dekom memenuhi kewajiban penyusunan kriteria calon Direksi dan membakukannya The Board of Commissioners fulfills the obligation to prepare criteria for prospective Directors and standardizing them.	Melalui persetujuan Dewan Komisaris Nomor: 06/DK/I-2018 tanggal 24 Januari 2018 Hal Calon Direksi PT PIDC. Through the approval of the Board of Commissioners Number: 06/DK/I-2018 dated 24 January 2018 Hal Prospective Directors of PT PIDC.
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. The Board of Commissioners/ Supervisory Board proposes prospective members of the Board of Directors to Shareholders / Capital Owners according to the policies and selection criteria.	Agar Dekom menyusun kriteria baku penilaian kinerja individu Direksi dan melakukan penilaian secara berkala dan melakukan penilaian atas capaian KPI kontrak manajemen serta menyampaikannya dalam laporan tugas pengawasan Dekom The Board of Commissioners prepares the standard criteria for evaluating individual Directors' performance and conducts regular assessments and evaluates the achievements of KPIs in management contracts and submits them in the report of the oversight duties of the Board of Commissioners.	Melalui persetujuan Dewan Komisaris Nomor: 06/DK/I-2018 tanggal 24 Januari 2018 Hal Calon Direksi PT PIDC. Through the approval of the Board of Commissioners Number: 06/DK/I-2018 dated 24 January 2018 Hal Prospective Directors of PT PIDC.
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. The Board of Commissioners / Supervisory Board proposes the remuneration of the Board of Directors in accordance with the applicable provisions and the performance evaluation of the Directors.	Agar Dekom menginstruksikan Sekdekom untuk mendokumentasikan proses pembahasan pengusulan remunerasi Direksi. The Board of Commissioners instructs the secretary of the Board of Commissioners to document the process of discussing the proposed remuneration for the Board of Directors.	Melalui surat Dewan Komisaris kepada pemegang saham Nomor: 27/DK/V-2018 tanggal 7 Mei 2018 Hal Tanggapan Dewan Komisaris Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT PELNI (Persero). Through a letter from the Board of Commissioners to shareholders Number: 27 / DK / V-2018 dated 7 May 2018 on Response from the Board of Commissioners for the Annual Report of PT PELNI (Persero) Financial Year 2017.
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The Board of Commissioners / Supervisory Board ensures that the principles of Good Corporate Governance have been implemented effectively and sustainably.	<p>a. Agar Dekom melakukan dan mendokumentasikan telaah atas hasil <i>assessment</i> GCG tahun 2016 dan muatan GCG yang diungkap dalam <i>Annual Report</i>, dengan mengikutsertakan peran aktif Komite Dekom serta menyampaikan hasil telaahnya kepada Direksi. The Board of Commissioners conducts and documents the review of the 2016 GCG assessment results and GCG contents revealed in the Annual Report, including; the active role of the Board of Commissioners and submitting the results of their review to the Board of Directors.</p> <p>b. Agar Dekom menindaklanjuti <i>areas of improvement</i> yang menjadi kewajibannya dan melakukan pemantauan atas progressnya secara terstruktur. The Board of Commissioners follows up on the areas of improvement which are their obligations and monitor the progress in a structured manner.</p>	<p>a. Melalui arahan Dekom dalam setiap persetujuan atas aksi korporasi disampaikan supaya mematuhi tata kelola perusahaan yang baik. Through the decree's directives of the Board of Commissioners, in every agreement on corporate action, it is conveyed in order to comply with good corporate governance.</p> <p>b. Melalui Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor: 62/DK/X-2018 tanggal 17 Oktober 2018 Hal Permintaan dokumen untuk tindak lanjut rekomendasi hasil GCG tahun 2017. Through a Letter of the Board of Commissioners to the President Director Number: 62 / DK / X-2018 dated October 17, 2018 regarding Request for documents for follow-up recommendations for GCG results in 2017</p>



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The Board of Commissioners / Supervisory Board measures and evaluates the performance of the Board of Commissioners / Supervisory Board.	<p>a. Agar Dekom melengkapi (mungkin sudah dibuat) RKA Dekom dengan anggaran, dan KPI beserta targetnya. The Board of Commissioners completes (maybe already made) the works and budget plan of the Board of Commissioners with the budget, and KPI and its targets.</p> <p>b. Agar Dekom melakukan penilaian terhadap capaian kinerja masing-masing anggota Dekom dan mendokumentasikannya. The Board of Commissioners evaluates the performance achievements of each member of the Board of Commissioners and writes it down on the minutes.</p> <p>c. Agar Dekom melakukan penilaian capaian KPI dan menuangkannya dalam laporan tugas pengawasan. The Board of Commissioners evaluates KPI's achievements and puts them in the supervisory task report.</p>	<p>a. Rencana Kerja, Anggaran dan KPI Dewan Komisaris beserta targetnya telah dimasukkan dalam RKA Dewan Komisaris dan dikompilasi dalam RKAP PT PELNI (Persero) Tahun 2018. The Work and Budget plan - and KPI and their targets have been included in the Board of Commissioners' work and budget plan compiled in the Company's budget plan of PT PELNI (Persero) in 2018</p> <p>b. Penilaian capaian kinerja anggota Dewan Komisaris tahun 2017 telah dilakukan. The evaluation of the performance of members of the Board of Commissioners in 2017 has been carried out.</p> <p>c. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor: 26/DK/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) selama Tahun Buku 2017. The supervisory report of the Board of Commissioners is submitted to the Minister of BUMN through letter Number: 26 / DK / V / 2018 dated 7 May 2018 regarding the Report of the Supervisory Commission of PT PELNI (Persero) during the 2017 Financial Year</p>
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai. The Board of Commissioners / Supervisory Board has adequate guidelines / rules of the Board of Commissioners / Supervisory Meeting.	Agar Dekom melakukan reviu secara tertulis atas Tata tertib Dekom ditetapkan berdasarkan SK No. 57/DK-VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang tata tertib Dekom. The Board of Commissioners conducts a written review of the Decree of Regulations stipulated by decree No. 57/ DK-VII/2010 dated July 29, 2010 concerning the Code of Conduct of The Board of Commissioners	Telah ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: Kep-01/DK/I-2016 tanggal 13 Januari 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) yang merevisi SK No. 57/ DK-VII/2010. The Board of Commissioners' Decree Number: Kep-01/ DK/I-2016 dated January 13, 2016 concerning the Code of Conduct of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) which revised the Letter of Decree No. 57 / DK-VII / 2010.
22	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar. The Board of Commissioners / Supervisory Board meetings are held regularly in accordance with applicable regulations and / or articles of association.	<p>a. Agar Dekom menyusun rencana rapat Dekom dengan mempertimbangkan jadwal waktu dan agenda yang direncanakan. The Board of Commissioners compiles the meeting plan by considering the planned timetable and agenda</p> <p>b. Agar Dekom meningkatkan lagi kehadirannya dalam rapat. The members of the Board of Commissioners improve their presence in the meetings.</p>	<p>a. Jadwal dan agenda rapat Internal dan Rapat Gabungan adalah sebagaimana tercantum dalam RKAP Dewan Komisaris. The schedule and agenda of the Internal Meeting and Joint Meeting are as stated in the Company's budget plan of the Board of Commissioners.</p> <p>b. Tingkat kehadiran Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana Rekap Kehadiran Dewan Komisaris. The level of attendance of the President Commissioner and Members of the Board of Commissioners is the same as the Attendance recapitulation of the Board of Commissioners.</p>



Pendahuluan

Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. The Board of Commissioners/Supervisory Board evaluates the implementation of the decisions of the previous meeting results.	Agar Dekom menginstruksikan Sekdekom untuk membuat risalah rapat untuk setiap kali rapat dan melengkapi substansinya dengan Evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pemantauan atas progress hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah ditindaklanjuti. The Board of Commissioners instructs the Secretary of the Board of Commissioners to make minutes of meetings for each meeting and completes the substance with an evaluation of the follow-up on the results of the previous meeting and monitors the progress of the results of the previous Board of meeting followed up.	a. Risalah Rapat tahun 2018 telah dibuat sesuai daftar kegiatan Dewan Komisaris tahun 2018. The Minutes of the 2018 Meeting have been made according to the list of activities of the Board of Commissioners in 2018. b. Matriks tindak lanjut hasil rapat sebelumnya telah disusun untuk bulan Oktober, November dan Desember 2018. The follow-up matrix of the results of the previous meeting has been prepared for October, November and December of 2018.
24	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas. The Secretariat of the Board of Commissioners / Supervisory Board has clear job descriptions.	Agar Dekom melakukan reviu secara tertulis atas Tata tertib Dekom ditetapkan berdasarkan SK no. 57/DK-VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang tata tertib Dekom, dan menyempurnakan tugas Sekdekom terkait kewajiban untuk menyediakan dukungan administrasi serta <i>monitoring</i> berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris. The Board of Commissioners conducts a written review of the Decree of Regulations stipulated by decree no. 57 / DK-VII / 2010 dated July 29, 2010 concerning the Decree of the Order, and perfecting the duties of the Secretary of the Board of Commissioners regarding the obligation to provide administrative support and to monitor related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners.	a. Telah ditetapkan SK Dewan Komisaris Kep-01/DK/I-2016 tanggal 13 Januari 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) yang merevisi SK No. 57/DK-VII/2010. Decree of the Board of Commissioners of Kep-01/DK/I-2016 dated 13 January 2016 has been stipulated concerning the Board Charter of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) which revised Decree No. 57/DK-VII/2010. b. Telah ditetapkan SK Dewan Komisaris Nomor: Kep-45/DK/VII-2010 tanggal 2 Juli 2010 Tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Sekdekom PT PELNI (Persero). Board of Commissioners Decree Number: Kep-45/DK/VII-2010 dated July 2, 2010 concerning Description of Duties and Responsibilities of Secretary of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).
25	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. The Secretary of the Board of Commissioners / Supervisory Board holds Board of Commissioners / Supervisory Board meetings and discussion / forum group discussion between the Board of Commissioners / Supervisory Board with Shareholders / Capital Owners, Directors and other related parties.	a. Agar Dekom menginstruksikan Sekdekom untuk menyusun risalah rapat untuk setiap kali rapat The Board of Commissioners instructs the Secretary of the Board of Commissioners to compile minutes of meetings for each meeting b. Agar Dekom menginstruksikan Sekdekom untuk membuat risalah rapat dengan memuat : The Board of Commissioners instructs the Secretary of the Board of Commissioners to make minutes of meetings by including: • <i>dinamika rapat</i> ; meeting mechanism; • <i>dissenting opinion</i> (bila ada); dissenting opinion (If it is existing); • evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan; evaluation of the implementation of the decisions of the previous meeting and; • keputusan rapat serta memintakan validasi risalah rapat dari anggota Dekom sesuai waktu yang ditentukan yaitu tidak lebih dari 7 hari setelah rapat diselenggarakan decision of the meeting and ask for the validation of minutes of meetings from members of the Board of Commissioners at the time specified not later than 7 days after the meeting was held	Risalah Rapat tahun 2018 telah dibuat sesuai Matrix Laporan Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2018. The Minutes of the 2018 Meeting have been made according to the Board of Commissioners' Activity Report Matrix in 2018.



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
26	<p>Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> <p>Membership composition that supports the implementation of the Committee's functions and the independence of each of the Board of Commissioners / Supervisory Committees.</p>	<p>Dekom agar mengikutsertakan Komite Kebijakan Risiko dalam diklat manajemen risiko.</p> <p>The Board of Commissioners involve the Risk Policy Committee in risk management training and education.</p>	<p>Komite Kebijakan Risiko belum melakukan diklat manajemen risiko</p> <p>The Risk Policy Committee has not conducted risk management training.</p>
27	<p>Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/ charter dan program kerja tahunan.</p> <p>The Board of Commissioners / Supervisory Committee has an annual charter and work program.</p>	<p>a. Dekom agar menginstruksikan Komite Kebijakan Risiko utk melakukan reuiu Piagam Komite Kebijakan Risiko.</p> <p>The Board of Commissioners instructs the Risk Policy Committee to review the Risk Policy Committee Charter.</p> <p>b. Agar Dekom menginstruksikan Komite audit untuk menyempurnakan muatan Piagam Komite Audit dan Piagam Komite kebijakan Risiko dengan mengacu pada SK Bapepam No : Kep-643/BL/2012 Tanggal : 7 Desember 2012.</p> <p>The Board of Commissioners instructs the Audit Committee to perfect the contents of the Audit Committee Charter and the Risk Policy Committee Charter with reference to the Bapepam Decree No: Kep-643/BL/2012 Date: December 7, 2012.</p> <p>c. agar Dekom menginstruksikan Komite Dekom untuk menyusun Program Kerja Tahunan masing-masing Komite Dekom dengan mengacu pada Piagam Komite yang telah disempurnakan.</p> <p>The Board of Commissioners instructs the Board of Commissioners' committee to compile the annual work program of each committee by referring to the enhanced charter of its committee.</p>	<p>Sudah dilakukan reuiu Piagam Komite Kebijakan Risiko dan telah ditetapkan pada tanggal 26 September 2018.</p> <p>A review of the Risk Policy Committee Charter has been reviewed and has been established on September 26, 2018.</p> <p>Telah disusun program kerja tahunan komite.</p> <p>The annual work program of the committee has been prepared.</p>
28	<p>Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.</p> <p>The Board of Commissioners' Committee/Oversight Committee conducts regular meetings in accordance with the annual work program and conducts other activities assigned by the Board of Commissioners / Supervisory Board..</p>	<p>Agar Dekom menginstruksikan masing-masing Komite untuk menyempurnakan penyusunan Program Kerja masing-masing Komite Dekom dengan memuat jumlah, jadwal dan agenda rapat, menyusun risalah rapat untuk setiap kali rapat yang diselenggarakan.</p> <p>The Board of Commissioners instructs each committee to perfect the preparation of the work program of each committee by including the number, schedule and agenda of the meeting, compiling minutes of meetings for each meeting held.</p>	<p>Telah disusun program kerja Komite yang memuat jumlah, jadwal dan agenda rapat.</p> <p>The Committee's work program has been prepared which contains the number, schedule and agenda of the meeting.</p>



Pendahuluan Introduction

No	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Progres Progress
29	<p>Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> <p>The Board of Commissioners' Committee/Supervisory Committee reports the activities and results of assignments received to the Board of Commissioners / Oversight Board.</p>	<p>a. Agar Dekom lebih mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing Komite Dekom dalam mendukung kelancaran tugas Dekom.</p> <p>The Board of Commissioners optimizes the functions and roles of each Committee in supporting the smooth function of the Board of Commissioners.</p> <p>b. Agar Dekom menginstruksikan masing-masing Komite untuk menyusun laporan yang informatif dan dapat diperbandingkan dengan rencananya (program kerja).</p> <p>The Board of Commissioners instructs each Committee to prepare reports that are informative and comparable to their plans (work program).</p>	<p>Telah disusun Laporan Kinerja Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko atas kegiatan 2018.</p> <p>The performance report of Audit Committee and Risk Policy Committee have been prepared for 2018 activities.</p>
Aspek IV Aspect IV			
1	<p>Perusahaan menyediakan bagi <i>stakeholder</i> akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.</p> <p>The Company provides a Stakeholder access to the relevant, adequate, and accountable information of the Company in time.</p>	<p>a. Perusahaan disarankan melaksanakan pengelolaan <i>website</i> sesuai dengan kebijakan yaitu memuat kebijakan-kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan kebijakan terbaru yang telah dilakukan revisi.</p> <p>The Company is suggested to implement website management according to the policy which compares Good Corporate Governance policy with the revised policy.</p> <p>b. Perusahaan disarankan mempublikasikan Pedoman-pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik edisi Tahun 2016.</p> <p>The Company was suggested to publish the guidelines of Good Corporate Governance in 2016.</p>	<p>Masih dalam proses untuk pembaharuan <i>website</i> yang dimulai prosesnya dari akhir tahun 2018. saat ini sudah pada tahap finalisasi <i>design</i> diperkirakan untuk dapat launching <i>website</i> baru pada bulan Juni 2019.</p> <p>Updating website that started its process from 2018. And currently in design finalization process predicted can be launching a new website on June 2019.</p> <p>Sudah di publikasikan melalui di web PT PELNI (Persero) dan melakukan publikasi baik secara langsung dan tidak langsung, tidak langsung dengan mereminder pedoman <i>soft structure</i> setiap awal bulan kepada millis pegawai setiap awal bulan dan secara langsung dengan melakukan sosialisasi.</p> <p>Has been published through PT PELNI (Persero) website and has been publishing directly or indirectly, for the indirectly publishing is to remind soft structure guidelines in every month through employee e-mail and for the directly publishing is to socialize it.</p>
2	<p>Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>The Company provides a Stakeholder access to the relevant, adequate, and accountable information of the Company in time.</p>	<p>Laporan Tahunan berikutnya dilengkapi dengan muatan pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengungkapkan pelaksanaan program pelatihan Direksi, Program perbaikan kesehatan, Program pengembangan seni budaya dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan.</p> <p>For the next Annual Report will be completed with Good Corporate Governance disclosure by stating the implementation of the Directors training, health improvement, art development and the spending cost related to corporate social responsibility especially in environment activities.</p>	<p>Untuk tahun ini telah diajukan pelatihan untuk Direksi, namun untuk pelaksanaannya sesuai dengan keputusan Direksi.</p> <p>This year has been proposed the training for the Directors, although its implementation based on the Directors' decision.</p>
3	<p>Perusahaan memperoleh penghargaan atau <i>award</i> dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.</p> <p>The Company earned awards in GCG and other field.</p>	<p>a. Agar Perusahaan mengikuti <i>Annual Report Award</i>.</p> <p>The Company participated Annual Report Award.</p> <p>b. Agar perusahaan berpartisipasi dan berupaya mendapatkan penghargaan atau <i>award</i> lainnya di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.</p> <p>The Company participated and strived to earn the acknowledgement and other awards in the field of publication and information disclosure.</p>	<p>Tahun 2017 tidak diadakan Annual Report Award oleh Kementerian BUMN.</p> <p>In 2017, Annual Report Award did not held by the Ministry of State-owned enterprises.</p> <p>Sudah mengikuti SRA (Sustainability Report Award untuk tahun 2017) dan PT PELNI (Persero) mendapat skor kategori Silver dan mendapat nilai 80,77 dari jumlah total 100.</p> <p>Has followed SRA (Sustainability Report Award 2017) and PT PELNI (Persero) achieved a silver category and a score of 80.77 from the total of 100</p>

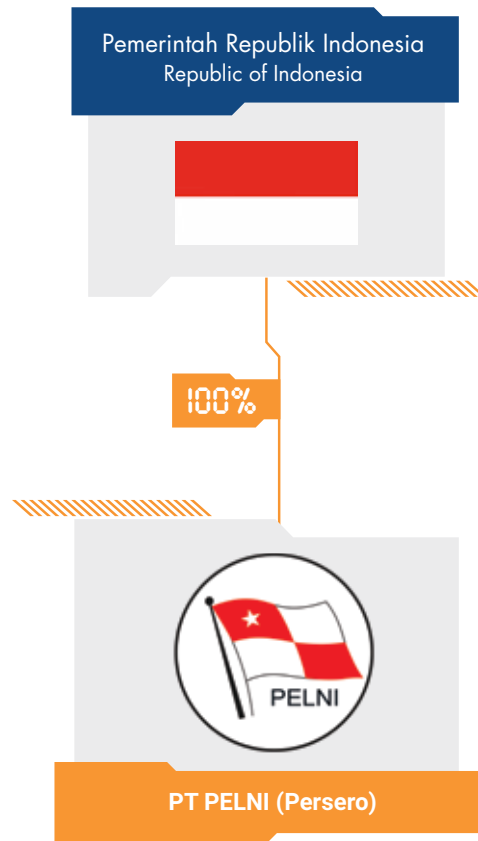


Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Major and Controlling Shareholders Informations

Sampai dengan saat ini, pemegang saham utama dan pengendali dari PT PELNI (Persero) adalah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan jumlah kepemilikan saham 100% atau kepemilikan penuh.

Currently, the main and holding shareholders of PT PELNI (Persero) is Indonesian Government through the Ministry of State-owned Enterprises with amounted to 100% shares or full ownership.

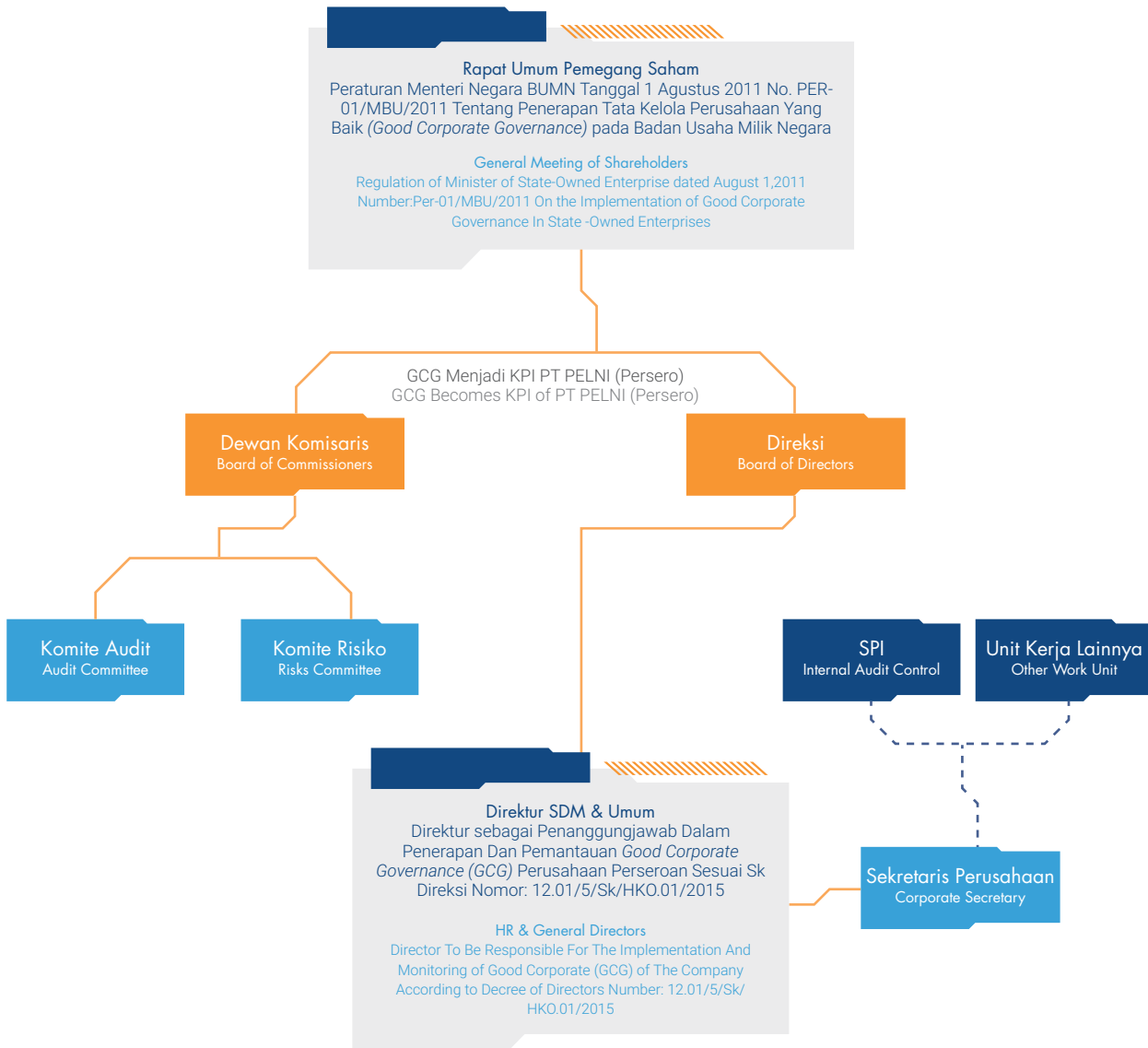


Struktur Organ GCG Perusahaan

GCG Structure

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah memiliki struktur Governance yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama PT PELNI (Persero) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun Organ Pendukung PT PELNI (Persero) diantaranya Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Manajemen Risiko. Berikut adalah Struktur GCG PT PELNI (Persero):

In compliance of Republic of Indonesia Law number. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, the Company has had Governance Structure consisting of main and supporting organ of the Company. Main organ of this structure is General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Directors. And the supporting organ consists of Audit Committee, Risk Policy committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management. Here is GCG Structure of PT PELNI (Persero) explained below:





Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

RUPS Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah Organ atau bagian Perseroan yang memiliki Kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

The GMS According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is an Organ or a part of the Company that has special authority which not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits that has been determined by the Laws and/or articles of association.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

Based on the provisions of the Articles of Association there are 2 (two) types of General Meeting of Shareholders, i.e:

1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham.

1. Annual General Meetings of Shareholders, which is held annually at least 6 (six) months after the financial year ended.
2. Extraordinary General Meetings of Shareholders could be held once a year if it is considered necessary by the Directors on a written request from the Board of Commissioners or from the Shareholders.

Pada tahun 2018, PT PELNI (Persero) menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yaitu RUPS RKAP tahun buku 2018 pada tanggal 23 Januari 2018 dan RUPS Laporan Manajemen Tahun Buku 2017 pada 16 Mei 2018.

PT PELNI (Persero) held 2 (two) Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) in 2018 namely the AGMS of the Company's work and budget plan for fiscal year 2017 dated on January 23, 2018 and the AGMS of Management statement for fiscal year 2016 dated on May 16 2018.

RUPS RKAP

Agenda dan Keputusan RUPS

Pada RUPS RKAP Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2018 telah diagendakan dengan keputusan sebagai berikut:

AGMS OF THE COMPANY'S WORK AND BUDGET PLAN The Agenda and Resolution of AGMS

On the AGMS of The Company Work and Budget Plan for fiscal Year 2018 held on January 23, 2018 that has been scheduled with the following decisions:

No.	Agenda RUPS RKAP Annual GMS of CBP	Keputusan Decision
1	Pemaparan dari Direksi PT PELNI (Persero) berikut Pembahasan; Terkait pengesahan RKAP tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Presentation from the Board of Director of PT. PELNI with the following discussion: related to the Company work and budget plan of 2018.	Menyetujui/ Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2018 (dua ribu delapan belas) PT Pelayaran Nasional Indonesia. Approved / Ratified the Company Work and Budget Plan (RKAP) and also Work and Budget plan for Partnership and Community Development Program (PKBL) 2018 (two thousand and eighteen) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
2	Rekomendasi Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). The Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Recommendations.	Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (Indikator Kinerja Kunci) tahun 2018 yang tertuang dalam kontrak manajemen yang di tanda tangani oleh Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Establishing <i>Key Performance Indicators</i> 2018 was stipulated in management contracts which signed by shareholders, the Board of Director of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
3	Pembacaan Pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ratification readings of General Meeting of Shareholders (GMS).	Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018. Establishing the Operational Aspect Indicators of PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the calculation of Company Health Level 2018.
4	Rekomendasi pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris terhadap alokasi anggaran investasi. Recommendation for granting authority to the Board of Commissioners regarding investment budget allocation.	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (Sepuluh Persen) dari masing-masing item investasi dan tidak merubah program/ item investasi serta tidak melebihi total nilai investasi. Approving the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there were actions that resulted the changes in the investment budget allocation with a maximum value of 10% (Ten Percent) of each investment item and did not change the investment program / item and not exceed the total values of investment.



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Arahan RUPS RKAP

Pada RUPS RKAP tersebut telah menghasilkan arahan RUPS dengan status tindak lanjut sebagai berikut:

Direction for The GMS of CBP

At the AGMS of The Company Work and Budget Plan has been generated The direction for GMS with follow-up status as follows:

No.	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1	<p>RKAP Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran Perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan 1 tahun 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>The Company work and Budget Plan 2018 (two thousand and eighteen) that have been ratified in order to be detailed into monthly targets and cascading to all members of the Company. The Board of Commissioners report the details result of the cascading which referred to the Shareholders in the first quarter of 2018.</p>	<p>RKAP 2018 telah di-breakdown per bulan, per Cabang, per Divisi dan perkapal serta diupload ke system Oracle EBS.</p> <p>The Company's work and budget plan of 2018 has been elaborated into per-month, per-branch, per-division and per-ship as well as uploaded to Oracle EBS system.</p>
2	<p>Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (<i>cost reduction program</i>) disemua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen Perusahaan.</p> <p>Striving to increase cost and cost control in all business lines in order to realize more effective and efficient management of the Company, and net income is the minimum target that must be achieved by all levels of the Company's management.</p>	<p>a. Tindak lanjut upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya dari Divisi PAKPPP :</p> <p>A follow-up effort to increase the income and cost control of PAKPPP division:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Channel Penjualan (7 channel: Indomart, Alfamart, Darmawisata, MMBC, Bimasakti, Ata Tour, Versa). Sales channel development (7 Channels, among others: Indomart, Alfamart, Darmawisata, MMBC, Bimasakti, Ata Tour, Versa). • Pengembangan Aplikasi <i>Mobile</i> Reservasi Tiket. Mobile ticket reservation development. • Pengembangan produk <i>lifestyle</i>. Lifestyle product development. • Proses Persetujuan penambahan ruas-ruas baru yang belum di-cover PSO An agreement process for additional routes has not been covered by public service obligation. • Pengembangan produk <i>lifestyle</i>. Lifestyle product development. <p>b. Tindak lanjut upaya peningkatan pendapatan biaya dari Divisi Pemasaran Kapal Barang yaitu dengan Implementasi <i>Redpack</i>, Kebijakan Elastisitas Tarif <i>Cargo</i>, Kerjasama dengan BRI terkait <i>payment cargo</i>, Kerjasama <i>Cargo Agency</i> dengan PT Garuda Indonesia, Pengangkutan ikan dengan sinergi BUMN.</p> <p>A follow-up effort to increase the income originating from cargo ship sales division is by Redpack implementation, an flexible cargo tariff policy, cooperation with BRI Bank related cargo payment, Cargo agency cooperation with PT Garuda Indonesia, fish carriage by State-owned enterprises synergy.</p> <p>c. Pengendalian biaya dilakukan dengan menggunakan sistem EBS <i>Budgeting</i>. Cost control was conducted by using EBS Budgeting system.</p>
3	<p>Melakukan upaya-upaya menaikkan produktivitas Kapal dan menata ulang lintasan, perbaikan bisnis proses dan meningkatkan pelayanan kepada Pengguna Jasa.</p> <p>Conducting some efforts to increase ship productivity and rearranging trajectories, improving business processes and service for costumers.</p>	<p>Melakukan <i>Clustering</i> trayek, <i>rerouting</i> dan <i>rescheduling</i> angkutan lebaran untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang guna peningkatan penghasilan dan pelayanan.</p> <p>Clustering routes, re-routing and re-scheduling for homecoming transportation to accommodate the passenger surge to increase the income and service.</p>
4	<p>Secara intensif melakukan <i>monitoring</i> dan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p> <p>Intensively monitoring and accelerating the completion of national strategic projects.</p>	<p>Program Startegis Perusahaan masuk ke dalam Rencana Kerja Manajemen PT PELNI (Persero) di Tahun 2018 yang terdiri dari 16 Program Strategis dan secara berkala di-monitor progress-nya oleh Manajemen PT PELNI (Persero).</p> <p>The Company strategic program wrapped in work management plan of PT PELNI (Persero) in 2018 consisting of 16 strategic programs and periodically monitoring its progress by PT PELNI (Persero).</p>



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

No.	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
5	<p>Mengingat realisasi penyerapan penggunaan dana PMN yang masih rendah, Direksi agar melaksanakan percepatan realisasi penggunaan dana PMN sesuai dengan rancangan peruntukan sebagaimana business plan yang diajukan, dan mengevaluasi realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER-08/MBU/06/2015 dan PER-11/MBU/09/2015.</p> <p>Considering the realization of the use of PMN funds that is still low, the Board of Directors must accelerate the realization of the use of PMN funds in accordance with the designation plan that proposed on business plan, and evaluating the realization of the use of these funds periodically in accordance with Minister of State-owned Enterprises Regulation Number. PER-08/MBU/06/2015 and PER-11/MBU/09/2015.</p>	<p>a. Pengadaan Kapal kelima telah terealisasi dan diserahkan-terimakan pada tanggal 23 Mei 2018 di Singapura. The fifth ship procurement realized and handed over on May 23, 2018 in Singapore.</p> <p>b. Untuk kapal keenam sedang dalam proses lelang ulang. The sixth ship is still in auction process.</p>
6	<p>Direksi agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anak perusahaan maupun perusahaan patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi.</p> <p>The Board of Directors improves coaching and supervision of the subsidiaries and joint ventures performance, especially those which make a significant contribution to the company's performance on a consolidated basis.</p>	<p>Program Strategis Anak Perusahaan telah masuk ke dalam Rencana Kerja Manajemen PT PELNI (Persero) di Tahun 2018 yang terdiri dari 16 Program Strategis dan secara berkala di monitor progress nya oleh Manajemen PT PELNI (Persero).</p> <p>The Subsidiary strategic program has incorporated into Management work plan of PT PELNI (Persero) in 2018 consisting of 16 strategic programs and periodically monitoring its progress by Management of PT PELNI (Persero).</p>
7	<p>Direksi agar memastikan Program pengelolaan dan pengembangan SDM yang dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi Corporate Human Capital (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karir dan talent management untuk mendukung pencapaian target-target perusahaan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan Best Practice.</p> <p>The Board of Directors ensures that the HR management and development program is conducted comprehensively by all functions of Corporate Human Capital (CHCD). Implementation of HR development policies, career paths and talent management to support the achievement of corporate targets in the short or long term to be improved, as well as an evaluation of HR policies so that they are always in Best Practice.</p>	<p>a. Sosialisasi dan implementasi tata nilai: Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, dan Competitive, budaya Perusahaan: PELNI (Peduli, Ekselen, dan Inovasi), dan perilaku utama: Jujur, Unggul, Adaptasi, Ramah, Akurat (JUARA). Socializing and implementing value governance, among others: Integrity, Continuous, Improvement, Customer Focus and Competitive. Corporate Culture, among others: PELNI (Care, Excellence, and Innovation) and Code of Ethics, among others: Honest, Superior, Adaptation, Friendly, Accurate (Champion).</p> <p>b. Melakukan kajian pengelolaan SDM menggunakan metode RASCI, di antaranya mencakup job family, analisa jabatan, sistem karir, kompetensi, dan reward. Reviewing Human Resources management uses RASCI method, such as including Job Family, Position assessment, career path, competency, and reward.</p> <p>c. Mengadaptasi talent management system dari Kementerian BUMN untuk menyempurnakan sistem talent saat ini berlaku di Perusahaan Adapting talent management system from the Ministry of State-owned Enterprises to accomplish the applicable talent system in the Company.</p> <p>d. Melakukan pengembangan SDM berbasis kompetensi, kurikulum dimasukkan dalam program MDP (management development program). Performing competency-base Human Resources development, its curriculum is stated in MDP (management development program).</p>
8	<p>Terkait PKBL diminta untuk: PKBL is required to:</p> <p>a. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN N.PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN melalui Portal PKBL dengan alamat http://pkbl.bumn.go.id Deliver periodic reports in a timely manner as stipulated in the Minister of State-owned Enterprises Regulation N.PER-09 / MBU / 07/2015 dated July 3,2015 concerning PKBL of State-owned Enterprises through PKBL Portal with the address on http://pkbl.bumn.go.id</p> <p>b. Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN, maka Direksi diminta untuk menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan Menteri BUMN dimaksud. With the issuance of the Minister of SOE Regulation Number: PER-02/MBU/07/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning PKBL of SOE, the Directors are asked to determining the SOP for PKBL implementation which has been adjusted to The Minister of SOE.</p>	<p>a. PT PELNI (Persero) telah menyampaikan laporan PKBL secara berkala di tahun 2018 dengan tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditentukan melalui portal PKBL. PT PELNI (Persero) submitted the environmental and community development work program report periodically in 2018 in timely manner in accordance with the determined due through PKBL portal.</p> <p>b. SK Direksi No: 10.25/01/SK/HKO.01/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur PKBL PT PelnI (Persero) tanggal 25 Oktober 2017 telah memuat Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 02/MBU/07/2017. The Letter of Directors' decree No: 10.25/01/SK/HKO.01/2017 concerning the Determination of Standard Operating Procedures for the environmental and community development program of PT PELNI (Persero) dated October 2017, 25 has included the Minister of State-owned Enterprises Regulation Number PER 02/MBU/07/2017.</p>



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

No.	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
9	<p>Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi talent management dengan sistematis yang lebih baik, serta memastikan ketersediaan dan kesiapan <i>talent</i> untuk <i>Sustainable Growth</i> dari BUMN, diminta kepada Direksi untuk:</p> <p>In order to managing talent management functions with better systematics, as well as ensuring the availability and readiness of talents for Sustainable Growth from SOEs, the Directors are asked to:</p> <p>a. Menyelenggarakan <i>talent management system</i> sekaligus menyiapkan <i>talent</i> perusahaan menjadi <i>talent pool</i> di Kementerian BUMN. Organize the talent management system also preparing Company talents to become a talent pool at the Ministry of State-owned Enterprises.</p> <p>b. Menyediakan <i>talent pool</i> di setiap minimal sebanyak 20%. Provide a talent pool of at least 20%.</p> <p>c. Menyiapkan kandidat calon Direksi dari BOD-1 sejumlah 3 suksesor per posisi BOD. Prepare candidate Directors from BOD-1 for 3 successors per BOD position.</p>	<p>a. Melakukan adaptasi sistem <i>talent pool</i> saat ini dengan sistem <i>talent</i> BUMN secara bertahap. Adapting the applicable talent pool system with the SOEs talent system gradually.</p> <p>b. Data <i>talent</i> BOD dan BOD-1 telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan diinput dalam aplikasi ITMS BUMN. Jumlah <i>talent</i> yang didaftarkan sebanyak 70%. Melakukan asesmen kompetensi untuk pegawai level BOD-1 yang belum melaksanakan <i>assessment</i> dan menjalankan <i>coaching</i> untuk meningkatkan kompetensi. <i>Batch</i> I telah selesai dilaksanakan bulan Februari 2018. BOD talent data and BOD 1 submitted to the Ministry of State-owned Enterprises and has been uploaded into ITMS BUMN application. The total talent registered amounting to 70%. Assessing the competency for BOD 1 official level that has not conducted the assessment and coaching to improve the competency. <i>Batch</i> I has been organized on February 2018.</p>
10	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, Auditor Independen dan Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2017 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2018.</p> <p>The Board of Directors should pay attention to the findings and recommendations of the BPK, Independent Auditors and the Company's Internal Control Unit that have not been resolved yet until 2017 and made this as a target for completion in 2018.</p>	<p>Untuk mempercepat penyelesaian Temuan dan Rekomendasi BPKRI maka hal yang akan dilakukan sbb: To accelerate the completion of findings and recommendation from Financial Audit Department of Republic of Indonesia, and could be conducted some steps as follows:</p> <p>a. Merekomendasikan agar penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Internal dan Eksternal menjadi <i>Jobdesc</i> dan KPI dari masing-masing Unit Kerja. Recommending the follow-up completion of internal and external recommendation become a <i>Jobdesc</i> and Key Performance Indicator for each of work units.</p> <p>b. Akan Diadakan Rapat Pertemuan antara PIC terkait dengan Komite Audit & Direksi tentang Pembahasan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Eksternal (BPK) yang akan diselesaikan pada tahun 2018. Will be held Meeting between PICs related to Audit Committee & Directors regarding the discussion on Accelerating the Settlement of Follow-Up External Findings and Recommendations (BPK) to be completed in 2018.</p>
11	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2018 sebagaimana disampaikan melalui Surat Nomor : 75/DK//XII-2017 tanggal 29 Desember 2017 dan Nomor: 03/DK/I-2018 tanggal 19 Januari 2018.</p> <p>The Board of Directors should pay attention to and follow up on the suggestions and recommendations of the Board of Commissioners in the implementation of the 2018 RKAP as stated submitted through Letter Number: 75/DK//XII-2017 dated December 29, 2017 and Number: 03/DK/I-2018 dated January 19, 2018.</p>	<p>Dilaksanakan sesuai arahan RUPS. Applied based on the direction of General Meeting of Shareholders</p>
12	<p>Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Dewan Komisaris Tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2018 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The Minutes of RKAP, RKA PKBL, RKA and KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Commissioners in 2018 which have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), which are an integral part of this Minutes of GMS Decision and serve as guidelines for Directors in implementing work program and performance target in 2018 as well as a means of monitoring and supervising for the Board of Commissioners.</p>	<p>Dilaksanakan sesuai arahan RUPS. Applied based on the direction of General Meeting of Shareholders</p>



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Agenda dan Keputusan RUPST TB 2017

Pada RUPS Laporan Manajemen Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2018 telah diadagendakan dengan keputusan sebagai berikut:

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR ANNUAL REPORT FISCAL YEAR 2017

Agenda and Resolution of AGMS Fiscal Year 2017

At the AGMS of Management Report for fiscal year 2017 that held on May 16, 2017 was scheduled with the following resolution:

No.	Agenda RUPS Tahunan TB 2017 AGMS Agenda Fiscal Year 2017	Keputusan Decision
1	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) serta Pengesahan Laporan Program kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).</p> <p>The Annual Report for the Fiscal Year 2017 (two thousand and seventeen) approval including the supervisory duty implementation report of the Board of Commissioners and Ratification for the Consolidated Financial Statements ended on December 31, 2017 and Ratification for Report of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2017 (two thousand and seventeen).</p>	<p>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (tiga puluh Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana Laporan Auditor Independen No.DSI.IS/OH/045.PELNI-LAI/18 tanggal 05 April 2018 (lima April dua ribu delapan belas).</p> <p>Approving Annual Report of the Company included the Supervisory duty which was performed by the Board of Commissioners for the Fiscal Year ended on December 31, 2017, and ratifying the Statements of Consolidated Financial of the Company for the Fiscal Year 2017 which has been audited by Djoko, Sidik & Indra Public Accounting Firm with reasonable opinion in all of material aspects as stated on Statements of Independent Auditor No.DSI.IS/HO/045.PELNI-LAI/18 dated on April 5, 2018.</p>
2	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).</p> <p>The determination of the Company's Net Income usage for the Fiscal year 2017(two thousand and seventeen).</p>	<p>Menetapkan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp276.419.034.328 (dua ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus Sembilan belas juta tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) sebagai cadangan.</p> <p>Determining the use of profit may be attributed to the Owner of the Entity for the Fiscal Year 2017 of Rp276.419.034.328 (two hundred seventy six billion four hundred nineteen million thirty four thousand three hundred and twenty eight Rupiah) as reserves.</p>
3	<p>Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>Determination of a Public Accounting Firm to Audit the Statements of Company's Consolidated Financial for the Fiscal Year 2018(two thousand and eighteen) and Financial statements of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2018 (two thousand and eighteen).</p>	<p>1. Menetapkan KAP Djoko, Sidik & Indra untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>Determining Djoko, Sidik & Indra Public Accounting Firm to audit the Statements of the Company's Consolidated Financial and Funds for the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program 2018 (two thousand and eighteen).</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Djoko, Sidik & Indra karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>Giving the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm, as well as establishing a replacement Public Accounting Firm in the case of Djoko, Sidik & Indra Public Accounting Firm for any reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and Company's financial for the Implementation of Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2018 (two thousand and eighteen).</p>
4	<p>Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>Determination of Tantiem for Book Year 2017 (two thousand and seventeen), Salary, Honorarium and Allowances and Other Facilities for the Board of Commissioners and Directors for the Year 2018 (two thousand and eighteen).</p>	<p>Tantiem Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ditetapkan dalam keputusan tersendiri.</p> <p>Bonuses for Book Year 2017 (two thousand and seventeen), Salary, Honorarium, and Allowances and Other Facilities for the Boar of Commissioners and Directors for 2018 (two thousand and eighteen). Which set out in separate decision.</p>
5	<p>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).</p> <p>Accountability Report on the Funds realization of Additional State Equity for the Fiscal Year 2017 (two thousand and seventeen).</p>	<p>Menerima Laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015 (dua ribu lima belas), untuk periode tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).</p> <p>Receiving the Statements on additional funds realization of the State Capital Participation that came from State Budget Fiscal Year 2015 (two thousand and fifteen), for the Period of the fiscal year 2017 (two thousand and seventeen).</p>



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Arahan dan Tindak Lanjut RUPST TB 2017

Direction and Follow Up of AGMS Fiscal Year 2017

No.	Arahan RUPST TB 2017 AGMS Direction Fiscal Year 2017	Tindak Lanjut Follow Up
1	RKAP Tahun 2017 yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan. The authorized Company's Budget Plan in 2017 is detailed as monthly target.	RKAP 2017 telah di-breakdown per-bulan, per-Cabang, per-Divisi dan per-kapal serta di-upload ke system Oracle EBS. The Company's Budget Plan in 2017 was elaborated into per-month, per-branch, per-division and per-ship and also uploaded to Oracle EBS System.
2	Untuk menunjang pertumbuhan perusahaan, termasuk peningkatan market share di industri pelayaran serta konektivitas, agar menyusun rute yang optimal didasarkan pada utilisasi aset eksisting dan peningkatan sinergi antar BUMN. To boost the growth of the Company, which includes expanding market share in this shipping industry and its connectivity, and to develop an optimum route based on the utilization of existing assets and synergizing State-owned enterprises.	<p>Untuk menunjang pertumbuhan perusahaan, termasuk peningkatan <i>market share</i> di industri pelayaran serta konektivitas, agar menyusun rute yang optimal didasarkan pada utilisasi aset eksisting dan peningkatan sinergi antar BUMN. To boost the growth of the Company, which includes expanding market share in this shipping industry and its connectivity, and to develop an optimum route based on the utilization of existing assets and synergizing State-owned enterprises.</p> <p>Tindak lanjut: Follow Up : Penyusunan trayek 2017 dilakukan pada awal tahun 2017 dan dilakukan kembali pada <i>peak season</i> angkutan Lebaran pada bulan Mei 2017 serta <i>peak season</i> angkutan Natal dan Tahun Baru 2018. Preparing the 2017 routes was conducted in early 2017 and implemented in the peak season of homecoming transportation in May 2017 – as well as the peak season for Christmas and New Year transportation in 2018.</p> <p>Memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan untuk mempertahankan rute yang dimanfaatkan sebagai rute wisata bahari PT PELNI (Persero). Antara lain : Giving suggestion to the Ministry of Transportation to strengthen the existing routes for PT PELNI (Persero) Marine Tourism Routes, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semarang – Karimun Jawa Semarang – Karimun Jawa • Sorong – Waisai Sorong – Waisai • Ambon – Banda Naira Ambon – Banda Naira • Baubau – Wanci Baubau – Wanci • Benoa – Labuan Bajo Benoa – Labuan Bajo <p>Sinergi BUMN dan Instansi Pemerintah : State-owned Enterprises' Synergy and Government Agencies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi muatan menggunakan Kapal Penumpang, antara lain PT POS Indonesia, Bank Indonesia. Optimizing freight carriage transportation using Passenger ships, among others; PT POS Indonesia, Bank of Indonesia. • Optimalisasi muatan menggunakan Kapal Tol Laut, antara lain RNI, Semen Indonesia, PPI, Bulog, dan Pertamina Optimizing freight carriage transportation using Tol Laut ships, among others; RNI, Semen Indonesia, PPI, Bulog and Pertamina.
3	Hasil penyusunan rute tersebut agar dibahas bersama Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham. Dalam hal terjadi penyimpangan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam rute baru dimaksud pada poin di atas, Direksi dan Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan revisi target dan angka RKAP Tahun 2017 paling lambat akhir Triwulan I tahun 2017. The results of preparing routes were discussed with the Board of Commissioners and submitted to Shareholders. If there was a significant deviation of the assumption used in those new routes above, the Board of Commissioners and Directors may submit a proposal for evaluating the targets and the Company's Budget Plan in 2017 at the latest in the end of the first quarter of 2017.	Perubahan trayek Kapal Penumpang pada tahun 2017 sebanyak 2 kali berdasarkan referensi dari Operasi Kapal Penumpang yaitu pada Bulan Januari 2017 (Triwulan 1) dan September 2017 (Triwulan IV). Perubahan trayek tersebut tidak disebabkan oleh perubahan asumsi, namun berdasarkan rutinitas dalam rangka menghadapi <i>peak season</i> . Changes in Passenger Ship routes in 2017 occurred 2 times based on references from Passenger Ship Operations, in January 2017 (1st Quarter) and September 2017 (IV Quarter). The changes were not caused by changes in assumptions, but based on routines to face the peak season.



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

No.	Arahan RUPST TB 2017 AGMS Direction Fiscal Year 2017	Tindak Lanjut Follow Up
4	<p>Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di semua lini usaha (<i>cost reduction program</i>) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan. Striving to increase revenue and controlling costs in all business lines (<i>cost reduction programs</i>) to realize more effective and efficient corporate management, and net income is the minimum target that must be achieved by all levels of company management</p>	<p>Upaya peningkatan pendapatan perusahaan: The efforts to increase the Company's revenues:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan bisnis <i>lifestyle</i> (MICE) dan wisata bahari. Lifestyle business development (MICE) and marine tourism. 2. Pendapatan perintis. Perintis ship income. 3. Pendapatan tol laut. Tol Laut ship income. 4. Pendapatan keagenan. Agency income. 5. Pendapatan galangan surya. Surya Docking revenue. 6. Penghasilan diluar usaha lainnya dari anak perusahaan (antara lain usaha sewa lahan parkir di rumah sakit). Income outside of other businesses from subsidiaries (including parking lots rents in hospitals). 7. Pengembangan <i>Channel</i> Penjualan (7 <i>channel</i>: Indomart, Alfamart, Darmawisata, MMBC, Bimasakti, Ata Tour, Versa). Development of Sales Channels (7 channels: Indomart, Alfamart, Tour, MMBC, Bimasakti, Ata Tour, Versa). <p>Tindak lanjut upaya pengendalian biaya perusahaan : Follow up the efforts on controlling the Company's cost:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pembelian barang dan jasa. Controlling the purchases of goods and services. 2. Menetapkan skala prioritas dalam pengeluaran biaya rumah tangga dan administrasi kantor. Establishing the priority scale in expenditure on household expenses and office administration. 3. Efisiensi penggunaan BBM kapal penumpang (<i>economic speed dan penerapan system control</i>). Efficient use of passenger ships fuel (economic speed and application of Fuel control system).
5	<p>Untuk meningkatkan likuiditas dan kemampuan permodalan perusahaan, Direksi agar meningkatkan manajemen <i>cashflow</i>, pencairan dana PSO tepat waktu dan segera mengupayakan penyelesaian piutang bermasalah. To increasing the liquidity and capital capacity of the company, the Board of Directors in order to increasing cashflow management, disbursement of PSO funds on time and immediately seek the settlement of problematic accounts.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen berupaya untuk menjaga <i>cashflow</i> perusahaan dengan melakukan pencairan dana PSO dan subsidi tepat waktu dan merealisasikan pembayaran (<i>cashout</i>) berdasarkan skala prioritas. Management strives to maintain the company's cashflow by disbursing PSO funds and subsidies in time and realizing cashout based on priority scale. 2. Pencairan dana PSO dan subsidi yang tepat waktu, diupayakan manajemen melalui sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Timely disbursement of PSO and subsidy funds, management strives through an accurate and timely reporting system and intensive coordination with the Ministry of Transportation and the Ministry of Finance. 3. Penyelesaian piutang bermasalah terus diupayakan dan dilakukan <i>monitoring</i> setiap triwulan. Settlement of problematic accounts continues to be sought and carried out monitoring every quarter.
6	<p>Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan bisnis inti perusahaan, pelaksanaan investasi agar diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur dan sistem untuk meningkatkan produktivitas usaha. In order to strengthen and develop the company's core business, the implementation of investment is prioritized on improving infrastructure and systems to increase business productivity.</p>	<p>Tindak lanjut upaya perbaikan dan peningkatan produktivitas: Follow up the efforts on improving and increasing the productivity:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan dan Instalansi Perangkat Aplikasi Penjualan Tiket di Kapal Perintis (telah terimplementasi 27 dari 46 kapal perintis). Installation of Ticket Sales Application Devices on Perintis Ships (27 of 46 perintis ships have been implemented). 2. Pemasangan dan Instalansi Perangkat Admin Kapal di Kapal Penumpang (telah terimplementasi 1 dari 26 kapal penumpang). Installation of Ship Admin Equipment on Passenger Ships (1 of 26 passenger ships has been implemented). 3. Implementasi E-Ticketing di Agent Travel (telah terimplementasi di 5 pelabuhan embarkasi: Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Bitung). E-Ticketing Implementation in Travel Agents (implemented in 5 embarkation ports: Priok, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Bitung). 4. Pembangunan <i>data center</i> PELNI sesuai dengan standar minimum untuk menjamin ketersediaan layanan infrastruktur Teknologi Informasi. Construction of the PELNI data center in accordance with minimum standards to guarantee availability for Information Technology infrastructure services. 5. Pembangunan aplikasi <i>New Bill of Lading</i> (BL) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas angkutan muatan dengan menerapkan aplikasi sebagai <i>platform</i> pemasaran dan penjualan angkutan muatan. Construction of the New Bill of Lading (BL) application aimed to increase the productivity of cargo transport by implementing applications as a marketing and sales platform for cargo transportation.



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

No.	Arahan RUPST TB 2017 AGMS Direction Fiscal Year 2017	Tindak Lanjut Follow Up
		<p>6. Pembangunan ulang <i>website</i> PT PELNI (Persero) agar sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan memenuhi kebutuhan kebutuhan bisnis <i>digital</i>. Rebuilding the PT PELNI (Persero) website to suit the latest technological developments and to meet the digital business needs.</p> <p>7. Pembangunan dan implementasi aplikasi Oracle EBS SCM untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis pengadaan barang/jasa di PT PELNI (Persero) Pembangunan aplikasi <i>dashboard management</i> dan <i>voyage account</i> yang berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajemen dalam menyikapi dinamika bisnis Perusahaan. Construction and implementation of Oracle EBS SCM applications to support the effectiveness and efficiency of business processes for procurement of goods / services at PELNI Development of dashboard management and voyage account applications that serve as decision-making tools for management in addressing the company's business dynamics.</p>
7	<p>Seluruh layanan baik darat maupun laut sudah harus menerapkan ICT (<i>information and communication technology</i>) untuk meminimalkan proses bisnis dilakukan secara manual. All services both land or sea have to implement ICT (information and communication technology) to minimize business processes conducted manually.</p>	<p>Penerapan ICT di darat meliputi beberapa bidang, yaitu: The application of ICT on land includes several fields, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan Penumpang, dengan menggunakan aplikasi PELNI <i>Ticketing System</i> (PTS) dan aplikasi Kapal Perintis (untuk penjualan tiket). Passenger Transportation, using the PELNI Ticketing System (PTS) application and Perintis Ship application (for ticket sales). 2. Keuangan, melalui aplikasi Oracle EBS <i>Finance</i>. Finance, through the Oracle EBS Finance application. 3. Pengembangan sistem angkutan muata melalui penerapan reservasi muatan <i>online</i>. Development of a public transport system through the application of online cargo reservations. 4. Pengembangan sistem admin kapal di atas kapal penumpang. Development of the ship admin system on passenger ships.
8	<p>Pelaksanaan kegiatan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Selain itu Direksi perlu melakukan pemisahan laporan keuangan antara kegiatan komersial dengan kegiatan PSO sesuai ketentuan yang berlaku. The implementation of Public Service Obligation (PSO) activities for both passenger transportation and freight transportation must be carried out perfectly in accordance with applicable regulations and the principles of GCG. In addition, the Directors need to separate financial statements between commercial activities and PSO activities in accordance with applicable regulations.</p>	<p>Pada saat perhitungan penagihan PSO & Subsidi, divisi PSO telah memisahkan komponen biaya yang ditanggung PSO dan yang tidak ditanggung (<i>deductible cost & non deductible cost</i>). When calculating PSO and Subsidies billing, the PSO division has separated the cost components borne by the PSO and not covered (deductible cost & non deductible cost).</p> <p>Namun untuk melakukan pemisahan pada laporan keuangan antara kegiatan komersial dan PSO mengalami kendala, yaitu adanya biaya-biaya yang ditanggung dalam 1 alat produksi yang sama (<i>joint cost</i>), misalnya biaya yang terdapat dalam 1 kapal PSO terdiri dari biaya penumpang (ditanggung PSO), biaya BBM (ditanggung PSO), biaya muatan barang (tidak ditanggung PSO), biaya penumpang non-ekonomi (tidak ditanggung PSO). However, to separate the financial statements between commercial activities and PSO, there are constraints, namely the existence of costs borne in the same production equipment (joint cost), for example the costs contained in 1 PSO vessel consisting of passenger costs (borne by PSO), fuel costs (borne by PSO), cost of cargo (not PSO), non-economic passenger costs (not covered by PSO).</p>
9	<p>Melakukan penataan SDM baik di induk maupun di anak-anak perusahaan serta peningkatan mutu secara berkesinambungan guna meningkatkan produktivitas. Arranging HR in both the parent and subsidiaries and continuous quality improvement to increase productivity.</p>	<p>Salah satu program kerja unggulan Divisi SDM terkait dengan pengelolaan SDM adalah sebagai berikut: One of HR Division's leading work programs related to HR management is as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas manpower planning dengan cara: Increasing the effectiveness of manpower planning by: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekrutmen pegawai darat dan laut; Recruitment of onshore and offshore employees; b. Program kaderisasi pejabat struktural; Structural regeneration program; c. Program individual <i>development planning</i>. Individual development planning program. 2. Penyusunan kamus kompetensi teknis. Preparation of the guidelines of technical competencies. 3. Program internalisasi budaya, tata nilai dan perilaku perusahaan yang selaras dengan strategi bisnis di seluruh unit kerja. Program internalization of culture, corporate values and behavior in line with the business strategies in all work units. 4. Implementasi ERP <i>Human Capital</i> (Oracle HRM). Implementation of ERP Human Capital (Oracle HRM). 5. Pemutakhiran sistem penilaian kinerja yang dihubungkan dengan pemberian kompensasi dan <i>benefit</i> untuk pegawai. Updating the performance assessment systems that are linked to provide the compensation and benefits for employees. 6. Pelatihan pengembangan untuk Nakhoda & Perwira. Development training for Skippers & Officers. 7. Sertifikasi untuk pegawai darat dan laut. Certification for onshore and offshore employees. 8. Melakukan kajian lengkap cabang rangkap antara PT PELNI (Persero) dan PT SBN. Conducting the complete study of multiple branches between PT PELNI (Persero) and PT SBN.



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

No.	Arahan RUPST TB 2017 AGMS Direction Fiscal Year 2017	Tindak Lanjut Follow Up
10	<p>Posisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) perusahaan agar diperkuat dalam rangka early warning system. Selanjutnya, Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham.</p> <p>The position of the company's Internal Control Unit (SPI) is strengthened in the framework of an early warning system. Furthermore, the Board of Commissioners must evaluate the effectiveness of Internal Control Unit's role and report the results to Shareholders.</p>	<p>Telah dilakukan pemberdayaan penguatan posisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam rangka <i>early warning system</i>, terutama :</p> <p>The position empowerment of the Internal Audit Unit (SPI) has been carried out in the framework of the early warning system, basically:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan <i>internal audit charter</i> (piagam pengawasan internal). Issuance of internal audit charter (internal supervision charter). 2. Penerbitan SK Direksi PT. PELNI (Persero) perihal: Issuance of Decree of the Board of Directors of PT. PELNI (Persero), about: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2017 SPI PT PELNI (Persero); Annual Audit Work Program (PKAT) in 2017 for Internal Control Unit of PT. PELNI (Persero); b. Pedoman Audit Investigatif Satuan Pengawasan Intern; Investigative Audit Guidelines for Internal Audit Unit; c. Pedoman Pengelolaan Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI); Guidelines for Management of Internal Audit Unit (SPI); d. SOP pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal di lingkungan PT PELNI (Persero); SOP monitoring the follow-up of recommendations from the results of internal and external auditors in PT. PELNI (Persero); e. Petunjuk dan mekanisme pengelolaan Kertas Kerja Audit (KKA). Guidelines and mechanism for managing Audit Working Paper (KKA). 3. Peningkatan kompetensi <i>internal auditor</i>, melalui pelatihan oleh Sucofindo dan PPAK. Guidelines and mechanism for managing Audit Working Paper (KKA) 4. Koordinasi dan supervisi mengenai audit keselamatan dengan <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) PT PELNI (Persero). Coordination and supervision regarding safety audits with Designated Person Ashore (DPA) PT PELNI (Persero).
11	<p>Melanjutkan langkah dan tahapan menuju <i>holding</i> maritim, termasuk meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholders</i>.</p> <p>The position of the company's Internal Control Unit (SPI) is strengthened in the framework of an early warning system. Furthermore, the Board of Commissioners must evaluate the effectiveness of Internal Control Unit's role and report the results to Shareholders.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2017 melakukan penyesuaian organisasi dengan fokus kepada bisnis penumpang dan bisnis barang. In 2017, the organization adjusted focus on the passenger business and the goods business. 2. Penyiapan people dalam bidang kompetensi untuk bisa menangani bisnis maritim. Preparation of people in the field of competence to be able to handle maritime business. 3. Sudah disiapkan sistem akuntansi COA (Chart Of Account) maritim sesuai kesepakatan tim pembentukan <i>holding</i> maritim. A maritime COA (Chart of Account) accounting system has been prepared in accordance with the agreement of the maritime holding establishment team.
12	<p>Melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka pembentukan <i> Holding</i> Rumah Sakit BUMN dan melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) selaku koordinator pembentukan <i> Holding</i> Rumah Sakit BUMN dimaksud.</p> <p>Conducting the preparatory steps in the framework of establishing a holding of State-owned Enterprise's Hospitals and coordinating with PT Pertamina (Persero) as the coordinator of the establishment of the Holding of State-owned Enterprise's Hospitals.</p>	<p>Pembentukan <i> Holding</i> Rumah Sakit BUMN telah dilakukan dengan PT Pertamina Bina Medika selaku <i> Holding</i> Induk Rumah Sakit sesuai Surat Menteri BUMN Nomor: S-736/MBU/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pembentukan.</p> <p>Establishing a Holding of State-owned enterprise's Hospitals has been done with PT. Pertamina Bina Medika as the Main Holding in accordance with the Minister of State-owned Enterprises' Letter Number: S-736/MBU/12/2016 dated December 21, 2016 concerning Formation.</p> <p><i> Holding</i> Rumah Sakit BUMN. Saat ini sedang dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Pertamina Bina Medika dengan PT RS. PELNI. SOE Holding Hospital. Currently, a Cooperation Agreement (PKS) is being made between PT. Pertamina Bina Medika with PT RS. PELNI.</p>
13	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi auditor internal maupun eksternal (BPK RI) yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2016 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2017.</p> <p>The Board of Directors must pay attention to the findings and recommendations of internal and external auditors (BPK RI) that have not been resolved until 2016 and make this as target for completion in 2017.</p>	<p>Penyelesaian rekomendasi temuan pada pemeriksaan internal dan eksternal (BPK RI) tahun 2016 dan 2017, yang terdiri dari rekomendasi temuan:</p> <p>Recommendation completion of findings on internal and external examinations (BPK RI) in 2016 and 2017, which consists of recommendations for findings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Rekomendasi (SR) sebanyak 125 rekomendasi temuan. According to Recommendations (SR) as many as 125 recommendations findings. 2. Belum Sesuai Rekomendasi (BS) sebanyak 46 rekomendasi temuan. Not suitable with Recommendations (BS) as many as 46 recommendations findings. 3. Diusulkan Selesai (DS) sebanyak 7 rekomendasi temuan. Completion (DS) as many as 7 recommendations findings. 4. Belum Ditindaklanjuti (BD) sebanyak 8 rekomendasi temuan. Not followed up (BD) as many as 8 recommendations findings. 5. Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) sebanyak 7 rekomendasi temuan. Can not be followed up (TDD) as many as 7 recommendations findings.



Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

No.	Arahan RUPST TB 2017 AGMS Direction Fiscal Year 2017	Tindak Lanjut Follow Up
14	<p>Terkait PKBL: Related Social and Community Development Programs (PKBL):</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN melalui Portal PKBL dengan alamat http://pkbl.bumn.go.id. Delivering the periodic reports in a timely manner as stipulated in the Ministry of SOE's Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 concerning social and community development programs of SOE through PKBL Portal via http://pkbl.bumn.go.id. Menganggarkan program BL yang diprioritaskan pada kegiatan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam rangka membantu menurunkan angka kemiskinan melalui elektrifikasi rumah tangga, penyediaan sarana air bersih dan MCK bagi masyarakat. Budgeting the community development program prioritized activities to improve the human development index in order to help reducing the poverty through electrification of households, provision of clean water facilities and public toilets. Memprioritaskan penyaluran PK dan BL di daerah wilayah kerja perusahaan atau kegiatan yang berkaitan dengan rantai nilai/pasok perusahaan dalam skema <i>cluster</i> sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan sekaligus untuk memitigasi risiko gagal bayar. Penyaluran dapat melibatkan lembaga yang mempunyai kompetensi seperti perguruan tinggi dalam hal pendampingan. Prioritizing the distribution of work plan and community development in the area of the company's work area or activities related to the company's value / supply chain in a cluster scheme to encourage improvement in the quality of life of the community, to increase the value of the company simultaneously and to mitigate the risk of default. Distribution can involve institutions that have competencies such as tertiary institutions in terms of assistance. 	<ol style="list-style-type: none"> PT PELNI (Persero) sudah menyampaikan laporan PKBL melalui Portal PKBL dengan alamat http://pkbl.bumn.go.id tepat waktu. PT PELNI (Persero) has submitted the PKBL report through the PKBL Portal via http://pkbl.bumn.go.id in time. PT PELNI (Persero) telah menganggarkan program BL yang diprioritaskan pada pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah tertinggal, seperti revitalisasi terumbu karang, bedah rumah dan bantuan lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan. PT PELNI (Persero) has budgeted the community development program prioritized on environmental preservation and development of underdeveloped areas, such as revitalizing coral reefs, home surgery and other assistance for community. PT PELNI (Persero) memprioritaskan penyaluran PKBL di wilayah operasi perusahaan dengan membentuk <i>cluster</i> mitra binaan agar memudahkan pendampingan atau <i>monitoring</i> mitra binaan untuk mitigasi risiko gagal bayar untuk program kemitraan serta melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya untuk program bina lingkungan. Pelaksanaan program kemitraan tersebut bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya dengan tujuan mengembangkan usaha petambak ikan bandeng dan udang vaname. Adapun lokasi kegiatan PKBL PT PELNI (Persero) di tahun 2017 adalah sebagai berikut: PT PELNI (Persero) prioritizes the distribution of PKBL in the company's operational areas by forming a fostered partner cluster to facilitate mentoring or monitoring of fostered partners to mitigate the risk of default for partnership programs and to carry out activities that can improve the living standards of surrounding communities for environmental development programs. The implementation of the partnership program is in collaboration with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries cq. The Directorate General of Fisheries and Aquaculture with the aim of developing a business of milkfish and vaname fish farmers. The location of PT PELNI (Persero) PKBL activities in 2017 is as follows: <ol style="list-style-type: none"> Program Kemitraan: Partnership Program: <ul style="list-style-type: none"> Jawa Tengah Central Java Jawa Barat West Java DKI Jakarta DKI Jakarta Program Bina Lingkungan: Community Development Program: <ul style="list-style-type: none"> BUMN Hadir untuk Negeri: Bengkulu SOE for Nations: Bengkulu Revitalisasi Terumbu Karang : DKI Jakarta Coal Revitalization : DKI Jakarta PELNI Peduli Bencana Alam: Bali PELNI assist natural disaster: Bali dan lain-lain and others
15	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2017 sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor : 01/DK/I-2017 tanggal 4 Januari 2017. The Board of Directors must pay attention and follow up on the suggestions and recommendations of the Board of Commissioners in the implementation of the 2017 Company's Budget Plan submitted by letter Number: 01/DK/I-2017 dated January 4, 2017.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan Dewan Komisaris. Has been conducted in accordance with the direction from the Board of Commissioners.</p>



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

No.	Arahan RUPST TB 2017 AGMS Direction Fiscal Year 2017	Tindak Lanjut Follow Up
16	<p>Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Dewan Komisaris Tahun 2017 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2017 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The Company's Budget Plan framework, PKBL work plan, Board of Commissioners' work plan and KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Commissioners in 2017 that have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), are an integral part of this Minutes of GMS Resolutions and to serve as guidelines for Directors in implementing work programs and performance targets in 2017 - as well as monitoring and supervision facilities for the Board of Commissioners.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS. Has been conducted in accordance with the direction of GMS Resolutions.</p>
17	<p>1. Terkait dengan kegiatan PT PELNI (Persero) yang dominan merupakan kegiatan PSO, dimana Kinerja operasionalnya lebih dari 50% (lima puluh persen) ditahun 2016 (dua ribu enam belas) dan 2017 (dua ribu tujuh belas) masih dari PSO atau Subsidi, sehingga diharapkan Manajemen dapat memisahkan kegiatan kegiatan terkait PSO dan kegiatan Non PSO, termasuk pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) agar penyerapan subsidi dipisahkan/dikeluarkan. Demikian pula pada KPI PT PELNI (Persero), diharapkan akuntansi dan perhitungannya tanpa PSO.</p> <p>Related to the dominant activities of PT PELNI is PSO activity, where its operational performance is more than 50% (fifty percent) in 2016 (two thousand sixteen) and 2017 (two thousand seventeen) still remains from PSO or Subsidies, so Management can separate activities related to PSO and Non-PSO activities, including the Partnership and Community Development Program (PKBL) so the absorption of subsidies is separated/issued. Similarly, the KPI of PT PELNI (Persero), is expected to count and calculate without PSO.</p> <p>2. Terkait dengan Dana PMN baik <i>cash</i> maupun <i>non cash</i>, Direksi diharapkan segera menindak lanjuti dan melaporkannya kepada pemegang saham. Related to PMN Funds, both cash and non cash, the Directors are expected to immediately follow up and report it to Shareholders.</p>	<p>1. Dalam penghitungan penyerapan PSO, divisi PSO telah memisahkan komponen biaya yang ditanggung PSO dan yang tidak ditanggung (<i>deductable cost & non deductible cost</i>) Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/9/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dimana pembukuan PKBL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan divisi PSO telah memisahkan komponen biaya PKBL menjadi biaya yang tidak ditanggung PSO.</p> <p>In calculating PSO absorption, the PSO division has separated the cost components borne by the PSO and those that are not covered (deductable cost & non deductible cost) In accordance with the Minister of SOE Regulation Number Per 09 / MBU / 9/2015 concerning the Partnership and Community Development Program, where the PKBL bookkeeping is carried out in accordance with applicable accounting standards and the PSO division has separated the PKBL cost component into costs not covered by the PSO.</p> <p>2. Progres laporan dana PMN <i>Cash</i> triwulanan sudah dilaporkan secara rutin ke BUMN. The Progress quarterly report of PMN Cash Fund has been reported regularly to SOEs.</p>
18	<p>Secara terperinci sesuai Proposal PT PELNI (Persero) sebelumnya serta selaras dengan tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 72-Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas.</p> <p>In accordance with the previous proposal of PT. PELNI (Persero) and in line with the purpose of the enactment of Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 72 of 2016, concerning Amendments on Government Regulation No. 44 of 2005 concerning The procedures for Participating and Administration of State Capital in SOEs and Limited liability company.</p>	<p>Laporan penggunaan Dana PMN telah dilaporkan kepada Pemegang Saham setiap Triwulan dan telah diupload dalam Portal FIS BUMN. The PMN Fund usage report has been reported to Shareholders every Quarter and has been uploaded in the BUMN FIS Portal.</p>



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan atas pelaksanaan strategi dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta pemberian rekomendasi pada Direksi guna memastikan kesinambungan aktivitas bisnis. Selain itu, Dewan Komisaris juga diharapkan mampu melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan efektivitas penerapan GCG termasuk di dalamnya memberikan saran konstruktif untuk penyempurnaan implementasi GCG oleh Perseroan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar PT PELNI (Persero), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2009 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta *Board Manual* Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

KOMPOSISI DAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018, komposisi Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) mengalami perubahan. Pada tahun 2018 telah terjadi pergantian pada Komisaris Utama dan penambahan Komisaris Independen. Per 31 Desember 2018 susunan komposisi Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

In accordance with the functions and authorities contained in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is responsible for the oversight function of the Company's strategy and management implementation by the Board of Directors and the recommendation to the Board of Directors to ensure the continuity of business activities. In addition, the Board of Commissioners is also expected to monitor the implementation and effectiveness of GCG implementation, including providing constructive advice for the improvement of GCG implementation by the Company.

THE BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT AND DISCHARGE

Appointments and Dismissals of the Board of Commissioners are determined at the General Meeting of Shareholders (GMS). The resolution on the appointment and dismissal of the Board of Commissioners is guided by the Articles of Association of PT PELNI (Persero), Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Law Number 19 of 2003 on SOE, Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2009 on Board of Directors and Board of Commissioners Appointment and Discharge in SOE and PT PELNI (Persero) Articles of Association.

THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION AND SEGREGATION OF DUTY

During 2018, the composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) has changed. In the year of 2018, there were changes on the President Commissioner and an addition on Independent Commissioner. As of December 31, 2018 the composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) can be seen in the table below:

No.	Nama Komisaris Name of Commissioner	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Jabatan Date of Appointment	SK Pengangkatan Appointment Decree
1	Bambang Prihartono	Komisaris Utama President Commissioner	19 Februari 2018 February 19, 2018	SK-48/MBU/02/2018
2	Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	08 Desember 2017 December 08, 2017	SK-264/MBU/12/2017
3	Danang Parikesit	Komisaris Independen Independent Commissioner	12 Juli 2018 July 12, 2018	SK-206/MBU/07/2018
4	Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	17 November 2015 November 17, 2015	SK-232/MBU/11/2015
5	Sudarto	Komisaris Commissioner	17 September 2014 September 17, 2014	SK-218/MBU/2014
6	Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	08 Januari 2014 January 08, 2014	SK-01/MBU/2014



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Integritas, kompetensi, reputasi, dan pengalaman adalah nilai yang dimiliki Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat menjalankan tugasnya masing - masing.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut pedoman kerja Dewan Komisaris PT PELNI (Persero):

1. Tugas Pengawasan.
2. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Tugas dalam Manajemen Risiko.
4. Tugas dalam Sistem Pengendalian Internal.
5. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
6. Tugas dalam Sistem Teknologi Informasi.
7. Tugas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
8. Tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa .
9. Tugas dalam Sistem Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*).
10. Tugas dalam pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
11. Tugas dalam Pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komsiaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
12. Tugas menilai kinerja Direksi.
13. Tugas dalam Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
14. Tugas dalam Nominasi dan Seleksi Calon Direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan keahliannya. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya:

All of the Board of Commissioners members have necessary integrity, competency, reputation and experience as well as expertise to exercise their function and duty.

THE BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties and responsibilities of the Board of Commissioners according to the Board Manual of the Board of Commissioners PT PELNI (Persero) are following:

1. Duties of Supervision.
2. Duties in the General Meeting of Shareholders.
3. Tasks in Risk Management.
4. Tasks within the Internal Control System.
5. Tasks in Transparency and Confidentiality of Information.
6. Tasks in Information Technology Systems.
7. Tasks in the Management of Human Resources.
8. Assignment in Procurement of Goods and Services.
9. Tasks in the Management and Follow-up Reporting System of Breach (*Whistle Blowing*).
10. Duties in the management of a Subsidiary/Joint Venture
11. Duties in the Election of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries / Joint Ventures..
12. The task of assessing the performance of the Board of Directors.
13. Duties in the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
14. Duties in Nomination and Selection of Prospective Directors.

In performing their duties, each Board of Commissioner has duties and responsibilities in accordance with his area and expertise. The following are the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in performing their duties:



Dewan Komisaris Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
1	Bambang Prihartono	Komisaris Utama President Commissioner	Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap hal-hal strategis dan <i>Good Corporate Governance</i> . To coordinate the duties and activities implementation of the Board of Commissioners and to provide recommendation to the Board of Directors regarding strategic issues and Good Corporate Governance.
2	Johannes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan bidang akuntansi, keuangan dan anggaran serta pengawasan internal. Merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Conducting the supervisory and advisory duties to the Board of Directors related the Company's business management on accounting, financial, internal supervisor and also positioning as Head of Audit Committee.
3	Danang Parikesit	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha dalam bidang transformasi perusahaan, pengelolaan anak perusahaan dan <i>non-core business</i> . Conducting the supervisory and advisory duties to the Board of Directors related business management in the Company transformation, Subsidiaries management and non-core business.
5	Sudarto	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan dalam bidang <i>core business</i> dan komersial serta pengelolaan teknologi informasi. Performing the supervisory and advisory duties to the Board of Directors related business management in core business, commercial and Information technology management.
4	Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan bidang sumber daya manusia, hukum, dan organisasi serta sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko. Conducting the Supervisory and advisory duties to the Board of Directors related human resources, legal and organization as well as positioning as Head of Risk Policy Committee.
6	Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan bidang investasi, perkapalan, armada dan teknik. Conducting the supervisory and advisory duties to the Board of Directors on the business management of investing, ship, fleet and technical

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan menyelenggarakan program pengenalan Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perseroan. Program pengenalan Dewan Komisaris diadakan ketika ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:

1. Prinsip-prinsip GCG.
2. Gambaran umum Perseroan.
3. Kewenangan yang didelegasikan.
4. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

THE BOARD OF COMMISSIONERS ORIENTATION PROGRAM

The Company conducts an introduction to the Board of Commissioners program to enable the Board of Commissioners from various backgrounds and experiences to be familiar with and understand the Company's activities and conditions. The responsibility for conducting the recognition program rests with the Corporate Secretary or any person who performs the functions of the Corporate Secretary.

Introduction program material at least includes:

1. GCG Principles.
2. Company overview.
3. Delegated authority.
4. Duties and responsibilities of the Board of Directors and Commissioners.



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Pada tahun 2018, program orientasi Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris baru yaitu Johannes Widodo Hario Mumpuni dan Danang Parikesit sebagai Komisaris Independen Perseroan.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN KOMISARIS 2018

Berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan yang dilakukan Dewan Komisaris pada tahun 2018, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan tambahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PELNI (Persero) Tahun 2018;
2. Calon Direksi PT PIDC melalui surat Nomor: 06/DK/I-2018 tanggal 26 Januari 2018;
3. Persetujuan calon Komisaris Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) melalui surat No. 20/DK/IV-2018 dan No. 21/DK/IV-2018 tanggal 19 April 2018;
4. Persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) melalui surat Nomor: 28/DK/V-2018 tanggal 8 Mei 2018;
5. Tindak lanjut pengelolaan Risiko melalui surat No. 30/DK/V-2018 tanggal 31 Mei 2018;
6. Efektivitas peran SPI melalui surat No. 31/DK/V-2018 tanggal 31 Mei 2018;
7. Persetujuan calon Komisaris PT PIDC melalui surat No. 33/DK/VI-2018 tanggal 7 Juni 2018;
8. Persetujuan Struktur Organisasi PT PELNI (Persero) Tahun 2018 melalui surat No. 37/DK/VII-2018 tanggal 20 Juli 2018;
9. Persetujuan penghapusbukuan inventaris kantor Gedung PT PELNI (Persero) Pusat melalui surat No. 39/DK/VII-2018 tanggal 20 Juli 2018;
10. Persetujuan penghapusbukuan dan Pemindahtanganan barang bekas di Gudang Persmat Tanjung Priok melalui surat No. 44/DK/VIII-2018 tanggal 1 Agustus 2018;
11. Persetujuan perubahan SK Direksi tentang Perjalanan Dinas Direksi, Komisaris, dan Komite melalui surat No. 45/DK-VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018;

In 2018, the Board of Commissioners orientation program has been given to new members of the Board of Commissioners namely Johannes Widodo Hario Mumpuni and Danang Parikesit as Independent Commissioners of the Company.

THE BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

During 2018, there is no the Board of Commissioners competency training and development.

ACTIVITY IMPLEMENTATION IN 2018 OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on duties, authorities and responsibilities regulated in article 15 of the Company's article of association, these activities conducted by the Board of Commissioners in 2018 which includes the following activities:

1. The Board of Commissioners response regarding the additional recommendation of the Company's work and budget plan of PT PELNI (Persero) in 2018;
2. The Director candidates of PT PIDC through letter Number: 06/DK/I-2018 dated January 26, 2018;
3. The Commissioners candidates agreement for the Subsidiary of PT PELNI (Persero) through letter No. 20/DK/IV-2018 and No. 21/DK/IV-2018 dated April 19, 2018;
4. Work capital credit agreement through letter No. 28/DK/V-2018 dated on May 8, 2018;
5. Follow-up risk management through letter No. 30/DK/V-2018 dated on May 31, 2018;
6. Internal Control Unit effectiveness through letter No. 31/DK/V-2018 dated on May 31, 2018;
7. The Board of Commissioners candidates approval of PT PIDC through letter No. 33/DK/VI-2018 dated on June 07, 2018.
8. The agreement of PT PELNI (Persero) organizational structure 2018 through letter No. 37/DK/VII-2018 dated on July 21, 2018;
9. Persetujuan penghapusbukuan inventaris kantor Gedung PT PELNI (Persero) Pusat melalui surat No. 39/DK/VII-2018 tanggal 20 Juli 2018;
10. Secondhand equipment written off and action agreement of Persmat warehousing on Tanjung Priok through letter No. 44/DK/VIII-2018 dated on August 01, 2018;
11. The changes agreement in the Director's letter concerning the official travel of Commissioners, Directors and Committee through letter No. 45/DK-VIII/2018 dated on August 01, 2018;



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

12. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik pelaksanaan audit laporan keuangan konsolidasian dan PKBL Tahun 2018 melalui surat No. 58A/DK/IX-2018 tanggal 21 September 2018;
13. Tindak lanjut pengelolaan risiko melalui surat No. 64B/DK/X-2018 tanggal 31 Oktober 2018;
14. Persetujuan pengangkatan Kepala SPI melalui surat No. 73/DK/XI-2018 tanggal 21 November 2018;
15. Persetujuan penghapusbukuan dan pemindahtanganan barang bekas di Gudang Presmat Tanjung Perak Surabaya melalui surat No. 74/DK/XI-2018 tanggal 27 November 2018;
16. Tanggapan atas kajian pengadaan kapal wisata Tahun 2018 melalui surat No. 77A/DK/XII-2018 tanggal 7 Desember 2018;
17. Tindak lanjut pengelolaan risiko melalui surat No. 79/DK/XII-2018 tanggal 17 Desember 2018;
18. Persetujuan ijin perpanjangan penghapusbukuan dan pemindahtanganan minyak pelumas Eks KM. Fudi melalui surat No. 82.DK/XII-2018 tanggal 21 Desember 2018;
12. Public accounting firm appointment for the implementation of consolidated financial audit statement and community and development program in 2018 through letter No. 58A/DK/IX-2018 dated on September 21, 2018.
13. Follow-up risk management through letter Number: 64B/DK/X-2018 dated on October 31, 2018;
14. Head of Internal Control Unit appointment through letter No. 73/DK/XI-2018 dated on November 21, 2018;
15. Secondhand equipment written-off and auction agreement of Presmart warehousing on Tanjung Perak, Surabaya through letter No. 74/DK/XI-2018 dated on November 27, 2018;
16. Response on tourism ship procurement in 2018 through letter No. 77A/DK/XII-2018 dated on Decemeber 07, 2018;
17. Follow-up risk management through letter No. 79/DK/XII-2018 dated on December 17, 2018;
18. Permission approval to extend the write-off and transfer of Ex MV. Fudi through letter No. 82.DK/XII-2018 dated December 21, 2018;

REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Sesuai dengan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) selama Tahun Buku 2018 No. 37/DK/V/2019, Dewan Komisaris telah memberikan Saran dan Rekomendasi atas pencapaian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk memperbaiki kinerja keuangan Perusahaan:
 - a. Direksi agar memanfaatkan idle asset dalam upaya peningkatan pendapatan Perusahaan;
 - b. Direksi agar selalu memonitor dan melaporkan capaian kinerja atas tantangan target kinerja tahun 2018 yang diberikan oleh Kementerian BUMN;
 - c. Direksi agar mengawal pengembangan bisnis anak Perusahaan;
 - d. Dewan Komisaris mengarahkan dan merekomendasikan Direksi agar mendorong kinerja cabang untuk menyusun suatu konsep pengembangan bisnis dalam rangka mengembangkan pasar angkutan kapal.

THE BOARD OF COMMISSIONERS RECOMMENDATION AND DECISION IN 2018

Based on the supervisory report of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) during the book year of 2018 No. 37/DK/V/2019, the Board of Commissioners provided suggestions and recommendation for 2018 performance as follows:

1. Recommendation to fix the financial performance of the Company:
 - a. The Board of Directors is recommended to utilize asset idle in improving the Company's revenues;
 - b. The Board of Directors is recommended to monitor and report the achievements on the challenges of the performance target in 2018 given by the Ministry of State-owned Enterprises;
 - c. The Board of Directors is recommended to oversee the business operation of Subsidiaries;
 - d. The Board of Commissioners direct and recommend the Board of Directors to boost the performance of Subsidiaries to prepare a business development concept in order to expand passenger transportation market.



Dewan Komisaris Board of Commissioners

2. Rekomendasi untuk memperbaiki proses bisnis Perusahaan:
 - a. Direksi agar melaksanakan strategi peningkatan produktivitas kapal terutama untuk kapal barang tol laut sebagai bagian dari amanat Pemerintah;
 - b. Direksi agar segera melaksanakan MoU yang telah dibuat dengan pihak-pihak lain dan menyelesaikan kontrak-kontrak yang belum selesai;
 - c. Direksi agar berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait kontrak penugasan kapal perintis, tol laut, dan ternak agar permasalahan terkait hal tersebut di tahun 2017 yang lalu tidak terulang kembali;
 - d. Direksi agar memperbaiki sistem pengelolaan barang mengingat proporsi rencana pendapatan barang dari total pendapatan Perusahaan masih rendah (hanya sebesar 7%) agar sejalan dengan rencana Perusahaan untuk shifting focus bisnis Perusahaan ke angkutan barang;
 - e. Dewan Komisaris mengarahkan dan merekomendasikan Direksi agar menyusun business plan sehingga dapat dijadikan masukan bagi Kementerian Teknis dalam menyusun kebijakan;
 - f. Dewan Komisaris mengarahkan Direksi agar selalu berupaya menangani kendala-kendala operasi kapal yang menyebabkan keterlambatan perjalanan kapal.

3. Rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal Perusahaan:

Direksi agar mempercepat penyelesaian Temuan dan Rekomendasi BPK-RI yaitu:

- a. Memasukkan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi auditor internal dan eksternal kedalam *jobdesc* dan KPI masing-masing Unit Kerja terkait;
- b. Melakukan *monitoring* atas temuan dan rekomendasi BPK-RI melalui pertemuan berkala antara unit-unit terkait dengan SPI.

2. Recommendation to improve the business process of the Company:
 - a. The Board of Directors is recommended to implement a ship productivity strategy improvement especially for Tol Laut carriage ship as a part of Government assignment;
 - b. The Board of Directors is recommended to assign MoU prepared by other parties and to accomplish unfinished contracts;
 - c. The Board of Directors coordinate with the Minister of Transportation related the assignment of Perintis, Tol Laut and Cattle ships in order to the constraints related those assignments in 2017 has not emerged;
 - d. The Board of Directors is to fix the equipment management system considering the proportion of the goods revenue plan generated from the Company's total revenue is still low (only 7%) in line with the Company's plan to shifting the Company's business focus to freight transportation;
 - e. The Board of Commissioners directs and recommends the Board of Directors to prepare business plan as an advice for the Ministry of Technical in constructing the policy;
 - f. The Board of Commissioners directs the Board of Commissioners to always manage the ship operation challenges that causes the delay on ship arrival.

3. Recommendation to improve the Company's internal control system:

The Board of Directors is to advance the accomplishment of the findings and recommendation of Financial Audit Agency of Republic of Indonesia with the following action:

- a. Input the completion steps for the follow-up recommendation of Internal and External Auditor into *jobdesc* and key performance indicators of each relevant unit;
- b. Monitoring the findings and recommendations of Financial Audit Agency of Republic of Indonesia through periodically meeting between relevant unit and Internal Control Unit.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

4. Rekomendasi untuk memperbaiki manajemen risiko Perusahaan:
 - a. Direksi agar meninjau SOP Perusahaan yang sudah tidak lagi sesuai dengan tantangan Perusahaan dan perkembangan proses bisnis berjalan;
 - b. Direksi agar melakukan *monitoring sparepart* kapal secara cermat dalam rangka menjaga kualitas layanan dan keselamatan penumpang.
 5. Rekomendasi untuk memperbaiki kinerja karyawan:
 - a. Direksi agar mengoptimalkan proses transformasi perusahaan dengan menyelaraskan konsep manajemen kinerja Perusahaan antara *jobdesc*, KPI dan remunerasi/*reward consequences* untuk unit/cabang maupun individu dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas Perusahaan. Termasuk diantaranya menetapkan *best and worst performers* dalam pencapaian target;
 - b. Direksi agar terus menerus melakukan peningkatan kompetensi (*hard* maupun *soft skill*) karyawan pada setiap jabatan termasuk menghindari *down-grade* dalam ketentuan jabatan awak kapal.
 6. Rekomendasi dalam pengelolaan Sistem Informasi:
 - a. Direksi agar menjabarkan rencana implementasi IT dalam akselerasi proses bisnis bagian penting dalam upaya pembenahan dan transformasi Perusahaan diselenggarakan dengan *master plan* teknologi (MPTI);
 - b. Direksi agar mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi dalam proses bisnis PT PELNI (Persero).
4. Recommendation to increase risk management of the Company :
 - a. The Board of Directors is to review SOP of the Company has not been suitable with the challenges and business process continuity;
 - b. The Board of Directors is recommended to monitor ship spare part carefully in order to maintain services quality and passenger safety.
 5. Recommendation to improve the employee performance:
 - a. The Board of Directors is recommended to optimize the Company's transformation process by aligning the performance management concept of the Company between *jobdesc*, KPI and remuneration/ *reward consequences* for unit/branches or individual in order to improving the performance and productivity of the Company, which includes to determine best and worst performance for achieving target.
 - b. The Board of Directors is to keep improving the employee competency (*hard* or *soft skill*) on each position that includes to avoid down-grade of position requirements for ship crews.
 6. Recommendation to manage information system:
 - a. The Board of Directors is to elaborate the implementation system of IT as the important business acceleration for improving an transformation of the Company aligned with technology master plan;
 - b. The Board of Director is to implement information technology governance in business process of PT PELNI (Persero).

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) bagi Dewan Komisaris, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 tentang tentang Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tata laksana kerja tersebut berisi panduan bagi Dewan Komisaris yang berisikan, antara lain:

BOARD MANUAL FOR BOARD OF COMMISSIONERS

In terms of relationship with other corporate structures regarding implementation of duty and responsibility, the Board of Commissioners has Board Manual for Board of Commissioners as working guideline for the Board of Commissioners that is validated under PT PELNI (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners Joint Decree No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Working Manual (*Board Manual*) for Board of Directors and Board of Commissioners. The Board Manual discloses guideline for the Board of Commissioners, among others:



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris;
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris;
4. Wewenang Dewan Komisaris;
5. Hak Dewan Komisaris;
6. Rapat Dewan Komisaris;
7. Komite-Komite Dewan Komisaris;
8. Sekretaris Dewan Komisaris;

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan tugas-tugasnya dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Setiap tahun komite-komite di bawah Dewan Komisaris mendapat penilaian kinerja sebagai tolok ukur efektivitas kerjanya.

Pada tahun 2018, komite-komite tersebut telah menjalankan telah menjalankan tugas dengan baik dan telah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan Perseroan. Implementasi program kerja dan ketepatan fungsinya senantiasa mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Demi terciptanya fungsi dan efektivitas kerja, Dewan Komisaris dibantu oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2018 dijabat oleh Weny Maulatsih.

Fungsi dan tugas Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2018 antara lain:

1. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
3. Memberikan bantuan ringkasan laporan manajemen.
4. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
5. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris.
7. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Urusan surat menyurat Dewan Komisaris.

1. Board of Commissioners requirement and composition;
2. Board of Commissioners Responsibility;
3. Board of Commissioners Task and Obligation;
4. Board of Commissioners Authority;
5. Board of Commissioners Rights;
6. Board of Commissioners Meeting;
7. Committees Under the Board of Commissioners;
8. Board of Commissioners Secretary;

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners performs its duties with the assistance of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. In every year, these committees under the Board of Commissioners receive performance assessment as a benchmark for the effectiveness of their performance.

In 2018, these committees have carried out their duties well and have contributed to the growth of the Company. The implementation of their work programs and the accuracy of their functions always support the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

For the sake of function and effectiveness of work, the Board of Commissioners is assisted by a Secretary. Secretary of the Board of Commissioners in 2018 has been served by Weny Maulatsih.

Function and assignment of Board of Commissioners in 2018 are as follows:

1. Preparing Board of Commissioners meeting material and minutes of meeting.
2. Performing other secretariate duties.
3. Providing support to management report summary.
4. Collecting relevant material and information related with Board of Commissioners duty implementation.
5. Coordinating with Corporate Secretary regarding any issue related with the Board of Commissioners and Board of Directors.
6. Administering the invitation meetings of the Board of Commissioners.
7. As a liaison officer between Board of Commissioners and Board of Directors.
8. Preparing the Letters of the Board of Commissioners.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Board of Commissioners Secretary



Weny Maulatsih
 Sekretaris Dewan Komisaris
 The Board of Commissioners Secretary

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Usia | Age
 33 tahun per 31 Desember 2018
 33 years old as of December 31, 2018

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
 Banyumas, 24 November 1985
 Banyumas, November 24, 1985

Domisili | Domicile
 Tangerang, Indonesia
 Tangerang, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan SK No KEP-02/DK/VII-2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
 Appointed as Board of Commissioners Secretary based on Decision Letter No No KEP-02/DK/VII-2018 about dismissal and appointment of the Board of Commissioners Secretary of PT PELNI (Persero)

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2012	D4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Diploma 4 of Accounting Stage Accounting College.
------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2018 - Sekarang (Present)	Sekretaris Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). The Board of Commissioner Secretary at PT PELNI (Persero)	2017 - 2018	Kepala Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia. Head of Human Resources Service Sub-Division
2017 - 2018	Sekretaris Dewan Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk The Board of Commissioners' Secretary of PT Indofarma (Persero) Tbk	2013 - 2017	Komite Audit Perum Jasa Tirta I Audit Committee of Perum Jasa Tirta I

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
 No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Dewan Komisaris Board of Commissioners

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan serta dapat bertindak secara objektif dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen yaitu Bapak Johannes Widodo Hario Mumpuni dan Bapak Danang Parikesit.

Kriteria Komisaris Independen

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-83/MBU/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris, maka Kriteria Komisaris Independen yaitu sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perseroan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pernyataan Tentang Independensi Komisaris Independen

Pemenuhan Kriteria Komisaris Independen telah sesuai dengan pernyataan di atas dengan lampiran pada tabel dibawah ini.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and the controlling shareholder, and is free from any business relationship or other relationship which may affect his ability to act independently or act solely for the benefit of the company and can act objectively as guided by GCG principles.

As of December 31, 2018, the Company has had 2 (two) the Board of Commissioners member that become Independent Commissioner namely Mr. Johannes Widodo Hario Mumpuni and Mr. Danang Parikesit.

The Criteria of Independent Commissioners

Referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-83/MBU/06/2015 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners, the Criteria of Independent Commissioners are as follows:

- Not working or having responsibility to plan, manage, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months.
- Not having any shares either directly or non-directly in the Company.
- Not having any affiliation with the Company, other members of Board of Commissioners, Board of Directors or Ultimate Shareholders.
- Not having any business affiliation either directly or non-directly related with the Company's business activity.

Independency Statements of Independent Commissioner

The fulfillment of the Criteria of Independent Commissioners is in accordance with the above statement with the attachment in the table below.

Aspek Independensi Aspects of Independence	Johannes Widodo Hario Mumpuni	Danang Parikesit
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain Not having any affiliation with other Directors and/or Board of Commissioners members	✓	✓
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan Not serving as Board or Directors in the Company that is affiliated with the Company	✓	✓
Tidak bekerja pada lembaga pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working in government agency within the last three years	✓	✓
Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working in the Company or its affiliation within three last years	✓	✓
Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya Not having any financial affiliation either directly or non-directly with the Company or other companies providing service and product to the Company and its affiliation	✓	✓
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perseroan Free from business interest and activity or other relationships that may constraint or disrupt the Board of Commissioners' capability to act and think independently in the Company's circumstances.	✓	✓



Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku. Tiap-tiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

The Board of Directors is the organ of the Company which carries out the management actions to achieve the Company's vision and mission in the best interests of the Company. The Board of Directors is also responsible for representing the Company both inside and outside the court in accordance with the applicable Articles of Association of the Company. Each member of the Board of Directors can perform the task and make decisions according to the division of duties and authority.

PERSYARATAN, KOMPOSISI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mengenai Persyaratan, Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Direksi meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Selain persyaratan formal dan material, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*). Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta pengalaman di bidang usaha Perseroan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

THE BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT AND DISCHARGE REQUIREMENT, COMPOSITION

The Terms, Composition, Appointment and Dismissal of the Board of Directors refers to Regulation Articles of Association and Minister of SOE Regulation No. Per-03/MBU/02/2015 regarding Board of Directors Member Appointment and Discharge Requirement and Procedure. The mandatory requirement for Board of Directors member candidate includes formal and material requirements. Other than formal and material requirements, the Board of Directors member candidate shall also comply with fit and proper test requirement. The Board of Directors member shall have sufficient and relevant knowledge with their position as well as experience in the Company's business field and/or other fields that are relevant with their positions.

KOMPOSISI DIREKSI

Menurut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-148/MBU/08/2015, SK-263/MBU/12-2016, SK-210/MBU/09/2017 dan SK-62/MBU/04/2017, susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Pursuant to Copy of Minister of State-Owned Enterprise Decree No. SK-148/MBU/08/2015, SK-263/MBU/12-2016, SK-210/MBU/09/2017 dan SK-62/MBU/04/2017, the Board of Directors composition as of December 31, 2018 is as follows:

No.	Nama Direksi Name of Directors	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Jabatan Date of Appointment	SK Pengangkatan Appointment Decree
1	Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director	26 September 2017 September 26, 2017	SK-210/MBU/09/2017
2	Tri Andayani	Direktur Keuangan Director of Finance	03 April 2017 April 03, 2017	SK-62/MBU/04/2017
3	Ganefi	Direktur SDM dan Umum Director of HR & General Affairs	26 September 2017 September 26, 2017	SK-210/MBU/09/2017
4	Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	01 Desember 2016 December 01, 2016	SK-263/MBU/12-2016
5	Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	03 April 2017 April 03, 2017	SK-62/MBU/04/2017
6	Harry Boediarso Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Ocean Freight and Toll Laut	21 Agustus 2015 August 21, 2015	SK-148/MBU/08/2015



Direksi Board of Directors

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pengelolaan Perseroan, Direksi Perseroan berpedoman pada *Board Manual* yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan di bidang pasar modal. Piagam ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab serta kewenangannya secara objektif dan efektif guna merealisasikan visi dan misi Perseroan.

Pembagian tugas masing-masing fungsi Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Tugas pokok Direktur Utama selaku anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Perseroan dan melakukan tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Salam;
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh para Direktur;
3. Mengendalikan pelaksanaan tugas Internal Audit, DPA-QHSSE, *Corporate Secretary*, *Corporate Planning & Risk Management*, *Legal*, bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya selaku Direksi Perseroan mengendalikan pelaksanaan fungsi staf Kantor Pusat;
4. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh unit kerja Kapal dan Kantor Cabang/*Terminal Point* serta Unit Bisnis Strategis/*Strategic Business Unit* (SBU) Perseroan secara menyeluruh.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang

Membina pengelolaan pemasaran, operasi dan pelayanan kapal penumpang dan perintis serta keagenan & *tour* agar dicapai kinerja citra produk jasa (*brand image*), pangsa pasar (*market share*), volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa Perseroan, pendapatan usaha jasa angkutan penumpang Perseroan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal;

THE BOARD OF COMMISSIONERS TASKS AND RESPONSIBILITIES

In executing the Company's management duties and authority, the Company's Directors are guided by Board Manual composed with due regard to the Company's Limited Liability Company Law, Company's Articles of Association, and capital market regulations. The Charter is intended to serve as a guideline for the Board of Directors in carrying out its roles and responsibilities and authorities objectively and effectively in order to realize the Company's vision and mission.

As for the tasks division of each function of the Board of Directors is as follows:

President Director

The main duties of the President Director as a member of the Board of Directors are as follows:

1. Conducting the Company management in accordance with the prevailing regulations for the company and performing other tasks as specified by Shareholders;
2. Controlling the Directors policies implementation is conducted by the Board of Director
3. Controlling the Internal Audit duties implementation, DPA-QHSSE, *Corporate Secretary*, *Corporate Planning & Risk Management*, *Legal*, along with Directors in its position as the Company's Board of Directors controlling the implementation of Head Office staff function;
4. Controlling the Board of Directors policies implementation which is organized by the Ship and Branch/*Terminal Point* work units as well as the overall Business Strategic Business Unit (SBU).

Passenger Transportation Director

Fostering the marketing management, operation and service of passenger and perintis ships and for the agent & *tour* in order to achieve the performance of brand image, market share, service sales volume, customer service growth, optimum and prioritize safety performance of shipping, service quality and optimal service user satisfaction;



Direksi

Board of Directors

Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut

Membina pengelolaan kegiatan pemasaran angkutan barang kapal penumpang & perintis, pemasaran kapal tol laut dan temak, operasi dan pelayanan kapal tol laut & ternak serta pengembangan usaha angkutan barang & tol laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja citra produk jasa (*brand image*), pangsa pasar (*market share*), volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa Perseroan, pendapatan usaha jasa angkutan barang Perseroan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal;

Direktur Armada

Membina pengelolaan kegiatan penyediaan dan penyiapan pakai sertifikat, fasilitas serta peralatan nautika, teknika, penyediaan dan modifikasi kapal, bahan bakar kapal dan *surveyor* serta *parenting* SBU Galangan PELNI Surya Surabaya agar dicapai kinerja kelaikan laut (*seaworthiness*), kesiapan pakai (*semiceability performance*), kehandalan (*reliability performance*), efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penyiapan pakai alat produksi jasa angkutan laut Perseroan yang optimal;

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Membina kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, administrasi dan pelayanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan di wilayah kerja Perseroan serta pengelolaan aset dan sebagai *parenting* untuk SBU Hotel Bahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja produktivitas sumber daya manusia dan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan administrasi serta layanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan dan ketertiban umum serta pemanfaatan aset pada wilayah kerja Perseroan yang optimal, mengendalikan pelaksanaan tugas Teknologi Informasi serta pengadanaa barang dan jasa.

Direktur Keuangan

Membina pengelolaan keuangan Perseroan yang meliputi pengelolaan kegiatan akuntansi, perbendaharaan, serta kewajiban layanan publik (*Public Service Obligation/PSO*) dan subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja pengelolaan keuangan, serta PSO dan subsidi yang optimal;

Director of Tol Laut & Cargo Transportation

Building the management of passenger & perintis ship, marketing activities, Tol Laut and Cattle ships marketing, operation and service of Tol Laut & Cattle ships and also the development of Tol Laut & freight shipping transportation business in accordance with the prevailing provisions, in order to achieve the performance of the service products image (brand image) , market share, sales volume of services, The Company customers growth for services, optimal corporate freight services income and prioritizing shipping safety performance, service quality and optimal service user satisfaction;

Fleet Director

Fostering the management of supply and preparatory activities using certificates, facilities and nautical equipment, technics, provision and modification of ships, ship fuel and surveyors and parenting SBU PELNI Surya Surabaya shipyard to achieve the performance of sea worthiness, semi capability performance, reliability (reliability performance), effectiveness and efficiency of the provision and preparation of the optimal production equipment of the company's sea transportation services;

Director of Human Capital and General Affairs

Fostering human resource management activities and organization, administration and public service of office household, safeguarding in the Company work area and asset management and as parenting for SBU Hotel Bahtera in accordance with applicable provisions in order to achieve the productivity performance of human resources and organizational, human resources quality improvement, order and smoothness of administration implementation and public service of office household, security and general order as well as asset utilization in optimal company work area, controlling the Information Technology implementation and goods and services procurement.

Director of Finance

Fostering the Company's financial management which includes the management of accounting activities, treasury, as well as public service obligations (PSO) and subsidies along with the prevailing provisions in order to achieve financial management performance, as well as the optimal PSO and subsidies;



Direksi Board of Directors

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk antisipasi atas masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Capacity enhancement is deemed important for the Board of Directors to keep updating information on the latest developments of the Company's business, the prevailing laws and regulations and to anticipate future problems for the sustainability and progress of the Company.

Nama Direksi Name of Directors	Jabatan Position	Program Peningkatan Kapasitas Capacity Building Program		
		Tanggal Date	Subyek Subject	Tempat Venue
Ganefi	Direktur SDM dan Umum Director of HR & General Affairs	18 Januari 2018 January 18, 2018	<i>Integrated Talent Management System (ITMS) a Leader Create Leaders.</i> Integrated Talent Management System (ITMS) a Leader Create Leaders.	Bandung
		29-31 Agustus 2018 August 29-31, 2018	<i>Sharing Session III FHCI "Talent Mobility & People Analytic in Implementation"</i> Sharing Session III FHCI "Talent Mobility & People Analytic in Implementation"	Medan
		21-23 November 2018 November 21-23, 2018	<i>Sharing Session IV FHCI "Digital Leadership"</i> Sharing Session IV FHCI "Digital Leadership"	Makasar

PROGRAM PENGENALAN/ORIENTASI DIREKSI

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wajib diberikan program pengenalan dan pendalaman pengetahuan bagi Anggota Direksi Perseroan. Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan, karena Anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan.

Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.

Pada tahun 2018, tidak ada program orientasi Direksi.

THE BOARD OF DIRECTORS ORIENTATION PROGRAM

For smooth duty implementation, the Board of Directors member shall be provided by orientation and knowledge development programs. The orientation program is essential to be conducted due to the Board of Directors members may be appointed from various background, therefore, to establish as solid team work, the Orientation Program becomes mandatory.

The orientation program provided to the Board of Directors members includes aspects as follows:

1. Explanation about duty and responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors based on the legal aspect.
2. Implementation of *Good Corporate Governance* principles by the Company.
3. Explanation about the Company in relation with purpose, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risk and other strategic issues.

In 2018, there is no the Board of Directors orientation program



Direksi

Board of Directors

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris & Direksi PT PELNI (Persero) No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 tentang tentang Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tata laksana kerja tersebut berisi panduan bagi Direksi yang berisikan, antara lain:

1. Kriteria Anggota Direksi dan Masa Jabatan Direksi;
2. Tanggung Jawab Direksi;
3. Tugas dan Kewajiban Direksi;
4. Wewenang Direksi;
5. Hak-Hak Direksi;
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
7. Etika Jabatan;
8. Penetapan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan;
9. Komposisi dan Pembidangan Tugas;
10. Rapat Direksi;
11. Organ Pendukung Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga 31 Desember 2018, Direksi Perseroan belum membentuk komite-komite di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai Organ Pendukung Direksi.

BOARD MANUAL FOR THE BOARD OF DIRECTORS

In relation with other corporate structures related with duty and responsibility implementation, the Board of Commissioners has Working Guideline (Board Manual) for the Board of Commissioners as working guideline for the Board of Commissioners that is ratified under under PT PELNI (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners Joint Decree No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and Board of Directors that discloses:

1. Board of Directors Members Criteria and Serving Period;
2. Board of Directors' Responsibility;
3. Board of Directors' Duty and Obligation;
4. Board of Directors' Authority;
5. Board of Directors' Rights;
6. Orientation Program and Capacity Building;
7. Position Ethics;
8. Stipulation of Company Management Policy;
9. Composition and Segregation of Duty;
10. Board of Directors Meeting;
11. Board of Directors Supporting Structure.

EVALUATION TO COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2018, the Board of Directors had not yet established Committee under the Board of Directors. Implementation of the Board of Directors' duty is assisted by Corporate Secretary and Internal Audit Unit as Board of Directors' Supporting Structure.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Board of Commissioners & Board of Directors Meeting Attendance Frequency

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Demi terciptanya efektifitas dan efisiensi jalannya perusahaan, maka selama 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 14 kali Rapat Dewan Komisaris. Adapun tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

THE BOARD OF COMMISSIONNERS MEETING

To effectively and efficiently run the Company, during 2018 the Board of Commissioners has held 14 times of the Board of Commissioners Meeting. The attendance levels of the Board of Commissioners are as follows:

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris 2018

Board of Commissioners Attendance Frequency 2018

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Total Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Leon Muhamad*	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100%
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	13	93%
Sudarto	Komisaris Commissioner	14	12	85%
Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	14	11	78%
Satya Bakhti Parikesit****	Komisaris Commissioner	14	6	43%
Bambang Prihartono**	Komisaris Utama President Commissioner	12	11	92%
Danang Parikesit***	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%

* Menjabat sampai dengan Februari 2018 | Served until February 2018

** Menjabat mulai dari Februari 2018 | Served from February 2018

*** Menjabat mulai dari Juli 2018 | Served from July 2018

**** Cuti Ibadah Haji | Annual Leave for Hajj

Agenda Rapat Dewan Komisaris 2018

Dalam pelaksanaannya, rapat Dewan Komisaris memiliki agenda untuk mengatur topik bahasan rapat yang akan di diskusikan. Berikut ini adalah agenda rapat Dewan Komisaris tahun 2018:

The Board of Commissioners Meeting Agenda 2018

The Board of Commissioner's meeting has an agenda to arrange meeting topic that could be discussed. There are the Board of Commissioner's meeting agenda year 2018 as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2018 Board of Commissioners Meeting Agenda 2018
1	22 Januari 2018 January 22, 2018	1. Pembahasan persiapan RUPS (RKAP) 2018 PT PELNI (Persero). Discussion on preparations for the AGMS (RKAP) 2018 of PT PELNI (Persero). 2. Lain-lain. Others.
2	15 Februari 2018 February 15, 2018	1. Pembahasan Laporan Manajemen <i>Un-Audited</i> tahun 2017. Discussion of the 2017 Unaudited Management Report. 2. Lain-lain. Others.
3	13 Maret 2018 March 13, 2018	1. Perkenalan dan <i>review</i> program kerja Dewan Komisaris. Introduction and reviews on the work program of the Board of Commissioners. 2. Lain-lain. Others.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2018 Board of Commissioners Meeting Agenda 2018
4	22 Maret 2018 March 22, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Audited Tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion on the Audited Management Report 2017 of PT PELNI (Persero) Pembahasan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Tindakan lanjut temuan BPK-RI yang berulang, yaitu temuan yang masalahnya cukup sistemik berkaitan dengan Permakanan dan Nilai Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM). Discussion on Evaluation Results of Audit Committee regarding the follow-up continuity problems of Indonesian Supreme Audit Institution which is the findings on systematically problems related to food availability and the basic value of cargo unit (SDUM). Lain-lain. Others.
5	19 April 2018 April 19, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran bulan Januari dan Februari 2018. Discussion on Budget Realization Reports for January and February 2018. Pembahasan surat masuk terkait usulan Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT PBM SBN dan PT RS PELNI. Discussion on the incoming letter regarding to Candidates of the Board of Commissioners of PT PBM SBN and PT RS PELNI. Lain-lain. Others.
6	07 Juni 2018 June 07, 2018	Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan April 2018. Discussion of Budget Realization Reports up to April 2018.
7	05 Juli 2018 July 05, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran bulan Mei 2018. Discussion on Budget Realization report's May 2018. Laporan pelaksanaan angkutan Lebaran tahun 2018. The implementation of Homecoming transportation report. Lain-lain. Others.
8	13 Juli 2018 July 13, 2018	Usulan Direksi tentang perubahan Struktur Organisasi PT PELNI (Persero) 2018. Proposal of Directors regarding changes to the Organizational Structure of PT PELNI (Persero) 2018.
9	01 Agustus 2018 August 01, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Penunjukan Ketua Komite Risiko. Head of Risk Committee appointment. Pembagian tugas Dewan Komisaris. Distribution of The Board of Commissioners. Usulan penghapusbukuan dan pemindahtanganan Barang Bekas di Gedung Presmart Tanjung Priok. Proposal for the write-off and transfer of Second hand Goods at Presmart Building, Tanjung Priok. Lain-lain. Others.
10	08 September 2018 September 08, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Komite Audit atas LRA Keuangan bulan Juli sampai dengan Juli 2018 PT PELNI (Persero). Audit Committee Evaluation of the LRA Finance from July to July 2018 of PT PELNI (Persero). Risiko <i>Load Factor</i> dan risiko PSO. Load Factor and PSO Risks. Lain-lain. Others.
11	04 Oktober 2018 October 04, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan laporan realisasi anggaran bulan Agustus 2018. Discussion on August budget realization 2018 report. Pembahasan tindak lanjut laporan <i>Self Assessment</i> GCG PT PELNI. Follow-up discussion on GCG Self Assessment report of PT PELNI.
12	17 Oktober 2018 October 17, 2018	Pembahasan Tindak Lanjut kunjungan lapangan PELNI Surabaya tanggal 3 Oktober 2018 mengenai: Discussion of PELNI Surabaya visit Followed-up on October 3, 2018 regarding: <ol style="list-style-type: none"> Pemaparan tata kelola dan proses bisnis galangan. Exposure to shipyard governance and its business processes. Pemaparan tata kelola dan proses bisnis pergudangan. Exposure to warehousing governance and its business process.
13	24 Oktober 2018 October 24, 2018	<ol style="list-style-type: none"> RKA Dewan Komisaris tahun 2019 PT PELNI (Persero). Work Plan of The Board of Commissioners 2019 of PT PELNI (Persero). Evaluasi Komite Audit atas konsep RKAP PT PELNI (Persero) tahun 2019. Audit Committee evaluation on 2019 RKAP Concept of PT PELNI (Persero).
14	26 Desember 2018 December 26, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Komite Audit atas laporan keuangan Oktober sampai dengan November 2018. Audit Committee evaluation on October until November financial report 2018. Evaluasi Komite Risiko terkait sinkronisasi resiko atas <i>asset Idle</i>, keamanan Armada, penyempurnaan anggaran dasar, progress pengadaan <i>Spare Part</i> serta mitigasi Bea masuk Barang pada Ditjen Bea dan Cukai. Risk Committee Evaluation related to risk synchronization of Idle assets, Fleet security, refinement of articles of association, procurement progress of Spare Parts and mitigation of Goods Import Duty at the Directorate General of Customs and Excise.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

RAPAT DIREKSI

Direksi dapat menyelenggarakan rapat untuk mengambil keputusan penting terkait kegiatan operasional dan bisnis Perseroan. Keputusan Direksi harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka keputusan rapat akan diputuskan oleh Direktur Utama.

Selama tahun 2018, Rapat Direksi secara internal maupun gabungan bersama Dewan Komisaris telah terselenggara sebanyak 46 kali.

Berikut adalah frekuensi kehadiran rapat Direksi yang terselenggara selama tahun 2018, antara lain :

Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi 2018

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Direksi Total Board of Directors Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	46	45	98%
Tri Andayani	Direktur Keuangan Director of Finance	46	42	91%
Ganefi	Direktur SDM & Umum Director of HR & General affairs	46	45	98%
Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	46	45	98%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	46	44	95%
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	46	43	93%

Agenda Rapat Direksi 2018

Dalam pelaksanaannya, rapat Direksi memiliki agenda untuk mengatur topik bahasan rapat yang akan di diskusikan.

THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

The Board of Directors may organize meeting to take important decisions related with the Company's operational and business activities. The Board of Directors' resolutions shall be taken based on collective consensus. If the consensus is not achieved, the resolutions will be taken by voting and if both of agree and disagree resolution are equal, than will be decided by President Director.

The Board of Directors Internal Meetings held in 46 meetings throughout 2018.

List of attendance and discussion agenda in the Board of Directors meetings in 2018 are as follows:

The Board of Directors Meeting Frequency 2018

The Board of Directors Meeting Agenda 2018

In its implementation, the Board of Directors meeting has an agenda to organize the discussion topics.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2018 Board of Directors Meeting Agenda 2018
1	10 Januari 2018 January 10, 2018	<ol style="list-style-type: none"> <i>Follow Up</i> atas Arahan Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan RI. Follow-up the direction of General-Directorate of The Ministry of Transportation of Republic of Indonesia. Budaya Perusahaan. Corporate Culture. Pembahasan Permakanan ACS. ACS Food discussion.
2	30 Januari 2018 January 30, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Hasil Temuan Audit DPA. The finding results of DPA Audit. Presentasi Keterikatan Pegawai oleh PPM. Employee engagement presentation by PPM. RKAP <i>Challenge</i> & Persiapan RUPS Anak Usaha. The Company's Budget Plan Challenge & GMS preparation of Subsidiaries. Paparan Pedoman Manajemen Proses Bisnis. The Guidelines of Business Process Management Presentation
3	06 Februari 2018 February 06, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan FGD Kementerian BUMN. FGD preparation of The Ministry of State-owned Enterprises. Persiapan Rapat Pimpinan PT PELNI (Persero). Executive Meeting preparation of PT PELNI (Persero).
4	13 Februari 2018 February 13, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Permasalahan Operasional Penugasan. Assignment Operational Constraints. FGD CEO BUMN di KM. Kelud. FGD of CEO of State-owned Enterprises on MV. Kelud.
5	20 Februari 2018 February 20, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Permasalahan Operasional Penugasan. Assignment Operational Constraints. Pengadaan Kontainer <i>Dry</i> dan <i>Reefer</i>. Dry and Reefer Container Procurement. Modifikasi KM. Kelimutu menjadi kapal wisata. MV. Kelimutu Modification into Tourism Ship. Pengadaan <i>sparepart</i> kapal. Ship <i>Sparepart</i> Procurement. Persiapan <i>Peak Season</i> Angkutan Lebaran 2018. Peak Season Preparation of Homecoming Transportation 2018. Permakanan Penumpang. Passenger Food.
6	06 Maret 2018 March 06, 2018	<ol style="list-style-type: none"> <i>Draft</i> Laporan Manajemen PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) management report draft. Optimalisasi Aset PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) Asset Optimization. Kerjasama PT Rumah Sakit PELNI dan PT Pertamedika. PT Rumah Sakit PELNI cooperation with PT Pertamedika. Progres Audit KAP. Public Accounting Firm Audit Progress. HUT PELNI 66 Tahun. 66th PELNI Anniversary.
7	12 Maret 2018 March 12, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Kapal Perintis SANUS 46. SANUS 46 Perintis Ship. Mudik Lebaran Gratis Motor. Homecoming Transportation Complimentary for Motorcycle Rider. Laporan Manajemen Bulan Januari 2018. Management Report of January 2018. Kajian Modifikasi KM Kelimutu menjadi kapal wisata. MV Kelimutu Modification Review into Tourism Ship. Uang Muka Operasional. Operational Down Payment. Pemaparan <i>Draft</i> SO Baru. New SO Draft Presentation.
8	20 Maret 2018 March 20, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Cabang bulan Januari-Februari 2018. Branches Performance Presentation of January – February 2018.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2018 Board of Directors Meeting Agenda 2018
9	22 Maret 2018 March 22, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan Dewan Komisaris. The Preparation of the Board of Commissioners Meeting Temuan Permakanan dan SDUM. Food and SDUM constraints finding.
10	27 Maret 2018 March 27, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Cabang bulan Januari-Februari 2018. Branches Performance Presentation of January - February 2018.
11	29 Maret 2018 March 29, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Cabang bulan Januari-Februari 2018. Branches Performance Presentation of January - February 2018
12	03 April 2018 April 03, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Operasional Tol Laut. Tol Laut Operational. Tindaklanjuti <i>Sparepart</i> Kapal. Follow-up ship sparepart. Persiapan Lebaran 2018. The Preparation of Homecoming Transportation 2018. Progres Audit BPK dan KAP. Financial Service Agency and Public Accounting Firm Audit Progress. Pengadaan Kapal PMN. PMN Ship procurement. Kesimpulan Evaluasi Kinerja Cabang Periode Januari-Februari 2018. The evaluating conclusion of branches performance of January - February 2018.
13	10 April 2018 April 10, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pemberitaan video pembuangan sampah KM. Sanus 50. MV. Sanus 50 Waste Disposal issue video. Progres Laporan Keuangan Triwulan-1. The First Quarter of Financial Report Progress. Hasil Audit BPK dan KAP. Financial Service Agency and Public Accounting Firm Audit Results. <i>Update</i> Kontrak Penugasan. Assignment Contract Update. Insiden KM. Wilis. MV. Wilis Incident. Laporan Pendahuluan modifikasi KM Kelimutu. Preliminary Report of MV Kelimutu modification. Efektivitas Pengelolaan Dokumentasi. Document Management Effectiveness. Penambahan Modal PT SBL. Capital additional for PT SBL.
14	16 April 2018 April 16, 2018	<ol style="list-style-type: none"> <i>Mapping</i> SDM Laut. Offshore Human Resources Mapping.
15	17 April 2018 April 17, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Angkutan Lebaran 2018. The Preparation of Homecoming Transportation 2018.
16	02 Mei 2018 May 02, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Hasil Rapat Kerja BUMN Hadir Untuk Negeri di Solo. Meeting result of BUMN Hadir Untuk Negeri in Solo. Persiapan Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting Preparation of The Board of Commissioners and Directors. Progress Pengadaan Kontainer. Container Procurement Progress. Pembahasan PT Aspan. PT Aspan Discussion. MOU dengan Himbara. MOU Assignment with Himbara. Laporan <i>Survey</i> Kapal Wisata di Cyprus. Tourism Ship Survey Report in Cyprus. Pembahasan Konsep Revisi PM 65 Tahun 2015. The Revision Concept Discussion of PM 65 of 2015



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2018 Board of Directors Meeting Agenda 2018
17	15 Mei 2018 May 15, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi Komunikasi dalam Persiapan Angkutan Mudik Lebaran 2018. Communication Strategy for the preparation of Homecoming Transportation 2018.2. Konsep dan Permasalahan PSO. PSO Concept and Constraints.3. Persiapan RUPS Anak Usaha. GMS Preparation of Subsidiaries.
18	28 Mei 2018 May 28, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Persiapan Angkutan Lebaran 2018. The Preparation of Homecoming Transportation 2018.2. Kejadian Kecelakaan KM. Bukit Raya. MV. Bukit Raya Accident.3. Gambaran Kapal Barang. Cargo Ship Overview.4. Progress IPO RS PELNI. IPO Progress of RS PELNI (Hospital).5. Pertemuan dengan Direktur Keuangan dan Direksi DPS Director of finance discussion with the Directors of DPS (Subsidiary).
19	26 Juni 2018 June 26, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Angkutan Lebaran Tahun 2018. Evaluation on Homecoming Transportation 2018.
20	11 Juli 2018 July 11, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja Semester 1 tahun 2018. Semester 1 Performance of 2018 Report.2. Kick Off RKAP 2019. The Company's Budget Plan 2019 Kick off.
21	17 Juli 2018 July 17, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi bisnis dalam mencapai target kinerja semester II. Business strategy in achieving the performance target of Semester II.
22	23 Juli 2018 July 23, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi Bisnis UAP (Lifestyle & wisata). UAP Business strategy (Lifestyle & Tourism).
23	24 Juli 2018 July 24, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Lanjutan Rapat Direksi. The Board of Directors Meeting.
24	25 Juli 2018 July 25, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat Direksi lanjutan. The Board of Directors Meeting.
25	27 Juli 2018 July 25, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat Direksi lanjutan. The Board of Directors Meeting.
26	07 Agustus 2018 August 25, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi Bisnis. Business Strategy.
27	14 Agustus 2018 August 14, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. PSO. PSO.
28	21 Agustus 2018 August 21, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja Manajemen Semester 1 Tahun 2018. Management Performance of Semester 1 of 2018.
29	29 Agustus 2018 August 29, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Remunerasi Pegawai. Employee Remuneration.
30	04 September 2018 September 04, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Manajemen Bulan Juli 2018. Management Report of July, 2018.2. Serikat Pekerja PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) Workers Union.
31	12 September 2018 September 12, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. PSO dan Subsidi PT PELNI (Persero). PSO and Subsidies of PT PELNI (Persero).2. Serikat Pegawai PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) Workers Union.3. Remunerasi Pegawai. Employee Remuneration.4. Prospek Cabang Singapore. Singapore Branch Prospect.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2018 Board of Directors Meeting Agenda 2018
32	18 September 2018 September 18, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat dengan Bapak Menteri Perhubungan. Preparation for a meeting with the Minister of Transportation. Struktur Organisasi Rumah Sakit PELNI. Organizational Structure of RS PELNI (Hospital). Penyerapan PSO & Subsidi. PSO and Subsidies absorption. Pendapatan Perkapalan. Shipping Revenues. Evaluasi Program <i>Auto collection</i> di Pelindo 4. Auto Collection Program Evaluation at Pelindo 4. Kinerja Optimalisasi Aset. Asset Optimization Performance.
33	25 September 2018 September 25, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Bulan Agustus 2018. Management Report of August 2018. Persiapan IBD EXPO. IBD Expo Preparation. Progres Pengadaan Kontainer. Container Procurement Progress.
34	02 Oktober 2018 October 02, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Progres Aksi Bantuan ke Palu dan Sekitarnya. Assistance Action Progress to Palu and Its Surroundings.
35	09 Oktober 2018 October 09, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja. The Performance Presentation.
36	16 Oktober 2018 October 16, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Kick off Meeting Pengembangan dan Pengelolaan SDM PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) Human Resources Development and Management kick off meeting. Finalisasi RKAP 2019. The Company's Budget Plan 2019 finalization.
37	23 Oktober 2018 October 23, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Penarikan Kapal KM Sabuk Nusantara 39. Withdrawal of MV Sabuk Nusantara 39. Persiapan Rapat Gabungan BOC dan BOD. Joint Meeting between The Board of Commissioners and Directors. Hasil pertemuan dengan Telkom. The minutes of meeting with Telkom. Progress Implementasi EDC. EDC implementation progress.
38	13 November 2018 November 13, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Progres Pengelolaan dan Pengembangan SDM PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) Human Resources Development and Management Progress. Persiapan <i>Peak Season</i> Natal 2018 dan Tahun baru 2019. Peak Season Preparation of Christmas 2018 and New Year 2019. Kajian Kapal Phinisi Phinisi ship review.
39	21 November 2018 November 21, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Kapal Phinisi. Phinisi ship.
40	27 November 2018 November 27, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Kejadian Pembuangan Sampah di KM Nggapulu. MV Nggapulu waste disposal issues. Tindaklanjut Peraturan Menteri No 65 tentang Komponen Biaya. Follow-up the Ministry regulation No. 65 concerning Cost Component. Pelaksanaan <i>Redpack</i>. The minutes of meeting with Telkom. Penggunaan <i>Vessel Web Analysis</i>. Vessel Web Analysis Usage Progres SCM Siparsel. SCM Siparsel progress.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2018 Board of Directors Meeting Agenda 2018
41	04 Desember 2018 December 04, 2018	1. Kinerja Manajemen. Management Performance.
42	05 Desember 2018 December 05, 2018	1. Pemaparan Direktorat Angkutan Barang. Freight Directorate Presentation.
43	07 Desember 2018 December 07, 2018	1. Pemaparan PT SBN. PT SBN Presentation. 2. Pemaparan Direktorat SDM. Human Resources Directorate Presentation. 3. Pemaparan TI. IT Presentation. 4. <i>Sharing Season</i> Dirjen Hubla. Sharing Season of General-Directorate of Sea Transportation. 5. <i>Sharing Season</i> Bp. Muchlis Budiono. Sharing Season with Mr. Muchlis Budiono.
44	11 Desember 2018 December 11, 2018	1. Pembahasan PSO dan subsidi. PSO and Subsidize discussion. 2. Pembahasan PMN. PMN discussion. 3. Angkutan Batubara PLN. PLN Coal Transportation. 4. Reparasi Kapal KM Kelimutu. MV Kelimutu Ship repairation. 5. Implementasi EDC. EDC implementation.
45	19 Desember 2018 December 19, 2018	1. <i>Peak Season</i> . Peak Season.
46	26 Desember 2018 December 26, 2018	1. Laporan Manajemen s.d Oktober 2018. Management Report until October 2018. 2. Laporan Manajemen s.d November 2018. Management Report until November 2018.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai Realisasi dari hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 31 Rapat Gabungan. Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS CONSOLIDATION MEETING

As a realization of work relationship between the Board of Commissioners and Directors, throughout 2018, the Board of Commissioners and Directors held 31 Joint meetings. The frequency and attendance rates of joint meeting during 2018 described in the following table below:



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

Frekuensi Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2018

Board of Commissioners and Board of Directors Consolidation Meeting Attendance Frequency of the 2018

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Leon Muhamad*	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100%
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	31	25	81%
Sudarto	Komisaris Commissioner	31	22	71%
Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	31	22	71%
Satya Bakhti Parikesit****	Komisaris Commissioner	31	12	39%
Bambang Prihartono**	Komisaris Utama President Commissioner	29	27	93%
Danang Parikesit***	Komisaris Independen Independent Commissioner	23	12	52%
Direksi Board of Directors				
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	31	10	32%
Tri Andayani	Direktur Keuangan Director of Finance	31	11	35%
Ganefi	Direktur SDM & Umum Director of HR & General affairs	31	16	51%
Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	31	10	32%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	31	11	35%
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	31	16	51%

* Menjabat sampai dengan Februari 2018 | Served until February 2018

** Menjabat mulai dari Februari 2018 | Served from February 2018

*** Menjabat mulai dari Juli 2018 | Served from July 2018

**** Cuti Ibadah Haji | Annual Leave for Hajj

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2018

Dalam pelaksanaannya, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi memiliki agenda untuk mengatur topik bahasan rapat yang akan didiskusikan. Berikut adalah agenda Rapat Gabungan yang dilaksanakan pada 2018:

The Board Commissioners and Directors Joint Meeting Agenda 2018

In its implementation, the Board of Commissioners and Directors joint meeting has an agenda to organize the discussion topics. There are the joint meeting agenda year 2018 as follows:



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Gabungan 2018 Joint Meeting Agenda 2018
1	22 Januari 2018 January 22, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan RUPS RKAP Tahun 2018 PT PELNI (Persero). The Preparation of GMS of The Company's Budget Plan 2018 of PT PELNI (Persero). Lain-lain. Others.
2	15 Februari 2018 February 15, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Manajemen <i>un-audited</i> tahun 2017. Un-audited Management 2017 Discussion. Lain-lain. Others.
3	13 Maret 2018 March 13, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Perkenalan dan <i>Review</i> Program Kerja Dewan Komisaris. Socialization and review on the work plan of the Board of Commissioners. Lain-lain. Others.
4	14 Maret 2018 March 14, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Peran PERLA untuk mendukung Tol Laut. PERLA encouragement in supporting Tol Laut program
5	19 Maret 2018 March 19, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Pembahasan Peran PERLA untuk mendukung Tol Laut. Discussion on PERLA encouragement in supporting Tol Laut program.
6	22 Maret 2018 March 22, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen <i>Audited</i> Tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion of the 2017 Audited Management Report of PT PELNI (Persero). Pembahasan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Tindak lanjut temuan BPK-RI yang berulang, yaitu temuan yang masalahnya cukup sistemik berkaitan dengan Permakanan dan Nilai Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM). Discussion of Audit Committee Evaluation Results for repeated follow-up The Audit Board of The Republic of Indonesia's findings, which is quite systemic in relation to the Feeding and Cargo Values (SDUM). Lain-lain. Others.
7	27 Maret 2018 March 27, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Maritim <i>Logistic</i>. Discussion on Maritime Logistic.
8	12 April 2018 April 12, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Laporan Keuangan (Konsolidasian) tahun 2017 PT PELNI (Persero). Financial Statements (Consolidated) 2017 Presentation of PT PELNI (Persero). Lain-lain. Others.
9	19 April 2018 April 19, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari dan Februari Tahun 2018. Discussing the Budget Realization Reports for January and February 2018. Pembahasan Surat masuk terkait calon Komisaris Anak Perusahaan PT SBN dan Rumah Sakit PT PELNI (Persero). Discussing the Incoming Letters related to candidates for Commissioners of Subsidiaries of PT SBN and PT PELNI (Persero) Hospital. Lain-lain. Others.
10	23 April 2018 April 23, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Penyusunan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero). Discussing the preparation of financial statements of PT PELNI (Persero).
11	26 April 2018 April 26, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Laporan Kinerja Divisi Teknologi Informasi Tahun 2017. Evaluating the 2017 performance report of Information Technology Division.
12	03 Mei 2018 May 03, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan <i>E-ticketing</i> PT PELNI (Persero). Discussing E-ticketing of PT PELNI (Persero).
13	07 Juni 2018 June 07, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Realisasi Kegiatan Usaha s.d Bulan April Tahun 2018 PT PELNI (Persero). Discussing the Business Activity Realization Report in April 2018 of PT PELNI (Persero). Lain-lain. Others.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Gabungan 2018 Joint Meeting Agenda 2018
14	05 Juli 2018 July 05, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Realisasi Kegiatan Usaha s.d Bulan Mei Tahun 2018 PT PELNI (Persero). Discussion on Budget realization report to May 2018 of PT PELNI (Persero). Laporan Pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2018. The Implementation of 2018 homecoming transportation report. Lain-lain. Others.
15	13 Juli 2018 July 13, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran bulan Mei s.d Mei Tahun 2018. Discussing the Budget Realization Reports for May up to May 2018. Pembahasan Usulan Direksi Terkait Permohonan Persetujuan Perubahan SK Direksi Tentang Peraturan Perjalanan Dinas Direksi, Komisaris dan Komite Komisaris. Discussing the Directors regarding Requests for Approval of Amendments to Directors' Decree concerning Official Travel Regulations of Directors, Commissioners and Committees. Pembahasan Usulan Direksi Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT PELNI (Persero). Discussing the Directors' Proposal on Changes in the Organizational Structure of PT PELNI (Persero). Pembahasan <i>Progress</i> Tol Laut Tahun 2018. Discussion on Progress of Tol Laut in 2018. Lain-lain. Others.
16	01 Agustus 2018 August 01, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Penunjukkan Pgs Ketua Komite Risiko. Appointment of Acting Chairman of Risk Committee. Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Dividing the Duties of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero). Pembahasan surat masuk terkait usulan penghapusbukuan dan pemindahtanganan barang bekas di Gedung Persmat Tanjung Priok. Discussing the incoming letters regarding the proposed write-off and transfer of used goods in Tanjung Priok Persmat Building. Pembahasan Laporan Realisasi Triwulan II dan semester 1 Tahun 2018 PT PELNI (Persero). Discussing the Report of 2nd Quarter and 1st Semester of 2018 of PT PELNI (Persero) Lain-lain. Others.
17	03 Agustus 2018 August 03, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Strategis Program Tol Laut T.A. 2018. Discussing the strategic programs of Tol Laut for 2018 Financial Year.
18	08 Agustus 2018 August 08, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK, KAP, dan SPI. Follow up the findings from BPK, KAP and Internal Audit Unit. Laporan SPI Triwulan II Tahun 2018. Internal Audit Unit 2nd Quarter Report of 2018. Tindak Lanjut Penanganan Risiko Keselamatan Kapal dan <i>Asset Idle</i>. Follow up Risk Mitigation of Ship Safety and Asset Idle . Lain-lain. Others.
19	23 Agustus 2018 August 23, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal. Following up the audits results of Internal and External Auditors. Pembahasan realisasi PKPT s.d. Semester I 2018 dan rencana PKPT Semester II. Discussing the PKPT realization up to The first semester of 2018 and the PKPT Semester II plan.
20	04 September 2018 September 04, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Tata Kelola Admin Kapal. Evaluating Ship Administration Management. Penerapan Sanksi atas Fraud oleh Pegawai PT PELNI (Persero). Implementation of Sanctions for Fraud conducted by PT PELNI (Persero)'s Employees. TL Penggantian Kerugian oleh Oknum Keagenan. Replacement of Losses caused by Agencies Members. Sistem Logistik, <i>Inventory</i>, <i>Supply Chain</i> dan <i>Procurement</i> PT PELNI (Persero). PT PELNI (Persero) Logistics, Inventory, Supply Chain and Procurement Systems.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Board of Commissioners & Board of Directors Attendance Frequency

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Gabungan 2018 Joint Meeting Agenda 2018
21	08 September 2018 September 08, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Evaluasi Komite Audit atas LRA Bulan Juli Tahun 2018. Discussion on Audit Committee Evaluation about Budget Realization Report (LRA) on July 2018.. Pembahasan Risiko <i>Load Factor</i> dan Risiko PSO. Discussion on Load Factor Risk and PSO Risk. Pembahasan Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) Bulan Juli Tahun 2018. Discussion on Financial Report of PT PELNI (Persero) on July 2018. Implementasi Admin Kapal. Implementation of Ship Administration.
22	14 September 2018 September 14, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Potensi Pendapatan RS PELNI dari Kegiatan Konsultasi Teknologi Informasi kepada RS Lain dan Bentuk Unit Bisnis yang Sesuai. Discussion on the Revenue Potential of RS PELNI originating from Information Technology Consulting activities toward another hospitals and in the form of suitable business unit. Lain-lain. Others.
23	15 September 2018 September 15, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Pembahasan Tol Laut. Following up the discussion of Tol Laut.
24	27 September 2018 September 27, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Strategis Program Tol Laut Tahun 2018. Discussing the strategic plan of Tol Laut Program of 2018.
25	04 Oktober 2018 October 04, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Evaluasi Komite Audit atas LK PT PELNI (Persero) s.d. Bulan Agustus 2018. Discussion on Committee Audit Evaluation about Financial Report of PT PELNI (Persero) to August 2018. Pembahasan Tindak Lanjut Laporan <i>Self-Assessment</i> GCG PT PELNI (Persero). Discussion on Follow up GCG Self Assessment Report of PT PELNI (Persero).
26	17 Oktober 2018 October 17, 2018	<p>Pembahasan Tindak Lanjut Kunjungan Lapangan Surabaya tanggal 03 Oktober 2018, mengenai:</p> <p>Discussing Surabaya Shipyard Field Visit on October 3, 2018, regarding:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemaparan Tata Kelola dan Proses Bisnis Galangan Surya. Presentation of the Management and Business Process of the Surabaya Shipyard. Pemaparan Tata Kelola dan Proses Bisnis Pergudangan. Presentation of Management and Business Processes in Warehousing.
27	24 Oktober 2018 October 24, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan RKAP PT PELNI (Persero) Tahun 2019. Discussion on CBP of PT PELNI (Persero) 2019. Evaluasi Komite Audit Atas Konsep RKAP PT PELNI (Persero) Tahun 2019. Audit Committee Evaluation about PT PELNI (Persero)'s CBP Concept in 2019. Pembahasan Konsep RKAP PT PELNI (Persero) Tahun 2019. Discussion on PT PELNI (Persero) CBP Concept in 2019.
28	06 November 2018 November 06, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Komite Audit Laporan Triwulan III PT PELNI (Persero). Evaluation of the Audit Committee 3rd Quarter Report of PT PELNI (Persero). Pembahasan Konsep Surat Tanggapan DEKOM PT PELNI (Persero) atas LRA Triwulan III/2018. Discussing the Concept of Commissioners Response' Letter on LRA 3rd Quarter 2018.
29	21 November 2018 November 21, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan <i>Asset Idle</i>. Asset Idle Discussion.
30	22 November 2018 November 22, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Tol Laut dan <i>Pilot Project</i> Papua Discussing Tol Laut program and Papua Pilot Project.
31	26 Desember 2018 December 26, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Evaluasi Komite Audit Atas LK PT PELNI (Persero) s.d. Bulan Oktober 2018 s.d. bulan November 2018. Discussion on Audit Committee evaluation on October to November 2019 Fincancial Statements of PT PELNI (Persero). Evaluasi Komite Pemantauan Risiko terkait sinkronisasi risiko untuk <i>asset idle</i>, keandalan armada, Penyempurnaan Anggaran Dasar, Progres pengadaan <i>Spare part</i> serta Mitigasi Bea Masuk Barang Ditjen Bea dan Cukai. Evaluating Risk Management Committee related to risk synchronization for asset idle, fleet reliability, completing the article of Association, spare parts and import tariff mitigation in the Directorate General of Customs and Protection. Tindak Lanjut Rapat yang Lalu. Follow up the previous meeting. Laporan Keuangan s.d Oktober 2018 Financial Report to October 2018. Laporan Keuangan s.d November 2018. Financial Report to November 2018. Prognosa Laporan Keuangan sampai dengan Desember 2018. Prognosis of Financial statements until December 2018.



Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of the Board Of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendukung pengawasan atas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dalam hal nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Nominasi dan Remunerasi dari Dewan Komisaris sendiri, serta kriteria dan aturan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dibahas dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan sesuai dengan Ralalah RUPS PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Laporan Keuangan dan mengacu kepada peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan surat keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-148/MBU/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tahun 2018.

Merujuk surat kuasa Menteri BUMN Nomor S-554/MBU/D4/06/2018 tanggal 05 Juni 2018 dan memperhatikan keputusan RUPS PT PELNI (Persero) tentang persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun buku 2017 maka BUMN menetapkan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi 2018 serta insentif kinerja tahun Buku 2017.

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS. Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai hasil analisis dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan hal tersebut kepada Dewan Komisaris, untuk kemudian hasilnya diteruskan kepada RUPS. Pada tahun 2017, Prosedur Pengusulan dan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2018 serta tantien atas Kinerja Tahun Buku 2017 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners forms a Nomination and Remuneration Committee to support supervising the development and implementation of policies in nominations and remuneration of the Board of Commissioners and Directors. The nomination and remuneration of the Board of Commissioners, criteria and rules for appointing the members of the Nomination and Remuneration Committee, which are discussed and decided at the Board of Commissioners' Meeting.

The remuneration of the Board of Commissioners and Directors is given in accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PELNI (Persero) concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements and referring to the Minister of State-owned Enterprises regulation of the Republic of Indonesia No: PER: 04/MBU/2014 dated March 10, 2014 the Board of Commissioners and Directors and Supervisory Board of the State-Owned Enterprises and the Minister of State-owned Enterprises decree Number: SK148/MBU/05/2018 dated May 31, 2018 concerning the Board of Commissioners and Directors, and Supervisory Board of State-owned Enterprises on 2018 earnings.

Refers to the power of attorney of the Minister of State-owned Enterprises Number S-554/MBU/D4/06/2018 dated June 5, 2018 and considers to the Annual General Meeting of Shareholders decision of PT PELNI (Persero) concerning to approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements for the Fiscal Year of 2017, and State-owned Enterprises determined the Board of Commissioners and Directors income and also performance incentives for the fiscal year of 2017.

RECOMMENDATION AND DETERMINATION PROCEDURES ON THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors is determined through an AGMS. The amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors is based on the performance achievements of the Board of Commissioners and Directors, according to the results of the analysis and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee proposes this to the Board of Commissioners. Then, the results are forwarded to the AGMS. In 2017, the Procedure for Proposing and Determining Salary/Honorarium, Allowances and facilities for the fiscal year of 2018 and bonuses for the Fiscal Year Performance of 2017 for the Board of Commissioners and Directors were as follows:



Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

- Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
 - Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
 - Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana tabel terlampir.
 - Gaji/honorarium serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2018.
 - Bagi anggota Direksi yang sudah ada (*existing*) dalam hal berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1.a mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji pada tahun buku sebelumnya maka gaji anggota Direksi yang sudah ada (*existing*) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya.
 - Total tantiem/insentif kerja (IK) untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2017 ditetapkan sebesar Rp.7.977.670.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan:
 - Tantiem/IK Direktur Utama, anggota Direksi lainnya, dan Komisaris Utama masing-masing sebesar 100%, 90%, dan 45% dari tantiem/IK Direktur Utama, sedangkan tantiem/IK anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem/IK Komisaris Utama. Besaran tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2017.
 - Pajak penghasilan (Pph) atas tantiem/IK menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai Biaya Perusahaan.
 - BUMN wajib memberlakukan pedoman penetapan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret
- Salary / Honorarium, Benefits and Facilities
 - The President Director's salary was determined at Rp150.000.000 (one hundred and fifty million rupiah) per month. The salary of other Directors was 85% from President Director's salary.
 - The President Commissioner's honorarium was set at 45% of the President Director's salary, while the honorarium of the Board of Commissioner members is set at 90% from the President Commissioner's honorarium.
 - Benefits and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners are given as the attached table.
 - The salary/honorarium, allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2018 has been effective from January 1, 2018.
 - For existing members in terms of the position factor of composition as referred in letter 1.a, the salary is received becoming smaller than the salary in the previous financial year, the salary of the existing members of the Board of Directors uses the salary received in the previous financial year.
 - Total bonuses / work incentives (IK) for the Board of Commissioners and Directors for the financial year of 2017 was set at Rp7.977.670.000, - (Seven billion nine hundred seventy-seven million six hundred seventy thousand rupiahs), under the condition:
 - The President Director's bonuses / work incentives, other members of the Board of Directors, and the President Commissioner are 100%, 90%, and 45% respectively from the President Director's bonuses/ work incentives, while the Board of Commissioner members bonuses/work Incentives is about 90% from President Commissioner's bonuses/ work incentives. The amount of bonuses/work incentives was proportionally calculated according to the tenure of each Board of Directors and Board of Commissioners in the Financial Year of 2017.
 - Income tax (Pph) for bonuses/work incentives is borne by the recipient and not to be charged as a Company Fee.
 - State-owned Enterprises has applied the stipulation of income guideline which is stipulated in the Minister of State-owned Enterprise Regulation Number: PER-04/MBU/2014 as lastly amended by The Minister of State-owned Enterprises Regulation Number: PER-06/MBU/06/2018 dated June 4, 2018 concerning the third amendment on The Minister of State-owned



Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Enterprises regulation Number: PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning guidelines for determining the income of the Board of Commissioners and Directors, and Supervisory Board of State-owned Enterprises, in determining the income of the Board of Commissioners and Directors in the relevant of State-owned Enterprises subsidiaries.

5. Hal-hal yang diatur dalam surat ini apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

5. These Matters are stipulated in this letter if there are errors in the future will be corrected accordingly.

STRUKTUR DAN JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari Gaji/Honorarium, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya keagamaan, transportasi, dan santunan purna jabatan. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan merujuk kepada Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor: S-554/MBU/D4/06/2018 tanggal 05 Juni 2018.

STRUCTURE AND THE AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The remuneration of the Board of Commissioners consists of Salary/Honorarium, benefits consisting of religious holiday, transportation, and post-service benefits. The facilities provided are health facilities and legal assistance. The Board of Commissioners Remuneration Structure refers to the Ministry of State-owned Enterprises Letter as Shareholder Number: S-554/MBU/D4/06/2018 dated June 5, 2018.

Uraian Penghasilan Remuneration Type	Keterangan Description
Honorarium Honorarium	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama = 45% dari gaji Direktur Utama. President Commissioner = 45% of President Director Salary. Komisaris = 90% dari honorarium Komisaris Utama. Commissioner = 90% of President Commissioner honorarium

Tunjangan/Fasilitas Allowance/Facility	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Commissioner
Pendapatan Bulanan Monthly Salary		
Honorarium Honorarium	Rp67.500.000	Rp60.750.000
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium perbulani 20% of monthly honorarium	20% dari honorarium perbulani 20% of monthly honorarium
Pendapatan Tahunan Annual Salary		
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	Dibayarkan 1 kali Honorarium Paid equal with 1 month honorarium	Dibayarkan 1 kali Honorarium Paid equal with 1 month honorarium
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Benefit	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year honorarium	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year honorarium
Pendapatan Lain-lain Others Salary		
Tantiem Incentives	Dibayarkan sebesar 45% dari Tantiem Direktur Utama Paid 45% of President Director's Incentives	Dibayarkan sebesar 90% dari Tantiem Komisaris Utama Paid 90% of President Commissioner's Incentives



Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Tunjangan/Fasilitas Allowance/Facility	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Commissioner
Fasilitas Facilities		
Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (<i>at cost</i>)	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (<i>at cost</i>)
Bantuan Hukum Legal Assistance	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost
Keanggotaan Profesi Professional Membership	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Pakaian Seragam/Dinas Uniform/Official Clothes	Tidak Ada None	Tidak Ada None

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2018 The Board of Commissioners Remuneration 2018

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan (Rp) Monthly Salary (Rp)	Tantiem (Rp) Incentives (Rp)
Bambang Prihartono	Komisaris Utama President Commissioner	Rp67.500.000	45% dari Tantiem Direktur Utama 45% of President Director's Incentives
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	Rp60.750.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Danang Parikesit	Komisaris Commissioner	Rp60.750.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Rp60.750.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Sudarto	Komisaris Commissioner	Rp60.750.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	Rp60.750.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives

Keterangan: *) Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 ditetapkan sebesar Rp7.977.670.000. (PADA SURAT PUTUSAN MENTERI BUMN 05 JUNI 2018 PENETAPAN UNTUK TAHUN BUKU 2017 BUKAN 2018)
Notes: *) Performance Incentives of the Board of Commissioners and Directors for Fiscal Year of 2017 stipulated at Rp7.977.670.000. (ON MINISTER OF SOE DECREE IN JUNE 05, 2018 IS STIPULATION FOR FISCAL YEAR OF 2017 NOT 2018)

STRUKTUR DAN JUMLAH REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi Direksi didasarkan kepada Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor: S-554/MBU/D4/06/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tahun 2018.

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun Buku 2018 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tantiem Direktur Utama, Direktur & Komisaris Utama masing-masing 100%, 85% dan 45% dari Tantiem Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE AND AMOUNT

The remuneration of the Board of Directors is based on the Letter of the Minister of State-owned Enterprises as Shareholder Number: S-554/MBU/D4/06/2018 dated June 5, 2018 concerning Submission of Determination Income of the Board of Commissioners and Directors of PT PELNI (Persero) in 2018.

Bonuses for the Board of Commissioners and Directors for fiscal year of 2018 were set as follows:

1. President Director's Bonuses, Director & President Commissioner are 100%, 85% and 45% respectively from the President Director's Tantiem while the Board



Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama. Besaran tantiem dihitung proporsional sesuai dengan masa kerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2017.

2. PPH menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

of Commissioners' incentives are 90% of the President Commissioner's tantiem. The tantiem amount was calculated proportionally according to the working period of each of the Directors and the Board of Commissioners in the Financial Year of 2017.

2. PPH is borne by the recipient and not to be charged as a company expense.

Uraian Penghasilan Remuneration Type	Keterangan Description
Gaji Salary	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama = Rp150.000.000 President Director = Rp150.000.000 Direksi = 85% dari Direktur Utama Board of Directors = 85% of President Director

Tunjangan/Fasilitas Allowance/Facility	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Commissioner
Pendapatan Bulanan Monthly Salary		
Gaji Pokok Basic Salary	Rp150.000.000	Rp127.500.000
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Rp27.500.000	Rp27.500.000
Pendapatan Tahunan Annual Salary		
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	Dibayarkan 1 kali Gaji Paid at Cost	Dibayarkan 1 kali Gaji Paid at Cost
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Benefit	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year honorarium	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year honorarium
Fasilitas Facilities		
Kendaraan Vehicle	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan 1 (one) unit with maintenance and operational cost by considering the Company's financial condition	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan 1 (one) unit with maintenance and operational cost by considering the Company's financial condition
Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)
Bantuan Hukum Legal Assistance	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost
Club Membership Corporate Member	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Biaya perwakilan Representation Cost	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Keanggotaan Profesi Professional Membership	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Pakaian Seragam/Dinas Uniform/Official Clothes	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost



Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Remunerasi Direksi untuk tahun 2018 The Board of Directors Remuneration 2018

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan (Rp) Monthly Salary (Rp)	Tantiem (Rp) Incentives (Rp)
Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director	Rp150.000.000	100%
Ganefi	Direktur Director	Rp135.000.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Harry Boediarso Soewarto	Direktur Director	Rp135.000.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Muhammad Tukul Harsono	Direktur Director	Rp135.000.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Olih Masolich Sodikin	Direktur Director	Rp135.000.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Tri Andayani	Direktur Director	Rp60.750.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives

INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk memastikan struktur di perseroan berjalan dengan baik, Perseroan memiliki sistem penilaian kinerja untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Indikator Pengukuran Kinerja untuk mengukur kinerja Direksi tahun 2018 ditetapkan dalam Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018.

INDICATORS DETERMINATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

To ensure the structure in the Company has been running well. The Company has appraisal performance system to stipulate remuneration for Board of Commissioners and Directors that was implemented during the General Meetings of Shareholders (GMS). Key performance indicators to evaluate Board of Directors in 2018 is stipulated in Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners in 2018.



Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners' and Directors' Composition Diversity

PT PELNI (Persero) meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perusahaan oleh Direksi dengan tidak mengenal perbedaan *gender*. Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usulan Pemegang Saham memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Periode 2018:

PT PELNI (Persero) believes that the diversity of expertise, experience, and educational background are indispensable for the supervisory services effectiveness of the Board of Commissioners and management of the Company by the Board of Directors with no recognition on gender differences. The Board of Commissioners and Directors of PT PELNI (Persero) are appointed by the resolution of General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Shareholders have a fairly diverse composition, based on their age, educational background, expertise and experience requirements in the performance of their duties and responsibilities. The composition diversity held by each member of the Boards of Commissioners and Directors of the Company for the period of 2018 in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Akademik dan Keahlian Academic Qualification and Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Bambang Prihartono	Komisaris Utama President Commissioner	Teknik Sipil Civil Engineering	58	Pria Male
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ekonomi dan Akuntansi Economic and Accounting	61	Pria Male
Sudarto	Komisaris Commissioner	Ekonomi dan Manajemen Bisnis Economics and Business Management	48	Pria Male
Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sains, Regional Science dan Environmental Planning Science, Regional Science and Environmental	59	Pria Male
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Hukum Legal	45	Pria Male
Danang Parikesit	Komisaris Commissioner	Doktor Teknik Doctor of Technices	53	Pria Male
Direksi Board of Directors				
Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director	Hubungan Internasional International Relations	51	Pria Male
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	Planologi Planology	62	Pria Male
Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	Nautika dan Master Mariner Nautical and Master Mariner	51	Pria Male
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	Ilmu Pelayaran Shipping Science	59	Pria Male
Tri Andayani	Direktur Keuangan Director of Finance	Akuntansi dan Manajemen SDM Accounting and HR Management	45	Wanita Female
Ganefi	Direktur SDM & Umum Director of HR & General Affair	Perbankan dan Keuangan Banking and Finance	55	Wanita Female

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan belum memiliki kebijakan spesifik yang mengatur mengenai keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Akan tetapi, kebijakan *Board Manual* di PT PELNI (Persero) telah mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan secara umum kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam untuk kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

By the end of 2018, the Company has not formulated specific policy regulating the composition diversity in the Board of Commissioners and Directors. However, Board Manual Policy of PT PELNI (Persero) stipulated criteria for every member of Board of Commissioners and Board of Directors, and generally this policy encouraged the selection of candidates as the Board of Commissioners and Board of Directors members from various background.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners' and Directors' Performance Assessment

Mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di Perseroan mengacu pada surat Kementerian BUMN Nomor SK S-676/ BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen. Berdasarkan ketentuan tersebut, landasan penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Direksi Perseroan. Target-target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) mencakup aspek finansial, operasional termasuk pelanggan dan aspek dinamis.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Mekanisme Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penerapan *Key Performance Indicators* (KPI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada saat melakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk Badan Usaha Milik Negara.
2. Kuasa Pemegang Saham bersama Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempersiapkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang akan dituangkan dalam Kontrak Manajemen antara pihak Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan Pihak Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas PT PELNI (Persero).
3. *Key Performance Indicators* (KPI) yang dipilih haruslah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mencerminkan kegiatan yang dominan pada Perseroan yang sekurang-kurangnya mencakup aspek operasional/teknis dan aspek finansial.
4. Kontrak Manajemen dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada saat Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

The Board of Commissioners and the Board of Directors performance assessment mechanism refers to Minister of SOE Letter No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract. According to this regulation, basis for the Board of Commissioners and Board of Directors Members performance assessment is explained in the Management Key Performance Indicators (KPI) and formulated as Management Contract between Shareholders and Board of Directors. The agreed targets are disclosed in the Management Contract and based on the Key Performance Indicators (KPI) including financial, operational including customer and dynamic aspects.

The Board of Commissioners and the Board of Directors performance assessment is done in the General Meetings of Shareholders (GMS).

THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESMENT

Board of Commissioners Performance Assessment Mechanism

The performance appraisal of the Board of Commissioners is carried out under the following mechanism:

1. Implementation of Key Performance Indicators (KPI) in the General Meetings of Shareholders during the validation of Budget Plan (RKAP) of the State-Owned Enterprise.
2. Altogether with the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board, the Shareholders Attorney prepares Key Performance Indicators (KPI) that will be disclosed as Management Contract between the Shareholders/Capital Owner with the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of PT PELNI (Persero).
3. The selected Key performance Indicators (KPI) shall be adjusted with characteristic of each State-Owned Enterprise (SOE) and reflected dominant activity in the Company at least covering operational/technical aspect and financial aspect.
4. The concerned Management Contract is integrated part of General Meetings of Shareholders (GMS) Minutes of Meeting on Budget Plan (RKAP) ratification.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Directors and The Board of Commissioners Performance Assesment

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2018

Pada tahun 2018, diperoleh hasil penilaian Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan KPI sebagai berikut:

The Performance Assessment Result of the Board of Commissioners in 2018

In 2018, has obtained The Performance Assessment Result of the Board of Commissioners of the Company based on KPI as follows:

No	Aspek dan Parameter Aspect and Parameter	Periode Periode	Satuan Output Output Unit	Bobot Quality	Output Output		%
					Rencana Plan	Realisasi Realization	
I. Aspek Perencanaan Planning Aspect							
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2018. Preparing Work and Budget Plans and the KPI 2018 of the Board of Commissioners.	Tahunan Annually	Dokumen Document	10	1	1	10.0
Sub Total Sub Total				10			10.0
II. Aspek Pengawasan dan Nasehat Supervisory and Advisory Aspect							
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Providing responses/recommendations to Shareholders regarding:						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Company Work and Budget Plan.	Tahunan Annually	Surat Letter	5	1	1	5.0
	b. Laporan Tahunan. Annual Report.	Tahunan Annually	Surat Letter	5	1	1	5.0
	c. Analisis Kinerja Triwulan. Quarterly Analysis Performance.	Triwulan Quarterly	Surat Letter	5	3	3	5.0
2	Memberi nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris. Providing advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the Board of Commissioners.	Setahun In a year	Surat/Risalah Letter/Minutes	10	12	12	10.0
3	Rapat Dewan Komisaris. The Board of Commissioners Meetings.						
	a. Jumlah Rapat. Number of Meetings	Bulanan Monthly	Kali Frequency	10	12	14	11.7
	b. Laporan Tahunan. Annual Report.	Bulanan Monthly	%	5	100	83.6	4.2
	c. Analisis Kinerja Triwulan. Quarterly Analysis Performance.	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	5	12	12	5.0
4	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan unit terkait. Committee Meetings between the Board of Commissioners and related units.	Setahun In a year	Risalah Minutes	5	24	24	5.0
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners' Working Visit.	Setahun In a year	Kunjungan Visit	5	5	5	5.0
6	Realisasi rencana kerja Dewan Komisaris. The work plan realization of the Board of Commissioners.	Setahun In a year	%	5	100	100	4.5
Sub Total Sub Total				60			60.4



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Directors and The Board of Commissioners Performance Assessment

No	Aspek dan Parameter Aspect and Parameter	Periode Periode	Satuan Output Output Unit	Bobot Quality	Output Output		%
					Rencana Plan	Realisasi Realization	
III. Aspek Pelaporan Reporting Aspect							
1	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris. KPI realization report of the Board of Commissioners.	Triwulan Quarterly	Laporan Report	5	3	0	0.0
2	Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Supervisory duties report of the Board of Commissioners.	Tahunan Annually	Laporan Report	10	1	1	10.0
Sub Total Sub Total				15			10.0
IV. Aspek Dinamis Flexible Aspect							
1	Pengusulan eksternal auditor kepada Pemegang Saham. External auditor proposal to Shareholders.	Tahunan Annually	Surat Letter	4	1	1	4.0
2	Peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop, dll. Competency development through Seminar, Workshop, Etc.	Setahun In a year	Kali Frequency	4	2	2	4.0
3	Hasil Asesmen GCG Dewan Komisaris (self assesment/BPK). Assessment Result of GCG of the Board of Commissioners (Self-assessment/ Financial Service Agency).	Tahunan Annually	Skor Score	4	75	86.54	4.6
4	Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan Auditor/ SPI. Response to the follow-up the findings of the Auditor / Internal Control Unit.	Setahun In a year	Surat Letter	3	1	1	3.0
Sub Total Sub Total				15			15.6
TOTAL TOTAL				100			96.0

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Mekanisme Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi Perseroan akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara kolektif. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris akan disampaikan dalam RUPS. Adapun penilaian Direksi diukur berdasarkan kriteria umum, yang meliputi: Komposisi, Kriteria, Perencanaan Strategis, Peran dan Tugas Tanggung Jawab, Program Pelatihan, Rapat Direksi, Efektivitas organ penunjang, Hubungan komunikasi, Pertanggungjawaban serta Komitmen Standar Etika.

THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

The Performance Assessment Mechanism of the Board of Directors

The Board of Directors' performance of the Company will be evaluated collectively by the Board of Commissioners. The results of the Board of Commissioners' performance evaluation will be submitted at GMS. The assessment of the Board of Directors is measured based on general criteria, which includes: Composition, Criteria, Strategic Planning, Roles and Tasks of Responsibility, Training Programs, Directors' Meetings, Effectiveness of supporting organs, Communication relations, Accountability and Ethical Standards Commitments.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Directors and The Board of Commissioners Performance Assessment

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Indikator kinerja atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perseroan, terdiri dari 5 (lima) perspektif berikut:

1. Perspektif Keuangan dan Pasar

Perspektif ini memfokuskan hasil-hasil finansial pasar utama dari perusahaan, yang bertujuan menunjukkan kesinambungan finansial dan pencapaian pasar.

2. Perspektif Fokus Pelanggan

Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja fokus pada pelanggan dari perusahaan, yang bertujuan menunjukkan sebaik apa perusahaan telah memuaskan pelanggan dan keterkaitannya dalam hubungan jangka panjang.

3. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses

Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja produk dan operasional utama dari perusahaan, yang bertujuan memeragakan mutu dan nilai produk dan jasa yang menimbulkan kepuasan dan keterikatan pelanggan. Selain itu, perspektif ini juga memfokuskan pada hasil-hasil proses utama lainnya dari perusahaan yang tidak dilaporkan dalam perspektif lainnya yang bertujuan memeragakan efektivitas dan efisiensi sistem kerja dan proses kerja.

4. Perspektif Fokus Tenaga Kerja

Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja perusahaan dalam aspek fokus pada tenaga kerja, yang tujuannya adalah mengetahui seberapa baik perusahaan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang produktif, peduli, dan membangun keterikatan dan lingkungan pembelajaran untuk semua tenaga kerja.

5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil utama perusahaan di bidang kepemimpinan senior dan tata kelola yang bertujuan untuk menunjukkan perusahaan yang mapan secara keuangan dan beretika yang memenuhi tanggung jawab sosialnya dan mendukung komunitas utamanya

The Performance Assessment Criteria of The Board of Directors

The performance indicator or Key Performance Indicators (KPI) used to measure the performance of the Company's Directors, consisting of 5 (Five) perspectives:

1. Financial and Market Perspectives

These perspectives focus on financial results of the Company's main market, which aims to show financial sustainability and market achievement.

2. Customers Focus Perspective

This perspective focuses on the performance results focusing on the customers of the company, which aims to show how the company satisfied the customer and its relevance in long-term relationships.

3. Product and Process Effectiveness Perspectives

This perspective focuses on the results of the main product and operational performance of the company, which aims to demonstrate the quality and value of products and services that lead to customer satisfaction and interest. In addition, this perspective also focuses on the results of other main processes from Company that are not reported in other perspectives aimed to demonstrate the effectiveness and efficiency of work systems and processes.

4. Manpower Focus Perspective

This perspective focuses on the results of Company's Performance in terms of the focus on the manpower, whose aim is to find out how well the company creates and maintains a productive, caring and constructive work environment and learning environment for all workers.

5. Leadership, Governance and Social Responsibility Perspective

This perspective focuses on the main Company's result in the area of senior leadership and governance that aim to show financially and ethically established companies that fulfill their social responsibilities and support their main communities.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Directors and The Board of Commissioners Performance Assessment

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2018

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen, maka setiap perusahaan BUMN diwajibkan membuat *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Direksi BUMN.

Kontrak manajemen merupakan kesanggupan manajemen untuk mencapai target-target yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Target-target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) mencakup aspek finansial, operasional termasuk pelanggan dan aspek dinamis.

Pada tahun 2018 telah diperoleh hasil penilaian skor KPI sebagai berikut:

Performance Assessment Result of The Board of Directors 2018

According to Minister of SOE Letter No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract, every SOE is regulated to formulate Management Key Performance Indicators (KPI) as Management Contract between the Shareholders with the Board of Directors.

Management Contract is agreement of the management to achieve targets agreed by both parties that are Shareholders with Board of Directors and Board of Commissioners. Targets that have been agreed upon are contained in Contract Management based on Key Performance Indicators (KPI) covering financial, operational aspects including customer and dynamic aspects.

In 2018, has obtained Key Performance Indicators assesment Result, as follows:

Uraian Description	Satuan Unit	Bobot Quality	Target Tahun 2018 2018 Target	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Nilai Capaian Tahun 2018 2018 Achievemnet	Nilai Skor KPI Tahun 2018 2018 KPI Score
I. Keuangan dan Pasar Financial & Market						
EBITDA Margin EBITDA Margin	%	10,00	13,37	14,76	110,40	12,00
Jumlah penghasilan perkapalan Total Shipping Revenue	Rp juta Rp million	10,00	4.411.425	3.717.725	84,27	8,43
Jumlah penghasilan perkapalan Total Shipping Revenue	Bulan Month	8,00	Mei, Juni, November dan Desember May, June, November and December	Mei, Juni, November dan Desember May, June, November and December	100,00	8,00
Sub Total Sub Total		28,00				28,43
II. Perspektif Fokus Pelanggan Customer Focus Perspective						
Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skor Score	9,00	4,30	3,90	90,70	8,16
Indeks Kepuasan Shipper Shipper Satisfaction Index	Skor Score	9,00	4,00	4,38	109,50	9,45
Sub Total Sub Total		18,00				17,61
III. Perspektif Efektifitas Produk dan Proses Product and Process Effectiveness Perspective						
Pax Factor Kapal Penumpang Fax Factor of Passenger Ship	%	5,00	75,00	61,00	81,33	4,07
Load Factor Muatan Kapal Penumpang Load Factor of Passenger Ship Cargo	%	5,00	70,00	40,85	58,36	2,92
On Time Performance Kapal Ship On Time Performance	%	5,00	96,00	94,59	101,49	5,07



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Directors and The Board of Commissioners Performance Assesment

Uraian Description	Satuan Unit	Bobot Quality	Target Tahun 2018 2018 Target	Realisasi Tahun 2018 2018 Realization	Nilai Capaian Tahun 2018 2018 Achievemnet	Nilai Skor KPI Tahun 2018 2018 KPI Score
Implementasi ERP Supply Chain Management ERP Supply Chain Management Implementation	%	4,00	100,00	74,31	74,31	2,97
Jumlah Paket Wisata yang Dilaksanakan Total Tour Package Implemented	Paket Package	5,00	5,00	6,00	120,00	5,25
Sub Total Sub Total		24,00				20,28
IV. Fokus Tenaga Kerja Manpower Focus						
Indeks Keterikatan Pegawai Employee Engagement Index	Skor Score	7,00	4,10	3,99	97,32	6,81
Pegawai PELNI yang Memenuhi Standar Kompetensi Employee Competency Standard Fulfillment	%	8,00	95,00	67,79	71,36	5,71
Sub Total Sub Total		15,00				12,52
V. Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance & Social Responsibility						
Skor GCG GCG Score	Skor Score	7,00	4,10	3,99	97,32	6,81
Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala BUMN On time SOE Regular Report Submission	%	8,00	95,00	67,79	71,36	5,71
Sub Total Sub Total		15,00				14,57
VI. Agen Pembangunan Development Agent						
Unsur Penugasan Pemerintah Government Assignment Elements						
Realisasi Voyage Seluruh Kapal Realization of Whole Ship Voyage	%	3,00	100,00	98,84	98,84	2,97
Unsur Pembangunan Daerah Ekonomi Terpadu The Integrated Economic Development Area Elements						
Muatan Barang Kapal Tol Laut Tol Laut Ship Cargo	Ton/m	2,00	58.754,00	4.730,00	8,05	0,16
Muatan Kontainer Kapal Tol Laut Tol Laut Ship Container Cargo	Teus	2,00	13.172,00	8.258,00	62,69	1,25
Realisasi Call Kapal Penugasan Realization of Ship Assignment Call	Call	3,00	23.506,00	12.101,00	51,48	1,54
Sub Total Sub Total		10,00				5,92
TOTAL TOTAL		100,00				89,99



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Directors and The Board of Commissioners Performance Assessment

PIHAK YANG MELAKUKAN ASESMEN

Sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen, maka setiap BUMN diwajibkan membuat Key Performance Indicator (KPI) Manajemen yang dijadikan Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham dengan Direksi BUMN tersebut.

Pihak yang melakukan assessment terhadap Perusahaan adalah Akuntan Publik, dalam hal ini dilakukan melalui audit Key Performance Indicator (KPI). Pada tahun 2018 dilakukan oleh KAP Djoko, Sidik & Indra.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMEN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kinerja Direksi juga dinilai oleh Tim yang ditunjuk Kementerian BUMN untuk menilai keunggulan kinerja perusahaan mengacu pada kriteria lain adalah kriteria penilaian keunggulan kinerja berbasis Malcolm Baldrige *Criteria for Performance Excellence* (MBCFPE).

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada Pasal 44 Bab XII, Peraturan Menneq BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan surat dari Kementerian BUMN No. S-281/S.MBU/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Tahun 2017 dan 2018, serta dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

ASSESSOR

According to Minister of SOE Letter No. SK S-6767/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract, every SOE is regulated to formulate Management Key Performance Indicators (KPI) as Management Contract between the Shareholders with the Board of Directors in respect to SOE.

The Company's assessor is Public Accountant, in this course, was done by Key Performance Indicators (KPI) audit. In 2018, the assessor was KAP Djoko, Siddik & Indra.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE

Board of Directors performance is also evaluated by Team appointed by Ministry of SOE to assess excellence performance of the Company referring to other Criteria, which is performance excellence assessment based on Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE).

Implementation of Board of Directors and Board of Commissioners performance assessment in the Company refers to Article 44 Chapter XII, Minister of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and Letter from Minister of SOE Number S-281/S.MBU/2014 regarding Implementation of Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) in 2015 and 2016 with result as follows:

Evaluasi Kinerja Direksi Berdasarkan Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN

The Board of Directors Based on the Implementation of Assessing the Superior Performance Criteria of SOE

No	Aspek dan Parameter Aspect and Parameter	Maksimal Skor Score Max	Pencapaian Skor Tahun 2017 Score Achievement 2017	Maksimal Skor Score Max	Pencapaian Skor Tahun 2018 Score Achievement 2018
Aspek Pelaporan Leadership					
	Kepemimpinan Senior Senior Leadership	70	38,50	70	42,00
	Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial/ Masyarakat Governance and Social Responsibility	50	25,00	50	27,50
Strategis Strategic					
	Pengembangan Strategi Strategy Development	40	24,75	40	27,00
	Implementasi Strategi Strategy Implementation	45	22,00	45	22,00



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Directors and The Board of Commissioners Performance Assesment

No	Aspek dan Parameter Aspect and Parameter	Maksimal Skor Score Max	Pencapaian Skor Tahun 2017 Score Achievement 2017	Maksimal Skor Score Max	Pencapaian Skor Tahun 2018 Score Achievement 2018
Pelanggan Customer					
	Suara Pelanggan Customer Inquiry	45	18,00	45	18,00
	Keterikatan dengan Pelanggan Customer Engagement	40	20,25	40	22,50
Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan Assessment, Analysis and Knowledge Management					
	Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan Assessment, Analysis and Performance Improvement	45	20,25	45	22,50
	Informasi dan Manajemen Pengetahuan Information, Knowledge Management	45	20,25	45	20,25
Tenaga Kerja Workforce					
	Lingkungan Tenaga Kerja Man Power Circumstances	40	22,00	40	22,00
	Keterikatan dengan Pekerja Workforce Engagement	45	22,50	45	22,50
Operasional Operational					
	Proses Kerja Working Process	45	22,50	45	27,00
	Efektivitas Operasional Operational Effectivity	40	20,00	40	22,00
	Skor Kategori Proses Process Category Score	550	276,00	550	295,25
	Hasil Produk dan Layanan Product and Service Result	110	54,00	110	54,00
	Hasil/Kinerja Pelanggan Customer Result	90	32,00	90	32,00
	Hasil/Kinerja Tenaga Kerja Employee Result	80	40,00	80	36,00
	Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance	80	36,00	80	36,00
	Hasil Keuangan dan Pasar Financial and Market Result	90	45,00	90	45,00
	Skor Kategori Hasil Result Category Score	450	207,00	450	203
	Total Skor Total Score	1.000	483,00	1.000	498,25
	Predikat Predicate	Good Performance		Good Performance	



Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Affiliation between The Board of Commissioners, Directors and Shareholders

Antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda.

Between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and the Main Shareholders and / or controlling Shareholder do not have any blood relation up to the third degree, either on a straight line or a lateral line or in law relationship.

Hubungan keluarga dan keuangan antara Anggota Dewan Komisaris dengan sesama Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan periode tahun 2018 digambarkan dalam tabel berikut:

Family and financial affiliation among the Board of Commissioners members with Board of Directors and/or Board of Commissioners members and Shareholders in 2018 are explained in the table below:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
Table of Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders Affiliation

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation With						Financial Relationship with Financial Affiliation with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Bambang Prihartono		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Johanes Widodo Hario Mumpuni		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sudarto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Raldi Hendro Koestoer		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Satya Bhakti Parikesit		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Danang Parikesit		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Direksi Board of Directors												
Insan Purwarisya L Tobing		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Harry Boediarto Soewarto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Muhamad Tukul Harsono		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Olih Masolich Sodikin		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tri Andayani		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ganefi		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Selama tahun 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun dengan Pemegang Saham.

Throughout 2018, all of Board of Commissioners and Board of Directors members were not having family and financial affiliations with other members of Board of Commissioners and Board of Directors or with the Shareholders.



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Shares Ownership

Diantara anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki saham perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners and Board of Directors do not have any shares ownership with detail as follows:

No	Nama Name	Kepemilikan Saham di Shares Ownership at		
		Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Lain Other Companies
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
1	Bambang Prihartono	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Johanes Widodo Hario Mumpuni	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Sudarto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Raldi Hendro Koestoer	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Satya Bhakti Parikesit	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
6	Danang Parikesit	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direksi Board of Directors				
1	Insan Purwarisya L Tobing	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Harry Boediarto Soewarto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Muhamad Tukul Harsono	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Olih Masolich Sodikin	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Tri Andayani	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
6	Ganefi	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None



Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Dual Position of The Board of Commissioners and Directors

Penjelasan rangkap jabatan di perusahaan atau instansi lain dijabarkan dalam table berikut:

Dual positions explanation in other companies or agencies is described in the following table:

No	Nama Name	Rangkap Jabatan Dual Position	
		Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan / Instansi Lain Other Companies Institutions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1	Bambang Prihartono	Tidak ada None	Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Head of Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ)
2	Johanes Widodo Hario Mumpuni	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Sudarto	Tidak ada None	Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan Minister of Finance Expert Staff for Organization, Bureaucracy and Information Technology, Ministry of Finance
4	Raldi Hendro Koestoer	Tidak ada None	Senior <i>Principal Policy Analyst</i> Kementerian Koordinator Perekonomian Senior Principal Policy Analyst of the Minister of Economic Coordinator
5	Satya Bhakti Parikesit	Tidak ada None	Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Deputy of Secretariat- Cabinet Economic Affairs
6	Danang Parikesit	Tidak ada None	Tidak Ada None
Direksi Board of Directors			
1	Insan Purwarisya L Tobing	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Tri Andayani	Komisaris PT SBN Commissioner of PT SBN	Tidak ada None
3	Ganefi	Komisaris Utama PT Rumah Sakit PELNI President Commissioner of PT RS PELNI (Hospital)	Tidak ada None
4	Muhamad Tukul Harsono	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Olih Masolich Sodikin	Komisaris Utama PT PIDC President Commissioners of PT PIDC	Tidak ada None
6	Harry Boediarso Soewarto	Komisaris Utama PT SBN President Commissioner of PT SBN	Tidak ada None



Komite Audit Audit Committee

Komite Audit dibentuk di bawah Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan, dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporan.

Komite Audit dibentuk oleh, dan bekerja untuk, serta bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit merupakan manifestasi kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dinyatakan melalui Peraturan Bapepam-LK No. XI. 1. 5, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-305/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat.

PIAGAM KOMITE AUDIT DAN PEDOMAN KERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Audit PT PELNI (Persero), sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit Nomor: 01/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, perlu disusun Rencana Kerja Komite Audit sebagai panduan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan Perseroan, monitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dan auditor internal.

Audit Committee Charter (Piagam Komite Audit) mengatur hal-hal mengenai Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab Komite Audit, Tugas Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit, Tanggung Jawab Pelaporan dan Masa Tugas.

PERSYARATAN KOMITE AUDIT

1. Pihak ekstern yang diangkat menjadi Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas.
2. Memiliki integritas yang tinggi, Kemampuan, Pengetahuan dan Pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang Pendidikan Akuntansi atau Keuangan.

The Audit Committee is established under the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners performing the supervisory function, and is directly responsible to the Board of Commissioners. The Audit Committee is independent, both in the performance of duties and reporting.

The Audit Committee is established by, and works for, and is responsible to the Board of Commissioners. The establishment of the Audit Committee is a manifestation of the Company's compliance with the Government Regulation on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee, as stated in Bapepam-LK Regulation No. XI. 1. 5, Attachment of Decree of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-305/BEJ/07/2004 dated July 19, 2004 concerning Regulation No. 1-A regarding Recording of Shares and Equity Securities Other than Shares issued by the Listed Company.

CHARTER AND WORKING GUIDELINES OF AUDIT COMMITTEE

In order to execute the duties of Audit Committee of PT PELNI (Persero), as stated in the Audit Committee Charter Number: 01/DK/I/2016 dated January 8, 2016, it is necessary to formulate the Audit Committee Work Plan as a guide in supervising the Company's financial reporting process, monitoring and evaluating the audit implementation process by external auditors and internal auditors.

Audit Committee Charter regulates aspects related to Audit Committee Structure, Membership Requirement, Audit Committee Responsibility, Audit Committee Duty, Audit Committee Authority, Audit Committee Meeting, Reporting Responsibility and Serving Period.

AUDIT COMMITTEE REQUIREMENT

1. External party to be appointed as Audit Committee shall not have any business relation or affiliation with the Company, Director, Commissioner or Majority Shareholders.
2. To have high integrity, competency, sufficient knowledge and experience in the working field and good communication skill.
3. One of the Audit Committee Members shall have Accounting or Finance educational background.



Komite Audit Audit Committee

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.07/DK/XIII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perseroan PT PELNI (Persero), sehingga susunan Komite Audit PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE APPOINTMENT AND DISCHARGE

Appointment and discharge of the Audit Committee members are done by Board of Commissioners based on a Decree issued by Board of Commissioners.

The Audit Committee members discharge may be administered if the concerned member entered end of his serving period and under the Board of Commissioners Decree is terminated due to not complying with the expected performance and/or being not competent in exercising the duty.

AUDIT COMMITTEE COMPOSITION

Based on the Board of Commissioners' Decree Number KEP.07/DK/XIII/2017 dated December 8, 2017 regarding the Dismissal and Appointment Head of the Audit Committee of PT PELNI (Persero), the composition of the PT PELNI (Persero) Audit Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Ketua Komite Audit Audit Committee Chairman	KEP.03/DK/VIII/2017
Subagio	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP.03/DK/VIII/2017
Joko Murdyono	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP.03/DK/VIII/2017

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Pengangkatan setiap anggota Komite Audit Perseroan didasarkan atas pemikiran untuk memastikan independensi Komite Audit sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan semestinya. Oleh karena itu, Perseroan menunjuk anggota Komite Audit yang memenuhi syarat independensi atau tidak berbenturan kepentingan dengan Perseroan terutama dalam hal tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan terhadap Perusahaan.

INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE

The appointment of each member of the Audit Committee of the Company is based on the premise of ensuring the independence of the Audit Committee so that it can perform its duties well and properly. Therefore, the Company appoints a member of the Audit Committee that meets the independence requirements or does not conflict with the Company, principally regarding having no relationship in terms of family, financial, management, and ownership of the Company.

Nama Name	Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik Executives of Public Accountant Firm	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	Memiliki Saham Perseroan (Langsung/Tidak Langsung) Shares Ownership in the Company (Direct/Non-Direct)	Hubungan Bisnis dengan Perseroan Business Affiliation with the Company
Johanes Widodo Hario Mumpuni	X	X	X	X	X
Subagio	X	X	X	X	X
Joko Murdyono	X	X	X	X	X



Komite Audit Audit Committee

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN KOMITE AUDIT

Untuk memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Piagam Komite Audit Nomor: 01/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit Perseroan adalah Tugas dari Komite Audit Perseroan dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Perseroan. Adapun tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *review* atas perencanaan audit Satuan Pengawasan Intern;
2. Melakukan *review* atas pelaksanaan audit yang dilakukan Satuan Pengawasan Intern untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai rencana, dan supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin mutu pelaksanaan audit;
3. Melakukan *review* atas pelaporan Satuan Pengawasan Intern;
4. Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil audit untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit tidak menindak lanjuti laporan Satuan Pengawasan Intern;
5. Melakukan komunikasi secara periodik dengan Satuan Pengawasan Intern;
6. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan;
7. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal;
8. Menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit selama tahun 2018 melakukan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali pertemuan yang seluruhnya telah didokumentasikan dalam notulen rapat. Rincian jumlah kehadiran masing-masing Anggota Komite Audit sesuai tabel berikut:

FAMILY AND FINANCIAL RELATIONSHIP OF AUDIT COMMITTEE

To qualify for independence in accordance with Indonesian regulations, all members of the Audit Committee have no financial, management, share ownership and / or family relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors, which may affect their ability to act independently.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

The scope of duties and responsibilities of Audit Committee based on the established charter of Audit Committee Number: 01/DK/I/2016 dated on January 8, 2016. In order to assist the Board of Commissioners in carrying out the supervisory duties and functions of the Company. The duties and responsibilities as stated in that charter as follows:

1. Reviewing the audit planning of Internal Control Unit;
2. Reviewing the audit implementation conducted by Internal Control Unit to ensure that the audit has been aligned with schedule planning and the supervising audit has performed correctly to guarantee the implementation quality of audit;
3. Reviewing Internal Control Unit reporting;
4. Assessing the follow-up result of audit and then taking a necessary steps in term of audit if there is no follow-up on Internal Control Unit report;
5. Communicating periodically with Internal Control Unit;
6. Reviewing the financial statements quality issued by the Company;
7. Reviewing internal control effectiveness;
8. Analyzing the compliance level of the Company with the applicable laws and regulations;
9. Performing other duties given by the Board of Commissioners.

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL OF AUDIT COMMITTEE

In 2018, Audit Committee held 28 (twenty eight meetings which all had been documented in Minutes of Meeting. Detail of Audit Committee member attendance is presented in table below:



Komite Audit Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Ketua Chairman	28	27	97%
Subagio	Anggota Member	28	23	83%
Joko Murdyono	Anggota Member	28	28	100%

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT 2017

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA 2017

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Agenda
1	10 Januari 2018 January 10, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan LHA-Khusus Kegiatan Keagenan di <i>Terminal Point</i> Lhokseumawe dan temuan SPI lainnya. Discussion on LHA-Special Agency at Terminal Point, Lhokseumawe and Internal Audit Unit findings. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal. Follow-up external findings development.
2	17 Januari 2018 January 17, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan LHA-SPI TW-IV/2017. Discussion on TW-IV/2017 of LHA-SPI Report. Lain-lain. Others.
3	07 Februari 2018 February 07, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Kerja Tim Komite Audit ke Surabaya. Audit Committee team work plan to Surabaya.
4	07 Maret 2018 March 07, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Laporan perkembangan Audit Eksternal KAP tahun buku 2017. Report Development of Public Accounting Firm Audit in 2017.
5	14 Maret 2018 March 14, 2018	<ol style="list-style-type: none"> <i>Monitoring</i> Perkembangan Tindak Lanjut (TL) temuan BPK-RI Tahun Buku 2017 Monitoring the follow-up development of Financial Audit Agency findings in 2017
6	16 Maret 2018 March 16, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress Pelaksanaan Audit tahun Buku 2017. Report of Audit implementation for fiscal year of 2017.
7	21 Maret 2018 March 21, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress Audit Keuangan Tahun Buku 2017. Report of financial audit for fiscal year of 2017.
8	22 Maret 2018 March 22, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari 2018. Report Evaluation of Budget Realization for January 2018.
9	28 Maret 2018 March 28, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Realisasi Anggaran Bulan Februari 2018. Report Evaluation of Budget Realization for February 2018.
10	04 April 2018 April 04, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Komite Audit TW-I-2018. Evaluation on The I-QT/2018 performance of Audit Committee.
11	23 April 2018 April 23, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Laporan Realisasi Bulan Maret dan s.d TW-I/ 2018. Report Evaluation of March up to I-QT/2018.
12	30 April 2018 April 30, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi atas Laporan Realisasi <i>Audited</i> Tahun Buku 2017. Evaluation on Audited Realization Report for fiscal year of 2017.
13	09 Mei 2018 April 30, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan LHA-SPI TW-I/2018. Discussion on I-QT/2018 of LHA-SPI Report.
14	25 Mei 2018 May 25, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi atas laporan Realisasi anggaran Bulan April dan s.d April 2018. Evaluation on Budget Realization of April 2018 Report.
15	29 Juni 2018 June 29, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi atas Laporan Realisasi Anggaran Bulan Mei dan s.d Mei 2018. Evaluation on Budget Realization of Mei 2018 Report.



Komite Audit Audit Committee

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Agenda
16	18 Juli 2018 April 30, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Komite Audit Semester I-2018. Evaluation on Semester I-2018 of Audit Committee Performance . Lain-lain. Others.
17	08 Agustus 2018 August 08, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring Perkembangan Tindakan lanjut temuan BPK-RI Tahun Buku 2007 s.d 2016 dan Tahun Buku 2017. Monitoring the Follow-up development of Financial Audit Agency findings for fiscal year of 2007, 2016 and 2017. Laporan SPI Triwulan II/ 2018. II Quarter/2018 of Internal Audit Unit Report.
18	23 Agustus 2018 August 23, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal. Follow-up result of Internal and External Auditor Investigation. Realisasi PKPT SPI s.d Semester I Tahun 2018. Annual Oversight Work Plan of Internal Audit Unit for Semester I of 2018.
19	29 Agustus 2018 August 29, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juli 2018. Evaluation on Budget Realization Report of July 2018.
20	14 September 2018 September 14, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pemaparan Program Kerja KAP Djoko, Sidik, & Indra Audit Tahun Buku 2018 PT PELNI (Persero). Work Program presentation of Djoko, Sidik & Indra Public Accounting Firm for 2018 Fiscal Year of PT PELNI (Persero).
21	26 September 2018 September 26, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Hasil Assessment GCG Tahun 2017 PT PELNI (Persero). Follow-up result assessment of GCG of PT PELNI (Persero) 2017.
22	28 September 2018 September 28, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi laporan Realisasi Anggaran Bulan Agustus dan s.d Agustus 2018. Evaluation on Budget Realization Report of Agustus 2018.
23	17 Oktober 2018 October 17, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan RKAP PT PELNI (Persero) tahun 2019. Discussion on the Company' budget plan 2019 of PT PELNO (Persero).
24	07 November 2018 November 07, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan LHA-SPI Triwulan III/2018. Discussion on III-QT/2018 of LHA-SPI Report.
25	14 November 2018 November 14, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan LHA-SPI Triwulan III/2018. Discussion on III-QT/2018 of LHA-SPI Report.
26	21 November 2018 November 21, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan laporan Keuangan Konsolidasian dan PKBL Tahun 2018. Reviews on Financial Consolidated Statement and the Partnership and Community Development Program 2018.
27	05 Desember 2018 December 05, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober dan s.d Oktober 2018. Evaluation on Budget Realization Report of October 2018.
28	19 Desember 2018 December 19, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan PSO dan Subsidi. PSO and Subsidy Management. Evaluasi Laporan Realisasi anggaran Bulan November dan s.d November 2018. Evaluation on Budget Realization Report of November 2018.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah melakukan berbagai aktivitas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas aktivitas dan operasional Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit menyusun program kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi yang dicantumkan dalam Piagam Komite Audit. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Komite Audit berkoordinasi dengan internal audit untuk pelaksanaan pengumpulan dan pengujian bukti yang selanjutnya menjadi kajian Komite Audit. Adapun pelaksanaan program kerja Komite Audit pada sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

THE DUTIES IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE IN 2018

Throughout 2018, Audit Committee conducted various activities to assist the Board of Commissioners in performing the oversight function of the Company's operational. In performing its function, Audit Committee prepare the work program based on the responsibility, point of view and function stated in the charter of Audit Committee. In its implementation, Audit committee coordinate with Internal Audit to collect and discover the evidences as a review of Audit Committee. The work program implementation of Audit Committee throughout 2018 is as follows:



Komite Audit

Audit Committee

a. Bidang Manajemen

Komite Audit telah menjalankan tugas dan telaahan dan memberikan rekomendasi atas Laporan Manajemen bulanan, triwulanan ataupun semesteran kepada Perseroan. Selama tahun 2018 tercatat ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian manajemen PT PELNI (Persero):

1. Laporan bulanan yang di buat Manajemen belum mencerminkan kinerja anggaran dan operasional Kantor Cabang di daerah. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pentingnya Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Kantor Cabang PT PELNI (Persero), agar dapat tergambar Kantor cabang mana saja yang kinerjanya baik dan kantor cabang mana saja yang kinerjanya masih belum optimal.
2. Setiap bulan ada kendala operasional kapal berupa kendala teknis dan gangguan cuaca yang berdampak pada keterlambatan operasi kapal dan berkurangnya frekuensi sehingga produktivitas tidak tercapai dan menurunkan pendapatan.
3. Terdapat pengelolaan kapal perintis yang masih kurang efisiensi (penggunaan BBM masih sangat boros) dan mengalami berbagai macam kendala teknis (kerusakan mesin dan dokumen administrasi kapal). Sementara dari sisi manajemen, bagian/unit yang khusus menangani kapal perintis masih belum sepenuhnya bekerja dengan optimal.
4. Program pemerintah (Tol Laut), membuka peluang bagi PT PELNI (Persero) untuk memanfaatkan kapal barangnya. Meskipun dari sisi efisiensi, kapal-kapal barang milik PT PELNI (Persero) yang ada saat ini sudah kurang efisien dari sisi operasional. Dari sisi PT PELNI (Persero), meskipun di tahun 2018 ini mencatat laba, namun laba tersebut bukan berasal dari operasional kapal yang optimal, tetapi disebabkan karena adanya tambahan dana PSO untuk pengoperasian kapal barang PT PELNI (Persero).
5. Permasalahan keterlambatan pencairan dana PSO selama bertahun-tahun menjadi problem yang terus berulang. Hal ini menyebabkan kas PT PELNI (Persero) kurang likuid dan berisiko, sehingga PT PELNI (Persero) mau tidak mau akhirnya selalu menambah pinjaman modal kerja untuk mengatasi kesulitan likuiditas tersebut. Padahal

a. Management

Audit Committee performed its duties and review and given the recommendation for monthly, quarterly and semester management report to the Company. During 2018, recorded some concerned issues that needs an attention from PT PELNI (Persero):

1. The monthly report made by management has not reflected the budget performance and operation of Branch offices in the regions. Therefore, it is essential to consider the importance of budget realization and performances report of Branch offices of PT PELNI (Persero), so that can be reflected of which branch offices has not performing well and not performing optimally.
2. There are operational constraints of ship in the form of technical constraints and weather disruption in every month that impacts on the delay of ship operations and reduces the delay frequency so ship productivity is not achieved and income losses.
3. There is a Perintis ship management, which has less efficiency (spendthrift fuel usage) and experiences various technical constraints (engine damage and ship document administration). Meanwhile, from the management side, specifically part/unit does not fully work optimally.
4. The Government program (Tol Laut), gives the opportunities for PT PELNI (Persero) to utilize Cargo ships. Although in terms of efficiency, the existing cargo ships of PT PELNI (Persero) operate less efficiently from the operational side. Even though, PT PELNI (Persero) recorded a profit in 2018 that was not originated from optimal ship operation, but from the additional PSO funds for Cargo Ship operation of PT PELNI (Persero).
5. The delay problem in disbursing PSO funds over the years has been a recurring problem. This causes PT PELNI (Persero)'s cash less liquid and risky, so PT PELNI (Persero) inevitably adds working capital loans to overcome these liquidity difficulties. In fact, with the additional loans, it is even more burdensome for PT PELNI



Komite Audit Audit Committee

- dengan tambahan pinjaman tersebut, justru makin membebani PT PELNI (Persero) khususnya untuk pembayaran bunga pinjamannya. Untuk itu percepatan penandatanganan kontrak dengan Ditjen Perhubungan Laut harus dilakukan di awal tahun (bulan Januari).
- Laporan kemajuan program kerja perusahaan masih terlalu umum dan tidak *up to date* dengan kenyataan sebenarnya. Di samping itu juga tidak mencantumkan target waktu untuk pencapaian program secara lebih spesifik.
 - Selama tahun 2018, proses penyampaian Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan kepada Komite Audit berjalan cukup baik dan tepat waktu, kecuali untuk Laporan Oktober yang agak terlambat dan *un-audited* sampai akhir Januari 2019.
 - Dari sisi laba, kinerja PT PELNI (Persero) tidak ada perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan kinerja tersebut pada periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian laba tidak mengindikasikan posisi *cash flow* yang baik. Bahkan selama beberapa bulan terakhir, posisi kas untuk kegiatan operasional selalu mencatat nilai negatif, yang artinya beban operasional perusahaan lebih besar dibanding pendapatan operasional.
 - Program pengetatan/pengawasan terhadap penggunaan BBM yang dicanangkan PT PELNI (Persero) mencatatkan hasil yang cukup baik, karena mampu menekan biaya BBM rata-rata hampir 10% dibandingkan dengan penggunaan BBM dalam RKAP 2018.
 - Dari sisi kinerja kapal penumpang, terlihat bahwa terdapat fluktuasi yang bervariasi dari setiap kapal. Pada periode *peak season* (arus mudik dan arus balik hari raya Idul Fitri), kinerja kapal penumpang menunjukkan kenaikan pendapatan. Namun secara umum, tren jumlah penumpang kapal PT PELNI (Persero) dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hal ini harus diperhatikan oleh manajemen PT PELNI (Persero) dalam perencanaan.
 - Pengelolaan kapal ternak sepanjang tahun 2018 secara umum jauh dibawah target RKAP. Tujuan program kapal ternak untuk menurunkan harga daging, belum sepenuhnya terwujud.
- (Persero), especially for the payment of the loan interest. For this reason, the acceleration of the signing contract with Directorate-General of Sea Transportation must be done at the beginning of the year (January).
- The progress report of the company's work program is not specific and does not up to date with the actual reality. In addition, it also does not mention the schedule for achieving the program more specifically.
 - During 2018, the process of submitting the Monthly and Quarterly Management Reports to the Audit Committee is running well and on time, except for the rather late October Report and un-audited report until the end of January 2019.
 - In terms of profit, the performance of PT PELNI (Persero) has no significant improvement compared to the performance in the same period of the previous year. Earning revenues do not indicate a good cash flow position. Even during the last few months, the cash position for operating activities always recorded the negative value, which means that the company's operating expenses is greater than the operating income.
 - The program of tightening/monitoring the use of fuel launched by PT PELNI (Persero) recorded good results, because it was able to reduce fuel costs by an average of almost 10% compared to the use of fuel in the the Company's budget plan 2018.
 - In terms of the performance of passenger ships, it can be seen that there are varieties fluctuations from each ship. During the peak season period (homecoming of Eid al-Fitr), the performance of passenger ships showed an increase of income. But in general, the trend of the number of passengers on PT PELNI (Persero) ship from year to year has decreased. This must be considered by the management of PT PELNI (Persero) in planning progress.
 - Cattle ship management throughout 2018 was generally under the Company's budget plan target. The cattle ship program aims to reduce meat prices has not yet been fully realized.



Komite Audit

Audit Committee

12. Penggunaan dana PMN selama tahun 2018 masih belum signifikan dan ditemukan beberapa kendala internal (Penyusunan SOP, proses lelang, dll.) yang tidak sesuai dengan perencanaan semula. Untuk itu pada tahun 2019 diharapkan semua kendala internal yang menghambat penggunaan PMN harus diantisipasi oleh manajemen PT PELNI (Persero).

b. Bidang Audit Internal

Kinerja SPI di tahun 2018 terus membaik dari kualitas penyajian laporan, adapun dari sisi penyampaian Laporan triwulanan kepada Komite Audit belum sepenuhnya tepat waktu.

Dalam beberapa pertemuan rutin triwulanan dengan SPI, komite audit mencatat ada beberapa hal yang menjadi perhatian manajemen, yaitu:

1. Terkait temuan SPI, masih banyak temuan yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Hal ini menjadi fokus utama bagi SPI pada tahun 2019 untuk terus memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada auditan. Diperlukan adanya pertemuan rutin antara semua auditan dan SPI bersama Komite Audit untuk membahas tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI yang semula direncanakan di tahun 2018 belum dilakukan.
2. Kualitas penyajian laporan hasil pemeriksaan SPI (triwulanan) sudah menunjukkan perbaikan kualitas. Atribut temuan seperti judul temuan, kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi sudah cukup baik sehingga laporan tersebut menjadi lebih informatif. Hanya saja dibutuhkan konsistensi penyajian atribut temuan pada setiap laporan pemeriksaan. Karena beberapa temuan yang disajikan masih belum konsisten antara uraian kondisi dan uraian sebab atau sebaliknya.
3. Permasalahan SDM SPI yang sering mengalami rotasi menjadi kendala bagi SPI dalam melaksanakan PKPT. Akibat program PKPT pada Triwulan III hanya terealisasi 3 dari 8 program yang direncanakan. Di samping itu, program pendidikan dan pelatihan audit bagi SDM SPI perlu untuk ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas SDM SPI. Untuk itu usulan anggaran diklat perlu direalisasikan sesuai dengan kebutuhan diklat SDM SPI.

12. The use of PMN funds during 2018 was still insignificant and found several internal obstacles (SOP preparation, auction process, etc.) which is not in accordance with the original planning. Therefore, in 2019 is expected that all internal constraints hinder the use of PMN must be anticipated by the management of PT PELNI (Persero).

b. Audit Internal Side

Internal Audit Unit performance in 2018 continued to improve from the quality of reporting, while in terms of submitting quarterly reports to the Audit Committee it was not fully timely.

In several quarterly regular meetings with Internal Audit Unit, the audit committee noted that there were the number of things were concerned by management, namely:

1. Regarding Internal Audit Unit findings, there are still many findings that have not been followed up by auditing. This become the main focus for Internal Audit Unit in 2019 to continuously monitor the follow-up of audit results to audits. There is a necessary regular meetings between all audits and Internal Audit Unit with the Audit Committee to discuss the follow-up on Internal Audit Unit findings which has not been planned for 2018.
2. The quality of the report presentation from the examination of Internal Audit Unit (quarterly) has shown quality improvement. The findings of attributes such as the title of the findings, conditions, criteria, causes, consequences, and recommendations are good enough so that the report becomes more informative. It's just that consistency is required in presenting the findings attributes in each inspection report. Because some of the findings presented are still not consistent between the description of the condition and the cause or vice versa.
3. The Human Resources problem of Internal Audit Unit which often experiences rotation that is an obstacle for Internal Audit Unit in implementing PKPT. As the result of the PKPT program in the third quarter only 3 of 8 programs were planned. In addition, education and training programs for Human Resources of Internal Audit Unit need to improve the Human Resources quality of Internal Audit Unit. For this reason, the training budget proposal needs to be realized in accordance with the Human Resources training needs of Internal Audit Unit.



Komite Audit

Audit Committee

c. Bidang Audit Eksternal

1. Penunjukkan KAP

Untuk audit keuangan Tahun Buku 2018, RUPS pada tanggal 16 Mei 2018, untuk pengesahan laporan Tahun Buku 2017 telah menyetujui KAP Djoko, Sidik, & Indra sebagai Auditor melakukan General Audit Tahun Buku 2018.

2. Monitoring Proses Audit

Selama pelaksanaan proses audit oleh KAP Djoko, Sidik, & Indra, komite audit melakukan komunikasi dengan KAP dilakukan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 3 kali selama proses audit. Sampai dengan akhir tahun 2018 telah dilakukan entry meeting dengan KAP Djoko, Sidik, & Indra yang membahas mengenai ruang lingkup, metodologi dan hal-hal lain yang terkait dengan proses audit dan progres temuannya akan disampaikan tiap minggu untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh manajemen dengan disupervisi oleh Komite Audit.

3. Menilai Hasil Pelaksanaan Audit Eksternal (KAP)

Karena sampai laporan ini dibuat proses audit masih sedang berlangsung, kami belum dapat menilai hasil pelaksanaan audit oleh KAP Djoko, Sidik, & Indra secara lebih detail.

4. Menilai Hasil Audit (BPK)

Komite Audit bersama dengan SPI melakukan update atas tidak lanjut rekomendasi hasil audit BPK pada PT PELNI (Persero) yang masih belum selesai/masih belum ditindaklanjuti.

d. Bidang Penugasan dari Dewan Komisaris

1. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

Selama tahun 2018 Komite Audit belum menemukan adanya masalah yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris

- Januari : Tg. Priok, KM. Lawit dan KM. Dorolonda.
- Februari : Tg. Pinang, Batam, KM. Bukit Siguntang, dan KM. Sabuk Nusantara 30.
- Maret : Kupang, KM. Wilis dan KM. Nusantara 69.

c. External Audit

1. Public Accounting Firm

For the financial audit for the Fiscal Year of 2018, the GMS on May 16, 2018, for the ratification of the 2017 Financial Year report has approved Djoko, Sidik, & Indra Public Accounting Firm as the Auditor to carry out the General Audit for the Fiscal Year of 2018.

2. Audit Process Monitoring

During the audit process by Djoko, Sidik, & Indra Public Accounting Firm, the audit committee communicated with the Public Accounting Firm if it is needed, at least 3 times during the audit process. Until the end of 2018, an entry meeting was held with Djoko, Sidik, & Indra Public Accounting Firm which discusses the scope, methodology and other matters related to the audit process and the progress of the findings will be submitted every week to be immediately followed up by management with under supervision by Audit Committee.

3. Assessing the Results of External Audit (KAP)

Because until this report made, the audit process is still ongoing, we have not been able to assess the results of the audit conducted by Djoko, Sidik, & Indra Public Accounting Firm in more detail.

4. Evaluate Audit Report (BPK)

The Audit Committee with Internal Audit unit updated the recommendation of Financial Investigation Agency's audit to PT PELNI (Persero) which has not yet been completed/has not yet been followed up.

Assignment from the Board of Commissioners

1. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners

During 2018 the Audit Committee has not found any problems that require the attention of the Board of Commissioners.

2. Carry out the tasks given by the Board of Commissioners

- January : Tg. Priok, MV. Lawit and MV. Dorolonda.
- February : Tg. Pinang, Batam, MV. Bukit Siguntang, and MV. Sabuk Nusantara 30.
- March : Kupang, MV. Wilis and MV. Nusantara 69.



Komite Audit Audit Committee

Profil Anggota Komite Audit Profile of Audit Committee Member



Johanes Widodo Hario Mumpuni
 Ketua Komite Audit
 Head of Audit Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Usia | Age
 61 tahun per 31 Desember 2018
 61 years old as of December 31, 2018

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
 Yogyakarta Tahun 1957
 Yogyakarta, on 1957

Domisili | Domicile
 DKI Jakarta, Indonesia
 DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-264/MBU/12/2017
 Appointed as Head of Audit Committee based on SOE's Decision Letter No. SK-264/MBU/12/2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1993	Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary's University of Halifax, Nova Scotia, Canada Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary's University of Halifax, Nova Scotia, Canada	1983	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Bachelor Degree of Economy, Economic Faculty, Accounting Major, Gajah Mada University, Yogyakarta
------	--	------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2014 - Sekarang (Present)	Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat. Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) Expert Staff of Central Government Finance Field.	2007 – 2009	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.
1984 - Sekarang (Present)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indonesian Supreme Audit Institution (BPK).	2005 – 2007	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.
2009 – 2014	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III. Main Auditor (Tortama) State Finance III.		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
 None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris Independen Perseroan
 Independent Commissioner of the Company

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
 No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
 None



Komite Audit Audit Committee

Profil Anggota Komite Audit Profile of Audit Committee Member



Subagio
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Kediri, 15 Juni 1969
Kediri, June 15, 1969

Usia | Age
49 tahun per 31 Desember 2018
49 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No KEP.03/DK/VIII/2017
Appointed as Committee Audit member based on decree of board of Commissioner No. KEP.03/DK/VIII/2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2014	Master of Public Administration University of Canberra Australia Master of Public Administration University of Canberra Australia	1998	Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Terbuka Pondok Cabe Bachelor of Economic Development Studies at Terbuka University, Pondok Cabe
2011	Magister Manajemen STIE IPWIJA Master of Management STIE IPWIJA	1991	Diploma Spesialisasi Anggaran STAN Diploma of Budget Specialization at Indonesian State College of Accountancy
2006	Sarjana Sains Terapan Akuntansi STAN Bachelor of Applied Accounting Science at Indonesian State College of Accountancy		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - Sekarang (Present)	Anggota Komite Audit Perseroan Member of Audit Committee of the Company	2011- 2013	Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Head of Planning and Budget Division of Indonesia's Corruption Eradication Commission
2015 – 2016	Pengolah Data Sistem Informasi & Layanan SDM Senior Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Data Processor Information Systems & Senior HR Services of Directorate General of Treasury at Ministry of Finance	2005 – 2007	Bendahara Pengeluaran Komisi Pemberantasan Korupsi Spending Treasurer of Indonesia's Corruption Eradication Commission
2013 – 2015	Spesialis Perencanaan dan Anggaran Madya Komisi Pemberantasan Korupsi Planning and Budget Associate Specialist of Indonesia's Corruption Eradication Commission	2006 – 2009	Fungsional Pada Kedeputusan Bidang Penindakan KPK Functional On Deputy for Action of Indonesia's Corruption Eradication Commission

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Komite Audit Audit Committee

Profil Anggota Komite Audit Profile of Audit Committee Member



Joko Murdyono
 Anggota Komite Audit
 Audit Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Usia | Age
 47 tahun per 31 Desember 2018
 47 years old as of December 31, 2018

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
 Pati, 7 Oktober 1971
 Pati, October 7, 1971

Domisili | Domicile
 DKI Jakarta, Indonesia
 DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No KEP.03/DK/VIII/2017
 Appointed as Committee Audit member based on decree of board of Commissioner No. KEP.03/DK/VIII/2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2006	Magister Administrasi Bisnis STIA LAN Master of Business Administration at STIA LAN
------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - Sekarang (Present)	Anggota Komite Audit Perseroan Member of Audit Committee of the Company	2010 – 2014	Kasubag Akuntansi dan Verifikasi, Biro Keuangan dan Perlengkapan Head of Accounting and Verification, Finance and Equipment Bureau
2014 - Sekarang (Present)	Kabag Akuntansi dan BLU, Biro Keuangan dan Perlengkapan Head of Accounting and Public Service Agency, Finance and Equipment Bureau		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
 No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee

Dalam menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT PELNI (Persero) membentuk Komite Manajemen Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris. Tujuan dibentuknya Komite Manajemen Risiko adalah untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada Badan Usaha Milik Negara termasuk PT PELNI (Persero) tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) pada Badan Usaha Milik Negara. Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) SK: Kep.03/DK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

In supporting the implementation of good corporate governance, PT PELNI has formed risk policy committee that has responsible to assist the Board of Commissioners. Risk Policy Committee is aimed to assist the Board of Commissioners in conducting their responsibilities as supervisor, advisor and assessor for an effective risk management. Risk management on State-owned Enterprises including PT PELNI (Persero) that stated in the Ministry of State-owned Enterprises' decision Number: PER-01/MBU/2011 on August 01, 2011 as amended into the Ministry of State-owned Enterprises regulation regarding the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises. Risk Policy Committee of PT PELNI (Persero) was formed according to the Decree of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero): Kep.03/DK/XII/2015 dated on December 10, 2015 concerning the dismissal and appointment of the Chairman of the Risk Policy Committee by the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

KOMPOSISI KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-03/DK./VIII/2017 dan No. Kep-04/DK./VIII/2017, tanggal 01 Agustus 2017 serta No. Kep-06/DK/XII-2017 tanggal 4 Desember 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Kebijakan Risiko, maka susunan Komite Kebijakan Risiko per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

RISK POLICY COMMITTEE COMPOSITION

Based on the Decision of the Board of Commissioners No. Kep-03 / DK. / VIII / 2017 and No. Kep-04 / DK. / VIII / 2017, August 1, 2017 and No. Kep-06 / DK / XII-2017 dated December 4, 2017, regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Policy Committee, the composition of the Risk Policy Committee as of December 31, 2018 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukkan Basis of Appointment
Satya Bhakti Parikesit	Ketua Komite Kebijakan Risiko (Komisaris) Risk Policy Committee Chairman (Commissioner)	Kep-03/DK/VIII-2017
Abdul Kholik Sutrisno	Anggota Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Member	Kep-06/DK/XII-2017
Radjalis	Anggota Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Member	Kep-06/DK/XII-2017

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Seluruh anggota Komite Kebijakan Risiko merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

INDEPENDENCY OF RISK POLICY COMMITTEE MEMBERS

All members of Risk Policy Committee are professionals, experienced, and have no business relations either directly or indirectly related to the Company's business activities, which is to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities.



Komite Kebijakan Risiko

Risk Policy Committee

Komite kebijakan Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.

Risk Policy Committee has meet the criteria of independence, ability, experience and integrity required in the provision regulation.

Berikut adalah tabel pengungkapan Independensi dari Komite Kebijakan Resiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 :

The following is the table of Independency statements from Risk Policy Committee as of December 31, 2018:

Nama Name	Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik Executives of Public Accountant Firm	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	Memiliki Saham Perseroan (Langsung/Tidak Langsung) Shares Ownership in he Company (Direct/Non-Direct)	Hubungan Bisnis dengan Perseroan Business Affiliation with the Company
Satya Bhakti Parikesit	X	X	X	X	X
Abdul Kholik Sutrisno	X	X	X	X	X
Radjalis	X	X	X	X	X

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
2. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan;
3. Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi;
4. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya serta semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut;
5. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
6. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite Kebijakan Risiko.

DUTY AND RESPONSIBILITY OF RISK POLICY COMMITTEE

Risk policy committee of PT PELNI (Persero) has duties and responsibilities as follows:

1. Provide input to the Board of Commissioners regarding the preparation of risk management improvements related to risk control all areas of the company prior to the approval of the Board of Commissioners;
2. Discuss with the Board of Directors or unit of work related to risk management, if necessary;
3. Research and review the policies and regulations on risk management policies made by the Board of Directors;
4. Conduct periodic review of the risk management policies and their implementation guidelines as well as all the changes and adjustments to the risk management policies;
5. Evaluate the model's accuracy and validity of the data used to measure the risk; and
6. Deliver input to the Board of Commissioners on matters that received attention and which need to be discussed with the Board of Directors, so could be followed up from the evaluation of the risk management by the Risk Policy Committee.



Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee

RAPAT KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Komite Kebijakan Risiko selama tahun 2018 melakukan rapat sebanyak 19 (Sembilan belas) kali pertemuan dan telah didokumentasi dalam notulen rapat. Rincian jumlah kehadiran rapat masing-masing Anggota Komite Kebijakan sesuai tabel berikut:

RISK POLICY COMMITTEE MEETING

During 2018, Risk Policy Committee conducted 19 (Nineteen) meetings and has been documented in the minutes of the meetings. The total attendance of each member of Risk Policy Committee elaborated in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Satya Bhakti Parikesit	Ketua Chairman	19	19	100%
Abdul Kholik Sutrisno	Anggota Member	19	19	100%
Radjalis	Anggota Member	19	19	100%

AGENDA RAPAT KOMITE KEBIJAKAN RISIKO 2018

RISK POLICY COMMITTEE MEETING AGENDA 2018

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Meeting Agenda
1	03 Januari 2018. January 03, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Kerja Komite Kebijakan Risiko Tahun 2017. Preparing the realization report of the Risk Policy Committee work plan 2017. Penyusunan program Kerja Komite kebijakan Risiko Tahun 2018. Preparing the risk policy committee.
2	24 Januari 2018 January 24, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kunjungan Kerja Ke Tanjung Priok. Making the report of work field to Tanjung Priok. Penyusunan Rencana Kunjungan Kerja ke Tanjung Pinang dan Tanjung Perak Surabaya. Arranging the work field plan to Tanjung Pinang and Tanjung Perak Surabaya Port. Monitoring atas hasil evaluasi Kinerja manajemen Risiko (ERM) Laporan semester II Tahun 2017. Monitoring the evaluation result of Risk Management Performance (ERM) in the second semester of 2017.
3	28 Februari 2018 February 28, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan laporan Manajemen Risiko TW-IV/2017. Discussing the forth quarter/2017 of Risk Management report. Tindaklanjuti penanganan Risiko pendapatan tahun 2018. Following-up the income risk management in 2018.
4	07 Maret 2018 March 07, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan TW-IV/2017 Manajemen Risiko. Discussing the forth quarter/2017 of Risk Management report Tindaklanjuti Pengadaan Sparepart dan Perawatan Kapal Tahun 2018. Following-up the spare-part and ship maintenance procurement in 2018.
5	10 April 2018 April 10, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun laporan Komite kebijakan Risiko Triwulan I/2018 Arranging the first quarter/2018 of Risk Policy Committee report Monitor Mitigasi Risiko Perusahaan Bidang Pengadaan Suku Cadang Tahun 2018 Monitoring the risk mitigation on Spare-part procurement 2018. Lain-lain. Others.
6	22 Mei 2018 May 22, 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Risiko TW-I/2018. Discussing the first quarter/2018 of Risk Management report. Pembahasan Antisipasi dan Persiapan Angkutan lebaran tahun 2018M/1439H. Discussing for anticipation and preparation of homecoming transportation 2018M/1439H. Lain-lain. Others.



Komite Kebijakan Risiko

Risk Policy Committee

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Meeting Agenda
7	26 Juni 2018 June 26, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Monitoring</i> pelaksanaan angkutan lebaran 1439 H/2018 M. The Director exposure of Human Resources & Public Affairs related to the Development of Idle Assets.2. <i>Monitoring</i> Kesiapan Penyelesaian Laporan ERM TW II/2018 terkait 15 Risiko Utama. Monitoring the preparedness for the completion of ERM QTII/2018 related 15 main risks.3. Menyusun Rencana Evaluasi Laporan Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) Triwulan III tahun 2018. Preparing the evaluation plan on third quarter 2018 of risk management report of PT PELNI (Persero)4. Lain-lain. Others.
8	26 Juli 2018 July 26, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Rencana Evaluasi Laporan Manajemen Risiko TW-II/2018. Preparing the evaluation plan on QT II/2018 of risk management report.2. Lain-lain. Others.
9	30 Juli 2018 July 30, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Evaluasi Laporan Manajemen Risiko TW-II/2018. Discussing an evaluation on the second quarter/2018 of risk management report.
10	01 Agustus 2018 August 1, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Plh Ketua Komite Kebijakan Risiko. Discussing the changes in head of Risk Policy Committee.2. Pembagian tugas Dewan Komisaris. Dividing the Board of Commissioners duties.3. Pembahasan surat masuk terkait Penghapusbukuan dan pemindahtanganan barang Bekas di Gudang Presmat Tanjung Priok. Discussing the incoming mail related book write-off and transfer of Second-hand items in the Presmat Warehouse, Tanjung Priok.4. Lain-lain. Others.
11	08 Agustus 2018 August 08, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Tindak lanjut Penanganan Risiko Keselamatan Kapal dan <i>Asset Idle</i>. Follow-up mitigation on ship safety and asset idle risks.2. Lain-lain. Others.
12	16 Agustus 2018 August 16, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Evaluasi Laporan Manajemen Risiko TW-III/2018. Preparing an evaluation on QTII/2018 of Risk Management Report.2. Menyusun Risalah rapat Tanggal 08 Agustus 2018. Making the minutes of August 08, 2018 meeting.3. Lain-lain. Others.
13	27 September 2018 September 27, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Tindak lanjut hasil Evaluasi Laporan GCG PT PELNI (Persero) Tahun 2017. Follow-up an evaluation result on GCG report of PT PELNI (Persero) 2017.2. Penyempurnaan muatan Piagam Komite kebijakan Risiko. Finishing the board charter material of Risk Policy Committee.3. Lain-lain. Others.
14	25 Oktober 2018 October 25, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Laporan manajemen Risiko TW-III /2018. Discussing QT-III/2018 of Risk Management report.
15	13 November 2018 November 13, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Laporan Menejemen Risiko TW-III /2018 PT PELNI (Persero). Evaluating QT-II/2018 of risk management report.2. Lain-lain. Others.
16	26 November 2018 November 26, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Tindak lanjut Penanganan Risiko Angkutan barang dan Tol Laut. Discussing the Follow-up mitigation on cargo and Tol Laut risks.
17	10 Desember 2018 December 10, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Tindak lanjut Penanganan Risiko Keselamatan Kapal. Discussing the Follow-up mitigation on ship safety risks.
18	10 Desember 2018 December 10, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Tindak lanjut Penanganan Risiko Pengembangan Usaha. Discussing the follow-up mitigation on business development risk
19	08 Agustus 2018 August 08, 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Laporan Rapat TindakInjut Penanganan Risiko Asset Idle dan Pengadaan Suku Cadang Kapal. Preparing the report of follow up mitigation on asset idle and ship spare-part procurement.2. Lain-lain. Others.



Komite Kebijakan Risiko

Risk Policy Committee

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE KEBIJAKAN RISIKO 2018

Pada tahun 2018, Komite Kebijakan Risiko telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 19 (sembilan belas) Rapat Internal Komite Kebijakan Risiko dan membahas laporan kinerja Perseroan, Laporan Manajemen Risiko dan hal lain yang dianggap perlu.
2. Melakukan pertemuan dengan Unit Manajemen Risiko guna membahas potensi risiko, proses mitigasi risiko dan kecukupan staf yang ditugaskan serta pelaporan.
3. Melakukan pertemuan dengan Direksi PT PELNI (Persero) dan melakukan *monitoring* potensi dan mitigasi risiko di Direktorat SDM, Direktorat Armada, Direktorat Usaha Angkutan Penumpang, Direktorat Usaha Angkutan Barang, Direktorat Usaha Tol Laut serta Direktorat Keuangan secara periodik.
4. Melakukan kali evaluasi manajemen risiko Perusahaan disertai dengan penyampaian laporan evaluasi manajemen risiko perusahaan kepada Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan penugasan khusus dari Dewan Komisaris serta memberikan saran dan/atau pendapat atas penugasan tersebut.

RISK POLICY COMMITTEE WORKING PROGRAM REALIZATION 2018

In 2018, Risk policy committee realized work program and activity, among others:

1. Organizing 19 (nineteen) Internal Risk Committee Meetings and discussing the Company's performance reports, Risk Management Reports and other things deemed necessary.
2. Meeting with the Risk Management Unit to discuss potential risks, the risk mitigation process and the adequacy of the assigned staff and its reporting.
3. Periodically meeting with the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and monitoring potential and its mitigation in the HR Directorate, Fleet Directorate, Passenger Transport Business Directorate, Directorate of Cargo Transport Business, Tol Laut directorate and Financial Directorate.
4. Performing an evaluation of the Company's risk management along with the submission of the company's risk management report to the Board of Commissioners.
5. Carrying out special assignments from the Board of Commissioners and providing suggestions and / or opinions on the assignment.



Komite Kebijakan Risiko

Risk Policy Committee

Profil Anggota Komite Kebijakan Risiko

Profile of Risk Policy Committee Member



Satya Bhakti Parikesit
 Ketua Komite Kebijakan Risiko
 Head of Risk Policy Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
 Cimahi, 6 November 1972
 Cimahi, November 6, 1972

Usia | Age
 46 tahun per 31 Desember 2018
 46 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
 DKI Jakarta, Indonesia
 DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko berdasarkan SK No. Kep-06/DK/XII-2017
 Appointed as Head of Risk Policy Committee based on Decision Letter No. Kep-06/DK/XII-2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2000	Ph.D of International Law University of Nottingham, Inggris Ph.D of International Law University of Nottingham, England	1999	Magister Hukum Universitas Padjajaran Master Degree of Law Universitas Padjajaran
1995	Sarjana Hukum Universitas Indonesia Bachelor Degree of Law Universitas Indonesia		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2015 - Sekarang (Present)	Komisaris PT PELNI (Persero) Commissioner of PT PELNI (Persero)	2015	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Expert Staff in Legal and International Relation
2011	Deputi Kemaritiman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Deputy of Maritime in Cabinet Secretariat of Republic of Indonesia		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
 None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris Perseroan
 Commissioner of the Company

Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet
 Deputy of Secretariat- Cabinet Economic Affairs

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
 No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
 None



Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee

Profil Anggota Komite Kebijakan Risiko Profile of Risk Policy Committee Member



Abdul Kholik Sutrisno
Anggota Komite Kebijakan Risiko
Risk Policy Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Tasikmalaya, 14 April 1984
Taskmalayai, April 14, 1984

Usia | Age
34 tahun per 31 Desember 2018
34 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Kebijakan Risiko berdasarkan SK No. Kep-06/DK/XII-2017
Appointed as Committee Audit member based on SK No. Kep-06/DK/XII-2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2009	Sarjana Ekonomi STIE Muhammadiyah Jakarta Bachelor of Economy STIE Muhammadiyah Jakarta	2005	Diploma Akuntansi STAN Diploma of Accounting STAN
------	--	------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Anggota Komite Kebijakan Risiko Perseroan Member of Risk Policy Committee of the Company	2017	PT Barata Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero)
2013	PT Bina Karya (Persero) PT Bina Karya (Persero)		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Komite Kebijakan Risiko

Risk Policy Committee

Profil Anggota Komite Kebijakan Risiko

Profile of Risk Policy Committee Member



Radjalis
 Anggota Komite Kebijakan Risiko
 Member of Risk Policy Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
 Padang, 3 Desember 1962
 Padang, December 3, 1962

Usia | Age
 56 tahun per 31 Desember 2018
 56 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
 DKI Jakarta, Indonesia
 DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Kebijakan Risiko berdasarkan SK No. Kep-06/DK/XII-2017
 Appointed as Committee Audit member based on SK No. Kep-06/DK/XII-2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2006	Magister Administrasi Bisnis STIA LAN Master of Business Administration at STIA LAN	1988	Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Bachelor Degree of Jayabaya University
------	--	------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - Sekarang (Present)	Anggota Komite Kebijakan Risiko Perseroan Member of Risk Policy Committee of the Company	2016	Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi Head of Governance of Transportation Services Infrastructure System
2015	Kepala Kajian Kemitraan dan Pelayanan Transportasi laut & Manajemen Transportasi Head of Partnership Studies and Services of Marine Transportation & Transportation Management	2013	Kasubag Perlengkapan Transportasi Laut Biro Keuangan Head of the Sea Transportation Division of the Finance Bureau

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
 None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
 None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
 No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
 None



Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi

Nomination and/or Remuneration Function

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN TATA KELOLA

Secara struktural, Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi di bawah koordinasi Dewan Komisaris. Namun fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan tetap dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko.

KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI DIREKSI

Perseroan telah memiliki mekanisme penetapan kandidat pengganti/suksesor Direksi, yaitu dengan mempunyai "Talent Pool" satu tingkat di bawah Direksi. Proses penilaian kompetensi dilakukan oleh Konsultan Independen. *Talent Pool* tersebut akan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

NOMINATION, REMUNERATION AND GOVERNANCE COMMITTEE

Structurally, the Company has no Nomination and Remuneration Committee under the coordination of the Board of Commissioners. However, the Company's nomination and remuneration functions are still conducted by the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee and the Risk Committee.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The Company has a mechanism to appoint Board of Directors successor candidate with "Talent Pool" one level below the Board of Directors. The competency assessment process is done by Independent Consultant. Talent Pool will be proposed by the Board of Commissioners to the Shareholders.





Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) serta menjaga kepatuhan PT PELNI (Persero) terhadap hukum dan perundang-undangan. Sekretariat Perusahaan juga mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsinya tersebut *Corporate Secretary* memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- Menyiapkan rencana kerja (jangka panjang, menengah dan pendek) dan program kerja Perseroan yang berkaitan dengan Humas, Kelembagaan & CSR, Kesekretariatan Direksi & GCG serta Pengelolaan Dokumen Korporat;
- Menyiapkan konsep peraturan kebijakan dan system prosedur dalam pengelolaan hubungan korporat, GCG, CSR, dokumentasi dan keprotokolan Perseroan, kesekretariatan layanan umum rumah tangga kantor Direksi;
- Menyelenggarakan kegiatan hubungan korporat, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dokumentasi dan keprotokolan Perseroan, kesekretariatan serta layanan umum rumah tangga kantor Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direksi di Kantor Cabang, Kapal, SBU, Instansi terkait dilingkup internal dan eksternal Perseroan;
- Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Perusahaan;
- Menyiapkan laporan berkala dan/atau laporan khusus kegiatan Sekretariat Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017

Adapun kegiatan-kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2018 antara lain:

- Sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) meliputi hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, lembaga lain dan publik;
- Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan;
- Memastikan bahwa PT PELNI (Persero) mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku;

Corporate Secretary is a liaison officer between the Company and stakeholders as well as to maintain compliance of PT PELNI (Persero) with the Law and regulatory frameworks. The Corporate Secretary also carries mission to support positive corporate image building consistently and continuously through effective communication program management to all Stakeholders.

DUTY AND RESPONSIBILITY OF CORPORATE SECRETARY

Description of duties and responsibilities of the Corporate Secretary is as follows:

- Preparing the work plans (long, medium and short term) and corporate work programs related to Public Relation, Institutional & CSR, Secretariat of the Board of Directors & GCG and Corporate Document Management;
- Preparing the concept of regulatory policies and system procedures in management of corporate relationships, GCG, CSR, corporate documentation and protocol, secretarial, household general services of the Board of Directors;
- Conducting corporate relations activities, good corporate governance and corporate social responsibility (CSR), corporate documentation and protocol, secretarial and the household general services of the Board of Directors in accordance with applicable regulations;
- Coordinating the activities implementation of the Board of Directors in Branch Offices, Ships, SBUs, related Institutions covering internal and external of the Company;
- To manage and mitigate risks in the implementation of the secretariat activities of the Company;
- Preparing periodic reports and / or special reports on the secretariat activities of the Company in accordance with applicable regulations.

CORPORATE SECRETARY DUTY IMPLEMENTATION REPROT 2017

Activities of the Corporate Secretary in 2018 are among others:

- As a liaison officer including the company's relationship with shareholders, regulators, other agencies and the public;
- Responsible for Corporate Secretariat;
- Ensure that PT PELNI (Persero) has obliged the applicable regulations on disclosure requirements;



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

- Membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan komunikasi terhadap publik internal dan eksternal;
- Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan mematuhi Perseroan untuk mematuhi peraturan tersebut;
- Membuat dokumentasi;
- Mengawal jalannya GCG dan CSR.
- Make the planning, implementation and control of public communication activities to internal and external;
- Following the development of the applicable regulations for the company to comply with these regulations;
- Creating documentation;
- Escorting the course of GCG and CSR.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary



Ridwan Mandaliko
Kepala Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretary

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
Padang, 01 September 1970
Padang September 01, 1984

Usia | Age
48 tahun per 31 Desember 2018
48 years old as of December 31, 2018

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Kepala Sekretariat Perusahaan berdasarkan 12.15/01/SK/HKO.01/2018
Appointed as Head of Corporate Secretary based on 12.15/01/SK/HKO.01/2018

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2002	Sarjana Ekonomi Bidang Manajemen Bachelor of Economy in Management	1993	Diploma Pelayaran Tata Laksana Diploma of Shipping Tata Laksana
------	---	------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2018	Kepala Sekretariat Perusahaan PT PELNI (Persero) Head of Corporate Secretary PT PELNI (Persero)	2017	Kacab PELNI Manado Head of PELNI Manado Branch
2016	Kacab PELNI Bali Head of PELNI Bali Branch	2016	Kacab PELNI Pare Pare Head of PELNI Pare Pare Branch

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Internal Audit Unit (SPI)

Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perseroan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang menjalankan fungsi Audit Internal untuk mengamankan aset dan kepentingan perusahaan. Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No: 12.22/2/SK/HKO.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang menjelaskan visi, misi, tujuan, ruang lingkup struktur, standar dan kode etik, wewenang, tugas dan tanggung jawab dari unit Satuan Pengawasan Intern.

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN PIHAK YANG MENANGKAT/MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan di atas, Perseroan telah membentuk Satuan Pengawasan Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dan dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen yang dilakukan secara bebas dan tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan oleh Manajemen maupun pihak lainnya dalam organisasi perusahaan.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern di Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam struktur organisasi Perusahaan, SPI berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
2. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Kepala SPI secara struktural bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Personil SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

As an effort to apply the principles of GCG, the Company established an Internal Control Unit that carries out the Internal Audit function to secure the company's assets and interests. The establishment of Internal Audit Unit refers to the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2003 of Chapter VI concerning State-Owned Enterprises, Government Regulation No.12 of 1998 concerning Limited Liability Companies, the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / MBU / 2012 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE), and Internal Audit Charter stipulated in Directors Decree No: 12.22 / 2 / SK / HKO.01 / 2014 date December 22, 2014 which explains the vision, mission, objectives, scope of the structure, standards and codes of ethics, authority, duties and responsibilities of the Internal Audit Unit.

POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT AND PARTY APPOINTING/DISSMISSING THE HEAD OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

In order to fulfill the above conditions, the Company has formed an Internal Audit Unit which is directly responsible to the President Director. The position of Internal Audit unit as an organ to assists the President Director that is equivalent in organizational structure for their roles and responsibilities, and in expressing views and thoughts related to the implementation of supervision to Management that is carried out freely and cannot be influenced or suppressed by Management and other parties in the Company's organization.

The position of the Internal Audit Unit in the Company is explained in the following terms:

1. In the organizational structure of the Company, Internal Audit Unit is under the President Director and led by a Head of Internal Audit Unit.
2. The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
3. The Head of Internal Audit Unit is structurally responsible to the President Director and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
4. Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of SPI.

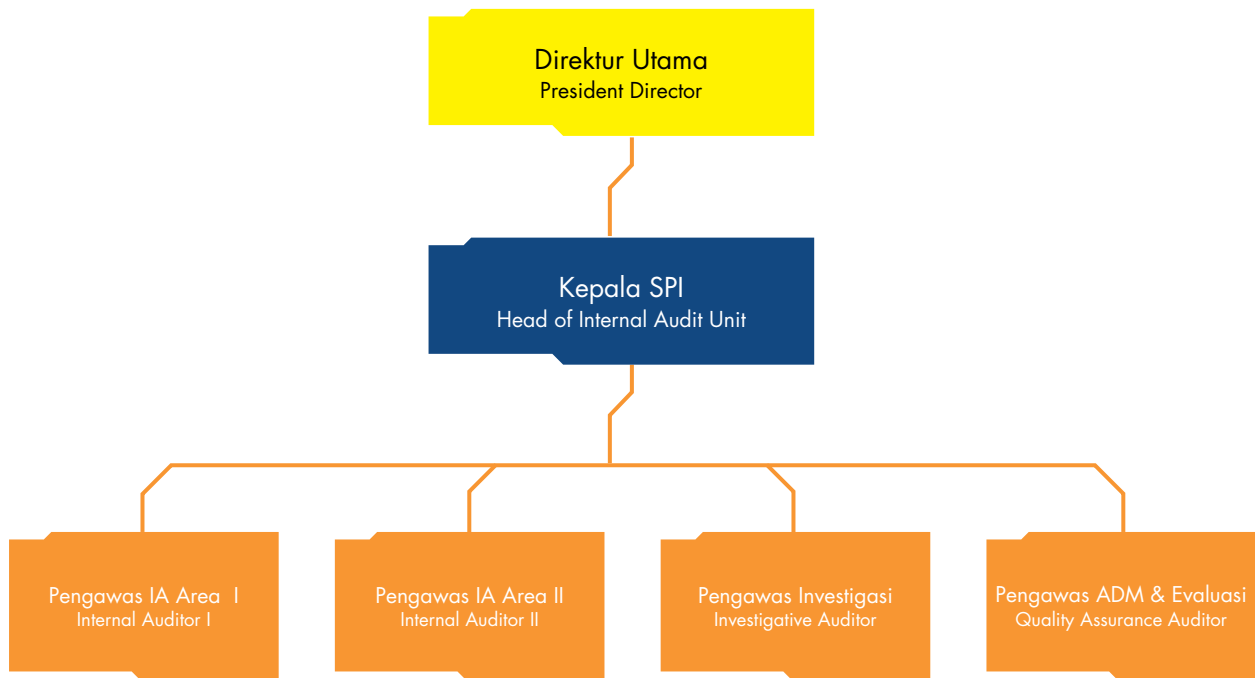


Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)

Jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern (KaSPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

The position of Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.

Struktur Organisasi SPI SPI Organization Structure



JUMLAH DAN KUALITAS AUDITOR INTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pengawasan Intern dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengawas Intern Area I, Pengawas Intern Area II, Pengawas investigasi, Pengawas Administrasi & Evaluasi. Saat ini, jumlah pegawai SPI Perseroan berjumlah 11 (sebelas) orang dengan susunan internal auditor Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

NUMBER AND QUALITY OF INTERNAL AUDITOR

In carrying out its duties, the Head of the Internal Audit Unit is assisted by Internal Auditor I, Internal Auditor II, Investigative Auditor, and Quality Assurance Auditor. Currently, the total number of Internal Audit Unit employees of the Company is 11 (eleven) personnel with the internal auditor composition of the Company's auditors as of December 31, 2017 is as follows:



Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)

KOMPOSISI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERN 2018

INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL COMPOSITION 2018

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Donni Rachmadi	Plh.Kepala SPI/Pengawas Investigasi Acting as Head of Internal Audit Unit/Investigative Auditor
2	Dahlia	Pengawas Adm & Evaluasi Quality Assurance Auditor
3	Damli, SE	Pemeriksa Utama Expert Auditor
4	M. Suwadi	Pemeriksa Utama Expert Auditor
5	Deni Hendayana	Pemeriksa Utama Expert Auditor
6	Yusman Sugeng	Pemeriksa Madya Junior Auditor
7	Sudjito	Pemeriksa Madya Junior Auditor
8	Nunung Nuraeni	Pemeriksa Madya Junior Auditor
9	Fatmawati	Pemeriksa Madya Junior Auditor
10	Ivan Eka Aditya	Junior Staff Junior Staff
11	Rohanah	Senior Officer Senior Officer

PIAGAM AUDIT INTERNAL

SPI merujuk Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 22 Desember 2014 sebagai landasan formal tertulis yang menjadi pedoman bagi Satuan Pengawasan Intern Perseroan dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Piagam Pengawasan Internal memuat:

1. Pendahuluan.
2. Visi dan Misi.
3. Tujuan.
4. Penyempurnaan.
5. Struktur dan Kedudukan.
6. Independensi dan Objektivitas.
7. Tugas dan Tanggung Jawab.
8. Wewenang.
9. Persyaratan Auditor.
10. Standar dan Kode Etik.
11. Larangan Rangkap Tugas.
12. Pola Hubungan.
13. Rivi Internal *Audit Charter*.
14. Penutup.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit Unit (SPI) refers to the Internal Audit Charter stipulated by the President Director dated December 22, 2014 as a written formal basis which guides the Company's Internal Audit Unit in exercising its authorities, duties, and responsibilities competently, independently and accountably.

The Internal Audit Charter includes:

1. Introduction.
2. Vision and Mission.
3. Objectives.
4. Improvement.
5. Structure and Position.
6. Independency and Objectiveness.
7. Duty and Responsibility.
8. Authority.
9. Auditor Requirement.
10. Standard and Code of Conducts.
11. Dual Position Prohibition.
12. Relationship Mechanism.
13. Internal Audit Charter Review.
14. Closing.



Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Internal Audit Unit (SPI)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
- b. Mengevaluasi integritas dan kehandalan, informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut;
- c. Mengevaluasi sistem yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur, peraturan perundangan yang memiliki dampak besar terhadap organisasi Perseroan;
- d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- e. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan penggunaan aset/alat produksi serta kegiatan lainnya.
- f. Melakukan audit atas badan usaha afiliasi dan Anak Perusahaan, atas permintaan Direktur Utama dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
- g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- h. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, up. Komite Audit;
- i. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh SPI dan/atau Auditor Eksternal;
- j. Melakukan evaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- k. Melakukan audit khusus, apabila diperlukan atas permintaan Direktur Utama atau sebagai pengembangan hasil audit sebelumnya.
- l. Melakukan kegiatan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern, serta praktik GCG dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan secara berkesinambungan.

DUTY AND RESPONSIBILITY OF SPI

Description of SPI's duty and responsibility is stipulated based on Internal Audit Charter, as follows:

- a. Develop and implement the Annual Audit Work Program (PKAT);
- b. Evaluate the integrity and reliability, information and the tools used to identify, measure, classify and report such information;
- c. Evaluate system created to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations that have a major impact on the organization of the company;
- d. To test and evaluate the implementation of the internal control and risk management system in accordance with the company's policies;
- e. Perform an audit and assessment of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and the use of assets/tools of production and other activities.
- f. Conduct an audit of a business affiliates and subsidiaries, at the request of the President Director and the report submitted to the Director and the Board of Commissioners of the subsidiaries;
- g. Provide suggestions for improvements and information on the activities examined at all levels of management;
- h. Create audit reports and submit the report to the Director and the Board of Commissioners, up. Audit Committee;
- i. Monitor, analyze and report on implementation of the improvements that have been suggested by Internal Control Unit and/or the External Auditors;
- j. Evaluate the quality of internal audits that being carried out;
- k. Conduct special audit, if necessary, at the request of the President Director or as a development of the previous audit results.
- l. Conduct consultations with regard to risk management, internal control systems, as well as GCG practices in an effort to improve the performance and value of the company on an ongoing basis.



Satuan Pengawan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)

PELATIHAN INTERNAL AUDITOR 2018

Demi menunjang kebutuhan, tingkat efektifitas dan lancarnya operasional Perseroan dalam melakukan Audit Internal, maka selama tahun 2018, Perseroan telah memberikan pelatihan bagi para personil SPI. Rincian pelatihan yang diikuti oleh masing-masing internal auditor, sebagai berikut:

INTERNAL AUDITOR TRAINING 2018

In order to support the need, the level of effectiveness, and smooth operation of the company in conducting Internal Audit, then during 2018, the Company has provided training for SPI personnel. Detail explanation of trainings participated by each internal auditors is as follows:

No	Nama Name	Pelatihan Training
1	Donni Rachmadi	DDA, AK, PTTA
2	Dahlia	DDA, AO, AK
3	Damli, SE	DDA, AO
4	M. Suwadi	DDA, IAD 1, AO
5	Deni Hendayana	AUP
6	Yusman Sugeng	IAD 1
7	Sudjito	IAD 1
8	Nunung Nuraeni	DDA, AO
9	Fatmawati	IAD 1
10	Ivan Eka Aditya	IAD 1
11	Rohanah	DDA

Catatan | Notes:

- DDA = Dasar Dasar Audit | Basic Audits
- AO = Audit Operasional | Operational Audit
- KPA = Komunikasi dan Psikologi Audit | Audit Communication And Psychology
- AK = Audit Kecurangan | Fraud Audit
- PTTA = Pengelolaan Tugas Tugas Audit | Audit Duties Management
- IAD1 = Internal Audit Tingkat Dasar 1 | Basic Internal Audit 1
- KKP = Kertas Kerja Pemeriksaan | Inspection Working Paper
- PLHAE = Penulisan Laporan Hasil Audit Yang Efektif | Effective Audit Report Preparation
- AS = *Audit Sampling* | Audit Sampling
- EDP = *Electronic Data Processing* | Electronic Data Processing
- INSW = *Indonesia National Single Windows* | Indonesia National Single Windows
- GA = *General Audit* | General Audit
- ACL = *Audit Command Language* | Audit Command Language
- RBA = *Risk Based Audit* | Audit Command Language
- AL = *Audit Lingkungan* | Environmental Audit
- APSPi = *Audit Penilaian Sistem Pengendalian Internal* | Internal Control System Assessment Audit
- AP = *Audit Psikologi* | Psychology Audit
- AID = *Audit Investigative Dasar* | Basic Investigative Audit
- ADTT = *Audit Dengan Tujuan Tertentu* | Audit with certain objectives
- AI = *Audit Investigasi* | Investigation Audit
- AIL = *Audit Internal Lanjutan* | Advanced Internal Audit



Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)

REALISASI PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2018

Realisasi PKAT Tahun 2018

Posisi: Per 31 Desember 2018

REALIZATION OF INTERNAL CONTROL YEAR 2018

Realization of PKAT 2018

Position: As of December 31, 2018

Obyek Object	TW I				TW II				TW III				TW IV				Jumlah Total			Keterangan Description	
	P	R	% TW I	% s/d TW I	P	R	% TW II	% s/d TW II	P	R	% TW III	% s/d TW III	P	R	% TW IV	% s/d TW IV	P	R	%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
Cabang Branch Office	28	8	4	50%	14%	4	0	0%	1%	10	1	10%	18%	6	0	0%	18%	28	5	18%	
Kapal Ship	9	4	3	75%	33%	0	0	0%	33%	1	0	0%	33%	4	0	0%	33%	9	3	33%	
SBU SBU	1	0	0	0%	0%	1	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	1	0	0%	
Kantor Pusat Head Office	1	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	1	2	200%	200%	0	1	0%	300%	1	3	300%	
	39	12	7	58%	18%	5	0	0%	18%	12	3	25%	26%	10	1	10%	28%	39	11	28%	

Keterangan | Remarks:

P = Perencanaan | Planning
R = Realisasi | Realization



Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit Profile



Donni Rachmadi
 Kepala Satuan Pengawasan Intern
 Head of Internal Audit Unit

Kewarganegaraan | Citizenship
 Indonesia
 Indonesian

Usia | Age
 53 tahun per 31 Desember 2018
 53 years old as of December 31, 2018

Tempat & Tanggal Lahir | Place & YOB
 Jakarta, 25 Juli 1965
 Jakarta, July 25, 1965

Domisili | Domicile
 Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
 Bekasi, East Java, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Nota Dinas Direktur SDM & Umum No.01.02/02/ND/040/2018
 Appointed as Head of Internal Audit Unit based on Official Memo of Director of Human Capital and General Affair No No.01.02/02/ND/040/2018

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2001	Sarjana Manajemen Transportasi Laut Bachelor of Sea Transportation Management
------	--

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Pengawas Investigasi, pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) Investigation Supervisor of Internal Control Unit	2014 - 2015	Manager Monitoring BBM Kapal, pada Biro BBM Ship Fuel's Manager Monitoring of Fuel Bureau
2013 - 2014	Expert Internal Auditor (bidang audit khusus) pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Auditor Expert (Special Audit Unit) of Internal Control Unit	2012 - 2013	Internal Auditor ISM Code & SMK 3, pada DPA/CSO ISM Code & HSE Internal Auditor of DPA/CSO

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
 No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan Saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None



Auditor Eksternal

External Auditor

Auditor Eksternal berkewajiban memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan yang benar akan membantu menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi terkait, termasuk untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Penyajian laporan keuangan dengan benar sesuai standar adalah kewajiban di mata hukum, dan sebagai Perusahaan yang baik selayaknya kita patuh terhadap hukum dan peraturan yang telah diatur.

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, PT PELNI (Persero) telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan etika profesi yang berlaku.

Adapun Fee Audit 5 tahun Terakhir adalah sebagai berikut:

External auditor is obliged to provide opinion on fairness and compliance of the Financial Statements with accounting principle that is commonly prevailed in Indonesia. Correct financial statements will help increase public confidence in the company or related organization, including improving the company's performance. The presentation of financial statements correctly according to the standards is a legal obligation, and as a good Company we should comply with laws and regulations that have been regulated.

FINANCIAL STATEMENTS AUDIT

In the implementation of Financial Statements Audit in Fiscal Year 2018, PT PELNI (Persero) had appointed Public Accountant Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra to perform the duty based on auditing standard prevailed by Indonesia Accountant Association and applicable professional ethics.

Explanation about audit fee in 5 recent years is as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of KAP	Biaya Audit (Rp) Audit Fee (Rp)	Opini Audit Audit Opinion
2018	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp887.580.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2017	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp658.000.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2016	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp652.025.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2015	KAP Bambang Mudjiono & Widiarto	Rp449.900.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2014	KAP Hendrawinata, Eddy & Siddharta	Rp579.250.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect

Selama tahun 2018, KAP Djoko, Sidik & Indra memberikan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan yaitu jasa audit kepatuhan dan laporan kinerja Perseroan.

Throughout 2018, KAP Djoko, Sidik & Indra provided other services than financial statements audit which was compliance audit and performance report audit.



Manajemen Risiko

Risk Management

Aktivitas perusahaan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal menyebabkan risiko bisnis menjadi semakin kompleks. Terciptanya *good corporate governance* tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko sehingga manajemen risiko merupakan kekuatan vital bagi *good corporate governance*. Manajemen risiko sangatlah penting sehingga menjadi hal mendesak yang harus diterapkan, karena melalui penerapan manajemen risiko secara formal, terstruktur dan terintegrasi perusahaan akan mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis.

MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN DALAM PERUSAHAAN

Integrated Balance Scorecard dengan Risk Management ISO 31000:2018

Pada Laporan Manajemen Risiko Triwulan III 2018 disampaikan bahwa salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh pemilik risiko adalah konsistensi dalam melaksanakan *response plan* atau tindak lanjut mitigasi risikonya. Tingkat efektifitas penanganan risiko yang diukur dari pencapaian *key risk indicator* aktual dibandingkan *key risk indicator* target menunjukkan aktifitas atau *progress* tindakan yang telah dilakukan oleh risk owner. Sampai dengan Triwulan III 2018, identifikasi risiko perusahaan masih berdasarkan sasaran tugas pokok fungsi masing-masing unit kerja, sehingga belum memberikan dampak penanganan risiko berdasarkan sasaran strategis perusahaan.

Dari analisa kondisi diatas maka kemudian dalam upaya lebih meningkatkan fungsi pengelolaan risiko perusahaan yaitu "To Create and Protect Value" maka pada Triwulan IV 2018 ini dilakukan salah satu *improvement* yaitu melakukan penanganan risiko-risiko perusahaan berdasarkan Sasaran Strategis Perusahaan (*strategic objective*) dengan cara melakukan integrasi antara *Balance Scorecard* dengan *Risk Management ISO 31000*. Metodologi *Balance Scorecard* merupakan manajemen kinerja dalam kerangka kerja yang terukur berdasarkan sasaran strategis perusahaan yang terdiri dari 4 perspektif yaitu *Finance, Customer Focus, Internal business process* dan *Learning & Growth*.

Metode *balance scorecard* untuk mengukur *result* kinerja dengan *framework strategy map* yang terdiri dari *strategic objective, key performance indicator* dan *strategic initiative* sedangkan *risk management* dengan *framework risk assessment* yang berisi *risk identification, key risk indicator* dan *response plan (mitigation plan)*. Dengan melakukan integrasi *balance scorecard* dan *risk management* maka

The Company activities are always faced with risks and closely related to its function to create value for the stakeholders. The rapid development of external and internal environments causes business risks for becoming increasingly complex. The creation of good corporate governance is inseparable from the risk management implementation. Therefore, risk management is a vital power for good corporate governance. Risk management is very important that it becomes an urgent matter to be implemented, because through formally, structured and integrated implementation of The Company's Risk Management will be able to adapt with the business environment.

RISK MANAGEMENT APPLIED IN THE COMPANY

Integrated Balance Score Card and Iso 31000:2018 Risk Management

In Quarter IV Risk Management Report of 2018 stated one of the factors that needs to be conducted by risk owner is consistency in implementing the response plan or following-up its risk mitigation. The effectiveness level of risk handling measured by the achievement of the actual key risk indicator compared to the key risk indicator target shows the activity or progress of actions taken by the risk owner. Until III quarter 2018, to identify the Company's risk remains based on the main function of each work unit, so it has not impacted on risk management according to the Company's strategic objectives.

From analysis mentioned above, as an effort to improve risk management function deeply is "To create and Protect Value" then in Quarter IV of 2018, Managing the Company's risk based on the Company's strategic objectives by integrating the balance scorecard with ISO 31000 Risk Management. Balance Scorecard Methodology is management performance within a framework measured according to the Company's strategic objectives consisting of 4 perspectives, among others; Finance, Customer Focus, Internal Business process and Learning & Growth.

Balance scorecard method is to measure the performance result and strategy framework that consists of strategic objectivity, key performance indicators and strategic initiatives however risk management and risk assessment frameworks contain risk identification, key risk indicators and response plan (mitigation plan). By integrating balance scorecard and risk management, can be identified and



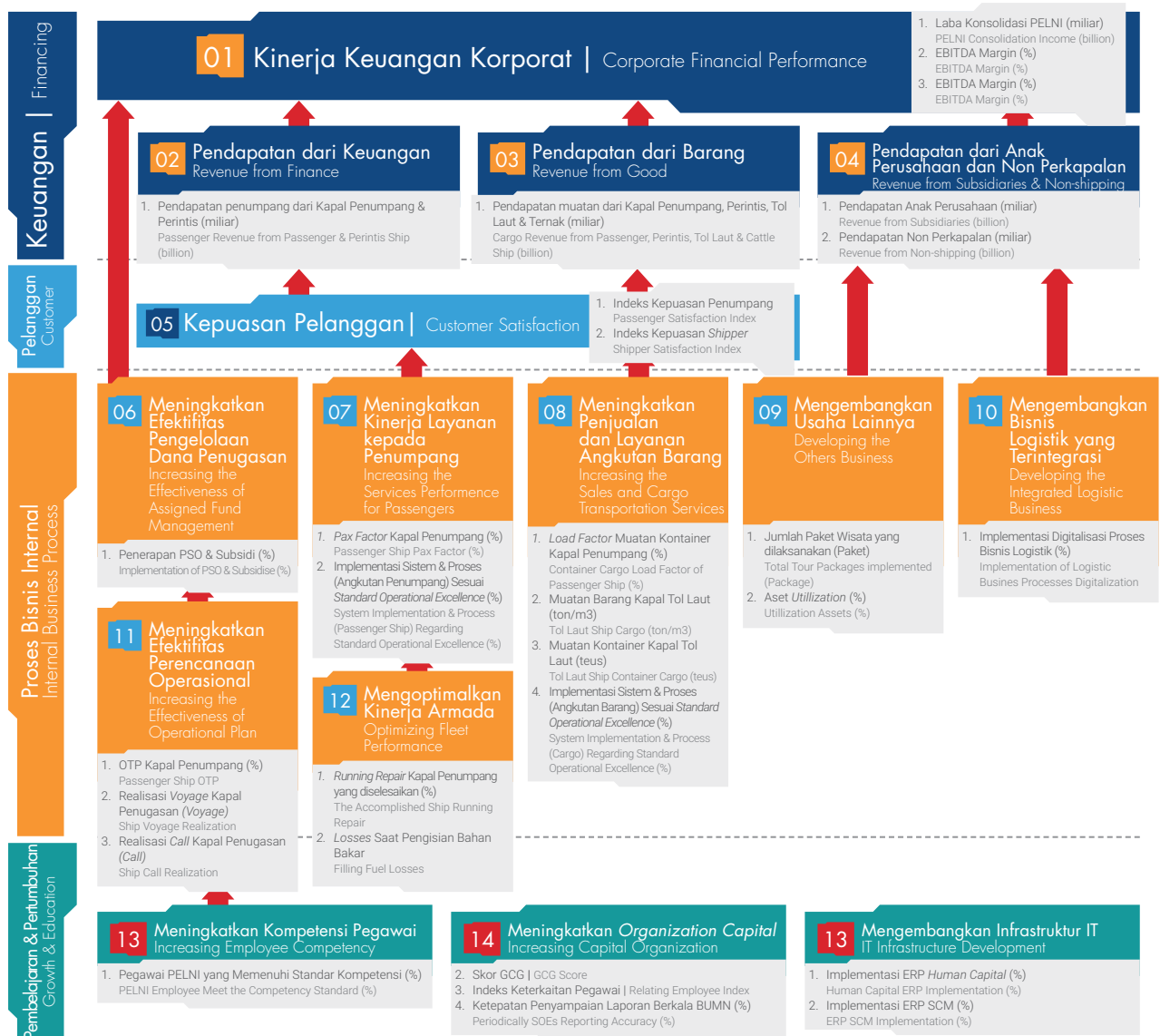
Manajemen Risiko Risk Management

dapat ditemukan dan dilakukan pengelolaan KPI perusahaan yang berkualitas untuk mendorong kinerja organisasi dengan menetapkan KRI sebagai *early warning system* untuk mengendalikan ancaman terhadap pencapaian *strategic objective* perusahaan.

Untuk memberikan gambaran secara utuh proses integrasi *balance scorecard* dengan *risk management* iso 31000, maka berikut dibawah ini merupakan *strategy map* PT PELNI (Persero) tahun 2018 based on 4 perspektif *balance scorecard* yaitu *finance*, *customer focus*, *internal business process* dan *learning & growth*.

escorted the management quality of the Company's key performance indicators to encourage organizational performance by establishing key risk indicator as an early warning system to control threats against the achievement of the Company's objective strategy.

To provide a complete picture of the balance scorecard integration processes with ISO 31000 Risk Management, the following is a strategy map of PT PELNI (Persero) in 2018 based on 4 perspectives of the balance scorecard, namely finance, customer focus, internal business process and learning & growth.



Manajemen Risiko Risk Management

Parameter untuk mengukur kinerja berdasarkan *balance scorecard* adalah *key performance indicator*, sedangkan parameter dalam pengelolaan risiko adalah *key risk indicator*. Sehingga dalam proses integrasi tercapainya sasaran strategis (*strategic objective*) perusahaan diukur menggunakan kinerja melalui *balance scorecard* (KPI) sedangkan manajemen risiko digunakan sebagai *early warning system* untuk menghilangkan fakto-faktor penyebab kegagalan pencapaian sasaran strategis melalui *key risk indicator* (KRI). Kerangka kerja (*frame work*) integrasi *balance scorecard* dengan *risk management* ini dapat memberikan kontribusi yang cukup efektif dalam pencapaian *strategic objective* perusahaan.

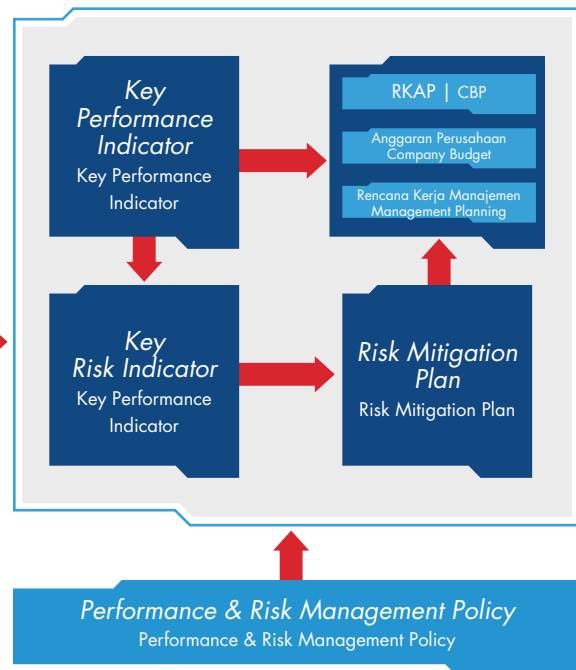
Berikut adalah kerangka kerja (*frame work*) integrasi *balance score card* dengan *risk management* ISO 31000:2018:



Nilai tambah pengelolaan risiko bagi perusahaan adalah dapat diketahui sedini mungkin faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian sasaran strategis dan integrasi ini mulai dilaksanakan pada saat pembahasan *risk assessment* triwulan IV 2018 berdasarkan Sasaran Strategis Perusahaan tahun 2018. Tujuan dari integrasi ini adalah melalui manajemen risiko dilakukan pemetaan risiko-risiko atau analisa pencetus risiko (*risk cause* atau *risk driver*) yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis perusahaan. Oleh karena itu pada Triwulan IV 2018 format atau *template risk register* yang digunakan berbeda dengan *risk register* pada Triwulan III 2018.

The parameter to measure performance based on *balance scorecard* is *key performance indicator*, and the parameter for risk management is *key risk indicators*. So that, in the integration process can achieve strategic objective of the Company and measured it using the performance through *balance scorecard* while risk management is used as an *early warning system* to eliminate the factors that emerge failure to achieve strategic goal through *key risk indicators*. The framework of the integration of *balance scorecard* and risk management can provide effective contribution for achieving the objective strategic of the Company.

The following is the framework of the integrarion of *balance scorecard* and ISO 31000:2008 of Risk Management:



The added value of risk management of the Company can be discovered as early as possible so the failure factors of objective strategic and integration are implemented when discussing the forth quarter of risk assessment of 2018 based on the Company's ojective strategic in 2018. This integration is aimed to map the risks or risk cause analysis that can hinder the achivement of the Company's strategic goals. Therefore, the format and template in the forth quarter of 2018 is differently compared to the risk register in the third quarter of 2018.



Manajemen Risiko Risk Management

Langkah awal adalah pemetaan dan penentuan *Key Risk Indicator* berdasarkan *alignment* atau keselarasan dengan *Key Performance Indicator* yang ada dengan menyusun Tabel Integrasi antara BSC melalui KPI & ERM ISO 31000 melalui KRI yang diturunkan (*cascading*) dari *Strategic Objectif* Korporat.

RISIKO YANG DIHADAPI DAN UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO PERUSAHAAN

1. Risiko Keselamatan Kapal

Risiko Keselamatan Kapal Perspektif Armada

a. Analisa Profil Risiko

Risk register Armada triwulan IV 2018 terlihat lebih sederhana dibanding dengan triwulan-triwulan sebelumnya yang begitu rinci dan detail, pada triwulan IV kali ini kami akan membahas risiko keselamatan keselamatan kapal penumpang perspektif Armada berdasarkan isu-isu penting saja tentunya yang selaras dengan capaian KPI Direktorat Armada seperti pada tabel diatas. Untuk sasaran strategis Direktorat Armada adalah meningkatkan efektifitas pengelolaan armada dimana KPI nya "*running repair* kapal penumpang yang diselesaikan (%)" ada beberapa peristiwa berisiko yang mungkin jika KPI tersebut tidak tercapai, diantaranya:

1. Gagal memenuhi jadwal pemeliharaan dan pemeliharaan korektif;
2. Ketidaksiapan armada/ketersediaan armada;
3. Kerusakan armada;
4. Kerusakan crane, dan palka;
5. Kerusakan Mesin;
6. Kerusakan Perlimbungan;
7. Kerusakan Navigasi & Komunikasi; dan
8. Kerusakan alat keselamatan.

Dari kedelapan peristiwa berisiko yang mungkin terjadi ada dampak yang ditimbulkan yakni, operasi kapal terganggu, gagal memenuhi target jam pelayaran, dan biaya menjadi besar. Tingkat risiko yang paling tinggi adalah "gagal memenuhi jadwal pemeliharaan dan pemeliharaan korektif", Kerusakan *crane* dan palka, kerusakan mesin, dan kerusakan Perlimbungan.

Penyebab terjadinya risiko-risiko tersebut biasa disebabkan karena suku cadang tidak tersedia, pengadaan tidak optimal, pemeliharaan & perbaikan yang tidak optimal, dan pemeliharaan pengoperasian yang buruk. Untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi maka ditetapkan *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai berikut:

The first step is mapping and determining the key risk indicators based on alignment or suitable of the existing key performance indicators by compiling Integration Table between BSC and KPI & ERM ISO 31000 through cascading KRI from strategic objectives of Corporate.

THE EXISTING RISK AND EFFORT TO MANAGE THE RISKS OF THE COMPANY

1. Ship Safety Risk

Ship Safety Risk On Fleet Perspective

a. Risk Profile Analysis

Fleet Risk Register of Forth quarter of 2018 looks unassuming compared to the previous quarters of which are so detailed and itemized. In this forth quarter we will elaborate the safety risk of passenger ship perspective based on important issues that is in line with KPI achievement of fleet directorate as mentioned in the table above. For the strategic objective of Fleet Directorate is to improve the effectiveness of fleet management where the KPI is "running repair of completed passenger ships (%)" there are several possible risk circumstances emerges if the KPI is not achieved, including:

1. Failure to meet the corrective and schedules maintenance;
2. Fleet unpreparedness/fleet availability;
3. Fleet damage;
4. Crane and hatch damage;
5. Machine damage;
6. Docking damage;
7. Navigation & communication damage; and
8. Safety equipment damage.

From those eight risky circumstances impact on ship operation and schedule target and the large costs. The highest risk level is "fail to meet the corrective and schedule maintenance", crane and hatch damage, engine damage and loading damage.

These risks are usually caused by unavailable spareparts, non-optimal procurement, maintenance and repairment, and bad operations. To minimize these risks, Key Risk Indicator is determined as follows:

Manajemen Risiko

Risk Management

1. % Prev Mtc belum diimplementasikan;
2. Jumlah armada yang tidak tersedia;
3. Jumlah kerusakan armada;
4. Jumlah kejadian kerusakan *crane*;
5. Jumlah kejadian kerusakan mesin;
6. Jumlah kejadian kerusakan perlimbungan;
7. Jumlah kejadian kerusakan navigasi & komunikasi; dan
8. Jumlah kerusakan alat keselamatan.

Dengan KRI tersebut diketahui hasil/ tingkat efektifitas pada KRI "kejadian kerusakan mesin" dan "kejadian kerusakan perlimbungan" dapat disimpulkan *ineffective* artinya faktor kerusakan mesin yang harus menjadi perhatian khusus Direktorat Armada agar alat produksi perusahaan bisa berjalan dengan baik.

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. % Prev Mtc belum diimplementasikan
 - Pelaksanaan *Preventive Maintenance* secara rutin dan terjadwal
2. Jumlah armada yang tidak tersedia;
 - Pelaksanaan *Preventive Maintenance* secara rutin dan terjadwal
 - Kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mesin-mesin yang spesifik
3. Jumlah kerusakan armada;
 - N/A
4. Jumlah kejadian kerusakan *crane*;
 - Pelaksanaan *Preventive Maintenance* secara rutin dan terjadwal
 - Pengoperasian Sesuai SWL
5. Jumlah kejadian kerusakan mesin;
 - Kebutuhan akan *spare part* motor induk yang sangat *urgent*, disiasati dengan merekondisi suku cadang bekas pakai
 - Transfer suku cadang antar kapal
 - Pelaksanaan *running repair* untuk pekerjaan *urgent*
6. Jumlah kejadian kerusakan perlimbungan
 - Pelaksanaan *docking* yang terjadwal
 - Penggantian plat-plat yang telah aus/ tipis pada saat pelaksanaan *docking*
7. Jumlah kejadian kerusakan navigasi & komunikasi
 - Melaksanakan koordinasi dengan divisi teknik terkait pemasangan *stabilizer*
 - Perbaikan alat navigasi & elektronika oleh *Authorized Agent*
 - Melaksanakan perawatan rutin

1. % Prev Mtc has not been implemented;
2. The number of unavailable fleets;
3. Total fleet damage;
4. The number of crane damage events;
5. The number of machine damage events;
6. The number of damages emerging;
7. The amount of navigation & communication tools damage;
8. The amount of safety equipment damage.

With this KRI, was recognized that the results / effectiveness level of the KRI of "machine damage" and "docking damage" could be concluded as an ineffective, it means that the engine damage factor should be a particular concern to the Fleet Directorate so the company's production equipment could run well.

b. Risk Management Planning

1. % Prev Mtc has not been implemented
 - The implementation of regular and scheduled Preventive Maintenance
2. The number of unavailable fleets
 - The implementation of regular and scheduled Preventive Maintenance
 - Procurement contract for specific machines
3. Total fleet damage
 - N/A
4. The number of crane damage events
 - The implementation of regular and scheduled Preventive Maintenance
 - Operations in accordance with SWL
5. The number of machine damage events
 - The needs of very urgent main motor spare part, and is dealt with reconditioning used parts
 - Spare parts transfer between ships
 - The implementation of running repair for urgent work
6. The number of damages emerging
 - The implementation of scheduled docking
 - Replacement of worn/exhausted plates during docking
7. The amount of navigation & communication tools damage
 - Coordinating with the engineering division regarding the installation of stabilizers
 - Repairing navigation & electronic devices by Authorized Agent
 - Carrying out routine maintenance



Manajemen Risiko Risk Management

- *Monitoring* laporan kondisi secara berkala
8. Jumlah kerusakan alat keselamatan
- Melaksanakan perawatan rutin
 - *Monitoring* laporan kondisi alat keselamatan
 - Melaksanakan perbaikan/*running repair*

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Response Plan Divisi Teknik:

1. Diperlukan suku cadang Motor Induk untuk pelaksanaan preventive maupun *corrective maintenance*.
2. Terkait *corrective maintenance* apabila terjadi kerusakan motor induk dilaksanakan dengan menggunakan suku cadang hasil rekondisi.
3. Terkait kondisi motor bantu, terdapat beberapa motor bantu yang telah *overdue* dan harus dilaksanakan *overhaul*.

Progress Tindak Lanjut Divisi Teknik:

1. Telah dilaksanakan pemeriksaan suku cadang Motor Induk sebanyak 6 *Purchase Order* (PO) untuk 24 kapal Penumpang di MaK Asia Singapore. Estimasi Pengiriman Minggu ke-II bulan Desember 2018.
2. Melakukan rekondisi terhadap suku cadang motor induk yang layak pakai untuk digunakan kembali. Apabila terdapat rekomendasi BKI maka diajukan Penundaan rekomendasi tersebut
3. Melakukan koordinasi dengan Divisi Pengadaan terkait jadwal kedatangan suku cadang motor bantu. Untuk motor bantu yang masuk dalam item *Continuous Machinery Survey* akan tetapi belum dilaksanakan *overhaul* maka diajukan penundaan rekomendasi.

Response Plan Divisi Nautika:

1. Merencanakan pemasangan CCTV anjungan pada tahun 2019
2. Membuat himbauan ke kapal untuk membuat laporan kondisi Otomasi/*Fire Alarm & Door Monitoring*
3. Mengoptimalkan *report* sertifikat *updating* sertifikat kapal bagian Nautika
4. Membuat himbauan ke kapal untuk pemutaran CD peraga keselamatan dalam kondisi darurat pada saat kapal tolak di setiap pelabuhan

- Periodically monitoring condition reports
8. The amount of safety equipment damage
- Carrying out routine maintenance
 - Monitoring reports on the condition of safety equipment
 - running repair

c. Follow-up Risk Management

Technical Division Response Plan:

1. Main Motor Parts are needed for preventive and corrective maintenance
2. Relating the corrective maintenance if the main motor damage emerges, and carried out using reconditioned spare parts.
3. Regarding the supporting motors condition, there are several supporting motors that have been overdue so overhauls must be carried out.

Follow-up progress of Technical Division:

1. Inspecting the main spare part amounted to 6 Purchase Order (PO) for 24 passenger ships in MAK Asia Singapore. Delivered in December 2018 of 2nd week.
2. Reconditioning the main motor parts that suitable for re-using. If there is a recommendation from BKI, so the recommendation is delayed.
3. Coordinating with the Procurement Division related to the arrival schedule of supporting motor parts. For supporting motors that included in Continuous Machinery Survey items but have not been overhauled, so a recommendation is postponed.

Nautics Division Response Plan:

1. Planning CCTV installation in 2019
2. Making an appeal to the ship to make a report on the condition of Automation / Fire Alarm & Door Monitoring
3. Optimizing Nautic's updating ship report certificate
4. Making an appeal to the ship to screen the visual aid safety in an emergency condition when the ship sailed from each port



Manajemen Risiko

Risk Management

Progress Tindak Lanjut Divisi Nautika:

1. Membuat usulan pemasangan CCTV anjungan pada RKAP 2019
2. Membuat nota dinas ke setiap kapal
3. Menggunakan media *cloud* PELNI

Response Plan Divisi Surveyor:

1. Kondisi kamar mandi

Progress Tindak Lanjut Divisi Surveyor:

1. Perbaikan RR oleh PT PIDC

Dari *response plan* yang disusun oleh Divisi Surveyor, perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan adalah:

- a. Data perawatan rutin dan realisasi alat bongkar per kapal di-update tiap bulan sehingga dapat diketahui *progress* perawatan yang dilakukan;
- b. Progress tindak lanjut perawatan *rutin crane* perlu dicatatkan dalam *risk register* tiap triwulan;
- c. Data realisasi perawatan rutin akomodasi dan kamar mandi perlu dicatatkan dalam *risk register* dan diberikan penjelasan akomodasi (kabin/kamar) atau kamar mandi sehingga diketahui progresnya secara akurat;

Risiko Keselamatan Kapal Perspektif Operasi

a. Analisa Profil Risiko

Sasaran strategis korporat pada risiko keselamatan kapal penumpang adalah meningkatkan efektifitas perencanaan operasional dengan KPI OTP kapal penumpang (%), dimana jika hal tersebut tidak terencana dengan baik maka akan menimbulkan peristiwa berisiko seperti, kedatangan dan keberangkatan kapal tidak sesuai jadwal tentunya hal tersebut akan berdampak pada gangguan dalam pelayanan. Penyebabnya sangat beragam mulai dari *factor loading & unloading* dipelabuhan tidak efektif, keterlambatan pengurusan surat & administrasi, *Bunker BBM* & pengisian air tawar yang tidak efektif, kendala teknis, DCS yang tidak efektif sampai pada ketepatan waktu penyelesaian *docking*. Dari keseluruhan penyebab terjadinya peristiwa berisiko kendala teknis memiliki tingkatan yang paling tinggi artinya dari segi kecenderungan dan dampak sangat sering terjadi berdampak besar.

Follow-up progress of Nautic Division:

1. Making the proposal for the installation of deck CCTV on the CBP 2019
2. Making official notes in every ship
3. Empowering cloud media of PELNI

Surveyor Division Response Plan:

1. Toilet condition

Follow-up progress of Surveyor Division:

1. RR repairment by PT PIDC

Based on response plan data prepared by Surveyor Division, needs a consideration and repairment, among others:

- a. Routine maintenance and realization data of loading and unloading equipment per vessel is updated every month so that the progress of the treatment can be known;
- b. The follow up progress of routine crane maintenance needs to be listed in the risk register quarterly;
- c. Routine maintenance data of accommodations and bathrooms needs to be listed in the risk register and given an explanation of accommodation (cabin/room) or bathroom so that progress is maintain accurately;

Ship Safety Risk on Operations Perspective

a. Risk Profile Analysis

The Company's strategic objective of passenger ship safety risk is to increase the effectiveness between operational planning with passenger ship OTP KPI (%), if it is not planned properly it will cause risky events such as, arrival and departure of the ship unscheduled, of course it impacts service disruption. The causes are very diverse starting from the factor of loading & unloading in the port is not effective, the delay in the management of letters & administration, ineffective Fuel Bunkers & freshwater charging, technical constraints, ineffective DCS and the docking completion constraint. Overall causes of technical constraints events have the highest level, it means that will have a large impact.



Manajemen Risiko

Risk Management

Tingkat risiko berwarna hijau cukup dikendalikan oleh pejabat setingkat Manager namun perlu dilaporkan ke *Vice President* unit terkait, untuk tingkat risiko yang berwarna kuning harus dikendalikan oleh pejabat setingkat *Vice President* dan dilaporkan pada Direktur terkait, namun jika tingkat risiko berwarna merah maka harus segera ditangani oleh Direktorat yang bertanggung jawab menanganinya dan dilaporkan pada Direktur Utama sesegera mungkin.

Agar tercapai sasaran strategis perusahaan perlu disusun *key risk indicator* (KRI) yang tepat. KRI yang kami buat untuk mengukur jumlah kejadian keterlambatan kedatangan dan keberangkatan kapal, deviasi data DCS dengan data penjualan serta jumlah kejadian keterlambatan penyelesaian *docking*. Dari KRI yang ada diharapkan dapat melihat seberapa banyak atau sering terjadi keterlambatan pelayaran ditinjau dalam berbagai faktor penyebab risiko agar dapat direncanakan dengan baik pengendalian risiko tersebut.

b. Rencana Pengendalian Risiko

Untuk Pengendalian Risiko kapal penumpang ada beberapa poin diantaranya:

1. Jika disebabkan oleh faktor *loading & unloading* di pelabuhan maka berkoordinasi dengan Kapal, Cabang dan Direktorat UAB terkait dengan kebutuhan waktu bongkar muat di Pelabuhan dan melakukan koreksi karyawan.
2. Jika disebabkan oleh faktor pengurusan surat dan administrasi maka berkoordinasi dengan Kapal, Cabang terkait dengan ketepatan pengurusan surat-surat di Pelabuhan dan melakukan koreksi karyawan.
3. Jika disebabkan oleh faktor bunker BBM & pengisian air tawar dipelabuhan maka berkoordinasi dengan Kapal, Cabang dan Divisi BBM terkait pengisian BBM di Pelabuhan dan melakukan koreksi karyawan.
4. Jika disebabkan oleh faktor keterlambatan penyelesaian *docking* maka berkoordinasi dengan Kapal, Cabang dan Divisi Teknik terkait Kendala Teknis dan Kendala Penyelesaian *Dock* serta melakukan koreksi karyawan

The green level of risk is sufficiently controlled at Manager level but still needs to be reported to relevant Vice President, for the yellow level of risk must be controlled at Vice President level and reported to the relevant Director, and the red level of risks must be handled immediately by directorate who is responsible for handling it and reported it to President Director as soon as possible.

In order to achieve the company's strategic goals is necessary to develop the right key risk indicators (KRI). KRI we made to measure the number of arrival and departure delays of the ship, DCS deviation data as well as sales data and the number of incidents of late docking completion. From the existing KRI, is expected to see how much the delay emerges and is reviewed in various risk factors so that the risk management can be properly planned.

b. Risk Management Planning

For risk management of passenger ships, there are several points including:

1. If caused by loading & unloading factors at port coordinate with Ship, Branch and Directorate of UAB related the needs of loading timing at port and to check the employees.
2. If caused by arranging letters and administration factors coordinate with Ship and Branch related to the accuracy of arranging documents in the Port and to check employees.
3. If caused by fuel bunker & freshwater filling factors at the port coordinate with Ship, Branch and Fuel Division regarding fuel filling and to check employees.
4. caused by the late docking completion coordinates with ship, branch and technical division related to technical and docking completion constraints as well as check employees.

Manajemen Risiko

Risk Management

c. Rencana Pengendalian Risiko vs Progres Tindak Lanjut TW III

1. Monitor OTP Tiap Kapal
2. Monitor Fasilitas Terminal Penumpang
3. Monitor fasilitas kepelabuhanan
4. Monitoring DCS"
5. Mengevaluasi Realisasi OTP TW III danantisipasi Kapal yang tidak OTP
6. Monitor Fasilitas Terminal Penumpang
7. Monitor fasilitas kepelabuhanan

d. Catatan Review

Berdasarkan hasil review yang dilakukan bersama Divisi Operasi kapal penumpang & perintis bahwa untuk pengendalian dan pengaturan agar tidak terjadi keterlambatan pelayaran berulang-ulang Divisi operasi tidak memiliki wewenangnya untuk menertibkan kegiatan operasional di cabang, semua diserahkan pada kepala cabang terkait. divisi operasi hanya melakukan koreksi karyawan jika terjadi keterlambatan kapal.

Risiko Keselamatan Kapal Perspektif DPA-QHSSE

a. Analisa Profil Risiko

Risk register Divisi DPA-QHSSE triwulan IV 2018 menjadi lebih sederhana, namun laporan lengkap hasil audit tiap kapal terlampir pada laporan ini. Sasaran strategis untuk divisi DPA-QHSSE terdapat dua sasaran yakni "meningkatkan efektifitas perencanaan operasional" dan "organization capital" dimana masing-masing sasaran strategis memiliki KPI yakni "OTP kapal penumpang (%)" dan "Skor GCG". Namun peristiwa berisiko yang mungkin terjadi jika perencanaan operasional tidak efektif akan mengakibatkan kecelakaan, hal ini dilihat dalam perspektif DPA-QHSSE dimana dampak yang ditimbulkan dari peristiwa berisiko adalah kerusakan, penumpang yang cedera, dan kerusakan aset. Penyebab terjadinya kecelakaan menurut perpektif DPA adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan KRI-nya adalah ketidaksesuaian dengan peraturan. Untuk KPI "Skor GCG" peristiwa berisikonya adalah temuan audit eksternal ISM-Code, temuan audit eksternal ISPS-Code, kelayakan dan keamanan gedung perkantoran PT PELNI (Persero) dengan konsekuensi sanksi, reputasi, kerugian finansial sampai pada kecelakaan.

c. Risk Management Planning vs Follow up progress of Third Quarter

1. Monitoring OTP for each vessel
2. Monitoring Passenger Terminal Facilities
3. Monitoring port facilities
4. Monitoring DCS
5. Evaluating the realization of OTP TW III and anticipating ships that are not OTP
6. Monitoring Passenger Terminal Facilities
7. Monitoring port facilities

d. Review Notes

Based on the results of a review conducted with passenger & perintis ship operations division for control and regulation to prevent repetition of shipping delays, Operating Division does not have the authority to curb operational activities in the branch, all of which are left to the relevant head of branch. the operating division only corrects employees if there is a ship delay.

Ship Safety Risk on DPA-QHSSE perspective

a. Risk Profile Analysis

Risk register in The fourth quarter of 2018 of DPA-QHSSE division is more modest, but the full report of the vessel audit results mentioned in this report. The strategic targets of DPA-QHSSE division there are two goals, namely "increasing the effectiveness of operational planning" and "capital organization" where each strategic goal has the KPI namely "OTP passenger ship (%)" and "GCG Score". However, the risky event occurs if the operational plan is not working effectively that will result in an accident, this is seen in DPA-QHSSE perspective of which the impact of risky events is damage, injured passengers, and asset damage. The causes of an accident according to DPA perspective which is non-compliance with KRI safety regulations. For KPI of "GCG Score" of the risky event is the finding of ISM-Code external audit, ISPS-Code external audit, and the feasibility and the security of PT PELNI (Persero) office building by impacting sanctions, reputation, financial losses and accidents.



Manajemen Risiko Risk Management

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Meningkatkan kesadaran terhadap efektifitas peraturan-peraturan keselamatan, serta keterampilan di atas kapal.
2. Menjaga kontrol yang ada dan melaksanakan peraturan dan regulasi kementerian terkait keamanan kapal.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

1. Pelaksanaan Audit Eksternal ISM-Code tepat.
2. Penyelesaian *Non Comformity* sebelum batas waktu *dead line*.

2. Risiko Budget

a. Analisa Profil Risiko

Ada tiga sasaran pada risiko *budget, organization capital*, pendapatan dari penumpang dan pendapatan dari barang dari ketiga sasaran tersebut ada dua peristiwa berisiko yang sesuai dengan tupoksi divisi akuntansi pertama, keterlambatan penginputan data dari divisi, kantor cabang dan anak perusahaan, kedua, inkonsistensi sumber data, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa berisiko tersebut adalah skor KPI kontrak manajemen dan tingkat akurasi data rendah dari kedua dampak yang mungkin terjadi, tingkat risiko yang tinggi adalah inkonsistensi data, hal tersebut dikarenakan banyaknya kesalahan dan revisi data yang diserahkan ke divisi akuntansi sehingga data yang disampaikan tidak akurat belum lagi penyebab yang ditimbulkan akibat system aplikasi keuangan yang digunakan belum sepenuhnya optimal serta keterlambatan data yang masuk dari pengguna. Maka KRI yang diukur adalah prosentase keterlambatan memasukan data dan prosentase deviasi data antara EBS dengan PTS. Dari kedua hasil tersebut diatas masih dapat dikatakan *“effective”*.

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Pengisian Portal Triwulan III tepat waktu.
2. Melakukan Pengecekan berkala bulanan dengan ayat silang dari divisi pemasaran kapal penumpang untuk penghasilan penumpang.

b. Risk Management Planning

1. Increasing the awareness efectivity of safety regulations, and knowledge for sailing.
2. Maintaining the existing control and applying the direction and regulation of the minister related to ship safety.

c. Follow-up Risk Management

1. Conducting ISM-Code External Audit precisely.
2. Settlement of Non Comformity before deadline.

2. Budget Risk

a. Risk Profile Analysis

There are three targets in the risk of budget, capital organization, income originating from passengers and goods, we obtain two risky events in accordance with the accounting division main duties, the first is late data input from divisions, branch offices and subsidiaries, and the second is inconsistencies of data sources. These risk events impact the management contract of KPI score and the low level of data accuracy, the high level of risk is data inconsistency, due to the large number of errors and revisions submitted to the accounting division so that the data is delivered inaccurate and due to the financial application system is not fully optimal and post-poned data coming from users. Then, the measured KRI is the percentage of the delay in entering and deviation data between EBS and PTS. From the two results above, still can be said as an *“effective management”*.

b. Risk Management Planning

1. Filling the Third Quarter Portal in time.
2. Monthly checking of budget risk with the cross paragraphs from passenger ships marketing related to passenger income.

Manajemen Risiko

Risk Management

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Response Plan Triwulan III:

1. Membandingkan secara manual antara data penghasilan di aplikasi *legacy* dengan data yang masuk di EBS.
2. Berkoordinasi secara rutin antara Akuntansi Cabang dan Pusat dengan Tim IT dan Tim Sigma.
3. Adanya Evaluasi dan *Review Data* yang ada di aplikasi EBS dengan *legacy* BL dan PTS.
4. *Request* ITCR untuk laporan pembandingan antara data pada sistem *legacy* dengan PTS.

Progress Tindak Lanjut Triwulan IV:

1. Membandingkan secara manual antara data penghasilan di aplikasi *legacy* dengan data yang masuk di EBS.
2. Berkoordinasi secara rutin antara Akuntansi Cabang dan Pusat dengan Tim IT dan Team Sigma (melalui WA group dan rapat).
3. Adanya Evaluasi dan *Review Data* yang ada di aplikasi EBS dengan *legacy* BL dan PTS.
4. *Request* ITCR untuk laporan pembandingan antara data pada sistem *legacy* dengan PTS.

Response Plan Triwulan I/2019

1. Berkoordinasi dengan Tim IT untuk percepatan progres *Request* ITCR untuk laporan pembandingan antara data pada sistem *legacy* dengan PTS.
2. Berkoordinasi secara rutin antara Akuntansi Cabang, Pusat, SBU dan Anak Perusahaan untuk percepatan laporan.
3. Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan *un-audited* realisasi tahun 2018.

3. Risiko PSO & Subsidi

a. Analisa Profil Risiko

Sasaran strategis untuk Divisi pengelolaan PSO & Subsidi adalah "meningkatkan efektifitas pengelolaan dana penugasan" dimana peristiwa pengelolaan dana penugasan adalah terlambatnya pencairan dana subsidi, penyerapan dana PSO rendah, dan Penyerapan dana subsidi juga rendah. Dari peristiwa berisiko tersebut memiliki dampak yakni *cash flow* perusahaan terganggu dan kinerja keuangan rendah. Untuk memitigasi risiko yang mungkin akan terjadi maka perlu

c. Follow-up Risk Management

The Third Quarter Response Plan:

1. Comparing manually between earnings data in legacy applications with data entered on EBS.
2. Regular coordinating between Accounting Branches and Centers with IT and Sigma Team.
3. Evaluating and Reviewing the data in EBS application with BL legacy and PTS.
4. Requesting ITCR for comparison reports between data on legacy systems with PTS.

Follow-up progress of Forth Quarter:

1. Comparing manually between earnings data in legacy applications with data entered on EBS.
2. Regular coordinating between Accounting Branches and Centers with IT and Sigma Team.
3. Evaluating and Reviewing the data in EBS application with BL legacy and PTS.
4. Requesting ITCR for comparison reports between data on legacy systems with PTS.

First Quarter/2019 Response Plan:

1. Coordinating with IT Team to accelerate the *Request* ITCR progress for comparison reporting between data on legacy systems with PTS.
2. Regular coordinating between Accounting Branches and Head Office, SBUs and Subsidiaries for accelerating reports.
3. Implementation of the compiling un-audited Consolidation in 2018.

3. PSO & Subsidies Risks

a. Risk Profile Analysis

The strategic goal of PSO & Subsidies Management Division is to "increase the management effectiveness of assignment fund" where the risky event emerges is the delay in disbursing subsidies, low absorption of PSO funds, and low absorption of subsidized funds. These affect the absorption of the company's cash flow and low financial performance. To mitigate these risks, KRI needs to be made which encourages the strategic goals with KRI namely the late document delivery



Manajemen Risiko Risk Management

dibuatkan KRI yang mendorong terhadap capaian sasaran strategis dengan KRI nya adalah kejadian keterlambatan pengiriman dokumen dan prosentase biaya tidak disetujui, dari keseluruhan risk register Divisi PSO & Subsidi seluruhnya menunjukkan *Effective*.

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Kendala : Tidak ada *closing* tanggal penarikan / *cut off* data *general ledger*
2. Kendala : Keterlambatan dokumen pendukung dari *user* terkait.
3. Kendala Tagihan Perintis : Tidak ada *closing* tanggal penarikan / *cut off* data *general ledger*.
4. Kendala Tagihan Tol Laut dan Ternak Bulan Oktober telah dikirim ke Kemenhub, namun masih menunggu jadwal verifikasi tagihan dan akhirnya harus di bank garansikan.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

1. Solusi : akan di akumulasi saat *un-audited* BPK RI dan perbaikan sistem EBS sesuai untuk *cut off* data.
2. Solusi : Berkordinasi dan menyurati *user* untuk ketepatan waktu dan sumber data.
3. Solusi : akan di akumulasi saat *un-audited* BPK RI dan perbaikan sistem EBS sesuai untuk *cut off* data.
4. Solusi : Penandatanganan kontrak penugasan subsidi dilakukan sebelum tahun berjalan.

4. Risiko Kelayakan & Keamanan Gedung

a. Analisa Profil Risiko

Risk register Divisi Umum pada triwulan IV 2018 ini masih menjadi risiko nomor empat dimana sasaran strategis adalah *organization capital*, jika tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka sasaran satrategis perusahaan tidak akan tercapai dan kemungkinan terjadi peristiwa berisiko adalah "kelayakan dan keamanan gedung perkantoran PT PELNI (Persero)" diseluruh Indonesia. Dampak yang dihasilkan jika kelayakan gedung tak dirawat dengan baik akan menimbulkan kecelakaan kerja, dan tentunya kerugian keuangan bagi

and the percentage of fees not approved, from the entire risk register of PSO & Subsidiess Division show an *Effective* management.

b. Risk Management Planning

1. Constraints: There is no closing withdrawal date / cut off general ledger data.
2. Constraints: supporting documents delayed from related users.
3. Perintis Bill Constraints: There is no closing date for the withdrawal / cut off of general ledger data.
4. Tol Laut and Cattle ships obstacles regarding October Bill have been sent to the Ministry of Transportation, but are still waiting for the bill verification schedule and finally must be guaranteed from the bank.

c. Follow-up Risk Management

1. Solution: will be accumulated when un-audited from Financial Investigation Agency of Republic of Indonesia and EBS system repairment are suitable for cut-off data;
2. Solution: Coordinates and writes to the user for timeliness and data sources.
3. Solution: will be accumulated when un-audited from Financial Investigation Agency of Republic of Indonesia and EBS system repairment are appropriate for cut-off data;
4. Solution: The signing of a subsidy assignment contract is carried out before the current year.

3. Feasibility & Security Building Risk

a. Risk Profile Analysis

Risk register of General Division in the fourth quarter of 2018 still becomes the number four risk where the strategic objective is capital organization, if it does not carry out its functions well then the company's strategic goals will not be achieved and the possibility of a risky event is "feasibility and security of PT PELNI (Persero) " around Indonesia. The resulting impact if the building feasibility is not properly maintained that will cause work accidents, and financial losses for the company. The level of likelihood of these



Manajemen Risiko

Risk Management

perusahaan. Tingkat kemungkinan dari dampak tersebut menunjukkan sangat mungkin terjadi dengan skor empat. Selanjutnya untuk dampak yang ditimbulkan menunjukkan skor empat sehingga tingkat dari risiko kelayakan dan keamanan gedung perkantoran menunjukkan skor 21 (merah) hal ini harus dilaporkan ke Direksi penanganan tindaklanjutnya. Selanjutnya penyebab terjadinya risiko disebabkan pemeliharaan tidak optimal dan usia peralatan gedung itu sendiri. *key risk indicator* untuk mencegah hal itu terjadi adalah dengan penyerapan anggaran pemeliharaan gedung pusat & cabang serta peralatan gedung yang dilakukan peremajaannya. Realisasi adari hal tersebut menunjukkan "*ineffective*" pada KRI penyerapan anggaran pemeliharaan gedung kantor pusat dan cabang, sementara itu *effective* pada peralatan gedung yang dilakukan peremajaannya.

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Renovasi bangunan.
2. Pengadaan peremajaan peralatan.
3. Penambahan target jumlah gedung PT PELNI (Persero) yang akan diperbaiki.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Response Plan:

1. Audit struktur terhadap struktur Gedung Kemayoran PT PELNI (Persero) pasca kebakaran tahun 2012 & 2013.
2. Perencanaan konsultan perencanaan perbaikan ME Gedung PT PELNI (Persero) Kemayoran yang disesuaikan harga pekerjaan tahun 2018 karena perhitungan sebelumnya sudah tidak relevan dengan harga saat ini dan perbaikan meliputi : pembuatan ruangan panel, Instalasi listrik lt 1 s/d 11, perbaikan *hydrant & sprinkler*, perbaikan *cubicle* dan *trafo* 20kv (proses penerbitan SPK pada Biro Hukum).
3. SBY - MKS - JPR- MDN sudah dilaksanakan sesuai ND No.12.06/03/ND/042/2017 tanggal 6 Desember 2017.
4. Akan dilaksanakan Audit Struktur dan *Electrical check* pada gedung PT PELNI (Persero) Cabang Surabaya, Makassar, Jayapura, Medan dan Kantor Pusat.

impacts likely occurs with four score. Furthermore, for the four score of risks emerge so that the level of risk of the feasibility and security of office buildings shows a score of 21 (red) this must be reported to the Board of Directors for the following up. Furthermore, the risk is caused by non-optimal maintenance and the age of the building equipment itself. The key risk indicator to prevent this from happening is by absorbing the central & branch building maintenance budgets and building equipment that is being rejuvenated. The realization shows "*ineffective*" on KRI absorption of central and branch office building maintenance budgets, while it is effective on building equipment carried out repairment.

b. Risk Management Planning

1. Building renovation.
2. The implementation of equipment rejuvenation.
3. Adding the number of PT PELNI (Persero) building will be repaired.

c. Follow-up Risk Management

Response Plan:

1. Audit structure of PT PELNI (Persero) Building construction in Kemayoran after the fires accident in 2012 & 2013.
2. Planning ME repairment consultation of PT PELNI (Persero) Building Kemayoran which adjusted the construction price in 2018 because the previous calculation was irrelevant to the current price and repairment including: making panel room, electrical installation on 1 to 11 floor, hydrant, sprinkler & cubicle repairment, and 20kv power house (in issuing letter of work at the Legal Bureau).
3. SBY - MKS - JPR-MDN has been carried out according to ND No.12.06/03/ND/042/2017 on December 6, 2017.
4. An Audit Structure and Electrical check will be carried out in PT PELNI (Persero) building in Surabaya, Makassar, Jayapura, Medan and Head office.



Manajemen Risiko Risk Management

Progress Tindak Lanjut:

1. Dilaksanakan *overhaul Genset* Gedung PT PELNI (Persero) Kemayoran (proses penerbitan SPK dari Divisi Pengadaan ke Biro Hukum).
2. Proses perencanaan ME Gedung PT PELNI (Persero) oleh Konsultan Perencana untuk pelaksanaan perbaikan tahap I.
3.
 - Surabaya : perbaikan hydrant, ac *split duct*, dan perbaikan ACP komposit.
 - Jayapura : perbaikan hydrant Cabang Jayapura sudah dapat difungsikan.
 - Makassar : belum ada tanggapan dan respon terhadap Nota Dinas No.12.06/03/ND/042/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan ND No.07.19/09/ND/042/2018 tanggal 19 Juli 2018.
 - Medan : On progres pelaksanaan sertifikasi K3 Gedung PT PELNI (Persero) Cabang Medan.
 - Bali : belum ada tanggapan dan respon terhadap Nota Dinas ND No.07.19/09/ND/042/2018 tanggal 19 Juli 2018.
4. Evaluasi penawaran pekerjaan Audit Struktur dan Evaluasi hasil *Electrical Check* Kantor Pusat:
 - Evaluasi hasil *Electrical Check* Kantor Cabang Surabaya.
 - Untuk Cabang Jayapura, Medan, Makassar, Surabaya, dan Bali telah disampaikan melalui Nota Dinas ND No. 07.19/09/ND/042/2018 tanggal 19 Juli 2018 untuk pelaksanaan audit struktur dan ME.

Follow-up progress:

1. Overhauling genset of PT PELNI (Persero) Kemayoran Building (in issuing letter of work in Procurement Division to the Legal Bureau).
2. Planning ME of PT PELNI (Persero) Building by relevant consultant for 1st repairment stage.
3.
 - Surabaya : hydrant, ac split duct and composite ACP repairsments
 - Jayapura : Hydrant in Jayapura branch has functionated
 - Makassar : No disclaimer and respons regarding official memo No.12.06/03/ND/042/2017 on December 06, 2017 dan ND No.07.19/09/ND/042/2018 on July 19, 2018
 - Medan : On implementing progress for the implementation of OSH certification in PT PELNI (Persero) building in Medan Branch
 - Bali : No disclaimer and respons regarding official memo ND No.07.19/09/ND/042/2018 on July 19, 2018.
4. Evaluating the work proposal of Audit Structure and reviewing the electrical check result in Head Office:
 - Electrical Check result evaluation in branch office of Surabaya.
 - Jayapura, Medan, Surabaya and Bali offices has stated through official memo ND No.07.19/09/ND/042/2018 on July 19, 2018 for the implementation of audit structure and ME.

5. Risiko Teknologi Informasi

a. Analisa Profil Risiko

Risk register Divisi Teknologi Informasi triwulan IV menunjukkan hasil atau tingkat efektifitas yang baik, dari laporan yang ada, peristiwa berisiko yang mungkin terjadi jika tidak ditangani dengan baik, kemungkinan akan terjadi seperti program ICT tidak efektif, insiden keamanan ICT, sampai pada *data crash*, tentunya jika hal tersebut sampai terjadi akan berdampak pada operasi terganggu, kerusakan data/data tercuri sampai pada data

5. Information Technology Risk

a. Risk Profile Analysis

Risk register of Information Technology Division in the forth quarter shows good results or effective management, from the existing reports, risky events occurs if it is not handled properly, the possibility will occur such as ineffective ICT programs, ICT security incidents and data crash. If this happens, it will impact the interrupted operation, data corruption / data stolen and the data loses. We mitigate the possibility level,



Manajemen Risiko Risk Management

hilang. Kita tidak menginginkan hal itu sampai terjadi, untuk itu kita mitigasi tingkat kemungkinannya, dari laporan yang kami terima seluruh risiko pada Divisi Teknologi Informasi menunjukkan angka tertinggi pada tingkat kemungkinan terjadi, namun rendah secara dampaknya, sehingga secara keseluruhan tingkatan risiko bias dikatakan sedang. Artinya risiko tersebut dikendalikan oleh pejabat setingkat *Vice President* namun perlu dilaporkan tiap bulannya atau tiap triwulannya kepada Direksi. Operasi terganggu dapat disebabkan oleh tiga hal:

1. *Low ICT Service Level.*
2. Sistem mati atau lambat.
3. Jaringan mati atau lambat.

Sementara itu kerusakan data/data dicuri disebabkan akses *control* yang kurang baik, data hilang disebabkan oleh kerusakan *hardware*. Berikut KRI Divisi Teknologi Informasi:

1. SLA score 90%.
2. Setiap insiden minor.
3. Setiap insiden medium.
4. Setiap insiden major.
5. Setiap insiden minor.
6. Setiap insiden medium.
7. Setiap insiden major.
8. Tidak ada insiden keamanan/Triwulan.
9. Kehilangan data tiap insiden.

Dari seluruh KRI yang ada seluruhnya dapat dikendalikan dengan baik oleh Divisi Teknologi Informasi.

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Meningkatkan keandalan *system*.
2. *Establish daily backup procedure.*
3. *Disaster Recovery Plan.*

Response Plan Triwulan III 2018:
Bagian Pengembangan

1. Melanjutkan Pengembangan Aplikasi Sesuai Prosedur Pengembangan TI.
2. *Transfer Knowledge* Antara Pegawai Kapal dan Cabang
3. Surat Edaran Tanggung Jawab Perawatan Perangkat Aplikasi Perintis.
4. *Monitoring* kondisi perangkat.
5. Evaluasi dan *monitoring* kinerja progress *Vendor*.
6. Penyesuaian SOP Direktorat UAB.

from the reports we received, all of the risks data in Technology Information Division show the highest number possibility, but low in impact, so that overall levels of risk can be said to be moderate. This means that the risk is controlled at Vice President level instead of needs to be reported monthly or quarterly to the Directors. The interrupted operation can be caused by three things, among others:

1. Low ICT Service Level.
2. Low or Down System.
3. Low or Down Network.

Meanwhile the data crash/stolen is due to poor access control, lost data caused by hardware damage. Next, the following is KRI Information Technology Information Division:

1. SLA score 90%.
2. Every minor incident.
3. Every incident of the medium.
4. Every major incident.
5. Every minor incident.
6. Every incident of the medium.
7. Every major incident.
8. No security/quarterly incidents.
9. Lost data of each incident.

From KRI above, those risk can be handled by Technology Information Division.

b. Risk Management Planning

1. Improve system reliability.
2. Establish daily backup procedures.
3. Disaster Recovery Plan.

Third Quarter of 2018 Response Plan:
Development Unit

1. Continuing Application Development in Accordance with IT Development Procedures.
2. Transfer Knowledge Between Ship and Branch Employees.
3. Perintis Application Maintenance Circulars letter.
4. Monitoring the devices condition.
5. Evaluating and monitoring the Vendor performance.
6. SOP adjustment of the Directorate of UAB.



Manajemen Risiko Risk Management

7. Melanjutkan Pengembangan Aplikasi Sesuai Prosedur Tata Kelola Pengembangan TI.
8. Rapat koordinasi dengan User terkait.
9. *Monitoring* kondisi perangkat.
10. Melanjutkan Pengembangan Aplikasi Sesuai Prosedur Tata Kelola Pengembangan TI.
11. Rapat koordinasi dengan User terkait.
12. Melanjutkan Pengembangan Aplikasi Sesuai Prosedur Tata Kelola Pengembangan TI.
13. Rapat koordinasi dengan User terkait.

Bagian Operasional

1. Pembuatan DRC *hot site* PELNI.
2. *Monitoring* dan Evaluasi secara berkala terhadap kinerja *vendor*.
3. *Monitoring* dan pengelolaan lalu lintas email.

Bagian Perencanaan dan Tata Kelola TI

1. *Monitoring* dan evaluasi anggaran per-bulan, per-triwulan, dan per-semester.
2. *Monitoring* dan evaluasi program kerja per-triwulan.
3. *Monitoring* dan evaluasi SOP yang terimplementasi per-triwulan.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Bagian Pengembangan

1. Persiapan implementasi kapal perintis berikutnya dan persiapan alat.
2. Diskusi Kendala via Group WhatsApp PIC Aplikasi Perintis (Kapal dan Cabang).
3. Surat Edaran Terkait FAQ dan Tanggung Jawab Perawatan Pertingkat Aplikasi Perintis.
4. Koordinasi divisi keuangan untuk pemrosesan Permintaan AP *Voucher*.
5. Mengadakan rapat UAT rutin periode perminggu.
6. Pembahasan SOP Direktorat UAB.
7. Review kebutuhan *User* terkait pengembangan aplikasi.
8. Rapat koordinasi dengan *User* terkait melakukan UAT.
9. Penggunaan perangkat dan *monitoring* perangkat *storage*.
10. Perbaikan aplikasi sesuai *User Acceptance Test*.

7. Continuing Application Development in Accordance with IT Development Governance Procedure.
8. Coordinating meetings with related Users.
9. Monitoring the condition of the device
10. Continuing Application Development in Accordance with IT Development Governance Procedures.
11. Coordinating meetings with related Users.
12. Continuing Application Development in Accordance with IT Development Governance Procedures.
13. Coordinating meetings with related Users.

Operational Unit

1. Making DRC hot site PELNI.
2. Monitoring and evaluating regularly the vendor performance.
3. Monitoring and Managing the traffic of email.

IT Governance and Planning Unit

1. Monitoring and Evaluating the budget every monthly, quarterly and semester.
2. Monitoring and evaluating work program quarterly.
3. Monitoring and evaluating the implemented SOP quarterly.

c. Follow-up Risk Management

Development Unit

1. Preparing the implementation of the perintis ship and tools.
2. Discussing the Constraints via WhatsApp group of PIC Perintis Applications (Ships and Branches).
3. Circular Regarding FAQ and Responsibility for Maintenance of Perintis Applications.
4. Coordinating the financial division for processing AP Voucher Requests.
5. Holding regular UAT meetings per-week.
6. Discussing SOP in the Directorate of UAB.
7. Reviewing user needs related to application development.
8. Coordinating meetings with related Users do UAT.
9. Use of devices and monitoring storage devices.
10. Repairing applications according to the User Acceptance Test.



Manajemen Risiko

Risk Management

11. Mengadakan *Final User Acceptance* Tes dan persiapan implementasi tahap 1.
12. Pengembangan aplikasi *mobile*.
13. Persiapan dengan user terkait launching dan implementasi aplikasi dan melakukan UAT.

Bagian Operasional

1. Dalam tahap perencanaan (*di-hold* menunggu pembangunan *data center* selesai).
2. Monitoring secara berkala terhadap kinerja *vendor* tiap bulan.
3. Evaluasi secara berkala terhadap kinerja *vendor* tiap tahun.
4. *Monitoring* dan pengelolaan lalu lintas email tiap bulan.

Bagian Perencanaan dan Tata Kelola TI

1. Membuat *dashboard* kinerja Divisi TI.

11. Holding Final User Acceptance Tests and preparing the implementation of phase.
12. Mobile applications development.
13. Preparation with users related to launching and implementing applications and conducting UAT.

Operational Unit

1. In planning progress (post-poned waiting the completion of data center construction).
2. Monitoring periodically the performance of vendor every year.
3. Evaluating periodically the performance of vendor every month.
4. Monitoring and managing the traffic of e-mail every month.

IT Governance and Planning Unit

1. Making the dashboard for IT division performance.

6. Risiko BBM

a. Analisa Profil Risiko

Sasaran strategis divisi pengelolaan BBM yakni Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Penugasan dan Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Armada dengan KPI Penyerapan PSO & subsidi (%), *Running repair* kapal penumpang yang diselesaikan (%) dan Kerugian saat pengisian bahan bakar (miliar), peristiwa berisiko yang mungkin terjadi adalah kenaikan harga BBM, dan kerugian BBM dampak yang ditimbulkan dari peristiwa berisiko tersebut adalah kelebihan pemakaian anggaran sampai pada kerugian finansial tingkatan risiko dari kedua dampak tersebut kelebihan pemakaian anggaran menjadi tingkatan yang tinggi dikarenakan kemungkinan terjadinya sangat tinggi walaupun dampak yang ditimbulkan tidak signifikan. Sedangkan kerugian atas finansial memiliki tingkat risiko yang sedang, penyebab risiko diakibatkan karena kebijakan pemerintah dan harga pasar serta tidak efektifnya SOP. *Key risk indicator* pengelolaan BBM adalah harga BBM subsidi, harga BBM non subsidi dan ambang batas bawah harga BBM. Dari ketiga KRI yang ada sekesemuanya menunjukkan hasil yang "effective". Saat ini sudah ada 13 kapal yang telah dipasang VWA data nama kapal yang telah terpasang ada pada tindak lanjut penanganan risiko pada laporan ini.

6. Fuel Risk

a. Risk Profile Analysis

The strategic objectives of fuel management division are to Increase the Assigned Fund Management Effectiveness and to intensify the Accomplished Passenger Management Effectiveness (in %), and Losses when refueling (in billion), risky events is the increase in fuel prices, and losses resulting from these risk events which are the excess use of the budget to the financial loss. The level of risks from both of these impacts excess budget use becomes a high level because the possibility of occurrence is very high even though the impact is not significant. Whereas financial losses have a moderate level of risk, the risk caused by government policies and market prices and ineffective SOP. Key risk indicators for fuel management are subsidized fuel prices, non-subsidized fuel prices and the lower threshold of fuel prices. Of the three KRIs, all of them show "effective" results. At present, there are 13 vessels that have been installed with VWA data of ship names installed in the follow-up risk handling in this report.



Manajemen Risiko Risk Management

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Revisi Anggaran.
2. Evaluasi terhadap *Surveyor Independent*, Tongkang & Cabang.
3. *Propose* kenaikan tarif dan dana PSO.
4. Pengoperasian Kapal menggunakan Putaran Ekonomis pada Masing- masing Kapal.
5. Target KPI berdasarkan besarnya rata-rata pemakaian liter/*mile* BBM pada semester 1.
6. Mengurangi *Looses* Pengisian BBM dengan menjadikan satu *Port* Pengisian *Bunker* dan bekerjasama dengan Pihak Independen PT Sucofindo sebagai Pengawas Independen
7. Monitor Pemakaian BBM Subsidi Kapal Perintis.
8. Pembuatan SK Rumus Perhitungan Bahan Bakar PT PELNI (Persero).
9. Pengawasan menggunakan sistem *Vessel Web Analyzer* pada kapal PT PELNI (Persero) (Target 13 Kapal terpasang Tahun 2018).

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

1. Dipersiapkan apabila terjadi kenaikan BBM.
2. Sudah dilakukan di semua kapal PT PELNI (Persero).
3. Antara KRI Target & KRI *Actual* sudah *Effective*.
4. Pemusatan *bunker* kapal PT PELNI (Persero) pada satu pelabuhan dan diawasi oleh PT Sucofindo selaku pihak independen antara PT PELNI (Persero) & PT Pertamina.
5. *Monitoring* pemakaian BBM Subsidi berdasarkan pada jumlah kuota subsidi tahunan kapal perintis.
6. SK Rumus dalam proses penandatanganan pihak-pihak terkait
7. Sampai dengan 28 Desember, sudah 13 kapal yang terpasang *Vessel Web Analyzer* yaitu KM. DOROLONDA, KM. DOBONSOLO, KM. BUKIT RAYA, KM. LAMBELU, KM. SINABUNG, KM. NGGAPULU, KM. GUNUNG DEMPO, KM. SIGUNTANG, KM. LABOBAR, KM. AWU, KM. SIRIMAU, KM. KELIMUTU, KM. PANGRANGO.

7. Risiko Pax Factor Kapal Penumpang

a. Analisa Profil Risiko

Sasaran Strategis Divisi pemasaran pada *risk register* triwulan IV 2018 adalah kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan dan

b. Risk Management Planning

1. Budget Revision.
2. Evaluating the Independent Surveyors, Barges & Branches.
3. Proposing the increase in rates and PSO funds.
4. Ship Operations using the Economic Round on each Ship.
5. The KPI target based on the average fuel usage of liter/*mile* in semester 1.
6. Reducing Fuel Filling *Looses* by making one Bunker Filling Port and cooperating with PT.Sucofindo as Independent Supervisor
7. Monitoring the Use of Perintis Ship Subsidized fuel.
8. Preparing the decree letter regarding Fuel Calculation Formula of PT PELNI (Persero).
9. Supervision using the *Vessel Web Analyzer* system on PT PELNI (Persero) ships (the target is 13 ships installed with this system in 2018).

c. Follow-up Risk Management

1. Preparing the fund if there is an increase of fuel price.
2. It has been done on all PT PELNI (Persero) ships.
3. Comparing between KRI Target & Actual KRI is effective.
4. The concentration of PT PELNI (Persero) ship bunkers in one port and supervised by PT Sucofindo as an independent party between PT PELNI (Persero) & PT Pertamina.
5. Monitoring the use of Subsidized fuel based on the annual quota of perintis ship.
6. Decree of Formulas in the signing process with related parties
7. As of December 28, 13 vessels have been installed with *Vessel Web Analyzer*, namely MV. DOROLONDA, MV. DOBONSOLO, MV. BUKIT RAYA, MV. LAMBELU, MV. SINABUNG, MV. NGGAPULU, MV. GUNUNG DEMPO, MV. SIGUNTANG, MV. LABOBAR, MV. AWU, MV. SIRIMAU, MV. KELIMUTU, MV. PANGRANGO.

7. Pax Factor Risk of Passenger Ship

a. Risk Profile Analysis

Strategic Objectives of Marketing Division on risk register in the fourth quarter of 2018 is customer satisfaction, increasing sales and services where



Manajemen Risiko

Risk Management

layanan kepada penumpang dimana sasaran tersebut harus capai dengan baik agar tidak terjadi peristiwa berisiko diantaranya pelanggan tidak puas, gagal dalam penetapan armada yang optimal sampai pada pelanggan beralih kepada rute pendek atau moda transportasi lain. Dampaknya akan menimbulkan pelanggan tidak loyal, sampai akhirnya penurunan penghasilan. Seluruh dampak yang timbul memiliki tingkatan risiko yang cukup tinggi (merah), karena tingkat kemungkinan dan tingkat konsekuensi juga cukup tinggi sehingga risiko tersebut jika terjadi harus segera dilaporkan ke jajaran Direksi pada kesempatan pertama. Penyebab risiko dari dampak yang mungkin terjadi bisa dipastikan berdasarkan complain pelanggan tidak ditindaklanjuti, tidak ada *market riset/OD* analisis dan rute tidak potensial. Untuk mencegah terjadinya dampak yang tinggi tersebut maka KRI-nya adalah:

1. Jumlah komplain pelanggan yang ditindaklanjuti.
2. Realisasi Rute kapal berbasis OD Analisis.
3. Realisasi hasil penjualan dibandingkan RKAP *Cluster* (Barat).
4. Realisasi hasil penjualan dibandingkan RKAP *Cluster* Tengah.
5. Realisasi hasil penjualan dibandingkan RKAP *Cluster* Timur.
6. Realisasi hasil penjualan dibandingkan RKAP *Cluster Long Distance*.
7. Deviasi data DCS dengan penumpang di atas kapal (tabel silang).

Berdasarkan tabel di atas hanya dua KRI yang menunjukkan hasil "ineffective" yakni pada KRI Realisasi hasil penjualan dibandingkan RKAP *Cluster* (Barat) dan KRI Realisasi hasil penjualan dibandingkan RKAP *Cluster Long Distance*.

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Melakukan *Survey* Kondisi Kapal Penumpang (Alat Produksi).
2. Bekerjasama dengan Divisi Diklat dan Divisi PKPP untuk Pelatihan *Hospitality Crew* Kapal.
3. Penambahan *Channel* Penjualan melalui:
 - a. *Travel Agent*;
 - b. Mitra B2B: Indomart, Alfamart;

the target must be well achieved so there are no risky events including unsatisfied customers, failing optimal fleet assignments and customers change over short routes or other transportation. The impact will lead to non-loyal customers, affecting the income decreases. All impacts have a high level of risk (red), because the level of possibility and consequences is also quite high so if it occurs must be immediately reported to the Board of Directors at the first opportunity. The possible impacts can be determined based on un-followed up customer complaints, there is no market research/OD analysis and no potential routes. To prevent such a high impact, so its KRI includes:

1. The number of customer complaints followed up
2. OD Analysis-based ship Routes realization.
3. Realization of sales results compared to the CBP Cluster (West).
4. Realization of sales proceeds compared to the CBP Cluster (Central)
5. Realization of sales proceeds compared to the CBP Cluster (East)
6. Realization of sales proceeds compared to the CBP Long Distance Cluster
7. DCS data deviation with passengers on board (cross table).

Based on the table above, only two KRIs show "ineffective" results, namely sales results of KRIs realization compared to the Company's work and budget plan Cluster (West) and sales results of KRIs realization compared to the Company work and budget plan - Long Distance Cluster.

b. Risk Management Planning

1. Conducting Passenger Ships condition survey (Production Tools).
2. Cooperating with Education and Training Division and PKPP Division for Ship Crew Hospitality Training.
3. Adding Sales Channels through:
 - a. *Travel Agent*;
 - b. B2B Partners: Indomart, Alfamart;



Manajemen Risiko Risk Management

- c. *Channeling* : Bimasakti, Ata tour, Darmawisata, Finnet, Versa, MMBC;
- d. Website PT PELNI (Persero);
- e. *Contact Center*; dan
- f. *Mobile Application*.
- 4. Memaksimalkan *pax factor low season*:
 - a. Menyelenggarakan *event, charter kapal*, dan paket wisata; dan
 - b. Memberikan diskon untuk tarif kelas/kabin.
- 5. Melaksanakan penugasan dari pemerintah:
 - a. Kegiatan. Mudik Motor Kementerian Perhubungan; dan
 - b. Kerjasama pengangkutan TKIB dengan Kementerian Sosial.
- 6. Melakukan Evaluasi Trayek Kapal Penumpang.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Perseroan telah membuat rencana jaringan trayek kapal penumpang yang mendapat penugasan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi untuk tahun 2019.

8. Risiko Pengadaan

a. Analisa Profil Risiko

Sasaran strategis divisi pengadaan memang terlihat tidak sesuai namun kami melihat dari segi pengadaan *spare part* kapal dimana sasaran strategisnya adalah "Meningkatkan efektifitas pengelolaan armada" jika ditelaah secara mendalam, efektifitas pengelolaan armada bergantung pada ketersediaan *spare part* kapal jika pengadaan *spare part* tidak dikelola dengan baik maka sasaran strategis perusahaan tidak mungkin tercapai, serta menimbulkan peristiwa berisiko seperti "gagal memenuhi jadwal pemeliharaan dan pemeliharaan korektif" dan berdampak operasi kapal terganggu. Tingkatan risiko pada risiko ini cukup tinggi dengan skor 21 (merah) penyebab risikonya suku cadang tidak tersedia dan pengadaan tidak optimal. Agar lebih optimal dalam hal pengadaan maka *key risk indicator* yang tepat untuk divisi pengadaan adalah:

1. % persediaan habis.
2. Nilai stok barang yang tidak terpakai.
3. % Pembelian ditempat.
4. Ketepatan waktu pengadaan.

- c. *Channeling* : Bimasakti, Ata tour, Darmawisata, Finnet, Versa, MMBC;
- d. PT PELNI (Persero) website;
- e. *Contact Center*; and
- f. *Mobile Application*
- 4. Maximizing *pax factors low season*:
 - a. Organizing *events, boat charters and tour packages*; and
 - b. Giving discounts for class rates/Cabin
- 5. Carrying out assignments from the government:
 - a. Homecoming for Motorbikers in the Ministry of Transportation activities
 - b. Cooperating the transportation of TKIB with the Ministry of Social Affairs.
- 6. Evaluating Passenger Ship Routes.

c. Follow-up Risk Management

The Company made passenger ship routes plan that has an assignment to serve economy class passenger in 2019.

8. Procurement Risk

a. Risk Profile Analysis

The strategic objective of the procurement division does look inappropriate however we see in terms of ship spare parts procurement where our strategic goal is "Increasing the effectiveness of fleet management" in deeply reviewed. The effectiveness of fleet management depends on the availability of ship spare parts if the spare parts procurement is not well managed making the unaccomplished Company's strategy, and creating risky events such as "fail to meet corrective and schedules maintenance" and impacting ship operation. The level of risk at this risk is quite high with a score of 21 (red) which causes that spare parts are not available and procurement is not optimal. To be more optimal, the right key risk indicators for the procurement division are as follows:

1. % of bare inventory.
2. unused items stock value.
3. % of purchases on place.
4. Timeliness of procurement.

Manajemen Risiko

Risk Management

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Rencana barang dikirim paling lambat akhir Desember tahun 2018 dari Singapore.
2. Divisi Pengadaan tidak mempunyai kewenangan, diusulkan saat implementasi aplikasi SCM Divisi terkait mengoptimalkan fungsi *Min Max Planning* pada aplikasi.
3. Divisi terkait memiliki kewenangan untuk proses Pengadaan sampai dengan 100 Juta.
4. Proses pengadaan Suku cadang Motor Induk telah dilaksanakan melalui *principal*.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

1. Revisi SOP Pengadaan Barang dan Jasa No. 29A/HKO.01/DIR/II-2012 sesuai PERPRES 16/2018.
2. Informasi valid dari produsen apabila ada perubahan barang.
3. Penegasan dari *user* bahwa barang pengganti bisa digunakan dengan spesifikasi yang sama.
4. Sudah selesai *review* SOP *Purchasing* dan *Inventory* untuk penggunaan aplikasi SCM SIPARSEL.
5. Produsen atau pihak pabrikan selalu meng-*update* informasi tentang barang-barang yang sudah tidak diproduksi lagi dan diganti dengan barang yang lain namun dengan dengan spesifikasi yang sama.
6. *User* menginformasikan kepada pihak kapal apabila ada barang-barang yang sudah *discontinue* dan diganti dengan barang yang lain namun dengan spesifikasi yang sama dan mengundang pihak produsen atau penyedia untuk melakukan familiarisasi apabila pemasangan atau penggunaannya berbeda dari produk sebelumnya.

9. Risiko Kinerja Jasa Angkutan Barang

a. Analisa Profil Risiko

Pada triwulan IV risiko kinerja angkutan barang terdapat dua sasaran strategis yang mana dilihat dari segi divisi pengembangan usaha angkutan barang, sasaran strategis pertama adalah meningkatkan Penjualan dan Layanan Angkutan Barang & PUAB dimana KPI nya adalah *Load factor* muatan barang (%) Jumlah *Cargo*, peristiwa berisiko yang mungkin terjadi rendahnya pertumbuhan *shiper* baru konsekuensi dari hal tersebut adalah sampai pada penghasilan

b. Risk Management Planning

1. Items sent no later than the end of December 2018 from Singapore.
2. The Procurement Division does not have authority, and is proposed when implementing SCM applications. The relevant division optimizes the Min Max Planning function on the application.
3. The relevant division has the authority for the Procurement process at 100 Million.
4. The process of procuring Main Motor Parts has been carried out through the principal.

c. Follow-up Risk Management

1. SOP Revision regarding Procurement No.29A/HKO.01/DIR/II-2012 in accordance with President Regulation 16/2018.
2. Valid Information from producer if there is a replacement item.
3. Statement of User that replacement item can be used with same specification.
4. After reviewing on SOP Purchasing and Inventory for using SCM SIPARSEL application.
5. Producer or Relevant Party always updating the information related to the items that have not been produced and switched by replacement product with same specification product.
6. User informs to ship party if there is a discontinue product and changed by replacement product with same specification and invites producer party or supplier to socialize "familiarization" if the installation or uses is different from the previous product.

9. Freight Transport Performance Risk

a. Risk Profile Analysis

The risk of freight transport performance in the forth quarter has two strategic objectives in terms of the freight transport business development, the first strategic goal is to increase Sales and Transport Services of Goods & PUAB where load factor (%) Cargo as its KPI, risky events possibility of a low growth of new shippers and the consequence is the income of goods transportation, if seen from the probability level and the impact rate are quite large with a score of



Manajemen Risiko Risk Management

angkutan barang, jika dilihat dari tingkat kemungkinan cukup besar dengan skor empat, dan dari tingkat dampak juga cukup besar dengan skor empat, secara keseluruhan tingkatan risiko ini cukup besar, total skor secara keseluruhan 21 (merah) risiko tersebut harus mendapat perhatian dari dewan direksi untuk penanggulangan yang baik terlebih Direktur Usaha Angkutan Barang Kapal Barang dan Tol Laut. Penyebab risiko tersebut dikarebakan kajian pengembangan usaha angkutan barang tidak berjalan dengan baik, maka KRI yang sesuai dengan tupoksi adalah Kajian *Mapping Cargo* Bisnis terselesaikan, Kajian pengadaan Depo Kontainer terselesaikan, Kajian pengadaan Kontainer terselesaikan, Pengadaan kontainer. Dari keempat KRI yang ada hanya dua yang menunjukkan hasil *"ineffective"* yakni Kajian *Mapping Cargo* Bisnis, Kajian pengadaan Depo Kontainer.

Sasaran strategis kedua adalah mengembangkan bisnis logistik yang terintegrasi dengan KPI Implementasi digitalisasi proses bisnis logistik (%) dimana terdapat dua peristiwa berisiko pada KPI tersebut jika tidak ditangani dengan baik yakni Keterlambatan Implementasi Digital Logistik, Sistem tidak berjalan dengan baik, dampaknya Terjadi penyimpangan dan kehilangan peluang Big Data dan tidak tercapai KPI korporat. Secara keseluruhan tingkat risiko cukup besar pada keduanya sehingga perlu segera dilaporkan pada Direksi. Penyebabnya bisa berupa keterlambatan ketersediaan sistem aplikasi logistik, Implementasi aplikasi *booking* muatan belum maksimal, Ketersediaan SOP *End to End Logistic*. KRInya adalah Cabang yang mengimplementasikan aplikasi, prosentase sistem pengujian gagal, UAT Aplikasi *New B/L go-live* (Desember 2018). Dari ketiga KRI yang diukur satu KRI yang mendapat hasil *"ineffective"* yakni KRI UAT Aplikasi *New B/L go-live* (Desember 2018) hanya mendapat 75% sampai bulan Desember 2018.

Sementara itu sasaran strategis Meningkatkan Penjualan dan Layanan Angkutan Barang & PUAB, peristiwa berisiko, dampak risiko, dan tingkatan risiko masih sama seperti diatas hanya saja penyebab risiko untuk *risk register* divisi pemasaran angkutan barang kapal penumpang

four, in total of the overall score of 21 (red) risk that must get the attention from the board of directors for the good handling, especially for the Director of Freight Forwarding and Tol Laut Freight Business. The cause of this risk is the freight forwarding business development not running well, the KRI in accordance with its duties is the completed Cargo Business Mapping research, the Container Depots procurement and Container procurement researches are completed. From four KRIs there are only two showing *"ineffective"* results, namely the Cargo Business Mapping, and Container Depots procurement researches.

The second strategic objective is to develop an Integrated logistics business with the KPI Implementation of digitalization in logistics business process (%), there are two risky events on this KPI if it is not handled properly namely Digital Logistics implementation delays and that system does not run well, impacting the Deviation and loss of Big Data opportunity and un-achieved KPI of the Company. Overall level of risk is quite large in both of them so it needs to be reported immediately to the Board of Directors. The risks could be originating from the availability tardiness of a logistics application system, the worst implementation of the freight booking application and the availability of SOP End to End Logistics. Its KRI is coming from our Branches to implement those application, the percentage failures of those testing system, and UAT New B/L go-live application (December 2018). From these three KRIs measured, only one KRI received an *"ineffective"* result, namely the KRI of UAT New B/L go-live application (December 2018) only gaining 75% until December 2018.

Meanwhile Increasing Goods & PUAB Sales and Transport Services of this strategic objective. Risky events, risk impacts, and risk levels are still same as mentioned above, but only the causes of risk for its risk register of the different marketing division of passenger ship for goods

Manajemen Risiko

Risk Management

berbeda yakni aktifitas *canvassing* yang tidak optimal dan belum adanya rencana pemasaran (*Marketing Plan*). KRI-nya pun demikian yakni Shiper baru per triwulan dan adanya marketing plan yang memadai. Dari kedua KRI tersebut diketahui hasil atau tingkat efektifitas dapat dikatakan "effective".

b. Rencana Pengendalian Risiko

Divisi Pengembangan Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut

1. KAK telah disusun dan di-review.
2. Kajian telah selesai dilakukan.
3. Kontrak sudah ditandatangani.
4. Rencana 2019 implementasi aplikasi reservasi & *labelling* di 40 (empat puluh) cabang dalam 3 (tiga) triwulan.
5. Status Aplikasi *New B/L* masih di-develop (75%) dan Rencana pengendalian risiko masih menggunakan Aplikasi B/L yang lama.

Divisi Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang

1. Membuat marketing *tools* untuk kegiatan *canvassing*.
2. Menyusun *marketing plan* berbasis 4 P (*Product, Price, Promotion, Place*).

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Divisi Pengembangan Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut

Respon Plan Triwulan III:

1. Uji coba sistem aplikasi *booking & labelling* pada pelaksanaan kegiatan operasional cabang Tanjung Priok,
2. Review KAK dan Konsiyering dengan pihak konsultan.
3. Penyusunan KAK Kajian Pengadaan Depo Kontainer.

Progres Respon Plan Triwulan IV:

1. Laporan Implementasi *booking online & Labelling* sudah diuji cobakan di 5 (lima) cabang yaitu Tanjung Priok, Kupang, Parepare, Bali dan Bitung (Nota Dinas 12.20/01/ND-B/024/2018).

transportation, namely not-optimum *canvassing* activities and neno marketing planning (*Marketing Plan*). And the KRI for those risk is also a new Shiper quarterly and there is an adequate marketing plan. From those two KRIs are resulting an "effectiveness" level.

b. Risk Management Planning

Freight Transportation and Tol Laut Business Development Division

1. KAK has reviewed and prepared.
2. A review has conducted.
3. Signed contract.
4. The implementation planning in 2019 for booking and labeling application in 40 branches in third quarter.
5. New B/L application development status of 75 % and Risk management plan stiiil using an old B/L application.

Freight Transportation of Ship Passenger Division

1. Making an marketing tools for *canvassing* activities.
2. Preparing the marketing plan with 4 P-Base (*Product, Price, Promotion, Place*).

c. Follow-up Risk Management

Freight Transportation and Tol Laut Business Development Division

Third Quarter Response Plan:

1. Booking and labelling application system trial on the implementation of operational activities in Tanjung Priok.
2. Reviewing KAK and Consigment with Consultant party.
3. Preparing KAK regarding Container Depot Procurement reviews.

The Fourth Quarter Response Plan Progress:

1. Report on online booking & labeling implementation has been tested in 5 (five) branches namely Tanjung Priok, Kupang, Parepare, Bali and Bitung (Service Note 12.20/01/ND-B/024/2018).



Manajemen Risiko

Risk Management

2. KAK sudah di-review namun pelaksanaan kajian *mapping kargo* akan dilakukan pada tahun 2019.
3. KAK sudah di-review namun pelaksanaan kajian pengadaan depo akan dilakukan pada tahun 2019.

Respon Plan Triwulan I-2019

1. Persetujuan rencana implementasi program tahun 2019 menunjuk Nota Dinas 12.20/01/ND-B/024/2018 (takah Direktur Utama nomor 650 dan takah Dir.UAB nomor F0757).
2. Implementasi *booking* reservasi *online* di 15 (lima belas) cabang PT PELNI (Persero) untuk triwulan I.
3. Pelaksanaan kajian *mapping cargo* bisnis dan pengadaan depo kontainer.

Divisi Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang

Respon Plan Triwulan III:

1. *Customer Focus*.
2. Membuat Muatan Berlabel *Redpack* secara sistematis.
3. Promosi Produk baru *End to End Logistics*.
4. Men-target cabang-cabang untuk merealisasikan kebijakan *return cargo*.

Progres Respon Plan Triwulan IV:

1. Melakukan koordinasi dengan PELNI 162 untuk menjaga hubungan dengan *customer*.
2. Melakukan Input Jenis Muatan Berlabel *Redpack* ke dalam Sistem Reservasi *Online*.
3. Mengikuti Pameran ITSCL 2018.
4. Mengirim Nota Dinas ke Cabang-cabang perihal Permintaan data untuk optimalisasi pendapatan perusahaan dari penghasilan *return cargo*.

Respon Plan Triwulan I-2019

1. Monitoring Evaluasi dan Implementasi *Redpack* dan Garuda Cargo.
2. Kunjungan Depo/Gudang Konsolidasi.
3. Sosialisasi dan Implementasi aplikasi muatan Perintis.
4. Sosialisasi dan Implementasi aplikasi *New BL*.

2. KAK has been reviewed but the implementation of cargo mapping studies will be conducted in 2019.
3. KAK has been reviewed but the implementation of depot procurement studies will be carried out in 2019.

First quarter – 2019 Response Plan:

1. The plan approval for implementing the 2019 program to appoint an official Note 12.20/01/ND-B/024/2018 (what is the President Director number 650 and what is the Director of UAB Number F0757).
2. Implementation of online reservation bookings at 15 (fifteen) branches of PT PELNI (Persero) for the first quarter.
3. Implementation of business cargo mapping studies and procurement of container depots.

Freight Transportation of Ship Passenger Division

Third Quarter Response Plan:

1. *Customer Focus*.
2. Systematically Making *Redpack* Labels.
3. New End to End Logistics Products Promotion.
4. Targeting the branches to realize the return cargo policy.

The Fourth Quarter Response Plan Progress:

1. Coordinating with PELNI 162 to maintain relationships with customers.
2. Inputting the *Redpack* Labeled Type into the Online Reservation System.
3. Joining the ITSCL 2018 Exhibition.
4. Sending Official Note to Branches regarding data request to optimize the Company's revenue from return cargo income.

First quarter – 2019 Response Plan:

1. Monitoring the Evaluation and Implementation of *Redpack* and Garuda Cargo.
2. Visiting Consolidated Depo/Warehouse.
3. Dissemination and Implementation of Pioneering cargo applications.
4. Socialization and Implementation of *New BL* applications.



Manajemen Risiko

Risk Management

10. Risiko Asset Idle

a. Analisa Profil Risiko

Pada triwulan IV 2018 ini *risk register idle asset* berubah, semula kami mengklasifikasikan aset PT PELNI (Persero) menjadi tiga bagian:

1. Aset siap pakai;
2. Aset perlu renovasi; dan
3. Aset bermasalah.

Sejak triwulan I-III 2018 belum menunjukkan hasil yang memadai, oleh sebab itu pada triwulan IV 2018 sasaran strategis *idle asset* mengarah pada "mengembangkan usaha lainnya" dimana jika sasaran tidak tercapai akan menimbulkan peristiwa risiko asset perusahaan tidak produktif dan akan berdampak pada peluang penghasilan yang hilang. Dari tingkatan risiko yang ada, berdasarkan tingkat kemungkinan memiliki skor lima, yang artinya pernah terjadi dalam tahun yang sama dan kemungkinan akan terjadi kembali ditahun depan, untuk tingkat dampak/konsekwensi memiliki skor tiga, dimana dampak tidak terlalu signifikan namun demikian, secara keseluruhan tingkat risiko *idle asset* ini cukup tinggi karena memiliki skor 20 (merah) yang artinya risiko ini harus diketahui oleh jajaran direksi untuk segera dilakukan mitigasinya. Penyebab dari risiko tersebut adalah perubahan kebijakan dari instansi setempat untuk aset yang akan dikerjasamakan dengan calon mitra, maka KRI yang nantinya dapat mendorong capaian sasaran adalah bisnis plan (triwulanan) yang telah di setujui tepat waktu, dan eksekusi *business plan*/tahun. Berdasarkan realisasi pada triwulan IV 2018 hasilnya dapat dikatakan "effective" pada dua KRI tersebut. Karena eksekusi bisnis plan per- tahun sudah di eksekusi dengan baik oleh divisi pengelolaan aset.

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Kordinasi dengan instansi setempat.
2. Eksekusi *Business Plan*.
3. *Monitoring* pembayaran.
4. Menyusun *Business Plan* Kemayoran.
5. Penandatanganan kontrak aset Semarang dibulan Desember 2018.

10. Asset Idle Risk

a. Risk Profile Analysis

In the fourth quarter of 2018, this asset idle of risk register changed, we classified PT PELNI (Persero) assets into three parts,

1. Ready-to-use assets;
2. Needing renovation assets; and
3. Problematic assets.

Since quarter I-III of 2018 has not shown sufficient results, therefore in the fourth quarter of 2018 of this idle asset strategic objective leads to "developing other businesses" where if the target is not achieved it will cause the risk of the company's assets to be unproductive and will have an impact on income opportunities lost. From the level of risk that exists, based on the level of probability has a score of five, which means that it happened in the same year and is likely to occur again next year, for the level of impact / score has a score of three, where the impact is not too significant, but overall level of risk This idle asset is quite high because it has a score of 20 (red) which means that this risk must be known by the board of directors to immediately mitigate it. The cause of the risk is a change in policy from the local agency for assets that will be cooperated with potential partners, the KRI that can later achieve the target is a business plan (quarterly) that has been approved on time, and business plan/year execution. Based on the realization in the fourth quarter of 2018 the results can be said to be "effective" on the two KRIs. Because the annual business plan execution has been well executed by the asset management division.

b. Risk Management Planning

1. Coordinating with local instanstion.
2. Business Plan execution.
3. Monitoring the payment.
4. Preparing Kemayoran Business Plan.
5. Semarang asset contract assignment on December 2018.



Manajemen Risiko Risk Management

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Berdasarkan paparan rapat bersama komisaris, Direktur SDM & Umum, tim manajemen risiko dan Divisi *Corporate Planning* pada tanggal 17 Desember 2018 disampaikan bahwa:

1. Pengembangan Aset Cabang Denpasar Bali:
 - MESS : Disewakan untuk pusat kopi atau indomart Kerjasama jangka panjang.
 - KANTOR : Akan direlokasi ke Benoa dengan renovasi.
 - BANGUNAN KANTOR : Difungsikan sebagai Pusat Diklat *tourisme and creativity* Segmen untuk masyarakat Bali dan sekitarnya
2. Pengembangan Aset Kemayoran.
3. Pengembangan Aset Surabaya.
4. Pengembangan Aset Pontianak.

c. Follow-up Risk Management

Based on joint meeting with Commissioners presentation, Director of Human Resources and Affairs, Risk Management team and Corporate Division planning on December 17, 2018 stated as:

1. Denpasar, Bali branch asset development:
 - MESS : rented out for coffee shop or Indomaret with long-term cooperation.
 - OFFICE: Will be relocated to Benoa with an renovation.
 - OFFICE BUILDING: functioned as tourism training center and creativity segment for Bali and surrounding areas.
2. Kemayoran Asset Development.
3. Surabaya Asset Development.
4. Pontianak Asset development.

11. Risiko Audit

a. Analisa Profil Risiko

Sasaran strategis SPI adalah *organization capital*, peristiwa berisikonya temuan audit internal, dampak yang ditimbulkan jika peristiwa berisiko terjadi adalah dampak reputasi perusahaan, kecurangan sampai pada kerugian keuangan. Tingkatan kemungkinan terjadinya sangat besar karena kejadian terus berulang-ulang tiap tahunnya dan diprediksi akan terjadi kembali pada tahun-tahun berikutnya, tingkat dampak sendiri jika cukup besar, karena diakumulasikan dari tahun-tahun kebelakang/sebelumnya temuan yang belum ditindaklanjuti oleh *auditee* sehingga secara keseluruhan tingkat risiko atas peristiwa berisiko sangat besar tercatat skor 23 (merah) tentunya hal ini harus diselesaikan dan diputuskan solusi terbaik secara seksama oleh jajaran Direksi. Penyebab risiko atas peristiwa tersebut karena rekomendasi hasil audit yang tidak ditindaklanjuti oleh *auditee* hingga berlarut-larut dan terus menerus berulang-ulang tiap tahunnya. Dari sini kami ingin mengetahui rekomendasi hasil audit yang ditindak lanjut oleh *auditee* berusia enam bulan, lebih dari enam bulan dan lebih dari satu tahun tentunya dengan pendekatan KRI *risk register audit*. Diketahui hasil dari rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh *auditee* berusia enam bulan, lebih dari enam bulan dan

11. Audit Risk

a. Risk Profile Analysis

The strategic objective of Internal Control unit is capital organization, the risky event of internal audit findings, the impact of which is caused if the risk event impacts the company's reputation, fraud and financial losses. The level of likelihood is very large due to the events continue to repeat every year and are predicted to occur again in the following years, the level of impact itself is quite large, because it is accumulated from the previous years of findings that have not been followed up by the Audit so that the overall level of the risk of a very large risk event is recorded as a score of 23 (red), of course this must be resolved and the best solution is decided by the Board of Directors. The cause of the risk for the incident was because of the audit results recommendations that were not followed up by the auditee until they dragged on and continued to take over repeatedly each year. From here we want to find out the recommendations of the audit results that are followed up by the auditee aged six months, more than six months and more than one year of course with the KRI approach to the risk register audit. It is known that the results of the audit results recommendations that are followed up by the auditee are six months old, more than six months and more than one year are not optimal and can be said to be "ineffective".

Manajemen Risiko

Risk Management

lebih dari satu tahun tidak maksimal dan dapat dikatakan *"ineffective"*. Perlu adanya ketegasan auditee untuk menindaklanjuti temuan-temuan rekomendasi hasil audit yang disampaikan oleh SPI agar perusahaan sehat secara budaya maupun keuangan.

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Melakukan pemantauan dengan *checklist* tindak lanjut dari *Auditee*.
2. Sosialisasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut.
3. Pembahasan triwulanan *monitoring* Tindak Lanjut rekomendasi Internal dengan PIC/*Auditee*.
4. Merekomendasikan tindak lanjut atas rekomendasi Internal dan Eksternal untuk menjadi KPI dan *Jobdesc* masing-masing unit kerja.
5. Melakukan pemantauan dengan *checklist* tindak lanjut dari *auditee*
6. Melakukan kategorisasi temuan-temuan yang material.
7. Pembahasan triwulanan *monitoring* Tindak Lanjut rekomendasi Eksternal dan Internal dengan PIC/*Auditee*.
8. Merekomendasikan tindak lanjut atas rekomendasi SPI untuk menjadi KPI dan *Jobdesc* masing-masing unit kerja.
9. Pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Eksternal dan Internal bersama Direksi dan PIC/*Auditee*.
10. *Monitoring* tindak lanjut temuan & rekomendasi audit.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

1. Melakukan *follow-up* dan pemantauan dengan *checklist* tindak lanjut dari *auditee*.
2. Mengkategorisasikan temuan-temuan material dan membuat rekapitulasi Potensi Kerugian perusahaan atas hasil temuan SPI dan BPK-RI.
3. Sedang dilakukan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengelolaan Angkutan Laut Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada PT PELNI (Persero) oleh BPK RI dengan Surat Tugas No. 334/ST/IX-XX.2/07/2018 Tanggal 30 Juli 2018.

there is a need for firmness of the auditee to follow up on the findings of the audit findings submitted by SPI so that the company is culturally and financially sound.

b. Risk Management Planning

1. Controlling the follow-up checklist from auditee.
2. Socializing the completion of follow-up recommendation.
3. Discussing the quarterly monitoring of follow-up external and internal recommendation with PIC/Audit.
4. Rekomendating the follow-up on Internal and External recommendation to be KPI and each of work unit *jobdesc*.
5. Controlling the follow-up checklist from auditee.
6. Categorizing the material findings.
7. Discussing the quarterly monitoring of follow-up external and internal recommendation with PIC/Audit.
8. Rekomendating the quarterly monitoring for the follow-up Internal Control Unit recommendation to be KPI and each of work unit *jobdesc*.
9. Discussing the completion of follow-up external and internal recommendation with the Directors and PIC/Audit.
10. Monitoring the follow-up findings & audit recommendation.

c. Follow-up Risk Management

1. Following-up and Controlling the follow-up checklist from Auditee.
2. Categorizing the material findings and making the recapitulation of potential company losses on the findings of Internal Control Unit and the Financial Audit Authority of Republic of Indonesia.
3. Preliminary Performance Examination is underway for the Management of Sea Transportation in 2017 and Semester I 2018 at PT PELNI (Persero) by financial audit authority of republic of Indonesia with Letter of Assignment No. 334/ST/IX-XX.2/07/2018 July 30, 2018.



Manajemen Risiko Risk Management

4. Sudah diusulkan sesuai ND SPI No. 10.04/01/ND/091/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 perihal Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2007-2015 dan SPI Tahun 2014-2016 dan akan diusulkan kembali di Triwulan I Tahun 2019.
5. Akan dilaksanakan pada Januari 2019.
6. Telah dilakukan pembahasan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Audit Internal dan Eksternal bersama Dewan Komisaris pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sesuai Risalah Rapat Komite Audit dengan Internal Audit PT PELNI (Persero) No. 66/K.Audit/XI-2018.

d. Rencana Penanganan Risiko 2019

1. Melakukan pemantauan dengan *checklist* tindak lanjut dari *auditee*.
2. Melakukan kategorisasi temuan-temuan yang material.
3. Pembahasan triwulanan *monitoring* Tindak Lanjut rekomendasi Eksternal dan Internal dengan PIC/*Auditee*.
4. Merekomendasikan tindak lanjut atas rekomendasi SPI untuk menjadi KPI dan *Jobdesc* masing-masing unit kerja.
5. Pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Eksternal dan Internal bersama Direksi dan PIC/*Auditee*
6. *Monitoring* tindak lanjut temuan & rekomendasi audit.

12. Risiko Audit

a. Analisa Profil Risiko

Pada *risk register* triwulan IV 2018 sasaran strategis Divisi perbendaharaan adalah kinerja keuangan korporat dimana KPI nya adalah Laba konsolidasi PT PELNI (Persero) (miliar), EBITDA margin (%), Penyelesaian utang SLA. Risk name dari divisi perbendaharaan ini adalah risiko likuiditas dimana jika tidak ditangani dengan baik kemungkinan akan menimbulkan peristiwa berisiko seperti arus kas tidak sehat, serta memunculkan dampak kerugian perusahaan. Tingkatan dari risiko tersebut tergolong sangat tinggi yakni total skor yang didapat sebanyak 23 point (merah) risiko tersebut hendaknya segera

4. It has been proposed according to ND SPI No. 10.04/01/ND/091/2017 on October 4, 2017 concerning Monitoring of Follow-Up Recommendations for financial audit authority of republic of Indonesia Audit Results for 2007-2015 and Internal Control Unit for 2014-2016 and will be proposed again in the First Quarter of 2019.
5. Will conducted on January, 2019.
6. Has been conducted the discussion on following up the examination results of Internal and External Audit with the Board of Commissioners on Wednesday, November 14, 2018 based on the minutes of Audit Committee meetings wit Internal Audit of PT PELNI (Persero) No: 66/K.Audit/XI-2018.

d. Risk management palnning in 2019

1. Controlling the follow-up checklist from *Auditee*.
2. Categorizing the material findings.
3. Quarterly discussion in monitoring the External and Internal recommendations with PIC/*Auditee*.
4. Rekomending the follow-up on Internal Control Unit recommendation to be its KPI and each of work unit's *jobdesc*.
5. Discussing the completion of follow-up on External and Internal recommendations with the Directors and PIC/*Auditee*.
6. Monitoring the followed-up findings & audit recommendation.

12. Audit Risk

a. Risk Profile Analysis

In the risk register of quarter IV of 2018 on the strategic objective of Treasury Division is corporate financial performance where the KPI is PT PELNI (Persero) consolidated profit (billion), EBITDA margin (%), SLA debt settlement. The risk name of the treasury division is liquidity risk where if not handled properly it will likely lead to risky events such as unhealthy cash flows, as well as creating a company loss impact. The level of the risk is very high, namely the total score obtained by 23 points (red), the risk should be immediately reported by the relevant director in order to get special handling in order to mitigate risk so that



Manajemen Risiko

Risk Management

dilaporkan direktur terkait agar mendapatkan penangan khusus dalam rangka mitigasi risiko supaya peristiwa berisiko tidak terjadi dikemudian hari. Penyebab dari peristiwa tersebut dikarenakan umur piutang dan umur hutang. KRI nya adalah:

- *Aging* < 1 tahun = 15 M
- *Aging* > 1 Tahun = 0
- *Aging* < 1 tahun ≤ 30 M
- *Aging* > 1 Tahun ≤ 10 M

Dari keempat KRI yang disusun terdapat satu KRI yang perlu segera dimitigasi yakni pada KRI *Aging Piutang* yang lebih dari satu tahun menunjukkan realisasi sebesar Rp28 miliar dengan hasil "ineffective".

b. Rencana Pengendalian Risiko

Response Plan Triwulan IV:

1. Melaksanakan SOP perbendaharaan, No. 07.04/02/sk/hko.01/2017.
2. Menjaga *control* yang ada *Response Plan* Triwulan I/2019 Melaksanakan SOP dan menjaga *control* yang ada.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Progress Tindak lanjut Triwulan IV: Evaluasi Posisi *Aging Hutang* dan *Piutang Per Debitur* dan *Kreditur*.

13. Risiko Corporate Branding

a. Analisa Profil Risiko

Satu sasaran strategis pada risiko *branding corporate* di triwulan IV 2018 ini yakni sasaran "*organization capital*" dengan KPI skor GCG dimana ada dua peristiwa berisiko yakni berita negative tentang PT PELNI (Persero) di masyarakat umum, kedua Tindak lanjut AOI yang tidak dilaksanakan dari kedua peristiwa berisiko tersebut terdapat dua dampak yang pertama reputasi buruk bagi perusahaan, kedua skor GCG tidak tercapai, dari kedua dampak tersebut dampak reputasi Perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dengan skor 23 (merah) tahun ini 2018 PT PELNI (Persero) dikejutkan dengan beredarnya video pembuangan sampah ke laut yang diduga dilakukan oleh pegawai PT PELNI (Persero), hal tersebut sangat

risky events do not occur in the future. The cause of the event was due to the age of the accounts receivable and the age of the debt. The KRI is among others:

- *Aging* <1 year = 15 B
- *Aging* > 1 year = 0
- *Aging* <1 year ≤ 30 B
- *Aging* > 1 year ≤ 10 B

From the four KRI prepared above, there are one of KRI needed to be mitigated namely *Debt Aging* more than one year showed the realization of Rp28 billion resulting "ineffective".

b. Risk Management Planning

Fourth Quarter of Response Plan:

1. Implementing treasury SOPs, No. 07.04/02/sk/hko.01/2017.
2. Maintaining the existing control of response plan in First Quarter to apply SOP and maintain the existing control.

c. Follow-up Risk Management

The Fourth quarter followed up progress: evaluating the aging position of debt and receivables per debtors and creditors.

13. Corporate Branding Risk

a. Risk Profile Analysis

One of the strategic objectives in corporate branding risk in the forth quarter Of 2018 is capital organization with its KPI of GCG score there has two risky events namely negative news about PT PELNI (Persero) in community. And the second is a followed up AOI that is not conducted. Those two risky events, there are two impacts i.e bad reputation and unachieved GCG score. From those impacts, the Company reputation has the highest level of 23 score (Red). In 2018, PT PELNI (Persero) is concerned with circulating video related waste disposal into the sea allegedly carried out by employees of PT PELNI (Persero), this has greatly tarnished for the Company's good reputation. The cause of the risk is poor imaging that has spread to the community because of the



Manajemen Risiko Risk Management

mencoreng reputasi baik Perusahaan selama ini. Penyebab risiko adalah pencitraan yang buruk yang tersebar ke masyarakat karena video tersebut. Penyebab risiko target skor GCG adalah belum adanya aturan yang mengharuskan AOI ditindaklanjuti unit kerja untuk mengatasinya perlu KRI yang tepat diantaranya:

1. Reaktif dalam menangkai berita negatif perusahaan.
2. Proaktif dalam menyampaikan berita positif perusahaan.
3. Tersedianya SK.

Dari ketiga KRI diatas dua KRI yang menunjukkan hasil "ineffective" yakni Proaktif dalam menyampaikan berita positif perusahaan dan Tersedianya SK.

b. Rencana Pengendalian Risiko

Alur respon reaktif saat pencitraan buruk sebagai berikut:

1. Klarifikasi/validasi kebenaran masalah.
2. Mengalisis akar masalah dan solusi yang dibutuhkan.
3. Meminta tindakan/solusi dari user terkait masalah.
4. Menyusun informasi untuk disampaikan kepada publik dalam bentuk *press release*.
5. Menyebarluaskan *press release* melalui media yang dimiliki.

Alur respon reaktif saat pencitraan buruk sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi dari user terkait kinerja/program positif Perusahaan.
2. Menyusun informasi dalam bentuk *press release*.
3. Menyebarluaskan *press release* melalui media yang dimiliki.

Tahun 2018, GCG melakukan *review* pedoman dengan timeframe pengerjaan:

1. Pengajuan izin prinsip dari Manager ke VP.
2. Pengajuan izin prinsip dari CS ke Direktur SDM & Umum.

video. The risk of a GCG score target that there is no regulation requiring the AOI to be followed-up by the work unit to overcome it:

1. Reactive in refuting the negative news about the Company.
2. Proactive in submitting the positive news about the Company.
3. The Letter of Decree availability.

From those KRI above, two KRI resulted "ineffective" which is proactive in reporting the Company's positive news and the letter of decree availability.

b. Risk Management Planning

Reactive response flows when bad image emerges as follows:

1. Clarifying/validating the truth of the problems.
2. Analyzing the root of the problems and needed solution.
3. Requesting action/solution from relevant user related the problems.
4. Preparing the information to explained to public through *press release*.
5. Expanding *press release* through owned media.

Reactive response flows when bad image emerges as follows:

1. Collecting the information from user related the performance/positive program of the Company.
2. Compiling the information through *press release*.
3. Socializing *press release* through our media.

In 2018, GCG reviewed its guidelines with work time frame:

1. Submission of principle permission from Manager to VP.
2. Submission of principle permission from CS to Director of Human Resources & General Affairs.

Manajemen Risiko

Risk Management

3. Konfirmasi ke Pengadaan terkait *Vendor* yang ditetapkan.
4. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan.
5. Melakukan *Entry Meeting* dengan unit-unit yang terkait.
6. Finalisasi *cover* kepada Direksi.
7. *Review draft* pedoman *soft structure*.
8. Finalisasi konten *Draft Soft structure*.
9. *Dummy*.
10. Persetujuan Direksi & Dewan Komisaris.
11. Cetak dan sosialisasi *soft structure*.

Sebelum aturan ditetapkan dalam pedoman *soft structure* tim GCG mengundang tim *counterpart* 2017 dan mendiskusikan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

Humas:

1. Telah dilakukan media *briefing* untuk menjelaskan tentang kebijakan pengupahan ke teman-teman media merespon aksi mogok SP.
2. Melakukan media *setting* untuk sejumlah kegiatan MOU dan penerimaan penghargaan bagi Perusahaan di media massa.
3. SOP Publikasi dalam progres.

GCG:

1. Sudah dilaksanakan *Self Assesment* GCG tahun 2017 dengan skor 80,448.
2. Sudah dilaksanakan penyusunan *Annual Report* tahun 2017 dan sudah dilakukan pendistribusiannya.
3. Sudah dilaksanakan melalui *web* dan *milis* pegawai.
4. Dalam proses pengumpulan persetujuan paraf Manager dan Tanda Tangan Direksi untuk cetak SR.
5. Dalam proses *review SK Soft Structure* dan pemilihan *vendor* untuk cetak pedoman GCG tahun 2018. Penyusunan *review* dan cetak pedoman *soft structure* hingga bulan Januari 2018.
6. Pembahasan dengan masing-masing Divisi akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2018.

3. Confirmation to Procurement related to the specified Vendor.
4. The needed data collection.
5. Conduct entry meeting with related units.
6. Cover finalization at the Board of Directors.
7. Review soft structure guidelines draft.
8. Soft structure draft of content finalization.
9. Dummy.
10. The approval of the Board of Commissioners and Directors.
11. Soft structure printed socialization.

Before the issuance of regulation in soft structure guideline of GCG team to invite counterpart 2017 and to discuss the followed up recommendation.

c. Follow-up Risk Management

Corporate Communication:

1. Has been conducted media briefing to explain payroll policy to media to respon work strike action.
2. Performing media setting to some MOU activities and reward earned by the Company printed in mass media.
3. SOP publication in progress.

GCG:

1. Has performed Self Assessment of GCG in 2017 with 80,448 score.
2. Has been conducted Annual Report 2017 preparation and has been distributed.
3. Has been implemented through web and employee mail.
4. In the process of collecting approval from the Manager and the Board of Directors for Sustainability Report printing.
5. In reviewing the letter of decree regarding soft structure and vendor chosen for guidelines of GCG in 2018. Review preparation and soft structure guidelines print out until January 2018.
6. Discussion in each division will be implemented in the middle of October, 2018.



Manajemen Risiko

Risk Management

14. Risiko SDM

a. Analisa Profil Risiko

Risk register Divisi SDM terdapat tiga sasaran strategis yang harus tercapai dan ketiga sasaran tersebut dibagi atas enam departemen yang ada pada divisi SDM dari ketiga sasaran tersebut sasaran pertama yakni meningkatkan efektifitas perencanaan operasional, dimana departemen perencanaan SDM laut yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya karena jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kecelakaan kapal dan berdampak pada kerusakan alam, penumpang yang cedera, dan kerusakan aset. Walaupun tingkat risiko tersebut masih dalam kategori sedang karena dilihat dari segi tingkat kemungkinan dan tingkat dampak namun hal tersebut diupayakan jangan sampai terjadi. Jika sampai terjadi peristiwa berisiko tersebut disebabkan karena ketidaksesuaian kapasitas & kapabilitas Nakhoda & ABK. *Vice President* SDM mesti mengawasi betul perputaran mutasi/rotasi Nakhoda dan ABK yang akan ditugaskan diatas kapal. KRI dari sasaran ini adalah Sesuai PDAK dan sesuai COC & COP. Disarankan departemen perencanaan SDM laut segera membangun system rekrutmen, mutase, rotasi dan promosi untuk pegawai laut agar tidak terjadi kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor *human error*.

Sasaran yang kedua adalah *human capital* dimana KPI korporat adalah prosentase pegawai PT PELNI (Persero) yang memenuhi standar kompetensi untuk pegawai darat dan pegawai PT PELNI (Persero) yang memenuhi standar kompetensi untuk pegawai laut peristiwa berisiko yang mungkin terjadi ada tiga kemungkinan, pertama pekerja yang tidak kompeten, dua, kaderisasi tidak berjalan dengan baik, rotasi pekerja, untuk pegawai laut jika KPI tidak tercapai maka kemungkinan terjadi peristiwa berisiko adalah kapasitas dan kapabilitas pegawai laut tidak terpenuhi. Sehingga berdampak pada produktifitas pekerja yang rendah, dan ketidaksediaan suksesor. Dari beberapa dampak yang ditimbulkan tingkat risiko yang paling tinggi adalah produktifitas pekerja yang rendah mencapai skor 21 (merah). Penyebabnya sangat beragam, diantaranya kurangnya perhatian, kurangnya *coaching*, posisi

14. Human Resources Risk

a. Risk Profile Analysis

Risk register of Human Resources Division has three strategic objectives that must be achieved and those objectives divided into the existing six department in Human Resources division, of what those three risks, first objective is to increase operational planning, where is offshore human resources planning department charged for its implementation. If it does not manage well that will create ship accident and will impact the natural damage, passenger injury, and asset damage. Even though, these risk level still have medium level if seen from possibility rates and impact level and we still get an attention to these risks. If these risks happened are due to nonconformity of captain and crew competency and capability. Vice President of Human Resources must control captain and crew mutation/rotation that will be charged for sailing. Its KRI of this objective is accordance with PDAK and COC & COP. Human resources development department is suggested to building a recruitment system, mutation, rotation, and promotion for offshore employee in order to negate ship accident caused by human error.

The second objective is human capital where its corporate KPI is the percentage of PT PELNI (Persero) employee who meets the competence of offshore and ashore employee. There is three risky events that probably happened, first event is incompetent employee, second event is regeneration not running well and job rotation for offshore employee if its KPI is not achieved so those risky events produce offshore employee incapacity and incapable. And resulting low-performance productivity and successor unpreparedness. From these impacts showed the highest level of risks is low performance of employee reaching 21 score (Red). This has various causes, such as less attention, less coaching treatment, wrong job position, wrong recruitment, no human resources capability development, whole uncondusive climate environment, have not been implemented the letter of decree regarding well offshore career



Manajemen Risiko

Risk Management

yang salah, rekrutmen yang salah, tidak adanya percepatan pengembangan kapabilitas SDM, secara keseluruhan iklim kerja tidak kondusif, belum dilaksanakannya SK pola karir pegawai laut dengan baik, tidak adanya perencanaan rekrutmen pegawai laut, tidak adanya *system monitoring* COC & COP, tidak adanya system mutasi pegawai laut. Untuk memitigasi risiko yang mungkin akan muncul maka ada beberapa KRI yang dianggap sesuai antara lain:

1. Jam pelatihan untuk pekerja darat.
2. Jam pelatihan untuk pekerja laut.
3. Jumlah VP yang akan di-coach/tahun.
4. Jumlah Manager yang akan di-coach/tahun.
5. Nilai PKP < 2,8.
6. Jumlah yang di PHK dalam waktu <1 tahun dari jumlah yang di rekrut.
7. Pelaksanaan program *talent pool*.
8. Rotasi pekerja yang tepat.
9. Jumlah temuan perwira laut yang tidak sesuai ijazah dengan jabatannya.
10. Adanya data perencanaan rekrutmen pegawai laut.
11. Tersedianya sistem *monitoring* COC & COP.
12. Tersedianya fasilitas konseling karir pegawai laut.
13. Tersedianya sistem mutasi untuk pegawai laut.

Dari ke-13 KRI pada sasaran strategis human capital terdapat enam hasil tingkat efektifitas yang menunjukkan "ineffective", keenam hasil *ineffective* tersebut adalah;

1. Jumlah VP yang akan di-coach/tahun.
2. Jumlah Manager yang akan di-coach/tahun.
3. Adanya data perencanaan rekrutmen pegawai laut.
4. Tersedianya sistem *monitoring* COC & COP.
5. Tersedianya fasilitas konseling karir pegawai laut.
6. Tersedianya sistem mutasi untuk pegawai laut.

Sasaran strategis ketiga adalah *organization capital* dimana indeks keterikatan pegawai menjadi KPI-nya dan peristiwa berisiko yang mungkin terjadi jika KPI tidak tercapai adalah iklim kerja yang tidak kondusif sehingga berdampak pada produktifitas kinerja yang rendah, tingkat risiko ini cukup besar.

shceme, no offshore recruitment planning, no COC & COP monitoring system, no offshore mutation system. To mitigate the risks, there are suitable KRI, among others:

1. Training hours for ashore employee.
2. Training hours for offshore employee
3. The number of VP will be coached/year.
4. The number of Manager will be coached/year.
5. PKP Score <2,8.
6. The number of work termination in <1 year compared to the number of employee recruited.
7. Talent pool program implementation.
8. Employee rotation precisely.
9. Total offshore employee findings who is not suitable their certificate with their certification.
10. There is the data for offshore employee recruitment planning.
11. COC & COP monitoring system availability.
12. Offshore career counseling facility.
13. Offshore mutation system availability.

From those 13 KRI on human capital's strategic objectives, there is six level of effectivity resulting "ineffective" as follows:

1. The number of VP will be coached/year.
2. The number of Manager will be coached/year.
3. There is the data for offshore employee recruitment planning.
4. COC & COP monitoring system availability.
5. Offshore career counseling facility.
6. Offshore mutation system availability.

Three strategic objectives are capital organization where the relating employee index being its KPI and risky event emerges if KPI is not gained an uncondusive work circumstances so it will affect low-performance productivity, there risks have a large impact.



Manajemen Risiko Risk Management

KRI dari masing-masing penyebab adalah:

1. Penilaian komitmen <2.
2. Penilaian komunikasi <2.
3. Penilaian kerjasama tim <2.
4. Penilaian Kinerja <2.
5. Penilaian C&B <2.
6. Penilaian T&D <2.
7. Penilaian perencanaan karir <2.
8. Penilaian W&S *relation* <2.

Dari kedelapan KRI yang ada secara keseluruhan dapat dikatakan baik, dengan hasil "effective".

b. Rencana Pengendalian Risiko

1. Melakukan pelatihan perwira kapal tanggal 4 - 7 Desember 2018.
2. Membuat program kerja pembibitan *coach* internal PT PELNI (Persero) di tahun 2019.
3. *Replacement*.
4. Jika terkait dengan kedisiplinan maka akan dilaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan PKB.
5. Evaluasi pegawai berdasarkan kompetensi (PG PL PD GOL dan PKP) dan hasil asesmen kompetensi pada level managerial (madya & utama).
6. Pemberian Kesempatan Pendidikan peningkatan Ijazah COC Pegawai Laut.
7. Rencana Rekrutmen menggunakan *Manage Service* untuk tamtama di tahun 2019.
8. Permintaan secara periodik kepada Penata Usaha Kapal data validasi COC & COP.
9. Membuat program FGD Pegawai Laut di tahun. 2019.
10. Pembuatan Sistem Mutasi Perintis *On Progres*.
11. Melaksanakan penandatanganan komitmen kepada BOC dan BOD setiap awal tahun atau pada saat pergantian Direksi.
12. Sosialisasi pelaksanaan pelaporan WBS kepada insan PT PELNI (Persero).
13. Menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan di Lingkungan PT PELNI (Persero).
14. Mengadakan sosialisasi tentang Pelaporan Elektronik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (e-LHKPN) kepada Wajib Lapori di PT PELNI (Persero) setiap 1 Tahun sekali."

The causes of each KRI are as follows:

1. Commitment <2 assessment.
2. Communication <2 assessment.
3. Team work <2 assessment.
4. Performance <2 assessment
5. C&B <2 assessment.
6. T&D <2 assessment.
7. Career planning assessment.
8. W&S relation assessment.

From those the existing KRI can be conducted well, resulting an "Effective" management.

b. Risk Management Planning

1. Conducting enlisted employee ship training on Deceber 4-7, 2018.
2. Making a coach internal PT PELNI (Persero) work program in 2019.
3. Replacement.
4. If related to dicipline so will be given dicipline sanction according to PKB.
5. Employee evaluation based on competency and assessment result at managerial level (first and main).
6. Giving the educational opportunities to develop COC offshore employee certificate.
7. Recruitment plan using *Manage Service* advisor for enlisted candidates in 2019.
8. COC & COP validation data periodically request to ship business unit.
9. Conducting FGD program for employee in 2019.
10. Making Perintis mutation system on progress.
11. Signing a commitment of BOC and BOD in every year or there is a change in the composition of the Board of Director.
12. Socializing the implementation of WBS reporting to PT PELNI (Persero).
13. Issuing the Director's letter of decree regarding State Officials Assets Reporting in environment of PT PELNI (Persero).
14. Socilizing the Electronic Reporting of State Officials Assets to compulsory reporting unit of PT PELNI (Persero) at once in a year.



Manajemen Risiko

Risk Management

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">15. Melaksanakan <i>TownHall Meeting</i> setiap 3 bulan sekali.16. Mengadakan kunjungan oleh BOD ke Cabang, Kapal dan SBU pada saat <i>peak season</i>.17. Melaksanakan Rapat Pimpinan.18. Melaksanakan <i>employee gathering</i>.19. Sosialisasi pelaksanaan pengisian Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) kepada seluruh Pegawai baik Kantor Pusat dan Kantor Cabang.20. Menghimbau kepada Admin PKP untuk melaksanakan PKP sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menilai sesuai dengan kinerja pegawai".21. Mengevaluasi kebijakan pengupahan dan pemberian manfaat kepada Pegawai di Lingkungan PT PELNI (Persero) secara berkala.22. Memberikan pengupahan dan manfaat kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.23. Merancang pengupahan sesuai dengan pencapaian kinerja pegawai.24. Melakukan <i>Training Need Analysis</i> (TNA) secara efektif dengan persetujuan Direktur SDM & Umum.25. Melakukan evaluasi <i>training</i> (Level 1 s/d 3).26. Menerapkan budaya <i>coaching</i>.27. Menggunakan metode <i>e-learning</i>.28. Merencanakan pegawai yg dalam evaluasinya masih <2 untuk mengikuti pelatihan yg sesuai dengan kompetensinya.29. Melaksanakan <i>briefing</i> level Divisi setiap hari sebelum melaksanakan rutinitas pekerjaan.30. Memberikan <i>coaching</i> kepada Pegawai.31. Melaksanakan rapat antar Divisi dalam 1 Direktorat setiap minggu". <p>Rencana penanganan risiko pada triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengevaluasi hasil <i>Workshop</i> pembahasan Struktur Organisasi & Tupoksi bersama unit kerja & Membuat SK Struktur Organisasi dan Tupoksi (Kantor Pusat dan Cabang).2. Identifikasi Proses Bisnis PT PELNI (Persero) sampai dengan level 5. | <ol style="list-style-type: none">15. Performing TownHall Meeting in every 3 month.16. Visiting the branches and strategic business unit by BOD in peak season.17. Conducting Executive Meeting.18. Employee gathering.19. Socializing the implementation of the employee performance assessment for all employee either in Head office and Branches.20. Appealing the employee performance assessment administrator to implement the employee performance assessment in accordance with the determined schedule and to assess the employee performance.21. Evaluating periodically the payroll and benefit policy to employee in environment of PT PELNI (Persero).22. Giving the payroll and benefit to employee based on laws provision23. Formulating the salary based on work performance.24. An effective Training Need Analysis with an agreement from Director of Human Resources and Affair.25. Training evaluation (Level 1 up to 3).26. Coaching culture implementation.27. Using e-learning method.28. Planning the under 2 years of employee tenure to engage suitable training competency.29. Division level daily briefing before conducting routine activities.30. Coaching to employee.31. Conducting the accros division meeting of 1 directorate in every week. <p>Risk Management Planning on Third Quarter:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Evaluating the workshop discussion result relating Organizational structure and Duties responsibility with work unit and making letter of decree on organizational structure and duties responsibility (Head office and Branches).2. Identifying business process of PT PELNI (Persero) until 5 Level. |
|--|---|



Manajemen Risiko Risk Management

3. Memetakan proses bisnis kepada jabatan yang bertanggung jawab, untuk seluruh jabatan.
4. Membuat kelompok jabatan untuk menentukan kompetensi teknis atau pola karir pegawai.
5. Mengevaluasi jabatan untuk seluruh jabatan dan melakukan Penyesuaian *Draft Job Profile* Unit Kerja Kantor Pusat & Cabang.
6. Me-review kriteria *top talent* yang saat ini berlaku di SK Pola Karir Pegawai.
7. Melakukan integrasi Penilaian Kinerja dengan remuneration dan migrasi remunerasi ke sistem remunerasi baru.
8. Melakukan Perhitungan Indeks Kesehatan Budaya Perusahaan bekerja sama dengan Pihak ke 3.
9. Pengesahan *Knowledge Management System* (SOP Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan) & Pengesahan Proses Bisnis Manajemen SDM.
3. Mapping the business process to responsible officials for all level position.
4. Grouping the level position to determine technical competency or employee career scheme.
5. Evaluating the position to all position and adjusting job profile draft in head office and branches.
6. Reviewing the applicable top talent criteria in letter of determination regarding employee career scheme.
7. Integrating work performance with remuneration and its migration to a new remuneration system.
8. Assessing corporate culture healthy with relevant third party.
9. Ratification of Knowledge Management System (SOP for the implementation of educational and training) & Human Resources Business Management Process.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

1. Sirkulir dan Sosialisasi SK Direksi tentang Struktur Organisasi & Tupoksi (Kantor Pusat & Cabang).
2. Memetakan proses bisnis kepada jabatan yang bertanggung jawab, untuk seluruh jabatan.
3. Melakukan *monitoring* kepada agen perubahan untuk menentukan *action plan* dan hasilnya kepada lingkungan unit kerja masing-masing.
4. Melakukan pelatihan perwira kapal.
5. Pembuatan sistem mutasi dan penggajian untuk kapal perintis.
6. Melaksanakan *briefing* level Divisi setiap hari sebelum melaksanakan rutinitas pekerjaan.
7. Merencanakan pegawai yg dalam evaluasinya masih <2 tahun untuk mengikuti pelatihan yg sesuai dengan kompetensinya.
8. Memberikan pengupahan dan manfaat kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Merancang pengupahan sesuai dengan pencapaian kinerja pegawai.

c. Follow-up Risk Management

1. Socializing the circular letter of director regarding organizational structure and duties responsibility (Head Office and Branches).
2. Mapping the business process to responsible officials for whole level.
3. Monitoring the change agent to take action plan and its results to each work unit environment.
4. Ship officer training.
5. Making a mutation and payroll system for perintis ship.
6. Daily level division briefing before joining to routine duties.
7. Planning the under 2 years of employee tenure to engage suitable training competency.
8. Giving the salary and benefit to the employee pursuant to laws provisions
9. Designing the salary based on employee performance.



Manajemen Risiko

Risk Management

b. Rencana Pengendalian Risiko 2019

1. Membuat kelompok jabatan untuk menentukan kompetensi teknis atau pola karir pegawai.
2. Mengevaluasi jabatan untuk seluruh jabatan dan melakukan Penyesuaian *Draft Job Profile* Unit Kerja Kantor Pusat & Cabang.
3. Me-review kriteria *top talent* yang saat ini berlaku di SK Pola Karir Pegawai.
4. Melakukan integrasi Penilaian Kinerja dengan remuneration dan migrasi remunerasi ke sistem remunerasi baru.
5. Pengesahan *Knowledge Management System* (SOP Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan) & Pengesahan Proses Bisnis Manajemen SDM.
6. Membuat program kerja pembibitan *coach* internal PT PELNI (Persero).
7. Pemberian Kesempatan Pendidikan peningkatan Ijazah COC Pegawai Laut.
8. Rencana Rekrutmen menggunakan *Manage Service* untuk tamtama.
9. Membuat program FGD Pegawai Laut.
10. Mengadakan sosialisasi tentang Pelaporan Elektronik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (e-LHKPN) kepada Wajib Laport di PT PELNI (Persero).
11. Melaksanakan *employee gathering* untuk setiap Direktorat Unit Kerja.
12. Sosialisasi pelaksanaan pengisian Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) kepada seluruh Pegawai baik Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
13. Melakukan *Training Need Analysis* (TNA) secara efektif dengan persetujuan Direktur SDM & Umum.
14. Menggunakan metode e-learning.

b. Risk Management Planning in 2019

1. Grouping the position to determine the competency and employee career scheme.
2. Evaluating the position to all position and adjusting job profile draft in head office and branches
3. Reviewing the applicable top talent criteria in letter of determination regarding employee career scheme.
4. Integrating the work assessment with remuneration and its changes to a new remuneration system.
5. The ratification of Knowledge Management System (SOP for the implementation of education and training) & Human Resources Business Management Process.
6. Making a coach internal PT PELNI (Persero) development program.
7. Giving the educational opportunities to develop COC offshore employee certificate.
8. Recruitment plan using *Manage Service* advisor for enlisted candidates.
9. FGD Program for Offshore employee.
10. Socializing the Electronic Reporting of State Officials Assets to compulsory reporting unit in PT PELNI (Persero).
11. Employee gathering to each of Directorats.
12. Socializing the implementation of employee assessment to whole employee either in head office or branches.
13. An effective Training Need Analysis (TNA) with an agreement from Director of Human Resources and General Affairs.
14. Using e-learning method.



Manajemen Risiko

Risk Management

15. Risiko Kapal Barang & Tol Laut

a. Analisa Profil Risiko

Ada dua sasaran strategis pada risiko kapal barang & tol laut yakni meningkatkan efektifitas perencanaan operasional dan meningkatkan penjualan dan layanan angkutan barang. Kedua sasaran tersebut dimiliki oleh dua divisi, pertama Divisi Pemasaran Kapal Barang & Tol Laut, kedua Divisi Operasi & Pelayanan Kapal Barang & Tol Laut. Selanjutnya kita akan uraikan sasaran strategis yang pertama. Pada sasaran meningkatkan efektifitas perencanaan operasional untuk kapal barang & tol laut, dimana jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan peristiwa berisiko yakni, Pelayanan Operasional Kapal Non Tol Laut tidak optimal serta akan berdampak pada penurunan penghasilan kapal non tol laut. Kemungkinannya masih dalam kategori sedang dengan skor 16 (kuning), penyebab risikonya belum adanya SOP operasional kapal non tol laut, KRI yang sesuai adalah tersedianya SOP operasional kapal non tol laut, hasilnya masih "ineffective".

Untuk sasaran meningkatkan penjualan dan layanan angkutan barang, peristiwa berisiko terdapat tiga peristiwa, pertama *booking space* kapal tidak fleksibel (H-7). Kedua rendahnya pertumbuhan *shipper* baru, ketiga *return cargo* rendah, ketiga hal tersebut akan berdampak pada penurunan penghasilan dan pendapatan tidak tercapai. Tingkat risiko dari ketiga peristiwa tersebut tergolong tinggi (merah) hal tersebut harus di laporkan ke tingkatan Direksi agar mendapat tindak lanjut penanganan yang tepat. Penyebab risiko masing-masing diatas disebabkan atas ketidakpastian dan ketidakhandalan armada/kapal, aktivitas *canvassing* kurang agresif dan penjualan *return cargo* kurang agresif. KRI-nya adalah:

1. Penerbitan Empleo (-90 hari).
2. Jumlah *Shipper* baru.
3. Load factor *return cargo* tiap 3 bulan.

Dari ketiga KRI yang ada masing-masing menunjukkan hasil "Ineffective".

15. Risks of Cargo and Tol laut Ships

a. Risk Profile Analysis

There are two strategic objectives for Freight and Tol Laut ship risks, among others: increasing operational planning effectiveness and expanding freight sales and service. Those two objectives originate from 2 division namely Freight and Tol Laut Ship Marketing Division and Freight and Tol Laut Operational and Service Division. Furthermore, we describe the first strategic objective, is to increase operational planning effectiveness for cargo and tollaut ships, if we do not handle it properly that will cause risky events, namely non optimum operational service of Non - Tol Laut will affect on decreasing Non-Tol Laut income. The possibilities are still in the moderate category with a score of 16 (yellow), the causes of this risk is not having operational SOP yet regarding Non - Tol Laut ships. The suitable KRI is the availability of operational SOP for Non - Tol Laut ship and still resulting "ineffective".

To increase freight sales and services objectives, there are three risky events. Firstly, is inflexible space ship booking (-7 from D days). Secondly, is the low growth of new shipper, and the last is the low cargo return. These three events will impact on the decrease of income and earning was not gained. The risk level of these risks is classified at high level (red), and must be reported to the Board of Directors to mitigate with an appropriate follow-up handling. The causes of these risks are due to the fleet uncertainty and unreliability, unaggressive canvassing activities and passive sales of cargo return. So, the obtained KRI is as follows:

1. The issuance of Empleo (-90 days).
2. New Shippers.
3. Load factor return cargo in every 3 months.

From those KRIs above, respectively resulted "Ineffective".



Manajemen Risiko

Risk Management

b. Rencana Pengendalian Risiko

Untuk pengendalian risiko pada sasaran strategis "Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Operasional" yakni menyusun SOP selesai Bulan Februari 2019. Sedangkan untuk penangan risiko pada sasaran strategis "Meningkatkan Penjualan dan Layanan Angkutan Barang" adalah:

1. Koordinasi lintas Divisi SDM dan Armada.
2. Evaluasi ABK terhadap penggunaan alat produksi).
3. Diklat ABK (Etos kerja sebagai ABK kapal barang bukan kapal penumpang, penggunaan alat produksi secara tepat).
4. *Shipper* dan *Forwarder* Ekshibisi.
5. Kerjasama dengan ALFI/ILFA.
6. Usulan *Discount tarif return cargo* ke Kemenhub.
7. Kerjasama dengan Pemda/BUMD.

c. Tindak Lanjut Penanganan Risiko

1. Pembahasan Internal Divisi Operasi dan Pelayanan Kapal Tol Laut & Ternak Penyusunan SOP Operasional Kapal Non Tol Laut.
2. Persiapan (Kerangka kerja).
3. Sudah dilaksanakan pada tanggal 12 - 14 September 2018.
4. Kontrak *charter* KM. LogNus 5 dengan PT Samudera Indonesia Group, Dalam proses lelang dengan Semen Indonesia, Penjajakan kerjasama dengan PT PN Holding.
5. Dalam pencarian armada untuk pengangkutan batubara.
6. Dalam tahap pendataan komponen biaya untuk penentuan tarif komersial (Koordinasi dengan Divisi Armada & SDM).

b. Risk Management Planning

To mitigate risk in accordance with "increasing Operational Planning Effectiveness" of strategic objective is to prepare SOP completion on February 2019 consisting of:

1. Coordination between Human Resources division and Fleet division.
2. Evaluating crews for the uses of production tools.
3. Crews training (code of ethic as freight crews not for passenger ship, the precisely uses of production tools).
4. Shipper and Forwarder exhibition.
5. Cooperation with ALFI/ILFA.
6. The proposal of discount cargo tariff return in Ministry of Transportation.
7. Cooperation with local government and regional-owned enterprises.

c. Follow-up Risk Management

1. Internal discussion of Tol Laut and cattle ship operation and service division.
2. Preparation (Framework).
3. Have been conducted on September 12-14, 2018.
4. MV. LogNus 5 charter contract with PT Samudera Indonesia Group, in auction process with Semen Indonesia, and cooperation with Holding PT PN.
5. Finding a fleet for coal transport.
6. Collecting cost component data stage to determine commercial tariff (Coordinating with fleet and human resources division).



Manajemen Risiko

Risk Management

EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO 2018

Sesuai dengan *frame work* ISO 31000, pengelolaan risiko-risiko di Perusahaan dengan berdasarkan kertas kerja *risk register* yang telah disusun, konsistensi dalam melaksanakan tindak lanjut merupakan poin penting untuk menangani risiko yang ada.

Namun yang menjadi fokus utama adalah progress tindak lanjut dari mitigasi risiko yang ada pada masing-masing divisi dan kewenangan *monitoring* adalah keterbatasan unit manajemen risiko dalam penyelesaian mitigasi risiko di tiap-tiap divisi.

Pada triwulan I 2018 unit manajemen risiko merubah *risk register* semula mengacu pada sasaran divisi menjadi sasaran tiap-tiap departemen dalam divisi terkait, hal itu kami maksudkan agar risiko tiap departemen dapat terpetakan dan dapat dimitigasi oleh masing-masing departemen sekaligus sebagai ajang sosialisasi manajemen risiko perusahaan sampai pada triwulan III 2018 masih digunakan *risk register* yang sama.

Pada triwulan IV 2018 ini mulai dikenalkan integrasi BSC/KPI dengan KRI hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi ERM (*Enterprise Risk Mangement*) agar fokus pada capaian sasaran strategis korporat dan berharap *risk register* yang pernah ada (Triwulan I-III 2018) digunakan masing-masing departemen untuk memitigasi risiko-risiko yang muncul yang mengganggu capaian sasaran departemen maupun divisi.

Sepanjang tahun 2018 ini, melalui pengelolaan seluruh risiko yang ada pada 15 risiko utama *gross risk* perusahaan sebesar Rp24.5 Triliun dapat diturunkan atau berhasil dihilangkan risiko sebesar Rp4.5 Triliun, sehingga residual risk perusahaan atau risiko perusahaan menjadi sebesar Rp20 Triliun.

RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN 2018

Pursuant to ISO 31000 Framework, we manage risk in the Company based on the prepared risk register guidelines, which is consistency in conducting "follow up" as an important point to handle the existing risk.

However, our main focus is following up the progress of the existing risk mitigation in each division and monitoring authority is risk management unit limitation for completing the risk mitigation in each division.

In the first quarter of 2018, risk management unit change risk register of which before referring to division objective becomes each department objective in relevant division, we hope that each department risk could be mapped and mitigated by each relevant department and also as a risk management socialization of the Company. Until the third quarter of 2018 still used same risk register.

In the forth quarter of 2018, we introduced integrating BSC/KPI with KRI, this conducted to re-use ERM (*enterprise risk management*) function so we focus on achieving Corporate Strategic Objectives and we hope that the existing risk register (I-III Quarter of 2018) used by each department to mitigate the risks emerges which disrupts the achievement of each department or division.

Through all risks management throughout 2018 regarding the company's 15 main gross risk amounted to Rp24.5 Trillion could be reduced or successfully eliminated the risk of Rp4.5 Trillion, so that the company's residual risk or company risk becomed Rp20 Trillion.



Etika Bisnis

Business Ethics

PEDOMAN PERILAKU

Perseroan menyusun Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan. Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh Insan PELNI di seluruh tingkat organisasi. Pedoman Perilaku PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 12.29/01/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

ISI PEDOMAN PERILAKU

Perseroan dengan konsisten mengaitkan *Code of Conduct* dengan nilai-nilai utama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

I. Pendahuluan

II. Pedoman Etika Usaha

A. Standar Hubungan dengan Stakeholders

1. Hubungan dengan Pemegang Saham.
2. Hubungan dengan Karyawan.
3. Hubungan dengan Pelanggan.
4. Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa.
5. Hubungan dengan Mitra Kerja.
6. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan.
7. Hubungan dengan Kreditor.
8. Hubungan dengan Pemerintah.
9. Hubungan dengan *Principal* Kapal Keagenan.
10. Hubungan dengan Media Massa.
11. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-Undangan.
12. Persaingan Usaha.

B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan

1. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan.
2. Penggunaan Aset Perusahaan.
3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan.
4. Pengelolaan Anak Perusahaan.

III. Pedoman Etika Kerja:

A. Nilai-Nilai Luhur Perusahaan

B. Menjaga Citra Perusahaan

C. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan

1. Integritas.
2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kerahasiaan Informasi.
4. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi
5. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan.

CODE OF CONDUCTS

The Company formulates Code of Conducts as reference of conducts for the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees. The Code of Conducts prevails for all PELNI People at all organization level. PT PELNI (Persero) Code of Conducts has been updated and validated under Board of Directors Decree No. 12.29/01/SK/HKO.01/2016 regarding Code of Conducts in PT PELNI (Persero) circumstances.

CONTENTS OF CODE OF CONDUCTS

The Company consistently linked the Code of Conducts with core values, as follows:

I. Introduction

II. Business Ethics Guidelines

A. Standard of Relationship with Stakeholders

1. Relationship with the Shareholders.
2. Relationship with the Employees.
3. Relationship with the Customers.
4. Relationship with the Suppliers and Vendors.
5. Relationship with the Business Partners.
6. Relationship with the Society and Environment.
7. Relationship with the Creditors.
8. Relationship with the Government.
9. Relationship with the Agency Ship Principal.
10. Relationship with the Mass Media.
11. Compliance with the Law.
12. Business Competition.

B. Ethical Standard in Company Management

1. Accounting and Finance Policy.
2. Corporate Assets Use.
3. Occupational Health, Safety and Environment.
4. Subsidiary Management.

III. Work Ethics Guideline:

A. Noble Values

B. Maintain Corporate Image

C. Responsibility to the Company

1. Integrity.
2. Compliance with the Law.
3. Information Confidentiality.
4. Data Recording, Report and Documentation.
5. Corporate Assets Protection and Use.



Etika Bisnis Business Ethics

6. Penggunaan Komunikasi Elektronik
7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Masyarakat
8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol.
9. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik.

6. Electronic Communication Use
7. Occupational Health, Safety, Environment and Society
8. Abuse of Drugs and Liquor
9. Involvement in Political Activity

D. Benturan Kepentingan

1. Menghindari Benturan Kepentingan.
2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan.
3. Kegiatan di Luar Perusahaan.
4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan teman
5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis/Hiburan dan lainnya.

D. Conflict of Interest

1. Avoiding Conflict of Interest.
2. Employee Personal Investment and Shares Ownership.
3. External Activity.
4. Treatment to Family and Friend.
5. Gratification, Reward, Business Reception/ Entertainment and Others.

E. Hubungan Kerja.

1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan.
2. Kerjasama Atasan dan Bawahan.

E. Working Relation.

1. Working Environment that is Free from Discrimination, Abuse, Dishonor Attitude and Abuse.
2. Coordination Between Superiors and Subordinates.

F. Hubungan Dengan Konsumen

1. Pelayanan Kepada Konsumen.
2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif.

F. Relationship with Customers

1. Customer Service.
2. Fair and Non-Discriminative.

G. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis

G. Treatment to Business Partner

H. Perlakuan Terhadap Pesaing

H. Treatment to Competitors

I. Hubungan Dengan Pemerintah

I. Relationship with The Government

1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan/Peraturan Terkait.
2. Pola Hubungan dan Komunikasi.

1. Legal Compliance.

J. Hubungan Dengan Masyarakat

J. Relationship with The Society

1. Pelayanan Masyarakat.
2. Pemberian Donasi.
3. Kesadaran akan Lingkungan Alam.

1. Community Service.
2. Donation.
3. Environmental Care.

IV. Penerapan Pedoman Perilaku, mencakup:

- A. Sosialisasi Pedoman Perilaku.
- B. Pernyataan Kepatuhan INSAN PT PELNI (Persero)
- C. Saluran Pengaduan Masalah.
- D. Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku.

IV. Code of Conducts Implementation, including:

- A. Code of Conducts Socialization
- B. PT PELNI (Persero) Individual Integrity Statement
- C. Complaint Channel
- D. Punishment to Code of Conducts Violation.

PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Implementasi *Code of Conduct* dilaksanakan oleh seluruh Insan PELNI. Untuk itu, Perseroan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi untuk memastikan *Code of Conduct* diketahui dan dijalankan oleh seluruh Insan Perusahaan. Pedoman GCG dan *Code of Conduct* telah di-

APPLICATION AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

Implementation of Code of Conduct implemented by all PELNI People. Therefore, the Company conducts socialization and internalization to ensure that the Code of Conduct is acknowledged and implemented by all Company People. The Code of GCG and Code of Conduct have been



Etika Bisnis

Business Ethics

upload pada *website* PT PELNI (Persero) www.pelni.co.id dan dapat diunduh secara langsung. Seluruh Insan PELNI diharuskan untuk membaca dan memahami dengan baik Pedoman Perilaku Perusahaan serta wajib secara berkala setiap tahunnya untuk menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen atas kepatuhan tersebut.

Bagi setiap Insan Perseroan yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar *Code of Conduct* harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Perseroan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan untuk menegakkan *Code of Conduct* Perseroan. Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah.

SOSIALISASI CODE OF CONDUCT

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Perseroan, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PELNI yang berperilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai yaitu antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas yang memuat komitmen pelaksanaan Pedoman Perilaku.

Dalam ketentuan Bab IV mengenai sosialisasi *Code of Conduct*, disebutkan bahwa seluruh Insan PELNI harus membaca dan memahami dengan baik isi Buku Pedoman dan bertanggungjawab untuk menaatinya. Direktorat SDM dan Umum berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan PELNI dengan menyampaikan daftar baca. Setiap Insan PELNI dapat meminta penjelasan dari atasan langsung apabila kurang memahami kebijakan Pedoman Perilaku.

uploaded on the PT PELNI (Persero) website www.pelni.co.id and can be downloaded directly. All PELNI People are required to read and understand the Code of Conduct properly and to annually sign the Compliance Statement of Compliance as manifestation of their compliance.

For any Company People who acknowledge a situation that is believed to have the potential to violate the Code of Conduct must immediately report to the superior or higher leadership in writing by including the identity of the reporter on the basis of full and accountable evidences and does not contain libel and personal interests. The Company will protect the confidentiality of any PELNI Insan who has reported the violation and will follow up immediately unless the report is incorrect and the complainant may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. Sanctions administration on the violation against the Code of Conduct is aimed to enforce the Code of Conduct. Any Company People who is proven to have violated the Code of Conduct shall be punished. Sanctions shall be governed by a separate regulation established in accordance with government regulations.

SOCIALIZATION OF THE CODE OF CONDUCT

The Company always disseminates the Code of Conduct considering the socialization as an important step in developing PELNI People who adapt the Corporate Culture in their attitude. The Code of Conduct is communicated and disseminated to the Board of Commissioners and its supporting structures, the Board of Directors and the one-level executives under the Board of Directors and all employees, among others through the signing of the Integrity Pact which contains the commitment of the implementation of Code of Conducts.

In the provisions of Chapter IV on the socialization of the Code of Conduct, the provisions mentioned that all Insan PELNI must read and understand well the contents of the Manual and be responsible for obeying it. The Directorate of Human Resources and General Affairs is obliged to socialize the Code of Conduct to all PELNI People by submitting the reading list. Each PELNI People may request an explanation from the immediate supervisor if he/she is not familiar with the Code of Conduct policy.



Etika Bisnis Business Ethics

KEBIJAKAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Seluruh insan PELNI wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen untuk memenuhi Pedoman Perilaku. Pedoman Penandatanganan Surat Kepatuhan Pedoman perilaku dilakukan secara berkala setiap tahun. Direktorat SDM dan Umum mendokumentasikan Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Perilaku Perseroan.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dijabarkan dalam Bab IV, yaitu dilakukan untuk menegakkan Pedoman Perilaku Perseroan. Setiap Insan PELNI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai Peraturan Perseroan.

Setiap insan PELNI yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman Perilaku harus segera melaporkan kepada atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi.

Perseroan akan melindungi kerahasiaan setiap insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku.

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ETIKA PERUSAHAAN

Evaluasi terhadap penerapan Pedoman Perilaku dilakukan secara berkala kepada Insan PELNI. Berdasarkan Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan rasa kepemilikan dari setiap Insan PELNI serta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan secara konsisten. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Perilaku akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan.

JUMLAH PELANGGARAN ETIKA PERUSAHAAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran etika Perusahaan dan tidak ada sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika Perusahaan.

DISCIPLINE ENFORCEMENT AND VIOLATION POLICY

All of PELNI People are required to sign the Statement of Compliance as a form of commitment to meet the Code of Conduct. Guidance on Signing of Compliance Guidelines Behavioral guidelines are conducted periodically every year. The Directorate of Human Resources and the General documents the Compliance Statement as an integral part of the Company's Code of Conduct.

Punishment for any violations against the Code of Conduct are outlined in Chapter IV, which is to enforce the Company's Code of Conduct. Any PELNI People who are proven violating the Code of Conduct will be punished. The granting of sanctions shall be governed by a separate regulation stipulated by the Company's Regulations.

Every PELNI People who acknowledge any situation that is believed to have the potential of violation against the Code of Conduct shall promptly report to a superior superior or a higher lead in writing by including the identity of the complainant on the basis of complete and accountable evidence and not containing any slander and personal interests.

The Company will protect the confidentiality of any PELNI People who has reported the violation and will follow-up immediately, unless the report is incorrect and the complainant may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. Throughout 2018 there is no violation of the Code of Conduct.

EVALUATION ON EFFECTIVENESS OF CODE OF CONDUCTS IMPLEMENTATION

Evaluation of the implementation of the Code of Conduct is done periodically to the PELNI People. Based on this evaluation is expected to encourage and increase the sense of ownership of every PELNI people and is expected to improve the competence and ability of employees consistently. As a dynamic guideline, the Code of Conducts is reviewed periodically and continuously.

TOTAL OF THE COMPANY VIOLENCE ETHIC 2018

In 2018, there is no the Company violence ethic and no sanction which given for the Company violence ethic.



Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan

Litigation Involving The Company

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Per 31 Desember 2018, Perseroan mencatat beberapa perkara penting yang melibatkan Perseroan, antara lain:

LITIGATION INVOLVING THE COMPANY

As of December 31, 2018, the Company recorded some cases involving the Company, as follows:

No	Pokok Perkara Case of Lawsuit	Status Penyelesaian Accomplishment Status	Sanksi Administrasi Administrative Sanctions
1	Eksekusi Aset Milik PT PELNI (Persero) yang ada di Semarang. PT PELNI (Persero) asset execution in Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Eksekusi telah dijalankan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana Berita Acara. Execution was officially carried out by the Semarang District Court based on the Minutes. Eksekusi Pengosongan tanggal 19 April 2018 sehingga saat ini PT. PELNI (Persero) telah memiliki legal standing untuk menempati obyek dimaksud. Disbursement Execution on April 19, 2018. PT. PELNI (Persero) has a legal standing to occupy the intended object. Kasus Selesai. Case closed. 	Tidak Ada None
2	Pendampingan Hukum Perkara Aset PT PELNI (Persero) di Semarang tingkat Peninjauan Kembali (MA). Assistance in the Law of Asset Case of PT. PELNI (Persero) in Semarang in the level of Judicial Review (MA).	<ul style="list-style-type: none"> PT PELNI (Persero) telah menerima Putusan Nomor : 372 PK/Pdt/2018 pada tanggal 28 Juni 2018 dan PT. PELNI (Persero) menang dalam perkara ini. PT PELNI (Persero) has received Decision Number: 372 PK / Pdt / 2018 on 28 June 2018 and PT. PELNI (Persero) won this case. Kasus Selesai. Case closed. 	Tidak Ada None
3	Pendampingan Hukum Perkara Aset PT PELNI (Persero) di Semarang tingkat Pertama. Assistance in the Law of Asset Case of PT. PELNI (Persero) in Semarang in the level of submitting.	<ul style="list-style-type: none"> PT PELNI (Persero) telah menerima Telah terbit Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Smg pada tanggal 04 September 2018 PT. PELNI (Persero) has received a Decision Number: 22 / Pdt.G / 2018 / PN.Smg on September 4, 2018 Kasus Selesai. Case closed. 	Tidak Ada None
4	Pendampingan Hukum Perkara Aset PT PELNI (Persero) di Makassar tingkat Kasasi. Assistance in the Law of Asset Case of PT. PELNI (Persero) in Makassar in the level of cassation.	<ul style="list-style-type: none"> Masih proses, dimana PT PELNI (Persero) belum mendapat Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. On progress, and PT. PELNI (Persero) has not received a decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia 	Tidak Ada None
5	Dugaan Pidana atas Aset Kemayoran. Criminal Allegation of Kemayoran Assets.	<ul style="list-style-type: none"> Sedang berjalan proses penyelidikan yang telah disampaikan oleh Pihak Kepolisian melalui SP2HP. The investigation process has been submitted by the Police through SP2HP which is underway. 	N/A
6	Dugaan Pidana atas Aset Makassar. Criminal Allegation of Makassar Assets.	<ul style="list-style-type: none"> Sedang berjalan proses penyelidikan yang telah disampaikan oleh Pihak Kepolisian melalui SP2HP. The investigation process has been submitted by the Police through SP2HP which is underway 	N/A

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2018

Selama periode tahun 2018, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2018

Selama periode tahun 2018, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi baik yang dikenakan kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi baik oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, Bursa Efek Indonesia maupun otoritas lainnya yang terkait dengan Perseroan.

LAW CASE INVOLVING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2018

Throughout 2018 period, there was no serving member of Board of Directors and Board of Commissioners who were involved in law case either civil or criminal cases.

ADMINISTRATIVE SANCTION 2018

Throughout 2018 period, the Company did not charge by any administrative sanction either to the Company, Board of Commissioners or Board of Directors members by Ministry of SOE as Shareholder, Indonesia Stock Exchange or other authorities related with the Company.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Corporate Data and Information Access

PT PELNI (Persero) secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perseroan kepada para *stakeholders* agar mengetahui kondisi Perseroan secara jelas dan terbuka. PT PELNI (Persero) memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, di antaranya sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) regularly updates information and provides easy access to information regarding the Company's activities and performance to stakeholders in order to know the Company's condition clearly and openly. PT PELNI (Persero) has various facilities that serve as a channel of information disclosure, among them as follows:

Media Media	Keterangan Description
Email : info.corporate@pelni.co.id infopelni162@pelni.co.id	Email info.corporate@pelni.co.id dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan (contoh Surat Keputusan Direksi) kepada seluruh pegawai. Email infopelni162@pelni.co.id dimanfaatkan untuk penyampaian keluhan pelanggan. Email info.corporate@pelni.co.id be used to disseminate information about the policy (eg Decree of the Board) to all employees. Email infopelni162@pelni.co.id be used for the delivery of customer comp
Website: www.pelni.co.id	Biro Teknologi dan Informasi bertindak sebagai admin, dengan penyuplai konten dari tiap divisi yang berkepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk konten Berita & Informasi. Technology and Information Bureau acts as admin, with suppliers of content from each division concerned. The Corporate Secretary is responsible for the content of News & Information.
Portal BUMN SOE's Portal	Website yang dikelola Kementerian BUMN yang menyediakan laman untuk tiap-tiap BUMN. Diperbaharui setiap kali Perseroan memiliki informasi yang layak diketahui oleh publik. Website is managed by the Ministry of SOEs that provides a page for each SOE. Updated whenever the Company has adequate information known to the public.
Media Internal Internal Media	Majalah Camar dengan 62 halaman diterbitkan secara berkala. Memuat informasi tentang peristiwa Perseroan yang disebarkan ke kantor pusat, cabang dan kapal. Camar magazine with 62 pages is published periodically. Contains information about events which are propagated to the company's head office, branches and boats.

PT PELNI (Persero) juga menyediakan akses informasi lain bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi relevan mengenai berita dan kinerja Perseroan, melalui media, sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) also provides other information access for the Shareholders and Stakeholders to gain relevant information about the Company's news and performance through media, as follows:

- Call Center : 162 / 021 162
- e-Mail : infopelni162@pelni.co.id
- Website : www.pelni.co.id
- SMS Masking : Pelni162
- Facebook : Pelayaran Nasional Indonesia
- Twitter : @Pelni162
- Instagram : Pelniline

- Call Center : 162 / 021 162
- e-Mail : infopelni162@pelni.co.id
- Website : www.pelni.co.id
- SMS Masking : Pelni162
- Facebook : Pelayaran Nasional Indonesia
- Twitter : @Pelni162
- Instagram : Pelniline



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blowing System

Whistle Blowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan PT PELNI (Persero).

Landasan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT PELNI (Persero) merujuk pada SK Pedoman WBS No 12.29/04/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT PELNI (Persero). Merujuk pada pedoman tersebut, implementasi WBS di PT PELNI (Persero) bertujuan untuk membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) agar berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terdeteksi secara dini (*early warning system*) dan dapat mengurangi/meminimalisir risiko yang dihadapi oleh Perseroan akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi yang berdampak pada pengurangan biaya (*cost reduction*) dalam mengelola akibat dari terjadinya suatu pelanggaran.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui *e-mail* perusahaan: wbs@pelni.co.id
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantara langsung atau melalui pos ke alamat:
Direksi PT PELNI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran
Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

Untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui *e-mail* perusahaan: wbs@pelni.co.id
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantara langsung atau melalui pos ke alamat:
Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran
Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

The Whistleblowing System is a system for processing complaints / deliveries submitted directly or indirectly in connection with actions against the law, regulations / standards, codes of ethics and policies, and other similar actions in the form of direct threats to the public interest, and Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) that occurred in the environment of PT PELNI (Persero).

Policy Basis for Violation Reporting System at PT PELNI (Persero) refers to WBS Decree No 12.29/04/SK/HKO.01/2016 on PT PELNI (Persero) Guideline for Whistle Blowing Management. Referring to these guidelines, WBS implementation at PT PELNI (Persero) aims to build, implement and manage a Reporting System of Violations (WBS) so that various issues within the Company that are not in accordance with prevailing ethical standards and laws and regulations can be detected early (Early warning system and can reduce/minimize risks faced by the Company due to financial, operational, legal, safety and reputation violations that result in cost reduction in managing the consequences of a violation.

SUBMISSION VIOLATION REPORT

Complaints of violation indication report by employees are made in writing with the following mechanism:

- Through company e-mail: wbs@pelni.co.id
- Delivering an official letter addressed to the Board of Directors by direct or by post to:

Direksi PT PELNI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran
Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

For report of violation committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners and Head of Work Unit of the Board of Directors Supporting Organ shall be done in writing with the following mechanism:

- Through company e-mail: wbs@pelni.co.id
- Delivering an official letter addressed to the Board of Directors by direct or by send mailing letter to:

PT PELNI (Persero) Board of Commissioners u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran
Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130



Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System

Beberapa ketentuan terkait penyampaian laporan pengaduan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pengaduan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi oleh fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
2. Pengaduan pelanggaran tanpa identitas sebaiknya dilengkapi oleh bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
3. Perseroan wajib memberikan tanda terima jika pengaduan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
4. Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *Stakeholders* maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu fotokopi identitas *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders*, surat kuasa.
5. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan pelanggaran kepada *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* yang mengajukan pengaduan.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan Perlindungan Pelapor mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Melindungi Pelapor.
2. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Perlindungan pelapor meliputi:
 - Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, e-mail) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
 - Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
 - Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari telapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakuan merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.

Several provisions related to the submission of complaint violation report are as follows:

1. Complaints submitted via written violations should attach a photocopy of identity and supporting evidence such as documents relating to transactions conducted and/or allegations of report submitted.
2. Complaints of an unlawful report should attach by supporting evidence such as documents relating to the transactions conducted and/or allegations of report submitted.
3. The Company shall provide a receipt if the violation report is filed in writing of identity.
4. If a violation report is filed by a Stakeholders representative, other than the above documents shall also be submitted another document that is a photocopy of the Stakeholders identity and/or Stakeholders representative, a power of attorney.
5. The seller shall be required to submit the receipt of the complaint to the Stakeholders and/or Stakeholders representatives who lodged the complaint.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

The Whistleblower Protection Policy covers the following aspects:

1. Protecting the Whistleblower.
2. The protection of the Whistleblower is intended to encourage the courage to report the offense.
3. Protection of the Whistleblower includes:
 - Guaranteed reporting facility facilities (telephone, mail, e-mail) or an independent, free and confidential Ombudsman.
 - Security of confidentiality of the identity of the Whistleblower and the contents of the report. This protection is provided when the Whistleblower provides an identity and information that can be used to contact the Whistleblower.
 - Guarantees protection against retaliation from the reporter or organization. Protection from pressure, from postponement of promotion, dismissal, lawsuit, property, to physical acts and other harmful treatment. This protection is not only for Whistleblower but can also be extended to family members of the reporting party.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System

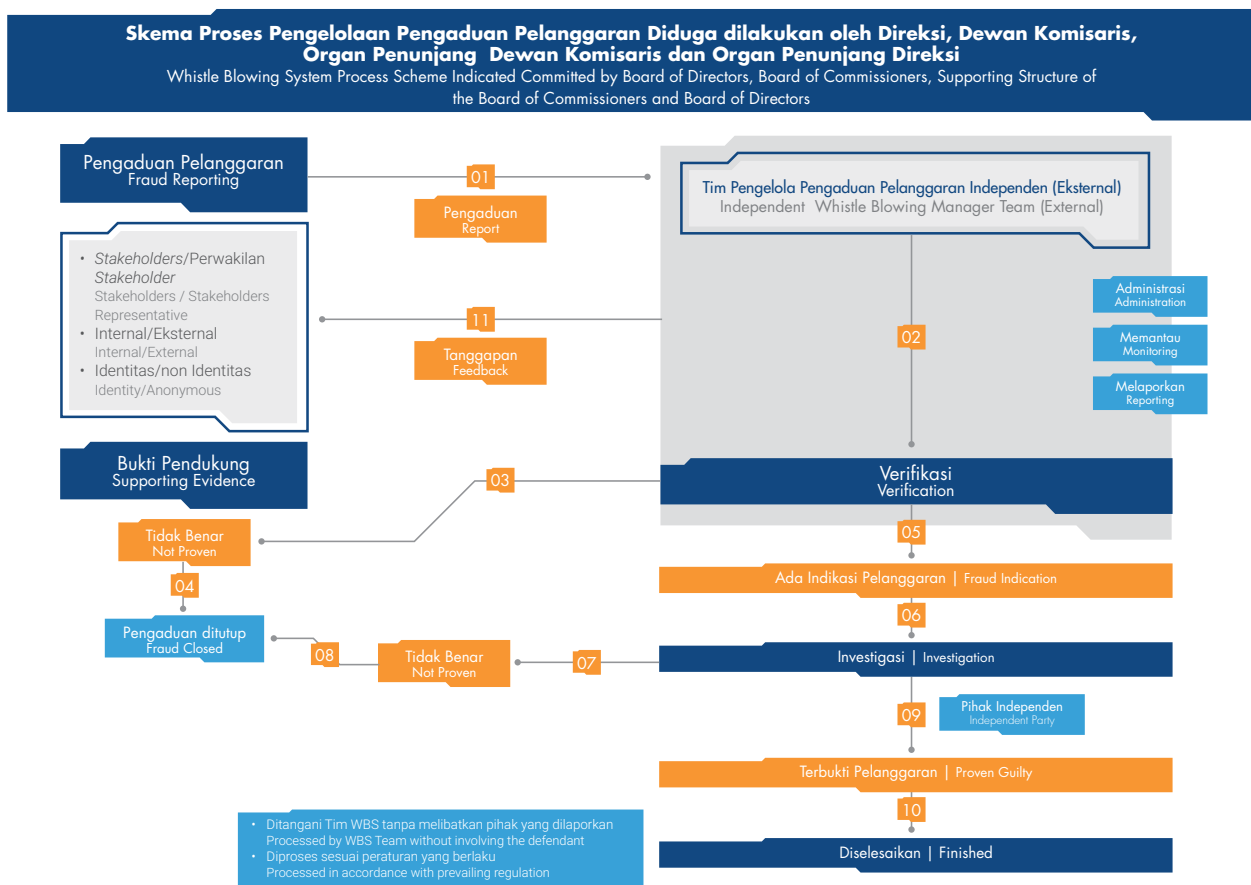
- Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
 - Guarantee of confidentiality of communication/information channels with the Whistleblower. Information on follow-up implementation, in the form of when and how and to the institution where the follow-up is submitted. This information is conveyed confidentially to the complete complainant.
4. Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan dimana penghargaan akan diberikan melalui kebijakan Direksi. Di sisi lain, Perseroan juga menerapkan sanksi bagi pelapor yang menyampaikan laporan palsu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. The above protection is not granted to the Whistleblower who is proven to report false and/or slander. The Company may reward Whistleblower for provable violations so that the assets/finances of the Company can be saved where the award will be granted through the Directors' policies. On the other hand, the Company also applies sanctions to reporters who submit false reports in accordance with applicable laws and the applicable legislation.

PENANGANAN PENGADUAN

Mekanisme penanganan pengaduan di PT PELNI (Persero), sebagai berikut:

REPORT PROCESS

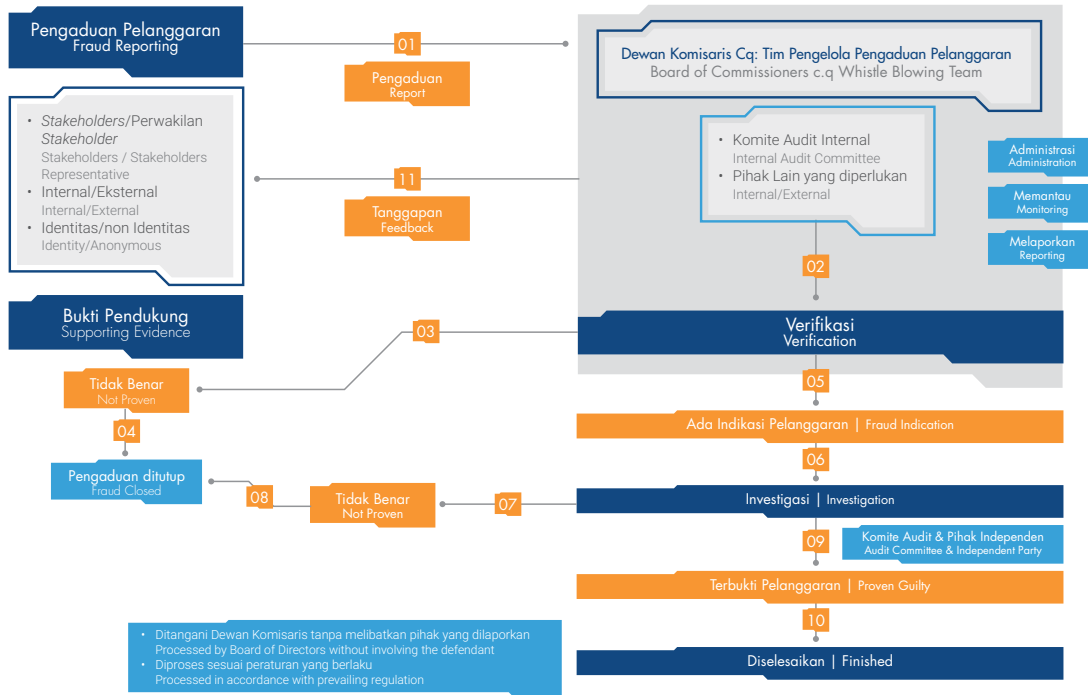
Report handling mechanism at PT PELNI (Persero) is as follows:



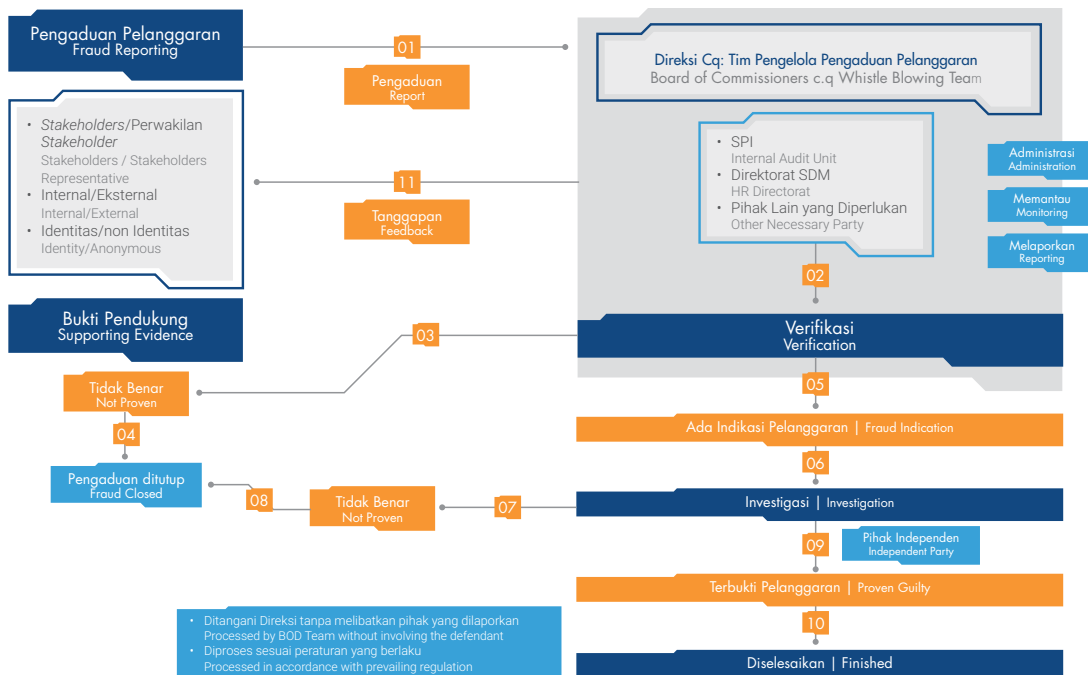


Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System

Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi Whistle Blowing System Process Scheme Indicated Committed by Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors



Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Karyawan PT PELNI (Persero) Whistle Blowing System Process Scheme Indicated Committed by Employee of PT PELNI (Persero)





Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blowing System

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN;

Untuk menangani laporan dugaan pelanggaran, Direksi telah membentuk:

1. Pengelola *Whistle Blowing System* adalah Unit yang melekat pada Struktural Sekretaris Perusahaan. Tugasnya meliputi: Menerima hasil dari laporan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (KP3), menyiapkan laporan berkala dan sosialisasi WBS.
2. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, maka Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (KP3) dan ditetapkan oleh Direksi meliputi unsur yang mewakili Direksi, SPI, Sekretaris Perusahaan, Divisi SDM dan Divisi Hukum.
3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi, dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi unsur Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Per 31 Desember 2018, tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN BUKU

Per 31 Desember 2018, tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan sehingga tidak terdapat sanksi/tindak lanjut atas pengaduan atau laporan yang diterima melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

THE PARTY MANAGING THE COMPLAINT;

To handle the violation report, the Board of Directors has established:

1. Whistle Blowing System Manager is a Unit attached to Structural Corporate Secretary. Duty: Receiving results from reports of the Grievance Complaints Management Team (KP3), preparing WBS periodic reports and dissemination.
2. For alleged violations committed by employees, the Board of Directors shall establish a Complaints Grievance Management Team (KP3) and set by the Board of Directors covering elements representing the Board of Directors, SPI, Corporate Secretary, Human Resources Division and Legal Division.
3. For alleged violations committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Directors, established and determined by the Board of Commissioners comprising the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Committee.

TOTAL REPORT RECEIVED AND PROCESSED IN RECENT FISCAL YEAR

As of December 31, 2018, there was no report or complaint submitted via Whistle Blowing System

PUNISHMENT/FOLLOW-UP OF COMPLETED REPORT IN THE FISCAL YEAR

As of December 31, 2018 there was no report or complaint submitted through Whistle Blowing System, therefore, there was no punishment/follow-up on the accepted report received via the Whistle Blowing System.



Pengendalian Gratifikasi

Gratification Prevention

Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan tata perilaku dalam hubungan bisnis antara hubungan bisnis dan mitra perusahaan, PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan. PT PELNI (Persero) memiliki pedoman gratifikasi yang diatur dalam SK Direksi Nomor: 12.29/03/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PELNI (Persero) dan SK Direksi Nomor: 12.29/02/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

Kebijakan ini telah mengacu pada Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ini telah dipublikasikan dalam portal internal dan *website* Perusahaan.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Untuk memperkuat pengendalian gratifikasi di dalam Perusahaan, PT PELNI (Persero) telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki kedudukan yang independen dan berada dibawah Sekretaris Perusahaan serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Perusahaan.

Unit Pengendalian Gratifikasi PT PELNI (Persero) memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan pengendalian praktik Gratifikasi di lingkungan Perusahaan;
2. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktek Gratifikasi, baik dari penerimaan laporan Gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi milik Negara;
3. Membuka rekening untuk menampung uang yang diterima dari Gratifikasi yang menjadi kewenangan Perusahaan dalam memutuskan peruntukannya;

In order to increase corporate value and behavior between business relationships and corporate partners, PT PELNI (Persero) is committed to implementing gratification controls to support efforts to eradicate corruption within the company. PT PELNI (Persero) has a gratification guideline stipulated in the Directors Decree Number: 12.29/03/SK/HKO.01/ 016 concerning Guidelines for Gratification Control within PT PELNI (Persero) and Directors Decree Number: 12.29/02/SK/HKO.01/2016 concerning Guidelines for Gratification Control Unit (UPG) in the Environment of PT PELNI (Persero).

This policy has referred to the State Owned Enterprise Regulation Number: PER-05 / MBU / 2014 concerning the Gratification Control Program within the Ministry of State-Owned Enterprises. This Gratification Control Policy has been published on the Company's internal portal and website.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

To strengthen gratification control in the Company, PT PELNI (Persero) has formed a Gratification Control Unit (UPG). The Gratification Control Unit has an independent position and is under the Corporate Secretary and is responsible to the Corporate Secretary.

PT PELNI (Persero) Gratification Control Unit has the following authorities, duties and responsibilities:

1. Prepare the rules relating to the implementation of the Gratification control in the Company;
2. Prepare work equipment and facilities related to the Gratification control, both from receipt of Gratification reports to the sending of Decisions of the Corruption Eradication Commission to recipients and / or reporters as well as retention of received money evidence from Gratification if decided by the Corruption Eradication Commission (KPK) belonging to the State;
3. Open an account to save money from gratuitification which is the authority of the Company for deciding its allocation;



Pengendalian Gratifikasi

Gratification Prevention

4. Mendiseminasikan/mensosialisasikan kebijakan Perusahaan terkait dengan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga, masyarakat pada umumnya dan para *stakeholders*;
 5. Bekerjasama dengan seluruh Direktorat dan Non Direktorat, seluruh cabang dan Kapal agar masing-masing membuat laporan Gratifikasi paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya;
 6. Menerima laporan benda Gratifikasi dari Insan PT PELNI (Persero) yang telah dilengkapi dengan dokumen yang terkait;
 7. Menelaah laporan Gratifikasi dan memberikan rekomendasi atas laporan dimaksud dan hasil dari rekomendasi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 8. Melakukan pemilihan kategori Gratifikasi dan pemrosesan laporan Gratifikasi dalam kedinasan dan bukan Gratifikasi dari Wajib Laport Gratifikasi bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 9. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan pengelolaan dan pengendalian Gratifikasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan SPI;
 10. Melakukan *monitoring* dan evaluasi efektivitas pengelolaan dan pengendaliannya Gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi per triwulan atau sesuai kebutuhan Perusahaan;
 11. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengelolaan dan pengendalian Gratifikasi kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang dapat digunakan sebagai salah satu *management tools* bagi Direksi;
 12. Menindaklanjuti laporan dugaan praktek Gratifikasi yang berasal dari dan/atau bersumber dari WBS, instansi yang berwenang dan/ atau informasi yang diperoleh dari masyarakat;
 13. Menyusun rencana kerja UPG setiap tahunnya;
 14. Membuat laporan perkembangan dan evaluasi kegiatan UPG setiap bulan yang ditunjukkan kepada Direktur SDM & Umum dengan tembusan BOC & Direksi lainnya.
4. Disseminate / socialize Company policies related to Gratification to Third Parties, common community and stakeholders;
 5. Collaborate with all Directorate and Non-Directorate, all branches and Ships to make a report on Gratification at least in 5th date of each month;
 6. Receive Gratification report from PT PELNI (Persero) personnel that equipped with related documents;
 7. Review Gratification report and provide recommendations on the intended report and the recommendations results that reported to the Corruption Eradication Commission;
 8. Select the Gratification category and process the Gratification report in the officially and not Gratification from the Compulsory Report of Gratification with the Corruption Eradication Commission;
 9. Submitt a recapitulation report on the handling of management and control of Gratification no later than the 10th date of each month to the Corruption Eradication Commission with a copy to the Directors, Board of Commissioners and Internal Audit Unit;
 10. Monitor and evaluate the effectiveness of management and control of Gratification with the Corruption Eradication Commission quarterly or according to the needs of the Company;
 11. Provide information and data related to the development of the Gratification management and control system to the Corporate Secretary which can be used as one of the management tools for the Board of Directors;
 12. Follow up on reports of alleged Gratification practices originating from and/or WBS, the authorized agency and / or information obtained from the community;
 13. Prepare UPG work plan in each year;
 14. Make reports on the progress and evaluation of UPG activities in every month that shown to the Director of HR & General Affairs with copies to the BOC & other Directors.



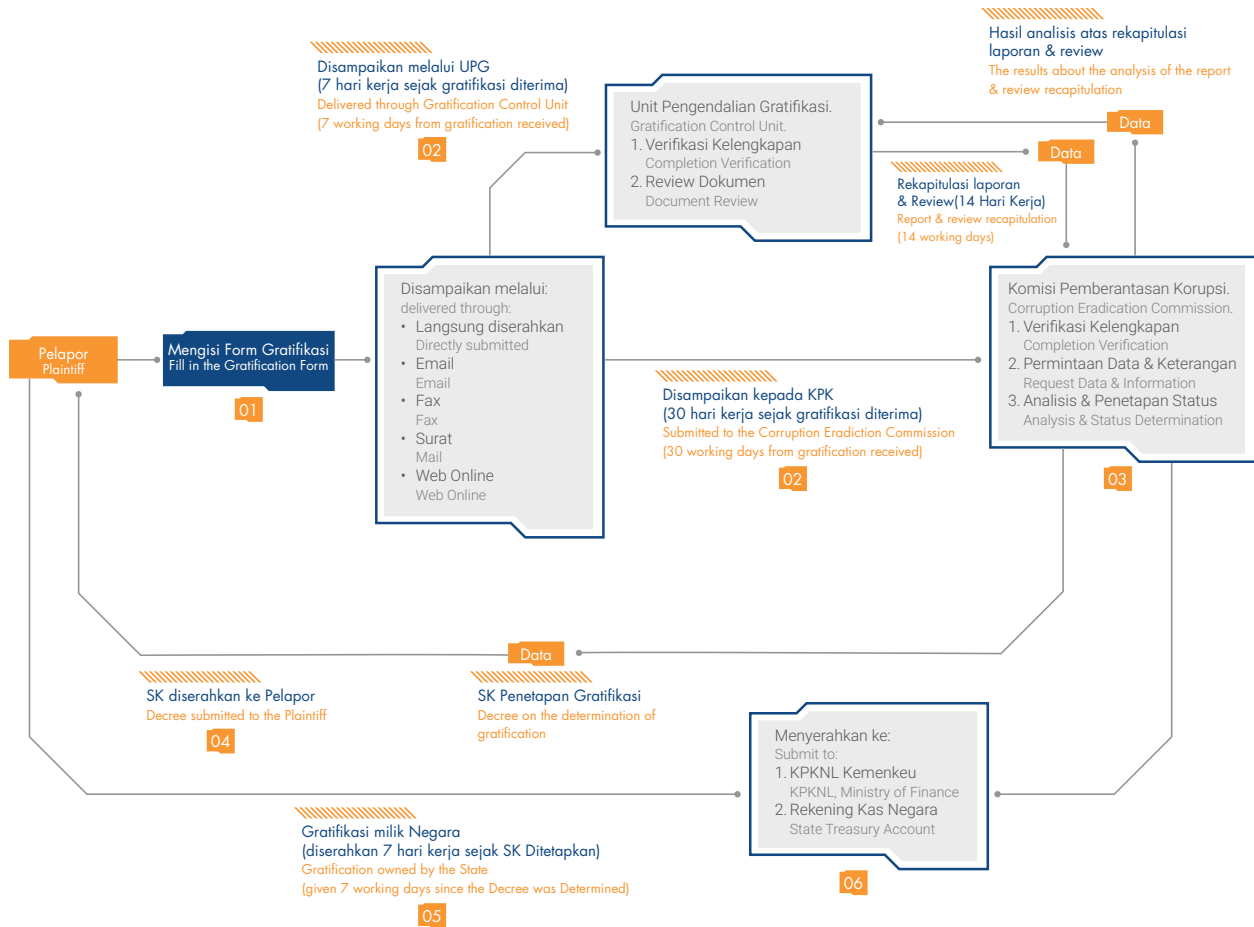
Pengendalian Gratifikasi Gratification Prevention

MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Mengacu pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT PELNI (Persero), mekanisme pelaporan dan penetapan status gratifikasi di Perseroan adalah sebagai berikut:

REPORTING MECHANISM AND GRATIFICATION STATUS DETERMINATION

Referring to Gratification Control Guidelines of PT PELNI (Persero), the reporting mechanism and determination of gratification status in the Company are as follows:



LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI 2018

Selama tahun 2018 tidak ada laporan penerimaan gratifikasi.

REPORT ON RECEIPT OF GRATIFICATION 2018

During 2018, there was no reports on receipt of gratification.

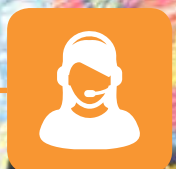


06

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility





Pendahuluan

Introduction



PT PELNI (Persero) sebagai Perusahaan yang seluruh kegiatan usaha dan operasionalnya berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan khususnya adalah lingkungan, masyarakat, karyawan dan konsumen tentu selalu memperhatikan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan dampak yang positif agar kelangsungan usahanya selalu berkelanjutan.

Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Perseroan berkomitmen memberikan hubungan timbal balik yang positif antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan. Hubungan antara Perseroan dan Pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha Perseroan sehingga Perseroan dapat senantiasa memberikan kontribusinya terhadap lingkungan.

PT PELNI (Persero) as a company whose entire business activities and operations directly relate to the stakeholders, especially the environment, community, employees and consumers certainly always pay attention to the needs and impacts caused. To that end, the Company is committed to continue to have a positive impact to ensure its business continuity is always sustainable.

Through its Corporate Social Responsibility activities, the Company is committed to providing a positive mutual relationship between the Company and its stakeholders. The relationship between the Company and Stakeholders is expected to maintain the Company's business continuity so that the Company can always contribute to the environment.



Pendahuluan Introduction

KEBIJAKAN PKBL

Kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) di PT PELNI (Persero) merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Merujuk pada landasan kebijakan tersebut, PT PELNI (Persero) melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PKBL tersebut juga melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha PT PELNI (Persero).

Pelaksanaan CSR PT PELNI (Persero) terbagi menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:

- Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup.
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat.
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Perlindungan Pelanggan.

LANDASAN HUKUM

Penerapan seluruh kegiatan Tanggung Jawab Sosial PT PELNI (Persero) telah sesuai dengan landasan-landasan hukum sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 60/KMK.016/96 tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994.
- Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. 100MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Keputusan Menteri BUMN Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

PKBL POLICY

Corporate Social Responsibility (CSR) implementation at PT PELNI (Persero) refers to the Minister of State-Owned Enterprise (BUMN) regulation No. PER-09/MBU/07/2016 dated July 3, 2016 regarding to Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises and the latest amendment in accordance with the Minister of State-Owned Enterprise regulation. PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 about the Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation no. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

Referring to the policy foundation, PT PELNI (Persero) implemented the Partnership and Community Development Program (PKBL) with the aim of assisting the Government in implementing more equitable development and improving the community welfare. PKBL's activities also involve the stakeholders, especially the communities that are located around the business area of PT PELNI (Persero).

CSR implementation of PT PELNI (Persero) is divided into 4 (four) areas, namely:

- Environmental Responsibility.
- Social Responsibility for Employment, Occupational Safety and Health.
- Social Responsibility for Social and Social Development.
- Social Responsibility for Customer Protection.

LEGAL BASIS

All activities of PT PELNI (Persero) Social Responsibility implementation has complied with the following legal basis:

- The Minister of Finance of the Republic of Indonesia decree No. 60/KMK.016/96 dated February 9, 1996 regarding to the amendment of article 3 of the Minister of Finance decree RINo. 316/KMK.016/1994.
- The Minister of State Owned Enterprises Decree Number: 100MBU/2002 dated 04 June 2002 about the health rating of State-Owned Enterprises.
- The Minister of SOE decree Kep-236/MBU/2003 on Partnership Program of the Small Business agency and Community Development Program.



Pendahuluan

Introduction

- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-03/MBU/S/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Penetapan Wilayah Binaan, tahun 2007.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- The Minister of State Owned Enterprises regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 on partnership program With Small Business And Community Development Program of State Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-08/MBU/2007 dated 27 April 2007 Concerning to the fourth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-05/MBU/2007.
- The Minister of State-Owned Enterprises Circular Letter No. SE-03/MBU/S/2007 dated July 17, 2007 on the Establishment of Assistance Areas, 2007.
- The Minister of State Owned Enterprises regulation PER-09 / MBU / 07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning Amendment to The Minister of SOEs regulation No. PER-09/MBU/07/2016 about Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-02/MBU/7/2017 About Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-09/MBU/07/2015 About the Partnership and Community Development Program of State-owned enterprises.

STRUKTUR ORGANISASI PKBL & CSR

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat PT PELNI (Persero), maka Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berada di bawah Divisi Perbendaharaan (*Treasury*) dan Direktur Keuangan. Dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Kantor Pusat dilakukan oleh *Senior Manager* Perbendaharaan dan dibantu oleh *Manager* PKBL beserta satu orang supervisor dan satu orang staf, sedangkan di daerah-daerah untuk pelaksanaan pembinaan Mitra dilakukan oleh staf PT PELNI (Persero) di cabang-cabang setempat.

PKBL & CSR ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In accordance with the Board of Directors decree of PT PELNI (Persero) No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017 dated February 28, 2017 on Organizational Structure, Main Duties and Functions of PT PELNI (Persero) Head Office, Partnership and Community Development program (PKBL) is under the Treasury Division and the Finance Director. In implementing the Partnership and Community Development Program for the Head Office is performed by Senior Manager of Treasury and assisted by PKBL Manager along with one supervisor and one staff member, while in the areas for the implementation of coaching Partners are conducted by PT PELNI (Persero) staff in local branches.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup

Social Responsibility in Environment

PT PELNI (Persero) dalam melakukan aktivitasnya sebagai Perusahaan yang bergerak dalam sektor transportasi memastikan bahwa aktivitas Perusahaan sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan yaitu keseimbangan antara *triple bottom* yaitu *line people, profit, planet*. Perseroan mengukur keberhasilan usaha berdasarkan tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan dan keuntungan. Model yang dikembangkan tidak hanya mengejar keuntungan finansial namun juga tanggung jawab sosial.

KEBIJAKAN

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial terhadap lingkungan merujuk pada dokumen Kedinasan di lingkungan PT PELNI (Persero) No. 01/HK.02.01/Dir.SDM dan Umum/VII/2013. Selain itu PT PELNI (Persero) juga memiliki Surat Edaran No. 07/SE/Dir.SDM dan UM/VI.2013 tentang penghematan Listrik dan Air. Program tanggung jawab terhadap lingkungan PT PELNI (Persero) bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai bagian dari program efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

PT PELNI (Persero) menyadari keberlangsungan bisnis perusahaan tidak hanya bergantung pada kinerja finansial namun juga kelestarian lingkungan hidup dan kemampuan memberi nilai tambah kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada awal tahun 2018 PT PELNI (Persero) telah menetapkan target kegiatan pengelolaan lingkungan yang disesuaikan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Perseroan telah menyusun program yang menjadi kampanye utama Perseroan terhadap pengelolaan operasional usaha yang ramah lingkungan yaitu program *Green Office*.

Cakupan kegiatan yang direncanakan melalui program *Green Office* yaitu penerapan operasional yang hemat kertas, penerapan hemat listrik, penerapan hemat air, mengurangi polusi udara dan pengelolaan limbah operasional kantor.

PT PELNI (Persero) in performing its activities as a company operating in the transportation sector ensures that the Company's activities are in accordance with the principle of sustainability that is the balance between triple bottom line people, profit, planet. The Company measures business success based on social responsibility, environmental stewardship and profitability. The developed model pursues not only financial gain but also social responsibility.

POLICY

The environmental Responsibility Program implementation refers to the official document of PT PELNI (Persero) No. 01/HK.02.01/Dir.SDM and Umum/VII/2013. Besides, PT PELNI (Persero) also has Circular Letter No. 07/SE/DirSDM and UM/VI.2013 about electricity and Water savings. The environmental responsibility program of PT PELNI (Persero) aims to create an environmentally friendly at work environment for preserving the environment as well as part of the sustainable resource efficiency program that has been implemented in the sustainable manner.

TARGET AND ACTIVITY PLAN

PT PELNI (Persero) realizes that the sustainability of the company's business depends not only on financial performance but also on environmental sustainability and the ability to add value to the surrounding community. Therefore, the Company always strives to run a business that is environmentally friendly and sustainability.

PT PELNI (Persero) had set the target of environmental management activities In early 2018 that were adjusted to the achievement in previous year. In order to achieve the set targets, the Company has developed a program that becomes the Company's main campaign for the management toward environmentally friendly business operational, which is namely *Green Office* program.

The scope of activities which planned through the *Green Office* program is the implementation of paper-efficient operations, electricity and water saving, reducing air pollution and waste management office operations.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup Social Responsibility in Environment

Kegiatan tanggung jawab sosial dalam bidang lingkungan juga dilakukan Perseroan melalui program PKBL khususnya bidang Bina Lingkungan. Bersama Yayasan Terumbu Rupa, setiap tahunnya Perseroan selalu merencanakan pengembangan program revitalisasi terumbu karang di wilayah Pulau Sepa Kepulauan Seribu dan Pulau Bangka Minahasa Utara.

REALISASI KEGIATAN

Program Green Office

Partisipasi PT PELNI (Persero) dalam menjaga kelestarian lingkungan dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan melalui Program *Green Office*. Program *Green Office* dilaksanakan melalui beberapa aktivitas, sebagai berikut:

1. Menerapkan hemat kertas dan tinta dengan cara mengurangi penggunaan kertas, penyimpanan dokumen dalam bentuk *soft copy*, pemanfaatan *email* sebagai pemanfaatan kertas bekas dalam mencetak dokumen yang belum final dan menggunakan *economode* version ketika melakukan pencetakan pada alat printer.
2. Menerapkan hemat listrik dengan cara mematikan komputer dan peralatan elektronik lainnya jika akan ditinggal atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, mengatur suhu ruangan agar tidak terlalu dingin, serta menghindari penggunaan lift dan menggunakan tangga jika hanya ingin pindah ke 1 atau 2 tingkat lantai yang berbeda.
3. Menerapkan hemat air dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan dan menutup keran air apabila tidak diperlukan.
4. Mengurangi polusi udara dengan cara pegawai dilarang untuk merokok di seluruh area dalam gedung, area merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah disediakan.
5. Melakukan pengelolaan limbah kertas, tinta printer, dan alat tulis melalui jasa pengelolaan sampah.

Bantuan Pelestarian Lingkungan

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut, PT PELNI (Persero) menyadari bahwa ekosistem laut juga menjadi faktor keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pada tahun 2018, PT PELNI (Persero) kembali memberikan kontribusi dalam melestarikan lingkungan laut. PT PELNI (Persero) melakukan kerjasama dengan Yayasan Terumbu Rupa untuk memberikan bantuan pelestarian lingkungan dengan dilakukannya Revitalisasi Terumbu Karang di Pulau Sepa, Kep Seribu, dan Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara.

Social Responsibility activities on environment also conducted by the Company through the Community and Development program especially in community environment assistance. cooperated with Terumbu Rupa Foundation, the Company always has a coral revitalization program in each year around sepa island, Kepulauan Seribu and Bangka island, North Minahasa.

ACITIVITY REALIZATION

Green Office Program

PT PELNI (Persero) participation in preserving the environment is carried out by creating an environmentally friendly in work environment through the Green Office Program. Green Office Program implemented through several activities, as follows:

1. Applying the paper and ink-saving by reducing paper usage, storing documents in soft copy, utilizing e-mail as wastepaper usage in printing unfinished documents and using economode version when printing on printer tools.
2. Applying the power saving by turning off the computer and other electronic equipment if it will be left or not used for along time, set the room temperature not too cold, and avoid the elevators usage and use the stairs if you just want to move to 1 or 2 levels of floor different.
3. Applying the water-saving by using water as needed and closing the water faucet if not needed.
4. Reducing air pollution by means of employees are prohibited to smoke in all areas of the building, smoking area is only allowed in places that have been provided.
5. Managing the waste paper, printer ink, and stationery through waste management services.

Environmental Conservation Assistance

As a company engages in marine transportation, PT PELNI (Persero) realizes that the marine ecosystem is also a factor of business sustainability in the long term. In 2018, PT PELNI (Persero) contributed in preserving the marine environment. PT PELNI (Persero) cooperates with Terumbu Rupa Foundation to provide environmental conservation assistance by conducting Coral Reef Revitalization on Sepa Island, Seribu Islands, and Bangka Island, North Minahasa.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup Social Responsibility in Environment

Pada tahun 2018 Perseroan telah menyalurkan bantuan pelestarian lingkungan melalui program Bina Lingkungan dengan nilai mencapai Rp330.127.500. Nilai ini tidak hanya mencakup bantuan pelestarian terumbu karang saja, namun juga mencakup bantuan pelestarian lingkungan lainnya.

In 2018, the Company distributed environmental conservation assistance through environment assistance reaching the score of Rp.330.127.500. This score did not only cover the coral revitalization, but also other environmental conservation.



SERTIFIKASI LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dalam Bidang Lingkungan Hidup, PT PELNI (Persero) juga telah melakukan sertifikasi lingkungan hidup untuk armada kapal penumpang melalui perolehan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal yang diterbitkan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 untuk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim untuk Kapal Motor (KM) Bukit Raya. Sertifikat tersebut diperoleh pada tanggal 8 September 2017 dan berlaku hingga 7 September 2020.

ENVIRONMENT CERTIFICATION

As part of Environmental Responsibility to the Environment, PT PELNI (Persero) has also conducted environmental certification for the passenger ships fleet through the acquisition of the National Certificate of Pollution Prevention from Ships which has been issued according to the Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 to comply with the Minister of Transportation Regulation No. 29 of 2014 about Maritime Environmental Pollution prevention for Motor Vessel (KM) Bukit Raya. The certificate was obtained on September 8, 2017 and has been valid until September 7, 2020.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

Dalam melakukan operasi usahanya, PT PELNI (Persero) selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelestarian lingkungan, didasari atas kesadaran bahwa pengelolaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja yang prima sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perseroan juga sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perseroan. Seluruh aktivitas Perseroan dievaluasi secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan.

KEBIJAKAN

Berdasarkan Disposisi Direktur Utama No.569 tanggal 05 Desember 2017 atas Nota Dinas Kepala DPA-ISM Code 12.05/01/ND/092/2017 tanggal 05 Desember 2017 perihal Jadwal Rencana Pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit DOC Kantor Pusat, SMC dan ISSC Kapal Penumpang, Kapal Barang dan Tol Laut, Kapal Perintis & Kapal Ternak dan Program Kerja SMK3 Tahun 2018.

Pada unit kerja DPA-ISM Code terdapat tiga jenis program kerja, yaitu:

- ISM-Code yang didasari oleh regulasi IMO (International Maritime Organization) yang juga dikonsolidasikan pada SOLAS (Safety of Life at Sea) 1974 Chapter IX (untuk ISM-Code);
- ISPS-Code yang didasari oleh regulasi IMO (International Maritime Organization) yang juga dikonsolidasikan pada SOLAS (Safety of Life at Sea) 1974 Chapter XI-2 (untuk ISPS-Code)
- SMK3 yang didasari oleh konvensi ILO (International Labor Organization) beserta turunannya seperti UU No.1 Th. 1970 tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3).

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

Sebagai komitmen untuk pelaksanaan Sistem Manajemen, PT PELNI (Persero) menetapkan target tahun 2018 yang berkaitan dengan sertifikasi *Document of Compliance* (DOC) dan *Safety Management Certificate* (SMC).

In conducting its business operations, PT PELNI (Persero) always prioritizes occupational safety and health, as well as environmental sustainability, based on the awareness that health and safety management is essential for longterm success. The Company always takes appropriate action to avoid accidents and health problems at work. The Company is also concerned with the problems and environmental impacts of all of the Company's activities. All of the Company's activities are scientifically evaluated their impact on the environment. Therefore, supervision and prevention actions are taken.

POLICY

Based on the President Director's Disposition No. 569 dated December 05, 2017 on Services Memorandum of Head of DPA-ISM Code 12.05/01/ND/092/2017 dated December 05, 2017 regarding Schedule of Internal Audit and External Audit Plan of DOC Head Office, SMC and ISSC Passenger Ship, Cargo and Tol Laut Ship, Perintis Ship & Cattle Ship and Work Program of HSE management and Schedule of Check on the Spot Plan to the Ship in 2018.

On DPA-ISM Code work unit, there is three types of work program, namely:

- ISM-Code is based on International Maritime Organization (IMO) regulation which is also consolidated with SOLAS (Safety of Life at Sea) 1974 of Chapter IX (for ISM-Code)
- ISPS-Code is based on International Maritime Organization (IMO) regulation which is also consolidated with SOLAS (Safety of Life at Sea) 1974 of Chapter XI-2 (for ISM-Code)
- HSE is based on ILO conventions (International Labor Organization) and its derivatives such as Law No.1 Th. 1970 concerning Occupational Health and Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Occupational Safety & Health Management System (HSE management).

TARGET AND ACTIVITY PLAN

As a commitment to the Management System implementation, PT PELNI (Persero) has set a target of 2018 relating to the certification for *Document of Compliance* (DOC) and *Safety Management Certificate* (SMC).



Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

Dalam rangka menghadapi eksternal audit DOC setiap tahunnya, Kantor Pusat harus diaudit internal terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan eksternal audit untuk mempertahankan Sertifikat DOC. Dalam mempertahankan sertifikasi DOC, Perusahaan perlu melakukan verifikasi meliputi:

- Verifikasi Tahunan (*Annual Verification*), setiap tahun dengan masa pengajuan antara 3 bulan sebelum s/d 3 bulan sesudah dari ulang tahun sertifikat.
- Verifikasi Pembaruan (*Renewal Verification*), pada tahun ke 5 dengan masa pengajuan 3 bulan sebelum habisnya masa berlaku sertifikat.

Sedangkan untuk sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) merupakan dokumen yang diterbitkan untuk suatu kapal yang menandakan bahwa manajemen Perusahaan dan kapal beroperasi sesuai dengan SMK yang disetujui. Dalam mempertahankan sertifikasi SMC, Perusahaan perlu melakukan verifikasi meliputi:

- Verifikasi Antara (*Intermediate Verification*), dengan masa pengajuan antara tahun ke 2 hingga tahun ke 3 dari ulang tahun sertifikat.
- Verifikasi Pembaruan (*Renewal Verification*), pada tahun ke 5 dengan masa pengajuan 6 bulan sebelum habisnya masa berlaku sertifikat.

REALISASI KEGIATAN Ketenagakerjaan

» Praktik Kesetaraan Gender

PT PELNI (Persero) menjamin kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan mulai dari tahap perekrutan, pengembangan karir hingga evaluasi kinerja. PT PELNI (Persero) tidak mengakui adanya diskriminasi berdasarkan gender maupun karakter lain seperti agama maupun etnis di mana kebijakan dan keputusan dalam aspek ketenagakerjaan sepenuhnya mempertimbangkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Praktik kesetaraan gender di PT PELNI (Persero) juga tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 09.30/5/SK/HKO.01/2015 tentang Pola Pengembangan Karir Jabatan Pegawai PT PELNI (Persero).

In order to face external DOC audits annually, the Head Office must be internally audited as a requirement for submitting external audits to maintain DOC Certificates. In maintaining DOC certification, the Company needs to carry out verification which includes:

- Annual Verification, every year with a submitting period between before 3 months/ after 3 months from the certificate anniversary.
- Renewal Verification, in the 5th year with a submission period of 3 months before the expiration of the certificate validity period.

Meanwhile, the Safety Management certificate (SMC) is a document issued for a ship which indicates that the management of the Company and the ship operates according to the approved Vocational School. In maintaining the SMC certification, the Company needs to verify the following matters:

- Intermediate Verification, with a period of submission on the 2nd to the 3rd of a year from the certificate's birthday.
- Renewal Verification, in the 5th year with a submission period of 6 months before the expiration of the certificate validity period.

ACTIVITY REALIZATION Employment

» Gender Equality Practice

PT PELNI (Persero) guarantees equality and job opportunities for all employees starting from the recruitment phase, career development to performance evaluation. PT PELNI (Persero) does not recognize discrimination based on gender or other characters such as religion or ethnicity where labor policy and decisions fully considering the employee performance. The practice of gender equality at PT PELNI (Persero) is implemented by the Directors Decree No. 09.30/5/SK/HKO.01/2015 concerning the Pattern of Career Development for Employee Position of PT PELNI (Persero).



Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

» **Turnover Karyawan**

Bagi Perseroan *turnover* karyawan merupakan indikator yang perlu diperhatikan. Sebab, tingkat *turnover* karyawan menggambarkan kualitas sistem SDM yang ada di suatu perusahaan. Tingkat *turnover* yang terlalu tinggi menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu diatasi oleh perusahaan untuk mengejar kelancaran kerja rutin dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan pemahaman seperti itu, maka Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga suasana lingkungan kerja agar tetap kondusif sehingga mendukung rasa nyaman karyawan dalam bekerja.

Pada tahun 2018, jumlah pegawai masuk sebanyak 952 orang dan jumlah pegawai keluar sebanyak 1.009 orang. Dengan begitu, maka *turnover rate* pegawai Perseroan pada tahun 2018 adalah 22,89.

» **Employee Turnover**

For the Company employee turnover is also an indicator that need to be considered. Because the Employee turnover rates also illustrate the quality of human resources system in the company. The turnover rate that is too high indicates there are problems that need to be addressed by the Company in order to pursue the smooth working routine and long-term sustainability. Therefore, the Company strives to maintain a conducive working environment that supports the comfort of employees in work.

In 2018, the number of employees joined are 952 people and the number of employees resigned are 1,009 people. Then, the turnover rate of the Company's in 2018 is 22.89.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

» **Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018**

- Sampai dengan Akhir Desember 2018, jumlah kapal penumpang eksisting yang sudah dilaksanakan internal audit ISM-Code sebanyak 25 dari 26 Kapal (96%). Untuk kapal perintis baru terealisasi sebanyak 8 kapal dari target 51 kapal (16%). Untuk kapal kapal barang dan tol laut sudah terealisasi sebanyak 5 dari 8 kapal (63%), serta kapal ternak sudah terealisasi seluruhnya sesuai rencana (100%).
- Pelaksanaan Eksternal Audit ISM-Code Tahun 2018 sudah 100% terealisasi sesuai rencana, penyelesaian tindak lanjut untuk eksternal audit ISM-Code sebagai berikut:
 - ↪ 16 dari 24 Kapal (67%) dalam kondisi *close out*.
 - ↪ 3 Kapal (12%) yang sudah melewati batas waktu penyelesaian NC dalam kondisi *Open* (NC MAJOR) dan harus segera dilaksanakan additional audit yaitu KM. Logistik Nusantara 4, KM. Kendhaga Nusantara 1, dan KM. Logistik Nusantara 5. Kendala pemenuhan NC terkait *Ballast Water Management Plan Approval, Approval Fire control dan live saving plan*, dan pemenuhan *emergency ladder*.

Occupational Safety and Healty

» **The performance of Occupational Health and Safety 2018**

- In the end of December 2018, the total number of existing passenger ship has been carried out by an ISM-Code of internal audit of 25 out of 26 ships (96%). For perintis ships, only 8 ships have been realized from the target of 51 ships (16%). For cargo and Tol Laut ships, 5 out of 8 ships have been realized (63%), and cattle ships have been fully realized according to plan (100%).as 20 ships from 29 ships (89%).
- The Implementation of ISM-Code of External Audit in 2018 has been realized 100%, the completion of follow-up the ISM-Code of external audit as follows:
 - ↪ 16 of 24 ships (67%) in close out condition.
 - ↪ 3 Vessels (12%) have passed NC settlement time limit in Open condition (NC MAJOR) and additional audit must be carried out immediately to MV. Logistik Nusantara 4, MV. Kendhaga Nusantara 1, and MV. Nusantara Logistics 5. The constraint of NC compliance related to *Ballast Water Management Plan Approval, Fire Control Approval and live saving plan*, and ladder emergency fulfillment.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

- 5 Kapal (21%) masih dalam proses tindaklanjut pemenuhan temuan (masih dalam batas due date) yaitu KM. Camara Nusantara 3, KM. Umsini, KM. Gunung Dempo, KM. Jetliner, dan KM. Ciremai.
- Program kerja internal audit SMK3-LH terealisasi sesuai rencana yaitu 100%. Namun untuk Inspeksi dan Sosialisasi di PT PELNI (Persero) Cabang Pantoloan diganti menjadi PT PELNI (Persero) Cabang Manokwari, dikarenakan ketika akan dilaksanakan inspeksi dan sosialisasi SMK3-LH wilayah Pantoloan-Palu terkena dampak Gempa dan Tsunami Palu.
- Pemeriksaan mata untuk semua pegawai PT PELNI (Persero) Pusat telah dilaksanakan pada tanggal 24 September s/d 04 Oktober 2018 bekerja sama dengan RS PELNI Petamburan.
- Pengadaan *fire equipment* seperti Helm, Baju Tahan Api/Panas, *Breathing Apparatus*, Kaca Mata pengaman, Sarung tangan, sepatu karet/ boot, tali pengaman/*gateline*, masker, senter, *fire blanket*, dan kapak pemecah kaca

» **Tingkat Kecelakaan Kapal Tahun 2018**

Untuk periode tahun 2018, Perseroan membuat 2 (dua) kategori laporan keadaan darurat, yaitu laporan berita acara keadaan darurat yang dikirimkan ke unit DPA dan dirapatkan kedalam MRT (*Management Response Team*), dan laporan keadaan darurat yang dilaporkan ke Mahkamah Pelayaran.

Tidak semua laporan keadaan darurat yang dikirimkan ke DPA kemudian dirapatkan ke dalam rapat MRT, hal ini dikarenakan hanya kasus-kasus yang membutuhkan tindakan penanggulangan lebih lanjut dengan koordinasi dari tim dan unit kerja terkait. Dan tidak semua kasus keadaan darurat yang dilaporkan ke DPA maupun dirapatkan dalam MRT dilaporkan ke Mahkamah Pelayaran, hal ini dikarenakan kasus yang dilaporkan tersebut menyebabkan kerugian pihak lain dan korban jiwa/pencemaran lingkungan maritim serta viral di media baik media sosial maupun media elektronik.

- 5 Ships (21%) are still in the process of following up the fulfillment of the findings (in the due-date limit), namely MV. Camara Nusantara 3, MV. Umsini, MV. Gunung Dempo, MV. Jetliner, and MV. Ciremai.
- The HSE-Living Environment work program realized according to plan, which is 100%. But for Inspection and Dissemination at PT Pelni (Persero) Branch of Pantoloan was changed into PT PELNI (Persero) Branch of Manokwari, when it will be carried out an inspection and socialization of the HSE-Living Environment in the Pantoloan-Palu areas affected by the earthquake and tsunami in Palu.
- Eye checks for all employees at Head Office of PT PELNI (Persero) conducted on September 24 to October 4, 2018 in collaboration with RS PELNI Petamburan (Hospital).
- Fire equipment procurement such as Helmets, Fireproof/Heat Resistant Clothing, Breathing Apparatus, Safety Glasses, Gloves, rubber boots/ boot, safety/*gateline* straps, masks, flashlights, fire blankets, and glass breaker axes

» **Ship Accident Rate 2018**

For the period of 2018, the Company made 2 (two) categories of emergency reports, namely an emergency response report sent to the DPA unit and put into the MRT (*Management Response Team*), and an emergency response report submitted to the Shipping Court.

Not all emergency reports submitted to DPA were then incorporated into MRT meetings, this was because only cases requiring further countermeasures with coordination of relevant teams and work units and causes loss of others and the loss of life/pollution of the maritime environment and viral in the media, both in social media and electronic media.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

Setiap tahun jumlah kapal yang beroperasi selalu bertambah. Pada tahun 2018 tercatat total 89 kapal yang beroperasi dan terdiri dari kapal tol laut, kapal ternak, kapal penumpang dan kapal perintis. Jumlah ini naik dari dibandingkan tahun 2017 dan 2016 yang mana jumlahnya sebesar 85 dan 75 kapal.

Ditahun 2018 terdapat beberapa kejadian keadaan darurat maupun *near misses* yang dikirimkan ke Unit Kerja DPA-QHSSE Code diantaranya kejadian tubrukan yang berarti keadaan darurat karena tubrukan kapal dengan kapal atau kapal dengan dermaga maupun dengan benda tertentu akan berpotensi menyebabkan kerusakan pada kapal, korban manusia, tumpahan minyak ke laut (kapal tangki), pencemaran dan kebakaran; kejadian kebakaran; kerusakan teknis; kejadian kandas; kejadian lain-lain yang meliputi jangkar jatuh kelaut, baling-baling terbelit tali *spring*.

Secara keseluruhan, jumlah keadaan darurat yang terjadi pada tahun 2018 turun sebesar 25 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan mengenai keadaan darurat yang terjadi pada kapal-kapal PT PELNI (Persero) Tahun 2018, sebagai berikut:

The number of ships operating always increases in each year. In 2018, there were the total of 89 ships operating and consisting of Tol Laut, Cattle, Passenger and Perintis ships. This number is increase compared to 2017 and 2016, which amounted to 85 and 75 ships.

In 2018, there were several incidents of emergency and near misses which sent to the DPA-QHSSE Code Working Unit, such as a collision occurrence (collision, touch, and crashing two or more ships at each other, ata crash into other objects that are not vessels either moving or fxd objects such as marine signs, ship lanterns and docks causing potential damage to ships, human casualties, oil spills to sea / pollution); fre incident, technical damage; incident aground; other events that include lose anchor in the sea, the twisted rotor blades.

Overall, the number of emergencies that occurred in 2018 decreased by 25% when compared to the previous year. The emergency report that occurred on PT PELNI (Persero) ships for the year of 2018, are as follows:

Kategori Keadaan Darurat Emergency Case Category	Tahun Year		
	2018	2017	2016
Tubrukkan Crash	3	11	9
Kebakaran Fire	-	2	1
Teknikal Error Error Technical	5	13	11
Orang jatuh ke laut People fell into the sea	-	0	3
Faktor alam Natural Disaster	-	0	0
Kandas Ship Failure	12	3	14
Lain-lain Others	2	3	4
Jumlah Kejadian Total Case	22	33	42
Jumlah Kapal Total Ship	89	85	75
Persentase Kejadian Dibandingkan Dengan Jumlah Kapal Case Percentage Compared with Total Ships	25%	39%	56%



Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

Tercatat pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah keadaan darurat sebesar 14%. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan jumlah keadaan darurat dan bertambahnya jumlah armada kapal.

Sebagai langkah antisipasi dan penanganan terhadap keadaan kasus darurat tersebut, Perseroan akan melakukan pengembangan *control system database*, dalam rangka untuk memudahkan dalam *me-monitor* masa berlaku sertifikat COP dan COC serat membuat program *control document* terkait kelancaran operasional penerbitan DOC, SMC, dan ISSC. Perseroan juga akan melaksanakan *safety drill* rutin tahunan yang melibatkan pihak kapal, kantor darat, dan instansi terkait di luar perusahaan yang terkoordinir dengan baik sehingga tercipta kesiapan dan kerja sama yang baik antar semua pihak dalam menangani kondisi darurat keselamatan.

Recorded in 2018 there was a decrease in the number of emergency situations by 14%. This was due to a decrease in the number of emergency situations and an increase in the number of fleets.

As an anticipation and handling of the emergency situation, the Company will develop the database control system, in order to facilitate monitoring the validity period of the COP certificate and COC fiber to create a control document program related to the smooth operation of DOC, SMC and ISSC publications. The company will also carry out an annual routine safety drill involving well-coordinated vessels, ashore offices, and related institutions outside the company so that the readiness and the cooperation between all parties can be created in handling safety emergency situations.





Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Responsibility in Community and Society Development Sector

PT PELNI (Persero) hadir tak sekadar mencari keuntungan semata. Sejak awal beroperasi, Perseroan berkomitmen agar kehadirannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan credo seperti itu, maka dari tahun ke tahun, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

KEBIJAKAN

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program PKBL ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam setiap kegiatannya, PT PELNI (Persero) selalu berusaha untuk melibatkan para pemangku kepentingan terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha PT PELNI (Persero).

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan PT PELNI (Persero) diterapkan melalui program PKBL. Setiap tahunnya PT PELNI (Persero) telah mencanangkan target dan rencana kerja program PKBL. Rencana kerja tersebut dibagai dalam dua bagian yaitu Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). Target dan rencana kerja tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja Kemitraan

a. Rencana Kerja Program Kemitraan

1. Penyaluran dana PKBL diprioritaskan ke daerah potensial dan sesuai dengan tingkat pengembalian dana tersebut.
2. Melakukan seleksi yang optimal terhadap calon mitra binaan yang layak mendapat pinjaman.
3. Mengelola, mengevaluasi dan monitoring laporan dan pengembalian kredit Dana Kemitraan untuk peningkatan kolektibilitas pinjaman.

PT PELNI (Persero) is not merely to collect profit. Since the beginning of its operation, the Company has been committed to making its presence can provide benefits for surrounding communities. From year to year, the Company continues to strive to improve the harmonious relationship with the community.

POLICY

The Partnership and Community Development Program (PKBL) refers to the Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / MBU / 07/2016 dated July 3, 2016 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program and amended the latest changes in accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02 / MBU / 07/2017 dated July 5, 2017 concerning Second Amendment of SOE Minister Regulation No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership Program and Community Development Program. This PKBL program aims to assist the Government in implementing more equitable development and improving community welfare. In each of its activities, PT PELNI (Persero) always strives to involve stakeholders, especially the community who are around the business area of PT PELNI (Persero).

TARGET AND ACTIVITY PLAN

Corporate Social Responsibility in the social and community of PT PELNI (Persero) is implemented through PKBL program. In every year, PT PELNI (Persero) has launched the target and work plan for PKBL program. The work plan is divided into two parts, namely Partnership Program (PK) and Community Development (BL). The target and work plan can be seen in the details below:

Partnership Workplan

a. Partnership Work Plan Program

1. PKBL funds Distribution is prioritized to potential areas and in accordance with the refund rate.
2. Optimal selection of prospective partners who are eligible to receive loans.
3. Managing, evaluating and monitoring reports and credit repayment of Partnership Funds for increasing loan collectibility.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Masyarakat Social Responsibility in Community and Society Development Sector

4. Dalam menyalurkan bantuan dititik beratkan kepada Mitra Binaan yang merupakan mitra kerja PT PELNI (Persero) yang termasuk dalam usaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.
5. Penyalurandana kemitraan lebih dititikberatkan pada sektor perikanan dengan pembentukan cluster-cluster dan akan bekerja sama dengan lembaga atau Kementerian dalam rangka pembinaan mitra binaan PKBL PT PELNI (Persero)
6. Mengadakan penyempurnaan sistim monitoring dan penagihan serta pengendalian hasil bantuan dana PTPELNI (Persero) yang telah diberikan kepada pengusaha kecil dan koperasi agar mendapat hasil produksi yang optimal dengan mengintensifkan koordinasi dengan pelaksana pembinaan di Pusat dan daerah – daerah.
7. Mengadakan kerja sama dengan Instansi terkait maupun lembaga-lembaga pendidikan sebagai pembinaan untuk meningkatkan kemampuan SDM Mitra Binaan.
8. Mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan staf PKBL.
9. Menginventarisir jaminan mitra binaan yang ada di kantor pusat maupun cabang-cabang atas mitra binaan yang mempunyai piutang macet serta melakukan tindakan atas jaminan mita binaan tersebut.
4. In distributing the funds that emphasized to partners who are the partners of PT PELNI (Persero) which included in the business of weak economic class and cooperatives.
5. Partnership funds Distribution is more focused on the fisheries sector with the formation of clusters and will cooperate with the institution or the Ministry in the framework of PKBL partners guided of PT PELNI (Persero)
6. Improving the monitoring and collection system and controlling the result of PT PELNI (Persero) fund grant which has been given to the small entrepreneurs and cooperatives in order to get optimal production result by intensifying coordination with the guided implementation in the Central and the regions.
7. Conducting cooperation with related institutions and educational institutions as a guided for improving Human Resources ability of Partnership Partners.
8. Attending the training or workshops to improve the capacity and capabilities of PKBL staff.
9. inventorying the guarantee of existing partners in the head office and branches of partners that have bad debts and take action for the guarantee of the clients.

b. Rencana Anggaran

Dana yang akan dialokasikan untuk program kemitraan PT PELNI (Persero) tahun berasal dari saldo akhir 2017 ditambah pengembalian pinjaman dari mitra binaan, jasa administrasi dan pendapatan jasa giro serta penerimaan dana dari BUMN pembina. Pada tahun 2018 PT PELNI (Persero) selaku BUMN Pembina akan memberikan alokasi dana sebesar Rp3.000.000.000,- untuk Program Kemitraan.

Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan Mitra Binaan

a. Rencana Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja usaha, mengadakan pelatihan ketrampilan / pendidikan dan membantu pemasaran hasil produksi. Pembinaan dititik beratkan kepada mitra binaan yang merupakan mitra

b. Budget Plan

Funds will be allocated for the partnership program of PT PELNI (Persero) come from the balance of the end of 2017 plus the return of loans from fostered partners, administration services and income from demand deposits and receipt of funds from state-owned enterprises development. In 2018, PT PELNI (Persero) as state-owned enterprises development will provide a funding allocation of Rp3,000,000,000 for the Partnership Program.

Partnership Development Workplan

a. Development Plan

The development program implementation is performed in the form of business working capital loan, providing skills /education training and assisting the products marketing . Guided is emphasized to the partners of PT.PELNI who are included in the



Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Responsibility in Community and Society Development Sector

kerja PT.PELNI yang termasuk dalam usaha golongan ekonomi lemah. Dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diharapkan dapat membantu masyarakat terutama yang berada disekitar lingkungan PT PELNI (Persero) Pusat dan Cabang-Cabang PT PELNI (Persero) sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Rencana Anggaran

Rencana anggaran kegiatan Pembinaan Mitra Binaan untuk tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp250.000.000 melalui berbagai kegiatan yang telah direncanakan sesuai program kerja PKBL.

Rencana Kerja Bina Lingkungan

a. Bantuan Bina Lingkungan

Sesuai Surat Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 Dana Bina Lingkungan dipergunakan untuk bantuan kemanusiaan dalam bentuk sebagai berikut:

- Bantuan bencana alam.
- Bantuan pendidikan.
- Peningkatan kesehatan masyarakat.
- Pengembangan prasarana dan sarana umum.
- Bantuan Sarana ibadah.
- Pelestarian alam.
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Penyaluran dana Bina Lingkungan tahun 2018 lebih dititikberatkan pada sektor pendidikan dan kegiatan lainnya dalam rangka melaksanakan program BUMN Hadir untuk Negeri yang dikoordinir oleh Kementerian BUMN.

b. Rencana Anggaran

Rencana anggaran untuk kegiatan Bina Lingkungan telah dianggarkan senilai Rp1.502.000.000.

business class of weak economy. By the Partnership and Community Development Program (PKBL) implementation is expected to help the community, especially around the environment of PT PELNI (Persero) Center and Branches as a form of The Company awareness to the surrounding community with the aim for increasing economic growth and improving the level life of community.

b. Budget Plan

The budget plan for the Partner development Program for 2018 has been budgeted by Rp250.000.000 through some various activities that have been planned according to the work program of PKBL.

Community Development Workplan

a. Community Development Assistance

According to the Minister of State Owned Enterprise regulation letter : PER-09 / MBU / 07/2015 dated July 3, 2015 Community Development Funds are used for humanitarian assistance with the following forms:

- Natural disaster funds.
- Educational funds.
- Improving public health.
- Public infrastructure and facilities development.
- Worship facilities funds.
- Nature conservation.
- Social funds in the context of poverty alleviation.

The Community Development funds distribution in 2018 were more focused on the education sector and other activities in order to implement BUMN Hadir Untuk Negeri program which coordinated by the Ministry of State-Owned Enterprises.

b. Budget Plan

The budget plan for Community Development program has been budgeted Rp1,502,000,000.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Masyarakat Social Responsibility in Community and Society Development Sector

REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA

Secara keseluruhan PT PELNI (Persero) telah berhasil menyalurkan dana PKBL sebesar Rp4.573.082.713 pada tahun 2018. Penyaluran dana tersebut dibagi atas Program Kemitraan, Pembinaan dan Bina Lingkungan. Rincian penyaluran dana PKBL pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

COST AND ACTIVITIES REALIZATION

Overall, PT PELNI (Persero) has succeeded in channeling PKBL funds in the amount of Rp. 4,573,082,713 in 2018. The distribution of funds is divided into the Partnership and Community Development Program. The details of the distribution of PKBL funds in 2018 explained in the table below:

Uraian Description	Biaya Cost
Program Kemitraan Partnership Program	Rp2.935.000.000
Pembinaan Mentoring	Rp134.166.300
Bina Lingkungan Community Development	Rp1.503.916.413

Program Kemitraan

Pada tahun 2018 untuk penyalurannya terdapat penambahan mitra binaan sebanyak 81 unit usaha kecil, dengan total dana pinjaman mitra binaan yang telah disalurkan sebesar Rp2.935.000.000.

Partnership Program

In 2018, for partnership program distribution funds, there was an additional assisted partner up to 81 small-business units, with the total of Rp2,935,000,000 in loans to the assisted partners.

Dengan demikian rincian jumlah mitra binaan PT PELNI (Persero) secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Thus the details of the total number of PT PELNI (Persero) assisted partners as of December 31, 2018 are as follows:

Mitra Binaan Partner	Jumlah Penyaluran Total Distribution	Jumlah Mitra Binaan Total Partners
Usaha Kecil Small Business	Rp38.243.878.814	1.211
Koperasi Cooperative	Rp3.593.412.007	199
Jumlah Total	Rp41.837.290.821	1.410

Realisasi sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2018 berasal dari pengembalian pinjaman mitra binaan yaitu hutang pokok ditambah dengan bunga sedangkan sumber dana lainnya adalah dari jasa giro, pendapatan lain-lain dan tambahan alokasi dana dari BUMN Pembina.

The realization of the Partnership and Community Development program fund sources in 2018 derived from the repayment of the loan from the assisted partners, namely principal plus interest, while other fund sources are from demand deposit services, other income and additional fund allocation from State-Owned Enterprises builder.



Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Responsibility in Community and Society Development Sector

Dana yang terhimpun untuk program kemitraan tahun 2018 adalah sebesar Rp3.200.958.604 atau 107% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,-. Dana tersebut berasal dari pengembalian pokok pinjaman ditambah jasa administrasi pinjaman, jasa giro, tambahan alokasi dana dari BUMN Pembina (biaya) dan pendapatan lain-lain.

Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dalam bentuk pinjaman modal usaha sampai dengan akhir Desember tahun 2018 adalah sebesar Rp2.935.000.000 atau 107% dari anggaran 2018, sedangkan pembinaan mitra binaan di tahun 2018 sebesar Rp.134.166.300.

Nilai realisasi penyaluran pinjaman dan pembinaan mitra pada tahun ini pada kenyataannya turun sebesar 4,4% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mana sebesar Rp3.070.000.000.

Rincian rencana dan realisasi anggaran dan kegiatan program kemitraan PT PELNI (Persero) dapat dilihat pada table berikut ini:

The Collected funds for the 2018 partnership program amounted to Rp3.200.958.604 or 107% from the budget of Rp3.000.000.000. The funds were derived from loan principal repayments plus loan administration services, demand deposit services, additional allocation of funds from State-Owned Enterprises builder (cost) and other income.

Assisted partners loans in the form of business capital loans in the end of December 2018 amounted to Rp. 2,935,000,000 or 107% of the 2018 budget, while the assisted partners development in 2018 was at Rp. 134,416,300.

The realization of loan disbursement and the assistance of partners in this year decreased by 4.4% compared to 2017 which amounted to Rp3,070,000,000.

The details of the budget and activities plan and the realization of PT PELNI (Persero) partnership program can be seen in the following table:

Sektor Sector	Rencana Plan		Realisasi Realization	
	Unit Unit	Jumlah Unit	Unit Unit	Jumlah Unit
Industri Industry	4	Rp160.000.000	6	Rp230.000.000
Perdagangan Trading	10	Rp300.000.000	10	Rp475.000.000
Pertanian Farming	-	-	2	Rp120.000.000
Perkebunan Agriculture	-	-	-	-
Peternakan Farming	2	Rp60.000.000	15	Rp395.000.000
Perikanan Fishery	55	Rp2.150.000.000	45	Rp1.585.000.000
Jasa Services	1	Rp30.000.000	2	Rp55.000.000
Lain-lain/Koperasi Others/Union	-	-	1	Rp75.000.000
Pembinaan Kemitraan Partnership Development	6	Rp300.000.000	24	Rp134.166.300
Jumlah Total		Rp3.000.000.000	81	Rp2.935.000.000

Program Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan yang telah dilakukan selama tahun 2018 sebanyak 24 mitra dengan biaya sebesar Rp134.166.300. Adapun kegiatan pembinaan di tahun 2018 meliputi:

Development Program

The implementation of the assistance program carried out during 2018 was 24 partners at the cost of Rp134,166,300, which includes:



Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social Responsibility in Community and Society Development Sector

1. Kegiatan Pameran Kuliner HUT Kementerian BUMN pada tanggal 28-29 April 2018 di Colomadu Surakarta Jawa Tengah dengan biaya sebesar Rp7.580.000 (diikuti oleh 1 mitra binaan).
2. Kegiatan *assessment* Pembinaan UKM Ikan Bandeng dan Udang Vaname pada tanggal 24 Agustus 2018 di Pemalang dan Demak Jawa Tengah dengan biaya sebesar Rp7.000.000. (diikuti oleh 20 mitra binaan).
3. Pelatihan secara teori penerapan SOP untuk penerapan usaha udang dan ikan pada tanggal 12-13 Oktober 2018, 17-18 November 2018 dan 11-12 Januari 2019 dengan biaya sebesar Rp89.886.300.
4. Pembuatan video profil UKM binaan dan penayangannya disalurkan TV kabel pada tanggal 3-5 September 2018 dengan biaya sebesar Rp29.700.000 (diikuti oleh 3 mitra binaan).

1. The Ministry of SOE's Anniversary Culinary Exhibition on April 28-29, 2018 in Colomadu Surakarta, Central Java, at the cost of Rp7,580,000 (followed by 1 assisted partner).
2. Assessment on SME development of Vaname shrimp and milkfish on August 24, 2018 in Pemalang and Demak, Central Java, at the cost of Rp7,000,000 (participated by 20 assisted partners).
3. The application of SOP seminar for the shrimp and fish businesses on October 12-13, 2018, November 17-18, 2018 and January 11-12, 2019 at the cost of Rp89,886,300.
4. The making of the profile videos of assisted SME and was broadcasted by cable TV on September 3-5, 2018 at the cost of Rp.29,700,000. (participated by 3 partners).

Program Bina Lingkungan

Dalam realisasi program Bina Lingkungan tahun 2018, PT PELNI (Persero) telah berhasil menyalurkan dana sebesar Rp1.503.916.413 dari rencana anggaran sebesar Rp1.502.000.000 dalam bentuk pemberian sumbangan/ bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, sarana ibadah, pelestarian alam dan sosial kemasyarakatan.

Community Development Program

In the realization of the Community Development program in 2018, PT PELNI (Persero) has managed to channel funds totaling Rp1,503,916,413 from the planned budget of Rp1,502,000,000 in the form of donations/ assistance to victims of natural disasters, education, health services, religious facilities, nature and social community conservation.



Bantuan Bencana Gempa Lombok
Earthquake Disaster Assistance in Lombok



Pembangunan Sarana Air Bersih di Demak - Jawa Tengah
Water Supply Facility in Demak, Central Java



BUMN Berbagi, perayaan Natal & Tahun Baru 2018, Medan - Sumatera Utara
SOE Charity, Christmas & New Year celebrations 2018 in Medan - North Sumatra



Bantuan Masjid Jami Assalam di Depok - Jawa Barat
Jami Assalam Mosque Assistance in Depok - West Java

Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Masyarakat Social Responsibility in Community and Society Development Sector



Program BUMN Siswa Mengenal Nusantara (SMN) ke Museum
 Indonesian Archipelago Knowledge for Student of SOE (SMN) program to the Museum



Program BUMN Siswa Mengenal Nusantara (SMN) di Papua
 Indonesian Archipelago Knowledge for Student of SOE (SMN) program in Papua



Revitalisasi terumbu karang di Pulau Kelapa
 Coral reefs Revitalization on Kelapa Island



Revitalisasi terumbu karang di Pulau Bangka - Sulawesi Utara
 Coral reefs revitalization on Bangka Island North Sulawesi

Berikut adalah rincian realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan pada tahun 2018:

The following is the realization of Community Development funds in 2018:

Jenis Bantuan Kind of Assistance	Rencana Plans	Realisasi Realization
Bantuan korban bencana alam. Assistance for natural disaster victims.	Rp250.000.000	Rp82.757.151
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan. Educational and/or training assistance.	Rp22.000.000	Rp82.130.000
Bantuan peningkatan kesehatan. Health Improvement Assistance.	Rp20.000.000	Rp48.896.413
Bantuan pengembangan prasarana dan /atau sarana umum. Development of public infrastructure and/or facilities.	Rp560.000.000	Rp330.127.500
Bantuan sarana ibadah. Worship facilities.	Rp300.000.000	Rp482.762.500
Bantuan pelestarian alam. Nature conservation.	Rp1.502.000.000	Rp1.503.916.413
Bantuan Sosial Masyarakat dalam rangka Pengentasan Kemiskinan. Social Assistance for Poverty Reduction.	Rp360.000.000	Rp288.195.130
Jumlah Total	Rp1.015.000.000	Rp814.347.092



Tanggung Jawab Sosial kepada Pelanggan

Social Responsibility to Customers

Pelanggan Perusahaan merupakan pihak eksternal Perusahaan yang sangat berpengaruh bagi keberlanjutan usaha PT PELNI (Persero) ke depan. Pelanggan merupakan pihak yang menjadi perhatian PT PELNI (Persero) untuk senantiasa ditunjang dengan fasilitas yang memadai dan memuaskan, hingga diharapkan terciptanya *customer engagement* dan saling menguntungkan.

KEBIJAKAN

Kebijakan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan terdapat dalam Proses penyampaian dan tindak lanjut keluhan pelanggan merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 04.28/03/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan *Standard Operating Procedures (SOP) Contact Center Info PELNI* yang mengatur standar pelayanan pelanggan melalui "Info PELNI 162."

RENCANA KEGIATAN

PT PELNI (Persero) telah menyusun rencana kerja untuk aktivitas Tanggung Jawab Sosial Kepada Konsumen serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2018 melalui koordinasi lintas direktorat, *Monday Briefing*, Rapat Pimpinan, dan Rapat Terbatas Direktorat/ Divisi.

Sasaran atau target rencana kegiatan/program kerja pada tahun 2018, antara lain:

1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut dalam aspek kenyamanan mencakup mutu dan citarasa makanan, kebersihan, *hospitality*, dan hiburan di ataskapal.
2. Tertib administrasi.
3. Efisiensi dalam penggunaan peralatan dapur.
4. Peningkatan *control* terhadap pelaksanaan kegiatanlayanan penumpang dan awak kapal.
5. Tersedianya informasi produk perusahaan (Jadwal, Tarif, Reservasi, *customer care* dan informasi lainnya).

REALISASI KEGIATAN

Kegiatan tanggung jawab sosial kepada pelanggan selama tahun 2018 antara lain adalah:

1. **Pengembangan New Pelni Ticketing System**
Pengembangan Modul NPTS terlaksana 5 Modul (Modul Reservasi Tiket, Modul *Payment Process*, Modul *Departure Control System*, Modul Admin Kapal, Modul Bagasi Manajemen).

Customer is the external parties of the Company that is very influential for the sustainability of PT PELNI (Persero) business going forward. PT PELNI (Persero) concerns to always be supported by adequate and satisfying facilities, so that can create customer engagement and mutual benefit.

POLICY

The policy of social responsibility to customers is in the process of delivering and following up the customer complaints that reffers to the Directors Decree No. 04.28/03/SK/HKO.01/2016 concerning Establishment of Contact Center Standard Operating Procedure (SOP) for PELNI Info which regulates customer service standards through "PELNI Info 162."

ACTIVITY PLAN

PT PELNI (Persero) compiled a work plan for Customer Social Responsibility activities and evaluates the implementation of work programs in 2018 through cross directorate coordination, *Monday Briefing*, Executive Meetings, and Directorate / Division Joint Meetings.

The targets or objectives for the work plan/work program in 2018 include:

1. The fulfillment of the Passenger Sea Transportation Service Standards in the comfort aspects includes the quality and taste of food, cleanliness, *hospitality* and entertainment on board.
2. Good administration.
3. Efficiency in using kitchen equipment.
4. Improving control over the implementation of passenger and crew services.
5. Availability of Company product information (Schedule, Tariff, Reservations, customer care and other information).

ACTIVITY REALIZATION

Social responsibility activities for customer during 2018 are as follows:

1. **Quality Assurance Service**
NPTS Module Development implemented in 5 Modules (Ticket Reservation Module, Payment Process Module, Departure Control System Module, Ship Admin Module, Baggage Management Module).



Tanggung Jawab Sosial kepada Pelanggan

Social Responsibility to Customers

2. **Pengadaan Blanko *Single Ticket***

Pengadaan blanko *single ticket* terlaksana sebanyak 2.500.000 tiket dan tiket perintis sebanyak 15.000 *roll*.

3. **Channel Development**

Total *Channel Development* yang terlaksana sampai dengan Desember 2018 sebanyak 8 *Channel* (Indomart, Alfamart, Darmawisata, Bima Sakti, MMBC, ATA Tour, Versa, Finnet).

4. **Implementasi Sistem *Ticketing* Kapal Perintis**

Sistem Aplikasi *Ticketing* Kapal Perintis telah diimplementasikan di 40 kapal perintis PT PELNI (Persero).

5. **Pengelolaan Distribusi Blanko *Single Ticket***

Proses pelaksanaan distribusi blanko *single ticket* telah dilakukan setiap ada permintaan tiket dari cabang dan kapal.

6. **Implementasi *E-Ticketing* di *Travel Agent***

Sudah terlaksana di 5 Embarkasi (Tg. Priok, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Bitung) dengan jumlah perangkat penukaran tiket sebanyak 10 unit printer dan laptop.

7. **Evaluasi Trayek Kapal Penumpang dan Trayek Kapal Perintis**

Evaluasi *re-routing* untuk *peak season* Lebaran dan Nataru tahun 2018 serta Trayek Kapal Penumpang Tahun 2019 telah terlaksana.

8. **Pembentukan *Sales Force Team***

Program Kerja *Sales Force* telah difasilitasi oleh Divisi SDM, dengan jumlah total peserta yang diterima sebagai *Sales Force Team* 31 orang.

9. **Penyesuaian Tarif Penumpang Ekonomi Kapal Penumpang dan Tarif Penumpang Kapal Perintis**

Penyesuaian tarif penumpang ekonomi kapal penumpang dan tarif penumpang kapal perintis ditunda berdasarkan pertimbangan Manajemen.

2. **Single Ticket Forms Procurement**

Single ticket forms carried out as many as 2,500,000 tickets and 15,000 perintis tickets.

3. **Channel Development**

Total Channel Development carried out until December 2018 as many as 8 Channels (Indomart, Alfamart, Darmawisata, Bima Sakti, MMBC, ATA Tour, Versa, Finnet).

4. **The Implementation of Perintis Ship Ticketing System**

Perintis Ship Ticketing Application System installed in 40 ships of PT PELNI (Persero).

5. **The Management of Single Ticket Forms Distribution**

Implementing a single ticket forms distribution has been carried out every time if there is a ticket request from branches and ships.

6. **E-Ticketing Implementation in Travel Agent**

It has been implemented in 5 Embarkations (Priok, Semarang, Surabaya, Balikpapan and Bitung) with 10 tickets and 10 laptop printer units.

7. **Evaluation on Passenger and Perintis Ships Routes**

Relouting evaluation for Ied Mubarak, Christmas and New Year peak season 2018 and Passenger Ship routes in 2019 have been implemented.

8. **Sales Force Team Establishment**

The Sales Force Work Program facilitated by HR Division, with the total participants accepted as Sales Force Team of 31 people.

9. **Adjustment of Economy passenger and Perintis Ship Tariff**

Adjustment of Economy Passenger and Perintis Ship Tariff based on Management consideration.



Tanggung Jawab Sosial kepada Pelanggan Social Responsibility to Customers

10. Pengelolaan Operasional, *Canvasing* dan Komunikasi

Program rutin Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang Kapal Penumpang dan Perintis.

11. *Monitoring* Reservasi dan Operasional *Peak Season*

Program rutin Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang Kapal Penumpang dan Perintis.

12. Pengembangan Aplikasi *Dashboard Management* Angkutan Penumpang Kapal Penumpang dan Kapal Perintis

Pengembangan Aplikasi *Dashboard Management* Angkutan Penumpang Kapal Penumpang dan Kapal Perintis ditunda.

13. Pengadaan Perangkat dan Sosialisasi Admin Bagasi

Pengadaan Perangkat dan Sosialisasi Admin Bagasi akan diimplementasikan di tahun 2019.

14. Implementasi Aplikasi Admin Kapal di Kapal Penumpang

Aplikasi Admin Kapal telah diimplementasikan di 11 kapal penumpang, yaitu kapal KM. Tidar, KM. Nggapulu, KM. Dorolonda, KM. Kelud, KM. Sinabung, KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu, KM. Gunung Dempo, KM. Dobonsolo, KM. Umsini dan KM. Kelimutu.

Selain melalui aktivitas tersebut, guna mendukung pelayanan kepada pelanggan, PT PELNI (Persero) juga menyediakan layanan *Contact Center* sebagai berikut:

1. *Voice Call* : 021-162 atau 162
2. Facebook : PELNI *Point* (*Fan Page* : Pelayaran Nasional Indonesia)
3. Twitter : @pelni162
4. Instagram : pelniline
5. *Sms Masking* : PELNI162
6. Email : infopelni162@pelni.co.id

10. The Management of Operational, *Canvasing* and Communication

Marketing Division routine program for Passenger transportation of Passenger and Perintis Ship.

11. *Reservation* and *Peak Season* Operational *Monitoring*

Marketing Division routine program for Passenger transportation of Passenger and Perintis Ship.

12. Management *Dashboard Application* Development of Passenger Ships and Perintis Ship for Passenger Transportation

Management *Dashboard Application* Development of Passenger Ships and Perintis Ship for Passenger Transportation canceled.

13. Device Procurement and Baggage Admin Socialization

Device Procurement and Baggage Admin Socialization will be implemented in 2019.

14. Ship Administration Implementation in Passenger Ship

The Ship Admin application has been implemented on 11 passenger vessels, namely MV. Tidar, MV. Nggapulu, MV. Dorolonda, MV. Kelud, MV. Sinabung, MV. Bukit Siguntang, MV. Lambelu, MV. Gunung Dempo, MV. Dobonsolo, MV. Umsini and MV. Kelimutu.

Other than through these divisions, to support service to the customers, PT PELNI (Persero) also provides *Contact Center* services, as follows:

1. *Voice Call* : 021-162 atau 162.
2. Facebook: PELNI *Point* (*Fan Page*: Pelayaran Nasional Indonesia).
3. Twitter : @pelni162.
4. Instagram : pelniine.
5. *Sms Masking* : PELNI162.
6. Email : infoPELNI162@pelni.co.id.



Tanggung Jawab Sosial kepada Pelanggan

Social Responsibility to Customers

Jumlah Keluhan Melalui Call Center Tahun 2017

Untuk mendukung pelayanan terhadap pelanggan, pada tahun 2018, PT PELNI (Persero) didukung oleh 87 petugas loket yang bertugas untuk menjual dan mencetak tiket, menerima dan memproses masukan, saran maupun keluhan pelanggan yang disampaikan melalui loket pelayanan PT PELNI (Persero). Per 31 Desember 2018, PT PELNI (Persero) mencatat 79 keluhan pelanggan yang disampaikan melalui berbagai media, dengan rincian jenis keluhan pelanggan sebagai berikut:

Total Complaint Received By Call Center in 2017

In order to support service to the customers, in 2018, PT PELNI (Persero) was supported by 87 locket staffs who were in charge to sell and print tickets, received and processed every inquiry, suggestion and complaint from the customers submitted to PT PELNI (Persero) service locket. As of December 31, 2018, PT PELNI (Persero) recorded 79 customer complaints that submitted via various media, with types of customer complaints, as follows:

Jenis Komplain Type of Complaint	Jumlah Total
Sewa Kabin/kasur Cabin/Bed Rental	15
Fasilitas di kapal Ship Facilities	12
Seat tidak sesuai tiket Seat Complaint	5
Penjualan tiket Ticket Sales	9
Harga tiket tidak sesuai Unmatch Price	6
Sampah Garbage	1
Perubahan Jadwal Kapal Ship Schedule Changes	1
Merokok Smoking	2
Tarif muatan Cargo Tariff	7
Tiket <i>online</i> Online Ticket	8
Barang tertinggal Lost Item	4
Calo Brokers	2
Aplikasi PELNI Mobile PELNI Mobile Apps	2
Pelayanan ABK Crews Services	2
Pelayanan Petugas <i>Call Center</i> Call Center Services	2
Diskon Tarif Tariff Discount	1
<i>Website</i> Website	1
<i>Over Capacity</i> Over Capacity	1
Jumlah Total	79

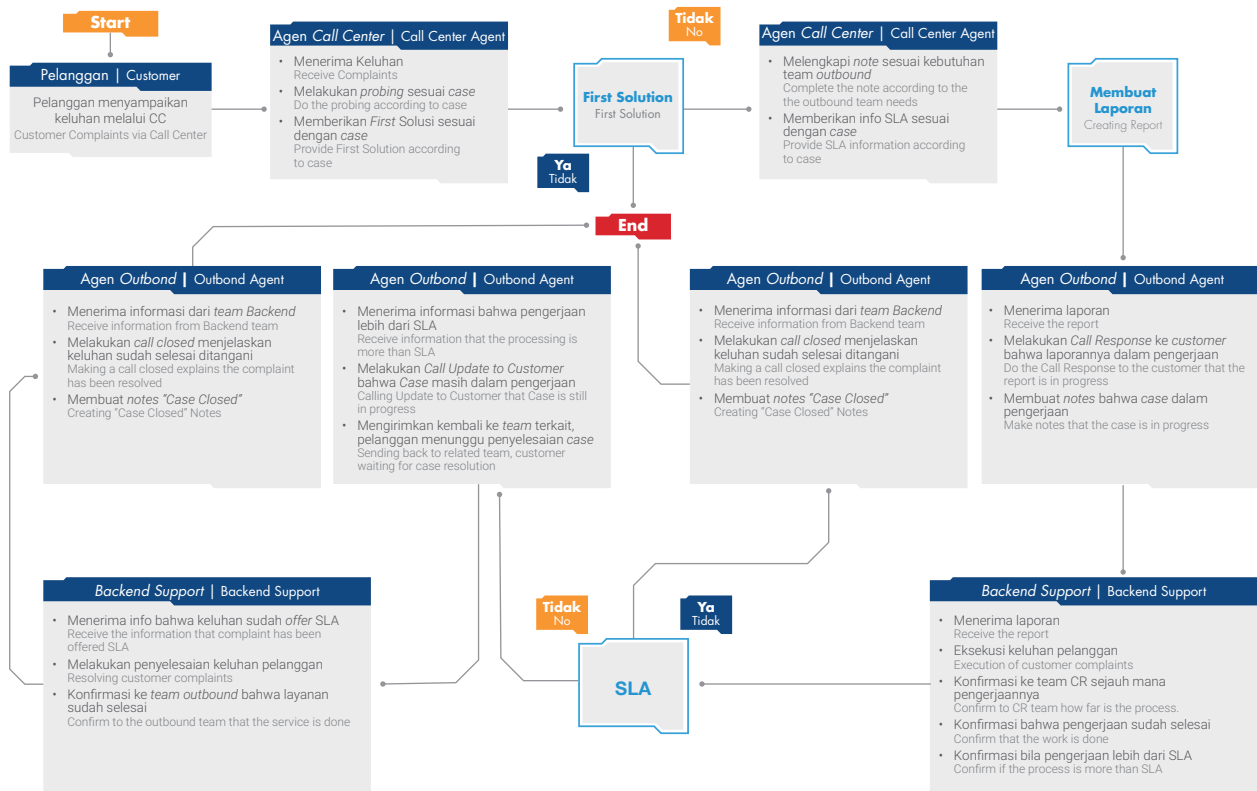


Tanggung Jawab Sosial kepada Pelanggan Social Responsibility to Customers

Seluruh keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan masalah yang dikeluhkan, melalui mekanisme sebagai berikut:

All of the customer complaint have been followed-up through coordination with related working unit based on the complained issues in the following mechanism:

Call Flow General Complaint Call Flow of General Complaint



REALISASI ANGGARAN

Per 31 Desember 2018, PT PELNI (Persero) telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5.592.038.486 untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial kepada pelanggan melalui pelayanan contact center 162.

BUDGET REALIZATION

As of December 31, 2018, PT PELNI (Persero) had allocated budget of Rp5,592,038,486 for social responsibility activities implementation to the customers through contact center 162 service.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN TAHUNAN 2018
PT PELNI (PERSERO)

Statement of Board of Commissioner
and Board of Director Members on
Accountability for the Annual Reports 2018
of PT PELNI (Persero)



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT PELNI (Persero)

Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability for the Annual Reports 2018 of PT PELNI (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) tahun buku 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Mei 2019

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Bambang Prihartono
Komisaris Utama
President Commissioner

Satya Bhakti Parikesit
Komisaris
Commissioner

Raldi Hendro Koestoer
Komisaris
Commissioner

Sudarto
Komisaris
Commissioner

Johanes Widodo Hario Mumpuni
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Danang Parikesit
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT PELNI (Persero)
Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability
for the Annual Reports 2018 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

We signed below, testifying that all information of PT PELNI (Persero) Annual Report for fiscal year of 2018 is entirely presented and we are fully responsible for contents accountability in this Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company. This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, May 28, 2019

Direksi
The Board of Directors



Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director



Tri Andayani
Direktur Keuangan
Director of Finance



Ganefi
Direktur SDM & Umum
Director of Human Capital & General Affairs



Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Business Transportation



Muhamad Tukul Harsono
Direktur Armada
Director of Fleet



Harry Boediarto Soewarto
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut
Director of Freight & Tol Laut



Halaman ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

REFERENSI SEOJK
NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN
TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016:
Annual Report of Public Company



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		
I. General Provision		
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√	1. Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making an investment decision, and is a means of monitoring issuers or public company.
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√	2. Along with the development of Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through an annual report.
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	3. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	√	4. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		
II. Format of Annual Report		
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed the format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√	3. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. Isi Laporan Tahunan		
III. Content Of Annual Report		
1. Ketentuan Umum		
1. General Provision		
a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		a. Annual Report should contain at least the following information:
1. Ikhtisar data keuangan penting;	12-15	1. Summary of key financial information;
2. Informasi saham (jika ada);	131, 223	2. Stock information (if any);
3. Laporan Direksi;	38-51	3. The Board of Directors report;
4. Laporan Dewan Komisaris;	24-31	4. The Board of Commissioners report;
5. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	60-150	5. Profile of Issuer or Public Company;
6. Analisis dan pembahasan manajemen;	154-197	6. Profile of Issuer or Public Company;
7. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	200-365	7. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	368-391	8. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	437-615	9. Audited annual report; and
10. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	394-395	10. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	√	b. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016:
Laporan Tahunan Perusahaan Publik
SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	12-15	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1. Pendapatan/penjualan;	√	1. Income/sales;
2. Laba bruto;	√	2. Gross profit;
3. Laba (rugi);	√	3. Profit (loss);
4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	4. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5. Total laba (rugi) komprehensif;	√	5. Total comprehensive profit (loss);
6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	6. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7. Laba (rugi) per saham;	√	7. Earning (loss) per share;
8. Jumlah aset;	√	8. Total assets;
9. Jumlah liabilitas;	√	9. Total liabilities;
10. Jumlah ekuitas;	√	10. Total equities;
11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	√	11. Profit (loss) to total assets ratio;
12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	√	12. Profit (loss) to equities ratio;
13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	√	13. Profit (loss) to income ratio;
14. Rasio lancar;	√	14. Current ratio;
15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	√	15. Liabilities to equities ratio;
16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	√	16. Liabilities to total assets ratio; and
17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	√	17. Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi Saham Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	311, 223	b. Stock Information Stock Information (if any) at least contains:
1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:		1. Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a. Jumlah saham yang beredar;	N.A.	a. Number of outstanding shares;
b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	N.A.	b. Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	N.A.	c. Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d. volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	N.A.	d. Share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	N.A.	Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	N.A.	Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;
2. Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	N.A.	2. in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	N.A.	a. Date of corporate action;
b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;	N.A.	b. Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	N.A.	c. Number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	N.A.	d. Share price prior to and after corporate action;
3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	N.A.	3. In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;	N.A.	4. In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuers or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat:	38-51	c. The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1. Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	√	1. The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a. Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	√	b. Comparison between achievement of results and targets; and
c. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. Challenges faced by the Issuer or Public Company;
2. Gambaran tentang prospek usaha;	√	2. Description on business prospects;
3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	3. Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	24-31	d. The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	1. Assessment of the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2. Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. Supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;
3. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	√	3. View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
4. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	√	4. View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
5. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	√	5. Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	√	6. The frequency and procedure of providing advice to members of the Board of Directors;



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016:
Laporan Tahunan Perusahaan Publik
SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	60-150	e. Profile of the Issuer or Public Company Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	60	1. Name of Issuer or Public Company, including change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	60,146-148	2. Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where the public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a. Alamat;	√	a. Address;
b. Nomor telepon;	√	b. Telephone number;
c. Nomor faksimile;	√	c. Facsimile number;
d. Alamat surat elektronik; dan	√	d. E-mail address; and
e. Alamat Situs Web;	√	e. Website address;
3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	62-65	3. brief history of the Issuer or Public Company;
4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	72-75	4. vision and mission of the Issuer or Public Company;
5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	66-71	5. line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	76-79	6. structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
7. Profil Direksi, paling sedikit memuat:	52-57	7. the Board of Directors profiles include:
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	√	a. name and short description of duties and functions;
b. foto terbaru;	√	b. latest photograph;
c. usia;	√	c. age;
d. kewarganegaraan;	√	d. citizenship;
e. riwayat pendidikan;	√	e. education;
f. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f. history position, covering information on:
1. dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	1. legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
2. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
3. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	√	g. competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Directors during the year under review (if any); and
h. hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	√	h. disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party;
8. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	32-37	8. the Board of Commissioners profiles, at least include:
a. nama;	√	a. name;



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
b. foto terbaru;	√	b. latest photograph;
c. usia;	√	c. age;
d. kewarganegaraan;	√	d. citizenship;
e. riwayat pendidikan;	√	e. education;
f. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f. history position, covering information on:
1. dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	1. legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
2. dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	2. legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
3. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	3. dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and
4. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	4. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	√	g. competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Commissioner during the year under review (if any);
h. hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	√	h. affiliation with other members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party; and
i. pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	√	i. statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);
9. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	√	9. In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
10. Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	82-88	10. Number of employees and description of the distribution of education level and age of the employee in the year under review;
11. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	223, 279	11. Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	223	a. shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	279	b. Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	N.A.	d. groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
12. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	223	12. number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
a. kepemilikan institusi lokal;	N.A.	a. ownership of local institutions;
b. kepemilikan institusi asing;	N.A.	b. ownership of foreign institutions;
c. kepemilikan individu lokal; dan	N.A.	c. ownership of local individual; and
d. kepemilikan individu asing;	N.A.	d. ownership of foreign individual;
13. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	223	13. information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
14. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	133-135	14. name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any); For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
15. kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	131	15. chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
16. kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	131	16. chronology of securities listing in addition to the said security in point 15), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);
17. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	136-137	17. name and address of capital market supporting institutions and/or professionals;
18. dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	136-137	18. in the event that the capital market supporting professionals provide services on a regular basis to the Issuer or the Public Company, then information on the services provided, fee and period of assignment should be disclosed; and
19. penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	18-21	19. awards and/or certification of national and international scales bestowed on the Issuer or Public Company during the last fiscal year (if any), covering:
a. nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	a. name of award and/or certification;
b. badan atau lembaga yang memberikan; dan	√	b. organization/institution that gives the awards; and
c. masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	√	c. award/certificate validity period (if any);
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	154-197	f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1. tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	156-164	1. operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	√	a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;
b. pendapatan/penjualan; dan	√	b. income/sales; and
c. profitabilitas;	√	c. profitability;



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai	165-180	2. comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	√	a. current assets, non-current assets, and total assets;
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	√	b. short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c. ekuitas;	√	c. equities;
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	√	d. sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e. arus kas;	√	e. cash flows;
3. kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	181	3. the capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	182	4. accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5. struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	183	5. capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	184	6. discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a. tujuan dari ikatan tersebut;	N.A.	a. the purpose of such ties;
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	N.A.	b. source of funds expected to fulfill the said ties;
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan	N.A.	c. currency of denomination; and
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	N.A.	d. steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	184-185	7. discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a. jenis investasi barang modal;	√	a. type of investment of capital goods;
b. tujuan investasi barang modal; dan	√	b. objective of the investment of capital goods; and
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	√	c. value of the investment of capital goods;
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	188	8. material information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	196-197	9. information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	186-187	10. comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a. pendapatan/penjualan;	√	a. income/sales;
b. laba (rugi);	√	b. profit (loss);
c. struktur modal (<i>capital structure</i>); atau	√	c. capital structure; or
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d. others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016:
Laporan Tahunan Perusahaan Publik
SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	186-187	11. target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a. pendapatan/penjualan;	√	a. income/sales;
b. laba (rugi);	√	b. profit (loss);
c. struktur modal (capital structure);	√	c. capital structure; or
d. kebijakan dividen; atau	√	d. dividend policy;
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	e. or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	193-195	12. marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	188	13. description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a. kebijakan dividen;	188	a. dividend policy;
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	N.A.	b. the date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	N.A.	c. amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar;	188	d. amount of dividend per year paid;
14. realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	188	14. use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	N.A.	a. during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	N.A.	b. in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	N.A.	15. material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, along others include:
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi;	N.A.	a. transaction date, value, and object;
b. nama pihak yang melakukan transaksi;	N.A.	b. name of transacting parties;
c. sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	N.A.	c. sifat hubungan Afiliasi (jika ada);
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	N.A.	d. description of the fairness of the transaction; and
e. pemenuhan ketentuan terkait;	N.A.	e. compliance with related rules and regulations;
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	188-190	16. changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	189-190	17. changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	200-365	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	200-365	Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
1. Direksi, mencakup antara lain:	246-250	1. the Board of Directors, covering:
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	√	a. the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;a) the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;
b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	√	b. statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c. prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	263-268	c. procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Directors, relation between remuneration and performance of the Issuer or Public Company;
d. kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	251-262	d. the policies and the frequency of the meeting of the Board of Directors, including the joint meeting with Board of Commissioners, and attendance of member of the Board of Directors in the said meeting;
e. informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	225-235	e. information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
1. keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√	1. AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
2. alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	√	2. explanation for the unrealized resolution;
f. informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	225-235	f. information on the resolution from the AGM of the year, covering:
1. keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√	1. AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
2. alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	√	2. explanation for the unrealized resolution;
g. penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	250	g. assessment of the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors
2. Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	236-245	2. the Board of Commissioners, cover:
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	√	a. duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	√	b. statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c. prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	263-268	c. Commissioners;procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration for each member of Board of
d. kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	251-262	d. policies and frequency of meeting of the Board of Commissioners, including meeting with the Board of Directors, and attendance of each member of the Board of Commissioners in the said meetings;
e. kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	233-236	e. policies of the Issuer or Public Company regarding the assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
1. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	√	1. procedure for the implementation of performance assessment;
2. kriteria yang digunakan; dan	√	2. criteria for assessment; and
3. pihak yang melakukan penilaian;	√	3. assessor;
f. penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	270-277	f. assessment on the performance of the committees under the Board of Commissioners; and



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016:
Laporan Tahunan Perusahaan Publik
SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
g. dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	301	g. in the event that the Board of Commissioners does not establish the Nomination and Remuneration Committee, then should contain at least:
1. alasan tidak dibentuknya komite; dan	√	1. reason not to establish the committee; and
2. prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	√	2. procedure of nomination and remuneration performed in the year under review;
3. Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N.A.	3. Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a. nama;	N.A.	a. name;
b. tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	N.A.	b. duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
c. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N/A	c. frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles of the Issuer or Public Company in the Capital Market;
4. Komite Audit, mencakup antara lain:	281-292	4. Audit Committee, among others covering:
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a. name and position in the committee;
b. usia;	√	b. age;
c. kewarganegaraan;	√	c. citizenship;
d. riwayat pendidikan;	√	d. education background;
e. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e. history of position; including:
1. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	1. legal basis for the appointment as member of the committee;
2. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
3. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f. periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	√	f. period and terms of office of the member of Audit Committee;
g. pernyataan independensi Komite Audit;	√	g. statement of independence of the Audit Committee;
h. kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	√	h. policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee;
i. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	i. education and/or training during the year under review (if any); and
j. pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	√	j. the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
5. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	293-300	5. another committee of the Issuer or the Public Company formed to support the function and duty of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee, containing:
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a. name and position in the Committee;
b. usia;	√	b. age;
c. kewarganegaraan;	√	d. citizenship;



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
d. riwayat pendidikan;	√	d. education background;
e. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e. history of position, including:
1. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	1. legal basis for the appointment as a member of the committee;
2. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of the committee, and other position (if any); and
3. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f. periode dan masa jabatan anggota komite;	√	f. period and terms of office of the member of Audit Committee;
g. uraian tugas dan tanggung jawab;	√	g. description of duty and responsibility;
h. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	√	h. the statement that the Committee has already had the Charter;
i. pernyataan independensi komite;	√	i. statement of independence of the Committee;
j. kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	√	j. policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
k. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	k. education and/or training during the year under review (if any); and
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	√	l. brief description on the activities of the committee;
6. Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	302-303	6. Corporate Secretary, including:
a. nama;	√	a. name;
b. domisili;	√	b. domicile;
c. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	c. history of position, including:
1. dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	√	1. legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
2. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d. riwayat pendidikan;	√	d. education background;
e. pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	√	e. education and/or training during the year under review; and
f. uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	√	f. brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
7. Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	304-310	7. Internal Audit Unit, among others including:
a. nama kepala Unit Audit Internal;	√	a. name of Head of Internal Audit Unit;
b. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	b. history of position, including:
1. dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan	√	1. legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
2. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	√	c. qualification or certification as internal auditor (if any);
d. pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	√	d. education and/or training during the year under review;
e. struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	√	e. structure and position of Internal Audit Unit;



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016:
Laporan Tahunan Perusahaan Publik
SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
f. uraian tugas dan tanggung jawab;	√	f. description of duties and responsibilities;
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	√	g. a statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h. uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	√	h. a brief description of on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;
8. uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	√	8. description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	√	a. financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	√	b. review on the effectiveness of internal control systems;
9. sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	√	9. risk management system implemented by the company, at least includes:
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a. general description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	√	b. types of risk and the management; and
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;
10. perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	311-316	10. important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others include:
a. pokok perkara/gugatan;	√	a. substance of the case/claim;
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan	√	b. status of settlement of case/claim; and
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
11. informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	326	11. information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
12. informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	318	12. information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a. pokok-pokok kode etik;	√	a. key points of the code of conduct;
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	√	b. socialization of the code of conduct and enforcement; and
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
13. informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	68-71	13. information about corporate culture (if any) of the Issuer or Public Company;
14. uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	178	14. description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:
a. jumlah saham dan/atau opsi;	N.A.	a. number of share and/or option;
b. jangka waktu pelaksanaan;	N.A.	b. period;
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	N.A.	c. the requirement for eligible employee and/or management; and
d. harga pelaksanaan;	N.A.	d. exercised price;
15. uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	321-325	15. description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
a. cara penyampaian laporan pelanggaran;	√	a. mechanism for violation reporting;
b. perlindungan bagi pelapor;	√	b. protection for the whistleblower;
c. penanganan pengaduan;	√	c. handling of violation reports;
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan	√	d. unit responsible for handling of violation report; and
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	√	e. results from violation report handling, at least includes:
1. jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	√	1. number of complaints received and processed during the fiscal year; and
2. tindak lanjut pengaduan;	√	2. follow up of complaints;
16. penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	N.A.	16. implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	N.A.	a. statement regarding the recommendation that has been implemented; and/or
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	N.A.	b. description of recommendation that has not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	368-391	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	√	1. Information on the social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company that covers policies, types of programs, and cost, among others related to:
a. lingkungan hidup, antara lain:	371-373	a. environment, among others:
1. penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	√	1. the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy;
2. sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. the waste treatment systems of the Issuer or Public Company;
3. mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	√	3. mechanism for filing a complaint on environmental issues; and
4. sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	√	4. environmental certifications;
b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	374-379	b. employment practices, occupational health and safety, among others:
1. kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	√	1. gender equality and equal work opportunity;
2. sarana dan keselamatan kerja;	√	2. work and safety facilities;
3. tingkat perpindahan (turnover) karyawan;	√	3. employee turnover;
4. tingkat kecelakaan kerja;	√	4. work incident rate;
5. pendidikan dan/atau pelatihan;	√	5. education and/or training;
6. remunerasi; dan	√	6. remuneration; and
7. mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	√	7. mechanism for filing complaint on employment issues;
c. pengembangan sosial dan masyarakat, antara lain:	380-386	c. social and community development, among others:
1. penggunaan tenaga kerja lokal;	√	1. the use of local work force;
2. pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	√	2. empowerment of local communities among others through the use of raw material produced by the community or by providing education;
3. perbaikan sarana dan prasarana sosial;	√	3. improvement of public social facilities and infrastructure;



Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016:
Laporan Tahunan Perusahaan Publik
SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
4. bentuk donasi lainnya; dan	√	4. other form of donation; and
5. komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	√	5. dissemination of the policies and procedures of anti-corruption at the Issuers or Public Company, and training on anti-corruption (if any);
d. tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	387-391	d. products and/or services responsibilities, among others:
1. kesehatan dan keselamatan konsumen;	√	1. consumers' health and safety;
2. informasi barang dan/atau jasa; dan	√	2. products and/or services information; and
3. sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	√	3. facilities, number, and resolution of consumer complaint.
2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	√	2. In the event that the Issuer or the Public Company imparts information on social and environmental responsibility as referred to in point 1) in separate report such corporate social and environmental responsibility report, or sustainability report, then the Issuers or the Public Company is excluded from disclosing information on social and environmental responsibility in Annual Report; and
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	√	3. The said report in point 2) should be submitted to the Financial Service Authority along with the Annual Report;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	437-615	i. Audited Annual Financial Statement Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with the statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislation in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislation in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	394-395	i. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

KRITERIA *ANNUAL REPORT AWARD* 2018
2018 Annual Report Award Criteria



Kriteria Annual Report Award 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Umum		
I. General		
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√	1. The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	√	2. The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:		3. The Annual Report shall present clear identity of the company Company name and the annual report financial year shall be presented on:
1. Sampul muka;	√	1. Front Cover;
2. Samping;	√	2. Side Cover;
3. Sampul belakang; dan	√	3. Back Cover; and
4. Setiap halaman.	√	4. Every page
5. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	5. Annual reports shall be displayed on the company's website, including the latest annual reports and at least the last 4 years.
4. Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan	√	4. The Annual Report shall be posted in the company's website
Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	Including the latest annual report as well as those for the last four years, at least.
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting		
II. Key Financial Highlights		
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	12-15	1. Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years
Informasi memuat antara lain:		Information contains the following:
1. Penjualan/pendapatan usaha;	√	1. Income;
2. Laba (rugi):	√	2. Profit (loss):
a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	√	a. Attributable to equity holders of the parent entity; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali;	√	b. Attributable to non controlling interest;
3. Penghasilan komprehensif periode berjalan :	√	3. Total comprehensive profit (loss):
a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	√	a. Attributable to equity holders of the parent entity; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan	√	b. Attributable to non controlling interest;
4. Laba (rugi) per saham.	√	4. Earning (loss) per share.
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.		Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	12-15	2. Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years
Informasi memuat antara lain:	√	Information contains the following:
1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;	√	1. Total investment on associates;
2. Jumlah aset;	√	2. Total assets
3. Jumlah liabilitas; dan	√	3. Total liabilities; and
4. Jumlah ekuitas.	√	4. Total equity.



Kriteria Annual Report Award 2018 2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	12-13	3. Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	N.A.	4. Share price information in tables and charts
1. Jumlah saham yang beredar;	N.A.	1. Number of shares outstanding;
2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:	N.A.	2. The table forms contain the following information:
a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	N.A.	a. Market capitalization based on the share price on the Stock Exchange where the share are listed;
b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	N.A.	b. Highest, lowest and closing the share price based on share price on the Stock Exchange where the share are listed; and
c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	N.A.	c. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed.
3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:	N.A.	3. The graph forms contain at least the following information:
a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	N.A.	a. The closing price of shares based on the share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and
b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	N.A.	b. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed
Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.		For each quarter in the latest 2 (two) financial years.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.		Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	N.A.	5. Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years
Informasi memuat:		Information contains:
1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding);	N.A.	1. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds;
2. Tingkat bunga/imbalance;	N.A.	2. Interest rate/yield;
3. Tanggal jatuh tempo; dan	N.A.	3. Maturity date; and
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.	N.A.	4. Rating of bonds/sukuk in 2015 and 2016.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/ sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan.		Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		III. Board of Commissioners and Board of Directors' Report
1. Laporan Dewan Komisaris	24-31	1. Board of Commissioners' Report
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;	25-26	1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation;
2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;	27	2. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration;
3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan	29	3. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and
4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	30-31	4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.



Kriteria *Annual Report Award* 2018 2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Laporan Direksi	38-51	2. Board of Directors' report
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:		1. Analysis of the company's performance, covering among others:
a. kebijakan strategis;	41-43	a. strategic policies;
b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	43-45	b. comparison between targets and achievements; and
c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;	45	c. challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges;
2. Analisis tentang prospek usaha;	45-46	2. Analysis on business prospects;
3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan	47	3. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and
4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	50	4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.
3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	394-395	3. Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	√	1. Signatures on a separate page;
2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	√	2. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report;
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan	√	3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	N.A.	4. Written explanation in a separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation a separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.
IV. Profil Perusahaan		IV. Company Profile
1. Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan <i>website</i> .	60	1. Name and complete address of the company Information contains, among others, name and address, postcode, telephone number, fax, email and website.
2. Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	62-65	2. Brief history of the company Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name. Note: to be disclosed if the company never had a change of name
3. Bidang usaha	66-71	3. Line of business
Uraian mengenai antara lain:		Description of, among others:
1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	66	1. The line of business as stated in the latest Articles of Association;
2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	66	2. Business activities; and
3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	67-71	3. Product and/or services offered.
4. Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	76-79	4. Organization structure Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least



Kriteria Annual Report Award 2018 2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup:	72-75	5. Vision, Mission and Corporate Culture Covers:
1. Visi perusahaan;	72	1. Vision;
2. Misi perusahaan;	72	2. Mission;
3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	72	3. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/Directors in the fiscal year; and
4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.	74	4. Statement on the corporate culture.
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	32-37	6. Profiles of members of the Board of Commissioners
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
1. Nama;	√	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
3. Umur;	√	3. Age;
4. Domisili;	√	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (study field and education institution);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	√	6. Work experience (position, company, and period in position); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	√	7. History of assignments (period and position) as a member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain:	52-57	7. Profiles of members of the Board of Directors Contain information on:
1. Nama;	√	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
3. Umur;	√	3. Age;
4. Domisili;	√	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (study field and education institution);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	√	6. Work experience (position, company, and period in position); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	√	7. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.
8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	80-104	8. Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization
Informasi memuat antara lain:		Information contains, among others:
1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	84-85	1. Number of employees at each level of the organization;
2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	86	2. Number of employees by education;
3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;	87	3. Number of employees by employment status;
4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan	89-99	4. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning the position of participants, type of training, and purpose of training; and
5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	100	5. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.



Kriteria Annual Report Award 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
9. Komposisi Pemegang saham	131,223,279	9. Shareholders composition
Mencakup antara lain:		Covering among others:
1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	N.A.	1. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage;
2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:	131,223	2. Details of shareholders and shareholding percentage:
a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan	N.A.	a. Names of shareholders with 5% or more shareholding; and
b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	N.A.	b. Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each.
3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.	279	3. Names of Director and Commissioner with direct or indirect share-ownership and the percentage of such shareholding.
Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.
10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	133-135	10. List of subsidiaries and/or associated entities
Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:		In table form, containing:
1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;	√	1. Name of subsidiary and/or associated entity;
2. Persentase kepemilikan saham;	√	2. Share-ownership percentage;
3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/ atau entitas asosiasi; dan	√	3. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and
4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	√	4. The operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/not yet in commercial operation).
11. Struktur grup perusahaan	132	11. Corporate group structure
Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	√	Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).
12. Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	131	12. Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year
Mencakup antara lain:		Covers, among others:
1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action);	N.A.	1. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action;
2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan	N.A.	2. Total number of shares outstanding following the corporate action; and
3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	N.A.	3. The stock exchange where the shares are listed.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if the company does not have the chronology of share listing.
13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	131	13. Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year
Mencakup antara lain:		Covers, among others:
1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;	N.A.	1. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date;
2. Nilai penawaran efek lainnya;	N.A.	2. Offering price of other securities;
3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan	N.A.	3. The stock exchange where the securities are listed; and
4. Peringkat efek.	N.A.	4. Rating of securities.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan	√	Note: should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/listing



Kriteria Annual Report Award 2018 2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	136-137	14. Name and address of supporting institutions and/or professionals
Informasi memuat antara lain:		Covers, among others:
1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;	√	1. Name and address of the company's Share Registrar;
2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan	√	2. Name and address of Public Accountant Firm; and
3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	√	3. Name and address of rating agencies.
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	18-21	15. Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels
Informasi memuat antara lain:		Covers, among others:
1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	1. Name of award and/or certification;
2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	2. Year received/issued;
3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	√	3. Name of institution that issued the award/certification; and
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	√	4. Validity period (certification).
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	146-148	16. Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any)
Memuat informasi antara lain:		Covers information on:
1. Nama dan alamat entitas anak; dan	√	1. Name and address of subsidiaries; and
2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.	√	2. Name and address of branch/representative office.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan		Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.
17. Informasi pada Website Perusahaan	149-150	17. Information in the corporate website
Meliputi paling kurang:		Covers at the very least:
1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	√	1. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder;
2. Isi Kode Etik;	√	2. Contents of the Code of Conduct;
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	√	3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, the summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, an announcement of summary GMS resolutions;
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);	√	4. Annual financial statements (last 5 years);
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	√	5. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	√	6. Board manual/Charter of the BoC. BoD, Committees and Internal Audit Unit.
18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	239, 249, 290-292	18. Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit
Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):		Cover at least information of type of training and participant of:
1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;	239	1. Training and/or education for Board of Commissioners;
2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;	249	2. Training and/or education for Board of Directors;
3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;	290-292	3. Training and/or education for Audit Committee;
4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	N.A.	4. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee;



Kriteria Annual Report Award 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;	298-300	5. Training and/or education for other Committee(s);
6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan	303	6. Training and/or education for Corporate Secretary; and
7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku.	308	7. Training and/or education for Internal Audit Unit. During the fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan		Note: should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		V. Management Discussion and Analysis on the Company Performance
1. Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai:	156-164	1. Operation review per business segment Includes analysis on:
1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	√	1. Elaboration on each business segment.
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:	√	2. Performance of each business segment, among others:
a. Produksi;	√	a. Production;
b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;	√	b. Increase/Decrease of production capacity;
c. Penjualan/pendapatan usaha; dan	√	c. Sales/income; and
d. Profitabilitas.	√	d. Profitability.
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:	165-180	2. Description on the Company's financial performance An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	166-168	1. Current assets, non-current assets, and total assets;
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;	168-170	2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;
3. Ekuitas;	170	3. Equity;
4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan	171-175	4. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and
5. Arus kas.	176-178	5. Cash flows.
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Penjelasan tentang:	181-182	3. Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry Explanation on:
1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan	√	1. Solvability, both short term and long term; and
2. Tingkat kolektibilitas piutang.	√	2. Level of receivables collectibility.
4. Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>) Penjelasan atas:	183	4. Discussion on capital structure, and management policy on capital structure Explanation of:
1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan	√	1. Details of capital structure comprising of interest-bearing debts/sukuk and equity;
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan	√	2. Capital structure policies; and
3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	√	3. Basis for the determination of capital structure policies.
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang:	184	5. Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year Explanation on:
1. Nama pihak yang melakukan ikatan;	N.A.	1. Parties in the commitments;
2. Tujuan dari ikatan tersebut;	N.A.	2. Objectives of the commitments;



Kriteria Annual Report Award 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	N.A.	3. Sources of funds to meet the commitments;
4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	N.A.	4. Denomination currency of commitments; and
5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	N.A.	5. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk.
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment to capital investments in the fiscal year.
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	184-185	6. Discussion on capital investment realized at the latest financial year
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Jenis investasi barang modal;	√	1. Type of capital investment;
2. Tujuan investasi barang modal; dan	√	2. Objectives of capital investment; and
3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	√	3. The nominal value of capital investment realized in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no capital investment.
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	186-187	7. Information on the comparison between initial target at the beginning of the financial year and the realization and target or the projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered a significant target for the company.
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan	√	1. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and
2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	√	2. Targets or projections set for the next 1 (one) year.
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	188	8. Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events)
Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.		Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future.
Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if there are no subsequent events.
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan	196-197	9. Business prospects
Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.		The description of on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources
10. Uraian tentang aspek pemasaran	193-195	10. Marketing aspects
Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar		The description of on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	188	11. The description of on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Kebijakan pembagian dividen;	√	1. Dividend payout policy;
2. Total dividen yang dibagikan;	N.A.	2. Total dividend disbursement;
3. Jumlah dividen kas per saham;	N.A.	3. Total cash dividend per share;



Kriteria Annual Report Award 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
4. Payout ratio; dan	N.A.	4. Payout ratio; and
5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun.	N.A.	5. Announcement date and cash dividend payout for each year.
Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	√	Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons.
12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	188	12. Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) still ongoing in the fiscal year
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;	N.A.	1. Number of ESOP/MSOP shares and its execution;
2. Jangka waktu;	N.A.	2. Period;
3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	N.A.	3. Eligible employee/management; and
4. Harga exercise.	N.A.	4. Exercise price.
Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if there are no such programs
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	188	13. Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report)
Memuat uraian mengenai:		Covers the following:
1. Total perolehan dana;	N.A.	1. Total proceeds;
2. Rencana penggunaan dana;	N.A.	2. Proceeds utilization plan;
3. Rincian penggunaan dana;	N.A.	3. Proceeds utilization details;
4. Saldo dana; dan	N.A.	4. Proceeds balance; and
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	N.A.	5. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any).
Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	188	14. Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties Covers the following:
Memuat uraian mengenai:		Covers the following:
1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;	N.A.	1. Name of transacting parties and the nature of related parties;
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	N.A.	2. Description of the transaction fairness;
3. Alasan dilakukannya transaksi;	N.A.	3. Transaction background;
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;	N.A.	4. Transaction realization at the last financial year;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan	N.A.	5. Company policy related with transaction review mechanism; and
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.	N.A.	6. Compliance to relevant regulations and provisions.
Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	√	Note: To disclose if there are no transactions.
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	188	15. Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company
Uraian memuat antara lain:		Covers information on:
1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	√	1. Name of regulations; and
2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	√	2. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts



Kriteria Annual Report Award 2018 2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	189-190	16. Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year
Uraian memuat antara lain:		Descriptions include among others:
1. Perubahan kebijakan akuntansi;	√	1. Changes in accounting policy;
2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	√	2. Reasons for the change; and
3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	√	3. Quantitative impact on the financial statements
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year
17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:	191-192	17. Information on business continuity Disclosures on:
1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	√	1. Significant issues on the company business continuity at the last financial year;
2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	√	2. Management assessment on point 1; and
3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.	√	3. Assumption implemented by the management in conducting the assessment.
Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.		Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences on the company's business continuity at the last financial year.
VI. Good Corporate Governance		
1. Uraian Dewan Komisaris	236-245	1. Description on the Board of Commissioners
Uraian memuat antara lain:		Covers the following:
1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;	237-238	1. Board of Commissioners responsibilities;
2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan	243	2. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and
3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	242-243	3. Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures)
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	245	2. Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners)
Meliputi antara lain:		Covers the following:
1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	245	1. Assignment criteria of Independent Commissioners; and
2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	245	2. Independence statement of each Independent Commissioner.
3. Uraian Direksi	246-250	3. Description on the Board of Directors
Uraian memuat antara lain:		Covers information on, among others:
1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	247-248	1. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;
2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan	250	2. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and
3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	250	3. Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)



Kriteria *Annual Report Award* 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	200-222	4. GCG implementation assessment for 2015, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors
Memuat uraian mengenai:		Covers the following:
1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;	√	1. Assessment criteria;
2. Pihak yang melakukan penilaian;	√	2. Assessor;
3. Skor penilaian masing-masing kriteria;	√	3. Assessment score on each criteria;
4. Rekomendasi hasil penilaian; dan	√	4. Recommendations on results of assessment; and
5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.		5. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations.
Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2015.
5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	263-268	5. Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors
Mencakup antara lain:		Covers the following:
1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;	√	1. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners;
2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;	√	2. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors;
3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;	√	3. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners;
4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;	√	4. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors;
5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan	√	5. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and
6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/ atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).	√	6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any).
Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.
6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	251-262	6. Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months)
Informasi memuat antara lain:		Covers among others:
1. Tanggal Rapat;	√	1. Date;
2. Peserta Rapat; dan	√	2. Attendance; and
3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	√	3. Agenda. Of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD.



Kriteria Annual Report Award 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.	223	7. Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder. Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders
Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	√	Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	278	8. Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholders
Mencakup antara lain:		Covers, among others:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;	√	1. The affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	√	2. The affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;	√	3. The affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan	√	4. The affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.	√	5. The affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder.
Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there is no affiliation relationship
9. Komite Audit	281-292	9. Audit Committee
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;	290-292	1. Name, position and tenure of audit committee members;
2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	290-292	2. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members;
3. Independensi anggota komite audit;	282	3. Independency of audit committee members;
4. Uraian tugas dan tanggung jawab;	283	4. Duties and responsibilities;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan	285-289	5. Brief report of audit committee activity; and
6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	283-285	6. Meeting frequency and attendance of audit committee.
10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	301	10. Nomination and/or Remuneration Committee
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	N.A.	1. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee;
2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;	N.A.	2. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	N.A.	3. Duties and responsibilities ;



Kriteria *Annual Report Award* 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/ atau remunerasi pada tahun buku;	N.A.	4. Brief report of committee activity in the fiscal year;
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	N.A.	5. Meeting frequency and attendance;
6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	N.A.	6. Statement of committee charter; and
7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	N.A.	7. Policies on Director succession.
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	293-300	11. Other committees under the Board of Commissioners
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	298-300	1. Name, position and brief profile of members of committee;
2. Independensi komite lain;	293-294	2. Independency of committee;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	294	3. Duties and responsibilities ;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan	297	4. Committee activity in the fiscal year; and
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	295-296	5. Committee meeting frequency and attendance.
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	302-303	12. Description of duties and functions of Corporate Secretary
Mencakup antara lain:		Information on, among others:
1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	303	1. Name and brief work experience of Corporate Secretary;
2. Domisili;	303	2. Domicile;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	302	3. Duties and responsibilities; and
4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	302-303	4. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.
13. Uraian mengenai unit audit internal	304-310	13. Description on Internal Audit Unit
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Nama ketua unit audit internal;	310	1. Name of internal audit unit head;
2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	310	2. Total employees (internal auditors) in internal audit unit;
3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	308	3. Certification on internal audit profession;
4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	304-305	4. Internal audit unit composition in the company's structure;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	309	5. Brief report on internal audit unit activity implementation; and
6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	304	6. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.
14. Akuntan Publik	311	14. Public Accountant
Informasi memuat antara lain:		Includes the following:
1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	1. Name and year of the public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years;
2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	2. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years;



Kriteria Annual Report Award 2018 2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	√	3. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and
4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	√	4. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year.
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		Note: to disclose if there are no other services rendered
15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	312-351	15. Description on risk management of the company
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	312-315	1. Explanation on risk management system implemented by the company;
2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	351	2. Explanation on risk management system effectiveness evaluation;
3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	315-350	3. Explanation on risks faced by the company; and
4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	315-350	4. Risk mitigation.
16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern	N.A.	16. Description of internal control system
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	N.A.	1. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control;
2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan	N.A.	2. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and
3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	N.A.	3. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.
17. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tata kelola Tanggung jawab sosial	368-372	17. Description on corporate social responsibility related to social responsibility governance.
1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial.	369	1. The Company's commitment on social responsibility.
2. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due dilligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan.	380	2. Information related to method and scope of due diligent on the impact of social, economic and environment of the company's activities.
3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan.	369	3. Information related to significant Stakeholders that impacted or influencing on the company's activities.
4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan.	369-373	4. Information related the essential issues of social economic and environment regarding the impact of the company activities.
5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban.	369	5. nformation related to the scope of corporate social responsibility as the company's responsibility or exceeding the company's obligation.
6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> .	368-370	6. Information related to the strategy and work program of the company in handling the issues of social, economic and environment as an manifestation of Stakeholders engagement and improving the value for Stakeholders and Shareholders.



Kriteria *Annual Report Award* 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab yang relevan dengan bisnis yang dijalankan.	386	7. Information related to the exceeding program as a minimum responsibility of the company in relevant with the operating business.
8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial.	386	8. Information related to the social responsibility funds and budgets of the company
18. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subjek Hak Azasi Manusia.	N.A.	18. Description of corporate social responsibility related to core subject of human rights.
1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjek Hak Azasi Manusia	N.A.	1. Information related to commitment and social responsibility policy in core subject of human rights.
2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjek Hak Azasi Manusia.	N.A.	2. Information related to the company's outline regarding social responsibility scope in core subject of human rights.
3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia	N.A.	3. Information related to corporate social responsibility planning in human rights
4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	N.A.	4. Information related to the implementation of CSR initiative in human rights
5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	N.A.	5. Information related to the achievement and reward of CSR initiative in human rights
19. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subjek Operasi yang adil	N.A.	19. Description of corporate social responsibility related to core subject of fairness operation
1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjek Operasi yang adil	N.A.	1. Information related to commitment and policy of social responsibility in core subject of fairness
2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjek operasi yang adil	N.A.	2. Information related to the company's outline regarding the scope of social responsibility in core subject of fairness
3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil	N.A.	3. Information related to corporate social responsibility planning in fairness operation.
4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	N.A.	4. Information related to the implementation of CSR initiative in fairness operation
5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	N.A.	5. Information related to the achievement and reward of CSR initiative in fairness operation
20. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang ;	371-373	20. Description on corporate social responsibility regarding environment, information disclosure is about:
1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan	371	1. Information related to commitment and policy of environment responsibility
2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan	372	2. Information related to the essential impact and risk of directly or indirectly environment in the company's operation
3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;	371	3. Information related to activities target/plan in 2018 determined by manajemen
4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan	372-373	4. Information related to the activities conducted and related to environmental programs that connected with the company's operational activities
5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup	372	5. Information related to the implementation of CSR initiative regarding environmental
6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.	372-373	6. Information related to quantitative impact on those operations; and such as the use of environmental friendly material and energy, waste management system of the company, environment complaint mechanism, environment aspect consideration in giving credit to customers, and others



Kriteria Annual Report Award 2018 2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	373	7. Environmental certification owned by the company
21. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang:	374-379	21. Description on corporate social responsibility related to occupational health and safety which covers information about:
1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan	374	1. The company's policy and commitment of social responsibility in core subject of employment
2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan	374	2. Information on the scope and outline of social responsibility in employment
3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;	374-375	3. Information on activities target/plan on 2018 determined by management; and
4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut	375-379	4. Activities conducted and quantitative impact on those activities
5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	375-379	5. Information related to occupational, health and safety practices, such as equality and job opportunity, facility and work safety, employee turnover, accident rate, remuneration and employment problem complaint, and etc.
22. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain:	387-391	22. Description on corporate social responsibility related to social responsibility in customers which covers:
1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan	387	1. Target/activities plan in 2018 determined by management;
2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut	387-391	2. Activities conducted and impact on those activities
3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	387-391	3. Related to product responsibility, such as customers health and safety, product information, facilities, the number and handling customer complaints and etc.
23. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang:	380-386	23. Description on corporate social responsibility related to community and social development, which includes information:
1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan	380	1. Policy and commitment related to corporate social responsibility in core subject of social and community development
2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan	380	2. Information related to relevant social issues with the Company
3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan	380-382	3. Information about social risks managed by management
4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan	380-382	4. The scope and minutes of information on social responsibility in social and community development
5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen	380-382	5. Target/activities plan in 2018 determined by management;
6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan	383-386	6. Activities conducted and impact on those activities
7. Biaya yang dikeluarkan	383-386	7. Cost distributed
8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	383-386	8. Related to social and community development, such as local labor absorption, local community development, public facilities improvement, other donation, communicating anti-corruption procedure and policy, anti-corruption training and others.



Kriteria *Annual Report Award* 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan, mencakup antara lain:	356	24. Significant cases currently being faced by the company, the entity, the active members of Board of commissioners and directors in reporting period, which includes;
1. Pokok perkara/gugatan;	√	1. Case/ Claim
2. Status penyelesaian perkara/gugatan;	√	2. Settlement status of litigation/claims;
3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	√	3. Impact to the company's condition; and
4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	√	4. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged)
Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		Note: in the case of an Corporate, a subsidiary, a member of the Board of Commissioners, and a member of the Board of Directors has no important case to disclose.
25. Akses informasi dan data perusahaan : Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	357	25. Access to company information and data : Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.
26. Bahasan mengenai kode etik, memuat uraian antara lain:	352-355	26. The description on code of ethic, which contains, among others
1. Pokok-pokok kode etik;	352-353	1. Contents of Code of Conduct;
2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	353	2. Disclosure of code of conduct application in all level of organization;
3. Penyebarluasan kode etik;	354	3. Code of conduct dissemination;
4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	355	4. Sanctions on code of conduct violations; and
5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	355	5. Number of violation and sanction in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.
27. Pengungkapan mengenai whistleblowing system	358-362	27. Disclosure on whistleblowing system
Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:		Includes the following mechanism of whistleblowing system:
1. Penyampaian laporan pelanggaran;	358-359	1. Violations report submission;
2. Perlindungan bagi whistleblower;	359-360	2. Whistleblowers protection;
3. Penanganan pengaduan;	360-361	3. Claims handling;
4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	362	4. Claims managers; and
5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	362	5. Total claims registered; and
6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.	362	6. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures.
Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	√	Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.



Kriteria Annual Report Award 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
28. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	269	28. Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition. Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied
VII. Informasi Keuangan		
VII. Financial Information		
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	394-395	1. Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements
Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	√	Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan	443	2. Independent auditor opinion on financial statements
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini	442-444	3. Independent Auditor Description in the Opinion
Deskripsi memuat tentang:		Description contains the following:
1. Nama dan tanda tangan;	√	1. Name & signatures;
2. Tanggal Laporan Audit; dan	√	2. Audit Report date; and
3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	√	3. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant
4. Laporan keuangan yang lengkap	445-450	4. Comprehensive financial statements
Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		Comprehensively covers the financial statements elements:
1. Laporan posisi keuangan;	√	1. Statements of financial position;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	√	2. Statements of comprehensive income and other comprehensive income;
3. Laporan perubahan ekuitas;	√	3. Statements of changes in equity;
4. Laporan arus kas;	√	4. Statements of cash flows;
5. Catatan atas laporan keuangan;	√	5. Notes to financial statements;
6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	√	6. Comparative information on previous periods; and
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	√	7. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).
5. Perbandingan tingkat profitabilitas	448	5. Profitability level comparison
Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya		Comparison of current profit (loss) with the previous year
6. Laporan Arus Kas	450	6. Statements of Cash Flows
Memenuhi ketentuan sebagai berikut:		Conformity to the following provisions:
1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	√	1. Grouping into three category of activities of operations, investment, and financing;
2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	√	2. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity;
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	√	3. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities;
4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	√	4. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.



Kriteria *Annual Report Award* 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	494-536	7. Summary of accounting policies
Meliputi sekurang-kurangnya:		Including at least:
1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	√	1. Compliance statement to SAK;
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	√	2. Basis of measurement and formulation of financial statements;
3. Pajak penghasilan;	√	3. Recognition of income and expense;
4. Imbalan kerja; dan	√	4. Employee benefits; and
5. Instrumen Keuangan.	√	5. Financial instrument.
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi	596-597	8. Disclosure of related parties transactions
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	√	1. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties;
2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	√	2. Transaction values and its percentage to total income and expense; and
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	√	3. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	549-553	9. Disclosure related to taxes
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	√	1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;
2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	√	2. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit;
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;	√	3. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is use as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	√	4. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	√	5. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	560-563	10. Disclosure related to fixed assets
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Metode penyusutan yang digunakan;	√	1. Used depreciation method;
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	√	2. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model;



Kriteria Annual Report Award 2018 2018 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	√	3. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	√	4. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	594-596	11. Disclosure related to operations segments
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;	√	1. General information covering factors used to identify reported segments;
2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;	√	2. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan	√	3. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and
4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	√	4. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	516-517	12. Disclosure related to Financial Instruments
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	√	1. Financial instrument classification;
2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;	√	2. Fair value of every financial instrument group;
3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;	√	5. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk;
4. Kebijakan manajemen risiko; dan	√	4. Risk management objectives and policies; and
5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	√	5. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.
13. Penerbitan laporan keuangan	440	13. Financial statements publication
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	√	1. Date of financial statements authorized for publication; and
2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	√	2. Parties responsible to authorize the financial statements.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Consolidated Financial Report

Halaman ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank



International member of:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA / ITS SUBSIDIARIES
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
DAN / AND
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Tanggal 31 Desember 2018, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir Tanggal pada Tanggal Tersebut)

As of December 31, 2018, and

for the Year Then Ended

(With Comparative as of December 31, 2017, and

for the Year Then Ended)

Nomor / Number : 00040/2.0821/AU.1/05/0112-1/1/IV/2019

Tanggal / Date : 22 April / April, 2019

HEAD OFFICE:

Graha Mandiri di/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia

Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081

Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com

NIKAP: 959/KM.1/2014



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Pages</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - iii	INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2018 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017 dan 01 Januari 2017/31 Desember 2016 - Reklasifikasi)	1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• Consolidated Statements of Financial Position (Balance Sheets) <i>As of December 31, 2018 (With Comparative as of December 31, 2017 and January 01, 2017/December 31, 2016 - Reclassification)</i>
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017)	3	<ul style="list-style-type: none">• Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income <i>For the Year Ended December 31, 2018 (With Comparative for the Year Ended December 31, 2017)</i>
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017)	4	<ul style="list-style-type: none">• Consolidated Statements of Changes in Equity <i>For the Year Ended December 31, 2018 (With Comparative for the Year Ended December 31, 2017)</i>
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Arus Kas Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017)	5	<ul style="list-style-type: none">• Consolidated Statements of Cash Flows <i>For the Year Ended December 31, 2018 (With Comparative for the Year Ended December 31, 2017)</i>
<ul style="list-style-type: none">• Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan 01 Januari 2017/31 Desember 2016 - Reklasifikasi dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)	6 - 163	<ul style="list-style-type: none">• Notes to Consolidated Financial Statements <i>As of December 2018 and for the Year Then Ended (With Comparative as of December 31, 2017, and January 01, 2017/December 31, 2016, - Reclassification, and for the Year Then Ended)</i>
Informasi Tambahan:		Additional Information:
LAPORAN KEUANGAN POKOK PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)		FINANCIAL STATEMENTS OF PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
(Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri)		(Financial Information - Parent Entity Only, As a Separate Financial Statements)
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan 01 Januari 2017/31 Desember 2016 - Reklasifikasi dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)		<i>As of December 31, 2018 and for the Year Then Ended (With Comparative as of December 31, 2017, and January 01, 2017/December 31, 2016, and for the Year Then Ended)</i>
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk Saja	1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• Statements of Financial Position (Balance Sheets) - Parent Only
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja	3	<ul style="list-style-type: none">• Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Only
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja	4	<ul style="list-style-type: none">• Statements of Changes in Equity - Parent Only
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Arus Kas - Induk Saja	5	<ul style="list-style-type: none">• Statement of Cash Flows - Parent Only



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI/
MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER**



PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Kantor Pusat | Jl. Gajah Mada No. 14, Jakarta 10130
T. +62-21-6334342 (Hunting) | F. +62-21-63854130
Call Center : (021) 162 | www.pelni.co.id |
Email: infopelni162@pelni.co.id |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB BATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Insan Purwarisya L Tobing
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta I0130
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Albezia VII G RT.005/RW.012 Cipinang, Pujo Gadung
Jakarta Timur
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Tri Andayani
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta I0130
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Serdang I No 46 Duren Sawit, Jakarta Timurn
Jabatan : Direktur Keuangan

Manyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2019



Insan Purwarisya L Tobing
Direktur Utama

Tri Andayani
Direktur Keuangan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REPORT***



International member of:



Nomor :

00040/2.0821/AU.1/05/0112-1/1/IV/2019

: Number

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)**

**The Shareholders,
Boards of Commissioners and Directors
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

We have audited the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries attached, consisting of statement of financial position (balance sheet) the consolidated dated December 31, 2018, as well as the income statement and earnings other comprehensive consolidated statement of changes in consolidated shareholders' equity, and flows consolidated cash for the year ended on that date; and an overview of the significant accounting policies and other explanatory information. We also conduct tests of adherence to laws and regulations and internal control direct and material effect on the consolidated financial statements.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Manajemen juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Management is responsible to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect to fairly presentation of these consolidated financial statements.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Auditor's responsibility

Our responsibilities are to express an opinion on such consolidated financial statements, and compliance to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect on the financial statements presentation based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and examination standards established by The Financial Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement, and compliance to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect on the present fairly to the accompanying consolidated financial statements enclosed.

HEAD OFFICE:

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia

Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081

Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com

NIUKAP: 959/KM.1/2014



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya. Suatu audit juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Selain itu, juga mencakup pengujian atas kepatuhan entitas terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perseroan telah melakukan reklasifikasi atas beberapa akun laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan awal tahun 2017 untuk tujuan keterbandingan laporan keuangan konsolidasian dengan melakukan reklasifikasi akun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Laporan keuangan tersendiri (induk saja) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasi terlampir, yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves the implementation of procedures to obtain audit evidence about the numbers and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement in the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In assessing such risks, the auditor considers internal control relevant to the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements of the entity to design audit procedures that are appropriate condition. An audit also includes evaluating the accuracy of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as the evaluation of the consolidated financial statements as a whole. Moreover, it also includes testing for compliance entity to the contract, the terms of the help and specific provisions of the legislation, and compliance with internal control.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

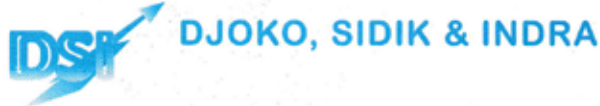
In our opinion, the consolidated financial statements attached present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in Note 39 to the accompanying consolidated financial statements, the Company has reclassified several consolidated financial position (balance sheet) statement accounts as of 31 December 2017 and early 2017 for the purpose of comparative consolidated financial statements by reclassifying accounts as required in the Financial Accounting Standards in Indonesia. Our opinion is not modified in this regard.

Others

Our audit the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended attached conducted to formulate an opinion on the consolidated financial statements as a whole. Separate financial statements (parent only) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) attached, which consists of a statement of financial position (balance sheet) dated December 31, 2018, as well as the income statement and earnings other comprehensive, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, is presented as additional information of the consolidated financial statements, which are presented for purposes of additional analysis of the accompanying consolidated financial statements are required under Indonesian Financial Accounting Standards.

**DJOKO, SIDIK & INDRA**

Informasi keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan - Entitas Induk saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan - Entitas Induk saja sebagai laporan Keuangan Tersendiri disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dalam rangka laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statement is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statements has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statement based on Auditing Standard established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statements present fairly, in all material respects, in the framework of the accompanying consolidated financial statements as a whole.

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan nomor laporan DSI.IS/HO/045.PELNI-LAI/18 tanggal 5 April 2018.

The Consolidated Financial Statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries on December 31, 2017 and for the year then ended have been audited by other independent auditors with unmodified opinions in accordance with report number DSI.IS/HO/045.PELNI-LAI/18 dated 5 April 2018.

Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern

The report on compliance with laws and regulations and internal control

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan kepada manajemen dalam laporan kami No. 00023/2.0821/ASS-LAK.UU/05/0112-1/1/IV/2019, tanggal 22 April 2019 dan No. 00024/2.0821/ASS-LAK.PI/05/0112-1/1/IV/2019, tanggal 22 April 2019.

Compliance with laws and regulations and internal control we issued to management in our report number 00023/2.0821/ASS-LAK.UU/05/0112-1/1/IV/2019, dated April 22, 2019 and number 00024/2.0821/ASS-LAK.PI/05/0112-1/1/IV/2019, April 22, 2019.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA

DJOKO, SIDIK & INDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Drs. Djoko Sutardjo, Ak., CA., CPA. *DS*
NRAP / Public Accountant License AP. 0112

22 April / April, 2019

NOTICE TO READERS

The above auditor's report and the accompanying financial statements are English translations of the Indonesian auditor's report and financial statements enclosed prepared for and used in Indonesia. The accompanying financial statements were prepared using accounting principles, procedures and reporting practices generally accepted in Indonesia and are not intended to present the financial positions, financial performances and their cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements are conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.



LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT*



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(NERACA) KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)**
As of December 31, 2018
(With Comparative as of December 31, 2017)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/Notes	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017 *)	01 Jan./Jan. 2017/ 31 Desember/ December 2016 *)		
ASET				ASSETS	
Aset Lancar				Current Assets	
Kas dan Setara Kas	4c; 4g; 4k; 6	1.521.886.980.235	1.338.781.110.919	885.614.536.588	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha (Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.7.899.955.168, Rp.4.727.279.135 dan Rp.8.199.684.373)	4g; 4k; 7	254.308.545.052	204.786.564.118	272.795.406.111	Accounts Receivables (Net of provision for impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively Rp.7.899.955.168, Rp.4.727.279.135 and Rp.8.199.684.373)
Aset Keuangan Lancar Lainnya (Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.176.105.864, Rp.174.460.475 dan Rp.222.551.921)	4g; 4i; 4k; 8	490.899.530.772	649.901.221.742	856.018.628.204	Other Current Financial Assets (Net of provision provision for impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively Rp.176.105.864, Rp.174.460.475 and Rp.222.551.921)
Persediaan	4o; 9	474.549.818.547	473.077.781.262	462.927.981.397	Inventories
Pajak Dibayar Dimuka	4y; 10a	49.309.224.102	33.256.903.830	22.151.702.943	Prepaid Taxes
Uang Muka	4p; 11	65.967.774.304	42.912.175.985	25.443.019.319	Advances Payment
Biaya Dibayar Dimuka	4p; 12	29.379.297.808	22.732.479.729	17.619.757.767	Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar		2.886.301.170.820	2.765.448.237.585	2.542.571.032.329	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non - Current Assets
Properti Investasi (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.8.661.038.915, Rp.8.287.437.967 dan Rp.7.913.837.023)	4q; 4s; 13	108.366.500.000	9.009.866.558	9.383.467.502	Investment Properties (Net of accumulated depreciation and impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively for Rp8.661.038.915, Rp.8.287.437.967 and Rp.7.913.837.023)
Alat Produksi (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.5.197.459.401.632, Rp.4.859.148.638.141 dan Rp.4.553.569.324.712)	4r; 4s; 14	3.048.365.774.736	3.205.175.256.051	3.228.703.512.764	Production Equipment (Net of accumulated depreciation and impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively Rp.5.197.459.401.632, Rp.4.859.148.638.141 and Rp.4.553.569.324.712)
Aset Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.417.711.187.982, Rp.379.570.050.702 dan Rp.356.264.486.602)	4r; 4s; 4v; 15	438.700.132.625	378.332.742.302	368.822.279.757	Fixed Assets (Net of accumulated depreciation and impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively Rp.417.711.187.982, Rp.379.570.050.702 and Rp.356.264.486.602)
Aset Tidak Berwujud	4s; 4t; 16	28.435.630.520	21.690.120.173	4.535.792.088	Intangible Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	4j; 4r; 4s; 17	305.678.011	1.215.907.402	11.528.979.765	Other Non Current Assets
Aset Pajak Tangguhan	4y; 10d	51.363.032.618	51.192.067.682	46.097.154.851	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.675.536.748.510	3.666.615.960.168	3.669.071.186.727	Total Non Current Assets
TOTAL ASET		6.561.837.919.330	6.432.064.197.753	6.211.642.219.056	TOTAL ASSETS

*) Reklasifikasi, Lihat Catatan 39

*) Reclassification, See Note 39

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(NERACA) KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)**
As of December 31, 2018
(With Comparative as of December 31, 2017)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/Notes	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017 *)	01 Jan./Jan. 2017/ 31 Desember/ December 2016 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Jangka Pendek					Short-Term Liabilities
Utang Usaha	4g; 4l; 18	165.434.166.928	155.769.014.125	157.386.238.502	Accounts Payable
Beban Akrua	4l; 4u; 19	63.899.122.286	171.423.202.038	219.932.451.249	Accrued Expenses
Utang pajak	4y; 10b	63.382.419.211	63.470.575.859	51.601.453.326	Tax Payable
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	4g; 4l; 22; 23	54.376.603.506	33.571.237.683	40.085.652.287	Current Portion of Long Term Liabilities
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	4l; 4t; 20	51.383.229.687	49.554.163.437	48.640.623.848	Prepaid Revenues/ Deposit/Deposit Guarantee
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	4g; 4l; 21	46.311.243.860	52.357.538.981	72.557.027.154	Other Short Term Financial Assets
Sub Jumlah		444.786.785.478	526.145.732.123	590.203.446.366	Sub Total
Liabilitas Jangka Panjang					Long-Term Liabilities
Utang Non Usaha Jangka Panjang	4g; 4l; 22	31.113.840.160	37.687.297.741	43.523.055.567	Long-Term Non Operating Payables
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	4g; 4l; 23	67.131.464.234	29.840.753.913	35.546.791.937	Long-Term Financial Institution and Bank Loan
Liabilitas Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	4x; 24	125.753.592.383	134.742.481.003	78.574.423.843	Long Term Employee Benefits
Sub Jumlah		223.998.896.777	202.270.532.657	157.644.271.347	Sub Total
Jumlah Liabilitas		668.785.682.255	728.416.264.781	747.847.717.713	Total Liabilities
Ekuitas					Equity
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, Modal dasar 13.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.065.092 saham per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016	1.1.3;25	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	Capital Stock - par value of Rp.1000.000 per share, Authorized - 13.000.000 share Issued and fully paid - 7.065.092 shares as of December 31, 2018, 2017 and 2016
Penyertaan Modal Pemerintah	26	564.951.174.642	564.951.174.642	564.951.174.642	Government Equity
Cadangan	4z; 27	689.012.343.748	412.593.309.420	164.190.404.982	Reserves
Saldo Rugi (Defisit)	4z; 28	(2.323.632.341.006)	(2.250.844.492.726)	(2.278.860.622.616)	Retained Earnings (Deficits)
Komponen Ekuitas Lainnya	4x; 29	(104.755.741.217)	(89.998.650.964)	(52.980.133.140)	Other Component Equity
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		5.890.667.436.167	5.701.793.340.372	5.462.392.823.869	Total equity attributable to owners of the company
Kepentingan Non Pengendali	4j; 30	2.384.800.908	1.854.592.600	1.401.677.474	Non-Controlling Interest
Jumlah Ekuitas		5.893.052.237.075	5.703.647.932.972	5.463.794.501.343	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		6.561.837.919.330	6.432.064.197.753	6.211.642.219.056	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

*) Reklasifikasi, Lihat Catatan 39

*) Reclassification, See Note 39

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Year Ended December 31, 2018
(With Comparative for the Year Ended
December 31, 2017)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
Pendapatan Usaha	4.609.235.210.122	4u; 31	4.415.691.596.174	Operating Revenues
Reduksi Pendapatan Usaha	(15.922.131.296)	4u; 31	(20.846.904.014)	Reduction in Operating Revenues
Pendapatan Usaha Bersih	4.593.313.078.826		4.394.844.692.160	Net Operating Revenues
Beban Pokok Usaha	4.010.771.544.004	4u; 32	3.652.043.994.978	Operating Expenses
Laba Kotor	582.541.534.822		742.800.697.182	Gross Profit
Beban Pemasaran dan Distribusi	35.518.329.585	4u; 33	23.151.835.641	Distribution and Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	471.911.710.583	4u; 34	457.368.737.599	General and Administrative Expenses
Laba Usaha	75.111.494.654		262.280.123.943	Operating Profit
Pendapatan Non Usaha, Bersih	215.534.799.370	4u; 35	95.046.791.560	Non Operating Income, Net
Laba Sebelum Pajak	290.646.294.024		357.326.915.503	Profit Before Tax
Manfaat (Beban) Pajak				Tax Benefits (Expense)
Beban Pajak Kini	(86.590.922.135)	4y; 10c	(85.431.483.847)	Current Tax Expenses
Manfaat Pajak Tangguhan	118.327.040	4y; 10d	4.986.061.877	Deferred Tax Benefits
Jumlah Beban Pajak	(86.472.595.095)		(80.445.421.970)	Total Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	204.173.698.929		276.881.493.533	Profit for the Current Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss
- Keuntungan (Kerugian) Akturia	(14.757.090.253)	4x	(37.429.500.261)	Actuarial Gain (Loss) -
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	189.416.608.676		239.451.993.272	Total Comprehensive Income of The Current Year
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				Profit for the Current Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	203.631.186.048	4d; 4j	276.419.034.328	Owner of the Company
Kepentingan Nonpengendali	542.512.881	4d; 4j	462.459.205	Non-Controlling Interest
Laba Tahun Berjalan	204.173.698.929		276.881.493.533	Profit for Current Year
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:				Total Comprehensive Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	188.874.095.795	4d; 4i	238.989.534.067	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	542.512.881	4d; 4i	462.459.205	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif	189.416.608.676		239.451.993.272	Total Comprehensive Income
Laba Bersih Per Saham Dasar	28.822,16	4w	39.124,62	Basic Earnings Per Share

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole



PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2018
(With Comparative for the Year Ended December 31, 2017)
(Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Additional Paid In Capital	Penyerahan Modal Pemerintah/ Government Capital	Cadangan/ Reserve	Saldo Rugi (Defisit)/ Retained Earnings (Deficits)	Komponen Ekuitas lainnya/ Other Equity Components	Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo Akhir per 31 Desember 2016/Ending Balance as of December 31, 2016	7.065.092.000.000	564.951.174.642	164.190.404.981	(2.278.860.622.615)	(52.980.133.139)	1.401.677.473	5.463.794.501.342
Laba Tahun Berjalan/Profit for the Current Year	-	-	-	276.419.034.328	-	462.459.205	276.881.493.533
Cadangan/Reserve	-	-	248.402.904.439	(248.402.904.439)	-	-	-
Penyaluran Program PKBL / PKBL Program Distribution	-	-	-	-	(37.429.500.261)	-	(37.429.500.261)
Kerugian Aktuaria/Actuarial Losses	-	-	-	-	410.982.436	(9.544.078)	401.438.358
Reklasifikasi/Reclassification	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2017/Ending Balance as of December 31, 2017	7.065.092.000.000	564.951.174.642	412.593.309.420	(2.250.844.492.726)	(89.998.650.964)	1.854.592.600	5.703.647.932.972
Laba Tahun Berjalan/Profit for the Current Year	-	-	-	203.631.186.048	-	542.512.881	204.173.898.929
Cadangan/Reserve	-	-	276.419.034.328	(276.419.034.328)	-	-	-
Penyaluran Program PKBL / PKBL Program Distribution	-	-	-	-	(14.757.090.253)	-	(14.757.090.253)
Kerugian Aktuaria/Actuarial Losses	-	-	-	-	-	(12.304.573)	(12.304.573)
Penyesuaian/Adjustment	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2018/Ending Balance as of December 31, 2018	7.065.092.000.000	564.951.174.642	689.012.343.748	(2.323.632.341.006)	(104.755.741.217)	2.384.800.908	5.893.052.237.076

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA****LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018

(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES****CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For The Year Ended December 31, 2018

(With Comparative for The Year Ended December 31, 2017)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2018	2017	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan	2.554.352.862.912	2.251.600.111.268	Receipt from Customer
Penerimaan <i>Public Service Obligation</i> dan Subsidi	2.403.998.420.099	2.461.769.659.728	Receipt from Public Service Obligation and Subsidy
Pembayaran kepada Pemasok	(3.615.028.381.520)	(3.685.537.235.345)	Payment to Suppliers
Penerimaan Kas Lain-lain	90.133.634.164	58.865.649.640	Others Cash Receipt
Pembayaran Biaya Operasional	(782.389.799.216)	(495.157.387.845)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Biaya Overhead	(76.776.562.279)	(21.902.907.842)	Payment of Overhead Expenses
Pembayaran Biaya Lain-lain	(16.043.313.429)	(64.074.590.632)	Payment of Other Expenses
Penerimaan Uang Jaminan dari Pelanggan	3.823.358.528	3.938.351.294	Receipt of Cash Collateral from Customer
Pembelian Persediaan	(13.536.488.215)	(5.928.989.525)	Purchase of Supplies
Penerimaan bunga	27.171.033.253	42.694.350.966	Interest Receipt
Pembayaran bunga pinjaman	(4.635.559.863)	(3.399.321.678)	Payment of Interest Loan
Pembayaran pajak	(114.380.774.251)	(103.606.112.553)	Tax Payment
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktifitas Operasi	456.688.430.181	439.261.577.476	Net Cash Provided from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Cash Flows from Investing Activities
Hasil Penjualan Aktiva Tetap	-	11.818.181.818	Sale of Fixed Assets
Perolehan Aset Sewa Guna Usaha	(4.081.133.557)	-	Purchase of Leases for Assets
Perolehan Aset Tetap	(279.199.223.995)	(255.874.864.846)	Purchase of Fixed Assets
Perolehan Aset Dalam Konstruksi	(57.680.567.005)	(70.411.551.464)	Construction in Progress
Perolehan Aset Tak Berwujud	(14.589.274.009)	(5.403.564.630)	Purchase of Intangible Assets
Perolehan Aset Lain-lain	(241.501.980)	(3.554.408.000)	Purchase of Other Assets
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktifitas Investasi	(355.791.700.546)	(323.426.207.122)	Net Cash Used in Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan (Pembayaran) Utang Bank	97.048.321.884	-	Receipt (Payment) Bank Loan
Pembayaran Deviden	(1.435.182.648)	-	Payment of Dividen
Pembayaran Utang Bank	(11.074.012.555)	(13.087.284.628)	Payment of Bank Loan
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktifitas Pendanaan	84.539.126.681	(13.087.284.628)	Net Cash Provided from (Used in) Financing Activities
PENINGKATAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	185.435.856.316	102.748.085.726	INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.704.346.345.935	1.601.598.260.209	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.889.782.202.251	1.704.346.345.935	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM**1.1. Pendirian Perusahaan**

Berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PERPUSKA).

Pada tanggal 28 April 1952 Yayasan PEPUSKA resmi dibubarkan. Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952.

Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Usaha. Pada tahun 1961 pemerintah menetapkan perubahan status dari Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (PN) dan dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. Kemudian pada tahun 1975 status perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PELNI sesuai dengan Akte Pendirian No. 31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Berita Negara RI No. 562-1976 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 1976. Dan Akte Perubahan No. 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 No. 31 tambahan Berita Negara No.2203.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dituangkan dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., SpN. No. 01, tanggal 16 Januari 2014 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-02312.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

- Pengadaan armada dan kelengkapannya untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal dan pelayaran yang melayani potensi pasar.
- Menjalankan kegiatan keagenan usaha pelayaran.

1. GENERAL**1.1. Company Establishment**

PT PELNI (Persero) was started when the Decree of Three Ministers was issued by the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on 5th September 1950, about the establishment of the Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PERPUSKA).

On 28th April 1952, Yayasan PEPUSKA was officially closed down. At the same time, PT PELNI (Persero) was founded based on the Decree of the Minister of Transportation No.M.2/1/2 on 28th February 1952 and No.A.2/1/2 on 19th April 1952, and by the National Gazette of Indonesian Republic No.50 on 20th June 1952.

The company experienced several changes in its business entity. In 1961, government of Indonesia changed the status from Limited Liability Company to be State Owned Company (PN) and was stated in the National Gazette of the Indonesia Republic No. LN 1961. Then, in 1975 the status was again changed into the Perseroan Terbatas (PT) PELNI based on the Articles of Incorporation No.31 on 30th October 1975. The amendment is stated in RI State Gazette No. 562-1976 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60 dated 27 June 1976. And Deed of Amandement No.22 on 4th March 1998 about Articles Association of PT PELNI (Persero) which was published on the National Gazette of Indonesian Republic on 16th April 1999 No.31 and in Supplement of State Gazette of Indonesian Republic No.2203.

The latest amendment of the Articles of Association of the Company is filed by the Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., SpN. No. 01 dated January 16, 2014 which has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-02312.AH.0102 year 2014 dated January 23,

1.2. Purposes and Objectives

Purposes and objectives of the Company are:

- Fleet procurement and apparatus for organizing the transport of passengers and goods by scheduled and cruise shipping networks that serve the market potential.*
- Cater a business shipping agency activities.*



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah: (lanjutan)

- c. Melakukan kegiatan operasi terminal, perdagangan, rute dan ekspedisi/forwarding.
- d. Melakukan kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dock/reparsi kapal.
- e. Melakukan kegiatan charter dan broker kapal.
- f. Kegiatan jasa konsultasi, pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pelayaran dan pelayanan kesehatan.

1.3. Modal

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% Penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta Notaris Ida Adiningsih,SH tanggal 01 Februari 2016 yang telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 Tahun 2016 tanggal 02 Februari 2016. Penambahan modal dasar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 melalui konversi uang pokok Subsidiary Loan Agreement (SLA) serta kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Drs.Bambang Mudjiono & Widiarto sebagaimana suratnya No.LAI_AU-015/KAP.BM&W/BM/IV/2016.

1.4. Tempat dan Kedudukan

Perseroan berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.19/3/SK/HKO.01/2016, tanggal 19 Januari 2016, Perseroan memiliki 45 Cabang operasional, 114 Terminal point, 1 cabang khusus di Singapura dan 2 *Strategic Business Unit* (Galangan Surya Surabaya dan Hotel Bahtera Cipayung).

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-264/MBU/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

1.2. Purposes and Objectives (continued)

Purposes and objectives of the Company are: (continued)

- c. Conducting terminal operation, trade, service and expedition / forwarding.*
- d. Perform maintenance services business activities and ship dock business/repair ships.*
- e. Do charter activities and ship broker.*
- f. Event consulting services, education and training related to the shipping business and health care.*

1.3. Capital

Share Capital paid to the entity is a 100% government participation in accordance with the Notarial Deed Ida Adiningsih SH, dated February, 01, 2016 which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 Year 20016 dated February 02, 2016. The addition of authorized capital was sourced from Transfer of State Assets sourced from Money Conversion Subsidiary Loan Agreement (SLA) and part of capitalized reserves PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) until the year 2015 audited by KAP Drs.Bambang Mudjiono & Widiarto as its letter No. LAI_AU-015/KAP.BM&W/BM/IV/2016.

1.4. Place and Domicile

The Company domiciled in Gajah Mada No. 14, Central Jakarta.

By virtue of Decree No. 01.19/3/SK/HKO.01/2016, dated Januari 19, 2016, the Company has 45 operational branches, 114 Terminal point, 1 special branch in Singapore and two Strategic Business Units (Galangan Surya Surabaya and Hotel Bahtera Cipayung).

1.5. Board of Commissioners and Directors

Board of Commissioners

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises no. SK-264 / MBU / 12/2017 dated December 4, 2017, the composition of the Board of Commissioners for the fiscal year 2017 is as follows:

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)**1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)****Dewan Komisaris (lanjutan)**

Komisaris Utama	:	Leon Muhamad	:
Komisaris Independen	:	Johanes Widodo Hario Mumpuni	:
Komisaris	:	Sudarto	:
Komisaris	:	Satya Bakti Parikesit	:
Komisaris	:	Raldi Hendro T. Koestoer	:

Selanjutnya mendasar pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-48/MBU/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan No. SK-206/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 susunan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Bambang Prihartono	:
Komisaris Independen	:	Johanes Widodo Hario Mumpuni	:
Komisaris	:	Sudarto	:
Komisaris	:	Satya Bakti Parikesit	:
Komisaris	:	Danang Parikesit	:
Komisaris	:	Raldi Hendro T. Koestoer	:

Remunerasi Dewan Komisaris diberikan sesuai dengan Risalah RUPS PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Laporan Keuangan dan mengacu kepada peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Badan Usaha Milik Negara. Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya keagamaan, transportasi, komunikasi dan santunan purna jabatan dan tunjangan transportasi. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas kesehatan, bantuan hukum dan perkumpulan profesi.

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pemegang Saham

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1. GENERAL (continued)**1.5. Board of Commissioners and Directors (continued)****Board of Commissioners (continued)**

Chief Commissioner	:	Leon Muhamad	:
Independent Commissioner	:	Johanes Widodo Hario Mumpuni	:
Commissioner	:	Sudarto	:
Commissioner	:	Satya Bakti Parikesit	:
Commissioner	:	Raldi Hendro T. Koestoer	:

The next fundamental on the decision of the Minister of State-owned enterprises no. Decree 48/MBU/02/2018 February 19 and no. SK-206/MBU/07/2018 2018 on July 12, the order of the Board of Commissioners for the year 2018, as follows:

Chief Commissioner	:	Bambang Prihartono	:
Independent Commissioner	:	Johanes Widodo Hario Mumpuni	:
Commissioner	:	Sudarto	:
Commissioner	:	Satya Bakti Parikesit	:
Commissioner	:	Danang Parikesit	:
Commissioner	:	Raldi Hendro T. Koestoer	:

The remuneration of the Board of Commissioners is granted in accordance with the Minutes of Shareholders Meeting of PT PELNI (Persero) on the Approval of the Annual Report of Ratification of Financial Statements and refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: PER: 04 / MBU / 2014 dated March 10, 2014 on Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners and Shareholders of State-Owned Enterprises. The remuneration of the Board of Commissioners consists of salaries / honoraria, allowances comprising religious holidays, transportation, communication and post-employment benefits and transportation allowances. The facilities provided are health facilities, legal aid and professional associations.

Affiliate Relations between Board of Commissioners, Directors and Shareholders

All members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) act independently and free from intervention from any party and have no financial relationship, management, share ownership, and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/ or the controlling shareholders or relationship with the company that could affect its ability to act independently.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Dewan Komisaris (lanjutan)

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris dengan
Direksi dan Pemegang Saham

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Tahun 2018 dan 2017, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Nani Sukamto.

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat independen dan mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

1. GENERAL (continued)

**1.5. Board of Commissioners and Directors
(continued)**

Board of Commissioners (continued)

Affiliate Relations between Board of
Commissioners, Directors and Shareholders

All members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) act independently and free from intervention from any party and have no financial relationship, management, share ownership, and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/ or the controlling shareholders or relationship with the company that could affect its ability to act independently.

Dual Positions

All members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) should not hold concurrent position which is prohibited by regulation.

In supporting the implementation of the function and effectiveness of the Board of Commissioners role, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners. In 2018 and 2017, the Secretary of the Board of Commissioners is held by Nani Sukamto.

The Audit Committee

The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners established by the Board of Commissioners as mandated by Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. The Audit Committee serves to assist the Board in carrying out its supervisory duties. The Audit Committee is independent and self-sufficient, both in the execution of its duties and reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders (RUPS). Audit Committee member terms should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association of the Company and may be reelected only for one (1) term.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Dewan Komisaris (lanjutan)

Komite Audit (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. Kep-07/DK/XII-2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Audit tahun buku 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Ketua Komite Audit			<i>Chairman of Audit Committee</i>
(merangkap Komisaris Independen)	: Johannes Widodo Hario Mumpuni	:	<i>(also as Independent Commissioner)</i>
Anggota	: Joko Murdyono	:	<i>Members</i>
Anggota	: Subagio	:	<i>Members</i>

Pelaksanaan tugas Komite Audit PT PELNI (Persero) berlandaskan pada Piagam Komite Audit yang disahkan pada 27 Mei 2004.

Komite Kebijakan Risiko

Pembentukan Komite Kebijakan Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk menerapkan GCG. Terkait implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Kebijakan Risiko menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Komposisi keanggotaan Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero) setiap periode berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal pihak profesional yang independen.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. Kep-06/DK/XII-2017 tanggal 1 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Kebijakan Risiko tahun buku 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Ketua Komite Kebijakan Risiko			<i>Chairman of the Risk Policy Committee</i>
(merangkap sebagai Anggota Komisari)	: Satya Bhakti Parikesit	:	<i>(Also as Members of Commissioner)</i>
Anggota	: Abdul Kholik Sutrisno	:	<i>Members</i>
	: Radjalis	:	

1. GENERAL (continued)

1.5. Board of Commissioners and Directors (continued)

Board of Commissioners (continued)

The Audit Committee (continued)

Based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) no. Kep-07 / DK / XII-2017 dated December 8, 2017 concerning the Termination and Appointment of the Chairman of the Audit Committee to the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee of book year 2018 and 2017 as follows:

Implementation of the Audit Committee duties in PT PELNI (Persero) based on the Audit Committee Charter which was ratified on May 27, 2004.

Risk Policy Committee

Establishment of Risk Policy Committee is part of the company's efforts to implement the GCG. Related to the implementation of good corporate governance, the role and functions of Risk Policy Committee are to be very strategic in assisting and enhancing the role of the Board of Commissioners in performing its supervisory function.

The membership composition of the Risk Policy Committee of PT PELNI (Persero) for each period is 3 (three) members consisting of a chairman who is a member of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) and 2 (two) committee members from independent professional parties.

Based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) no. Kep-06 / DK / XII-2017 dated December 1, 2017 concerning the Termination and Appointment of the members of the Risk Policy Committee to the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee of book year 2018 and 2017 as follows:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia No. SK-MBU/04/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia dan No. SK-210/MBU/09/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia dan telah di Akta Notariskan No. 1 tanggal 3 Oktober 2017, Notaris Ida Adiningsih, SH., susunan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Insan Purwarisya L. Tobing	:	President Director
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	:	Olih Masolich Sodikin	:	Director of Passenger Transportation
Direktur Keuangan	:	Tri Andayani	:	Director of Finance
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Harry Boediarto Soewarto	:	Director of Maritime Goods and Toll Road Transport
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Ganefi	:	Director of Human Resources and General Affairs
Direktur Armada	:	M. Tukul Harsono	:	Director of the Fleet

Mendasar pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan memperhatikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun buku 2016 yang disahkan pada tanggal 16 Mei 2017, maka ditetapkan Penghasilan Dewan Komsaris dan Direksi serta insentif kinerja sebagai berikut:

- a. Gaji Dirut ditetapkan naik dari gaji tahun 2016. Gaji Direktur lainnya 90 % dari gaji Direktur Utama.
- b. Honorarium Komisaris ditetapkan 45 % dari Gaji Direktur Utama. Honorarium Dewan Komisaris ditetapkan 90 % dari Komisaris Utama.

1. GENERAL (continued)

1.5. Board of Commissioners and Directors (continued)

Directors

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company of PT Pelayaran Nasional Indonesia. SK-MBU / 04/2017 dated April 3, 2017 on the Change of Nomenclature of Occupation, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of Limited Liability Company of PT Pelayaran Nasional Indonesia and No. SK-210 / MBU / 09/2017 dated September 26, 2017 on the Transfer of Duties and Appointments of Members of the Board of Directors of Limited Liability Company Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia and notarized by Notarial Deed No. 1 dated October 3, 2017, Notary Ida Adiningsih, SH., The composition of the Board of Directors for the year ended December 31, 2018 and 2017 as follows:

Direktur Utama	:	Insan Purwarisya L. Tobing	:	President Director
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	:	Olih Masolich Sodikin	:	Director of Passenger Transportation
Direktur Keuangan	:	Tri Andayani	:	Director of Finance
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Harry Boediarto Soewarto	:	Director of Maritime Goods and Toll Road Transport
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Ganefi	:	Director of Human Resources and General Affairs
Direktur Armada	:	M. Tukul Harsono	:	Director of the Fleet

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-122 / MBU / 06/2017 dated June 21, 2017 and observe the decision of PT PELNI (Persero) General Meeting of Shareholders on Approval on the Annual Report and Ratification of Financial Statements 2016 Final year validated on 16 May 2017, stipulated Income of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the performance incentives as follows:

- a. Salary of President Director is set up from the salaries of 2016. Salaries of other Directors are 90% of salary of President Director.
- b. Honorarium of Commissioner was assigned to 45% of the salary of the President Director. Honorarium of Board of Commissioners is set to 90% of the Commissioner.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Direksi (lanjutan)

- c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi BOD & BOC ditetapkan mengacu pada PER-01/MBU/06/2017.
- d. Gaji/Honorarium bagi Direksi & Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2017 berlaku efektif 1 Januari 2017.

Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris juga menerima insentif kinerja tahun buku 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Insentif Kinerja Direktur & Komisaris Utama masing-masing 90% dan 45% dari insentif kinerja Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris sebesar 90% dari insentif Komisaris Utama dan pembayarannya dihitung proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2016.
- PPH menjadi beban perusahaan.

Hubungan Afiliasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Seluruh anggota Direksi PT PELNI (Persero) bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi PT PELNI (Persero) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki

Usaha pokok PT PELNI (Persero) adalah menyediakan jasa angkutan transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Berdasarkan usaha pokok tersebut, bidang usaha yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) antara lain:

1. GENERAL (continued)

1.5. Board of Commissioners and Directors (continued)

Directors (continued)

- c. Benefits and/or facilities for BOD and BOC were set refers to the PER-01/MBU/06/2017.
- d. Salary/Honorarium for Board of Directors and Commissioners as well as allowances and facilities for 2017 become effectively commencing on January 1, 2017.

In addition, the Board of Commissioners and also received performance incentives for the fiscal year 2016, subject to the following conditions:

- Performance Incentives of President Director & Commissioner are respectively 90% and 45% of performance incentives of President Director while the incentives of Board of Commissioners are amounting to 90% of the Commissioner incentive and the payment is calculated proportionately and by calculating the effective work on fiscal year of 2016.
- PPH become the company's expense.

Affiliate Relations Between the Directors, the Board of Commissioners and Shareholders

All members of the Directors of PT PELNI (Persero) act independently and free from intervention from any party and have not the financial relationship, management, ownership, and/or family relationship to the second degree with other members of the Directors, Board of Commissioners and/or controlling shareholders or relationship with the company that could affect their abilities to act independently.

Dual Positions

All members of the Directors of PT PELNI (Persero) shall not also have dual positions which have been prohibited by valid law.

1.6. Business Line and Owned Business Unit

The primary business line of PT PELNI (Persero) is the provision of the marine transportation which serves the commercial and logistic among islands. Based on that primary business, the services provided by PT PELNI (Persero) are:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

- a. Jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran tetap, teratur dan terjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu.
- b. Jasa keagenan.
- c. Jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan Red dan ekspedisi/forwarding.
- d. Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal.
- e. Charter dan broker kapal.
- f. Jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan.

Produk dan Jasa Perkapalan

Jasa Perkapalan

a. Kapal 2 in 1

Kapal jenis 2 in 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Welf dan dibangun di galangan Pepenburg, Jerman. Kapal 2 in 1 ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

b. Kapal Penumpang Serbaguna

Kapal jenis 3 in 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan mobil sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 in 1, yaitu kapal serbaguna yang dapat mengangkut kontainer di bagian depan dan belakang serta penumpang dan mobil. Kapal ini telah dimodifikasi di galangan Sembawang Singapura.

1. GENERAL (continued)

1.6. Business Line and Owned Business Unit (continued)

- a. Freight services for passengers and freight with fixed, regular and scheduled shipping lines as well as shipping that serves certain requests.
- b. Agency services.
- c. Terminal operation, warehouse, Red transportation, and expedition/forwarding services.
- d. Ship maintenance and dock business or ship reparation services.
- e. Ship charter and broker.
- f. Consultant, training, health care services, and hospitality business.

Product and Shipping Services

Shipping Services

a. Kapal 2 in 1

2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Welf and built at Pepenburg Shipyard, Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid 2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knot.

b. Multipurpose Passenger Ship

The 3 in 1 ship type is multipurpose passenger ship with capacity to carry containers, passenger and car simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships which have been modified into 3 in 1 ship type, the multipurpose ships for carrying container at the front and back sides as well as passenger and car. The ships had been modified at Sembawang Shipyard, Singapore.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)****Produk dan Jasa Perkapalan (lanjutan)**Jasa Perkapalan (lanjutan)**c. Kapal Barang**

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, PT PELNI (Persero) memiliki 3 kapal barang yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 dan KM Caraka Jaya Niaga– 32 dengan kapasitas muat yang berbeda-beda untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

d. Kapal Tol Laut

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 9 (sembilan) armada Kapal Tol Laut yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22, KM Caraka Jaya Niaga III – 32, KM.Logistik Nusantara 1, 2, 3, 4 dan 5, serta KM Kendhaga Nusantara 1.

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada Peraturan Presiden RI No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM161 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, PT PELNI (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik tersebut atau yang disebut sebagai program Tol Laut (layanan angkutan barang yang terjadwal, tetap, dan teratur).

e. Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 2 (dua) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dan KM Camara Nusantara III dengan rute Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

1. GENERAL (continued)**1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)****Product and Shipping Services (continued)**Shipping Services (continued)**c. Cargo Ship**

For logistic distribution across Indonesian region, PT PELNI (Persero) has 3 cargo ships, among others, KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 and KM Caraka Jaya Niaga– 32 with different capacities for provide cargo ship to carry large volume cargo with excellent service and supported by professional personnel.

d. Tol Laut Ship

PT PELNI (Persero) was operating 9 (nine) Marine Highway fleet namely KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22, KM Caraka Jaya Niaga III – 32, KM. Logistics Nusantara 1, 2, 3, 4 and 5, as well as the KM Kendhaga Nusantara 1.

Tol Laut Ship is operated referring to the RI Presidential Decree No. 106 year 2015 concerning the Implementation of Public Service Obligations for Marine Freight Transportation and the Regulation of the Minister of Transportation No. PM161 year 2015 concerning on public service obligations for the marine freight transportation, PT PELNI appointed as executor of the public service obligations or the so called Tol Laut (Marine Toll) program (scheduled, fixed, and regular freight services).

e. Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 2 (two) Cattle Ship, KM Camara Nusantara I and KM Camara Nusantara III with route of Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. The operation of cattle ship aims to help the Government implements lower meat price and increase welfare of the breeders in domestic cow breeding center.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)**

Produk dan Jasa Perkapalan (lanjutan)

Jasa Perkapalan (lanjutan)

f. Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak.

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 47 (empat puluh tujuh) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

Unit Bisnis Strategik

a. Keagenan Kapal

Jenis keagenan kapal, meliputi:

- 1) Clearance in 7 out
- 2) Bunker, Fresh Water, Provision Supply
- 3) Crew Attendance
- 4) Protecting Agent
- 5) Custom Clearance
- 6) Layanan Sea Pollution
- 7) Layanan Garbage Removal

b. Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

c. Galangan Surya Surabaya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin space dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

d. Bisnis Properti

Persewaan ruang kantor dari aset gedung PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PELNI serta persewaan toko dan cafe di atas kapal.

1. GENERAL (continued)

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)**

Product and Shipping Services (continued)

Shipping Services (continued)

f. Pioneer Ship

Pioneer ship fleet is part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Tol Laut and Cattle ships.

PT PELNI (Persero) operates 47 (forty seven) Pioneer Ships covering remote area across Indonesia.

Strategic Business Unit

a. Ship Agency

Type of Agency Services:

- 1) Clearance in 7 out
- 2) Bunker, Fresh Water, Provision Supply
- 3) Crew Attendance
- 4) Protecting Agent
- 5) Custom Clearance
- 6) Sea Pollution Services
- 7) Garbage Removal Services

b. Bahtera Hotel

Hotel that has meeting and training center facilities equipped with meeting room facility that has capacity over 200 pax as well as other supporting facilities.

c. Galangan Surya Surabaya

Established since May 20, 1996, the Shipyard handled 500- type PELNI ships, such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF), strategic projection to guarantee docking and repair space for all vessels (including large ships) that are operated by PT PELNI (Persero).

d. Property Business

Office space renta from PT PELNI (Persero)'s building assets spread across branch office of PT PELNI (Persero). In addition, the property business also includes onboard advertising space rental on PELNI ships as well as onboard store and café rental.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
 (lanjutan)**

Produk dan Jasa Perkapalan (lanjutan)

Unit Bisnis Stratejik (lanjutan)

Sebagai perusahaan pelayaran, saat ini PT PELNI (Persero) mengoperasikan 25 unit armada kapal penumpang, 1 unit kapal ferry cepat dan mengoperasikan 9 unit armada kapal barang dengan total bobot mati sebesar 35.044 ton. Untuk melayani penumpang dan barang tersebut, kami membagi armada menjadi:

- 1) Type 3000 pax
- 2) Type 2000 pax (2 unit dimodifikasi 3 in 1)
- 3) Type 1000 pax
- 4) Type 500 pax
- 5) Ro-Ro type cargo 3 unit
- 6) Kapal Barang Type Caraka
- 7) Kapal Logistik Nusantara (*Type Container*)

PT PelnI (Persero) dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki unit-unit usaha yang terdiri dari:

- **Kantor Pusat** **1**
- **Kantor Cabang A, lokasi di:** **3**
 - 1) Tanjung Priuk
 - 2) Surabaya
 - 3) Makasar
- **Kantor Cabang B, lokasi di:** **10**
 - 1) Ambon
 - 2) Sorong
 - 3) Bau-Bau
 - 4) Bitung
 - 5) Kupang
 - 6) Tanjungpinang
 - 7) Jayapura
 - 8) Manokwari
 - 9) Balikpapan
 - 10) Semarang

1. GENERAL (continued)

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
 (continued)**

Product and Shipping Services (continued)

Strategic Business Unit (continued)

As a shipping company, PT PELNI (Persero) operates 25 units of passenger vessels fleet, one fast ferry vessels and operates a fleet of 9 units of goods with a total deadweight of 35.044 tons. To serve passengers and goods, we divided the fleet into:

- 1) Type 3000 pax
- 2) Type 2000 pax (2 unit modified to be 3 in 1)
- 3) Type 1000 pax
- 4) Type 500 pax
- 5) Ro-Ro type cargo 3 unit
- 6) Cargo Ship Type Caraka
- 7) Logistik Nusantara Ship (*Type Container*)

PT PelnI (Persero) in managing the business operation has business units that consists as below:

- **Head Office** •
- **Branch Office A, location at:** •
 - Tanjung Priuk 1)
 - Surabaya 2)
 - Makasar 3)
- **Branch Office B, location at:** •
 - Ambon 1)
 - Sorong 2)
 - Ambon 3)
 - Bitung 4)
 - Kupang 5)
 - Tanjungpinang 6)
 - Jayapura 7)
 - Manokwari 8)
 - Balikpapan 9)
 - Semarang 10)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)**

- **Kantor Cabang C, lokasi di:** **18**
 - 1) Larantuka
 - 2) Denpasar
 - 3) Batam
 - 4) Ternate
 - 5) Namlea
 - 6) Biak
 - 7) Serui
 - 8) Pare Pare
 - 9) Nabire
 - 10) Kumai
 - 11) Sampit
 - 12) Tarakan
 - 13) Nunukan
 - 14) Tual
 - 15) Medan
 - 16) Maumere
 - 17) Pontianak
 - 18) Fak Fak
- **Kantor Cabang D, lokasi di:** **14**
 - 1) Bima
 - 2) Waingapu
 - 3) Timika
 - 4) Ende
 - 5) Dobo
 - 6) Kotabaru/Batulicin
 - 7) Palu
 - 8) Kendari
 - 9) Merauke
 - 10) Tanjung Balai Karimun
 - 11) Labuan Bajo
 - 12) Luwuk
 - 13) Kaimana
 - 14) Toli - Toli
- **Terminal Penghubung, lokasi di:** **114**
 - 1) Pangkal Pinang
 - 2) Tanjung Pandan
 - 3) Palembang
 - 4) Bengkulu
 - 5) Jambi
 - 6) Padang
 - 7) Kalianget
 - 8) Bawean
 - 9) Masalembo
 - 10) Laga
 - 11) Probolinggo
 - 12) Gresik

1. GENERAL (continued)

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)**

- **Branch Office C, location at:**
 - Larantuka 1)
 - Denpasar 2)
 - Batam 3)
 - Ternate 4)
 - Namlea 5)
 - Biak 6)
 - Serui 7)
 - Pare Pare 8)
 - Nabire 9)
 - Kumai 10)
 - Sampit 11)
 - Tarakan 12)
 - Nunukan 13)
 - Tual 14)
 - Medan 15)
 - Maumere 16)
 - Pontianak 17)
 - Fak Fak 18)
- **Branch Office D, location at:**
 - Bima 1)
 - Waingapu 2)
 - Timika 3)
 - Ende 4)
 - Dobo 5)
 - Kotabaru/Batulicin 6)
 - Palu 7)
 - Kendari 8)
 - Merauke 9)
 - Tanjung Balai Karimun 10)
 - Labuan Bajo 11)
 - Luwuk 12)
 - Kaimana 13)
 - Toli - Toli 14)
- **Terminal Point, location at:**
 - Pangkal Pinang 1)
 - Tanjung Pandan 2)
 - Palembang 3)
 - Bengkulu 4)
 - Jambi 5)
 - Padang 6)
 - Kalianget 7)
 - Bawean 8)
 - Masalembo 9)
 - Laga 10)
 - Probolinggo 11)
 - Gresik 12)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
 (lanjutan)**

• **Terminal Penghubung, lokasi di: (lanjutan)**

- 13) Selayar
- 14) Biringkasih
- 15) Bandanaira
- 16) Saumlaki
- 17) Amahai
- 18) Bula
- 19) Geser
- 20) Larat
- 21) Ilwaki
- 22) Moa
- 23) Tepa
- 24) Mangole
- 25) Sidangole
- 26) Buli
- 27) Cirebon
- 28) Karimun Jawa
- 29) Sami
- 30) Wanci
- 31) Raha
- 32) Samarinda
- 33) Banjarmasin
- 34) Bontang
- 35) Paser
- 36) Tanah Grogot
- 37) Kalabahi
- 38) Rote
- 39) Sabu
- 40) Atapupu/Atambua
- 41) Gorontalo
- 42) Tahuna
- 43) Amurang
- 44) Marore
- 45) Togian
- 46) Kwandang
- 47) Lirung
- 48) Miangas
- 49) Siau
- 50) Karatung
- 51) Ulisiau
- 52) Kahikitang
- 53) Wasior
- 54) Bintuni
- 55) Tj Uban
- 56) Tarempa
- 57) Letung
- 58) Tambelan
- 59) Natuna/Ranai
- 60) Midai

1. GENERAL (continued)

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
 (continued)**

Terminal Point, location at: (continued)

- Selayar 13)
- Biringkasih 14)
- Bandanaira 15)
- Saumlaki 16)
- Amahai 17)
- Bula 18)
- Geser 19)
- Larat 20)
- Ilwaki 21)
- Moa 22)
- Tepa 23)
- Mangole 24)
- Sidangole 25)
- Buli 26)
- Cirebon 27)
- Karimun Jawa 28)
- Sami 29)
- Wanci 30)
- Raha 31)
- Samarinda 32)
- Banjarmasin 33)
- Bontang 34)
- Paser 35)
- Tanah Grogot 36)
- Kalabahi 37)
- Rote 38)
- Sabu 39)
- Atapupu/Atambua 40)
- Gorontalo 41)
- Tahuna 42)
- Amurang 43)
- Marore 44)
- Togian 45)
- Kwandang 46)
- Lirung 47)
- Miangas 48)
- Siau 49)
- Karatung 50)
- Ulisiau 51)
- Kahikitang 52)
- Wasior 53)
- Bintuni 54)
- Tj Uban 55)
- Tarempa 56)
- Letung 57)
- Tambelan 58)
- Natuna/Ranai 59)
- Midai 60)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)**

• **Terminal Penghubung, lokasi di: (lanjutan)**

- 61) Selat Panjang
- 62) Serasan
- 63) Bagan siapi-api
- 64) Kualaenok
- 65) Perawang
- 66) Dumai
- 67) Tambilahan
- 68) Palopo
- 69) Belang-Belang
- 70) Barru
- 71) Malili
- 72) Tobelo
- 73) Galela
- 74) Babang
- 75) Morotai
- 76) Gebe
- 77) Labuha
- 78) Gunung Sitoli
- 79) Sibolga
- 80) Lhoksumawe
- 81) Enggano
- 82) Sikakap/Mentawai
- 83) Teluk Talam
- 83) Malahayati
- 84) Meulaboh
- 85) Sintete
- 86) Ketapang
- 87) Kandawang
- 88) Pemangkat
- 89) Sinkawang
- 90) Teluk Air
- 91) Batu Ampar
- 92) Ampenan/Lembar
- 93) Banyuwangi
- 94) Jampea
- 95) Buleleng
- 96) Celukan Bawang
- 97) Padang Bai
- 98) Nusa Penida
- 99) Kisar
- 100) Loweleba
- 101) Bade
- 102) Sanana
- 103) Namrole
- 104) Letsula
- 105) Reo
- 106) Marapokot
- 107) Parigi

1. GENERAL (continued)

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)**

• **Terminal Point, location at: (continued)**

- Selat Panjang 61)
- Serasan 62)
- Bagan siapi-api 63)
- Kualaenok 64)
- Perawang 65)
- Dumai 66)
- Tambilahan 67)
- Palopo 68)
- Belang-Belang 69)
- Barru 70)
- Malili 71)
- Tobelo 72)
- Galela 73)
- Babang 74)
- Morotai 75)
- Gebe 76)
- Labuha 77)
- Gunung Sitoli 78)
- Sibolga 79)
- Lhoksumawe 80)
- Enggano 81)
- Sikakap/Mentawai 82)
- Teluk Talam 83)
- Malahayati 83)
- Meulaboh 84)
- Sintete 85)
- Ketapang 86)
- Kandawang 87)
- Pemangkat 88)
- Sinkawang 89)
- Teluk Air 90)
- Batu Ampar 91)
- Ampenan/Lembar 92)
- Banyuwangi 93)
- Jampea 94)
- Buleleng 95)
- Celukan Bawang 96)
- Padang Bai 97)
- Nusa Penida 98)
- Kisar 99)
- Loweleba 100)
- Bade 101)
- Sanana 102)
- Namrole 103)
- Letsula 104)
- Reo 105)
- Marapokot 106)
- Parigi 107)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
 Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
 As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
 (lanjutan)**

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
 (continued)**

- **Terminal Penghubung, lokasi di:** (lanjutan)
 - 108) Poso
 - 109) Kolondale
 - 110) Agast
 - 111) Amamapare
 - 112) Badas
 - 113) Buol
 - 114) Banggai

- **SBU:**
 - 1) Galangan Surya Surabaya
 - 2) Hotel Bahtera Cipayung

- **Cabang Khusus, lokasi di:**
 Singapore

Jumlah

2

1

163

- **Terminal Point, location at:** (continued)
 - Poso 108)
 - Kolondale 109)
 - Agast 110)
 - Amamapare 111)
 - Badas 112)
 - Buol 113)
 - Banggai 114)

- **SBU:**
 - Galangan Surya Surabaya 1)
 - Hotel Bahtera Cipayung 2)

- **Chief Executive Officer, location at:**
 Singapore

Total

1.7. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

1.7. Human Resources and Organizational Structure

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebagai berikut: (tidak diaudit)

The number of permanent employees on December 31, 2017 dan 2016 respectively as follows: (unaudited)

	31 Des/Dec 2018	31 Des/Dec 2017	
Manajer Utama	63	129	Top Manager
Senior Manajer	189	486	Midle Manager
Yunior Manajer	243	496	Lower Manager
Staf	730	554	Staff
Officer	3.142	2.827	Officer
Jumlah	4.367	4.492	Total

Dari jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang masuk dalam perhitungan kewajiban atas imbalan pasca kerja sebagai berikut: (tidak diaudit)

From the total number of permanent employees of the Company as of December 31, 2018 and 2017, which are included in the calculation of liabilities for post-employment benefits as follows: (unaudited)

	31 Des/ Dec 2018	31 Des/ Dec 2017	
Program Santunan Meninggal dan Cacat, Uang Pisah, THT dan MPP	4.334	4.388	Death and Disability Compensation Program, Separate Money, THT and MPP
Program UU No. 13 Tahun 2003	3.099	3.304	UU No. 13 Year 2003 Program
Program Dana Pensiun	2.948	3.140	Pension Fund Program
Program Selisih UU No. 13/2003 dan DPLK	1.235	1.084	Difference Program UU No.3 / 2003 and DPLK

Struktur Organisasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Surat Keputusan Direksi Nomor 11.06/SK/HKO.01/2017 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 04.12/3/SK/HKO.01/2016, sebagaimana tampak pada halaman berikut ini.

Organizational Structure of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) by Directors Decree Number 11.06 / SK / HKO.01 / 2017 concerning Amendments to Directors' Decree Number: 04.12 / 3 / SK / HKO.01 / 2016, as presented on the following page.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

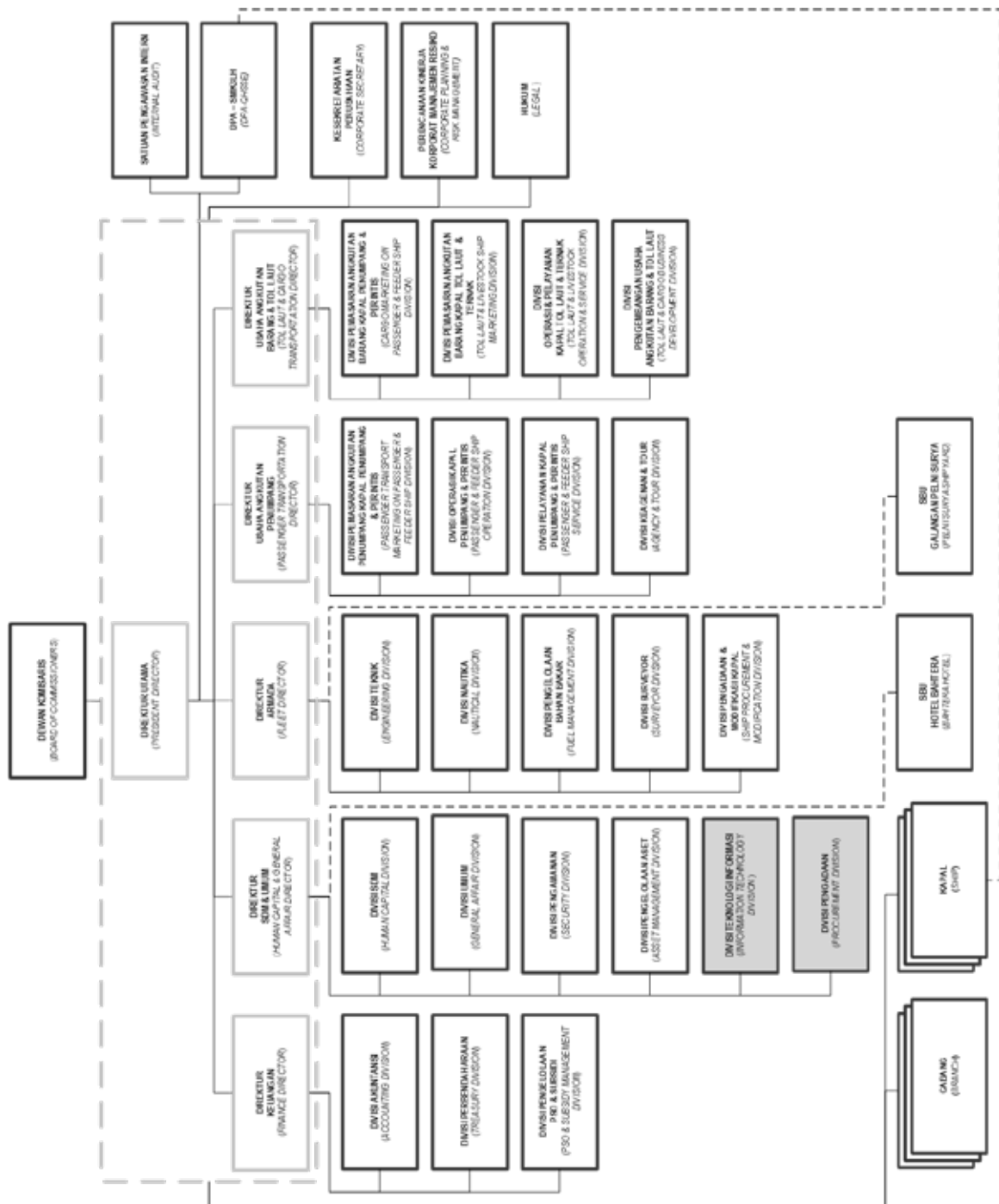
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

**1.7. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi
(lanjutan)**

**1.7. Human Resources and Organizational
Structure (continued)**



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)**1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diperbaharui melalui Nomor PER-09/MBU/2012, bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

- a. Pedoman GCG
- b. Pedoman *Code of Conduct*
- c. Tata Laksana Kerja (Board Manual) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
- d. Pedoman Benturan Kepentingan
- e. Pakta Integritas
- f. Pedoman Penanganan Gratifikasi

1. GENERAL (continued)**1.8. The Implementation of Good Corporate Governance (GCG)**

The Company implements GCG structure and mechanism aiming to operate process and structure to achieve performance target and accountability of the Company to generate added value for the Shareholders and Stakeholders by considering interests of other Stakeholders.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) practice at PT PELNI (Persero) refers several prevailing Laws in Indonesia, among others, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company and Minister of State-Owned Enterprise Decree Number Kep-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise (SOE), and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 on Application of Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State-Owned Enterprises, as had been refurbished through No. PER-09 / MBU / 2012. GCG that the BUMN are required to apply consistently and continuously by referring to this Regulation by taking into account the terms and norms as well as the articles of association of BUMN.

GCG implementation commitment in the Company is manifested as several manual books related with GCG implementation and GCG integrity pact signing by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

- a. *Manual of GCG*
- b. *Manual of Code of Conduct*
- c. *PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and*
- d. *Manual of Conflict of Interest*
- e. *Integrity Pact*
- f. *Anti-Gratification Manual*



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(lanjutan)**

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG (GCG Assessment) secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Untuk periode tahun buku 2017, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta sesuai dengan Laporan No. LGCG-221/PW09/4.1/2017 tanggal 6 Juni 2017, dengan capaian skor Laporan Self Assesment Penerapan GCG adalah 80,448 atau predikat Baik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kriteria Pengujian/ Assessment Criteria	Bobot/ Weight	Capaian/ Achievement		Penjelasan/ Explanation
			Skor/ Score	Persentase/ Percentage	
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan/Commitment on Sustainable Corporate Governance	7,000	5,795	82,79	Baik/Good
2.	Pemegang Saham dan RUPS (Pemilik Modal)/Shareholders and GMS (Capital Owner)	9,000	8,301	92,23	Sangat Baik/ Very Good
3.	Dewan Komisaris/The Board of Commissioners	35,000	29,764	85,04	Sangat Baik/ Very Good
4.	Direksi/Directors	35,000	29,900	85,43	Sangat Baik/ Very Good
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi/Information Disclosure and Transparency	9,000	6,688	74,32	Cukup Baik/ Fair
6.	Aspek Lainnya/Others Aspect	5,000	0	0	
Skore Keseluruhan/Total Score		100,000	80,448		Baik/Good

1.9. Manajemen Risiko

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan framework ISO 31000 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Kebijakan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko PT PELNI (Persero).

1. GENERAL (continued)

1.8. The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) (continued)

The company is carrying out an evaluation of the practice of GCG GCG Assessment activities through (GCG Assessment) on a regular basis in order to measure the quality of GCG implementation in each of the Organs of the company. For the period fiscal year 2017, GCG Assessment shall be conducted by BPKP DKI Jakarta Representative in accordance with Report No. LGCG-221 / PW09 / 4.1 / 2017 dated June 6, 2017 with achievement score of 80.448 or Good predicate with details as follows:

1.9. Risk Management

PT PELNI (Persero) implements Risk Management System based on ISO 31000 framework to establish risk management practice with broader perspective, easier to be understood, measured and support cross working units coordination and integration in the Company.

Risk Management System policy has been updated according to Board of Directors Decree No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 dated October 6, 2016 regarding Stipulation of PT PELNI (Persero) Risk Management Policy.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Guna mendukung penerapan Manajemen Risiko ISO 31000, dilakukan peningkatan kompetensi SDM di unit manajemen risiko dengan mengikutsertakan workshop dan standarisasi sertifikat risk management berbasis ISO 31000 secara berkelanjutan. Tercatat sampai tahun 2016, 1 orang expert risk management (Staf Utama Direktur Utama), 1 orang (manager) memiliki sertifikasi risk management base on ISO 31000 dan base on ISO 31010, 2 orang (staf) memiliki sertifikasi risk management base on ISO 31000 dan ISO 31010.

Profil dan Mitigasi Risiko

a. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Armada

Membahas risiko keselamatan keselamatan kapal penumpang perspektif Armada berdasarkan isu-isu penting yang selaras dengan capaian KPI Direktorat Armada. Untuk sasaran strategis Direktorat Armada adalah meningkatkan efektifitas pengelolaan armada dimana KPI nya "running repair kapal penumpang yang diselesaikan (%)"

Tindakan Mitigasi:

Melakukan pemeriksaan suku cadang Motor Induk sebanyak 6 Purchase Order (PO) untuk 24 kapal Penumpang, melakukan rekondisi terhadap suku cadang motor induk yang layak pakai untuk digunakan kembali, dan melakukan perbaikan RR oleh PT. PID.

b. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Operasi;

Sasaran strategis korporat pada risiko keselamatan kapal penumpang adalah meningkatkan efektifitas perencanaan operasional dengan KPI OTP kapal penumpang (%), dimana jika hal tersebut tidak terencana dengan baik maka akan menimbulkan peristiwa berisiko seperti, kedatangan dan keberangkatan kapal tidak sesuai jadwal tentunya hal tersebut akan berdampak pada gangguan dalam pelayanan. Penyebabnya sangat beragam mulai dari factor loading & unloading dipelabuhan tidak efektif, keterlambatan pengurusan surat & administrasi, Bunker BBM & pengisian air tawar yang tidak efektif, kendala teknis, DCS yang tidak efektif sampai pada ketepatan waktu penyelesaian docking.

1. GENERAL (continued)

1.9. Risk Management (continued)

In order to support the implementation of ISO 31000 Risk Management, personnel competency development in risk management unit had been done by participating the personnel in risk management workshop and certificate standardization based on ISO 31000 in on going basis. As of 2016, 1 risk management expert (Main Staff of the President Director), 1 Manager with risk management certification based on ISO 31000 and based on ISO 31010, 2 staffs with risk management certification based on ISO 31000 and ISO31010.

Risk Profile and Mitigation

a. Ship Safety Risk and Passenger Fleet perspective

Discuss the safety risks the safety of passenger ships the fleet perspective based on important issues that resonated with nothing much to KPI Directorate fleet. Strategic objectives for the Directorate Fleet is to increase the effectiveness of the management of the fleet which KPIS are his "running repair passenger ship completed (%)"

Mitigation Measures:

Checks the parent Motor spare parts as 6 Purchase Order (PO) for 24 passenger ship, doing recondition spare parts against motor carriers a viable use for reuse, and perform repairs RR by PT. PID.

b. Vessel & Passenger Safety Risk in Operational Perspective

Corporate strategic goals at the risk of the safety of passenger ships is increasing the effectiveness of operational planning with KPI OTP passenger ship (%), where if not planned properly, it will give rise to risk events such as the arrival and departure of the ship, does not fit the schedule of course it will have an impact on the disruption in service. The cause is very diverse ranging from the factor loading unloading & dipelabuhan not effective delay clearance letter & administration, Bunker FUEL charging & freshwater ineffective, technical constraints, DCS that are not effective until the timeliness the completion of the docking.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

- b. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang
perspektif Operasi; (lanjutan)

Tindakan Mitigasi:

Melakukan monitor On Time Performance (OTP)
Tiap Kapal, fasilitas Terminal Penumpang,
fasilitas kepelabuhanan dan monitoring DCS.

- c. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang
Perspektif *Designated Persons Ashore* (DPA);

Sasaran strategis untuk divisi DPA-QHSSE
terdapat dua sasaran yakni "meningkatkan
efektifitas perencanaan operasional" dan
"organization capital" dimana masing –masing
sasaran strategis memiliki KPI yakni "OTP kapal
penumpang (%)" dan "Skor GCG". Namun
peristiwa berisiko yang mungkin terjadi jika
perencanaan operasional tidak efektif akan
mengakibatkan kecelakaan, hal ini dilihat dalam
perspektif DPA-QHSSE dimana dampak yang
ditimbulkan dari peristiwa berisiko adalah
kerusakan, penumpang yang cidera, dan
kerusakan asset.

Tindakan Mitigasi:

Melakukan sinergi dan koordinasi dengan pihak
eksternal safety audit diantaranya Biro Klasifikasi
Indonesia dalam pemeriksaan keselamatan
kapal, kesiapan peralatan keselamatan,
kecukupan alat keselamatan sesuai peraturan
dan ketentuan yang berlaku. Hasil temuan dari
pemeriksaan keselamatan harus segera
ditindaklanjuti.

- d. Risiko Budget;

Ada tiga sasaran pada risiko budget yaitu
organization capital, pendapatan dari
penumpang dan pendapatan dari barang. Dari
ketiga sasaran tersebut ada dua peristiwa
berisiko yang sesuai dengan tupoksi divisi
akuntansi. Pertama, keterlambatan penginputan
data dari divisi, kantor cabang dan anak
perusahaan. Kedua, inkonsistensi sumber data.
Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa berisiko
tersebut adalah skor KPI kontrak manajemen dan
tingkat akurasi data rendah dari kedua dampak
yang mungkin terjadi, tingkat risiko yang tinggi
adalah inkonsistensi data.

1. GENERAL (continued)

1.9. Risk Management (continued)

Risk Profile and Mitigation (continued)

- b. *Vessel & Passenger Safety Risk in Operational
Perspective; (continued)*

Mitigation Measures:

*Monitors On Time Performance (OTP) Every
ship, Passenger Terminal facilities, on-site
kepelabuhanan and monitoring of DCS.*

- c. *Vessel & Passenger Safety Risk in Designated
Persons Ashore Perspective (DPA);*

*Strategic goals for the Division of DPA-QHSSE
there are two target i.e. "improve the
effectiveness of the operational planning" and
"organization capital", where each KPI has
strategic goals i.e. "OTP passenger ship (%)"
and the Score GCG ". But the events of at risk
that may occur if the perencanaan not effective
operations will result in an accident, this is seen
in the perspective of the DPA-QHSSE where
the impact of the event is at risk of damage,
passengers injuries, and damage to the asset.*

Mitigation Measures:

*Synergies and coordination with the external
safety audit of which the Bureau of
classification of Indonesia in the examination of
the safety of the vessel, the readiness of safety
equipment, the adequacy of the safety rules
and conditions. Findings from an examination of
safety must be immediately acted upon.*

- d. *Budget Risk;*

*There are three targets at the risk of the budget
namely organization capital, revenue from
passengers and revenue from goods. The third
of these objectives there are two risky events
corresponding to auth Division accounting.
First, the delay in penginputan data from
divisions, branches and subsidiaries. Second,
the inconsistency data source. The impact
caused from the risky events is the KPI score
management contract and the level of accuracy
of the data is lower than both the impact that
may occur, a high level of risk is inkonsistensi
the data.*



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

d. Risiko Budget; (lanjutan)

Hal tersebut dikarenakan banyaknya kesalahan dan revisi data yang diserahkan ke divisi akuntansi sehingga data yang disampaikan tidak akurat belum lagi penyebab yang ditimbulkan akibat system aplikasi keuangan yang digunakan belum sepenuhnya optimal serta keterlambatan data yang masuk dari pengguna.

Tindakan Mitigasi:

Membandingkan secara manual antara data penghasilan di aplikasi legacy dengan data yang masuk di EBS, berkoordinasi secara rutin antara Akuntansi Cabang dan Pusat dengan Tim IT dan Team Sigma (melalui WA group dan rapat), adanya Evaluasi dan Review Data yang ada di aplikasi EBS dengan legacy BL dan PTS, serta melakukan Request ITCR untuk laporan pembandingan antara data pada sistem legacy dengan PTS.

e. Risiko Public Service Obligation (PSO) dan Subsidi;

Sasaran strategis untuk Divisi pengelolaan PSO & Subsidi adalah "meningkatkan efektifitas pengelolaan dana penugasan" dimana peristiwa berisikonya adalah terlambatnya pencairan dana subsidi, penyerapan dana PSO rendah, dan Penyerapan dana subsidi juga rendah. Dari peristiwa berisiko tersebut memiliki dampak yakni cash flow perusahaan terganggu dan kinerja keuangan rendah.

Tindakan Mitigasi:

Berkoordinasi dengan BPK RI untuk dilakukan akumulasi saat un-audited BPK RI dan perbaikan sistem EBS sesuai untuk cut off data, berkoordinasi dan menyurati user untuk ketepatan waktu dan sumber data, penandatanganan kontrak penugasan subsidi yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

1. GENERAL (continued)

1.9. Risk Management (continued)

Risk Profile and Mitigation (continued)

d. Budget Risk; (continued)

This is due to the many errors and revisions to the data submitted to the accounting division so that the data submitted is inaccurate, not to mention the causes caused by the financial application system that is used is not fully optimal and the data delays that come from users.

Mitigation Measures:

Compare manually data between legacy applications in earnings with the data entered in the EBS, coordinate regularly between Accounting branch and Center IT with the team and Team Sigma (via the WA group and meeting), the evaluation and Review of existing Data on the application of EBS with legacy BL apart, as well as doing a Request for a report on the comparison between the ITCR data on legacy systems with PTS.

e. Public Service Obligation (PSO) and Subsidies Risk;

Strategic goals for the Division of management of PSO & Subsidies is "improving the effectiveness of the management of the funds assigned" where berisikonya is the terlambatnya event of the disbursement of subsidies, the absorption of funds is low, and the absorption of PSO funds subsidies also low. From the risky events having an impact i.e. the company's cash flow is interrupted and financial performance.

Mitigation Measures:

Coordinate with BPK RI to do accumulation when BPK RI un-audited and repair system EBS appropriate to cut off data, coordinating and inviting the user to timeliness and data source, the signing of the contract of assignment of the subsidy is carried out prior to the current year.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

f. Risiko Kelayakan & Keamanan Gedung;

Sasaran strategis adalah organization capital, jika tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka sasaran satrategis perusahaan tidak akan tercapai dan kemungkinan terjadi peristiwa berisiko adalah "kelayakan dan keamanan gedung perkantoran PT. PELNI (Persero)"

Tindakan Mitigasi:

Melakukan pemeliharaan dan perbaikan gedung PT. Pelni di Kantor Pusat maupun Cabang.

g. Risiko Teknologi Informasi ;

Risk register Divisi IT triwulan IV menunjukkan hasil atau tingkat efektifitas yang baik, dari laporan yang ada, peristiwa berisiko yang mungkin terjadi jika tidak ditangani dengan baik, kemungkinan akan terjadi seperti program ICT tidak efektif, insiden keamanan ICT, sampai pada data crash, tentunya jika hal tersebut sampai terjadi akan berdampak apada operasi terganggu, kerusakan data/ data tercuri sampai pada data hilang.

Tindakan Mitigasi:

Review kebutuhan user terkait pengembangan aplikasi, penggunaan perangkat dan monitoring perangkat storage, perbaikan aplikasi sesuai User Acceptance Test, pengembangan aplikasi mobile.

h. Risiko Bahan Bakar Minyak;

Sasaran strategis divisi pengelolaan BBM yakni Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Penugasan dan Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Armada dengan KPI Penyerapan PSO & subsidi (%), Running repair kapal penumpang yang diselesaikan (%) dan Kerugian saat pengisian bahan bakar (miliar), peristiwa berisiko yang mungkin terjadi adalah kenaikan harga BBM, dan kerugian BBM.

1. GENERAL (continued)

1.9. Risk Management (continued)

Risk Profile and Mitigation (continued)

f. Building Security & Feasibility Risk;

Strategic goals of the organization is the capital, if not run it functions properly then the target satrategis companies will not be reached and the likelihood of risky events occurring is "feasibility and security of office buildings of PT PELNI (Persero) "throughout Indonesia.

Mitigation Measures:

Maintenance and repair of PT. Pelni at Headquarters and Branches.

g. Information Technology Risk;

Risk registers Division IV quarter IT showed results or a good efektifitas level, from existing reports, event risk that may occur if not treated properly, it will likely occur as the ICT program is not effective, incident ICT security, until the crash data, certainly if it is to happen will impact apada operation is compromised, the damage of data/data divest victims until the data is lost.

Mitigation Measures:

Review the needs of the user associated application development, the use of monitoring devices and device storage, repair applications according the User Acceptance Test, mobile application development.

h. Fuel Oil Risk;

Strategic goals of the Division of FUEL management i.e. Boost the effectiveness of the management of the Fund and increase the effectiveness of the assignment of the management of the Fleet with KPI Absorption PSO & subsidy (%), Running repair passenger ship completed (%) and losses when refueling (billion) of risky events, that may happen is the increase in the price of fuel, and the loss of FUEL.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

h. Risiko Bahan Bakar Minyak; (lanjutan)

Tindakan Mitigasi:

Pemusatan bunker kapal Pelni pada satu pelabuhan dan diawasi oleh PT.Sucofindo selaku pihak independent antara PT.Pelni & PT Pertamina dan monitoring pemakaian BBM Subsidi berdasarkan pada jumlah kuota subsidi tahunan kapal.

i. Risiko Pax Factor Kapal Penumpang;

Sasaran Strategis Divisi pemasaran pada risk register adalah kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan dan layanan kepada penumpang dimana sasaran tersebut harus capai dengan baik agar tidak terjadi peristiwa berisiko diantaranya pelanggan tidak puas, gagal dalam penetapan armada yang optimal sampai pada pelanggan beralih kepada rute pendek atau moda transportasi lain.

Tindakan Mitigasi:

Melakukan survey kondisi kapal penumpang (alat produksi), mengadakan pelatihan Hospitality Crew Kapal, Penambahan channel penjualan, dan melakukan Evaluasi Trayek Kapal Penumpang.

j. Risiko Pengadaan;

Sasaran strategis divisi pengadaan adalah "Meningkatkan efektifitas pengelolaan armada" jika ditelaah secara mendalam, efektifitas pengelolaan armada bergantung pada ketersediaan spare part kapal jika pengadaan spare part tidak dikelola dengan baik maka sasaran strategis perusahaan tidak mungkin tercapai, serta menimbulkan peristiwa berisiko seperti "gagal memenuhi jadwal pemeliharaan dan pemeliharaan korektif" dan berdampak operasi kapal terganggu.

Tindakan Mitigasi:

Revisi SOP Pengadaan Barang dan Jasa No. 29A/HKO.01/DIR/II-2012 sesuai PERPRES 16/2018.

1. GENERAL (continued)

1.9. Risk Management (continued)

Risk Profile and Mitigation (continued)

h. Fuel Oil Risk; (continued)

Mitigation Measures:

Centralizing the bunker ship Pelni on one port and supervised by PT. Sucofindo as independent parties between PT. Pelni & PT Pertamina FUEL usage and monitoring of Subsidi based on the amount of the annual subsidy quota of ships.

i. Pax Factor Passenger Ship Risk;

Strategic goals of the Marketing Division at risk register is customer satisfaction, and improve sales and service to passengers where the target should be achieved properly so as not to risk events occur among these customers are not satisfied, fail in the determination of the optimal fleet until the customers switch to a shorter route or mode of transportation to another.

Mitigation Measures:

Survey of the condition of the passenger ship (means of production), conduct training Hospitality Crew Aboard, the addition of channel sales, and conducting an evaluation of the Route the ship passengers.

j. Procurement Risk;

The Procurement Division's strategic goals is to "enhance the effectiveness of the management of the fleet" If analyzed in depth, fleet management effectiveness depends on the availability of spare parts spare part procurement if the ship is not managed properly then strategic goals unattainable, not corporations and raises the risk of events such as "failing to meet the schedule maintenance and corrective maintenance" and affect the operation of the ship is compromised.

Mitigation Measures:

SOP of revisions of procurement of goods and services no. 29A/HKO. 01/DIR/II-2012 in accordance 16/2018 REGULATION.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

k. Risiko Kinerja Jasa Angkutan Barang;

Strategis pertama adalah memingkatkan Penjualan dan Layanan Angkutan Barang & PUAB dimana KPI nya adalah Load factor muatan barang (%) Jumlah Cargo, dan sasaran strategis kedua adalah mengembangkan bisnis logistic yang terintegrasi dengan KPI Implementasi digitalisasi proses bisnis logistik (%).

Tindakan Mitigasi:

Laporan Implementasi booking online & Labelling sudah di uji cobakan di 5 (lima) cabang, menjaga hubungan dengan customer, melakukan Input Jenis Muatan Berlabel Redpack ke dalam Sistem Reservasi Online, dan mengirim Nota Dinas ke Cabang" perihal Permintaan data untuk optimalisasi pendapatan perusahaan dari penghasilan return cargo.

l. Risiko Asset Idle;

Sasaran strategis idle asset mengarah pada "mengembangkan usaha lainnya" dimana jika sasaran tidak tercapai akan menimbulkan peristiwa risiko asset perusahaan tidak produktif dan akan berdampak pada peluang penghasilan yang hilang.

Tindakan Mitigasi:

Melakukan pengembangan aset cabang PT. PELNI (Persero).

m. Risiko Audit;

Sasaran strategis SPI adalah organization capital, peristiwa berisikonya temuan audit internal, dampak yang ditimbulkan jika peristiwa berisiko terjadi adalah dampak reputasi perusahaan, kecurangan sampai pada kerugian keuangan.

Tindakan Mitigasi:

Melakukan follow up dan pemantauan dengan checklist tindaklanjut dari auditee, mengkategorisasikan temuan-temuan material dan membuat rekapitulasi Potensi Kerugian perusahaan atas hasil temuan, melakukan pembahasan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Audit Internal dan Eksternal bersama Dewan Komisaris.

1. GENERAL (continued)

1.9. Risk Management (continued)

Risk Profile and Mitigation (continued)

k. Performance Of The Freight Transport Services Risk;

The first is the strategic memingkatkan sales and service Goods Transport & PUAB where KPIS are its Load factor freight charge (%) The amount of Cargo, and the second strategic goal is to develop a logistic business terintegrasi with KPI Implementation logistics business processes digitalization (%).

Mitigation Measures:

Report on the implementation of online booking & Labelling already in the test cobakan in 5 (five) branch, keeping in touch with the customer, perform Input types of Payloads Labeled Redpack into the reservation system Online, and send a Note to the Office of the branch "about data Requests for the optimization of the company's revenue from income return cargo.

l. Idle Asset Risk;

Idle asset strategic goals leads to "develop other business" where if goals are not reached will cause event risk asset companies are not productive and will have an impact on the income opportunities are lost.

Mitigation Measures:

Asset development branch PT PELNI (Persero).

m. Audit Risk;

Strategic goals of the organization are capital, SPI event berisikonya internal audit findings, the impact posed if risky events occurring is the impact the reputation of the company, financial losses to the cheating.

Mitigation Measures:

Follow up and monitoring with checklist tindaklanjut from auditees, mengkategorisasikan material findings and make a recap of the company's potential losses over the results of findings, conduct a Follow-up discussion of the results of the Audit examination Internal and external joint Board of Commissioners.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

n. Risiko Likuiditas;

Sasaran strategis Divisi perbendaharaan adalah kinerja keuangan korporat dimana KPI nya adalah Laba konsolidasi PELNI (miliar), EBITDA margin (%), dan penyelesaian utang SLA.

Tindakan Mitigasi:

Melakukan evaluasi posisi aging hutang dan piutang per debitur dan kreditor.

o. Risiko Corporate Branding;

Satu sasaran strategis pada risiko branding corporate yakni sasaran "organization capital" dengan KPI skor GCG dimana ada dua peristiwa berisiko yakni berita negative tentang Pelni di masyarakat umum, kedua tindak lanjut AOI yang tidak dilaksanakan.

Tindakan Mitigasi:

Melakukan media setting untuk sejumlah kegiatan MOU dan penerimaan penghargaan bagi Perusahaan di media massa, dan sudah dilaksanakan Self Assesment GCG tahun 2017 dengan skor 80,448.

p. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM);

Sasaran pertama meningkatkan efektifitas perencanaan operasional, sasaran kedua adalah human capital dimana KPI korporat adalah prosentase pegawai PELNI yang memenuhi standar kompetensi untuk pegawai darat dan pegawai PELNI yang memenuhi standar kompetensi untuk pegawai laut, dan asaran strategis ketiga adalah organization capital dimana indeks keterikatan pegawai menjadi KPInya.

Tindakan Mitigasi:

Sirkulir dan Sosialisasi SK Direksi tentang Struktur Organisasi & Tupoksi (Kantor Pusat & Cabang), memetakan proses bisnis kepada jabatan yang bertanggung jawab untuk seluruh jabatan, dan memberikan pengupahan dan manfaat kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. GENERAL (continued)

1.9. Risk Management (continued)

Risk Profile and Mitigation (continued)

n. Liquidity Risk;

Strategic goals of the Division of Treasury is corporate financial performance where the KPI is a consolidated profit of PELNI (billion), EBITDA margin (%), and debt settlement SLA.

Mitigation Measures:

To evaluate the position of the aging debts and receivables per debtor and creditor.

o. Corporate Branding Risk;

One strategic target for corporate branding risk is the goal of "organization capital" with KPI GCG scores where there are two risky events, namely negative news about Pelni in the general public, both AOI follow-ups that were not implemented.

Mitigation Measures:

Do the media settings for a number of activities of the MOU and the receipt of the award for the company in mass media, and already implemented Self just my Assesment of GCG year 2017 with a score of 80.448.

p. Human Resources (Hr) Risk;

The first target increases the effectiveness of operational planning, the second target is the human capital which corporate KPI is the percentage of employees who meet the competency standards PELNI to employees and officers of the competence standards PELNI for employees, and the third is a strategic organization asaran capital where employees worked attachment index KPI.

Mitigation Measures:

Circular and Dissemination of Directors' Decree on Organizational Structure & Auth (Head Office & Branch), mapping business processes to positions responsible for all positions, and providing remuneration and benefits to employees in accordance with statutory provisions.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

q. Risiko Kapal Barang & Tol Laut ;

Ada dua sasaran strategis pada risiko kapal barang & tol laut yakni meningkatkan efektifitas perencanaan operasional dan meningkatkan penjualan dan layanan angkutan barang. Kedua sasaran tersebut dimiliki oleh dua divisi, pertama divisi pemasaran kapal barang & tol laut, kedua divisi operasi & pelayanan kapal barang & tol laut.

Tindakan Mitigasi:

Penyusunan SOP Operasional Kapal Non Tol Laut, persiapan (kerangka kerja), dan pendataan komponen biaya untuk penentuan tarif komersial.

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Perseroan telah memperoleh sertifikasi atas aset yang digunakan dalam kegiatan usaha utama dibidang pelayaran, meliputi:

1. GENERAL (continued)

1.9. Risk Management (continued)

Risk Profile and Mitigation (continued)

q. *The Toll of the Sea & Freighter Risk;*

There are two strategic goals at the risk of the freighter sea namely the toll increase & effectiveness of operational planning and improve sales and service the transport of goods. The second target is owned by two divisions, the first division of the freighter marketing toll of the sea, both & Division operating freighter Service & & toll of the sea.

Mitigation Measures:

Preparation of Non-Toll Ship Operational SOP, preparation (framework), and data collection of cost components for determining commercial rates.

1.10. Certification of Quality Management System

The Company has certified the assets used in the main business activities in the field of shipping, including:

No.	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa Berlaku/ Validity Period
1.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal/Ship Pollution Prevention National Certificate	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	14 Nopember 2018 s.d. 13 Februari 2019/ November 14, 2018 until February 13, 2019
2.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang/Passengers Vessels Safety Certificate a. KM Tilong kabila b. KM Egon c. KM Pangrango d. KM Lambelu e. KM Bukit Siguntang	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	01 Agustus 2019 19 Mei 2019 13 Februari 2019 27 Februari 2019 25 Maret 2019



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
 Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
 As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

1.10. Certification of Quality Management System (continued)

No.	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa Berlaku/ Validity Period
2.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang/Passengers Vessels Safety Certificate (lanjutan/continued) f. KM Sirimau g. KM Nggapulu h. KM Jetliner i. KM Sangiang j. KM Bukit Raya k. KM Leuser l. KM Awu m. KM Lawit n. KM Kelimutu o. KM Dobonsolo p. KM Tidar q. KM Umsini r. KM Labobar s. KM Wilis t. KM Dorolonda u. KM Sinabung v. KM Ciremai w. KM Gunung Dempo x. KM Kelud		30-Apr-19 26 Juli 2019 02 Maret 2019 11 Januari 2019 19 Februari 2019 26 Mei 2019 09 April 2019 31 Juli 2019 07 September 2019 19 Februari 2019 25 Februari 2019 19 Februari 2019 14 Mei 2019 10 Februari 2019 19 Februari 2019 25 April 2019 19 Februari 2019 08 September 2019 03 Mei 2019
3.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/Minimum Safe Manning Document a. KM Sangiang b. KM Bukit Raya c. KM Lambelu d. KM Lawit e. KM Labobar f. KM Tidar g. KM Ciremai h. KM Dobonsolo i. KM Sinabung j. KM Umsini k. KM Bukit Siguntang l. KM Tatamailau m. KM Kelud n. KM Dorolonda o. KM Nggapulu p. KM Gunung Dempo	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	06/04/2018 - 05/04/2019 13/12/2018 - 13/12/2019 19/11/2018 - 18/11/2019 14/12/2018 - 14/12/2019 07/01/2019 - 06/01/2020 25/01/2019 - 24/01/2020 18/12/2018 - 17/12/2019 22/01/2019 - 21/01/2020 24/01/2019 - 23/01/2020 29/11/2018 - 29/11/2019 28/11/2018 - 27/11/2019 07/02/2019 - 06/08/2019 13/12/2018 - 13/12/2019 06/06/2018 - 06/06/2019 18/11/2018 - 17/11/2019 13/12/2018 - 13/12/2019



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

**1.10. Certification of Quality Management System
(continued)**

No.	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa Berlaku/ Validity Period
3.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/Minimum Safe Manning Document (lanjutan/continued) q. KM Kelimutu r. KM Sirimau s. KM Awu t. KM Leuser u. KM Binaiya v. KM Tilongkabila w. KM Jetliner x. KM Egon y. KM Wilis		14/02/2019 - 13/02/2020 13/02/2019 - 12/02/2020 24/01/2019 - 23/01/2020 24/01/2019 - 23/01/2020 31/07/2018 - 30/07/2019 05/11/2018 - 04/11/2019 03/12/2018 - 02/06/2019 26/03/2018 - 25/03/2019 03/12/2018 - 03/12/2019
4.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal/International Certificate Of Prevention Of Pollution From Ships a. KM Sangiang b. KM Bukit Raya c. KM Lambelu d. KM Lawit e. KM Labobar f. KM Tidar g. KM Ciremai h. KM Sinabung i. KM Bukit Siguntang j. KM Tatamailau k. KM Kelud l. KM Nggapulu m. KM Kelimutu n. KM Sirimau o. KM Awu p. KM Leuser q. KM Binaiya r. KM Tilongkabila s. KM Jetliner t. KM Egon u. KM Wilis	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	31/08/2016 - 30/08/2019 08/09/2017 - 07/09/2020 18/02/2019 - 17/05/2019 09/12/2017 - 08/12/2019 31/09/2016 - 30/09/2019 24/11/2015 - 23/11/2021 09/09/2016 - 08/09/2019 25/07/2018 - 24/07/2021 11/03/2019 - 12/06/2021 23/12/2016 - 22/12/2019 13/07/2018 - 12/07/2020 05/09/2016 - 04/09/2019 06/09/2016 - 07/09/2019 08/10/2016 - 07/10/2019 12/09/2018 - 11/09/2021 14/12/2016 - 13/12/2021 17/11/2016 - 16/11/2021 14/02/2017 - 13/02/2021 04/03/2019 - 30/05/2019 05/03/2019 - 04/06/2019 13/02/2019 - 12/05/2019
5.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran/National certificate in prevention of pollution by Dirt a. KM Dobonsolo b. KM Umsini c. KM Gunung Dempo	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	20/09/2016 - 19/09/2019 06/09/2016 - 05/09/2019 09/09/2016 - 08/09/2019



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
 Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
 As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

1.10. Certification of Quality Management System (continued)

No.	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa Berlaku/ Validity Period
6.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara/ <i>National certificate in prevention of pollution by air</i> a. KM Dobonsolo b. KM Umsini c. KM Dorolonda d. KM Gunung Dempo	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/ <i>Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia</i>	20/09/2016 - 19/09/2019 06/09/2016 - 05/09/2019 09/06/2017 - 08/06/2020 09/06/2016 - 08/06/2019
7.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/ <i>National certificate in prevention of pollution by oil</i> a. KM Gunung Dempo	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/ <i>Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia</i>	04/06/2015 - 03/06/2019
8.	Sertifikat Garis Muat, Lambung dan Mesin - Kapal Penumpang/ <i>Load Line, Hull and Machine - Passenger Ships Certificate:</i> a. KM Awu b. KM Bukit Raya c. KM Binaiya d. KM B. Siguntang e. KM Ciremai f. KM Dobonsolo g. KM Dorolonda h. KM Egon i. KM G. Dempo j. KM Kelimutu k. KM Kelud l. KM Lawit m. KM Leuser n. KM Lambelu o. KM Labobar p. KM Nggapulu q. KM Pangrango r. KM Sirimau s. KM Sinabung t. KM Sangiang u. KM Tilong Kabila v. KM Tatamailau w. KM Tidar x. KM Umsini y. KM Wilis z. KM Caraka Jn III-4 aa. KM Caraka Jn III-22 ab. KM Caraka Jn III-32 ac. KFC Jet Liner	PT Biro Klasifikasi Indonesia	03/7/2017 - 08/06/2021 30/9/2014 - 27/3/2019 2/6/2014 - 25/3/2019 24/10/2016 - 23/5/2021 29/11/2018 - 01/08/2023 10/03/2018 - 10/03/2023 25/10/2016 - 11/7/2021 29/06/2015 - 29/06/2020 31/08/2018 - 20/06/2023 7/5/2015 - 4/2/2020 08/11/2018 - 07/05/2019 26/5/2016 - 8/12/2019 16/10/2018 - 28/05/2023 23/05/2017 - 15/05/2022 12/9/2014 - 26/6/2019 07/02/2017 - 05/04/2022 27/03/2017 - 09/11/2021 21/9/2015 - 17/5/2020 31/05/2017 - 18/04/2022 19/6/2014 - 12/5/2019 12/6/2015 - 4/2/2020 19/1/2016 - 25/3/2020 26/1/2017 - 26/11/2021 10/8/2015 - 28/7/2020 11/5/2015 - 11/2/2020 24/01/2017 - 25/10/2021 8/3/2013 - 12/11/2017 4/7/2014 - 14/5/2019 30/11/2018 - 28/02/2019



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.11. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Bidang Usaha/ Line of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
				31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, custom clearance, pedalaman depo/Transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.		99,47%	361.990.635.630	284.811.017.330
PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal/General trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services.		99,50%	183.921.499.919	138.318.058.306
PT Rumah Sakit Pelni	Rumah Sakit/Hospital		99,96%	404.850.884.000	290.200.259.225

1.11.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)

PT Sarana Bandar Nasional didirikan berdasarkan Akte Notaris Soelaiman Arjasasmita di Jakarta No. 59 tanggal 31 Maret 1986 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor Q2-1932 HT 01.01 tahun 1987 tanggal 5 Maret 1987. Anggaran Dasar Entitas diperbaharui dengan Akte Notaris Ny. Imah Fatimah, SH No. 17 tanggal 12 Agustus 1998. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp15.000.000.000.

1. GENERAL (continued)

1.11. Subsidiaries

As of December 31, 2018 and 2017, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company, are as follows:

1.11.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)

PT Sarana Bandar Nasional was established based on the Notary Deed Soelaiman Arjasasmita in Jakarta No. 59 March, 31 1986 and has received approval by the Minister of Law and legislation with the Decree HT 01.01 02-1932 Number 1987 on 5 March 1987. The basic budget entity updated with the Notary Deed Mrs. Imah Fatimah, SH No. 17 12 August 1998. The capital placed and paid in full is Rp15.000.000.000.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

**1.11.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)
 (lanjutan)**

Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Notaris Saifullah, SH No. 9 tahun 2008 pada tanggal 12 Agustus 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-5912.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 4 September 2008.

Modal Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT Sarana Bandar Nasional Nomor 59 tanggal 31 Maret 1986, Notaris Soeleman Ardjasmita, SH dan Akta perubahan anggaran dasar terakhir Nomor: 17 tanggal 12 Agustus 1998, Notaris Imas Fatimah, SH modal dasar perseroan berjumlah Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap lembar saham.

1. GENERAL (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

**1.11.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)
 (continued)**

The last basic budget changes based on the Deed Notary Saifullah, SH No. 9 Year 2008 on August, 12 2008 and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-5912.AH.01.02 dated September, 4 2008.

Capital Stock

Based on Deed of Establishment of PT Sarana Bandar Nasional No. 59 dated March 31, 1986, Notary Soeleman Ardjasmita, SH and Deed perubahan Last statutes No. 17 dated August 12, 1998, Notary Imas Fatimah, SH authorized capital amounted to Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah) divided into 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share.

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham / Shares	Nilai Nominal/ Par Value (Rp)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid Shares Value (Rp)	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage
PT Pelni (Persero)	14.920	1.000.000	14.920.000.000	99,47%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	80	1.000.000	80.000.000	0,53%
Jumlah / Total	15.000	1.000.000	15.000.000.000	100,00%

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) tanggal 12 Nopember 2013, dan, Surat Keputusan Direktur Utama PT PELNI (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor: 01/DIR/SBN/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Sarana Bandar Nasional, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Bandar Nasional sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors

Based on the Minutes of the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) of PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) on dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) dated November 12, 2013, and, the Decree of the President Director of PT Pelni (Persero) as the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) Number: 01 / DIR / SBN / X / 2014 dated October 16, 2014, on Termination and Appointment of Directors of PT Sarana Bandar Nasional, the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Sarana Bandar Nasional as follows:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

**1.11.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)
(lanjutan)**

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

**31 Desember/
December 2017**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Capt. Daniel E. Bangonan
Komisaris : August Harris, SH

Direksi

Direktur Utama : Suharyanto
Direktur Operasional : Murdiyoto
Direktur Keuangan : Nofiyetti Edizar

Tempat dan Kedudukan

Dalam menjalankan usahanya PT Sarana Bandar Nasional berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Tengah II Blok B 13-14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510.

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak 255 dan 118 karyawan. (Tidak Diaudit)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Aset	361.990.635.630	284.811.017.330
Liabilitas	70.666.401.250	43.184.898.925
Ekuitas	291.324.234.381	241.626.118.405
Pendapatan	412.984.063.080	292.879.633.825
Beban	(362.811.674.935)	(247.376.106.144)
Laba Tahun Berjalan	50.172.388.145	45.503.527.681

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

PT Pelita Indonesia Djaya Corporation, Jakarta didirikan berdasarkan Akte Notaris Djojo Mulyadi, SH di Jakarta No. 3 tanggal 29 September 1969 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1969.

1. GENERAL (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

**1.11.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)
(continued)**

**Board of Commissioners and Directors
(continued)**

Board Of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Director

President Director
Operation Director
Finance Director

Place and Position

Currently, PT Sarana Bandar Nasional is located in Jl. Cempaka Putih, Central II Block B 13-14 Cempaka Putih 10510.

Human Resources

The number of employees of the company on December 31, 2018 and 2017 are 255 and 118 employees. (Unaudited)

Summary of Key Financial Information

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya Corporation, Jakarta was established based on the Notary Act Djojo Mulyadi, SH in Jakarta No. 3 dated September 29, 1969 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 9, 1969.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

**1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)
(lanjutan)**

Anggaran Dasar Perseroan diperbaharui dengan Akte Notaris SP. Henny Singgih, SH No. 21 tanggal 10 April 2001. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp2.010.000.000.

Modal Saham

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 99,5% penyertaan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan 0,5% penyertaan Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH No. 7 tanggal 10 Juni 2009 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU-43800.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 4 september 2009.

1. GENERAL (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

**1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC)
(continued)**

The Articles of Association of the Company are updated by Notarial Deed SP. Henny Singgih, SH. No. 21 dated April 10, 2001. The issued and fully paid capital amounted to Rp2,010,000,000.

Shares Capital

Shares Capital paid to the entity is 99.5% ownership of PT Pelayaran Nasional Indonesia and 0.5% ownership in accordance Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni Deed Raden Mas Soediarso Soenarto, SH No. 7 dated June 10, 2009 were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-43800.AH.01.02 in 2009 on September 4, 2009.

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham / Shares	Nilai Nominal/ Par Value (Rp)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid Shares Value (Rp)	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage
PT Pelni (Persero)	2.000	1.000.000	2.000.000.000	99,50%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	10	1.000.000	10.000.000	0,50%
Jumlah / Total	2.010	1.000.000	2.010.000.000	100,00%

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pelita Indonesia Djaya Nomor :AHU-10.AH.02.02- Tahun 2009 Tanggal 24 April 2009 Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelita Indonesia Djaya maka susunan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia per tanggal 27 Mei 2016 sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors

Based on the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) of PT Pelita Indonesia Djaya Number: AHU-10.AH.02.02- Year 2009 Date 24 April 2009 Decree of the Head of the National Defence Decree No. 104 / KEP-17.3 / III / 2011 Date March 21, 2011 On Termination and Transfer of Duties Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelita Indonesia Djaya membership of the Board of Directors the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia as of May 27, 2016 as follows:

**31 Desember/
December 2018**

Dewan Komisaris
Komisaris Utama

:

Olih Masolich Sodikin

:

Board Of Commissioners
President Commissioner



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11. Subsidiaries (continued)

**1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)
(lanjutan)**

**1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC)
(continued)**

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

**Board of Commissioners and Directors
(continued)**

**31 Desember/
December 2018**

Direksi

Director

Direktur Utama : Effendi
Direktur Operasi : Asiano Yames Iryanto Lontoh

President Director
Operation Director

Tempat dan Kedudukan

Place and Position

Entitas berkedudukan di Jalan Palmas No 2
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Entities domiciled in Palmas No 2, Tanjung
Priok Port in North Jakarta.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 masing-
masing sebanyak 1.098 dan 1.002. (Tidak
diaudit)

The number of employees of the company
on December 31, 2018 and 2017 are 1.098
and 1.002 employees. (Unaudited)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

Summary of Key Financial Information

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Aset	183.921.499.919	138.318.058.306	Assets
Liabilitas	65.803.534.754	60.293.748.001	Liabilities
Ekuitas	118.117.965.165	78.024.310.305	Equity
Pendapatan	385.258.660.978	315.514.834.715	Revenues
Beban	(344.855.299.015)	(281.741.637.595)	Expenses
Laba Tahun Berjalan	40.403.361.963	33.773.197.120	Profit for The Year

1.11.3. PT Rumah Sakit PELNI

1.11.3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI, didirikan
berdasarkan Akta Notaris Yulkhaizar, SH No.
7 tanggal 9 November 2007 di Jakarta. PT
Rumah Sakit PELNI merupakan salah satu
usaha sampingan dari Entitas yang sejak
tanggal 1 Juli 2007 dipisah menjadi Entitas
Anak. Modal yang ditempatkan dan disetor
penuh adalah sebesar Rp59.480.000.000.

PT Rumah Sakit PELNI, was established
based on the Deed Notary Yulkhaizar, SH
No. 7 date of November 9, 2007 in Jakarta.
PT Rumah Sakit PELNI is one of the side
business of entity that since July 1, 2007
are separated into subsidiary. The capital
placed and paid in full is
Rp59.480.000.000.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.3. PT Rumah Sakit PELNI (lanjutan)

Modal Saham

Berdasarkan Akta Notaris Yulkhaizar Panuh, SH., No. 7 tanggal 9 November 2008, modal dasar Perseroan berjumlah Rp237.920.000.000 terbagi atas 237.920 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000.

Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% atau Rp 59.480.000.000 yang terdiri dari 59.480 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

1. GENERAL (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

1.11.3. PT Rumah Sakit PELNI (continued)

Share Capital

Based on Notarial Deed Yulkhaizar Panuh, SH., No.7 dated November 9, 2008, authorized capital stock amounting to Rp237.920.000.000 divided into 237.920 shares, each share having a nominal value of Rp 1.000.000.

Authorized and issued capital stock of 25% or Rp 59,480,000,000 consisting of 59.480 shares with a nominal value of Rp1.000.000.

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham / Shares	Nilai Nominal/ Par Value (Rp)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Shares Value (Rp)	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage
PT Pelni (Persero)	59.455	1.000.000	59.455.000.000	99,96%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	25	1.000.000	25.000.000	0,04%
Jumlah / Total	59.480	1.000.000	59.480.000.000	100,00%

Selanjutnya berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan khususnya perihal Persetujuan Konversi Hutang menjadi Penambah Penyertaan Modal pada PT Rumah Sakit Pelni, telah diambil keputusan bahwa Anggaran Dasar PT Rumah Sakit Pelni diubah melalui Akta No.12 tanggal 23 April 2018, dihadapan Notaris Ida Adiningsih S.H., mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor PT Rumah Sakit Pelni. Sehingga komposisi kepemilikan pemegang saham tahun 2018 menjadi:

Furthermore, based on the results of the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, especially regarding Debt Conversion Agreement to Increase the Equity Participation at Pelni Hospital, a decision was made that the Articles of Association of Pelni Hospital were amended through Deed No.12 dated April 23 2018 before Notary Ida Adiningsih SH, regarding changes in the increase in the issued / paid-up capital of PT Pelni Hospital. So that the composition of shareholders ownership in 2018 becomes:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham / Shares	Nilai Nominal/ Par Value (Rp)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Shares Value (Rp)	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage
PT Pelni (Persero)	100.035	1.000.000	100.035.000.000	99,98%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	25	1.000.000	25.000.000	0,02%
Jumlah / Total	100.060	1.000.000	100.060.000.000	100,00%



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11. Subsidiaries (continued)

1.11.3. PT Rumah Sakit PELNI (lanjutan)

1.11.3. PT Rumah Sakit PELNI (continued)

Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Directors

Berdasarkan Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Mayoritas PT Rumah Sakit Pelni Nomor: 10.22/03/SK/HKO.01/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelni, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Rumah Sakit Pelni sebagai berikut:

In accordance with Decree of the Board of Directors of PT Pelni, Appointment of Commissioners of PT RS PELNI and Decree No. 10.22/03/SK/HKO.01/2018 dated October 22, 2018 on the Appointment and Transfer of Board of Commissioners of PT RS PELNI with the following composition:

**31 Desember/
December 2018**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ganefi
Komisaris : Wibisono, SE., MM
Komisaris : Laksda TNI (PURN) dr. H Darmansyah

Board Of Commissioners

: President Commissioner
: Commissioner
: Commissioner

Direksi

Direktur Utama : dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B.BTKV (K)
Direktur Adm.& Keuangan : Mohamad Kartobi
Direktur Operasi : dr. Rooshardianty Suryandari, MBA
Direktur Medis : dr. Astari Mayang Anggarani, MARS

Directors

: President Director
: Director of Adm & Financial
: Director of Operation
: Director of Medical

Tempat dan Kedudukan

Place and Position

Saat ini, PT RS Pelni beralamat di Jl. Aipda K.S Tubun No.92-94, Jakarta Barat 11410.

Currently, PT RS Pelni Located In Aipda K. S Tubun No.92-94, West Jakarta 11410.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak 1.214 dan 1.227 karyawan. (Tidak diaudit)

The number of employees of the company on December 31, 2018 and 2017 are 1.214 and 1.227 employees. (Unaudited)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

Summary of Key Financial Information

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Aset	404.850.884.000	290.200.259.225	Assets
Liabilitas	194.873.138.613	157.925.695.933	Liabilities
Ekuitas	209.977.745.386	132.274.563.292	Equity
Pendapatan	466.952.775.747	447.991.683.195	Revenues
Beban	(424.902.703.471)	(410.966.676.305)	Expenses
Laba Tahun Berjalan	37.406.997.564	37.025.006.890	Profit for The Year

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN

PT PelnI (Persero) dalam menjalankan kegiatan jasa perkapalan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan, serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan jasa perkapalan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
- b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- c. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*).
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 tahun 2015, tentang Standar Keselamatan Pelayaran.
- h. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 37 tahun 2015 tentang Standar pelayanan penumpang angkutan laut.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 65 tahun 2015 tentang Komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.
- j. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 119 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 37 tahun 2015, tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut.

2. SHIPPING SERVICES REGULATION

PT PelnI (Persero) in carrying out the shipping services activities is subject to the Law of the Republic of Indonesia number 17 of 2008, concerning Shipping and Regulation of the Government of Republic of Indonesia number 61 of 2009, on Ports, as well as the provisions stipulated by the Minister of Communications. Some important provisions related to shipping services:

- a. Presidential Regulation Number 2 of 2016 regarding State-Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.*
- b. Presidential Regulation Number 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Groceries and Valuable Goods.*
- c. Presidential Regulation Number 106 of 2015 regarding Public Service Obligation Implementation for Marine Cargo.*
- d. Minister of Transportation Regulation Number PM. 4 of 2016 as Amendment to Minister of Transportation Regulation Number PM 161 of 2015 regarding Public Service Obligation for Marine Cargo.*
- e. The Republic of Indonesia Minister of Transportation Regulation Number PM. 6 of 2016 regarding State-Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.*
- f. Minister of Transportation Regulation Number 10 of 2016 regarding Marine Cargo Transportation Tariff in Public Service Obligation Implementation.*
- g. Minister of Transportation Regulation No. PM 20 Year 2015 regarding Maritime Safety Standards..*
- h. Minister of Transportation Regulation No. PM 37 of 2015 regarding Standard sea transportation services for passengers.*
- i. Minister of Transportation Regulation No. PM 65 of 2015 regarding Cost components of compensation paid by the government to implement public service obligations of maritime transport for economy class passengers.*
- j. Minister of Transportation Regulation No. PM 119 of 2015 regarding Amendment to the Minister of Transportation Regulation No. PM 37 of 2015, about maritime passenger transport service standards.*



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN (lanjutan)

- k. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 146 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 74 tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa transportasi.
- l. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 161 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
- m. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 168 tahun 2015, tentang Tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*).
- n. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 170 tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 16 tahun 2014 tentang tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi.
- o. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 182 tahun 2015, tentang Tarif muatan untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak.
- p. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/7/1/DJPL-15 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/18/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2016 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 30 November 2015.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

- a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018:
 - PSAK 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

2. SHIPPING SERVICES REGULATION (continued)

- k. Minister of Transportation Regulation No. PM 146 of 2015 regarding Second amendment for Minister of Transportation Regulation No. 74 of 2015 about the implementation and operation of transport services.
- l. Minister of Transportation Regulation No. PM 161 of 2015 regarding Organizing public service obligations for sea freight.
- m. Minister of Transportation Regulation No. PM 168 of 2015 regarding Sea freight rates in order to do public service obligation.
- n. Minister of Transportation Regulation No. PM 170 of 2015 regarding Amendments to the Minister of transportation's regulation No. PM 16 of 2014 about upper limit rates for domestic sea passenger in economy class.
- o. Minister of Transportation Regulation No. PM 182 of 2015 regarding Cargo rates to subsidize the ship cattle operation.
- p. Marine Transportation General Directorate Decree Number AL.108/7/1/DJPL-15 as the Second Amendment on Marine Transportation General Directorate Decree Number AL.108/5/18/DJPL-15 regarding Route Network and Requirement for Pioneer Shipping Vessel Budget year 2016 and Implementation Provisions dated November 30, 2015.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK")

- a. The Amendments and Interpretations of PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants which are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018:
 - PSAK 2 (Amendment 2016), "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative"

The amendments require an entity to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
 (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI
 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)**

**a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan
 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari
 Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif
 untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1
 Januari 2018: (lanjutan)**

- PSAK 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan" (lanjutan)

Amandemen tersebut tidak menentukan format spesifik untuk mengungkapkan aktivitas pendanaan; namun, suatu entitas dapat memenuhi tujuan pengungkapan dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dalam laporan posisi keuangan.

- PSAK 13 (Amandemen 2017), "Properti Investasi: tentang Pengalihan Properti Investasi"

Amandemen ini mengatur perubahan penggunaan properti investasi, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"

Penyesuaian ini mengatur bahwa entitas dapat memilih untuk mengukur investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimiliki oleh, atau dimiliki secara tidak langsung melalui, entitas yang merupakan organisasi modal ventura, atau reksa dana, unit perwalian dan entitas serupa termasuk dana asuransi terkait- investasi, pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Entitas melakukan pemilihan tersebut secara terpisah untuk masing-masing entitas asosiasi atau ventura bersama.

- PSAK 16 (Amandemen 2015), "Aset Tetap: tentang penambahan paragraf yang terkait dengan Aset Agrikultur"

Mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer plants) masuk ruang lingkup PSAK 16 : Aset Tetap; tanaman produktif sebagai Tanaman Hidup yang (i) digunakan dalam proses produksi atau penyediaan produk agrikultur, (ii) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk lebih dari 1 periode, dan (iii) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

**3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
 FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")
 AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL
 ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") (continued)**

**a. The Amendments and Interpretations of PSAK
 issued by the Financial Accounting Standards
 Board of the Indonesian Institute of Accountants
 which are effective for the financial year
 beginning on or after January 1, 2018: (continued)**

- PSAK 2 (Amendment 2016), "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative" (continued)

The amendments do not prescribe a specific format to disclose financing activities; however, an entity may fulfill the disclosure objective by providing a reconciliation between the opening and closing balances in the statement of financial position for liabilities arising from financing activities.

- PSAK 16 (Amendment 2017), "Investment Property: Transfers of Investment Property"

This amendment governs changes in the use of investment property, when the property meets, or stops fulfilling, the definition of investment property and there is evidence of changes in use.

- PSAK 15 (Improvement 2017), "Investments in Associates and Joint Ventures"

This adjustment stipulates that the entity may choose to measure investments in associates or joint ventures owned by, or indirectly through, entities that are venture capital organizations, or mutual funds, trusteeship units and similar entities including investment-related insurance funds, at fair value through profit or loss in accordance with PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement. The entity makes these selections separately for each associate or joint venture.

- PSAK 16 (Amendment 2015), "Fixed Asset: regarding Adding Paragraphs related to Agricultural Assets"

Clarifying that biological assets that meet the definition of bearers are within the scope of PSAK 16: Fixed Assets; productive plants as Living Plants which (i) are used in the process of producing or supplying agricultural products, (ii) are expected to produce products for more than 1 period, and (iii) have very rare possibilities to be sold as agricultural products, except for the sale of residues incidental.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)**

**a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari
Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1
Januari 2018: (lanjutan)**

- PSAK 16 (Amandemen 2015), "Aset Tetap: tentang penambahan paragraf yang terkait dengan Aset Agrikultur" (lanjutan)

Amandemen ini tidak relevan dengan operasi dan bisnis Perseroan sehingga tidak menyebabkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak pada penyajian maupun pengungkapan terhadap laporan keuangan grup.

- PSAK 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"

Amandemen ini mengklarifikasi hal berikut:

- Bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya;
- Bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak;
- Bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai;

**3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")
AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") (continued)**

**a. The Amendments and Interpretations of PSAK
issued by the Financial Accounting Standards
Board of the Indonesian Institute of Accountants
which are effective for the financial year
beginning on or after January 1, 2018: (continued)**

- PSAK 16 (Amendment 2015), "Fixed Asset: regarding Adding Paragraphs related to Agricultural Assets" (continued)

This amendment is not relevant to the operations and business of the Company so that it does not cause changes to the Company's accounting policies and does not have an impact on the presentation or disclosure of the group's financial statements.

- PSAK 46 (Amendment 2016), "Taxation; Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses"

The amendments clarify the following:

- That the temporary difference may be deducted arising when the carrying amount of the debt instrument assets measured at fair value and fair value is less than the tax purpose, regardless of whether the debt instrument's holders aspect to recover the carrying amount of the debt instruments by self or by use, for example by owning and receiving a contractual cash flow, or a combination of both.
- The taxable income will be available therefore the deductible temporary differences can be utilized, and the valuation of the deductible temporary differences shall be made in accordance with the tax regulation;
- That tax deductions arising from the reversal of deferred tax assets are exempt from future estimated taxable income. Then the entity compares the temporary differences that can be deducted by the estimated future taxable income that does not include the tax deductions resulting from the reversal of the deferred tax assets to assess whether the entity has sufficient future taxable income;



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)**

**a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari
Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1
Januari 2018: (lanjutan)**

- PSAK 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan:
tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk
Rugi yang Belum Direalisasi" (lanjutan)

- Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak
masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa
aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika
terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan
besar entitas akan mencapai nilai pemulihan
tersebut.

- PSAK 53 (Amandemen 2017), "Pembayaran
Berdasarkan Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran
Transaksi Pembayaran Berdasarkan Saham"

Amandemen ini mengatur klasifikasi dan pengukuran
transaksi pembayaran berbasis saham yang
diselesaikan dengan kas serta mensyaratkan
adanya pengungkapan informasi tambahan yang
diperlukan.

- PSAK 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan
Kepentingan Dalam Entitas Lain"

Penyesuaian ini mengatur bahwa ketika kepentingan
entitas dalam entitas anak, ventura bersama, atau
entitas asosiasi diklasifikasikan sebagai dikuasai
untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak
Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan, entitas tidak disyaratkan untuk
mengungkapkan ringkasan laporan keuangan untuk
entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi.

- PSAK 69 (2015), tentang "Agrrikultur"

PSAK ini mengatur tentang definisi tanaman
produktif, transformasi biologis, aktivitas agrikultur,
pengakuan dan pengukuran aset biologis, serta
keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat
pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan
nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset
biologis.

**3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")
AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") (continued)**

**a. The Amendments and Interpretations of PSAK
issued by the Financial Accounting Standards
Board of the Indonesian Institute of Accountants
which are effective for the financial year
beginning on or after January 1, 2018: (continued)**

- PSAK 46 (Amendment 2016), "Taxation;
Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized
Losses" (continued)

- Estimated on the possibility of the future taxable
income may include the recovery of some of the
Entity's assets over than its carrying amount if
there is sufficient evidence that prove the Entity
can be achieve this recovery amounts.

- PSAK 53 (Amendment 2017), "Classification and
Measurement of Share-based Payment
Transactions"

This amendment regulates the classification and
measurement of stock-based payment transactions
that are settled in cash and requires the disclosure
of additional information needed.

- PSAK 53 (Improvement 2017), "Disclosures of
Interest in Other Entities"

This adjustment stipulates that when the interests
of an entity in a subsidiary, joint venture or
associate are classified as controlled for sale in
accordance with PSAK 58: Non-Current Assets
Controlled for Sale and Discontinued Operations,
the entity is not required to disclose a summary of
financial statements for subsidiaries, joint venture,
or associate.

- PSAK 69 (2015), regarding "Agricultural"

This PSAK provides for the definition of productive
crops, biological transformation, agricultural
activities, recognition and measurement of
biological assets, as well as gains and losses
arising from the initial recognition of biological
assets at fair value less costs to sell and from
changes in fair value less the cost of selling
biological assets.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)**

**a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari
Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1
Januari 2018: (lanjutan)**

- PSAK 69 (2015), tentang "Agrikultur" (lanjutan)

Penerbitan standar baru ini tidak relevan dengan kegiatan usaha Grup, sehingga tidak memberikan dampak pada penyajian maupun pengungkapan terhadap laporan keuangan Grup.

Penerapan Standar, Amandemen dan Penyesuaian Standar, tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tahun ini dan tahun sebelumnya.

**b. Interpretasi Standar yang telah diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan
Akuntan Indonesia, namun baru berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini
diperkenankan, yaitu:**

- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka"
- ISAK 34, "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan interpretasi standar akuntansi keuangan tersebut.

**c. Standar dan Amandemen Standar yang telah
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, relevan
namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020,
dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:**

- PSAK 15 (Amandemen), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 62 (Amandemen), "Kontrak Asuransi: Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"

**3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")
AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") (continued)**

**a. The Amendments and Interpretations of PSAK
issued by the Financial Accounting Standards
Board of the Indonesian Institute of Accountants
which are effective for the financial year
beginning on or after January 1, 2018: (continued)**

- PSAK 69 (2015), regarding "Agricultural" (continued)

The issuance of this new standard is irrelevant to the Group's business activities, so as not to have an impact on the presentation or disclosure of the Group's financial statements.

The adoption of Standards, Amendments and Standard Adjustments does not have a material impact on disclosures or amounts recognized in the consolidated financial statements for this year and the previous year.

**b. Standard Interpretation that has been issued by
the Financial Accounting Standards Board of the
Indonesian Institute of Accountants, but has only
been effective for the financial year beginning on
or after January 1, 2019, with early application
permitted:**

- ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"
- ISAK 34: "Uncertainty Over Income Tax Treatments"

The Company is evaluating the possible impact on the issuance of these interpretation of financial accounting standards.

**c. Standard and Amendment Standards that have
been issued by the Financial Accounting
Standards Board of the Indonesian Institute of
Accountants, are relevant but only effective for
the financial year beginning on or after January 1,
2020, with early application permitted:**

- PSAK 15 (Amendment), "Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures"
- PSAK 62 (Amendment), "Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts"



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)**

c. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, relevan namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu: (lanjutan)

- PSAK 71 (Amandemen 2017), "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 (Amandemen 2017), "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"

Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar dan amandemen standar akuntansi keuangan tersebut.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasi disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia yang telah konvergen dengan IFRS, dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 untuk diterbitkan pada tanggal 22 April 2019.

b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

**3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")
AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") (continued)**

c. *Standard and Amendment Standards that have been issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, are relevant but only effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted: (continued)*

- *PSAK 71 (Amendment 2017), "Financial Instruments"*
- *PSAK 72 (Amendment 2017), "Revenue from Contract with Customers"*
- *PSAK 73, "Leases"*

The Group is evaluating the possible impact on the issuance of these standards and amendments to the financial accounting standards.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. The Statement of Compliance

The Consolidated financial statements have been compiled and prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation of Financial Accounting Standard issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) - Indonesian Institute of Accountants who has been converging with IFRS, and Regulation No. VIII.G.7, "Presentation of Financial Statements for Public Listed Company".

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018 to be published on April 22, 2019.

b. Basic of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statement

Presentation of the consolidated financial statements are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 1 (Amendment 2015), "Presentation of Financial Statements".



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi tertentu dan asumsi-asumsi.

Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi di dalam Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 5.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada tiap entitas dalam Grup diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basic of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statement (continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

The consolidated statements of cash flows prepared using the direct method the cash flows into operating, investing and financing activities. For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents comprise of cash on hand, cash in bank and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions.

It also requires management to consider in the process of implementing the accounting policies within the Group. Complex areas or require higher levels of consideration, or areas where assumptions and estimates may have significant impact on the consolidated financial statements are disclosed in Note 5.

Although these estimates are based on management's best knowledge of the event and the current action, the results may differ resulting in the amount originally estimated.

c. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Transaction included in the financial statements of each of the entities in the Group are measured using the currency of the primary economic environment which the operate entity ("the functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan (lanjutan)

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada tiap entitas dalam Grup diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Seluruh angka keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali apabila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Sesuai PSAK No.10 (R-2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (Penyesuaian 2014), pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional (yaitu: Rupiah). Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Foreign Currency Translation (continued)

Functional and Reporting Currencies (continued)

Transaction included in the financial statements of each of the entities in the Group are measured using the currency of the primary economic environment which the operate entity ("the functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

The entire financial figures in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah unless otherwise stated.

Transactions and Balances

In accordance with PSAK No.10 (R-2010): The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates (Adjustment 2014), on initial recognition, foreign exchange transactions are recorded in the functional currency (ie: Rupiah). The amount of foreign currency is calculated into the functional currency at the spot rate between the functional and foreign currencies on the date of the transaction.

At the end of each reporting period:

- Foreign exchange monetary items are translated using the closing exchange rate;
- Pos nonmonetary measured in historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date of the transaction; and
- Pos nonmonetary measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date when fair value is measured.

Transactions denominated in foreign currencies are translated into the functional currency using the exchange rate on the date of the transaction. Exchange gains or losses arising from transaction settlement and from translation at the end of the year exchange rates on monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)

Mata Uang Penyajian Berbeda dengan Mata Uang Fungsionalnya

Ketika penggunaan mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka:

- Aset dan liabilitas disajikan/dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
- Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

	2018	2017	
1 EURO	Rp16.560	Rp16.174	1 EURO
1 USD	Rp14.481	Rp13.548	1 USD
100 JPY	Rp 131	Rp 120	100 JPY
1 AUD	Rp10.211	Rp10.557	1 AUD
1 SGD	Rp10.603	Rp10.134	1 SGD

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah, dan dicatat sesuai dengan 'kurs pajak mingguan' yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

d. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Foreign Currency Translation (continued)

Presentation Currency Differs from its Functional Currency

When the use of a presenting currency differs from its functional currency, then:

- Assets and liabilities are presented/ translated at the closing rate at the statement of financial position date;
- Income and expenses for each income statement and other comprehensive income are translated at the transaction rate; and
- The resulting foreign exchange difference is recognized in other comprehensive income.

The closing exchange rate used at the reporting is the middle rate of Bank Indonesia as follows:

Furthermore, for the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) with respect to claims and liabilities in foreign currency payable in dollars, and recorded in accordance with the 'weekly tax rate' prevailing at the date of issuance of tax invoice.

d. Basic of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Perusahaan menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan diatas.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di-investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak.

Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan, yang relevan dalam menilai apakah hak suara atas investee tersebut mencukupi untuk memberinya kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relative terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa investor memiliki atau tidak memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilihan suara dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak tersebut dan tidak mengkonsolidasikan entitas anak ketika kehilangan pengendaliannya. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisi atau dilepas selama tahun berjalan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan kepentingan nonpengendali.

Perusahaan juga mengatribusikan jumlah laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

**4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Basic of Consolidation (continued)

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally.

The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicates that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the noncontrolling interest.

Total comprehensive income are attributed to owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Selisih antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali.

Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non-pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Basic of Consolidation (continued)

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transaction between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest.

All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented in equity. The interests of a non-controlling shareholders may initially be measured at fair value or on the proportion of non-controlling interest in the identifiable net assets of the acquired party.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan non-pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non-pengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah penghasilan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non-pengendali, bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto entitas anak disajikan sebagai "kepentingan non-pengendali" pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian.

Hak non-pengendali atas laba (rugi) neto entitas anak pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian disajikan sebagai "Laba/Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali".

e. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi.

**4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Basic of Consolidation (continued)

Measurement options are made at the time of acquisition on an acquisition basis. After the acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of non-controlling interest in initial recognition plus the proportion of non-controlling interest in subsequent changes in equity. The amount of comprehensive income is attributable to non-controlling interests, even if this results in a non-controlling interest having a deficit balance.

The portion of minority shareholders' ownership of the subsidiaries' net assets is presented as "non-controlling interests" in the Consolidated Statements of Financial Position.

The non-controlling interest in net income (loss) of the subsidiaries in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income is presented as "Income or Loss for the Period Attributable to Non-Controlling Interests".

e. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi pada saat kehilangan pengendali.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas yang menyiapkan laporan keuangannya ("Entitas pelapor"):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:

- 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
- 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau
- 3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Business Combinations (continued)

If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

f. Business Combinations of Entities Under Common Control

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as Additional Paid in Capital and is not recycled to profit and loss when control is lost.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period in which the merging entities were placed under common control.

g. Transactions with Related Parties

The related party is a person or Entity associated with the Entity prepares its financial statements ("Entity complainant"):

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

- 1) *Has control or joint control over the reporting entity,*
- 2) *Has significant influence over the reporting entity; or*
- 3) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity*

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- 1) *The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**g. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)**

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya)
 - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir - a.
 - 7) Orang yang diidentifikasi dalam butir - a, angka 1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - 8) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**g. Transactions with Related Parties (continued)**

- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)
- 2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - 3) Both entities are joint venture of the same third party.
 - 4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - 5) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - 6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - 7) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity)
 - 8) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

- 1) deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk deposit on call); dan
- 2) instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

i. Kas dan Setaran Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi, jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai "kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya" dan dikelompokkan pada aset keuangan lancar lainnya.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan operasi dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, bank and instruments that can be classified as cash equivalents include:

- 1) time deposits with original maturities of three months or less from the date of placement and is unrestricted and not warranted (including deposits on call); and
- 2) market instruments and can be liquid within a period of not more than three (3) months.

i. Restricted cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which are placed as bank guarantees, performance bond and others for a particular purpose are classified as "restricted cash and cash equivalents" and are classified into other current financial assets.

j. Investments in Associates and Joint Ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies. A joint venture is arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The results of operations and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment, or a portion thereof, is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with PSAK 58 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Grup dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Grup telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat investee menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama.

Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.

Persyaratan dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama Grup. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investments in Associates and Joint Ventures (continued)

The Group's share of an associate's loss that exceeds the carrying amount of an investment (which includes all long-term interests, substantially, is part of the Group and the net investment value of a subsidiary in an associate) is recognized only to the extent that the Group has legal obligations or constructive obligations or make payments for the obligations of associates or joint ventures.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture.

Any excess of the cost of the acquisition over the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the investee is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate or a joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55.

Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi atau ventura bersama.

Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi atau ventura bersama akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait, Grup mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investments in Associates and Joint Ventures (continued)

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55.

The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture.

In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Ketika Grup mengurangi kepemilikannya di entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Group terus menggunakan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke dalam laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan penurunan kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

k. Aset Keuangan

Aset keuangan diakui ketika Grup merupakan bagian dari salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrument tersebut.

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang regular mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu tertentu yang umumnya ditetapkan dalam peraturan atau kebiasaan yang berlaku dipasar dimana pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya. Pada pengakuan awal biaya transaksi diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan atau penerbitan aset keuangan (selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) yang ditambahkan atau dikurang secara tepat ke nilai wajar aset keuangan. Biaya transaksi yang diatribusikan langsung pada perolehan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung ke laba rugi.

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investments in Associates and Joint Ventures (continued)

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a group entity transacts with an associate or a joint venture of the Group, profit and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of interests in the associate or joint venture that are not related to the Group.

k. Financial Assets

Financial assets are recognized when a group entity becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

All financial assets are recognized and derecognized on trade date basis. Regular way purchase or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace and are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets (other than financial assets at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified into 4 categories, namely (i) financial assets are measured at fair value through profit and loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, and (iv) available for sale financial assets. This classification depends on the company's purpose of financial assets' acquisition.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Grup memiliki aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan aset keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo tidak diungkapkan.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan di amortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif.

**4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

k. Financial Assets (continued)

Initial recognition (continued)

Management recognized financial assets' classification at initial acquisition. The Company determines the classification of financial assets at initial recognition and, when allowed and appropriate, re-evaluate the classification of these assets at the end of each financial period.

Financial assets are initially recognized at fair value plus (in the case of investments which are not measured at fair value through profit and loss) transaction costs are directly attributable.

The purchase or sale of financial assets that require delivery of assets within a period specified by regulation or custom prevailing in the market (a common trade) are recognized on trade date, the date the Company committed to buy or sell the asset.

As of December 31, 2018 and 2017, the Group have financial assets in the category of loans and receivables.

Therefore, accounting policies related to financial assets in the fair value category through profit or loss, available for sale financial assets and held-to-maturity investments are not disclosed.

Measurement after Initial Recognition

Loans and Receivables

Loans and receivables are non derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL, HTM investments or AFS financial assets.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees and costs that are an integral part of the effective interest rate.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (lanjutan)

Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya yang dimiliki oleh Grup.

Piutang

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan usaha perseroan dan entitas anak pada umumnya dan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang dikelompokkan sebagai aset lancar.

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perseroan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut melunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pada saat pengakuan awal, piutang usaha yang mempunyai masa angsuran lebih dari 1 (satu) tahun diukur sesuai dengan nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Perseroan dan entitas anak menetapkan cadangan penurunan nilai piutang secara kolektif dengan menggunakan metode *roll rate method* atau dikenal sebagai *Migration Analysis* atau *Flow Model*. Model ini menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (*roll rate average*) dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets (continued)

Measurement after Initial Recognition (continued)

Loans and Receivables (continued)

Amortization is recorded as part of interest income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when loans and receivables are derecognized or has decreased in value, as well as during the amortization process.

As of December 31, 2018 and 2017, this category includes cash and cash equivalents, accounts receivable and other current financial assets held by the Group.

Trade Receivables

Trades receivable are the rights arising from the delivery of goods or services in the business of a company and its subsidiary in general and are expected to be completed within one year or less classified as current assets.

Trade receivables represent rights arising from the delivery of goods or services as the business of the Company, on the basis of an agreement or agreement between the company and another party, requiring that the other party repay the payment of the goods or services it has received or the debt after a certain period in accordance with deal.

At initial recognition, trade receivables that have a repayment period of more than one (1) year are measured at fair value. After initial recognition the receivables are measured at amortized cost using the effective interest rate.

The company and its subsidiary establishes reserves for impairment of receivables are collectively using the roll rate or the method known as the Migration Analysis or Flow Model. These model uses past experience to calculate the average percentage of displacement (roll rate average) and adjusted statistically for significantly changed percentages.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

Piutang (lanjutan)

Penghapusbukuan piutang harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

Piutang yang telah dihapusbukukan, dicatat secara ekstra-komtabel dan tidak menghilangkan kewajiban penagihan. Apabila ternyata piutang tersebut dapat dibayar/dilunasi oleh debitur, dicatat dan diklasifikasikan dalam akun "pendapatan non-usaha".

Penyisihan penurunan nilai (yaitu cadangan kerugian penurunan piutang tak tertagih yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian piutang.

Metode bunga efektif

Metode bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode terkait.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Aset keuangan, selain yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti yang objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets (continued)

Measurement after Initial Recognition (continued)

Trade Receivables (continued)

Write-off trade receivables must have prior approval from the Board of Commissioner in accordance with the Company's Articles of Association.

Accounts that have been written-off are recorded extra-komtabel and do not eliminate the liability. Should the receivables be paid / settled by the debtor, recorded and classified into "non-operating income" account.

Allowance for impairment losses (ie allowance for uncollectible trade receivable losses amounting to 100% of total trade receivables), is presented as part of trade receivables.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified as FVTPL.

Impairment of Financial Assets

Financial assets, other than those at fair value through profit and loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**k. Aset Keuangan (lanjutan)****Pengukuran setelah Pengakuan Awal (lanjutan)****Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)**

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

• Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan melakukan penurunan nilai untuk kelompok tersebut dengan metode 'kolektif'. Aset yang penurunan nilainya menggunakan metode 'individual', penyisihan atas kerugian penurunan nilainya dikeluarkan dari perhitungan secara 'kolektif'.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**k. Financial Assets (continued)****Measurement after Initial Recognition (continued)****Impairment of Financial Assets (continued)**

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

• Financial assets measured at amortized cost

Management first determines whether there is objective evidence of impairment individually on financial assets that are individually significant, or collectively, for financial assets that are insignificant individually.

Management first determines whether there is objective evidence of impairment individually on financial assets that are individually significant, or collectively, for financial assets that are insignificant individually.

If management determines that there is no objective evidence of impairment of the individually assessed financial assets, whether they are significant or insignificant, they are included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and impairment of the group with the 'collective' method. Assets that decrease in value use the 'individual' method, allowance for impairment losses are excluded from 'collective' calculations.

If there is objective evidence that impairment has occurred on assets under the category of loans and receivables, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of the estimated future cash flows (excluding future unexpected credit losses) which is discounted using the original effective interest rate of the asset (which is the effective interest rate calculated at the time of initial recognition). The carrying amount of the asset is immediately deducted by any impairment or use of an allowance account. The amount of the losses incurred is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

- **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan Piutang

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa, aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

- **Financial assets measured at amortized cost (continued)**

Loans and Receivables

At each reporting date, the Group evaluate whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

Financial assets or groups of financial assets are written down in value and any impairment loss has occurred, if and only where, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events occurring after the initial recognition of the asset (adverse event) and events that adversely affects the estimated future cash flows of financial assets or groups of financial assets that can be reliably estimated.

Objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired includes:

- Significant financial difficulty of the obligor or issuer of financial instruments;
- A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- The lender, for economic or legal reasons in connection with the financial difficulties experienced by the borrower, provide relief (concessions) on the part of borrowers who do not may be given if the borrower did not experience such difficulties;
- There is a probability that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- Disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

- **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan Piutang (lanjutan)

- i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitor), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang signifikan yang terdapat indikasi penurunan nilai (piutang yang bukan berasal dari transaksi jasa kepelabuhanan). Uji penurunan nilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan dan aset keuangan yang signifikan tetapi tidak memiliki indikasi penurunan nilai berdasarkan data historis.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

- **Financial assets measured at amortized cost (continued)**

Loans and Receivables (continued)

- i. Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
- ii. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of future estimated future cash flows (excluding future unexpected loan losses) discounted using the original effective interest rate of the asset.

The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

If the loan and receivable have a variable interest rate, the discount rate used to measure any impairment loss is the applicable effective interest rate stipulated in the contract. As a practical guide, the Company can measure the decrease in the fair value of the instrument using the observable market price.

If, in the subsequent period, the amount of the impairment loss is reduced and the deduction may be objectively attributed to an event occurring after the impairment is recognized (such as an increase in the credit rating of the debtor), the reversal of a previously recognized impairment loss is recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment test performed individually for financial assets that are significant indications of impairment (receivables which are not derived from seaport services transactions). Impairment test performed collectively for financial assets that are not significant and significant financial assets but has no indication of impairment based on historical data.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

- **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan Piutang (lanjutan)

Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan secara langsung melalui kerugian penurunan nilai untuk seluruh aset keuangan, kecuali untuk piutang usaha dan piutang non-usaha dimana nilai tercatat diturunkan melalui akun penyisihan penurunan nilai piutang. Bila piutang usaha atau piutang non-usaha tidak tertagih, piutang dihapuskan terhadap akun penyisihan penurunan nilai piutang.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang (terpulihkan) karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

- **Financial assets measured at amortized cost (continued)**

Loans and Receivables (continued)

The present value of estimated future cash flows discounted using the beginning effective interest rate of the financial asset. If the loans and receivables which have variable interest rates, the discount rate for measuring any impairment loss is the recent effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced directly through impairment losses for all financial assets, except for trade receivables and non-trade receivables from which the carrying amount is reduced through an allowance for impairment value. When a trade receivable or non-performing receivable is not collectible, the receivables are written off against the allowance for impairment value.

If, in the subsequent years, the amount of any impairment loss increases or decreases (recovered) due to an event occurring after the impairment is recognized, an adjustment of the allowance for impairment losses previously recognized is recognized. Recovery of impairment is subsequently recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, provided that the carrying value of the assets after the recovery of the impairment has not exceeded the amortized cost on the date of the recovery.

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
 Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
 As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

l. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam akuisisi atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi) dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, sesuai dengan pengakuan awal.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui segera dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial Assets (continued)

Derecognition of Financial Assets (continued)

If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

l. Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction cost that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, in initial recognition.

Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil yang diterima, setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan – biaya perolehan diamortisasi

Utang bank, utang jangka panjang, utang obligasi, utang usaha dan utang lainnya pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Financial Liabilities and Equity Instruments (continued)

Equity instruments

An equity instruments is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost". The Group financial liabilities are classified as "at amortized cost".

Financial liabilities – at amortized cost

Loans from banks, long-term loans, bonds payable and trade and other payables are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, their obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
 Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
 As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling-hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

n. Klasifikasi atas Instrumen Keuangan

Grup mengklasifikasi-instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Instrumen Keuangan/ <i>Financial Instruments</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2014) / <i>Category as defined by PSAK No. 55 (Revised 2014)</i>	Golongan / <i>Class</i>	Sub Golongan / <i>Sub Class</i>
Aset Keuangan / <i>Financial Assets</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang / <i>Loans and receivables</i>	Kas dan setara kas / <i>Cash and cash equivalents</i>	
		Piutang usaha / <i>Account receivables</i>	
		Aset Keuangan Lancar Lainnya/ <i>Other Current Financial Assets</i>	Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Restricted cash and cash</i>
			Piutang Lain-Lain/ <i>Other Receivables</i>
			Pendapatan Masih Harus Diterima/ <i>Accrued Revenues</i>
			Penempatan jangka pendek/ <i>Short term investment</i>
			Aset lancar lainnya/ <i>Other current assets</i>

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position (balance sheets) if, and only if, currently, has the legal entitlement to indemnify the recognized amount and there is an intention to settle the net, or to realize assets and settle their obligations simultaneously.

The fair value of financial instruments traded on the active market at the date of the statement of financial position (balance sheets) is based on the quoted market price or the quoted price of the seller / dealer (bid price for the buy position and ask price for the selling position), regardless of transaction costs. If the current bid price and ask price are not available, then the last transaction price used to reflect current fair value evidence, as long as there is no significant change in the economy since the transaction. For all financial instruments not listed in an active market, except for investments in equity instruments that do not have quoted prices, fair value is determined using valuation techniques.

Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

n. Classes of Financial Instruments

The Group classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

**4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

n. Klasifikasi atas Instrumen Keuangan (lanjutan)

n. Classes of Financial Instruments (continued)

Instrumen Keuangan/ <i>Financial Instruments</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2014) / <i>Category as defined by PSAK No. 55 (Revised 2014)</i>	Golongan / <i>Class</i>	Sub Golongan / <i>Sub Class</i>
Liabilitas keuangan / <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas Keuangan Lainnya/ <i>Other Financial Liabilities</i>	Utang Usaha / <i>Account Payables</i>	
		Beban Akrua / <i>Accrued Expenses</i>	
		Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang/ <i>Current portion of long term debt</i>	
		Pendapatan diterima dimuka/deposit/uang jaminan/ <i>Prepaid revenues/deposits/deposits guarantee</i>	
		Utang Bunga/ <i>Interest Payables</i>	
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ <i>Other Short Term Financial Liabilities</i>	
		Liabilitas Jangka Pendek Lainnya/ <i>Other Long term liabilities</i>	
		Utang non usaha jangka panjang/ <i>Long term non business debt</i>	
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang/ <i>Long term financial institution and bank debt</i>			

o. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset tidak lancar lainnya".

p. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

o. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower.

Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Allowance for decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values in the current period.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the statements of financial position (balance sheet) date.

Defective/spoilage Inventories, there is no parent/main asset or economically can not be used are presented in the "other non-current assets".

p. Prepaid Expenses and Advance Payment

Prepaid expenses are expenses that have been paid for the useful life of twelve months or more. Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

q. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Properti investasi disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai.

Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Prepaid Expenses and Advance Payment (continued)

At the end of the reporting period, prepaid expenses are stated at the value of the goods / services / benefits or equivalent which has not been recognized in the current period. Long-term prepaid expenses are presented as "Other Current Assets" in the Statement of Financial Position (balance sheet).

Advances are a number of cash-out or costs incurred by the company for an activity or something that will have the responsibility in a certain time and have been assigned.

q. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both.

Costs after the initial acquisition is recognized in the carrying amount of investment property if and only if it is probable that future economic benefits in respect of the investment property will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably, and does not include the cost of the maintenance of investment property.

Investment property is initially measured at cost which includes the purchase price and costs directly attributable. Furthermore, after the initial measurement, property investments valued using fair value, net of accumulated depreciation and accumulated impairment. Gains or losses arising from changes in fair value recognized in profit or loss as incurred.

Investment properties are depreciated using the straight-line method based on its estimated useful lives.

Investment property includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion.

Accumulated acquisition and development costs (including borrowing costs incurred) are amortized when completed and ready for use.

Investment properties shall be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Properti Investasi (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Mulai tahun 2018, Perseroan memilih menggunakan model nilai wajar (sebelumnya menggunakan model biaya perolehan) untuk mengukur properti investasi - tanah dan bangunan yang berlaku propektif sebagaimana diatur pada standar yang berlaku. Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan (neraca) dibanding dengan nilai buku atas penerapan pertama kali atau nilai wajar sebelumnya, diakui sebagai keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar aset non keuangan dan disajikan pada pendapatan (beban) non usaha. (Lihat catatan 13 dan 33)

Selanjutnya, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan (neraca) atau sekurang-kurangnya pada akhir tahun, dengan pilihan model nilai wajar, Perseroan melakukan telaahan atas nilai wajar properti investasi - tanah dan bangunan. Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan (neraca) dibanding nilai wajar sebelumnya, merupakan keuntungan (kerugian) dan disajikan pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

r. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan (*acquisition cost*), setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Namun, tidak termasuk biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari.

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya (*cost model*) dalam melakukan pengukuran untuk seluruh aset tetapnya setelah pengakuan awal aset tetap yang bersangkutan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Investment Properties (continued)

Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

Starting in 2018, the Company chooses to use the fair value model (previously using the acquisition cost model) to measure investment property - land and buildings that apply proposition as stipulated in applicable standards. Increase (decrease) arising from fair value at the position date of the financial statements (balance sheet) compared to the book value for the first time application or previous fair value, is recognized as gain (loss) of change in the fair value of non financial assets and presented as non operating income (expense). (See notes 13 and 33)

Furthermore, at each financial position report date (balance sheet) or at least at the end of the year, with a choice of fair value models, the Company conducts a review of the fair value of investment property - land and buildings. The increase (decrease) arising from the fair value at the position date of the financial statements (balance sheet) compared to the previous fair value, represents gain (loss) and is presented in the group of non operating income (expenses).

r. Fixed Assets

Fixed assets, except land are stated at the acquisition cost, after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. However, it does not include daily repairs and maintenance costs.

Until now, the Company still chooses to use the cost model in measuring all of its fixed assets after the initial recognition of the fixed assets concerned.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended on use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the land rights.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
 Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
 As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Aset Tetap (lanjutan)

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Manfaat/ Useful Life	Tarif Penyusutan / Depreciation Rate	Type of Assets
Aset Tetap			Fixed Assets
Bangunan			Building
- Diperoleh masa PN	12,5 Tahun / Years	8%	Retrieved period PN -
- Diperoleh setelah PT	40 Tahun / Years	2,5%	Obtained after PT -
Kendaraan	5 Tahun / Years	20%	Vehicle
Inventaris			Inventory
- Peralatan komputer	7 Tahun / Years	15%	Computer equipment -
- Peralatan komunikasi	7 Tahun / Years	15%	Communications equipment -
- Perabotan kantor/rumah tangga	7 Tahun / Years	15%	Office equipment / household -
- Aset KSO	7 Tahun / Years	15%	Joint Operation - assets -
Peralatan Wisma	7 Tahun / Years	15%	Homestead equipment

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed Assets (continued)

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Expenses incurred after fixed assets are used, such as repairs and maintenance expenses, are charged to profit or loss when incurred. If these expenses lead to an increase in future economic benefits from the use of these fixed assets that can exceed their normal performance, then these expenses are capitalized in addition to the acquisition cost of fixed assets.

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or no future economic benefit is expected from its use or disposal.

Fixed asset sold or disposed of, are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset.

Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds, if any, and the carrying amount of fixed assets and recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

Depreciation (except for land) is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Aset Tetap (lanjutan)

Jenis Aset Tetap	Umur Manfaat/ Useful Life	Tarif Penyusutan / Depreciation Rate	Type of Assets
Alat Produksi			Production Equipments
Armada Kapal			Fleet
- Kapal Penumpang	30 Tahun / Years	3,3%	Passenger ship -
- Kapal Roro	30 Tahun / Years	3,3%	Roro ship -
Jet Liner	25 Tahun / Years	4%	Jetliner
Egon	25 Tahun / Years	4%	Egon
Ganda Dewata			Ganda Dewata
- Kapal Eks PT PANN (KM Caraka Th. 1990)	20 Tahun / Years	5%	Ex ship PT PANN - (KM Caraka years 1990)
- Kapal Sewa Guna Usaha Th. 1990	20 Tahun / Years	5%	Ship Lease years 1990 -
Galangan dan alat apung	10 Tahun / Years	10%	Shipyards and floating equipment
Kontainer	10 Tahun / Years	10%	Containers
Alat mekanik dan non mekanik	10 Tahun / Years	10%	Tools mechanical and non-mechanical

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan.

Pinjaman dana secara spesifik telah ditentukan penggunaannya, jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Pinjaman dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed Assets (continued)

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Borrowing Costs

Borrowing costs that can be distributed directly with the acquisition, construction or manufacture of qualifying assets are borrowing costs that can be avoided if the expenditure on qualifying assets is not carried out.

Specific use of the loan has been determined, the amount of borrowing costs that can be capitalized is equal to the actual borrowing costs incurred during the period less investment income on the temporary investment of the loan.

Fund loans generally use it to obtain a qualifying asset, the amount of borrowing costs that can be capitalized by applying a capitalization rate to the expenditure on the asset. Tariff capitalization is the weighted average borrowing cost for the loan balance during the period outside the specific loan to obtain the qualifying asset. The amount of borrowing costs capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing costs incurred during that period.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya Pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan proyek telah selesai atau pada saat konstruksi selesai dan aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai konstruksi aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai konstruksi tersebut selesai.

Aset Dalam Konstruksi

Aset dalam konstruksi merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada akhir tahun sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.

Aset dalam konstruksi disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah digunakan sesuai tujuannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama.

Aset Tidak Produktif/Tidak Berfungsi

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi/usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan/pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif/tidak berfungsi dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed Assets (continued)

Borrowing Costs (continued)

Capitalization of borrowing costs discontinued when activities associated with the acquisition and development projects have been completed or when construction is completed and the asset is ready for its use.

Interest expense and other borrowing costs, such as discount fees on loans, either directly or indirectly used to finance construction of certain assets are eligible, are capitalized until construction is completed.

Construction in Progress

Construction in progress (CIP) are fixed assets in the construction phase, which are stated at cost based on the physical percentage of work completed at the end of the year in accordance with the Minutes of Physical Progress of Work.

CIP are presented as part of fixed assets, which are stated based on acquisition costs, costs, directly attributable costs, initial estimates of the costs of dismantling and moving fixed assets and restoring the location of fixed assets and borrowing costs used to finance assets during the period development.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets when the construction is substantially completed and the assets are ready for its intended use, as evidenced by the Minutes of First Taking Over.

Non Productive/Non Function Assets

Fixed assets that do not provide benefits in production activity / her business or no future economic benefits are expected from the use / disposal of assets not classified as productive / not functioning and are presented in groups of other non-current assets.

Fixed assets in that category of impaired its carrying value at the time no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of non-productive assets created as the application of the accounting impairment.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tidak Produktif/Tidak Berfungsi (lanjutan)

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2010, tentang Tata-cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini, diakui pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

s. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya "Rugi Penurunan Nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed Assets (continued)

Non Productive/Non Function Assets (continued)

The write-off and the alienation of property and equipment following the regulation stated by the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 regarding Procedure for Written-off and Transfer of Fixed Assets of State-Owned Company.

Unproductive fixed assets are derecognised when the the elimination has received approval from the Board of Commissioners and or Shareholders.

Gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed the elimination unproductive it was recognized in the group of other income (expenses).

s. Impairment of Non-financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of its tangible and intangible assets to determine whether there is any indication that the assets have suffered an impairment loss.

If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "Impairment Losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi kecuali aset tersebut dicatat sebesar nilai revaluasi, dimana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill hanya diuji untuk menentukan adanya penurunan nilai pada setiap akhir tahun pelaporan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana goodwill terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas goodwill tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Impairment of Non-financial Assets (continued)

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

If the recoverable amount of an asset (or cashgenerating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment in each annual reporting end and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. If the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Aset Takberwujud

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Beban tersebut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Aset Takberwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan.

Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai, secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun.

**4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

t. Intangible Assets

Cost incurred for extension or renewal of land rights are recognized as intangible assets. Amortized over the period, whichever is shorter between the legal life or economic life of the land. If the cost incurred are not material, then charged in the current period.

Intangible assets are recorded at acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their useful lives. The Group estimates the recoverable value of its intangible assets.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the profit or loss as the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually, either individually or at the cashgenerating unit level. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount. The useful life of an intangible asset that is not being amortised shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Software is amortized using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets of 5 (five) up to 10 (ten) years.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan, termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi / perintisan usaha.

t. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas dimasa depan, tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar saat diterima, tidak termasuk pajak penjualan (PPN).

- Pendapatan atas penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) diakui pada saat pengajuan klaim terhadap seluruh biaya yang terkait langsung dengan kegiatan PSO.

Selisih kekurangan pembayaran atau kelebihan pencairan dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik akan diperhitungkan setelah dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh pihak yang ditunjuk dalam Perjanjian.

- Pendapatan tambang pasasi dan muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang pasasi (B60A) dan daftar tambang muatan (B60).
- Pendapatan charter diakui proporsional selama periode perjanjian.
- Pendapatan bongkar muat, komisi keagenan, EMKL dan reparasi diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual.
- Penghasilan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Intangible Assets (continued)

Intangible assets are derecognized when no further economic benefits are expected, either from further use or from disposal. The difference between the carrying amount and the net proceeds received from disposal is recognized in the statement of profit or loss.

The costs that do not have a useful life of more than one period can not be suspended, including losses arising from the initial operation and cost of preoperative / pioneering effort.

t. Received in Advance

Received in advance are money received from other parties in connection with the services of products that will be performed by entities in the future, but the services are not delivered to that party.

u. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at fair value of the consideration received, excluding sales taxes (VAT).

- *Revenue from the implementation of Public Service Obligations (PSO) is recognized at the time of filing a claim against all costs directly related to PSO activities.*

The difference in underpayment or excess disbursement of funds for the implementation of Public Service Obligations will be taken into account after document verification and field verification by the party designated in the Agreement.

- *Pasasi mines and cargo revenues are recognized according to the level of completion services on the basis pasasi mine money list (B60A) and the list of charges mines (B60).*
- *Charter revenue is recognized proportionately over the period of the agreement.*
- *Revenue stevedoring, agency commissions, and reparations EMKL recognized when services have been completed.*
- *Rental income, interest and other recognized on an accrual basis.*
- *Dividend income from investment in shares of stock is recognized when the shareholders rights to receive such dividend have been established.*



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Pendapatan/Beban Keuangan

Beban diakui dengan menggunakan metode akrual dengan penegasan sebagai berikut: beban dikeluarkan dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan, beban yang tidak dapat dimanfaatkan untuk periode akuntansi berikutnya, beban penurunan aset yang tidak mungkin dihindarkan.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan kategori tersedia dijual yang memperoleh bunga, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

v. Transaksi Sewa

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan Grup (*Lessee*) mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan, atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and Expense Recognition (continued)

Expenses are recognized when incurred or based on their beneficial period.

Finance Income/Cost

Expenses are recognized on accrual basis to the assertion as follows: expenses incurred in an attempt to generate revenue in the current period, expenses that can not be utilized for the next accounting period, asset impairment charges that are unavoidable.

For all financial instruments measured at amortized cost and interest bearing financial assets classified as available-for-sale, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

v. Lease Transactions

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases that transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset are classified as finance leases. In a Group financing lease (*Lessee*) recognizes assets and liabilities in the consolidated statement of financial position at the beginning of the lease, at fair value of the leased asset, or at the present value of the minimum lease payments, if the present value is less than fair value.

A reassessment is made after inception of the lease only if one of the following applies:

- a. there is a change in the contractual terms of the agreement, unless such changes only renew or extend the existing agreement;

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**v. Transaksi Sewa (lanjutan)**

- b. opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
- c. terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
- d. terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

Perlakuan Akuntansi untuk Lessee

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

Sewa Pembiayaan

Sewa pembiayaan, yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Perseroan, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan sebagai kerugian pada laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Aset sewaan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut, kecuali apabila terdapat ketidakpastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa atau masa manfaat.

Keuntungan yang ditangguhkan dari transaksi penjualan dan sewa-balik pembiayaan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa Operasi

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tersebut tidak ditransfer kepada Grup diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba-rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan secara garis lurus selama masa sewa.

**4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)****v. Lease Transactions (continued)**

- b. a renewal option is exercised or extension granted, unless the term of the renewal or extension was initially included in the lease term;
- c. there is a change in the determination of whether the fulfillment is dependent on a specified asset; or
- d. there is a substantial change to the asset.

Accounting Treatment as a Lessee

Where a reassessment is made, lease accounting shall commence or cease from the date when the change in circumstances gave rise to the reassessment for scenarios a, c or d and the date of renewal or extension period for scenario b.

Financial Lease

Leases which transfer to the Company substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly as loss at the consolidated statement of comprehensive income in current year.

The leased of assets are depreciated over the estimated useful life of the assets except if there is no reasonable certainty that the group will obtain ownership by the end of the lease term, in which case, the lease of assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term.

Deferred gain from sale and finance leaseback transaction is amortised using straight line method over the lease term.

Operating Lease

Leases where all the risk and benefits of ownership of the assets are not transferred to the group are classified as operating leases. Lease payments under operating leases are recognized as an expense at the consolidated statement of comprehensive income in current year on a straight-line basis over the lease term.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Transaksi Sewa (lanjutan)

Perlakuan Akuntansi sebagai Lessor

Sewa dimana Perseroan dan entitas anak tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laporan laba-rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

w. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada liabilitas tersebut.

Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan Liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

x. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Lease Transactions (continued)

Accounting Treatment as a Lessor

Leases where the Company and its subsidiaries retains substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases.

Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized at the consolidated statement of comprehensive income in current year conformity with the lease term on the same basis as rental income.

w. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

The provision is measured using estimated cash flows to settle current liabilities with the carrying amount equal to the present value of the cash flows.

Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

x. Employment Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are employee benefits payable in less than one year, including the following salaries, wages and social security contributions. The obligation to pay these benefits are recognized at its undiscounted amount and as an expense in the consolidated statement of comprehensive income for the year and recorded as accrued expenses.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**x. Imbalan Kerja (lanjutan)****Imbalan Kerja Jangka Panjang**

Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

4.x.1. PensiunProgram Pensiun Manfaat Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun, yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, setelah memperhitungkan faktor usia, masa kerja dan jenjang kepangkatan (golongan) dan nilai kompensasi.

Dalam program ini, manfaat pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program manfaat pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun ini dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Pelni (YKPP).

Pembayaran kontribusi (iuran dana pensiun) dibiayai oleh karyawan (Peserta) dan Perseroan (Pemberi Kerja). Iuran Dana Pensiun (IDP) beban peserta ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Perseroan.

IDP beban pemberi kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial sesuai dengan kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun setelah dikurangi IDP beban peserta. Perhitungan aktuarial dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode *Projected Unit Credit* (PUC) seperti yang diharuskan oleh PSAK No. 24 (Revisi 2016) "Imbalan Kerja".

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**x. Employment Benefits (continued)****Long-Term Employment Benefits**

Long-term employee benefits are employee benefits that will be paid / payable after workers retire. The obligation to pay these benefits are recognized at amounts discounted and maturing after one accounting period and are recognized as an expense in the consolidated statement of comprehensive income and liabilities.

Part of obligations maturing within one accounting period will be recorded as part of current liabilities and obligations that will mature after one accounting period are recorded as long-term liabilities.

4.x.1. PensionThe Defined Benefit Pension Plan

The defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement after considering factor such as age, years of service, rank ladder (grade) and the amount of compensation.

In this program, retirement benefits will be paid is calculated based on final salary and the employee. This pension benefit program is managed by the Pension Fund Foundation Pelni (YKPP).

Payment of contributions (pension fund contributions) is financed by employees (Participants) and the Company (Employer). Pension Fund contributions (IDP) of participants' fees are set at 5% of basic pension income and the Company's contribution.

The IDP of the employer's expense is determined based on the actuarial calculation in accordance with the funding requirement for the financing of the Pension Program after deducting the participant's IDP. The actuarial calculations are performed periodically, at least once every three years.

For financial reporting purposes, the defined benefit pension plan is calculated using the actuarial assumptions based on the Projected Unit Credit (PUC) method as required by PSAK No. 24 (Revised 2016), "Employee Benefits".



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

4.x.1. Pensiun (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

4.x.2. Program Manfaat Karyawan Lainnya

Perseroan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan/tabungan purna jabatan, program santunan meninggal dan catat, Uang pisah, Tunjangan Hari Tua dan Tunjangan Masa Persiapan Pensiun kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja ini.

4.x.3. Kesejahteraan Karyawan

Untuk mensejahterakan karyawannya, PT Pelni (Persero) memiliki beberapa program kesejahteraan, antara lain:

Tantiem

Tantiem dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), serta dibukukan sebagai beban (expense) tahun berjalan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Employment Benefits (continued)

Long-Term Employment Benefits (continued)

4.x.1. Pension (continued)

The Defined Benefit Pension Plan (continued)

The entire remeasurement, consisting of actuarial gains and losses and the yield on pension fund assets (excluding net interest) recognized directly through Other comprehensive income in order for assets or pension liabilities net recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the deficit and surplus pension fund. Remeasurement mengreklasifikasi no profit or loss in subsequent periods.

The entire past service costs are recognized when the first between when the amendment / curtailment occurs or when the cost of restructuring or termination of employment are recognized. As a result, the past service cost not yet vested no longer be deferred and recognized over the vesting period of the future.

4.x.2. Other Employee Benefit Program

The Company also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay and functional retirement pay death benefit program and record, Money separation, Annuities and Retirement for their qualifying employees based on the Company policies.

These other postemployment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees. No funding has been made to this long-term benefits.

4.x.3. Employee Welfare

For the welfare of their employees PT Pelni (Persero) has several welfare programs such as:

Tantiem

Tantiem is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders ("RUPS"), charged to the income statement of the current year.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

4.x.3. Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Jasa Produksi/Bonus

Bonus dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham ("RUPS"), dibukukan sebagai beban (expense) tahun berjalan.

Cuti Besar dan Cuti Tahunan

Perseroan memberikan kesempatan cuti tahunan (selama 12 hari per tahun) dan cuti besar (selama 30 hari). untuk melengkapi pelaksanaan cuti tersebut, Perseroan memberikan tunjangan cuti tahunan.

Dana Pindah Rumah

Perseroan menyediakan uang pindah bagi karyawan Perusahaan yang dipindahtugaskan dan memasuki masa bebas tugas (MBT).

Asuransi Jiwa dan Jamsostek

Perseroan membiayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perseroan bekerja sama dengan beberapa Perseroan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perseroan juga mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

y. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Beban pajak kini Grup ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Employment Benefits (continued)

Long-Term Employment Benefits (continued)

4.x.3. Employee Welfare (continued)

Incentives for Employee/Bonus

Incentives for employee/Bonus is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (so called "RUPS"), charged to the income statement of the current year.

Annual and Long Leave

The Company provides annual leave opportunities (for 12 days per year) and long leave (for 30 days). to complete the execution of such leave, the Company provides annual vacation allowance.

Relocation Allowance

The company provides the fund for Company's employee who is going to move on his duty-free period.

Life Insurance and Jamsostek

The Company entitles its employees in the life insurance program. In supporting this program, the Company has agreement with several insurance companies to provide the insurance products The Company's employees are also entitled to the social security of employee in BPJS Ketenagakerjaan.

y. Income Tax

Expenses (income) tax is the combined sum of current tax and deferred tax are taken into account in determining income in the period. The tax is recognized in the income statement, except when the tax related to the transactions or events directly recognized in equity and other comprehensive income.

Current Taxes

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. The Group's current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pospos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset, dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Income Tax (continued)

Current Taxes (continued)

Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income statement because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax assets and liabilities are recognized, if the amount of taxes paid for the current period and prior periods exceeds the amount of tax payable for that period, then the excess is recognized as an asset, and if the amount of unpaid taxes is now recognized as a liability.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is decided. Shortage / excess income tax payments are recorded as part of the "Current Tax Expense" in the income statement and other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legal right to offset the recognized amounts and has the intention to finish with a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred Taxes

Deferred income tax is recognized, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**y. Pajak Penghasilan (lanjutan)**Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**y. Income Tax (continued)**Deferred Taxes (continued)

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each consolidated statement of financial position date and is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction is reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable income would be available.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax related to transactions both in other comprehensive income or directly charged to shareholders' equity, are recorded in other comprehensive income or equity in question.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Penggunaan Saldo Laba

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (expense) melainkan sebagai distribusi/ pengurang saldo laba.

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pasal 8 ayat (1), bahwa Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:

- 1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau
- 2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.

Lihat catatan 27 dan 28.

aa. Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan asumsi bahwa semua opsi saham dilaksanakan pada saat penerbitan.

ab. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Grup melakukan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal tentang komponen Grup yang dianalisa secara berkala oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya berdasarkan segmen dan menilai prestasi mereka.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. The Usage of Retained Earnings

The use of retained earnings on the basis of decisions/minutes of the General Meeting of Shareholders (RUPS) to be realized in accordance with the contents of the decision. Such use includes, but is not limited to the distribution of dividends, cost of personnel and provision for general reserve to retained earnings. The distribution is not treated as an expense (expense) but rather as a distribution / deduction from retained earnings.

As stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03 / MBU / 12/2016, on the Amendment of the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015, concerning the Partnership Program and Community Development Program for State Owned Enterprises, article 8, point (1), that the Fund Partnership Program and Community Development Program sourced from:

- 1) Allowance partially net profit of BUMN; and/or
- 2) Budgets are calculated as cost in BUMN.

See notes 27 and 28.

aa. Basic Net Earnings (Loss) Per Share

Basic earnings (loss) per share amounts are computed by dividing the profit for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings (loss) per share is computed after making necessary adjustments to the weighted-average number of ordinary shares outstanding assuming the full exercise of employee stock option at the time of issuance

ab. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Operating segments are required to be identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- 1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses;

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**ab. Informasi Segmen (lanjutan)**

2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;

3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Grup membagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam catatan 36, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

ac. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam catatan 4 pada laporan keuangan konsolidasi, manajemen diminta untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi nilai tercatat aset dan liabilitas yang telah disajikan oleh sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa, pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**ab. Segment Information (continued)**

2) whose operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and value its performance;

3) for which discrete financial information is available.

For management purposes, the Group are divided into operating segments based on products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of each segment. The segment managers report directly to the management regularly review the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance.

Additional disclosures on each of the segments contained in note 36, including the factors used to identify the reported segments and the measurement basis of segment information.

ac. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Group's financial position at the date of the consolidated statement of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Group accounting policies, which are described in note 4 to the consolidated financial statements, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made by the management, which affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada catatan 4.k dan 4.l.

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Provisi kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group accounting policies that have the significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the group accounting policies disclosed in note 4.k and 4.l.

b. Provision for Impairment of Financial Assets

Provision for impairment of loans and receivables is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables.

The Group assesses specifically at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset have impairment value (uncollectible).

The formed of provision is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for doubtful accounts is provided on accounts specifically identified as impaired.

Loans and receivables written-off are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions will be taken.

Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided, is performed periodically during the period. Therefore, timing and amount of allowances for impairment value of doubtful accounts recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang Grup tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018
Kas dan Setara Kas	1.521.886.980.235
Piutang Usaha	254.308.545.052
Aset Keuangan Lancar Lainnya	490.899.530.772

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup memiliki akumulasi rugi fiskal dan mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut. Jika hasil pemeriksaan pajak mungkin berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diestimasi, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

b. Provision for Impairment of Financial Assets (continued)

The carrying value of the Group loans and receivables as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	31 Desember/ December 2017	
1.338.781.110.919		Cash and Cash Equivalent
204.786.564.118		Account Receivables
649.901.221.742		Short-term Investment

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group has accumulated fiscal loss and recognized deferred tax asset on those fiscal loss. The final tax outcome of the tax audit is different from the amounts that were initially estimated, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan 38.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud akan meningkatkan beban penyusutan dan menurunkan nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud selama tahun berjalan. Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud diungkapkan pada catatan 4.r dan 4.t.

c. Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, Grup membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

Significant component of fair value measurement is determined based on objective evidence derived from diversification (i.e. foreign exchange, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are disclosed in Note 38.

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment and Intangible Assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on The Group assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each of ending financial period and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above. The decline in the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets will increase depreciation and reduce the carrying value of fixed assets and intangible assets.

There is no change in the estimated useful lives of property and equipment and intangible assets during the year. Estimated useful lives of property and equipment and intangible asset described in note 4.r and 4.t.

c. Impairment of Loans and Account Receivables

The Group assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, the group makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

**c. Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
(lanjutan)**

Grup juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 6,7,dan 8.

d. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Penelaahan penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi adanya penurunan nilai. Penentuan nilai wajar aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari penggunaan berkelanjutan dan pelepasan aset tersebut.

Setiap perubahan signifikan pada asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dapat memberikan dampak yang material terhadap penilaian nilai yang terpulihkan dan setiap kerugian penurunan nilai yang dihasilkan dapat memberikan dampak terhadap hasil operasi.

Nilai tercatat properti investasi, alat produksi dan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diungkapkan dalam Catatan 13, 14,15 dan 16.

e. Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah kewajiban dan imbalan tersebut. Asumsi yang digunakan diungkapkan dalam catatan 24 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi sepanjang masa kerja dan umumnya mempengaruhi beban yang diakui dan kewajiban yang dicatat pada periode mendatang. Walaupun Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan wajar dan dapat diandalkan, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat secara material mempengaruhi jumlah liabilitas imbalan pasti pasca-kerja Grup. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, liabilitas manfaat pascakerja masing-masing sebesar Rp.125.753.592.383 dan Rp.134.742.481.003. (Lihat Catatan 24)

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

**c. Impairment of Loans and Account Receivables
(continueud)**

The Group also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in notes 6, 7, and 8.

d. Impairment of Non Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets.

Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying amounts of investment properties, production equipment and fixed assets as of December 31, 2018 and 2017 have been disclosed in Notes 13, 14, 15 and 16.

e. Post Employment Benefits

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts its liabilities and benefit. Those assumptions are described in note 24 and include, among others, discount rate and rate of salary increase.

Actual results that differ from the Group assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of the Group long term employee benefits liability. As of December 31, 2018 and 2017, long-term employee benefits liability amounted to Rp.125.753.592.383 and Rp.134.742.481.003. (See Note 24)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Pajak Penghasilan

Dalam situasi tertentu, Perseroan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perseroan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 (R-2009), "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Pajak penghasilan telah diungkapkan dalam catatan 10.

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 4y.

h. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan Usang dan Bergerak Lambat

Cadangan persediaan usang dan bergerak lambat diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

f. Income Taxes

In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57 (R-2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset. Income tax is disclosed in note 10.

g. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized.

Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 4y.

h. Allowance for obsolete and slow moving inventories

Allowance for obsolete and slow moving inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details are disclosed in Note 9.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENT

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
Kas			Cash
Rupiah	7.859.255.597	8.212.262.162	Rupiah
Valuta Asing (2018: USD 2.149 ; SGD 176 dan 2017: USD 2,840 ; SGD 419)	32.987.477	48.044.793	Foreign Currency (2018: USD 2.149 ; SGD 176 dan 2017: USD 2,840 ; SGD 419)
Jumlah Kas	<u>7.892.243.074</u>	<u>8.260.306.955</u>	Total Kas
Bank			Bank
Pihak berelasi			Related parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	308.787.748.038	430.344.483.128	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	54.736.258.629	357.328.378.520	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	27.734.212.370	21.686.624.733	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Sub Jumlah	<u>391.258.219.037</u>	<u>809.359.486.381</u>	Sub Total
Bank			Bank
Pihak berelasi			Related parties
<u>Valuta Asing</u>			<u>Foreign Exchange</u>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2018: USD 1,943,433 dan 2017: USD 1,356,829)	28.142.859.210	18.382.315.363	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2018: USD 1,943,433 and 2017: USD 1,356,829)
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (2018: USD 35,326 ; SGD 6,719 ; EUR 6,740 dan 2017: USD 28,899 ; SGD 31,894 ; EUR 6,770)	694.416.454	912.853.687	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (2018: USD 35,326 ; SGD 6,719 ; EUR 6,740 and 2017: USD 28,899 ; SGD 31,894 ; EUR 6,770)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2018: USD 10,936 dan 2017: USD 10,974)	158.367.836	148.679.816	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2018: USD 10,936 dan 2017: USD 10,974)
Sub Jumlah	<u>28.995.643.500</u>	<u>19.443.848.866</u>	Sub Total
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Syariah Mandiri	45.545.618.551	280.585.741	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Central Asia, Tbk	1.452.596.935	615.331.774	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank DKI	79.723.212	399.121.928	PT Bank DKI
PT Bank Panin, Tbk	33.027.426	2.159	PT Bank Panin, Tbk
<u>Valuta Asing</u>			<u>Foreign Exchange</u>
Citibank N.A	-	1.797.427.114	Citibank N.A
Sub Jumlah	<u>47.110.966.124</u>	<u>3.092.468.717</u>	Sub Total
Jumlah Bank	<u>467.364.828.661</u>	<u>831.895.803.963</u>	Total Bank



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Deposito		
Pihak berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	53.925.000.000	35.100.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	609.600.000.000	211.600.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	383.100.000.000	251.925.000.000
Jumlah Deposito	1.046.625.000.000	498.625.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.521.886.980.235	1.338.781.110.919

Tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar dan 4,25% - 7,5% pada tahun 2018 dan 2017.

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perseroan dan entitas anak dan tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaan.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 37.

6. CASH AND CASH EQUIVALENT (continued)

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Deposit		
Related parties		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	35.100.000.000	35.100.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	211.600.000.000	211.600.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	251.925.000.000	251.925.000.000
Total Deposit	498.625.000.000	498.625.000.000
Total Cash & Equivalents	1.338.781.110.919	1.338.781.110.919

Interest rate per year rupiah deposits by and 4,25% - 7,5% in 2018 and 2017.

The entire cash and cash equivalents of the Company and subsidiaries are not pledged as collateral for liabilities and other loans and there are no restrictions for use.

Explanations of related parties refer to Notes 37.

7. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<u>Pihak Berelasi:</u>		
JKN - BPJS	47.897.252.123	29.739.795.353
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut	18.987.222.242	21.831.920.318
PT Sarana Gama Sejahtera	15.925.811.888	1.359.089.236
PT PLN (Persero)	1.550.646.144	2.238.142.833
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	936.646.129	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	860.817.498	860.817.498
PT Pupuk Kaltim (Persero)	757.197.904	-
Kementerian Perhubungan	-	973.163.670
CQ. Karo. Perencanaan	-	78.733.271.116
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	77.803.319.579	10.185.354.185
Sub Jumlah	164.718.913.507	145.921.554.209
<u>Pihak Ketiga:</u>		
PT Cipta Mulia Buana Perkasa	6.996.616.376	-
PT Putra Master	6.158.779.124	7.653.775.720
PT Jembatan Nusantara	2.922.702.588	-
PT Armada Rock Karunia (ARK)	2.855.376.900	1.334.506.884
Perusahaan Ekspedisi Bongkar Muat Kapal	2.746.890.916	1.362.323.620
Saldo dipindahkan	21.680.365.904	10.350.606.224

7. ACCOUNTS RECEIVABLE

a. Based on the customer

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<u>Related Parties:</u>		
JKN - BPJS	29.739.795.353	29.739.795.353
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	21.831.920.318	21.831.920.318
Directorate of Naval Traffic	1.359.089.236	1.359.089.236
PT Sarana Gama Sejahtera	2.238.142.833	2.238.142.833
PT PLN (Persero)	-	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	860.817.498	860.817.498
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-	-
PT Pupuk Kaltim (Persero)	973.163.670	973.163.670
Ministry of Transportation	78.733.271.116	78.733.271.116
CQ. Head of Planning Bureau	10.185.354.185	10.185.354.185
Others (below Rp500 Million)	-	-
Sub Total	145.921.554.209	145.921.554.209
<u>Third Parties:</u>		
PT Cipta Mulia Buana Perkasa	-	-
PT Putra Master	7.653.775.720	7.653.775.720
PT Jembatan Nusantara	-	-
PT Armada Rock Karunia (ARK)	1.334.506.884	1.334.506.884
Expedition Loading Company	1.362.323.620	1.362.323.620
Carried forward balance	10.350.606.224	10.350.606.224



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Saldo pindahan	21.680.365.904	10.350.606.224
PT Parani Artamandiri	2.367.420.000	2.394.640.000
PT Samudera Energi Tangguh	2.150.247.000	-
PT Prima Eksekutif	1.837.297.421	-
PT Guheba Indonesia	1.281.681.916	2.184.355.223
PT Solusi Integrasi Utama	1.216.187.592	1.216.187.592
PT PP Urban	1.089.660.000	-
PT Aman Mandiri	1.049.488.350	-
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	892.277.023	880.768.129
PT Polsasu Indah	891.400.000	-
PT Atosim Lampung Pelayaran	865.291.650	865.291.650
CV Lumba-Lumba Ternate	815.915.332	-
Carnival Uk (MV. Arcadia)	733.669.149	686.399.394
PT. Wilmar Chemical Indonesia	681.808.000	-
PT Lazada Talgate	642.947.580	-
PT Pewete Bahtera Kencana	580.234.300	655.234.300
CV Jimsagho	-	2.353.000.000
PT KAPP Nusa Wangi	-	986.544.188
PT Indomarco Prismatama	-	839.054.913
PT Selog	-	711.754.068
PT Equator Marindo	-	612.520.203
AS Makening	-	583.646.126
Fred Olsen Cruise Line	-	533.404.405
RCCL Ltd	-	519.389.811
CV Anambas Expedisi	-	503.436.940
Lainnya (dibawah Rp500 juta)	58.713.695.496	36.716.056.148
Sub Jumlah	97.489.586.713	63.592.289.314
Dikurangi:		
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(7.899.955.168)	(4.727.279.135)
Sub Jumlah	(7.899.955.168)	58.865.010.180
Jumlah	254.308.545.052	204.786.564.118

b. Berdasarkan jenis usaha

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Entitas Induk:		
Perkapalan	49.302.130.728	109.031.501.563
Perhotelan	30.702.200	158.550.200
Perbengkelan	14.404.547.883	11.965.827.910
Usaha Lainnya	19.108.025.644	13.202.284.253
	82.845.406.455	134.358.163.926
Dikurangi:		
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(3.098.956.587)	(2.022.898.695)
Sub Jumlah	79.746.449.868	132.335.265.231

7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

a. Based on the customer (continued)

	Brought forward balance
PT Parani Artamandiri	PT Parani Artamandiri
PT Samudera Energi Tangguh	PT Samudera Energi Tangguh
PT Prima Eksekutif	PT Prima Eksekutif
PT Guheba Indonesia	PT Guheba Indonesia
PT Solusi Integrasi Utama	PT Solusi Integrasi Utama
PT PP Urban	PT PP Urban
PT Aman Mandiri	PT Aman Mandiri
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Polsasu Indah	PT Polsasu Indah
PT Atosim Lampung Pelayaran	PT Atosim Lampung Pelayaran
CV Lumba-Lumba Ternate	CV Lumba-Lumba Ternate
Carnival Uk (MV. Arcadia)	Carnival Uk (MV. Arcadia)
PT. Wilmar Chemical Indonesia	PT. Wilmar Chemical Indonesia
PT Lazada Talgate	PT Lazada Talgate
PT Pewete Bahtera Kencana	PT Pewete Bahtera Kencana
CV Jimsagho	CV Jimsagho
PT KAPP Nusa Wangi	PT KAPP Nusa Wangi
PT Indomarco Prismatama	PT Indomarco Prismatama
PT Selog	PT Selog
PT Equator Marindo	PT Equator Marindo
AS Makening	AS Makening
Fred Olsen Cruise Line	Fred Olsen Cruise Line
RCCL Ltd	RCCL Ltd
CV Anambas Expedisi	CV Anambas Expedisi
Others (below Rp500 Million)	Others (below Rp500 Million)

Sub Total

Less:

Provision for Impairment Losses

Sub Total

Total

b. Based of type business

Parent Entity:
Shipping
Hospitality
Workshop
Others

Less:

Provision for Impairment Losses

Sub Total



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan jenis usaha (lanjutan)

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<u>Entitas Anak:</u>		
PT Rumah Sakit Pelni	144.368.118.505	48.962.596.747
PT Sarana Bandar Nasional	30.905.982.398	23.377.843.681
PT Pelita Indonesia Djaya	4.088.992.862	2.815.238.899
	179.363.093.765	75.155.679.327
Dikurangi:		
Provisi penurunan nilai	(4.800.998.581)	(2.704.380.440)
Sub Jumlah	174.562.095.184	72.451.298.887
Jumlah	254.308.545.052	204.786.564.118

c. Berdasarkan analisa umur piutang

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Kurang dari 1 tahun	210.616.283.601	159.666.127.912
1 - 2 tahun	20.171.211.524	32.254.495.852
2 - 3 tahun	19.267.504.217	5.351.214.252
3 - 4 tahun	2.498.450.852	-
4 - 5 tahun	1.106.897.946	12.242.005.236
Di atas 5 tahun	8.548.152.080	-
	262.208.500.220	209.513.843.252
Dikurangi:		
Provisi penurunan nilai	(7.899.955.168)	(4.727.279.135)
Jumlah	254.308.545.052	204.786.564.118

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai selama tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Saldo Awal	4.727.279.135	8.199.684.373
Pembentukan (Pemulihan) Provisi	3.172.676.034	(3.472.405.239)
Saldo akhir	7.899.955.168	4.727.279.135

Piutang Kementerian Perhubungan CQ. Kepala Biro Perencanaan merupakan piutang kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atas kekurangan kompensasi biaya *Public Service Obligation* (PSO) tahun 2016, pengakuan awal disajikan sebagai pendapatan yang masih harus diterima. (Lihat Catatan 8)

Terhadap piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak berelasi, Perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai, karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

b. Based of type business (continued)

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<u>Subsidiaries:</u>		
PT Rumah Sakit Pelni	48.962.596.747	23.377.843.681
PT Sarana Bandar Nasional	30.905.982.398	23.377.843.681
PT Pelita Indonesia Djaya	4.088.992.862	2.815.238.899
	179.363.093.765	75.155.679.327
Less:		
Provision for Impairment Losses	(4.800.998.581)	(2.704.380.440)
Sub Total	174.562.095.184	72.451.298.887
Total	254.308.545.052	204.786.564.118

c. Based on Aging Analysis

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Kurang dari 1 tahun	210.616.283.601	159.666.127.912
1 - 2 tahun	20.171.211.524	32.254.495.852
2 - 3 tahun	19.267.504.217	5.351.214.252
3 - 4 tahun	2.498.450.852	-
4 - 5 tahun	1.106.897.946	12.242.005.236
Di atas 5 tahun	8.548.152.080	-
	262.208.500.220	209.513.843.252
Less:		
Provision for Impairment Losses	(7.899.955.168)	(4.727.279.135)
Total	254.308.545.052	204.786.564.118

Movements of provision for impairment losses during 2018 and 2017 as follows:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Saldo Awal	4.727.279.135	8.199.684.373
Pembentukan (Pemulihan) Provisi	3.172.676.034	(3.472.405.239)
Saldo akhir	7.899.955.168	4.727.279.135

Transportation Clearance CQ. Receivables The Head of Planning Bureau is a receivable to the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation on the lack of compensation for the Public Service Obligation (PSO) fee in 2016, initial recognition is presented as accrued income. (See Note 8)

Toward accounts receivable from the related parties, the Company did not set up a reserve provision for impairment, as management believes the amount of such receivables are collectible.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Terdapat piutang usaha yang dijadikan jaminan atas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2018 dan 2017. (Lihat Catatan 23)

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa provisi kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 37.

7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

No trade receivables are pledged as collateral for the loans of the Company and Subsidiaries in 2018 and 2017. (See Note 23)

Based on a review at the end of the year, management believes that the provision for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Explanations of related parties refer to Notes 37.

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
a. Pendapatan Masih Harus Diterima	112.835.916.592	274.806.676.092
b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	362.895.222.016	360.565.235.016
c. Piutang Lain-lain	10.168.392.164	9.529.310.634
d. Penempatan Jangka Pendek	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah	<u>490.899.530.772</u>	<u>649.901.221.742</u>

a. Rincian Pendapatan Masih Harus Diterima

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Public Service Obligation (PSO)	29.829.438.925	196.992.392.533
Pelayanan kesehatan	2.967.513.355	47.569.890.109
Usaha Penunjang	75.268.740.035	30.197.946.150
Asuransi	3.629.137.162	-
Lainnya	1.141.087.115	46.447.300
Jumlah	<u>112.835.916.592</u>	<u>274.806.676.092</u>

Pendapatan masih harus diterima Public Service Obligation (PSO) merupakan pendapatan PSO tahun berjalan yang belum terealisasi pencairan dananya sampai dengan akhir tahun berjalan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) (BABUN-BPP) Tahun Anggaran 2018 No. SP DIPA 999.07.1.98120/2018 tanggal 29 Desember 2017 dan Tahun Anggaran 2017 No. 999.07.1985120/2017 tanggal 30 Desember 2016, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2013 tahun 2013. (Lihat Catatan 7 dan 31)

Pendapatan masih harus diterima pelayanan kesehatan merupakan tagihan/klaim pada Entitas Anak PT Rumah Sakit Pelni atas pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang masih dalam proses verifikasi.

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Accrued Revenues	112.835.916.592	274.806.676.092
Restricted Cash	362.895.222.016	360.565.235.016
and Cash Equivalent	10.168.392.164	9.529.310.634
Other Receivables	5.000.000.000	5.000.000.000
Short Term Investment	5.000.000.000	5.000.000.000
Total	<u>490.899.530.772</u>	<u>649.901.221.742</u>

a. Detail of Accrued Revenues

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Public Service Obligation (PSO)	29.829.438.925	196.992.392.533
Health Service	2.967.513.355	47.569.890.109
Supporting Business	75.268.740.035	30.197.946.150
Insurance	3.629.137.162	-
Others	1.141.087.115	46.447.300
Total	<u>112.835.916.592</u>	<u>274.806.676.092</u>

Revenue Accrued Public Service Obligation (PSO) PSO is the income of the current year unrealized disbursement of funds until the end of the current year in accordance with the State General Treasurer Budget Implementation List (DIPA-BUN) (BABUN-BPP) Budget Year 2018 No. SP DIPA 999.07.1.98120/2018 dated 29 December 2017 and Budget Year 2017 No. 999.07.1985120 / 2017 dated 30 December 2016, and in accordance with Minister of Finance Regulation Number 173 / PMK.02 / 2013 in 2013. (See Note 7 and 31)

Revenues are still to be received health services is a bill / claim on Subsidiary PT Rumah Sakit Pelni on the National Health Insurance patients are still in the process of verification.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS (continued)

b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

b. Restricted Cash and Cash Equivalent

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas setara kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu seperti bank garansi, jaminan pelaksanaan dan sebagainya yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

Cash and cash equivalents Restricted cash equivalents represent cash reserved for specific purposes such as bank guarantees, performance bonds and so the term of 1 year or less. Cash and cash equivalents restricted as follows:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Pihak berelasi			Related parties
<u>Giro - Rupiah</u>			<u>Deposit - Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	299.517.228	426.084.496	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	505.999.135	349.739.224	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Sub Jumlah	805.516.363	775.823.720	Sub Total
<u>Deposito - Rupiah</u>			<u>Deposit - Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	200.000.000.000	331.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	150.057.300.000	57.300.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	155.091.990	130.091.990	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Sub Jumlah	350.212.391.990	331.187.391.990	Sub Total
<u>Bank Garansi - Rupiah</u>			<u>Deposit - Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	11.729.913.563	2.234.082.933	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	147.100.100	51.846.900	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Sub Jumlah	11.877.013.663	2.285.929.833	Sub Total
Pihak ketiga			Third parties
<u>Deposito - Rupiah</u>			<u>Deposit - Rupiah</u>
PT Bank Syariah Mandiri	-	26.315.789.473	PT Bank Syariah Mandiri
PT Tirta Investama	300.000	300.000	PT Tirta Investama
Sub Jumlah	300.000	26.316.089.473	Sub Total
Jumlah	362.895.222.016	360.565.235.016	Total

Deposito PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., sebesar Rp.200.000.000.000 dan Rp.300.000.000.000 merupakan dana Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2018 dan 2017, sedangkan deposito PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp.150.000.000.000 per 31 Desember 2018 digunakan sebagai Jaminan Bank Garansi.

Deposits of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., amounting Rp.200.000.000.000 and Rp.300.000.000.000 are funds of the State Capital Investment as of December 31, 2018 and 2017, while deposits of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. amounting Rp.150.000.000.000 as of December 31, 2018 is used as a Guarantee of Bank Guarantee.

c. Piutang Lain-Lain

c. Other Receivables

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
<u>Pihak Berelasi:</u>			<u>Related Parties:</u>
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	1.530.400.369	1.530.400.369	Pelni Pensioners Health Foundation
Pegawai	1.850.641.029	1.502.513.129	Employee
Lainnya	1.227.561.970	-	Others
Sub Jumlah	4.608.603.368	3.032.913.498	Sub Total



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

c. Piutang Lain-Lain (lanjutan)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
<i>Pihak Ketiga:</i>		
PT Asuransi Purna Arthanugraha	742.903.064	695.160.913
Koperasi Karyawan Sejahtera	700.685.600	-
Lainnya	4.292.305.996	5.975.696.698
	<u>5.735.894.660</u>	<u>6.670.857.611</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(176.105.864)	(174.460.475)
Sub Jumlah	<u>5.559.788.796</u>	<u>6.496.397.136</u>
Jumlah	<u>10.168.392.164</u>	<u>9.529.310.634</u>

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai tahun 2018 dan 2017, sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Saldo Awal	174.460.475	222.551.921
Pembentukan (Pemulihan) Provisi	1.645.389	(48.091.446)
Saldo akhir	<u>176.105.864</u>	<u>174.460.475</u>

Piutang lain-lain kepada PT Asuransi Purna Arthanugraha (Aspan) merupakan klaim asuransi kapal KM. FUDI sesuai dengan Berita Acara No. 477/DIRUT/UM/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, sebesar USD 51,170.58 dan Rp1.901.895 sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017.

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

d. Penempatan Jangka Pendek

Merupakan deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan namun tidak lebih dari dua belas bulan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk oleh Entitas Anak PT Sarana Bandar Nasional sebesar Rp5.000.000.000, pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 8,25% pada tahun 2018 dan 2017.

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS (continued)

c. Other Receivables (continued)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
			<i>Third Parties:</i>
			PT Asuransi Purna Arthanugraha
			Deposit
			Others
	<u>5.735.894.660</u>	<u>6.670.857.611</u>	
<i>Less:</i>			<i>Provision for Impairment Losses</i>
	<u>5.559.788.796</u>	<u>6.496.397.136</u>	Sub Total
	<u>10.168.392.164</u>	<u>9.529.310.634</u>	Total

Movements of allowance for impairment losses of 2018 and 2017, as follows:

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
	174.460.475	222.551.921	<i>Beginning Balance</i>
	1.645.389	(48.091.446)	<i>Reserved (Recovery) Provision</i>
	<u>176.105.864</u>	<u>174.460.475</u>	Ending Balance

Another explanation lay-kepada PT Asuransi Full Arthanugraha (Aspan) is an Insurance Claim Ship KM. FUDI accordance WITH Minutes No. 477 / Managing Director / UM / XII / 2011 Date of December 22, 2011, amounting to USD 1,661,437.95 As of December 31, 2018 and 2017.

Based on a review at the end of the year, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on other receivables uncollectible.

c. Short Term Investment

Is a time deposit of more than 3 (three) months but not more than twelve months in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk by Subsidiaries of PT Sarana Bandar Nasional amounting to Rp5,000,000,000, as of December 31, 2018 and 2017.

Interest rate per year rupiah deposits by 8,25% in 2018 and 2017.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORY

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
Entitas Induk:			Parent Entity:
Suku cadang	363.843.163.382	374.681.043.927	Spareparts
Pelumas	30.509.014.234	25.612.037.475	Lubricants
Bahan bakar	41.228.120.930	48.814.658.270	Fuel
Makanan	4.628.626.546	4.441.721.936	Food
Tiket Penumpang	4.909.366.545	5.301.143.040	Passenger Ticket
Lainnya	619.768.479	423.943.683	Others
Sub Jumlah	<u>445.738.060.116</u>	<u>459.274.548.331</u>	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiary:
PT Sarana Bandar Nasional	20.533.980.978	6.929.688.674	PT Sarana Bandar Nasional
PT Rumah Sakit Pelni	8.277.777.453	6.873.544.256	PT Rumah Sakit Pelni
Sub Jumlah	<u>28.811.758.431</u>	<u>13.803.232.931</u>	Sub Total
Jumlah	<u>474.549.818.547</u>	<u>473.077.781.262</u>	Total

Persediaan obat-obatan pada entitas anak PT Rumah sakit Pelni senilai Rp5.597.000.000 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (Lihat Catatan 23)

The supply of medicines to the subsidiary PT Pelni Hospital worth Rp.5.597.000.000 is used as collateral for credit facilities obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (See Note 23)

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, burglary dan resiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perseroan terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

Inventories are not insured against fire, burglary and other risks. Management believes that, the company's inventory is located in several locations, so the possibility of a loss in the same time to multiple locations is very small.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset dan tidak terdapat persediaan usang pada komponen aset lancar.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed replacement or recovery value of assets and there are no obsolete inventories in current assets component.

Persediaan usang telah dilakukan reklasifikasi kedalam aset tidak lancar lainnya dan telah dilakukan penurunan nilai persediaan.

Inventory obsolescence the reclassification into other non-current assets and has conducted impairment of inventories.

10. PERPAJAKAN

10. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
Entitas Induk:			Parent Entity:
Pajak Penghasilan Pasal 21	-	3.620.497.379	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 22	187.705.453	-	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 25	191.443.053	-	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 28A	-	6.223.141.753	Income Tax Article 28A
Pajak Lainnya	17.953.755.815	5.463.496.406	Other Taxes
Sub Jumlah	<u>18.332.904.321</u>	<u>15.307.135.538</u>	Sub Total



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar Dimuka (lanjutan)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Entitas Anak:		
Pajak Penghasilan Pasal 23	73.751.861	554.203.876
Pajak Penghasilan Pasal 25	1	-
Pajak Pertambahan Nilai	26.529.132.575	15.757.861.624
Pajak Lainnya	4.373.435.344	1.637.702.792
Sub Jumlah	<u>30.976.319.781</u>	<u>17.949.768.292</u>
Jumlah	<u>49.309.224.102</u>	<u>33.256.903.830</u>

b. Utang Pajak

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Entitas Induk:		
Pajak Pertambahan Nilai	17.643.645.487	14.972.882.583
Pajak Penghasilan Pasal 15	10.791.610.867	7.951.953.686
Pajak Penghasilan Pasal 21	5.555.161.386	7.680.786.129
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.649.028.455	2.152.051.789
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.212.615.611	1.116.482.875
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	131.261.588	166.180.513
Pajak Penghasilan Pasal 26	22.477.156	7.374.080
Pajak Daerah	22.766.547	41.332.141
Pajak Lainnya	471.617.158	6.817.879.798
Sub Total	<u>37.500.184.255</u>	<u>40.906.923.594</u>
Entitas Anak:		
Pajak Pertambahan Nilai	12.787.764.659	5.665.137.777
Pajak Penghasilan Pasal 21	5.203.887.384	3.838.522.154
Pajak Penghasilan Pasal 25	4.104.007.956	-
Pajak Penghasilan Pasal 29	3.063.035.286	12.788.440.878
Pajak Penghasilan Pasal 23	486.728.144	247.956.133
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	159.843.065	15.585.163
Pajak Penghasilan Pasal 15	55.625.000	-
Pajak Lainnya	21.343.462	8.010.159
Sub Total	<u>25.882.234.956</u>	<u>22.563.652.265</u>
Jumlah	<u>63.382.419.211</u>	<u>63.470.575.859</u>

c. Beban (Manfaat) Pajak

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Entitas Induk:		
Beban Pajak Kini	692.604.750	3.767.159.308
Beban Pajak Final	45.114.084.393	43.285.023.252
Beban (Manfaat) Tangguhan	(848.737.098)	(5.476.277.129)
Sub Jumlah	<u>44.957.952.045</u>	<u>41.575.905.431</u>

10. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Subsidiary:		
Income Tax Article 23	554.203.876	-
Income Tax Article 25	-	-
Value-Added Tax	15.757.861.624	15.757.861.624
Other Taxes	1.637.702.792	1.637.702.792
Sub Total	<u>17.949.768.292</u>	<u>17.949.768.292</u>
Total	<u>33.256.903.830</u>	<u>33.256.903.830</u>

b. Tax Payable

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Parent Entity:		
Value Added Tax	14.972.882.583	14.972.882.583
Tax Income Article 15	7.951.953.686	7.951.953.686
Tac Income Article 21	7.680.786.129	7.680.786.129
Tax Income Article 22	2.152.051.789	2.152.051.789
Tax Incime Article 23	1.116.482.875	1.116.482.875
Tax Income Article 4 Paragraph 2	166.180.513	166.180.513
Tax Incime Article 26	7.374.080	7.374.080
Local Tax	41.332.141	41.332.141
Other Taxes	6.817.879.798	6.817.879.798
Sub Total	<u>40.906.923.594</u>	<u>40.906.923.594</u>

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Subsidiary:		
Value Added Tax	5.665.137.777	5.665.137.777
Tac Income Article 21	3.838.522.154	3.838.522.154
Tax Incime Article 25	-	-
Tax Income Article 29	12.788.440.878	12.788.440.878
Tax Incime Article 23	247.956.133	247.956.133
Tax Income Article 4 Paragraph 2	15.585.163	15.585.163
Tax Income Article 15	-	-
Other Tax	8.010.159	8.010.159
Sub Total	<u>22.563.652.265</u>	<u>22.563.652.265</u>
Total	<u>63.470.575.859</u>	<u>63.470.575.859</u>

c. Tax Expense (Benefit)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Parent Entity:		
Current Tax Expense	3.767.159.308	3.767.159.308
Final Tax Expense	43.285.023.252	43.285.023.252
Tax Expense (Benefits)	(5.476.277.129)	(5.476.277.129)
Sub Total	<u>41.575.905.431</u>	<u>41.575.905.431</u>



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

c. Beban (Manfaat) Pajak (lanjutan)

c. Tax Expense (Benefit) (continued)

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Entitas Anak:			Subsidiary:
Beban Pajak Kini	40.104.044.688	38.008.112.380	Current Tax Expense
Beban Pajak Final	680.188.304	371.188.906	Final Tax Expense
Beban (Manfaat) Tangguhan	730.410.058	490.215.252	Tax Expense (Benefits)
Sub Jumlah	41.514.643.050	38.869.516.539	Sub Total
Jumlah	86.472.595.095	80.445.421.970	Total

d. Rekonsiliasi Fiskal

d. Fiscal Reconciliation

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk	248.589.138.093	317.994.939.757	Profit before income tax of the parent entity
Perbedaan temporer:			Temporary Differences:
Penyisihan piutang usaha	1.149.680.052	(3.490.944.269)	Receivable Allowance
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.975.583.809	17.459.992.274	Employee Benefits Liability
Penyusutan aset tetap	269.684.530	7.936.060.511	Fixed Assets Depreciation
Jumlah	3.394.948.391	21.905.108.516	Total
Perbedaan permanen:			Permanent Differences:
Beban pemasaran	3.073.731.320	2.791.637.332	Marketing expenses
PPH 21 ditanggung Entitas	18.464.712.732	16.251.620.000	Income tax art 21 by entity
Pendapatan di luar usaha lainnya	(212.277.269.926)	(118.050.368.818)	Other revenues
Jumlah	(190.738.825.874)	(99.007.111.486)	Total
Beban (pendapatan) terkait yang telah dikenakan Pajak			Related expenses (income) that have been charged Final Tax:
PPH final Usaha perkapalan	(1.315.003.847.620)	(1.224.230.973.065)	Income Tax Shipping Businessess
Penghasilan PSO (Public Service Obligation)	(2.403.998.420.099)	(2.461.783.255.474)	Public Service Obligation Income
Usaha sampingan	(8.469.820.684)	(9.843.290.638)	Other Income
Pendapatan deposito, jasa giro dan dividen	(33.795.446.091)	(44.319.214.292)	Revenues deposits, demand deposits and dividends
Beban usaha perkapalan	3.484.765.136.193	3.268.421.413.107	Shipping Businessess Expenses
Beban overhead	79.452.299.511	116.911.910.175	Overhead Expenses
Beban diluar usaha - PPh final atas pendapatan deposito, jasa giro, dividen dan aset tetap penjualan	138.575.257.431	129.019.109.673	Expenses outside the business final income tax on income on deposits, current accounts, dividends and fixed asset sales
Jumlah	(58.474.841.359)	(225.824.300.514)	Total
Penghasilan Kena Pajak	2.770.419.251	15.068.636.273	Taxable Income



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Pajak Penghasilan Badan Terutang	692.604.750	3.767.159.068
Kredit Pajak:		
Pajak Penghasilan Pasal 22	3.307.562.489	3.360.085.671
Pajak Penghasilan Pasal 23	49.671.970	72.251.731
Pajak Penghasilan Pasal 25	5.594.655.300	6.557.963.419
Jumlah	8.951.889.759	9.990.300.821
Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar	8.259.285.009	6.223.141.753
Beban Pajak Penghasilan Kini:		
Entitas Induk	692.604.750	3.767.159.068
Entitas Anak:		
PT Sarana Bandar Nasional	15.693.344.847	15.721.503.500
PT Pelita Indonesia Djaya	13.930.479.250	11.826.923.500
PT Rumah Sakit Peln	10.480.220.591	10.459.685.380
Sub Jumlah	40.104.044.688	38.008.112.380
Jumlah	40.796.649.438	41.775.271.449

Saat ini Perseroan sedang dilakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Empat sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00245/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 tanggal 8 Agustus 2018 untuk tahun pajak 2017 dan sampai terbitnya laporan ini, pemeriksaan masih berlangsung.

10. TAXATION (continued)

d. Fiscal Reconciliation (continued)

Corporate Income Tax Payable
Tax Deduction:
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23
Income Tax Article 25
Total
Corporate Income Tax Over Payment
Current Income Tax Expense:
Parent Entity
Subsidiary:
PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya
PT Rumah Sakit Peln
Sub Total
Total

The Company is currently being examined in order to test the compliance fulfillment of tax obligations by the Fourth Mandatory Tax Service Office in accordance with the Order for Examination Number: PRIN-00245 / WPJ.19 / KP.0405 / RIK.SIS / 2018 dated 8 August 2018 dated August 8, 2018 to tax year 2017 and until the publication of this report, the audit is still ongoing.

e. Pajak Tangguhan

	<u>2018</u>	
	<u>Aset (Liabilitas) Pajak Deferred Tax Assets Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Dibebankan ke Laba (Rugi) / Charged to Profit (Loss)</u>
Entitas Induk:		
Penurunan Nilai Piutang	21.834.080.229	287.420.013
Penyusutan Aset Tetap	5.841.238.861	67.421.132
Liabilitas Imbalan Kerja	10.612.993.021	444.554.536
Sub Jumlah	38.288.312.110	799.395.681
Entitas Anak:		
Sub Jumlah	12.903.755.572	(628.430.745)
Sub Jumlah	12.903.755.572	(628.430.745)
Jumlah	51.192.067.682	170.964.936

e. Deferred Tax

Parent Entity:
Impairment of Receivables
Depreciation of Fixed Assets
Liability for Employee Benefits
Sub Total
Subsidiary:
Sub Total
Total



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. PajakTangguhan (lanjutan)

	2017		
	Aset (Liabilitas) Pajak Deferred Tax Assets Saldo Awal / Beginning Balance	Dibebankan ke Laba (Rugi) / Charged to Profit (Loss)	Aset (Liabilitas) Pajak Deferred Tax Assets Saldo Akhir / Ending Balance
Entitas Induk:			
Penurunan Nilai Piutang	22.706.816.296	(872.736.067)	21.834.080.229
Penyusutan Aset Tetap	3.857.223.733	1.984.015.128	5.841.238.861
Liabilitas Imbalan Kerja	6.247.994.952	4.364.998.069	10.612.993.021
Sub Jumlah	32.812.034.981	5.476.277.129	38.288.312.110
Entitas Anak:			
Sub Jumlah	13.285.119.870	(381.364.298)	12.903.755.572
Sub Jumlah	13.285.119.870	(381.364.298)	12.903.755.572
Jumlah	46.097.154.851	5.094.912.831	51.192.067.682

Parent Entity:
Impairment of Receivables
Depreciation of Fixed Assets
Liability for Employee Benefits

Sub Total

Subsidiaries:

Sub Total

Total

10. TAXATION (continued)

e. Deferred Tax (continued)

11. UANG MUKA

Merupakan pengeluaran yang diberikan kepada pihak ketiga dan dana operasional SBU dan Cabang berkenaan dengan aktivitas usaha atau non usaha.

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Entitas Induk:		
Perkapalan	26.613.979.331	21.216.443.699
Keagenan	5.287.520.964	6.617.213.527
Administrasi dan umum	8.432.169.541	6.982.007.397
Usaha Galangan	-	224.912.388
Lainnya		42.231.800
Sub Jumlah	40.333.669.836	35.082.808.811
Entitas Anak:		
PT Sarana Bandar Nasional	12.389.697.139	3.429.886.837
PT Pelita Indonesia Djaya	6.158.464.955	2.341.528.872
PT Rumah Sakit Pelni	7.085.942.374	2.057.951.465
Sub Jumlah	25.634.104.468	7.829.367.174
Jumlah	65.967.774.304	42.912.175.985

Represents expenditures granted to third parties and SBU and Branch operational funds in respect of business or non-business activities.

Parent Entity:
Shipping
Agency
General and Administrative
Enterprises Shipyard
Other

Sub Total

Subsidiary:
PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya
PT Rumah Sakit Pelni

Sub Total

Total

11. ADVANCES PAYMENT

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Entitas Induk:		
Administrasi dan umum	16.031.123.968	15.388.657.810
Sewa	682.842.385	423.343.158
Usaha Perhotelan	156.052.503	-
Usaha Perkapalan	1.383.482.339	25.557.663
Asuransi	10.000.000	788.105
Lainnya	34.600.634	116.339.500
Sub Jumlah	18.298.101.829	15.954.686.236

Parent Entity:
General and Administrative
Insurance
Shipping
Hospitality
Rent
Other

Sub Total

12. PREPAID EXPENSES



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)

12. PREPAID EXPENSES (continued)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
Entitas Anak:			Subsidiary:
PT Sarana Bandar Nasional	10.370.648.682	6.528.106.509	PT Sarana Bandar Nasional
PT Rumah Sakit Pelni	710.547.297	249.686.984	PT Rumah Sakit Pelni
Sub Jumlah	<u>11.081.195.979</u>	<u>6.777.793.493</u>	Sub Total
Jumlah	<u>29.379.297.808</u>	<u>22.732.479.729</u>	Total

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTY

	<u>2018</u>				
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Addition</u>	<u>Pengurangan/ Reduction</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>
Biaya Perolehan / Acquisition Cost					
Tanah/Land	2.353.266.575	89.798.738.425	-	-	92.152.005.000
Gedung/Building	14.944.037.950	9.931.495.965	-	-	24.875.533.915
Sub Jumlah	<u>17.297.304.525</u>	<u>99.730.234.390</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>117.027.538.915</u>
Akumulasi Penyusutan/ Depreciation Accumulated					
Gedung/Building	8.287.437.967	1.024.422.129	-	(650.821.181)	8.661.038.915
Sub Jumlah	<u>8.287.437.967</u>	<u>1.024.422.129</u>	<u>-</u>	<u>(650.821.181)</u>	<u>8.661.038.915</u>
Nilai Buku	<u>9.009.866.558</u>				<u>108.366.500.000</u>
	<u>2017</u>				
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Addition</u>	<u>Pengurangan/ Reduction</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>
Biaya Perolehan / Acquisition Cost					
Tanah/Land	2.353.266.575	-	-	-	2.353.266.575
Gedung/Building	14.944.037.950	129.000.000	-	(129.000.000)	14.944.037.950
Sub Jumlah	<u>17.297.304.525</u>	<u>129.000.000</u>	<u>-</u>	<u>(129.000.000)</u>	<u>17.297.304.525</u>
Akumulasi Penyusutan/ Depreciation Accumulated					
Gedung/Building	7.913.837.023	1.021.990.870	-	(648.389.926)	8.287.437.967
Sub Jumlah	<u>7.913.837.023</u>	<u>1.021.990.870</u>	<u>-</u>	<u>(648.389.926)</u>	<u>8.287.437.967</u>
Nilai Buku	<u>9.383.467.502</u>				<u>9.009.866.558</u>

Sesuai kebijakan akuntansi properti investasi bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 dan seterusnya Perseroan memilih menggunakan model nilai wajar yang berlaku prospektif atas nilai properti investasi - tanah dan bangunan dengan pertimbangan sedang dilakukan upaya untuk optimalisasi aset tersebut, dimana pada akhir tahun sebelumnya masih disajikan sebesar nilai buku karena menggunakan model biaya perolehan.

In accordance with the investment property accounting policy that as of December 31, 2018 and beyond, the Company has chosen to use the fair value model that applies prospectively to the value of investment property - land and buildings considering that efforts are being made to optimize the asset, which at the end of the previous year is still presented at book value because it uses the acquisition cost model.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Kenaikan (penurunan) atas metode tersebut dicatat sebagai keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar aset properti investasi dan dicatat sebagai pendapatan non usaha. (Lihat catatan 4q dan 35)

Properti Investasi dengan nilai wajar per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.366.500.000 sesuai dengan laporan penilai independen nomor 087/SKR/IV/2019 tanggal 22 April 2019, tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat mengenai Nilai Wajar aset properti investasi yang terletak di Makassar dan Medan yang akan digunakan untuk keperluan Pelaporan Keuangan.

13. INVESTMENT PROPERTY (continued)

The increase (decrease) in the method is recorded as a gain (loss) change in the fair value of investment property assets and recorded as non-business income. (See notes 4q and 35)

Investment property with fair value as of December 31, 2018 amounting to Rp108.366.500.000 in accordance with the independent appraisal report number 087/SKR/IV/2019 dated April 22, 2019, the purpose of this valuation is to express opinions regarding the Fair Value of investment property assets located in Makassar and Medan that will be used for financial reporting purposes.

	2018			Total
	Nilai Buku/ Book Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar/ Increase (Decrease) of Fair	
Tanah	2.353.266.575	92.151.960.000	89.798.693.425	Land
Gedung	6.282.999.035	16.214.540.000	9.931.540.965	Building
Jumlah	8.636.265.610	108.366.500.000	99.730.234.390	

Pada tahun 2018 Perseroan melakukan reklasifikasi properti investasi atas tanah dan bangunan dan untuk saldo per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 / 31 Desember 2016 untuk tujuan keterbandingan.)Lihat catatan 3q, 15 dan 35)

In 2018 the Company reclassifies investment properties on land and buildings and for balances as of 31 December 2017 and 1 January 2017/31 December 2016 for comparative purposes. (See notes 3q, 15 and 35)

Tidak terdapat properti investasi Grup yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman/kewajiban lainnya dan properti investasi berupa gedung tidak diasuransikan.

There are no Group investment properties that are pledged as collateral to other loans / liabilities and investment properties in the form of uninsured buildings.

14. ALAT PRODUKSI

14. PRODUCTION EQUIPMENT

	2018				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost					
Perolehan Langsung/ Direct Acquisition					
Armada Kapal/Fleet	7.801.448.463.344	92.549.796.275	-	-	7.893.998.259.619
Perlengkapan Armada/ Equipment Fleet	212.597.490.444	138.950.604.914	-	-	351.548.095.358
Sub Jumlah	8.014.045.953.788	231.500.401.189	-	-	8.245.546.354.977



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

14. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

	2018				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ Accumulated Depreciation and Impairment					
Armada Kapal/Fleet	4.819.288.326.358	323.438.544.711	-	-	5.142.726.871.069
Perlengkapan Armada/ Equipment Fleet	39.860.311.783	14.872.218.780	-	-	54.732.530.563
Sub Jumlah/Sub Total	4.859.148.638.141	338.310.763.491	-	-	5.197.459.401.632
Nilai Buku/Book Value	3.154.897.315.647				3.048.086.953.345
Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	50.277.940.404	278.821.391	-	50.277.940.404	278.821.391
Jumlah/Total	3.205.175.256.051				3.048.365.774.736
	2017				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost					
Perolehan Langsung/ Direct Acquisition					
Armada Kapal/Fleet	7.316.831.712.215	39.678.936.577	-	444.937.814.552	7.801.448.463.344
Perlengkapan Armada/ Equipment Fleet	465.441.125.261	167.707.924.129	-	(420.551.558.946)	212.597.490.444
Sub Jumlah/ Sub Total	7.782.272.837.476	207.386.860.706	-	24.386.255.606	8.014.045.953.788
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ Accumulated Depreciation and Impairment					
Armada Kapal/Fleet	4.332.583.706.343	282.767.281.192	-	203.937.338.823	4.819.288.326.358
Perlengkapan Armada/ Equipment Fleet	220.985.618.369	5.010.048.981	-	(186.135.355.567)	39.860.311.783
Sub Jumlah/Sub Total	4.553.569.324.712	287.777.330.173	-	17.801.983.256	4.859.148.638.141
Nilai Buku/Book Value	3.228.703.512.764				3.154.897.315.647
Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	-	50.277.940.404	-	-	50.277.940.404
Jumlah/Total	3.228.703.512.764				3.205.175.256.051



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

Pada tahun 2018, Perusahaan menambah 1 (satu) unit kapal container KM. Logistik Nusantara 5 (Ex MV. Hannah S) dengan type 350-450 TEUs diserahkan pada Akhir Bulan Mei 2018 di Singapura sesuai dengan *Protocol of Delivery and Acceptance* tanggal 31 Mei 2018, biaya perolehan KM Logistik Nusantara 5 sebesar USD6,422,038,- atau setara dengan Rp.90.263.435.000, ditambah dengan biaya yang terkait langsung dengan pengadaan kapal, seperti ROB BBM, jasa konsultan, *legal assistance*, biaya perjalanan dinas dan lainnya sebesar Rp.2.286.361.275, sehingga biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 5 sebesar Rp.92.549.796.275.

Pada tahun 2017, Perseroan menambah 4 (empat) unit kapal container dengan rincian sebagai berikut:

- a. KM. Logistik Nusantara 1 (Ex MV. Bald) dengan type 451-700 TEUs diserahkan pada akhir bulan Februari 2017 di Singapura sesuai dengan *Protocol of Delivery and Acceptance* tanggal 21 Februari 2017. Biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 1 sebesar USD4,800,000 atau setara dengan Rp.64.075.600.000 ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan kapal, seperti ROB BBM, jasa konsultan, *legal assistance*, biaya perjalanan dinas dan lainnya sebesar Rp.4.031.036.976, sehingga biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 1 sebesar Rp.68.106.636.976.
- b. KM. Logistik Nusantara 2 (Ex MV. Sanmari) dengan type 125-175 TEUs diserahkan pada tanggal 18 September 2017 di Singapura sesuai dengan *Protocol of Delivery and Acceptance* tanggal 18 September 2017. Biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 2 sebesar USD3,375,000 atau setara dengan Rp.44.688.483.750 ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan kapal, seperti ROB BBM, jasa konsultan, *legal assistance*, biaya perjalanan dinas dan lainnya sebesar Rp.3.470.337.263, sehingga biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 2 sebesar Rp.48.158.821.013.
- c. KM. Logistik Nusantara 3 (Ex MV. Fria) dengan type 125-175 TEUs diserahkan pada tanggal 7 Nopember 2017 di Singapura sesuai dengan *Protocol of Delivery and Acceptance* tanggal 7 Nopember 2017. Biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 3 sebesar USD3,575,000 atau setara dengan Rp.48.396.945.000 ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan kapal, seperti ROB BBM, jasa konsultan, *legal assistance*, biaya perjalanan dinas dan lainnya sebesar Rp.3.045.521.140, sehingga biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 3 sebesar Rp.51.442.466.140.

14. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

In 2018, the Company added 1 (one) unit container ship KM. Logistik Nusantara 5 (Ex MV. Hannah S) with type 350-450 TEUs submitted at the end of May 2018 in Singapore in accordance with the *Protocol of Delivery and Acceptance* dated May 31, 2018. Cost of acquisition of KM. Nusantara Nusantara 5 amounted to USD6,422,038, or equivalent to Rp.90.263.435.000, plus costs directly related to the procurement of vessels, such as ROB BBM, consultant services, *legal assistance*, official travel and other costs of Rp.2.286.361.275, so the acquisition cost of KM. Logistik Nusantara 5 amounting to Rp.92.549.796.275.

In 2017, the Company adds 4 (four) container ship units with the following details:

- a. KM. Logistics Nusantara 1 (Ex MV. Bald) with type 451-700 TEUs submitted at the end of February 2018 in Singapore in accordance with the *Protocol of Delivery and Acceptance* dated February 21, 2017. Cost of acquisition of KM. Logistik Nusantara 1 amounted to USD4,800,000, or equivalent to Rp.64.075.600.000, plus costs directly related to the procurement of vessels, such as ROB BBM, consultant services, *legal assistance*, official travel and other costs of Rp.4.031.036.976, so the acquisition cost of KM. Logistik Nusantara 1 amounting to Rp.68.106.636.976.
- b. KM. Logistik Nusantara 2 (Ex MV. Sanmari) with type 125-175 TEUs submitted on September 18, 2017 in Singapore in accordance with the *Protocol of Delivery and Acceptance* dated September 18, 2017. Cost of acquisition of KM. Logistik Nusantara 2 amounted to USD3,375,000, or equivalent to Rp.44.688.483.750, plus costs directly related to the procurement of vessels, such as ROB BBM, consultant services, *legal assistance*, official travel and other costs of Rp.3.470.337.263, so the acquisition cost of KM. Nusantara Logistik 2 amounting to Rp.48.158.821.013.
- c. KM. Logistik Nusantara 3 (Ex MV. Fria) with type 125-175 TEUs submitted on November 7, 2017 in Singapore in accordance with the *Protocol of Delivery and Acceptance* dated November 7, 2017. Cost of acquisition of KM. Logistik Nusantara 3 amounted to USD3,575,000, or equivalent to Rp.48.396.945.000, plus costs directly related to the procurement of vessels, such as ROB BBM, consultant services, *legal assistance*, official travel and other costs of Rp.3.045.521.140, so the acquisition cost of KM. Nusantara Logistik 3 amounting to Rp.51.442.466.140.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

d. KM. Logistik Nusantara 4 (Ex MV. Serser) dengan type 125-175 TEUs diserahkan pada tanggal 12 Desember 2017 di Singapura sesuai dengan *Protocol of Delivery and Acceptance* tanggal 12 Desember 2017. Biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 4 sebesar USD3,450,000 atau setara dengan Rp.46.837.770.000 ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan kapal, seperti ROB BBM, jasa konsultan, legal assistance, biaya perjalanan dinas dan lainnya sebesar Rp.3.241.211.634, sehingga biaya perolehan KM. Logistik Nusantara 4 sebesar Rp.50.277.940.404.

Seluruh pengadaan kapal kontainer tersebut dimaksud untuk mendukung penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut (tol Laut) merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM161 Tahun 2015, pendanaannya menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

Mendasar pada penilaian oleh pihak independen terhadap nilai wajar kapal pada tahun 2017 dan 2016, manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat kapal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 masih dibawah nilai wajarnya.

Pada tahun 2017, Grup melakukan penilaian 2 (dua) unit kapal penumpang dan tanah serta bangunan kantor yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 14, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat yang obyektif mengenai nilai wajar untuk kepentingan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 48. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan Pasar untuk aset kapal penumpang dan Pendekatan Biaya untuk aset tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2017. Penilaian dilakukan oleh penilai independen sesuai dengan Laporrannya No. 061/SKR/II/2018 tanggal 23 Februari 2018. Berikut hasil nilai wajar dari aset yang dinilai:

No./ Number	Nama Aset Tetap/ Fixed Assets Name	Tipe/Type dan Luas/Wide	Nilai Buku/ Book Value (Rp)	Nilai Wajar/ Fair Value (Rp)	Simpulan/ Conclusion
1.	KM. Bukit Siguntang	2000 Pax	57.225.262.760	108.437.100.000	Tidak terindikasi mengalami penurunan nilai
2.	KM. Lambelu	2000 Pax	65.364.044.731	108.437.100.000	
3.	Tanah dan Bangunan	1.724 M2	1.238.660.947	65.772.575.000	

Perseroan melakukan penilaian properti berupa 2 (dua) tanah dan bangunan gedung serta 8 (delapan) armada untuk memberikan pendapat yang objektif mengenai nilai wajar dan sisa umur manfaat dari aset tersebut per tanggal 31 Desember 2016 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang digunakan untuk kepentingan pelaporan keuangan sesuai PSAK 16 dan PSAK 68. Berikut aset yang dilakukan penilaian:

14. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

d. KM. Logistik Nusantara 3 (Ex MV. Fria) with type 125-175 TEUs submitted on November 7, 2017 in Singapore in accordance with the *Protocol of Delivery and Acceptance* dated November 7, 2017. Cost of acquisition of KM. Nusantara Nusantara 1 amounted to USD3,575,000, or equivalent to Rp.48.396.945.000, plus costs directly related to the procurement of vessels, such as ROB BBM, consultant services, legal assistance, official travel and other costs of Rp.3.045.521.140, so the acquisition cost of KM. Nusantara Logistik 1 amounting to Rp.51.442.466.140.

The entire procurement of container ships is intended to support the implementation of public service obligations for sea freight transportation (Sea toll) referring to the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 106 of 2015 and Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia PM161 Number 2015, funding using State Capital Participation funds (PMN)

Based on an independent party's assessment of the fair value of ships in 2017 and 2016, management believes that the carrying amount of the vessel for the year ended December 31, 2018 is still below its fair value.

In the year 2017, the Group assessed 2 (two) units of passenger vessels and land and office buildings located at Jalan Jenderal Sudirman no. 14, Mangkura Village, Ujung Pandang District, Ujung Pandang Municipality, South Sulawesi Province with the intent and objective to provide an objective opinion on the fair value for financial reporting purposes in accordance with PSAK 16 and PSAK 48. The valuation approach used is to use the Market Approach for assets passenger vessels and the Cost Approach for land and building assets as of December 31, 2017. The appraisal is performed by an independent appraiser pursuant to its Report no. 061 / SKR / II / 2018 dated February 23, 2018. Here are the fair value of assessed assets:

The Company conducts property valuations in the form of 2 (two) buildings and buildings and 8 (eight) fleets to provide objective opinions regarding the fair value and remaining useful life of these assets as of December 31, 2016 by the Public Appraisal Service Office used for interest financial reporting in accordance with PSAK 16 and PSAK 68. The following assets are assessed:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

14. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

No. /Number	No. Laporan / No. Report	Tanggal Laporan / Reporting date	Keterangan / Information	Definisi Nilai / Definition of value	Nilai / Value (Rp)
(1)	016/LP/II/2017	14 Februari 2017	KFC. Jet Liner	Nilai Wajar/Fair value	109.201.538.727
(2)	017/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Labobar	Nilai Wajar/Fair value	455.680.060.890
(3)	018/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Gunung Dempo	Nilai Wajar/Fair value	713.140.500.924
(4)	019LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Caraka Jaya Niaga III-4	Nilai Wajar/Fair value	5.897.112.276
(5)	020/LP/II/2017	14 Februari 2017	KFC. Jet Liner	Nilai Residu/Residual value	18.210.319.343
(6)	021/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Labobar	Nilai Residu/Residual value	50.233.464.243
(7)	022/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Gunung Dempo	Nilai Residu/Residual value	44.775.299.002
(8)	023/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Sinabung	Nilai Residu/Residual value	57.406.675.018
(9)	024/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Kelud	Nilai Residu/Residual value	56.385.588.227
(10)	025/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Dorolonda	Nilai Residu/Residual value	51.119.679.893
(11)	026/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Nggapulu	Nilai Residu/Residual value	53.120.810.988
(12)	027/LP/II/2017	14 Februari 2017	Gedung Gajah mada	Nilai Wajar/Fair value	433.568.800.000
(13)	028/LP/II/2017	14 Februari 2017	Gedung Kemayoran	Nilai Wajar/Fair value	219.940.600.000

Atas hasil tersebut, tidak mengakibatkan penyajian kembali atas nilai aset tetap.

On these results, when compared with the book value of each asset is assessed, will be summed up as follows:

No.	Nama Properti / Property name	Nilai Buku / Book Value	Nilai Wajar / Fair Value	Selisih / Difference
(1)	KFC. Jet Liner	107.997.913.528	109.201.538.727	-
(2)	KM. Labobar	452.928.495.667	455.680.060.890	-
(3)	KM. Gunung Dempo	712.162.029.642	713.140.500.924	-
(4)	KM. Caraka Jaya Niaga III-4	-	5.897.112.276	-
(5)	KM. Sinabung	250.175.938.573	250.175.938.573	-
(6)	KM. Kelud	231.191.409.929	231.191.409.929	-
(7)	KM. Dorolonda	296.199.154.208	296.199.154.208	-
(8)	KM. Nggapulu	341.104.694.142	341.104.694.142	-
(9)	Gedung Gajah mada	23.680.981.511	433.568.800.000	-
(10)	Gedung Kemayoran	11.724.725.246	219.940.600.000	-

Berdasarkan laporan KJPP bahwa umur ekonomis kapal diperkirakan selama 30 tahun dengan mengacu pada umur ekonomis hasil kajian dari Clarkson Research Service, dan dapat dinyatakan bahwa rata-rata nilai sisa kapal berkisar 5% dari nilai barunya atau biaya reproduksi barunya.

Based on the report KJPP that the estimated economic life of the ship for 30 years with reference to the economic life results from Clarkson Research Service, and can be stated that the average value of the rest of the ship about 5% of the value of new or reproduction cost new.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

Alat produksi berupa armada kapal diasuransikan pada PT Asuransi Jasindo dan Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan cukup memadai untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian terhadap aset yang dipertanggungjawabkan. (Lihat Catatan 32)

Tidak terdapat alat produksi yang digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/pinjaman Grup.

14. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

The production equipment in the form of an insured fleet at PT Asuransi Jasindo and the Group believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses to the insured assets. (See Note 32).

There are no production equipment used as collateral for Group liabilities.

15. ASET TETAP

15. FIXED ASSETS

	2018				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost					
<u>Perolehan Langsung/ Direct Acquisition</u>					
Tanah/Land	25.111.181.619	31.667.559.999	-	-	56.778.741.618
Gedung/Building	300.628.591.019	27.726.917.889	-	-	328.355.508.908
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	146.720.898.443	18.837.549.780	-	1.301.936.818	164.256.511.406
Inventaris Kantor/ Office Inventory	237.142.025.437	9.653.243.202	(270.608.318)	154.866.666	246.369.793.656
Alat Produksi Lainnya/ Other Tools	22.505.098.928	6.810.391.326	-	-	29.315.490.254
Sub Jumlah/Sub Total	732.107.795.446	94.695.662.196	(270.608.318)	1.456.803.484	825.076.045.841
<u>Sewa Pembiayaan/ Leasing Financing</u>					
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	13.779.128.686	3.903.467.157	-	-	17.682.595.843
Sub Jumlah/Sub Total	13.779.128.686	3.903.467.157	-	-	17.682.595.843
Jumlah/Total	745.886.924.132	98.599.129.353	(270.608.318)	1.456.803.484	842.758.641.684
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ Accumulated Depreciation and Impairment					
<u>Perolehan Langsung/ Direct Acquisition</u>					
Gedung/Building	106.122.440.663	8.417.120.650	-	650.821.181	115.190.382.494
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	83.073.786.085	8.289.122.059	2.527.754.904	1.107.936.818	87.727.216.422
Inventaris Kantor/ Office Inventory	166.041.742.520	6.282.015.252	20.508.585	154.866.666	172.148.382.521
Alat Produksi Lainnya/ Other Tools	19.355.649.924	15.479.164.527	(233.632.391)	-	34.601.182.060
Sub Jumlah/Sub Total	374.593.619.192	21.761.179.779	(213.123.806)	154.866.666	409.667.163.497



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS (continued)

	2018				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Sewa Pembiayaan/ Leasing Financing					
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	4.976.431.510	3.067.592.971	-	-	8.044.024.481
Sub Jumlah/Sub Total	4.976.431.510	3.067.592.971	-	-	8.044.024.481
Jumlah/Total	379.570.050.702	24.828.772.750	(213.123.806)	154.866.666	417.711.187.978
Nilai Buku/Book Value	366.316.873.431				425.047.453.706
Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction					
	12.015.868.871	1.636.810.048	-	-	13.652.678.919
Jumlah/Total	378.332.742.302				438.700.132.625
	2017				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost					
Perolehan Langsung/ Direct Acquisition					
Tanah/Land	24.128.598.080	982.583.539	-	-	25.111.181.619
Gedung/Building	290.342.837.178	9.372.515.341	-	913.238.501	300.628.591.019
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	32.150.324.359	28.877.742.424	-	85.692.831.660	146.720.898.443
Inventaris Kantor/ Office Inventory	114.012.377.740	6.887.162.616	-	116.242.485.080	237.142.025.437
Alat Produksi Lainnya/ Other Tools	248.782.826.358	692.751.900	-	(226.970.479.330)	22.505.098.928
Sub Jumlah/Sub Total	709.416.963.715	46.812.755.819	-	(24.121.924.089)	732.107.795.446
Sewa Pembiayaan/ Leasing Financing					
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	9.486.888.686	4.292.240.000	-	-	13.779.128.686
Sub Jumlah/Sub Total	9.486.888.686	4.292.240.000	-	-	13.779.128.686
Jumlah/Total	718.903.852.401	51.104.995.819	-	(24.121.924.089)	745.886.924.132



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS (continued)

	2017				Saldo Akhir/ Ending Balance
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ Accumulated Depreciation and Impairment					
Perolehan Langsung/ Direct Acquisition					
Gedung/ <i>Building</i>	98.088.930.433	7.459.436.316	(121.659.974)	695.733.888	106.122.440.663
Kendaraan Bermotor/ <i>Vehicle</i>	27.363.821.129	24.811.813.205	-	30.898.151.752	83.073.786.085
Inventaris Kantor/ <i>Equipment</i>	91.958.272.344	5.407.291.688	-	68.676.178.487	166.041.742.520
Alat Produksi Lainnya <i>Other Tools</i>	136.037.279.526	2.941.558.600		(119.623.188.202)	19.355.649.924
Sub Jumlah/Sub Total	353.448.303.432	40.620.099.808	(121.659.974)	(19.353.124.075)	374.593.619.192
Sewa Pembiayaan/ Leasing Financing					
Kendaraan Bermotor/ <i>Vehicle</i>	2.816.183.170	2.160.248.340	-	-	4.976.431.510
Sub Jumlah/Sub Total	2.816.183.170	2.160.248.340	-	-	4.976.431.510
Jumlah/Total	356.264.486.602	42.780.348.148	(121.659.974)	(19.353.124.075)	379.570.050.702
Nilai Buku/Book Value	362.639.365.799				366.316.873.431
Aset Dalam Konstruksi/ <i>Assets Under Construction</i>	6.182.913.958	11.848.726.371	-	(6.015.771.458)	12.015.868.871
Jumlah/Total	368.822.279.757				378.332.742.302

Penambahan aset tetap tanah tahun 2018 merupakan biaya pengurusan peralihan hak atas tanah PT Rumah Sakit Pelni.

The addition of fixed assets in 2018 is the cost of managing the transfer of rights to the land of PT Rumah Sakit Pelni.

Penambahan aset tetap gedung tahun 2018, antara lain pembelian bangunan ruko untuk Kantor Pusat PT Pelita Indonesia Djaya senilai Rp.12,7 miliar dan renovasi bangunan di Kantor Pusat PT Pelni (Persero) serta PT Rumah Sakit Pelni.

The addition of fixed assets of the building in 2018, including the purchase of buildings for PT Pelita Indonesia Djaya Head Office worth Rp.12.7 billion and renovation of buildings at PT Pelni (Persero) Headquarters and PT Rumah Sakit Pelni.

Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi dijadikan jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri, termasuk bangunan ruang rawat inap yang telah direnovasi. (Lihat Catatan 23)

Land and Building Subsidiary PT Rumah Sakit Pelni with certificate of Right to Building No. 620 / Slipi used as collateral for the credit facilities obtained from PT Bank Syariah Mandiri, including inpatient room building that has been renovated. (See Note 23)

1 set alat Angiography/Cathlab merek GE Healthcare tipe Innova IGS 520 Gen2 Tahun 2015 dan seluruh alat kesehatan yang dibeli dan dibiayai oleh PT Bank Syariah Mandiri, dijadikan jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri. (Lihat Catatan 23)

An set of Angiography / Cathlab devices from the GE Healthcare Innova type IGS 520 Gen2 in 2015 and all medical devices purchased and financed by PT Bank Syariah Mandiri, are used as collateral in connection with credit facilities obtained from PT Bank Syariah Mandiri. (See Note 23)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Peralatan kesehatan berupa 1 unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785 Essential C-Arm dan 1 unit Brivo MR 355 Inspire 1,5T dijaminan atas fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai masing-masing sebesar Rp8.143.905.000 dan Rp12.439.680.000. (Lihat Catatan 23)

Alat kesehatan berikut ini, dijadikan jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri: (Lihat Catatan 23)

- a. 1 set Alat Angiography/Cath Lab Angiography/Cath Lab merek GE Healthcare tipe Innova IGS 520 Gen2;
- b. 1 set Alat Ultrasonography (USG) merek Hitachi tipe Hi Vision Avius;
- c. 1 set Alat Endoscopy merek Olympus;
- d. Mobil Ambulance KIA K2700;
- e. Mobil Avanza Veloz 1.5 M/T;
- f. Genset Type Perkins Prime Power 500KVA;
- g. Diagnostic Ultrasound System Merk Aloka;
- h. Radiologi Type Mars 40/CS/RAD;
- i. Color Dopler Ultrasound System Merk Aloka;
- j. Ventilator Neonate to Adult Type Respirationics;
- k. Ventilator Pediatric to Adult Type C Merk Hamilton;
- l. Meja Operasi Merk Medifa;
- m. 118 set Patient Bed dan perlengkapan penunjang lainnya;
- n. Aset eksisting PT RS Pelni sejumlah 86 item.

Perseroan sedang dan masih melakukan kajian/telaahan teknis terhadap properti investasi lainnya dalam upaya untuk optimalisasi aset agar menjadi lebih maksimal, mengingat nilai pendapatan yang diperoleh tidak signifikan dan kesulitan dalam teknis administrasi lainnya. Oleh karenanya untuk properti investasi tersebut dilakukan reklasifikasi penyajian sebagai aset tetap. (Lihat Catatan 13 dan 39)

Perseroan telah melakukan penilaian terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan pada tahun buku 2017 dan 2016 oleh penilai independen dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat yang obyektif mengenai nilai wajar untuk kepentingan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 48. Hasil dari penilaian tersebut, tidak terdapat indikasi penurunan nilai sehingga Perseroan tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun berjalan. (Lihat Catatan 14)

15. FIXED ASSETS (continued)

The health care equipment as 1 unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & BRIVO OEC C-Arm Essential 785 and 1 355 units BRIVO MR Inspire 1,5T pledged against the loan facility obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk , with the value of each of Rp8.143.905.000 and Rp12.439.680.000. (See Note 23)

The following medical devices are used as collateral in connection with credit facilities obtained from PT Bank Syariah Mandiri: (See Note 23)

- a. 1 set of Angiography / Cath Lab Angiography / Cath Lab Tools GE brand Healthcare Innova type IGS 520 Gen2;
- b. 1 set Ultrasonography (USG) merk Hitachi tipy Hi Vision Avius;
- c. 1 set Endoscopy merk Olympus;
- d. Ambulance KIA K2700;
- e. Avanza Veloz 1.5 M/T;
- f. Genset Type Perkins Prime Power 500KVA;
- g. Diagnostic Ultrasound System Merk Aloka;
- h. Radiologi Type Mars 40/CS/RAD;
- i. Color Dopler Ultrasound System Merk Aloka;
- j. Ventilator Neonate to Adult Type Respirationics;
- k. Ventilator Pediatric to Adult Type C Merk Hamilton;
- l. Medifa Brand Operating Table;
- m. 118 sets of Patient Bed and other supporting equipment;
- n. The existing assets of PT Pelni Hospital are 86 items.

The company is currently and still conducting a technical review / review of other investment properties in an effort to optimize assets to become more leverage, given the insignificant value of income obtained and other technical administrative difficulties. Therefore the investment property is reclassified as a fixed asset. (See Note 13 and 39)

The Company has undertaken an assessment of property, plant and equipment in fiscal year 2017 and 2016 by an independent appraiser with the intent and purpose of providing an objective opinion of fair value for financial reporting purposes in accordance with PSAK 16 and PSAK 48. The results of the assessment, there is an indication of impairment so that the Company does not need to establish allowance for impairment losses in the current year. (See Note 14)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. ASET TAKBERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

	2018				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost					
Perangkat lunak	10.528.772.935	14.595.424.897	106.556.299	-	25.017.641.533
Hak guna bangunan	2.320.284.302	294.370.112	-	-	2.614.654.414
Sub Jumlah	12.849.057.237	14.889.795.009	106.556.299	-	27.632.295.947
Akumulasi Amortisasi/ Amortization Accumulated					
Perangkat lunak	3.840.878.977	6.525.526.870	3.391.666	-	10.363.014.181
Hak guna bangunan	1.618.714.233	257.471.916	-	-	1.876.186.149
Sub Jumlah	5.459.593.210	6.782.998.786	3.391.666	-	12.239.200.330
Nilai Buku	7.389.464.027				15.393.095.617
Aset Dalam Konstruksi/ Asset Under Construction	14.300.656.146	5.959.301.205	-	7.217.422.448	13.042.534.903
Sub Jumlah	14.300.656.146	5.959.301.205	-	7.217.422.448	13.042.534.903
Jumlah	21.690.120.173				28.435.630.520
	2017				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost					
Perangkat lunak	5.138.569.971	5.390.202.964	-	-	10.528.772.935
Hak guna bangunan	2.306.922.636	13.361.666	-	-	2.320.284.302
Sub Jumlah	7.445.492.607	5.403.564.630	-	-	12.849.057.237
Akumulasi Amortisasi/ Amortization Accumulated					
Perangkat lunak	2.295.859.627	1.545.019.350	-	-	3.840.878.977
Hak guna bangunan	613.840.892	1.004.873.341	-	-	1.618.714.233
Sub Jumlah	2.909.700.519	2.549.892.691	-	-	5.459.593.210
Nilai Buku	4.535.792.088				7.389.464.027
Aset Dalam Konstruksi/ Asset Under Construction	-	14.300.656.146	-	-	14.300.656.146
Sub Jumlah	-	14.300.656.146	-	-	14.300.656.146
Jumlah	4.535.792.088				21.690.120.173



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Biaya Perolehan:		
Piutang Usaha Tidak Tertagih	81.551.664.401	78.205.289.102
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	1.736.484.272	1.322.703.811
Aset Tetap Tidak Berfungsi	30.018.336.764	29.930.797.353
Lainnya	1.716.501.980	1.579.027.662
Jumlah	115.022.987.417	111.037.817.928
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
Piutang Usaha Tidak Tertagih	(81.551.664.401)	(78.205.289.102)
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	(1.735.284.272)	(1.322.503.811)
Aset Tetap Tidak Berfungsi	(29.955.360.833)	(29.904.797.253)
Lainnya	(1.474.999.900)	(389.320.360)
Jumlah	(114.717.309.406)	(109.821.910.526)
Nilai Buku	305.678.011	1.215.907.402

17. OTHER NON CURRENT ASSETS

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Acquisition Cost:		
Account Receivable Not Collectible	81.551.664.401	78.205.289.102
Inventory Damaged	1.736.484.272	1.322.703.811
Fixed Assets Damage	30.018.336.764	29.930.797.353
Other	1.716.501.980	1.579.027.662
Total	115.022.987.417	111.037.817.928
Accumulated Depreciation and Impairment		
Account Receivable Not Collectible	(81.551.664.401)	(78.205.289.102)
Inventory Damaged	(1.735.284.272)	(1.322.503.811)
Others	(29.955.360.833)	(29.904.797.253)
Fixed Assets Damage	(1.474.999.900)	(389.320.360)
Total	(114.717.309.406)	(109.821.910.526)
Book Value	305.678.011	1.215.907.402

18. UTANG USAHA

a. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok, sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Pihak Berelasi:		
PT Pelindo I, II, III dan IV	6.934.380.740	13.981.210.186
PT Asuransi Jiwasraya	6.212.488.067	-
PT PAL Indonesia	2.703.782.582	-
Otoritas Kepelabuhanan	2.682.447.668	2.117.138.342
PT Sarana Gama Sejahtera	2.213.779.431	1.035.911.773
PT Sucofindo (Persero)	1.034.200.000	219.181.454
PT Biro Klasifikasi Indonesia	780.442.900	286.833.110
PT Pertamina (Persero)	725.832.000	556.978.000
Ditjen Perhubungan Laut	111.185.825	3.095.475
PT Jasa Raharja (Persero)	67.234.000	1.801.166.000
Yayasan Dana Pensiunan Pelni	-	2.477.445.687
Lainnya (dibawah Rp500 Juta)	1.903.231.710	3.067.435.017
Sub Jumlah	25.369.004.923	25.546.395.044
Pihak Ketiga:		
PT Araya Internusa	6.438.924.069	8.376.576.046
PT Cahaya Samoedra Bersaudara	5.957.527.235	-
Koperasi Bina Sejahtera	4.761.672.336	4.489.424.036
PT Mitra Sistematika Global	3.682.448.000	-
PT Telkom Enterprise	2.876.383.931	2.897.053.224
PT Insan Kencana Perdana	2.679.021.765	1.565.906.521
PT Eastern Citra Bamantara	2.336.971.358	2.980.122.321
PT Jasaraharja Putera	1.968.244.000	3.676.811.600
PT Pancuracahaya Wahyu	1.874.085.555	837.958.649
Saldo dipindahkan	32.575.278.249	24.823.852.397

18. ACCOUNTS PAYABLE

a. Details of the accounts payable by supplier, as follows:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Related Parties:		
PT Pelindo I, II, III dan IV	6.934.380.740	13.981.210.186
PT Asuransi Jiwasraya	6.212.488.067	-
PT PAL Indonesia	2.703.782.582	-
Port Authority	2.682.447.668	2.117.138.342
PT Sarana Gama Sejahtera	2.213.779.431	1.035.911.773
PT Sucofindo (Persero)	1.034.200.000	219.181.454
PT Biro Klasifikasi Indonesia	780.442.900	286.833.110
PT Pertamina (Persero)	725.832.000	556.978.000
Ditjen Perhubungan Laut	111.185.825	3.095.475
PT Jasa Raharja (Persero)	67.234.000	1.801.166.000
Pelni Pension Fund Foundation	-	2.477.445.687
Others (below Rp.500 Million)	1.903.231.710	3.067.435.017
Sub Total	25.369.004.923	25.546.395.044
Thrid Parties:		
PT Araya Internusa	6.438.924.069	8.376.576.046
PT Cahaya Samoedra Bersaudara	5.957.527.235	-
Koperasi Bina Sejahtera	4.761.672.336	4.489.424.036
PT Mitra Sistematika Global	3.682.448.000	-
PT Telkom Enterprise	2.876.383.931	2.897.053.224
PT Insan Kencana Perdana	2.679.021.765	1.565.906.521
PT Eastern Citra Bamantara	2.336.971.358	2.980.122.321
PT Jasaraharja Putera	1.968.244.000	3.676.811.600
PT Pancuracahaya Wahyu	1.874.085.555	837.958.649
Carried forward balance	32.575.278.249	24.823.852.397



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. UTANG USAHA (lanjutan)

a. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok, sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Pihak Ketiga: (lanjutan)		
Saldo pindahan	32.575.278.249	24.823.852.397
CV Makassar Teknik Abadi	1.749.295.328	1.349.489.400
PT Kimiko Kimberly Indonesia	1.706.412.614	671.624.612
PT Industri Kapal Indonesia	1.643.282.730	-
PT Bahtera Biru	1.524.823.487	541.099.876
PT Dalekesa Asri Cemerlang	1.486.571.516	7.472.723.772
PT Samudra Marine Indonesia	1.475.690.025	-
PT Harapan Abadi Niagatama	1.424.810.794	1.680.425.450
PT Santhi Dharma Artha	1.405.981.825	348.202.804
Karya Mandiri Makmur Sejati	1.398.587.100	3.069.938.323
MPC Munchmeyer Petersen Marine GmbH	1.332.103.500	-
PT Segara Permai	1.256.235.186	4.074.968.177
PT Peralube Nusajaya	1.177.377.816	1.210.207.412
PT Sumber Mas Intinusa	1.136.337.333	1.225.673.273
PT Sinar Kencana	1.109.116.540	2.115.748.538
PT Peruri Digital Security	1.100.094.252	1.018.111.751
PT Wartsila Indonesia	1.012.283.962	363.108.353
PT Inko Artha Samudra	980.122.200	467.602.400
PT Berdikari Alam Surya	975.839.785	950.264.685
PT Eastern Indotech Multitama	956.207.250	2.096.425.180
PT Astra Graphia	862.088.800	726.108.900
PT Central Marine Indonesia	749.908.668	602.684.533
PT Mitra Karya Utama	738.558.539	-
Toni Hendarto	681.600.000	-
Koperasi Karya Sejahtera	608.351.900	1.262.345.869
PPM Management	601.355.000	383.050.000
PT Metito Indonesia	535.990.000	589.904.200
PT Arcelindo Lestari	525.636.964	36.285.725
PT Solusi Integrasi Utama	517.072.788	517.072.788
PT Indotek Total Solusi	25.380.084	931.947.493
PT Pahala Artha Lestari	19.661.854	736.803.023
PT Kresna Adikarsa	3.248.500	840.189.500
PT Aerofood Indonesia	-	701.154.898
PT Panca Bina Persada	-	661.586.394
Lainnya (dibawah Rp.500 Juta)	14.715.472.772	11.722.715.798
Sub Jumlah	78.010.777.361	73.191.315.524
Jumlah	103.379.782.284	98.737.710.568
Entitas Anak:		
PT Sarana Bandar Nasional	4.264.639.648	2.910.200.035
PT Pelita Indonesia Djaya	16.740.246.014	12.993.328.835
PT Rumah Sakit Pelni	41.049.498.982	41.127.774.687
Sub Jumlah	62.054.384.644	57.031.303.557
Jumlah	165.434.166.928	155.769.014.125

18. ACCOUNTS PAYABLE (continued)

a. Details of the accounts payable by supplier, as follows: (continued)

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Thrid Parties: (continued)		
Brought forward balance		
CV Makassar Teknik Abadi		1.349.489.400
PT Kimiko Kimberly Indonesia		671.624.612
PT Industri Kapal Indonesia		-
PT Bahtera Biru		541.099.876
PT Dalekesa Asri Cemerlang		7.472.723.772
PT Samudra Marine Indonesia		-
PT Harapan Abadi Niagatama		1.680.425.450
PT Santhi Dharma Artha		348.202.804
Karya Mandiri Makmur Sejati		3.069.938.323
MPC Munchmeyer Petersen Marine GmbH		-
PT Segara Permai		4.074.968.177
PT Peralube Nusajaya		1.210.207.412
PT Sumber Mas Intinusa		1.225.673.273
PT Sinar Kencana		2.115.748.538
PT Peruri Digital Security		1.018.111.751
PT Wartsila Indonesia		363.108.353
PT Inko Artha Samudra		467.602.400
PT Berdikari Alam Surya		950.264.685
PT Eastern Indotech Multitama		2.096.425.180
PT Astra Graphia		726.108.900
PT Central Marine Indonesia		602.684.533
PT Mitra Karya Utama		-
Toni Hendarto		-
Koperasi Karya Sejahtera		1.262.345.869
PPM Management		383.050.000
PT Metito Indonesia		589.904.200
PT Arcelindo Lestari		36.285.725
PT Solusi Integrasi Utama		517.072.788
PT Indotek Total Solusi		931.947.493
PT Pahala Artha Lestari		736.803.023
PT Kresna Adikarsa		840.189.500
PT Aerofood Indonesia		701.154.898
PT Panca Bina Persada		661.586.394
Others (below Rp.500 Million)		11.722.715.798
Sub Total		73.191.315.524
Total		98.737.710.568
Subsidiary:		
PT Sarana Bandar Nasional		2.910.200.035
PT Pelita Indonesia Djaya		12.993.328.835
PT Rumah Sakit Pelni		41.127.774.687
Total		57.031.303.557
Total		155.769.014.125



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. UTANG USAHA (lanjutan)

b. Utang usaha berdasarkan jatuh temponya

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Belum jatuh tempo	1.633.828.849	1.362.851.678
1 sampai dengan 30 hari	79.671.973.157	39.490.100.174
31 sampai dengan 60 hari	26.529.787.957	22.270.918.945
61 sampai dengan 150 hari	19.655.520.558	26.590.613.567
Lebih dari 150 hari	37.943.056.407	66.054.529.762
Jumlah	<u>165.434.166.928</u>	<u>155.769.014.126</u>

18. ACCOUNTS PAYABLE (continued)

b. Accounts payable based on maturity

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
			<i>Not yet due</i>
			<i>1 to 30 days</i>
			<i>31 to 60 days</i>
			<i>61 to 150 days</i>
			<i>More than 150 days</i>
Jumlah	<u>165.434.166.928</u>	<u>155.769.014.126</u>	Total

19. BEBAN AKRUAL

Entitas Induk:
Usaha Perkapalan
Lainnya

Sub Jumlah

Entitas Anak:

PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya
PT Rumah Sakit Pelni

Sub Jumlah

Jumlah

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
	7.538.743.168	119.714.612.161
	11.271.107.962	3.233.754.129
Sub Jumlah	<u>18.809.851.130</u>	<u>122.948.366.290</u>
	12.870.887.929	16.424.506.405
	28.251.312.192	26.564.529.360
	3.967.071.035	5.485.799.983
Sub Jumlah	<u>45.089.271.156</u>	<u>48.474.835.748</u>
Jumlah	<u>63.899.122.286</u>	<u>171.423.202.038</u>

Parent entity:
*Shipping
Other*

Sub Total

Subsidiary:

*PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya
PT Rumah Sakit Pelni*

Sub Total

Total

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA DAN UANG MUKA DITERIMA

Uang Muka Diterima

Entitas Induk:

Uang Jaminan
Usaha Perkapalan
Usaha Keagenan
Usaha Sampingan
Lainnya

Sub Jumlah

Entitas Anak:

PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya
PT Rumah Sakit Pelni

Sub Jumlah

Jumlah Uang Muka Diterima

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
	13.288.467.378	13.079.348.838
	10.879.609.073	12.381.485.919
	7.392.717.017	7.808.664.426
	26.000.000	64.415.000
	1.612.702.814	1.585.139.219
Sub Jumlah	<u>33.199.496.282</u>	<u>34.919.053.402</u>
	9.959.717.156	1.931.875.689
	109.728.859	444.588.630
	244.818.228	-
Sub Jumlah	<u>10.314.264.243</u>	<u>2.376.464.319</u>
Jumlah Uang Muka Diterima	<u>43.513.760.525</u>	<u>37.295.517.721</u>

Advance Received

Parent entity:

*Deposits
Shipping
Agency
Side Business
Others*

Sub Total

Subsidiary:

*PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya
PT Rumah Sakit Pelni*

Sub Total

Total Advance Received



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA DAN UANG MUKA
DITERIMA (lanjutan)**

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Pendapatan Diterima Dimuka		
<u>Entitas Induk:</u>		
Tambang pasasi dan muatan	902.667.000	1.846.883.368
Sewa	821.112.806	1.356.191.307
Lainnya	1.556.979.713	2.181.486.252
Sub Jumlah	<u>3.280.759.519</u>	<u>5.384.560.927</u>
<u>Entitas Anak:</u>		
PT Sarana Bandar Nasional	2.115.531.216	3.797.070.245
PT Pelita Indonesia Djaya	1.007.370.940	933.243.615
PT Rumah Sakit Peln	1.465.807.487	2.143.770.929
Sub Jumlah	<u>4.588.709.643</u>	<u>6.874.084.789</u>
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	<u>7.869.469.162</u>	<u>12.258.645.716</u>
Jumlah	<u>51.383.229.687</u>	<u>49.554.163.437</u>

Uang jaminan diterima merupakan uang muka/deposit sebagai jaminan atas hubungan kerja sesuai kontrak/ketentuan, dan akan dikembalikan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan/ketentuan yang berlaku, meliputi uang deposit agen/biro perjalanan dan uang jaminan rekanan.

Uang muka diterima usaha perkapalan merupakan uang muka yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha perkapalan, meliputi tambang pasasi, tambang muatan, charter kapal, sewa ruang kapal, wisata bahari dan lainnya.

Pendapatan diterima di muka tambang pasasi dan muatan merupakan penerimaan hasil penjualan tiket penumpang dan muatan pada suatu jadwal keberangkatan kapal untuk beberapa tujuan pelabuhan singgah.

Pendapatan diterima di muka atas sewa merupakan pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa ruangan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Telkomsel, sewa ruangan di kapal, food court di Rumah Sakit Peln dari PT Sebastian Citra Indonesia.

**20. PREPAID REVENUES AND ADVANCE RECEIVED
(continued)**

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Prepaid Revenues		
<u>Parent entity:</u>		
Ticket and Freight	902.667.000	1.846.883.368
Rental	821.112.806	1.356.191.307
Others	1.556.979.713	2.181.486.252
Sub Total	<u>3.280.759.519</u>	<u>5.384.560.927</u>
<u>Subsidiary:</u>		
PT Sarana Bandar Nasional	2.115.531.216	3.797.070.245
PT Pelita Indonesia Djaya	1.007.370.940	933.243.615
PT Rumah Sakit Peln	1.465.807.487	2.143.770.929
Sub Total	<u>4.588.709.643</u>	<u>6.874.084.789</u>
Total Prepaid Revenues	<u>7.869.469.162</u>	<u>12.258.645.716</u>
Total	<u>51.383.229.687</u>	<u>49.554.163.437</u>

The deposit is received as deposit for security of the contractual / contractual relationship, and will be refunded at once or gradually in accordance with the applicable agreement, including the deposit of the agent / travel agency and the security deposit of the counterparty.

Advances received by the shipping business are advances received in connection with shipping business activities, including pasang mines, cargo mines, boat charter, space rental vessels, marine tourism and others.

Prepaid income of the pasasi mine and the cargo shall be the proceeds of the sale of passenger tickets and cargo on a scheduled departure of the vessel for some of the transit port purposes.

Revenue received in advance on the lease is rental income received in advance upon room lease from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Telkomsel, rental space on board, food court at Peln Hospital from PT Sebastian Citra Indonesia.

21. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Entitas Induk:		
<u>Pihak Berelasi</u>		
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	5.344.299.333	5.152.204.232
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	5.707.446.435	1.362.948.540
Otoritas Pelabuhan	2.222.079.723	1.656.255.360
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1.517.114.893	440.600.938
Saldo dipindahkan	<u>14.790.940.384</u>	<u>8.612.009.070</u>

21. OTHER SHORT TERM FINANCIAL LIABILITIES

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Parent Entity:		
<u>Related Parties</u>		
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	5.344.299.333	5.152.204.232
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	5.707.446.435	1.362.948.540
Port Authority	2.222.079.723	1.656.255.360
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1.517.114.893	440.600.938
Carried forward balance	<u>14.790.940.384</u>	<u>8.612.009.070</u>



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

21. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA (lanjutan) **21. OTHER SHORT TERM FINANCIAL LIABILITIES (continued)**

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
Entitas Induk:			Parent Entity:
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Saldo pindahan	14.790.940.384	8.612.009.070	Brought forward balance
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	1.510.567.225	1.510.567.225	Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
BPJS Ketenagakerjaan	864.607.560	864.607.560	BPJS Ketenagakerjaan
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	797.640.161	719.453.661	Pelni Pensioners Health Foundation
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	726.560.080	4.567.488.277	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Yayasan Dana Pensiunan Pelni	173.342.684	106.806.000	Pelni Pension Fund Foundation
Lainnya	1.549.646.827	285.219.077	Others
Sub Jumlah	20.413.304.921	16.666.150.870	Sub Total
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Related Parties</u>
PT. Citra Bayu Adhiguna	10.131.465.032	23.722.584.692	PT. Citra Bayu Adhiguna
PT. Asuransi Purna Artanugraha	2.759.443.788	3.074.622.861	PT. Asuransi Purna Artanugraha
PT. Sumber Subur Santosa	664.500.000	-	PT. Sumber Subur Santosa
PT. Saga Retailindo	590.060.216	-	PT. Saga Retailindo
PT. Radio Mustika Abadi	428.848.000	-	PT. Radio Mustika Abadi
PT. Delano Gemilang Abadi	370.816.153	-	PT. Delano Gemilang Abadi
Dream Tours & Travel	91.465.450	973.255.290	Dream Tours & Travel
Lainnya	4.758.431.554	3.930.264.434	Others
Sub Jumlah	19.795.030.193	31.700.727.277	Sub Total
Sub Jumlah Entitas Induk	40.208.335.115	48.366.878.147	Sub Total Parent Entity
Entitas Anak:			Subsidiaries:
PT Sarana Bandar Nasional	4.427.100.816	2.400.041.633	PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya	683.356.400	626.228.185	PT Pelita Indonesia Djaya
PT Rumah Sakit Pelni	992.451.529	964.391.016	PT Rumah Sakit Pelni
Sub Jumlah Entitas Anak	6.102.908.745	3.990.660.834	Sub Total Subsidiaries
Jumlah	46.311.243.860	52.357.538.981	Total

Utang kepada PT Citra Bayu Adhiguna merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) dalam pengembangan kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Dobonsolo dan Ciremai, sesuai dengan Surat Perjanjian No. TH.94/SS/VIII/2009 dan No. TH.07.1-3/SS/2013 tanggal 20 Agustus 2009 dan 27 Maret 2013 tentang usaha optimalisasi kapasitas ruang muat kapal penumpang.

Debt to PT Citra Bayu Adhiguna is a Joint Operation (KSO) in the development of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ship of Dobonsolo and Ciremai, pursuant to Letter of Agreement No. : TH.94 / SS / VIII / 2009 and No. TH.07.1 -3 / SS / 2013 dated 20 August 2009 and 27 March 2013 on efforts to optimize the capacity of passenger vessel loading.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
 Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
 As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG

22. LONG TERM DEBT NON BUSINESS

31 Desember/December 2018					
Nama Kreditur/ <i>Creditor</i>	Tingkat Bunga / <i>Interest Rate</i>	Jatuh Tempo Tahun / <i>Maturity Year</i>	Saldo 31 Des 2017 / <i>Balance Dec 31, 2018</i>	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / <i>Current Portion for Long Term Debt</i>	Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / <i>Long Term Portion Maturity</i>
KFW - Spare parts	1,25%	2025	23.386.735.918	3.480.658.331	19.906.077.587
KFW - KM Labobar	1,25%	2025	13.167.484.595	1.959.722.022	11.207.762.573
Jumlah			36.554.220.513	5.440.380.353	31.113.840.160
31 Desember/December 2017					
Nama Kreditur/ <i>Creditor</i>	Tingkat Bunga / <i>Interest Rate</i>	Jatuh Tempo Tahun / <i>Maturity Year</i>	Saldo 31 Des 2016 / <i>Balance Dec 31, 2017</i>	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang/ <i>Current Portion for Long Term Debt</i>	Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / <i>Long Term Portion Maturity</i>
KFW - Spare parts	1,25%	2025	27.592.316.854	3.480.658.332	24.111.658.522
KFW - KM Labobar	1,25%	2025	15.535.361.240	1.959.722.021	13.575.639.219
Jumlah			43.127.678.094	5.440.380.353	37.687.297.741

KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia: SLA-1144/DP3/2001 - Nilai Pinjaman DM 44.000.000

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar DM 44.000.000 sesuai dengan Loan Agreement 1999 66 383 tanggal 31 Juli 2000 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Entitas) melalui surat Menteri Keuangan No. S-047/MK.17/2001 tanggal 15 Januari 2001 sebagai *Project Executing Agency* dan *Sub Borrower* dalam rangka pengadaan Spareparts untuk kapal penumpang yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank DKI Jakarta sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga, dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

- Bagian A sebesar DM 28,600,000 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.
- Bagian B sebesar DM 15,400,000 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 9,54% per

KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia : SLA-1144/DP3/2001 - Value of Loan DM 44,000,000

Loans to the *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to DM 44 million according to the 1999 66 383 Loan Agreement dated July 31, 2000 which was forwarded to PT Indonesian National Shipping (Entity) through the Ministry of Finance letter No. S-047 / MK.17 / 2001 dated January 15, 2001 as *Project Executing Agency* and *Sub-borrower* in order to procure Spare parts for passenger ships as outlined in the Agreement SLA No.1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of Indonesia with PT National Shipping Indonesia (Persero) and PT Bank DKI Jakarta appoint as an intermediary in the payment of principal and interest costs, with details of the loan as follows:

- Part A of DM 28,600,000 as soft loans with an interest rate of 1.25% per year.
- Part B of DM 15,400,000 as a commercial loan with an interest rate of 9.54% per year.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (lanjutan)

KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia: SLA-1144/DP3/2001 - Nilai Pinjaman DM 44.000.000 (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan cut-off date pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar DM 28,468,125 atau setara dengan Euro 14.555.521 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2040 dan DM 15.328.990 atau setara dengan Euro 7.837.588 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA-488/SLA-1144/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015, diubah menjadi:

- a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR22,393,109.43 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - 1) pinjaman lunak sebesar EUR14,555,521.09.
 - 2) pinjaman komersil sebesar EUR7,837,588.34.
- b. Kewajiban non pokok senilai EUR2,457,823.45 dibayarkan selama 10 tahun dai tahun 2016 sampai dengan 2015 yang terdiri dari:
 - 1) pinjaman lunak sebesar EUR431,540.19.
 - 2) pinjaman komersil sebesar EUR2,026,283.26.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA-1144/DP3/2001) sebesar EUR2,457,823.45. (Lihat Catatan 25)

22. LONG TERM DEBT NON BUSINESS (continued)

KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia : SLA-1144/DP3/2001 - Value of Loan DM 44,000,000 (continued)

Based on the Minutes of Reconciliation in the Context menyelesaikan sourced from the State Receivables Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Indonesian National Shipping No. 33 / PB4.1 / PT Bank DKI / 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut-off date of March 31, 2007 with total liabilities of the National Sailing PT Indonesia (Persero) amounting to DM 28,468,125 or equivalent to Euro 14,555,521 to soft loans ended June 30, 2040 and DM 15.32899 million, equivalent to Euro 7,837,588 for commercial loans ended June 30, 2014.

Based on the Amendment Agreement (Agreement) on the Loan Settlement Agreement No. SLA-1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of the Republic of Indonesia and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number; AMA-488 / SLA-1144 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015, changed to:

- a. The principal liability of EUR 22,393,109.43 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law, which consists of:
 - 1) a soft loan of EUR 14,555,521.09.
 - 2) a commercial loan of EUR 7,837,588.34.
- b. Non principal liabilities of EUR 2,457,823.45 are payable for 10 years from 2016 to 2015 consisting of:
 - 1) a soft loan of EUR 431,540.19.
 - 2) a commercial loan of EUR 2,026,283.26.

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1144 / DP3 / 2001) of EUR2,457,823.45. (See Note 25)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (lanjutan)**KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik
Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro
16,361,340**

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar Euro 81,806,700 sesuai dengan Loan Agreement 2001 65 159 tanggal 1 Februari 2002 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Entitas) melalui surat Menteri Keuangan No. S-115/MK.17/2002 tanggal 22 April 2002 sebesar Euro 16,361,340 dalam rangka pengadaan Kapal Penumpang Nomor 23 Pelni yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga, dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

- Bagian A sebesar Euro 8,180,670 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.
- Bagian B sebesar Euro 8,180,670 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 6,39% per tahun.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 34/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan *cut-off date* pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Euro 7,469,800 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2042 dan Euro 7,460,000 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015, diubah menjadi:

- Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR14,929,800 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - pinjaman lunak sebesar EUR7,469,800.
 - pinjaman komersil sebesar EUR7,460,000.

22. LONG TERM DEBT NON BUSINESS (continued)**KFW Passenger ship - Government of Republic
Indonesia: SLA-1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro
16,361,340**

Loans to the *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to Euro 81,806,700 according to the 2001 65 159 Loan Agreement dated February 1, 2002 which was forwarded to PT Indonesian National Shipping (Entity) through the Ministry of Finance letter No. S-115 / MK.17 / 2002 April 22, 2002 amounted to Euro 16,361,340 in order to procure Passenger Vessel No. 23 Pelni as outlined in the Agreement SLA No.1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002 between the Government of Indonesia with PT Indonesian National Shipping (Persero) and appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) as an intermediary in the payment of principal and interest costs, with details of the loan as follows:

- Part A of Euro 8,180,670 as a soft loan with an interest rate of 1.25% per year.
- Section B of Euro 8,180,670 as a commercial loan with an interest rate of 6.39% per year.

Based on the Minutes of Settlement Reconciliation in the Context of State Receivables sourced from Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 34 / PB4.1 / PT Bank DKI / 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut-off date of March 31, 2007 with total liabilities of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amounting to Euro 7,469,800 for soft loans ended December 30, June 2042 and Euro 7,460,000 for commercial loans ended June 30, 2015.

Based on the Amendment Agreement (Agreement) on the Loan Settlement Agreement No. SLA-1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of the Republic of Indonesia and Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number; AMA-488 / SLA-1144 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015, changed to:

- The principal liability of EUR 14,929,800 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law, which consists of:
 - a soft loan of EUR 7,469,800.
 - a commercial loan of EUR 7,460,000.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (lanjutan)

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16,361,340 (lanjutan)

b. Kewajiban non pokok senilai EUR1,383,833.45 dibayarkan selama 10 tahun dai tahun 2016 sampai dengan 2015 yang terdiri dari:

- 1) pinjaman lunak sebesar EUR220,414.14.
- 2) pinjaman komersil sebesar EUR1,163,419.31.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA-1151/DP3/2002) sebesar EUR1,383,833,45. (Lihat Catatan 25)

22. LONG TERM DEBT NON BUSINESS (continued)

KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA-1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340 (continued)

b. Non principal liabilities of EUR 1,383,833.45 are payable for 10 years from 2016 to 2015 consisting of:

- 1) a soft loan of EUR 220,414.14.
- 2) a commercial loan of EUR 1,163,419.31.

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1151 / DP3 / 2002) of EUR 1,383,833.45. (See Note 25)

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG

23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS

31 Desember/December 2018

Nama Kreditur/ Creditur	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo Tahun / Maturity Year	Saldo 31 Des 2018/ Balance Dec 31, 2018	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / Current Portion for Long Term Debt	Bagian Jatuh Tempo lebih dari Setahun / Long Term Maturity
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	14,00%	2019	1.772.222.222	1.772.222.222	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	13,75%	2019	422.222.222	422.222.222	-
PT Bank Syariah Mandiri	9,00%	2021	4.854.881.616	1.541.930.965	3.312.950.652
PT Bank Syariah Mandiri	9,00%	2021	3.313.821.657	1.011.931.724	2.301.889.933
PT Bank Syariah Mandiri	9,00%	2021	1.732.348.408	490.316.261	1.242.032.147
PT Bank Syariah Mandiri	9,00%	2022	5.245.248.448	1.092.362.484	4.152.885.963
PT Bank Syariah Mandiri	9,00%	2028	45.263.540.000	12.000.000	45.251.540.000
PT Bank Syariah Mandiri	9,00%	2024	8.757.781.884	333.196.945	8.424.584.939
PT Bank Syariah Mandiri	9,00%	2019	38.845.500.330	38.845.500.330	-
Sewa Pembiayaan / Financial Lease			5.860.120.600	3.414.540.000	2.445.580.600
Jumlah/Total			116.067.687.387	48.936.223.153	67.131.464.234



PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018, dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut) (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018, and for the Year Then Ended (With Comparative As of December 31, 2017, and for the Year Then Ended) (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS (continued)

31 Desember/December 2017					
Nama Kreditur/ <i>Creditur</i>	Tingkat Bunga / <i>Interest Rate</i>	Jatuh Tempo Tahun / <i>Maturity Year</i>	Saldo 31 Des 2016 / <i>Balance Dec 31, 2017</i>	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / <i>Current Portion for Long Term Debt</i>	Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / <i>Long Term Maturity</i>
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2019	3.153.932.588	-	3.153.932.588
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2021	2.138.423.902	-	2.138.423.902
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2021	4.151.894.363	-	4.151.894.363
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2021	6.131.894.909	-	6.131.894.909
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2021	6.080.884.707	-	6.080.884.707
PT Bank Syariah Mandiri	0,28%	2018	8.432.349.330	8.432.349.330	-
PT Bank Syariah Mandiri	0,31%	2018	9.500.000.000	9.500.000.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	0,23%	2018	6.950.000.000	6.950.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	14,00%	2019	3.705.555.556	-	3.705.555.556
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	13,75%	2019	1.688.888.889	-	1.688.888.889
Sewa Pembiayaan / <i>Financial Lease</i>		2020	6.037.787.000	3.248.508.000	2.789.279.000
Jumlah/Total			57.971.611.243	28.130.857.330	29.840.753.913

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perjanjian kredit antara Entitas Anak PT Rumah Sakit PELNI dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit Nomor: MRC/06/0611/R

Perjanjian Kredit No. MRC/06/0611/R, tanggal 10 Nopember 2014 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 14 November 2014 sampai dengan 13 November 2019, maksimum Kredit yang diberikan sebesar Rp.8.700.000.000 atau setara dengan USD715.460,53, Kurs USD tertinggi = Rp 12.160. Bank memberikan fasilitas berupa kredit investasi dengan tujuan untuk keperluan pembelian alat kesehatan berupa 1 (satu) unit Brivo MR355 Inspire 1,5 T, dengan rincian sebagai berikut :

Taksasi	Rp 12.439.680.000	(100%)
Dana Sendiri	Rp 3.739.680.000	(30%)
Pembiayaan	Rp 8.700.000.000	(70%)

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

- 1) Alat kesehatan berupa 1 (satu) unit Brivo MR355 Inspire 1.5 T senilai Rp.12.439.680.000.
- 2) Persediaan berbagai macam obat-obatan senilai Rp.5.597.000.000 sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 07,tanggal. 03 Nopember 2011.

(Lihat Catatan 9 dan 15)

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Loans to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. a credit agreement between the Subsidiary PT Rumah Sakit Pelni with PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., the details are as follows:

a. Credit Contract Nomor: MRC/06/0611/R

Credit Agreement No. MRC / 06/0611 / R, dated November 10, 2014 with a period of 60 (sixty) months, starting from November 14, 2014 to November 13, 2019, the maximum amount of Credit extended is Rp.8.700.000.000 or equivalent to USD715,460.53 , The highest USD exchange rate = Rp.12.160. The bank provides facilities in the form of investment loans with the aim of purchasing medical devices in the form of 1 (one) unit of Brivo MR355 Inspire 1.5 T, with the following details:

Assessed	Rp 12.439.680.000	(100%)
Self Financing	Rp 3.739.680.000	(30%)
Financing	Rp 8.700.000.000	(70%)

Assets submitted as collateral in the form of:

- 1) Health equipment in the form of 1 (one) unit Brivo MR355 Inspire 1.5 T worth Rp.12.439.680.000.
- 2) Inventory of various kinds of medicines worth IDR.5.597.000.000 according to No. Fiduciary Guarantee Deed. 07, date. November 3, 2011.

(See Note 9 and 15)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (lanjutan)

b. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/063

Perjanjian dibuat tanggal 26 Mei 2014. Jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp5.700.000.000 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 26 Mei 2014 sampai dengan 25 Mei 2019.

Fasilitas kredit berupa kredit investasi dengan tujuan pembelian berbagai macam alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Taksasi	Rp 8.143.905.000	(100%)
Dana Sendiri	Rp 2.443.905.000	(30%)
Pembiayaan	<u>Rp 5.700.000.000</u>	(70%)

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

- 1) 1 (satu) unit optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785Essential C-ARM senilai Rp.8.143.905.000;
- 2) Persediaan berbagai macam obat-obatan senilai Rp.5.597.000.000.

(Lihat Catatan 9 dan 15)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

a. Perjanjian Kredit Nomor: 45.-LD1833428722.

Maksimum Kredit yang diberikan sebesar Rp.9.694.200.000 dana yang dicairkan sebesar Rp.8.757.781.884 dengan tujuan untuk keperluan investasi pembelian alat kesehatan diluar Merial Tower, dengan rincian sebagai berikut:

Operating Table + Acessories package	Rp 600.000.000
Complete Set Bubble CPAP + Air-02 Mixer, Combined With Optiflow and Compressor	Rp 208.000.000
USG (Probe convex + Endocavity) Merk : Mindray / China Type DCN-6	Rp 211.200.000
Laser Mata	Rp 338.250.000
USG (Probe convex + linier + sector + dycom) Merk : Ben-Q/ Taiwan Type UP 200	Rp 176.000.000
Endoscopy Evis Exera III Series 190	Rp 2.067.762.400
MSCT 32 SLICE / RESOLUTION ACT	Rp 2.431.680.000
Instrument Bedah Jantung	Rp 34.089.484
Dental Chair	Rp 95.600.000
Hearth Lung Machine	Rp 2.403.200.000
Heater Cooler Machine	Rp 212.000.000
Pembiayaan	<u>Rp 8.777.781.884</u>

**23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK
LOANS (continued)**

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (continued)

b. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/063

This contract created on May 26, 2014. The number of loans approved for Rp5.700.000.000 with a period of 60 (sixty) months, starting from May 26, 2014 until May 25, 2019.

Credit facility in the form of investment credit for the purpose of the purchase of medical equipment with details as follows:

Assessed	Rp 8.143.905.000	(100%)
Self Financing	Rp 2.443.905.000	(30%)
Financing	<u>Rp 5.700.000.000</u>	(70%)

Assets submitted as collateral in the form of:

- 1) 1 (one) CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785Essential C-ARM optima unit worth Rp.8.143.905.000;
- 2) Inventory of various kinds of medicines worth IDR.5.597.000.000.

(See Note 9 and 15)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

a. Aqgreement Number: 45.-LD1833428722

The maximum loan amounting to Rp.9,694,200,000 disbursed funds amounting to Rp.8,757,781,884 for the purpose of investing in the purchase of medical devices outside the Merial Tower, with details as follows:

Operating Table + Acessories package	Rp 600.000.000
Complete Set Bubble CPAP + Air-02 Mixer, Combined With Optiflow and Compressor	Rp 208.000.000
USG (Probe convex + Endocavity) Merk : Mindray / China Type DCN-6	Rp 211.200.000
Laser eye	Rp 338.250.000
USG (Probe convex + linier + sector + dycom) Merk : Ben-Q/ Taiwan Type UP 200	Rp 176.000.000
Endoscopy Evis Exera III Series 190	Rp 2.067.762.400
MSCT 32 SLICE / RESOLUTION ACT	Rp 2.431.680.000
Cardiac Surgery Instrument	Rp 34.089.484
Dental Chair	Rp 95.600.000
Hearth Lung Machine	Rp 2.403.200.000
Heater Cooler Machine	Rp 212.000.000
Financing	<u>Rp 8.777.781.884</u>



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (lanjutan)

a. Perjanjian Kredit Nomor: 45.- LD1833428722 (lanjutan)

Sifat kredit adalah kredit investasi Non-Revolving dengan schedule angsuran pokok sebagai berikut angsuran bulan ke-1 s/d ke-72 Rp 177.230.309. Kredit diberikan selama jangka waktu 72 bulan sejak pencairan kredit, termasuk grace period 6 (enam) bulan, dikenakan bunga sebesar 9% per tahun atau sesuai tarif suku bunga yang berlaku di BSM pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan selanjutnya akan direview setiap saat untuk di sesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BSM.

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

1) Agunan saat efektif fasilitas 1 :

Sesuai dengan eksisting (terlampir) diikuti dengan pelepasan agunan deposito bank senilai Rp 26.315.789.474.

2) Dengan tambahan agunan:

a) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT Rumah Sakit PELNI senilai Rp.53.000.000.000. (Lihat Catatan 7).

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi, seluas 60.601 M2 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 14/2004, tanggal 07 Mei 2004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tertanggal 19 Mei 2004 yang tercatat atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT Pelni (Persero). (Lihat Catatan 15)

3) Agunan setelah selesainya proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bagunan nomor 620/Slipi menjadi atas nama PT Rumah Sakit Pelni (fasilitas II sampai dengan fasilitas V dapat efektif): (Lihat Catatan 15)

a) 1 set alat Angiography/cathlab merek GE Healthcare tipe Innova IGS 520 Gen2 Tahun 2015.

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi, seluas 60.601 M2 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 14/2004, tanggal 07 Mei 2004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tertanggal 19 Mei 2004 yang tercatat atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT Pelni (Persero).

**23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK
LOANS (continued)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (continued)

a. Agreement Number: 45.-LD1833428722 (continued)

The nature of credit is Non-Revolving investment credit with a schedule of principal installments as follows: installments of the 1st month to 72nd month Rp. 177,230,309. Credit is given for a period of 72 months from credit disbursement, including a grace period of 6 (six) months, bears interest at 9% per year or according to the interest rate applicable at BSM at the time of signing the Credit Agreement and will be reviewed at any time to be adjusted with the interest rate applicable at BSM.

Assets submitted as collateral in the form of:

1) Collateral when effective facility 1:

In accordance with the existing (attached) followed by the release of collateral for bank deposits valued at Rp. 26,315,789,474.

2) With additional collateral:

a) Effective account receivables and potential trade receivables of PT Rumah Sakit Pelni worth Rp.53,000,000,000. (See Note 7)

b) The Land and Building of the Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Use and Building Number 620 / Slipi, covering an area of 60,601 M2, described in letter number 14/2004, dated May 7, 2004, issued by the Head of West Jakarta City Land Office dated May 19, 2004 the name of the Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia as PT Pelni (Persero). (See Note 15)

3) Collateral after the completion of the process of turning the name of the Certificate of Use for Bagunan 620 / Slipi becomes on behalf of PT Rumah Sakit Pelni (facility II to facility V can be effective): (See Note 15)

a) 1 set of GE Healthcare brand Angiography / cath tool type Innova IGS 520 Gen2 in 2015.

b) The Land and Building of the Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Use and Building Number 620 / Slipi, covering an area of 60,601 M2, described in letter number 14/2004, dated May 7, 2004, issued by the Head of West Jakarta City Land Office dated May 19, 2004 the name of the Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia as PT Pelni (Persero).



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (lanjutan)

a. Perjanjian Kredit Nomor: 45.- LD1833428722 (lanjutan)

- 3) Agunan setelah selesainya proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 620/Slipi menjadi atas nama PT Rumah Sakit Pelni (fasilitas II sampai dengan fasilitas V dapat efektif): (Lihat Catatan 7 dan 15) (lanjutan)
- c) Seluruh alat kesehatan yang akan dibeli dan dibiayai oleh bank.
- d) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT RS Pelni senilai Rp.53.000.000.000.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 620 telah beralih dari PT Pelni (Persero) kepada PT Rumah Sakit Pelni sebagaimana tercantum dalam Lembar Tambahan untuk Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.620, efektif tanggal 20 Agustus 2018.

b. Perjanjian Kredit No. 37.- LD1815170377

Perjanjian No. 37.- LD1815170377 perihal persetujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip *Musyarakah Muntanaqishah (Non-Revolving)* pada tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp.45.270.540.000 dan *margin* yang ditetapkan 9,00% per anum. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 120 bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan. Fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk Refinancing Bangunan dan sarana Pendukung *Eksisting* Rumah Sakit Pelni (selain Bangunan New Bougenville).

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

- 1) Agunan saat efektif fasilitas 1 :
Sesuai dengan *eksisting* (terlampir) diikuti dengan pelepasan agunan deposito bank senilai Rp.26.315.789.474.
- 2) Dengan tambahan agunan:
 - a) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT Rumah Sakit PELNI senilai Rp.53.000.000.000. (Lihat Catatan 7)
 - b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi, seluas 60.601 M2. (Lihat Catatan 15)

**23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK
LOANS (continued)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (continued)

a. Agreement Number: 45.-LD1833428722 (continued)

- 3) *Collateral after the completion of the process of turning the name of the Certificate of Use for Building 620 / Slipi becomes on behalf of PT Rumah Sakit Pelni (facility II to facility V can be effective): (See Note 7 and 15) (continued)*
- c) *All medical devices that will be purchased and financed by the bank.*
- d) *Effective trade receivables and trade receivables potential PT RS Pelni worth Rp.53.000.000.000.*

Building Rights Certificate No. 620 has switched from PT Pelni (Persero) to PT Rumah Sakit Pelni as stated in the Additional Sheet for Building Rights Certificate No.620, effective on August 20, 2018.

b. Agreement Number: 37.- LD1815170377

Agreement No. 37.- LD1815170377 concerning Financing approval based on the Musyarakah Muntanaqishah (Non-Revolving) principle on May 31, 2018, with the outstanding principal amounting to Rp.45.270.540.000 and the margin set at Rp.9.00% per annum. Payments are made in installments for 120 months, starting from the date of disbursement of funds. The financing facility will be used to refit buildings and existing supporting facilities for Rumah Sakit Pelni (other than the New Bougenville Building).

Assets submitted as collateral in the form of:

- 1) *Collateral when effective facility 1:*
In accordance with the existing (attached) followed by the release of collateral for bank deposits valued at Rp.26.315.789.474.
- 2) *With additional collateral:*
 - a) *Effective account receivables and potential trade receivables of PT Rumah Sakit Pelni worth Rp.53,000,000,000. (See Note 7)*
 - b) *The Land and Building of the Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Use and Building Number 620 / Slipi, covering an area of 60,601 M2. (See Note 15)*



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (lanjutan)

b. Perjanjian Kredit No.: 37.- LD1815170377 (lanjutan)

3) Agunan setelah selesainya proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 620/Slipi menjadi atas nama PT Rumah Sakit Pelni (fasilitas II sampai dengan fasilitas V dapat efektif): (Catatan 7 dan 15)

a) Satu set alat Angiography/cathlab merek GE Healthcare tipe Innova IGS 520 Gen2 Tahun

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi, seluas 60.601 M2.

c) Seluruh alat kesehatan yang akan dibeli dan dibiayai oleh bank.

d) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT RS Pelni senilai Rp.53.000.000.000.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 620 telah beralih dari PT Pelni (Persero) kepada PT Rumah Sakit Pelni sebagaimana tercantum dalam Lembar Tambahan untuk Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.620, efektif tanggal 20 Agustus 2018.

c. Perjanjian No. 02.- 7117838573

Berdasarkan Surat Nomor 02.- LD1527546276 Tanggal 7 Maret 2018 perihal persetujuan pembiayaan a.n PT Rumah Sakit PELNI. Perusahaan memperoleh jenis fasilitas pembiayaan Musyarakah (pembiayaan dana berputar), dengan *limit* pembiayaan sebesar Rp.53.000.000.000, pinjaman yang dapat dicairkan sebesar Rp.38.845.500.330. Proyeksi penjualan tahun 2018 sebesar Rp.565.535.230.323. Tujuan pembiayaan untuk modal kerja usaha rumah sakit, dengan jangka waktu penarikan 12 bulan.

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

1) Agunan saat efektif fasilitas 1 :

Sesuai dengan eksisting (terlampir) diikuti dengan pelepasan agunan deposito bank senilai Rp.26.315.789.474.

2) Dengan tambahan agunan:

a) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT Rumah Sakit PELNI senilai Rp.53.000.000.000. (Lihat Catatan 7)

**23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK
LOANS (continued)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (continued)

b. Agreement Number: 37.- LD1815170377 (continued)

3) Collateral after the completion of the process of turning the name of the Certificate of Use for Bagunan 620 / Slipi becomes on behalf of PT Rumah Sakit Pelni (facility II to facility V can be effective): (See Note 7 and 15)

a) 1 set of GE Healthcare brand Angiography / cath tool type Innova IGS 520 Gen2 in 2015.

b) The Land and Building of Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Use and Building Number 620 / Slipi, covering an area of 60,601 M2.

c) All medical devices that will be purchased and financed by the bank.

d) Effective trade receivables and trade receivables potential PT RS Pelni worth Rp.53.000.000.000.

Building Rights Certificate No. 620 has switched from PT Pelni (Persero) to PT Rumah Sakit Pelni as stated in the Additional Sheet for Building Rights Certificate No.620, effective on August 20, 2018.

c. Agreement Number: 02.- 7117838573

Based on Letter Number 02.- LD1527546276 dated March 7, 2018 concerning the financing agreement a.n PT Rumah Sakit PELNI. The company obtained a type of Musyarakah financing facility (revolving fund financing), with a financing limit of Rp.53.000.000.000, a loan that could be disbursed in the amount of Rp.38.845.500.330. The sales projection for 2018 is Rp.565.535.230.323. The financing objectives for working capital of a hospital business, with a withdrawal period of 12 months.

Assets submitted as collateral in the form of:

1) Collateral when effective facility 1:

In accordance with the existing (attached) followed by the release of collateral for bank deposits valued at Rp.26.315.789.474.

2) With additional collateral:

a) Effective account receivables and potential trade receivables of PT Rumah Sakit Pelni worth Rp.53,000,000,000. (See Note 7)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (lanjutan)

c. Perjanjian No. 02.- 7117838573 (lanjutan)

2) Dengan tambahan agunan: (lanjutan)

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi, seluas 60.601 M2. (Lihat Catatan 15)

3) Agunan setelah selesainya proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 620/Slipi menjadi atas nama PT Rumah Sakit Pelni (fasilitas II sampai dengan fasilitas V dapat efektif): (Lihat Catatan 7 dan 15)

a) Satu set alat Angiography/cathlab merek GE Healthcare tipe Innova IGS 520 Gen2 Tahun 2015.

b) Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Pelni dengan sertifikat Hak Guna dan Bangunan Nomor 620/Slipi, seluas 60.601 M2.

c) Seluruh alat kesehatan yang akan dibeli dan dibiayai oleh bank.

d) Piutang usaha efektif dan potensi piutang usaha PT RS pelni senilai Rp 53.000.000.000.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 620 telah beralih dari PT Pelni (Persero) kepada PT Rumah Sakit Pelni sebagaimana tercantum dalam Lembar Tambahan untuk Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.620, efektif tanggal 20 Agustus 2018.

d. Perjanjian No. 17/0114/0741/0058/VIII/MRBH

Berdasarkan Perjanjian No. 17/0114/0741/0058/VIII/MRBH perihal persetujuan Pembiayaan Al-Murabahah dengan fasilitas Wakalah (Swing Line Facility - Non Revolving) pada tanggal 01 juli 2015, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp.8.584.468.750 dan margin yang ditetapkan Rp.3.022.734.968. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 39 bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan.

Bank menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli obyek murabahah, yaitu berupa alat kesehatan cathlab/angiography GE healthcare tipe innova IGS 520 gen 2.

**23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK
LOANS (continued)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (continued)

c. Agreement Number: 02.- 7117838573 (continued)

2) With additional collateral: (continued)

b) The Land and Building of the Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Use and Building Number 620 / Slipi, covering an area of 60,601 M2. (See Note 15)

3) Collateral after the completion of the process of turning the name of the Certificate of Use for Bagunan 620 / Slipi becomes on behalf of PT Rumah Sakit Pelni (facility II to facility V can be effective): (See Note 7 and 15)

a) 1 set of GE Healthcare brand Angiography / cath tool type Innova IGS 520 Gen2 in 2015.

b) The Land and Building of Rumah Sakit Pelni with the Certificate of Use and Building Number 620 / Slipi, covering an area of 60,601 M2.

c) All medical devices that will be purchased and financed by the bank.

d) Effective trade receivables and trade receivables potential PT RS Pelni worth Rp.53.000.000.000.

Building Rights Certificate No. 620 has switched from PT Pelni (Persero) to PT Rumah Sakit Pelni as stated in the Additional Sheet for Building Rights Certificate No.620, effective on August 20, 2018.

d. Agreement No. 17/0114/0741/0058 / VIII / MRBH

Based on Agreement No. 17/0114/0741/0058 / VIII / MRBH regarding Al-Murabahah Financing approval with Wakalah facility (Swing Line Facility - Non Revolving) on July 1, 2015, with the principal amount owed Rp.8.584.468.750 and the margin set at Rp.3.022.734.968. Payments are made in installments for 39 months, starting from the date of disbursement of funds

The bank provides financing facilities to customers that will be used to buy murabahah objects, namely cathlab / angiography medical devices GE healthcare innova type IGS 520 gen 2.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
 Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
 As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (lanjutan)

d. Perjanjian No. 17/0114/0741/0058/VIII/MRBH (lanjutan)

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

- 1) Bangunan ruang rawat inap yang direnovasi.
- 2) 1 set alat Angiography/Cath Lab Angiography/Cath Lab merek GE Healthcare tipe Innova IGS 520 Gen2 atau spesifikasi lain dengan fungsi sama yang dibeli.
- 3) 1 set alat Ultrasonography (USG) merek Hitachi tipe Hi Vision Avius atau spesifikasi lain dengan fungsi sama yang dibeli.
- 4) 1 set alat Endoscopy merek Olympus atau spesifikasi lain dengan fungsi yang dibeli.
- 5) Kumpulan aset eksisting PT RS Pelni sejumlah 86 (delapan puluh enam) item sebagaimana tercantum dalam daftar pengikatan fidusia alat dan perlengkapan PT Rumah Sakit Pelni tertanggal 01 Juli 2015.

(Lihat Catatan 15)

e. Perjanjian No. 18/0201/0741/0058/VIII/MRBH

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.18/0201/0741/0058/VIII/MRBH, tanggal 03 Agustus 2016, An. PT Rumah Sakit Pelni tentang akad pembiayaan untuk renovasi dan pembangunan ruang rawat inap tahap IV berdasarkan prinsip murabahah. Bank dengan ini menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli obyek murabahah, dan nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut dari bank sejumlah Rp.11.108.062.958, sebagai harga jual yang berasal dari :

Harga beli	Rp 6.415.531.250
Margin	Rp 4.692.531.708
Harga jual	Rp 11.108.062.958

Jumlah Kewajiban Rp 11.108.062.958

Aset yang diserahkan sebagai agunan berupa :

- 1) Bangunan ruang rawat inap yang direnovasi.
- 2) 1 set alat Angiography/Cath Lab yang dibeli.

23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS (continued)

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (continued)

d. Agreement No . 17/0114/0741/0058/VIII/MRBH (continued)

Assets submitted as collateral in the form of:

- 1) Remodeled inpatient building.
- 2) 1 set of Angiography / Cath Lab Angiography / Cath Lab tools brand GE Healthcare type Innova IGS 520 Gen2 or other specifications with the same function purchased.
- 3) 1 set of Ultrasonography (USG) tools of Hitachi brand type Hi Vision Avius or other specifications with the same function purchased.
- 4) 1 set of Olympus Endoscopy tools or other specifications with functions purchased.
- 5) The collection of existing assets of PT RS Pelni is 86 (eighty six) items as listed in the fiduciary binding list of equipment and supplies of PT Rumah Sakit Pelni dated July 1, 2015.

(See Note 15)

e. Agreement No .18/0201/0741/0058/VIII/MRBH

Based on the Credit Agreement No.18 / 0201/0741/0058 / VIII / MRBH, August 3, 2016, An. PT Rumah Sakit Pelni regarding financing agreements for renovation and construction of stage IV inpatient rooms based on the murabahah principle. The Bank hereby provides financing facilities to customers that will be used to purchase murabahah objects, and customers hereby accept the provision of these financing facilities from the bank in the amount of Rp.11.108.062.958, as the selling price derived from:

Purchase price	Rp 6.415.531.250
Margin	Rp 4.692.531.708
Selling price	Rp 11.108.062.958

Total Liabilities Rp 11.108.062.958

Assets submitted as collateral in the form of:

- 1) Remodeled inpatient building.
- 2) 1 set of Angiography / Cath Lab tools purchased.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA
PANJANG (lanjutan)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (lanjutan)

e. Perjanjian No. 18/0201/0741/0058/VIII/MRBH (lanjutan)

3) Kumpulan aset *eksisting* PT RS Peln antara lain:

- a) Mobil Ambulance KIA K2700
- b) Mobil Avanza Veloz 1.5 M/T
- c) Genset *Type Perkins Prime Power* 500KVA
- d) *Diagnostic Ultrasound System Merk* Aloka
- e) Radiologi *Type Mars 40/CS/RAD*
- f) *Color Dopler Ultrasound System Merk* Aloka
- g) *Ventilator Neonate to Adult Type Respirationics*
- h) *Ventilator Pediatric to Adult Type C Merk* Hamilton
- i) Meja Operasi Merk Medifa
- j) Kumpulan perlengkapan/alat Rumah Sakit sejumlah 86 items yang diperoleh selama 28 Oktober 2013 s.d. 17 April 2015.
- k) 118 *set patient bed* dan perlengkapan penunjang lainnya.

(Lihat Catatan 15)

PT Tunas Finance Mandiri

Merupakan utang sewa pembiayaan antara entitas anak PT Pelita Indonesia Djaya dengan PT Tunas Finance Mandiri atas pengadaan 3 Unit Toyota Vios 1.5G A/T tahun 2015 jangka waktu 60 bulan, 12 Unit Toyota Inova G2.0M/T tahun 2015 jangka waktu 60 bulan, 16 unit Toyota Avanza Veloz 1.5M/T tahun 2015 jangka waktu 36 bulan, 2 Unit Toyota Avanza Grand New 1.3 G/MT, 15 Unit Toyota Avanza G M/T jangka waktu 36 bulan dan 2 Unit Toyota Vios G A/T 1.5 jangka waktu 36 bulan.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh aktuaris independen, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, berdasarkan laporannya masing-masing No. 496-A/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-B/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-C/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-D/PSAK/DAT/III/2018 dan No. 496-A/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-B/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-C/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-D/PSAK/DAT/III/2018.

**23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK
LOANS (continued)**

PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (continued)

e. Agreement No. 18/0201/0741/0058/VIII/MRBH (continued)

3) *The collection of existing assets of PT RS Peln includes:*

- a) KIA K2700 Ambulance
- b) Avanza Veloz 1.5 M / T
- c) Genset *Type Perkins Prime Power* 500KVA
- d) *Diagnostic Ultrasound System Merk* Aloka
- e) Radiologi *Type Mars 40/CS/RAD*
- f) *Color Dopler Ultrasound System Merk* Aloka
- g) *Ventilator Neonate to Adult Type Respirationics*
- h) *Ventilator Pediatric to Adult Type C Merk* Hamilton
- i) *Medifa Brand Operating Table*
- j) *A collection of equipment / hospital equipment for 86 items obtained during October 28, 2013.d. April 17, 2015.*
- k) *118 sets of patient beds and other supporting equipment.*

(See Note 15)

PT Tunas Finance Mandiri

Represents a debt financing lease between subsidiaries of PT Pelita Indonesia Djaya and PT Tunas Finance Mandiri on the procurement of 3 units of Toyota Vios 1.5GA / T in 2015 for 60 months, 12 units of Toyota Inova G2.0M / T 2015 period of 60 months, 16 units Toyota Avanza Veloz 1.5M / T 2015 36 months, 2 units Toyota Avanza Grand New 1.3 G / MT, 15 units Toyota Avanza GM / T 36 month period and 2 units Toyota Vios GA / T 1.5 period 36 months.

24. LIABILITIES OF LONG TERM EMPLOYEE BENEFITS

The Company provides long-term benefits to employees in accordance with the rewards based on Labor Law No. 13/2003. The benefits are not funded. The following table presents the components of benefits expense net recognized in the income statement consolidation and the amounts recognized in our consolidated balance sheet for the estimated liabilities for employee benefits are calculated by an independent actuary, for the period / year ended December 31, 2018 and 2017, based on the report No. 496-A/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-B/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-C/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-D/PSAK/DAT/III/2018 and No. 496-A/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-B/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-C/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-D/PSAK/DAT/III/2018.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Tingkat diskonto	8,10%	6,50%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	3%	3%
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun
Tingkat mortalita	Indonesia - III (2011)	Indonesia - III (2011)
Tingkat cacat tetap	0,02% per tahun	0,02% per tahun
	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) awal periode	27.105.991.652	(41.640.111.748)
Pembayaran imbalan pada tahun berjalan	(7.022.440.000)	(5.572.410.272)
Beban (pendapatan) imbalan pada Laba Rugi	(27.827.646.449)	(26.629.014.035)
Pendapatan (Beban) pada Penghasilan Komprehensif lain	(109.634.269.110)	(149.105.829.415)
luran Pemberi kerja	(43.049.240.364)	(3.118.072.569)
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) akhir periode	114.496.226.847	125.404.248.861
Entitas Anak	11.257.365.536	9.338.232.142
Jumlah	125.753.592.383	134.742.481.003

24. LIABILITIES OF LONG TERM EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The actuarial calculation uses the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

Discount Rate
The Projected rate of salary Increase

Mortality Rate
Permanent disability rate

Reserves (Prepaid Expenses) at beginning of period
Benefit payments in the current year (Benefit) Expenses on the Profit and Loss Benefits (Expenses) on other Comprehensive Income Employer Contributions Reserves (Prepaid Expenses) at end of period Subsidiaries

Total

Rincian beban yang diakui di laporan laba rugi:

Details of the expense recognized in the income statement

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Biaya Jasa Kini	10.063.351.596	9.014.781.702
Biaya Bunga	29.713.171.866	32.291.789.807
Pendapatan Bunga atas Aset	(21.561.895.680)	(23.846.579.235)
Jumlah	18.214.627.782	17.459.992.274

Current service cost
Interest Cost
Interest Income on Assets

Total

25. MODAL SAHAM

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut:

25. CAPITAL STOCK

Authorized Capital, issued and fully paid respectively on December 31, 2018 and 2017, are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Lembar Saham/ Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Nominal Value per Share	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah nilai saham/ Total value of shares
Negara Republik Indonesia/ Republic of Indonesia	7.065.092	1.000.000	100%	7.065.092.000.000
Jumlah	7.065.092	1.000.000	100%	7.065.092.000.000



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 1 Februari 2016, Notaris Ida Adiningsih, S.H., tentang Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia. 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp7.065.092.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:

- a. sebesar Rp6.565.092.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta No. 1, tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-02312.AH.01.02.TH 2013, tanggal 23 Januari 2013.
- b. sebesar Rp500.000.000.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2015.

25. CAPITAL STOCK (continued)

The paid-up capital stock to the Company represents 100% Government investment in accordance with Deed No. 1 dated February 1, 2016, Notary Ida Adiningsih, S.H., concerning Approval of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of Persero Limited of PT Pelayaran Nasional Indonesia. 100% of the total nominal value of each share placed or fully amounting to Rp7,065,092,000,000 has been fully paid by the Republic of Indonesia (Shareholder) in the following manner:

- a. amounting to Rp6.565.092.000.000 representing an initial capital contribution in accordance with Deed No. 1 dated January 16, 2013, drawn up before Notary Nanda Fauz Iwan, SH., Which has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-02312.AH.01.02.TH 2013, January 23, 2013.
- b. of Rp500,000,000,000 derived from the State Budget of 2015 as stipulated in Government Regulation no. 111 Year 2015.

26. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Landasan Hukum/ Legal Foundation	Penyertaan Modal Pemerintah / Government Capital
PP. RI No. 40 Tahun 1992	309.143.585.642
PP. RI No. 87 Tahun 2016	564.807.589.000
Jumlah / Total	873.951.174.642

Pada tahun 2016 terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Non Tunai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan nilai sebesar Rp564.807.589.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi Utang Soft Loan Agreement (SLA) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002.

26. GOVERNMENT CAPITAL

Pengalihan/ Redirect	Jumlah / Total
309.000.000.000	143.585.642
-	564.807.589.000
309.000.000.000	564.951.174.642

In 2016 there is the addition of the Government of Non-Cash by the Indonesian Government Regulation No. 87 Year 2016 About the Addition of Investment of the Republic of Indonesia in Capital Shares Owned Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia with a value of Rp564.807.589.000, sourced from budget of the State 2016 through the conversion of debt Soft Loan Agreement (SLA) Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia to the Republic of Indonesia under the Agreement Subsidiary Loan No. 1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 and No. 1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. CADANGAN

Merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari laba setelah pajak yang belum ditentukan peruntukannya sebesar Rp164.190.404.981 dan Rp66.533.679.319 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Merupakan bagian dari sumber daya yang teridentifikasi dan dibentuk dari jumlah tertentu atau sebagian dari laba bersih setiap tahun buku, sesuai Undang-undang No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 70 (1).

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Saldo awal	412.593.309.420	164.190.404.981
Penggunaan Laba tahun lalu	276.419.034.328	248.402.904.439
Saldo akhir	<u>689.012.343.748</u>	<u>412.593.309.420</u>

(Lihat Catatan 28)

27. RESERVE

A reserve established by the General Meeting of Shareholders of the profit after tax has not been determined allotment of Rp164.190.404.981 and Rp66.533.679.319 on December 31, 2018 and 2017.

Is a part of the identified resource and is formed from a certain or partial amount of net profit per year of the book, pursuant to Law No.40 of 2007, regarding Limited Liability Company, Article 70 (1).

Beginning balance
 Distribution of Profit Previous Year
 Ending balance

(See Note 28)

28. SALDO RUGI/DEFISIT

Merupakan akumulasi laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan pembentukan cadangan dan/atau pembagian dividen dan/atau alokasi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Saldo awal	(2.250.844.492.726)	(2.278.860.622.615)
Distribusi Saldo Laba Tahun Lalu:		
Cadangan	(276.419.034.328)	(248.402.904.439)
Laba Tahun Berjalan	203.631.186.048	276.419.034.328
Saldo akhir	<u>(2.323.632.341.006)</u>	<u>(2.250.844.492.726)</u>

Penggunaan laba tahun buku 2017 dan 2016 masing-masing sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 11 tanggal 16 Mei 2018, dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., dan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 5 tanggal 16 Mei 2017, dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH.

(Lihat Catatan 27)

28. RETAINED EARNING/DEFICITS

This represents the accumulated profit of the current year after deducting the formation of reserves and / or dividend distribution and / or allocation of Partnership and Community Development Program.

Beginning balance
 Distribution of Retained Earnings:
 Reserve
 Profit of Current Year
 Ending balance

The use of profit for the fiscal year 2017 and 2016 is in accordance with the Minutes of Meeting of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, no. 11 dated May 16, 2018, before Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., and the Minutes of Meeting of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, no. 5 dated May 16, 2017, before Notary Ida Adiningsih, SH.

(See Note 27)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

29. OTHER COMPONENT EQUITY

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Saldo awal	(89.998.650.964)	(52.980.133.139)	<i>Beginning balance</i>
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Tahun Berjalan	(14.757.090.253)	(37.429.500.261)	<i>Current Actuarial Profit (Loss)</i>
Penyesuaian	-	410.982.436	<i>Adjustment</i>
Saldo akhir	(104.755.741.217)	(89.998.650.964)	Ending balance

30. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

30. NON-CONTROLLING INTERESTS

31 Desember/December 2018					
Pemegang Saham/ Shareholders	% Penyertaan / Participation	Bagian dari pemilik saham kepentingan non- pengendali (awal) / Part of the owners of shares of non- controlling interests (initial)	Dividen/ Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) Current Year	Bagian dari pemilik saham kepentingan non- pengendali akhir / Part of shareholders of non-controlling interests of the end
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / <i>Pensioners Health Foundation Pelni</i>	0,53% in SBN	80.000.000	1.205.879.964	267.302.612	1.553.182.576
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / <i>Pensioners Health Foundation Pelni</i>	0,50% in PIDC	10.050.000	382.358.370	201.588.898	593.997.268
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / <i>Pensioners Health Foundation Pelni</i>	0,02% in RS PELNI	25.000.000	18.356.076	9.346.142	52.702.218
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / <i>Pensioners Health Foundation Pelni</i>	2,00 % in PBN	5.000.000	88.800.346	11.126.888	104.927.234
Koperasi Sabanas/ <i>Cooperative Sabanas</i>	1,01 % in SBL	3.800.000	23.043.271	53.148.341	79.991.612
Jumlah/Total		123.850.000	1.718.438.027	542.512.881	2.384.800.908



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (lanjutan)

30. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

31 Desember/December 2017					
Pemegang Saham/ Shareholders	% Penyertaan / Participation	Bagian dari pemilik saham kepentingan non- pengendali (awal) / Part of the owners of shares of non- controlling interests (initial)	Dividen/ Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) Current Year	Bagian dari pemilik saham kepentingan non- pengendali akhir / Part of shareholders of non-controlling interests of the end
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,53% di SBN	80.000.000	964.714.590	242.567.634	1.287.282.224
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,50% di PIDC	10.050.000	214.407.311	168.795.034	393.252.345
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,04% di RS PELNI	23.792.000	14.588.502	14.810.003	53.190.505
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	2,00 % di PBN	5.000.000	74.610.067	14.190.279	93.800.346
Koperasi Sabanas/ Cooperative Sabanas	1,01 % di SBL	3.800.000	1.170.925	22.096.255	27.067.180
Jumlah/Total		122.642.000	1.269.491.395	462.459.205	1.854.592.600

31. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha merupakan penjualan jasa pelayaran dan jasa lainnya, terdiri dari:

31. OPERATING REVENUES

Operating revenues represent the sale of shipping services and other services, consisting of:

	2018	2017	
Pendapatan Usaha, Bruto:			Gross Operating Revenue:
Penugasan Pemerintah	2.403.998.420.099	2.461.769.659.728	Government Assignments
Tambang Pasasi	950.638.152.538	889.394.643.194	Ticketing
Usaha Pelayanan Kesehatan	439.088.892.384	441.408.835.268	Health Service Business
Tambang Muatan	330.608.794.184	320.478.606.780	Cargo
Usaha Perkapalan Lainnya	48.401.983.144	35.136.941.899	Other Shipping Business
Usaha Perbengkelan	18.099.289.077	16.956.444.537	Workshop Business
Usaha Perhotelan	5.572.693.541	5.090.408.351	Hospitality Business
Usaha Keagenan	3.661.157.279	4.633.224.984	Agency Business
Usaha Wisata Bahari	1.277.049.050	67.005.500	Marine Tourism Business
Usaha Penunjang Lainnya	407.888.778.826	240.755.825.933	Other Supporting Enterprises
Sub Jumlah Dipindahkan	4.609.235.210.122	4.415.691.596.174	Carried Forward Sub Total



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

	2018	2017
Sub Jumlah Pindahan	4.609.235.210.122	4.415.691.596.174
Dikurangi:		
Reduksi Tambang pasasi	15.885.383.696	(20.832.628.562)
Reduksi Tambang Muatan	36.747.600	-
Reduksi Perhotelan	-	(14.275.452)
Sub Jumlah	15.922.131.296	(20.846.904.014)
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih	4.593.313.078.826	4.394.844.692.160

Pendapatan Penugasan Pemerintah merupakan kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation - PSO*), meliputi:

- Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
- Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak;
- Angkutan Barang di Laut (Tol Laut);
- Kapal Perintis Milik Negara; dan
- Kapal Rede.

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi:

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 Nomor: HK.107/1/8/DJPL-18 dan Nomor: TH.2.26-01/SS/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan Nomor: HK.107/4/19/DJPL-16 dan Nomor: TH.1230-01/SS/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk Tahun Anggaran 2017.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.867.769.738.000 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA 999.07.1.98120/2018 tanggal 29 Desember 2017 dan untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.060.567.229.000 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA999.07.1.985120/2017 tanggal 30 Desember 2016.

31. OPERATING REVENUES (continued)

	2018	2017	
Sub Jumlah Pindahan	4.609.235.210.122	4.415.691.596.174	Brought Forward Sub Total
Dikurangi:			Less:
Reduksi Tambang pasasi	15.885.383.696	(20.832.628.562)	<i>Ticketing Reduction</i>
Reduksi Tambang Muatan	36.747.600	-	<i>Hospitality Reduction</i>
Reduksi Perhotelan	-	(14.275.452)	<i>Hospitality Reduction</i>
Sub Jumlah	15.922.131.296	(20.846.904.014)	Sub Total
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih	4.593.313.078.826	4.394.844.692.160	Total Revenue, Net

Government Assignment Revenue is compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) assignments, including:

- Sea Freight for Economy Class Passengers;
- Activities of Operation of Livestock Ships;
- Freight in the Sea (Sea Toll);
- State-owned Pioneer ships; and
- Rede Ships.

a. Sea Freight for Economy Class Passengers:

The revenue assignment for carrying out the obligations of public services for sea transportation for economy class passengers is based on the Agreement on the Implementation of Obligatory Services for Sea Transport for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2018 Number: HK.107 / 1/8 / DJPL-18 and Number: TH.2.26-01 / SS / 2018 dated 26 February 2018 and Number: HK.107 / 4/19 / DJPL-16 and Number: TH.1230-01 / SS / 2016 dated 30 December 2016 for the Fiscal Year 2017.

The value of the agreement on the implementation of public service obligations in the field of sea transportation for economy class passengers sourced from the state budget for 2018 in the amount of Rp. 1,867,769,738,000 based on the Budget Implementation List (DIPA) of the State General Treasurer Budget Implementation Registration Number 2018 Number: SP DIPA 999.07.1.98120/2018 on December 29, 2017 and for the 2017 fiscal year amounting to Rp2,060,567,229,000 in accordance with the Budget Implementation List (DIPA) Number DIPA999.07.1.985120 / 2017 dated December 30, 2016.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)**a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi:
(lanjutan)**

Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal yang melaksanakan kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagai berikut:

No.	Nama Kapal/ Name of Ship	Jumlah Trip/ Total Voyage		Jumlah Kompensasi/ Total Compensation (Rp)	
		2018	2017	2018	2017
1.	KM. Umsini	23	24	97.612.565.407	92.966.182.669
2.	KM Tidar	23	22	82.428.435.470	92.954.811.633
3.	KM Bukit Siguntang	23	23	94.168.842.821	96.455.862.003
4.	KM Lambelu	23	24	93.488.486.762	121.610.479.718
5.	KM Sinabung	23	19	97.796.584.928	109.867.010.010
6.	KM Kelud	46	45	74.042.057.341	100.174.933.294
7.	KM Dorolonda	23	24	129.714.615.266	141.031.282.447
8.	KM Nggapulu	23	24	125.228.276.390	143.411.042.274
9.	KM Labobar	23	21	127.406.426.583	134.185.369.516
10.	KM Kelimutu	23	24	34.324.483.209	50.949.621.314
11.	KM Lawit	23	21	48.571.149.113	59.099.461.693
12.	KM Tatamailau	23	22	46.369.113.186	51.174.523.400
13.	KM Sirimau	12	12	43.676.802.572	49.415.921.287
14.	KM Awu	23	24	41.863.065.176	57.018.598.159
15.	KM Leuser	12	12	48.536.893.277	50.097.699.662
16.	KM Binaiya	23	24	46.647.417.024	53.144.191.713
17.	KM Bukit Raya	23	24	52.861.247.863	63.400.637.907
18.	KM Tilongkabila	23	24	40.979.556.365	49.433.871.387
19.	KM Pangrango	23	24	32.380.685.727	33.462.158.128
20.	KM Sangiang	23	24	40.267.236.711	38.973.173.870
21.	KM Wilis	23	22	31.498.084.369	35.000.885.883
22.	KM Gunung Dempo	23	23	112.946.638.934	100.094.467.919
23.	KM Ciremai	23	24	83.579.071.148	102.884.476.922
24.	KM Dobonsolo	23	23	79.788.192.172	88.520.884.451
25.	KM Egon	23	43	54.474.888.507	69.934.048.111
26.	KM Jet Liner	46	38	107.118.921.681	75.305.633.628
Jumlah		622	634	1.867.769.738.002	2.060.567.228.998
Jumlah Pembulatan				1.867.769.738.000	2.060.567.229.000

b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak:

Pendapatan penugasan penyelenggaraan subsidi pengoperasian kapal ternak didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Tahun Anggaran 2018 Nomor: 01/Satkerlala/RT.1-2/IV/2018 dan Nomor: TH.04.12-02/SS/2018 tanggal 12 April 2018, dan Nomor: 01/Satkerlala/RT-1/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk Tahun Anggaran 2017.

31. OPERATING REVENUES (continued)**a. Sea Freight for Economy Class Passengers:
(continued)**

The number of trips and compensation per unit of ship carrying out the Sea Transport Sector Public Service Obligations for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2018 and 2017 are as follows:

b. Activities of Operation of Livestock Ships:

Revenue assignment for the operation of livestock vessel subsidy is based on the Agreement on the Implementation of Livestock Ship Subsidy Activities for Fiscal Year 2018 Number: 01 / Satkerlala / RT.1-2 / IV / 2018 and Number: TH.04.12-02 / SS / 2018 dated 12 April 2018, and Number: 01 / Satkerlala / RT-1 / III / 2017 dated March 13, 2017 for the Fiscal Year 2017.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak; (lanjutan)

Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak berdasarkan jaringan trayek tetap dan teratur (liner) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/2/7/DJPL-2018 tanggal 29 Januari 2018 dan lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) round voyage sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal (*home base*) sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal, setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1, tanpa menggunakan kapal pengganti, kode Trayek: RT-1, yaitu Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang, dan KM. Camara Nusantara 3, tanpa menggunakan kapal pengganti, kode Trayek: RT-2, yaitu Kupang - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang - Cirebon - Bengkulu - Cirebon - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 selama 365 hari sejak NOR (Notice of Readiness) terhitung paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, sedangkan untuk KM. Camara Nusantara 3 selama 243 hari sejak NOR (Notice of Readiness) mulai tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2018 sebesar Rp.16.008.262.000, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2018 tanggal 5 Desember 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, dan untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp.14.775.156.344, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Tarif penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak.

31. OPERATING REVENUES (continued)

**b. Activities of Operation of Livestock Ships;
(continued)**

The work of organizing subsidy activities for the operation of livestock vessels is based on a fixed and regular route network according to the Decree of the Director General of Sea Transportation Number AL.108 / 2/7 / DJPL-2018 dated 29 January 2018 and the length of ship shipping takes a maximum of one round voyage in accordance with the route stipulated in the Decree of the Director General of Sea Transportation, starting from the time the ship arrives at the base port (home base) until the ship arrives back at the base port, after sailing according to the specified port order.

The vessel used in the operation of the subsidy operation for cattle vessels is KM. Camara Nusantara 1, without using replacement vessels, Route code: RT-1, namely Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang, and KM. Camara Nusantara 3, without using a replacement vessel, Route code: RT-2, namely Kupang - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang - Cirebon - Bengkulu - Cirebon - Kupang. Time for carrying out KM activities. Camara Nusantara 1 for 365 days from NOR (Notice of Readiness) from no later than January 1, 2018 to December 31, 2018, while for KM. Camara Nusantara 3 for 243 days from the NOR (Notice of Readiness) starting on May 2, 2018 until December 31, 2018.

The value of the implementation agreement for subsidizing the operation of Livestock Vessels in the 2018 budget year is Rp.16.008.262.000, charged to the Budget Implementation Entry (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2018 dated December 5, 2017 State Budget (APBN) Year Budget 2018, and for 2017 fiscal year in the amount of Rp.14.775.156.344, charged to the Budget Implementation Registration Number (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2017 dated 7 December 2016.

Rates implementation of the activities of livestock vessels operating subsidy of fiscal year 2018 based on Regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia Number 30 Year 2018 concerning PM third amendment to the Regulation of the Minister of Communications of the Republic of Indonesia Number PM 182 2015 on Freight rates for Ships Operating Subsidies Livestock Event.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

c. Angkutan Barang di Laut (Tol Laut):

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2018 Nomor: 01/Kontrak-TL/PELNI/PPK/V/Ditlala-2018 dan Nomor: TH.5.31-02/SS/2018 tanggal 31 Mei 2018, dan Nomor: 01/Kontrak-TL/PELNI/PPK/I/Ditlala-2017 tanggal 19 Januari 2017 untuk Tahun Anggaran 2017.

Penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut Tahun Anggaran 2018 ke seluruh pelosok tanah air dengan jaringan trayek tetap dan teratur (liner) berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/17/DJPL-17 tanggal 20 Desember 2017, menggunakan 6 (enam) kapal utama, 1 (satu) kapal penghubung dan 1 (satu) kapal pengganti, maksimal 120 voyage/frekwensi. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/1/9/DJPL-17 tanggal 16 Januari 2017 tentang perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/1/1/DJPL-16, menggunakan 6 (enam) unit kapal.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut tahun anggaran 2018 sebesar Rp.207.292.435.000, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2018 tanggal 5 Desember 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, dan untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp.226.432.143.000, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal dan kode trayek yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagai berikut:

No.	Nama Kapal/ Name of Ship	Kode Trayek/ Route Code		Jumlah Trip/ Total Voyage		Jumlah Kompensasi/ Total Compensation(Rp)	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
1.	KM. Logistik Nusantara I	T-4		18		44.294.946.000	-
2.	KM. Kendhaga Nusantara 1	T-4		18		19.082.803.000	-
3.	KM. Caraka Jaya Niaga III-22	T-6	T-3	19	12	28.760.532.000	33.775.203.765
4.	KM. Caraka Jaya Niaga III-32	T-6	T-5	19	12	28.760.532.000	32.386.616.519
5.	KM. Caraka Jaya Niaga III-4	T-2	T-6	19	24	26.935.307.000	38.334.329.119

31. OPERATING REVENUES (continued)

c. Freight in the Sea (Sea Toll):

Revenue assignment for the implementation of public service obligations for sea freight transportation is based on the Public Service Obligation Agreement for the Transport of Goods in the Sea Fiscal Year 2018 Number: 01 / Contract-TL / PELNI / PPK / V / Ditlala-2018 and Number: TH. 02 / SS / 2018 dated May 31, 2018, and Number: 01 / Contract-TL / PELNI / PPK / I / Ditlala-2017 dated January 19, 2017 for the Fiscal Year 2017.

Implementation of public services for the transportation of goods at sea Fiscal Year 2018 to all corners of the country with a fixed and regular route network (liner) based on the Decree of the Director General of Sea Transportation Number AL.108/5/17/DJPL-17 dated December 20, 2017, using 6 (six) main vessels, 1 (one) connecting ship and 1 (one) replacement ship, maximum 120 voyage / frequency. Whereas for the 2017 Fiscal Year based on the Director General of Sea Transportation Decree Number AL.108 / 1/9 / DJPL-17 dated January 16, 2017 concerning the second amendment to the Decree of the Director General of Sea Transportation Number AL.108 / 1/1 / DJPL-16, using 6 (six) units of the ship.

The value of the agreement for carrying out public service obligations for goods transported at sea in the fiscal year 2018 is Rp.207.292.435.000, charged to the Budget Implementation Registration Number (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2018 dated December 5, 2017 State Budget (APBN)) Fiscal Year 2018, and for the 2017 fiscal year amounting to Rp.226.432.143.000, charged to the Budget Implementation Entry (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2017 dated 7 December 2016.

The number of trips and compensation per unit of ship and route code that carry out the Public Service Transport Obligations in the Sea in the Fiscal Year 2018 and 2017 are as follows:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

31. OPERATING REVENUES (continued)

c. Angkutan Barang di Laut (Tol Laut); (lanjutan)

c. Freight in the Sea (Sea Toll); (continued)

No.	Nama Kapal/ Name of Ship	Kode Trayek/ Route Code		Jumlah Trip/ Total Voyage		Jumlah Kompensasi/ Total Compensation(Rp)	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
6.	KM. Logistik Nusantara III	T-13		22		29.415.762.000	-
7.	KM. Logistik Nusantara IV	T-14		16		27.489.723.000	-
8.	KM. Logistik Nusantara II	T-15		20		31.313.362.000	-
9.	KM. Mentari Perdana		T-11		12	-	40.837.251.397
10.	KM. Meratus Ultima I		T-12		12	-	40.837.251.397
11.	KM. Freedom		T-13		12	-	40.261.490.803
Jumlah/Total						207.292.435.000	226.432.143.000

d. Kapal Perintis Milik Negara

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2018 Nomor: 01/Satkerlala/Altis/III/2018 dan Nomor: TH.3.22-01/SS/2018 tanggal 22 Maret 2018, dan Nomor: 01/Satkerlala/Altis/II/2017 dan Nomor: TH.1.19-02/SS/2017 tanggal 19 Januari 2017 untuk Tahun Anggaran 2017.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara tahun anggaran 2018 sebesar Rp.309.418.630.360 termasuk PPN 100%, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2018 tanggal 5 Desember 2017, dan untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp.512.011.857.595, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2017 tanggal 7 Desember 2016.

e. Kapal Rede.

Pendapatan Kapal Rede didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2018 Nomor: 01/Satkerlala/Rede/II/2018 dan Nomor: TH.11.27-01/SS/2018 tanggal 27 Nopember 2018.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) tahun anggaran 2018 sebesar Rp.6.899.848.177 termasuk PPN 100%, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2018 tanggal 5 Desember 2017.

d. State-owned Pioneer ships; and

Revenue assignment for the implementation of state-owned pioneer ship public service activities is based on the Agreement on the Implementation of State-Owned Pioneering Ship Public Service Activities Fiscal Year 2018 Number: 01 / Satkerlala / Altis / III / 2018 and Number: TH.3.22-01 / SS / 2018 March 22 2018, and Number: 01 / Satkerlala / Altis / II / 2017 and Number: TH.1.19-02 / SS / 2017 dated January 19, 2017 for the Fiscal Year 2017.

The agreement value for the implementation of state-owned pioneer ship public service activities in the fiscal year 2018 is Rp. 309,418,630,360 including 100% VAT, charged to the Budget Implementation Entry (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2018 dated December 5, 2017, and for 2017 budget year amounting to Rp.512,011,857,595, charged to the Budget Implementation List (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2017 dated 7 December 2016.

e. Rede Ships.

Rede Ships revenue is based on the Treaty Ports Water Transport Organization by Using State-Owned Ship (Ship Rede) Fiscal Year 2018 Number 01 / Satkerlala / Rede / II / 2018 and No. TH.11.27-01 / SS / 2018 dated November 27, 2018

The value of the agreement for the operation of port water transportation services using State-Owned Vessels (Kapal Rede) in the fiscal year 2018 is Rp.6.899.848.177 including 100% VAT, charged to the Budget Implementation Registration Number (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454 / 2018 December 5, 2017.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

Mendasar pada Berita Acara Perhitungan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 18 April 2019, pengajuan klaim atas penyelenggaraan pelayanan publik untuk penumpang kelas ekonomi selama tahun 2018 sebesar Rp2.120.260.138.181. terkoreksi sebesar Rp243.091.059.526,43 sehingga pengakuan pendapatan pelayanan penumpang kelas ekonomi menjadi Rp1.877.169.078.655. Sehingga Perseroan membukukan pendapatan usaha penugasan khusus Pemerintah (PSO dan Subsidi) sebesar Rp2.403.998.420.099, terdiri dari:

a. Kapal Penumpang Kelas Ekonomi	Rp 1.877.169.078.655
b. Subsidi - Kapal Perintis	Rp 352.354.135.862
c. Subsidi - Kapal Tol Laut	Rp 156.577.304.164
d. Subsidi - Kapal Ternak	Rp 16.004.287.770
e. Subsidi - Kapal Rede	Rp 1.893.613.648

Jumlah**Rp 2.403.998.420.099**

Mendasar pada hasil Pemeriksaan Perhitungan Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 April 2018, Perseroan membukukan pendapatan atas pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik sebesar Rp2.461.769.659.728, terdiri dari:

a. Kapal Penumpang Kelas Ekonomi	Rp 1.906.905.507.415
b. Subsidi - Kapal Perintis	Rp 303.915.869.175
c. Subsidi - Kapal Tol Laut	Rp 236.173.126.794
d. Subsidi - Kapal Ternak	Rp 14.775.156.344

Jumlah**Rp 2.461.769.659.728**

(Lihat Catatan 7 dan 8)

31. OPERATING REVENUES (continued)

Based on the Minutes of Calculation of the Implementation of Sea Transport Sector Public Service Obligations for Economy Class Passengers at PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Fiscal Year 2018 by the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency on April 18, 2019, submitting claims for organizing public services for economy class passengers during the year 2018 amounting to Rp2.120.260.138.181 corrected by Rp243.091.059.526,43 so that the recognition of economy class passenger service revenues became Rp1.877.169.078.655. So that the Company posted a special Government assignment income (PSO and Subsidies) of Rp2.403.998.420.099, consisting of:

Economy Class Passenger Ships
Subsidies - Pioneer Ships
Subsidies - Marine Toll Ship
Subsidies - Cattle Ships
Subsidies - Rede Ships

Total

Based on the results of the Examination of Funding for the Implementation of Public Service Obligations of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the 2017 Budget Year by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia on April 5, 2018, in 2017 the Company posted revenues for the implementation of Public Service Obligations in the amount of Rp2.461.769.659.728, consisting of:

Economy Class Passenger Ships
Subsidies - Pioneer Ships
Subsidies - Marine Toll Ship
Subsidies - Cattle Ships

Total

See Note 7 and 8.

32. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA

	2018	2017
Perkapalan	1.548.961.377.624	1.432.966.113.744
Pegawai	1.029.693.841.121	839.199.914.841
Pemeliharaan dan Perbaikan	418.657.198.844	384.944.638.739
Penyusutan dan Amortisasi	342.929.763.416	362.848.191.362
Penumpang	321.865.725.456	306.730.836.564
Pelayanan Kesehatan	246.859.612.450	172.122.151.544
Asuransi	56.229.788.955	56.986.731.284
Muatan Ternak	20.372.340.749	4.732.988.825
Perbengkelan	11.871.775.628	12.298.909.214
Kendali Mutu Pelayanan	8.502.836.732	6.473.352.683
Perhotelan	2.875.966.285	12.499.776.156
Sewa	968.673.100	58.266.709.817
Pajak dan Retribusi	216.401.321	1.851.572.503
Beban Pokok Lainnya	766.242.323	122.107.703
Jumlah	4.010.771.544.004	3.652.043.994.978

Jumlah**4.010.771.544.004****32. COST OF REVENUES**

Shipping
Employee
Maintenance and Repair
Amortization and Depreciation
Passenger
Health Services
Insurance
Animal Cargo
Workshop
Quality Service Control
Hospitality
Rent
Taxes and Levies
Other Cost of Revenues

Total**3.652.043.994.978**



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. BEBAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

	2018	2017
Penjualan	21.569.973.517	15.118.685.616
Kehumasan	6.977.241.672	4.920.252.462
Promosi dan Periklanan	6.648.507.869	2.759.416.133
Pemasaran Lainnya	322.606.527	353.481.430
Jumlah	35.518.329.585	23.151.835.641

33. MARKETING AND DISTRIBUTION EXPENSES

Sales
Public Relations
Promotion and Advertising
Others Marketing
Total

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2018	2017
Pegawai	306.474.622.649	288.025.931.578
Pemeliharaan dan Perbaikan	41.038.001.732	24.421.881.753
Rumah Tangga	23.169.415.196	21.913.398.925
Imbalan Paska Kerja	1.986.451.076	21.417.153.114
Administrasi Perkantoran	19.413.519.706	16.512.819.679
Penyusutan dan Amortisasi	15.914.971.505	12.840.673.320
Konsultan dan Audit	16.258.382.118	10.457.716.767
Sewa	9.276.027.383	9.133.480.251
Pajak dan Restribusi	8.702.681.481	27.235.251.670
Asuransi	6.465.171.766	4.809.024.558
Keselamatan dan Kesehatan	3.664.818.350	1.213.075.238
PKBL	3.209.827.821	2.111.847.807
Denda/Klaim	2.658.814.598	1.217.608.447
Provisi Penurunan Nilai Piutang	1.187.091.873	-
Perencanaan dan Pengembangan	927.490.357	6.905.279.650
Olah Raga dan Kesenian	858.880.900	538.849.057
Sumbangan	221.250.059	302.648.141
Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Keuangan	412.780.461	287.204.334
Lainnya	10.071.511.552	8.024.893.310
Jumlah	471.911.710.583	457.368.737.599

34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Employees
Maintenance and Repair
Household
Post-Employment Benefits
Office administration
Amortization and Depreciation
Audit and Consultant
Rent
Taxes and Levies
Insurance
Security and Safety
PKBL
Penalties / Claims
Provision of Impairment of Receivables
Development and Planning
Sport and Art
Donations
Loss on Impairment of
Non-Financial Assets
Others
Total

35. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

	2018	2017
a. Pendapatan Non Usaha:		
Keuntungan Perubahan Nilai Wajar Aset Non Keuangan (lihat cat.13)	99.730.234.390	-
Bunga	31.727.502.257	44.703.924.402
Pemulihan Iuran Program Dana Pensiun	25.251.286.891	-
Sewa	15.018.454.422	13.984.118.564
Klaim Asuransi	9.083.796.709	4.727.394.885
Jasa Administrasi	8.119.909.566	5.699.846.076
Jasa Giro	5.251.677.217	3.829.970.595
Keuntungan Selisih Kurs	2.357.708.569	2.243.458.642
Denda	569.757.866	-
Pelunasan Piutang Dihapuskan	71.976.771	87.068.007
Keuntungan Penjualan Aset	-	4.604.463.293
Lainnya	38.191.334.947	33.823.501.326
Sub Jumlah	235.373.639.605	113.703.745.790

35. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)

a. Non-Operating Revenues:
Gains of changing Fair Value
of non-financial assets (see note 13)
Interest
Recovery of Pension Fund Program Fees
Rent
Insurance Claim
Administration Services
Current account service
Foreign Exchange Gains
Penalties
Repayment of Accounts Receivable
Gains of Asset Sale
Others
Sub Total



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA (lanjutan)

	2018	2017
b. Beban Non Usaha:		
Administrasi Bank	5.712.219.058	4.059.249.080
Kerugian Penjualan Aset Keuangan	-	57.257.501
Kerugian Selisih Kurs	2.098.921.561	1.568.831.084
Beban Keuangan	3.641.085.183	7.059.135.487
Lainnya	8.386.614.433	5.912.481.078
Sub Jumlah	19.838.840.235	18.656.954.229
Jumlah Pendapatan Non Usaha, Bersih	215.534.799.370	95.046.791.560

Keuntungan perubahan nilai wajar aset non keuangan merupakan kenaikan perubahan nilai wajar properti investasi tanah dan gedung. (Lihat Catatan 13)

Pemulihan iurang program dana pensiun merupakan kelebihan iuran program manfaat pasti dana pensiun yang telah dibayarkan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya berdasarkan perhitungan aktuarial.

Mendasar pada Risalah Lelang Kapal Ganda Dewata No. RL-002/PLII.04/2017, tanggal 2 Agustus 2017, Perseroan membukukan keuntungan atas penjualan kapal Ganda Dewata sebesar Rp4.499.945.962 dari harga lelang sebesar Rp13.000.000.000 termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau sebesar Rp11.818.181.818 dengan nilai buku kapal Rp7.318.235.856.

Beban keuangan merupakan beban bunga atas pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya pada tahun 2018 dan 2017.

35. NON OPERATING INCOME (EXPENSES) (continued)

b. Non-Operating Expenses:
Bank Administration
Loss on Sale of Financial Assets
Foreign Exchange Losses
Financial Expenses
Others

Sub Total
Total Non Operating Income, Net

The gains of changing the fair value of non-financial assets is an increase in the fair value of investment property of land and buildings. (See Note 13)

The recovery of pension fund program contributions is an excess of defined benefit program pension contributions that have been paid by the company when compared to the obligations that should be based on actuarial calculations.

Based on to the Minutes of Ganda Dewata Vessel Auction in 2017, the Company profits on the sale of Ganda Dewata vessels amounting to Rp4.499.945.962 from the auction price of Rp13.000.000.000 include Value Added Tax or amount Rp11.818.181.818 with book value of Vessel Rp7.318.235.856.

Finance expense represents interest expense on bank loans and other financial institutions in 2018 and 2017.

36. INFORMASI SEGMENT USAHA

a. Pendapatan usaha bersih menurut wilayah

	2018		2017		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	73.905.169.516	1,53%	73.721.812.630	1,68%	Sumatera
Jawa	3.790.763.210.059	78,38%	3.451.406.449.804	78,53%	Jawa
Kalimantan	127.658.619.370	2,64%	114.256.842.937	2,60%	Kalimantan
Bali dan Nustra	147.610.947.350	3,05%	120.073.368.932	2,73%	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	696.466.192.057	14,40%	635.386.217.857	14,46%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Jumlah	4.836.404.138.352	100%	4.394.844.692.160	100,00%	Total

36. SEGMENT INFORMATION

a. Net operating income by region.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

36. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Hasil usaha laba (rugi)-kotor menurut wilayah

b. Results of gross operations income (loss) by region

	2018		2017		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	36.751.432.867	4,45%	42.554.057.373	5,73%	Sumatera
Jawa	532.393.324.786	64,48%	501.306.840.981	67,49%	Jawa
Kalimantan	89.522.070.203	10,84%	79.407.360.514	10,69%	Kalimantan
Bali dan Nustra	72.276.325.456	8,75%	70.637.368.467	9,51%	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	94.689.441.035	11,47%	48.895.069.848	6,58%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Jumlah	825.632.594.348	100%	742.800.697.183	100,00%	Total

c. Aset menurut wilayah

c. Assets by region

	2018		2017		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	95.768.108.032	1,43%	62.323.009.504	0,97%	Sumatera
Jawa	6.194.516.631.371	91,83%	6.150.749.907.567	91,83%	Jawa
Kalimantan	178.397.561.382	1,59%	87.161.123.824	1,59%	Kalimantan
Bali dan Nustra	144.562.821.062	1,26%	79.037.211.242	1,26%	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	91.780.066.836	4,50%	53.832.243.474	4,50%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	(2.529.897.267)	0,01%	(1.039.297.858)	0,01%	Singapore
Jumlah	6.702.495.291.416	100%	6.432.064.197.753	100,00%	Total

d. Aset Tetap menurut wilayah

d. Fixed assets by region

	2018		2017		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	57.822.711.646	1,66	1.854.875.114	0,05	Sumatera
Jawa	3.677.825.604.183	105,47	3.492.729.972.074	97,82	Jawa
Kalimantan	83.314.872.538	2,39	17.349.993.823	0,49	Kalimantan
Bali dan Nustra	24.370.834.769	0,70	7.050.471.274	0,20	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	(356.268.115.775)	-10,22	51.436.419.054	1,44	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	-	0,00	7.849.800	0,00	Singapore
Jumlah	3.487.065.907.361	100%	3.570.429.581.139	100%	Total

e. Biaya penyusutan menurut wilayah

e. Depreciation costs by region

	2018		2017		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	260.642.824	7,28%	416.514.802	0,11	Sumatera
Jawa	354.368.960.844	99,04%	367.479.441.926	98,09	Jawa
Kalimantan	663.321.420	0,19%	1.342.828.573	0,36	Kalimantan
Bali dan Nustra	461.612.027	0,13%	513.948.588	0,14	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	2.065.775.677	0,58%	4.884.663.198	1,30	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	-	0,00%	1.962.456	0,00	Singapore
Jumlah	357.820.312.792	100%	374.639.359.543	100%	Total



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

f. Liabilitas menurut wilayah

	2018		2017		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	13.469.490.519	2,04	13.388.915.010	1,84	Sumatera
Jawa	577.528.481.322	87,27	646.466.556.067	88,75	Jawa
Kalimantan	11.037.748.296	1,67	10.752.180.806	1,48	Kalimantan
Bali dan Nustra	11.087.633.012	1,68	11.173.401.196	1,53	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	48.597.205.692	7,34	46.464.730.764	6,38	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	65.123.414	0,01	170.480.938	0,02	Singapore
Jumlah	661.785.682.255	100%	728.416.264.781	100,00%	Total

36. SEGMENT INFORMATION (continued)

f. Liabilities by region.

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material
dengan pihak - pihak berelasi dengan rincian sebagai
berikut:

37. RELATED PARTY TRANSACTION

The nature of relationship and type of material
transactions with parties who have a special relationship
with the following details:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ Nature of relationship Related Parties	Transaksi/Transactions
1.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
4.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
5.	Kementerian Perhubungan c.q. Karo Perencanaan	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable
6.	PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable
7.	PT ASDP Indonesia Ferry	Entitas Lelang yang Dikelola Oleh Pemerintah R.I. / Auction Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable
8.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable
9.	PT Pupuk Kaltim (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable
10.	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Personil Kunci / Common Key Management	Utang Piutang / Receivable - Payable
11.	PT Sarana Gama Sejahtera	Personil Kunci / Common Key Management	Utang Piutang / Receivable - Payable



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) 37. RELATED PARTY TRANSACTION (continued)

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ Nature of relationship Related Parties	Transaksi/Transactions
12.	PT Sarana Bandar Nasional	Entitas Anak / Subsidiaries	Penyertaan, Hutang Piutang / Interest, Receivable - payable
13.	PT Pelita Indonesia Djaya	Entitas Anak / Subsidiaries	Penyertaan, Hutang Piutang / Interest, Receivable - payable
14.	PT Rumah Sakit Pelni	Entitas Anak / Subsidiaries	Penyertaan, Hutang Piutang / Interest, Receivable - payable

38. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan (neraca):

38. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Here's an overview of the carrying value and the estimated fair value of financial instruments are stated in the statement of financial position (balance sheet):

	31 Desember/December 31, 2018		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan:			Financial Assets:
Kas dan Setara Kas	1.521.886.980.235	1.521.886.980.235	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	254.308.545.052	254.308.545.052	Account Receivable
Aset Keuangan Lancar Lainnya	490.899.530.772	490.899.530.772	Other Current Financial Assets
Jumlah	2.267.095.056.059	2.267.095.056.059	Total
Liabilitas Keuangan:			Financial Liability:
Utang Usaha	165.434.166.928	165.434.166.928	Account Payables
Beban Akrua	63.899.122.286	63.899.122.286	Accrued Expenses
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	54.376.603.506	54.376.603.506	Current Portion for Long Term Liabilities
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	51.383.229.687	51.383.229.687	Prepaid Income/Deposits/ Deposit Guarantee
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	46.311.243.860	46.311.243.860	Other Short Term Financial Liabilities
Utang Non Usaha Jangka Panjang	31.113.840.160	31.113.840.160	Other Long Term Non Business Debt
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	67.131.464.234	67.131.464.234	Long Term Financial Institution and Bank Loan
Jumlah	479.649.670.661	479.649.670.661	Total
	31 Desember/December 2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan:			Financial Assets:
Kas dan Setara Kas	1.338.781.110.919	1.338.781.110.919	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	204.786.564.118	204.786.564.118	Account Receivable
Aset Keuangan Lancar Lainnya	649.901.221.742	649.901.221.742	Non-Current Financial Assets - Others
Jumlah	2.193.468.896.779	2.193.468.896.779	Total



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**38. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
(lanjutan)**

**38. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

		31 Desember/December 2017		
		Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Liabilitas Keuangan:				Financial Liability:
Utang Usaha	155.769.014.125	155.769.014.125		Account Payables
Beban Akrua	171.423.202.038	171.423.202.038		Accrued Expenses
Bagian Lancar atas Liabilitas				Current Portion for
Jangka Panjang	33.571.237.683	33.571.237.683		Long Term Liabilities
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	49.554.163.437	49.554.163.437		Prepaid Income/Deposits/ Deposit Guarantee
Liabilitas Keuangan				Other Short Term
Jangka Pendek Lainnya	52.357.538.981	52.357.538.981		Financial Liabilities
Utang Non Usaha Jangka Panjang	37.687.297.741	37.687.297.741		Other Long Term Non Business Debt
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	29.840.753.913	29.840.753.913		Long Term Financial Institution and Bank Loan
Jumlah	530.203.207.919	530.203.207.919		Total

**39. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 01 JANUARI
2017/31 DESEMBER 2016**

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 01 Januari 2017/31 Desember 2016 di reklasifikasi menyesuaikan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2018. Perbandingan saldo-saldo akun laporan keuangan konsolidasian yang disajikan kembali dengan yang dilaporkan sebelumnya sebagai berikut:

**39. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 01 JANUARY 2017/31
DECEMBER 2016**

Multiple accounts in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2017 and 01 January 2017/31 December 2016 are reclassified in accordance with the presentation of the consolidated financial statements of 2018. Comparison of the consolidated balance sheet of account balances relative to those previously reported as follows:

		31 Desember/December 2017			
		Dilaporkan Sebelumnya/ Previously Reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Penyajian Sekarang/Current Presentation	
Properti Investasi:					Investments Property:
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Cost of acquisition:</u>
Tanah	3.094.049.600	(740.783.025)	2.353.266.575		Land
Gedung	40.977.201.737	(26.033.163.787)	14.944.037.950		Building
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Gedung	21.982.967.567	(13.695.529.600)	8.287.437.967		Building
Aset Tetap:					Investments Property:
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Cost of acquisition:</u>
Tanah	24.370.398.594	740.783.025	25.111.181.619		Land
Gedung	274.595.427.232	26.033.163.787	300.628.591.019		Building
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Gedung	92.426.911.063	13.695.529.600	106.122.440.663		Building

(Lihat Catatan 13 dan 15)

(See Note 13 and 15)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**39. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 01 JANUARI
2017/31 DESEMBER 2016 (lanjutan)**

**39. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 01 JANUARY 2017/31
DECEMBER 2016 (continued)**

	31 Desember/December 2016			
	Dilaporkan Sebelumnya/ Previously Reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Penyajian Sekarang/Current Presentation	
Properti Investasi:				Investments Property:
<u>Biaya Perolehan</u>				<u>Cost of acquisition:</u>
Tanah	3.094.049.600	(740.783.025)	2.353.266.575	Land
Gedung	40.848.201.737	(25.904.163.787)	14.944.037.950	Building
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Gedung	20.960.976.697	(13.047.139.674)	7.913.837.023	Building
Aset Tetap:				Investments Property:
<u>Biaya Perolehan</u>				<u>Cost of acquisition:</u>
Tanah	23.387.815.055	740.783.025	24.128.598.080	Land
Gedung	264.438.673.391	25.904.163.787	290.342.837.178	Building
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Gedung	85.041.790.759	13.047.139.674	98.088.930.433	Building

(Lihat Catatan 13 dan 15)

(See Note 13 and 15)

40. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN

40. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE

Keterangan	2018	2017	Deviasi/ Deviation (%)	Description
1	2	3	4=(2-3)/3	1
Kas dan Setara Kas (KS)	1.521.886.980.235	1.338.781.110.919	13,68	Cash and Cash Equivalents (CC)
Piutang Usaha (PU)	254.308.545.052	204.786.564.118	24,18	Trade Receivables (TR)
Persediaan (SD)	474.549.818.547	473.077.781.262	0,31	Inventory (IN)
Aset Lancar (AL)	2.886.301.170.820	2.765.448.237.585	4,37	Current Assets (CA)
Penyusutan dan Amortisasi (PA)	383.605.108.836	331.808.371.164	15,61	Depreciation and Amortization (DA)
Jumlah Aset (JA)	6.561.837.919.330	6.432.064.197.753	2,02	Total Assets (TA)
Liabilitas Jk. Pendek (KL)	444.786.785.478	526.145.732.123	(15,46)	Short-Term Liabilities (STL)
Liabilitas Jk. Panjang (KJP)	223.998.896.777	202.270.532.657	10,74	Long-Term Liabilities (LTL)
Jumlah Kewajiban (JK)	668.785.682.255	728.416.264.781	(8,19)	Total Liabilities (TL)
Modal Kerja Bersih (MKB) = (AL - KL)	2.441.514.385.342	2.239.302.505.462	9,03	Net Working Capital (WC)=(CA)-(STL)
Akumulasi Saldo Laba (RE)	(1.634.619.997.258)	(1.838.251.183.306)	(11,08)	Retained Earnings (RE)
Ekuitas (EK)	5.893.052.237.075	5.703.647.932.972	3,32	Equity (EQ)
Laba Bersih (LRB)	204.173.698.929	276.881.493.533	(26,26)	Net Income (NI)
Laba Bersih (LRB1)	189.416.608.676	239.451.993.272	(20,90)	Net Income (NI1)
Modal Sendiri (MS) = (EK-LRB)	5.688.878.538.146	5.426.766.439.439	4,83	Own Capital (OC)=(EQ-PCY)
Pajak Penghasilan (PJ)	86.590.922.135	85.431.483.847	1,36	Income Tax (IT)
Jumlah Pendapatan Usaha (JPU)	4.593.313.078.826	4.394.844.692.160	4,52	Total Op. Revenue (TOP)
Total Pendapatan (TP)	4.828.686.718.431	4.508.548.437.950	7,10	Total Revenue (TR)
Laba Kotor (LK)	582.541.534.822	742.800.697.182	(21,57)	Gross Profit (GP)
Biaya Bunga (BB)	3.641.085.183	7.059.135.487	(48,42)	Interest Cost (IC)
Capital Employed (CE)	6.534.863.884.117	6.355.469.732.332	2,82	Capital Employee (CE)
EBIT=(LRB+BB+PJ)	294.405.706.247	369.372.112.866	(20,30)	EBIT=(NI+IC+T)
EBITDA=(LRB+BB+PJ+PA)	678.010.815.083	454.803.596.713	49,08	EBITDA=(EBIT+DA)



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN (lanjutan)

**40. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE
(continued)**

Keterangan	Satuan / Unit (%; kali/times; hari/days)	2018	2017	Deviasi / Deviation (%)	Description
a	b	c	d	e=(c-d)/d	a
I. Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar (AL/KL)	%	648,92	525,60	23,46	I. Liquidity Ratios Current Ratio (AL/KL)
Rasio Cepat (KS + PU) / KL	%	399,34	293,37	36,12	Quick Ratio (KS + PU) / KL
Rasio Kas (KS / KL)	%	342,16	254,45	34,47	Cash Ratio (KS / KL)
II. Rasio Leverage					
Rasio Kewajiban atas Aset (JK/JA)	%	10,19	11,32	(10,00)	II. Leverage Ratios Debt to Assets Ratio (JK/JA)
Rasio Kewajiban atas Ekuitas (JK/EK)	%	11,35	12,77	(11,14)	Debt to Equity Ratio (JK/EK)
Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas (KJP/EK)	%	3,80	3,55	7,18	Long-Term Debt to to Equity (KJP/EK)
III. Rasio Aktivitas					
Rasio Perputaran Persediaan (SD/JPU)	kali / times	0	0	(4,02)	III. Activity Ratios Inventory Turnover Ratio (SD/JPU)
Rasio Perputaran Aset (TP/CE)	%	73,89	70,94	4,16	Assets Turnover Ratio (TP/CE)
Rasio Penagihan Rata2 (PU/JPU)x365	hari / days	20	17	18,82	Average Collectible Ratio (PU/JPU)x365
IV. Rasio Profitabilitas					
Imbalan terhadap Ekuitas (LRB1/MS)	%	3,33	4,41	-24,54	IV. Profitability Ratios Return on Equity (LRB1/MS)
Imbalan terhadap Investasi (EBIT + PA) / CE	%	10,33	7,07	46,13	Return on Investment (EBIT + PA) / CE
Marjin Laba Kotor atas Penjl. (LK / JPU)	%	12,68	16,90	-24,96	Gross Profit Margin on Sales (LK / JPU)
Marjin Laba Bersih atas Penjl. (LRB / TP)	%	4,23	6,14	-31,15	Net Profit Margin on Sales (LRB / TP)
Rasio EBITDA atas Aset	%	10,33	7,07	46,13	EBITDA on Assets Ratio

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Perusahaan dalam posisi likuiditas mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, hal ini tercermin dari peningkatan rasio lancar semula 525,60% menjadi 648,92%; rasio cepat dari 293,37% menjadi 399,34%; dan rasio kas dari 254,45% menjadi 342,16%.

Liquidity Ratio

Liquidity ratios are measurement to calculate the company's ability to meet its short term liabilities.

The Company's liquidity position increased by 2018 compared to 2017, the current ratio decreased from 525,60% to 648,92%; quick ratio from 293,37% to 399,34%; and cash ratio from 254,45% to 342,16%.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN (lanjutan)

Rasio Likuiditas (lanjutan)

Peningkatan rasio likuiditas dipengaruhi oleh:

- Peningkatan aset lancar sebesar 4,37% dari semula Rp.2.765.448.237.584 menjadi Rp.2.886.301.170.820, yang antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 13,68% dari semula Rp.1.338.781.110.919 menjadi Rp.1.521.886.980.235 serta peningkatan piutang usaha sebesar 24,18% dari semula Rp.204.786.564.118 menjadi Rp.254.308.545.052.
- Penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 15,46% dari semula Rp.526.145.732.124 menjadi Rp.444.786.785.478.

Rasio Leverage

Rasio leverage adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya apabila saat ini perusahaan dilikuidasi.

Tingkat kemampuan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tahun 2018 dalam memenuhi seluruh kewajiban apabila dilakukan likuidasi pada saat ini mengalami peningkatan dibanding dengan capaian tahun 2017, hal ini tercermin dari penurunan rasio total liabilitas terhadap total aset dari 11,32% menjadi 10,19%, rasio total liabilitas terhadap ekuitas dari 12,77% menjadi 11,35% dan meskipun rasio liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas mengalami peningkatan dari 3,55% menjadi 3,80%.

Peningkatan rasio leverage dipengaruhi oleh:

- Peningkatan jumlah aset sebesar 2,02% dari semula Rp.6.432.064.197.751 menjadi Rp.6.561.837.919.330, yang antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 13,68% dari semula Rp.1.338.781.110.919 menjadi Rp.1.521.886.980.235 serta peningkatan piutang usaha sebesar 24,18% dari semula Rp.204.786.564.118 menjadi Rp.254.308.545.052.
- Penurunan jumlah liabilitas sebesar 8,19% dari semula Rp.728.416.264.781 menjadi Rp.668.785.682.255, yang antara lain dipengaruhi oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 15,46% dari semula Rp.526.145.732.124 menjadi Rp.444.786.785.478.

40. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE (continued)

Liquidity Ratio (continued)

Increased liquidity ratios are influenced by:

- The increase in current assets was 4,37 from Rp.2.765.448.237.584 to Rp.2.886.301.170.820, which was partly influenced by an increase in cash and cash equivalents by 13,68% from the original Rp.1.338.781.110.919 became Rp.1.521.886.980.235 and increased trade receivables by 24,18% from Rp.204.786.564.118 to Rp.254.308.545.052.
- The decrease of short-term liabilities amounted to 15,46% from Rp.526.145.732.124 to Rp.444.786.785.478.

Leverage Ratio

Leverage ratios are a measurement to calculate the company's ability to meet all current liabilities if the company liquidated.

The capability of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2018 to fulfill all obligations if liquidated at this time has increased compared to the achievement in 2017, this is reflected by the decrease of total liabilities ratio to total assets from 11,32% to 10,19% the ratio of total liabilities to equity from 12,77% to 11,35% and although the ratio of long-term liabilities to equity increased from 3,55% to 3,80%.

Increased leverage ratios are influenced by:

- The increase in total assets amounted to 2,02% from Rp.6.432.064.197.751 to Rp.6.561.837.919.330, which was partly influenced by an increase in cash and cash equivalents by 13,68% from Rp.1.338.781.110.919 became Rp.1.521.886.980.235 and increased trade receivables by 24,18% from Rp.204.786.564.118 to Rp.254.308.545.052.
- The decrease in total liabilities was 8,19% from Rp.728.416.264.781 to Rp.668.785.682.255, which was partly influenced by a decrease in short-term liabilities of 15,46% from Rp.526.145.732.124 to Rp.444.786.785.478.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN (lanjutan)

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya.

Dibandingkan dengan tahun 2017, tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya relatif mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari rasio perputaran aset dari 70,94% menjadi 73,89%, meskipun rasio penagihan rata-rata piutang meningkat dari 17 hari menjadi 20 hari dan rasio perputaran persediaan stabil.

Peningkatan rasio aktivitas dipengaruhi oleh:

- Peningkatan total pendapatan 7,10% dari Rp.4.508.548.437.950 menjadi Rp.4.828.686.718.431 sedangkan total pendapatan usaha meningkat 4,52% dari semula Rp.4.394.844.692.160 menjadi Rp.4.593.313.078.826.
- Peningkatan *capital employee* 2,82% dari Rp.6.355.469.732.331 menjadi Rp.6.534.863.884.117.

Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas atau rasio kemampulabaan perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pada tahun 2018, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya secara umum mengalami penurunan, hal ini terlihat dari hasil imbalan (*return*) terhadap ekuitas menurun dari 4,41% menjadi 3,33%, rasio imbalan terhadap investasi meningkat dari 7,07% menjadi 10,33%, margin laba kotor menurun dari 16,90% menjadi 12,68%, margin laba bersih menurun dari 6,14% menjadi 4,23%, dan rasio EBITDA terhadap aset meningkat dari 7,07% menjadi 10,33%.

Penurunan efektivitas penggunaan sumber daya dipengaruhi oleh:

- Peningkatan *capital employee* 5,04% dari Rp.6.355.469.732.331 menjadi Rp.6.675.521.256.200.
- Peningkatan total pendapatan 10,28% dari Rp.4.508.548.437.950 menjadi Rp.4.972.047.543.567 sedangkan total pendapatan usaha meningkat 10,05% dari semula Rp.4.394.844.692.160 menjadi Rp.4.836.404.138.352.

40. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE (continued)

Activity Ratio

Activity ratio are a measure used to calculate the effectiveness of the company in utilizing all available resources in its control.

Compared to the year 2017, the level of effectiveness of the company in utilizing the relative resources increased, this is reflected in the asset turnover ratio from 70,94% to 73,89%, although the average collection ratio of accounts receivable increased from 17 days to 20 days and the ratio inventory turnover of stable.

Increased activity ratio is affected by:

- The total revenue increase of 7,10% from Rp.4.508.548.437.950 to Rp.4.828.686.718.431, while total operating income increased 4,52% from Rp.4.394.844.692.160 to Rp.4.593.313.078.826.
- Increase in *capital employee* by 2,82% from Rp.6.355.469.732.331 to Rp.6.534.863.884.117.

Profitability Ratio

Profitability ratios or the ratio is a measure of corporate kemampulabaan used to calculate the net outcome of various policy and management decisions that will provide a final answer about the effectiveness of management in managing the company.

In 2018, the level of effectiveness of the use of resources in general has decreased, as seen from the return on equity increased from 4,41% to 3,33%, the ratio of return on investment increased from 7,07% to 10,33%, gross profit margin decreased from 16,90% to 12,68%, net profit margin decreased from 6,14% to 4,23%, and the EBITDA to asset ratio increased from 7,07% to 10,33%.

Increased effectiveness of resource use is influenced by:

- Increase in *capital employee* by 2,42% from Rp.6.355.469.732.331 to Rp.6.675.521.256.200.
- The total revenue increase of 10,28% from Rp.4.508.548.437.950 to Rp.4.972.047.543.567, while total operating income increased 10,05% from Rp.4.394.844.692.160 to Rp.4.836.404.138.352.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN (lanjutan)

Rasio Profitabilitas (lanjutan)

Peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya dipengaruhi oleh: (lanjutan)

- c. Penurunan laba kotor 21,57% dari Rp.742.800.697.182 menjadi Rp.582.541.534.822 dan penurunan laba tahun berjalan sebesar 26,26% dari semula Rp.276.881.493.533 menjadi Rp.204.173.698.929.
- d. Peningkatan EBITDA 49,08% dari Rp.454.803.596.713 menjadi Rp.678.010.815.083.

40. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE (continued)

Profitability Ratio (continued)

Increased effectiveness of resource use is influenced by: (continued)

- c. Decrease in gross profit 21,57% from Rp.742.800.697.182 to Rp.582.541.534.822 and the decrease in current year's profit was 26,26% from Rp.276.881.493.533 to Rp.204.173.698.929.
- d. EBITDA increase of 49,08% from Rp.454.803.596.713 to Rp.678.010.815.083.

41. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum go-public oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

$$Z - Score = \frac{6,56 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak/Earning Before Tax \& Interest}}{\text{Jumlah aset/Total Assets}} + \frac{3,26 \times \text{Akm.Saldo Laba/Retained Earning}}{\text{Jumlah aset/Total Assets}} + \frac{1,05 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak/Earning Before Tax \& Interest}}{\text{Jumlah Kewajiban/Total Liabilities}} + \frac{6,72 \times \text{Nilai Buku Ekuitas/Equity}}{\text{Jumlah Kewajiban/Total Liabilities}}$$

41. REVIEW OF THE GOING CONCERN

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	262.559.876.950	319.682.126.588	<i>Profit before Interest and tax</i>
Laba Sebelum Pajak	290.646.294.024	357.326.915.503	<i>Profit before tax</i>
Dikurangi: Pendapatan Bunga	31.727.502.257	44.703.924.402	<i>Reduced: Interest Income</i>
Ditambah: Beban Bunga	3.641.085.183	7.059.135.487	<i>Additional: Interest Expense</i>
Jumlah Aset	6.561.837.919.330	6.432.064.197.753	<i>Total Assets</i>
Akm. Saldo Laba	(1.634.619.997.258)	(1.838.251.183.306)	<i>Retained Earning</i>
Saldo Ekuitas	5.893.052.237.075	5.703.647.932.972	<i>Total Equity</i>
Jumlah Liabilitas	668.785.682.255	728.416.264.781	<i>Total Liabilities</i>

Catatan:

- Jika hasilnya, Z < 1,23 mengindikasikan prediksi pailit.
- Jika hasilnya, 1,23 < Z < 2,90 mengindikasikan gray area.
- Jika hasilnya, Z > 2,90 mengindikasikan tidak pailit.

Notes:

- If result Z < 1.23 indicates prediction of bankruptcy.
- If result 1.23 < Z < 2.90 indicates gray area.
- If result Z > 2.90 indicates no bankruptcy.

Perhitungan Z-score tahun 2018 sebagai berikut:

The calculate of Z-Score in 2018, consist of:

$$Z - Score = \frac{6,56 \times 262.559.876.950}{6.561.837.919.330} + \frac{3,26 \times (1.634.619.997.258)}{6.561.837.919.330} + \frac{1,05 \times 262.559.876.950}{668.785.682.255} + \frac{6,72 \times 5.893.052.237.075}{668.785.682.255} = \frac{1.722.392.792.793}{6.561.837.919.330} + \frac{-5.328.861.191.061}{6.561.837.919.330} + \frac{275.687.870.798}{668.785.682.255} + \frac{39.601.311.033.146}{668.785.682.255} = 0,26 + (0,81) + 0,41 + 59,21 = \underline{59,08}$$



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
 for the Year Then Ended
 (With Comparative As of December 31, 2017, and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

41. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

Perhitungan Z-score tahun 2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Z - Score} &= \frac{6,56 \times 319.682.126.588}{6.432.064.197.753} + \frac{3,26 \times (1.838.251.183.306)}{6.432.064.197.753} \\
 &+ \frac{1,05 \times 319.682.126.588}{728.416.264.781} + \frac{6,72 \times 5.703.647.932.972}{728.416.264.781} \\
 &= \frac{2.097.114.750.416}{6.432.064.197.753} + \frac{-5.992.698.857.577}{6.432.064.197.753} \\
 &+ \frac{335.666.232.917}{728.416.264.781} + \frac{38.328.514.109.573}{728.416.264.781} \\
 &= 0,33 + (0,93) + 0,46 + 52,62 \\
 &= \underline{\underline{52,47}}
 \end{aligned}$$

Z - Score	
2018	2017
59,08	52,47

Berdasarkan hasil perhitungan Z-score *model* tahun 2018 diperoleh score 61,68 sedangkan score tahun 2017 sebesar 52,47 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas 'tidak pailit' atau diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya **sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya**.

41. REVIEW OF THE GOING CONCERN (continued)

The calculate of Z-Score in 2017, consist of:

Based on the results of Z-score calculation model year 2018 obtained score 61,68 while the score of 2017 of 52,47 so indicating very far above the limit 'not bankrupt' or meant that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries are **very capable of maintaining continuity of business**.

42. PERIKATAN

Perjanjian Kerjasama dengan PT Indah Karya (Persero)

Pada tanggal 27 April 2018, Entitas Anak PT Rumah Sakit Pelni menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Indah Karya (Persero) tentang Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar No. U.4/03/03/IV/2018 dan No. 022/HKM/IKA/IV/2018. Ruang lingkup dalam perjanjian tersebut adalah PIHAK PERTAMA memberikan hak Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA melaksanakan hak pengelolaan tersebut dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pendampingan Pendirian Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar, meliputi beberapa item pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi studi kelayakan;
 - 2) Evaluasi master plan dan bangunan;
 - 3) Meeting perencanaan project;
 - 4) Perencanaan dan konsultasi pemilihan alat-alat medis.

42. ENGAGEMENT

Cooperation Agreement with PT Indah Karya (Persero)

On April 27, 2018, the Subsidiary of PT Rumah Sakit Pelni signed a Cooperation Agreement with PT Indah Karya (Persero) concerning Management of Hospital Management at Royal Biringkanaya Makassar No. U.4 / 03/03 / IV / 2018 and No. 022 / HKM / IKA / IV / 2018. The scope of the agreement is that the FIRST PARTY gives the Management of the Royal Biringkanaya Makassar Hospital Management to the SECOND PARTY and the SECOND PARTY to carry out the management rights in the following:

- a. Assistance for the Establishment of Royal Biringkanaya Makassar Hospital, covering several work items as follows:
 - 1) Evaluation of feasibility studies;
 - 2) Evaluation of master plan and building;
 - 3) Project planning meeting;
 - 4) Planning and consulting for the selection of medical devices.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERIKATAN (lanjutan)

**Perjanjian Kerjasama dengan PT Indah Karya (Persero)
(lanjutan)**

b. Penyiapan Pra Operasional Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar, meliputi beberapa item pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan struktur organisasi;
- 2) Instalasi Software Informasi Teknologi (RS Pelni Operating System), meliputi:
 - Sistem informasi rawat jalan;
 - Sistem informasi rawat inap;
 - Sistem informasi persediaan;
 - Sistem informasi rekam medis;
 - Sistem informasi kepegawaian;
 - Sistem informasi aplikasi akuntansi;
 - Instalasi hardware informasi teknologi.
- 3) Transfer BOD dengan 4 (empat) calon Direksi;
- 4) Rekrutmen pegawai;
- 5) Pembuatan kebijakan, SOP dan Instruksi Kerja;
- 6) Transportasi, akomodasi dan uang saku;
- 7) Pembuatan formularium.

c. Pelaksanaan Operasional Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar, meliputi item pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Manajerial Medis;
- 2) Pengelolaan Manajerial Non Medis;
- 3) Pengelolaan Manajerial Administrasi, Keuangan dan Aset;
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- 5) Pengelolaan Perijinan yang terkait dengan rumah sakit;
- 6) Pengelolaan Pencapaian Penetapan Kelas, Akreditasi Nasional maupun Internasional;
- 7) Pengelolaan hubungan baik dengan stakeholder Pemerintah setempat, rekanan kerja rumah sakit dan masyarakat;
- 8) Pengelolaan penyiapan penyerahan Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit Royal Biringkanaya dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- 9) Pengelolaan manajerial lainnya yang terkait dengan Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar.

Dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK PERTAMA membayar Biaya Fee kepada PIHAK KEDUA, atas Pengelolaan Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar sebesar Rp.8.170.000.000 dengan rincian:

- a. Biaya tahap pendampingan pendirian Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar sebesar Rp.5.670.000.000;
- b. Biaya Branding Fee Rumah Sakit Pelni untuk 5 tahun pertama sebesar Rp.2.500.000.000;

42. ENGAGEMENT (continued)

**Cooperation Agreement with PT Indah Karya
(Persero) (continued)**

b. Pre-operational Preparation of Royal Biringkanaya Makassar Hospital, includes several work items as follows:

- 1) Organizational structure planning;
- 2) Installation of Information Technology Software (RS Pelni Operating System), includes:
 - Outpatient information system;
 - Inpatient information system;
 - Inventory information system;
 - Medical record information system;
 - Personnel information system;
 - Accounting application information system;
 - Installing information technology hardware.
- 3) Transfer of BOD with 4 (four) prospective Directors;
- 4) Employee recruitment;
- 5) Policy making, SOP and Work Instruction;
- 6) Transportation, accommodation and pocket money;
- 7) Making a formulary.

c. The Operational Implementation of Royal Biringkanaya Makassar Hospital includes work items as follows:

- 1) Managerial Medical Management;
- 2) Managerial Non Medical Management;
- 3) Managerial Administration, Finance and Assets Management;
- 4) Human Resource Management;
- 5) Management of Licenses related to hospitals;
- 6) Management of Achieving Class Determination, National and International Accreditation;
- 7) Managing good relations with stakeholders Local government, hospital and community work partners;
- 8) Management of preparation of the submission of Management of the Royal Biringkanaya Hospital from the SECOND PARTY to the FIRST PARTY;
- 9) Other managerial management related to Royal Biringkanaya Makassar Hospital.

In implementing this agreement, the FIRST PARTY pays the Fee for the SECOND PARTY, for the Management of the Royal Biringkanaya Makassar Hospital in the amount of Rp.8.170.000.000 with details:

- a. The cost of assisting the establishment of the Royal Biringkanaya Makassar Hospital amounted to Rp.5.670.000.000;
- b. Branding Fee for Pelni Hospital for the first 5 years amounting to Rp.2.500.000.000;

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERIKATAN (lanjutan)**Perjanjian Kerjasama dengan PT Indah Karya (Persero)
(lanjutan)**

- c. Management Fee dihitung berdasarkan jumlah omzet neto setiap bulan yang diperoleh Rumah Sakit Royal Biringkanaya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pencapaian omzet minimal 50% dari bisnis plan, maka besar fee yang dibayarkan PHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp200.000.000;
 - 2) Pencapaian omzet diatas 50% s.d. 75% dari bisnis plan, maka besar fee yang dibayarkan PHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 3% dari jumlah omzet per bulan;
 - 3) Pencapaian omzet diatas 75% dari bisnis plan, maka besar fee yang dibayarkan PHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 2% dari jumlah omzet per bulan;

Pembayaran biaya fee diatur sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap Pendampingan Pendirian Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar sampai dengan tahap Pra Operasional kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap berdasarkan pencapaian progres dengan produk laporan (product deliverable) sesuai rincian biaya terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Pembayaran Branding Fee Rumah Sakit Pelni sebesar Rp2.500.000.000 dibayarkan sebanyak dua kali, yaitu:
 - 1) Termin I 60%, yaitu sebesar Rp1.500.000.000 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA saat Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar dapat dioperasikan;
 - 2) Termin II 40%, yaitu sebesar Rp1.000.000.000 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA satu tahun setelah Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar telah dioperasikan.
- c. Pembayaran Management Fee atas pengelolaan Manajemen Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar, dibayarkan setiap bulan setelah laporan kinerja manajemen dan keuangan disusun dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan batas waktu akhir bulan berikutnya.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan diatur sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pendampingan Pendirian Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar dan Penyiapan Pra Operasional Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar, akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA selama kurun lebih 1 (satu) tahun setelah perjanjian ini ditandatangani atau maksimal 3 bulan sebelum operasional Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar.

42. ENGAGEMENT (continued)**Cooperation Agreement with PT Indah Karya
(Persero) (continued)**

- c. Management Fee is calculated based on the amount of net turnover each month obtained by Royal Biringkanaya Hospital, with the following conditions:
- 1) Achievement of a minimum turnover of 50% of the business plan, the amount paid is PHAK FIRST to the SECOND PARTY of Rp.200.000.000;
 - 2) Achievement of turnover above 50% up to 75% of the business plan, then the fee paid PHAK FIRST to the SECOND PARTY is 3% of the total turnover per month;
 - 3) Achievement of turnover above 75% of the business plan, then the fee paid is PHAK FIRST to the SECOND PARTY of 2% of the total turnover per month;

Payment of fee is arranged as follows:

- a. Payment for the stage of Mentoring of the Establishment of Royal Biringkanaya Makassar Hospital up to the Pre-Operational stage for the SECOND PARTY is carried out in stages based on the progress of the product report (product deliverable) according to the detailed costs attached to this Cooperation Agreement;
- b. Branding Fee of Pelni Hospital in the amount of Rp.2.500.000.000 is paid twice, namely:
 - 1) The first term is 60%, which is equal to Rp1,500,000,000 paid to the SECOND PARTY when the Royal Biringkanaya Makassar Hospital can be operated;
 - 2) Termination 40%, which is equal to Rp1,000,000,000, is paid to the SECOND PARTY one year after the Royal Biringkanaya Makassar Hospital has been operated.
- c. Payment of Management Fee for management of the Royal Biringkanaya Makassar Hospital is paid monthly after the management and financial performance reports are prepared and submitted by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY with the deadline for the following month.

The period of completion of work is arranged as follows:

- a. Job Assistance for Establishment of Royal Biringkanaya Makassar Hospital and Pre-Operational Preparation of Royal Biringkanaya Makassar Hospital, will be completed by the SECOND PARTY for more than 1 (one) year after the agreement is signed or a maximum of 3 months before the operation of Royal Biringkanaya Makassar Hospital.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. PERIKATAN (lanjutan)

**Perjanjian Kerjasama dengan PT Indah Karya (Persero)
(lanjutan)**

- b. Branding Fee dan Management Fee berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak dimulainya operasional Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar.

Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak dimulainya operasional Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar. Sampai dengan terbitnya laporan keuangan ini, progres pembangunan Rumah Sakit Royal Biringkanaya Makassar masih dalam tahap land clearing.

43. PERKARA-PERKARA LITIGASI

- a. Perkara Perdata Upaya Perlawanan "Derden Verzet" Menteri BUMN kepada Hasan Ismail, PT. PELNI (Persero), Perkara Nomor : 110/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Pst

Menteri BUMN selaku RUPS PT. PELNI (Persero) mengajukan perlawanan (Derden Verzet) terhadap penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor : 77/2012.Eks jo Nomor 168/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst jo 537/Pdt/2009/PT.DKI jo 76K/Pdt/2011 jo 496PK/Pdt/2013. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

- b. Perkara Perdata "Gugatan Pengosongan" oleh Sdr. Daeng Abdul Karim yang mengklaim sebagai ahli waris atas Tanah Kantor Cabang PT. PELNI (Persero) Makassar yang terletak di Jl. Sudirman 14/14A. Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2013/PN.Mks.

Sdr. Daeng Abdul Karim mengklaim sebagai ahli waris tanah milik PT. PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Sudirman No. 14/14A sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 259/ Mangkura Makassar Sulawesi Selatan. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

- c. Perkara Perdata "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" oleh PT. Semarang Baru Indah Sejahtera kepada PT. PELNI (Persero). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 207/Pdt.G/2015/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No : 120/Pdt/2016/PT.Smg.

PT. Semarang Baru Indah Sejahtera mengajukan Gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" kepada PT. PELNI (Persero) atas Aset tanah dan bangunan sesuai alas Hak SHGB No 475/1983 a.n PT PELNI (Persero). Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, PT. Semarang Baru Indah Sejahtera mengajukan Kasasi atas Putusan PN Semarang dan PT Jawa Tengah Kasasi di Mahkamah Agung.

42. ENGAGEMENT (continued)

**Cooperation Agreement with PT Indah Karya
(Persero) (continued)**

- b. Branding Fee and Management Fee are valid for 5 (five) years, starting from the commencement of the operation of the Royal Biringkanaya Makassar Hospital.

This cooperation agreement is valid for 5 (five) years, starting from the commencement of the operation of the Royal Biringkanaya Makassar Hospital. Until the issuance of this financial report, the progress of the construction of the Royal Biringkanaya Makassar Hospital is still in the land clearing stage.

43. LITIGATION CASE

- a. Civil Proceedings of "Derden Verzet" Resistance against Minister of SOEs to Hasan Ismail, PT. PELNI (Persero), Case Number 110/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Pst

Minister of SOEs as the AGM of PT. PELNI (Persero) filed a resistance (Derden Verzet) against the determination of Chairman of Central Jakarta District Court Number: 77 / 2012.Ex jo Number 168 / Pdt.G / 2008/ PN.Jkt.Pst jo 537 / Pdt / 2009 / PT.DKI jo 76K / Pdt / 2011 jo 496 PK / Pdt / 2013. The final position of the case up to the publication of this report, Appeal at the High Court of DKI Jakarta.

- b. The Civil Lawsuit "Lifting Law" By Br. Daeng Abdul Karim who claimed to be the heir of the Land Branch Office of PT. PELNI (Persero) Makassar which is located on Jl. Sudirman 14 / 14A. Case Number: 324/Pdt.G/2013/PN.Mks

Mr. Daeng Abdul Karim claims to be the heir of land owned by PT. PELNI (Persero) located on Jl. Sudirman No. 14 / 14A as Building Rights Certificate Number: 259 / Mangkura Makassar South Sulawesi. The final position of the case up to the publication of this report, Appeal at the High Court of South Sulawesi.

- c. Civil Lawsuit "Lawsuit of Action Against the Law" by PT. Semarang Baru Indah Sejahtera to PT. PELNI (Persero). Semarang State Court Verdict No. 207/Pdt.G/2015/ PN.Smg, Central Java High Court Verdict No. : 120/ Pdt/2016/PT.Smg.

PT. Semarang Baru Indah Sejahtera filed a lawsuit "Action Against the Law" to PT. PELNI (Persero) on Land and building assets in accordance with the rights of SHGB No 475/1983 a.n PT PELNI (Persero). The final position of the case up to the publication of this report, Appeal at the High Court of South Sulawesi..PT. Semarang Baru Indah Sejahtera filed an appeal on the verdict of PN Semarang and PT

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

43. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- d. Perkara Perdata "Perbuatan Melawan Hukum" Oleh Agustine Ria Dewi (ahli waris penghuni) terhadap PT.PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Jambi No. 61 Surabaya. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 229/Pdt.G/2014/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 272/Pdt/2015/PT.Sby.

Agustine Ria Dewi selaku Ahli Waris Penghuni melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. PELNI (Persero) atas Aset milik PT. PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Jambi No. 61 Surabaya. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Agustine Ria Dewi mengajukan Kasasi atas Putusan PN Surabaya dan PT Jawa Timur, serta Kasasi di Mahkamah Agung.

- e. Perkara Pidana "Dugaan Tindak Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat atau akta otentik". Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/436/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum.

PT. PELNI (Persero) melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dan atau 263 KUHP dan atau 264 KUHP. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Proses Penyidikan.

- f. PKPU PT Rolika Caterindo. Putusan PN Niaga Nomor : 17/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst.

PT Rolika Caterindo merupakan mitra PT.PELNI (Persero) yang memiliki utang macet, dan dalam perkembangannya digugat oleh BNI Syariah selaku Kreditor. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Putusan Pengadilan Negeri Jak-Pus Nomor : 17/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- g. Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di PELNI Cabang Ambon. Perkara Hubungan Industrial di PN Nomor 10/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.Amb.

Tenaga Harian Lepas di berhentikan oleh Kepala Cabang, dan dalam perkembangannya melakukan upaya gugatan di PN Ambon. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 10/Pdt-sus.PHI/2016/ PN.Ambon.

- h. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Star Power Bussines Pte Ltd. Perkara di PN Nomor : 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst.

PELNI melakukan pengadaan barang spare part kapal melalui proses lelang, dimana salah satu peserta melakukan gugatan. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Menunggu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

43. LITIGATION CASE (continued)

- e. Civil Law "Action Against the Law" By Agustine Ria Dewi (heir of the inhabitants) against PT.PELNI (Persero) located on Jl. Jambi No. 61 Surabaya. Surabaya State Court Verdict 229/Pdt.G/2014/PN.Sby Surabaya High Court Verdict: 272/Pdt/2015/ PT.Sby.

Agustine Ria Dewi as the Heir of the Inhabitant to Commit a Action against the Law to PT. PELNI (Persero) on assets owned by PT. PELNI (Persero) located on Jl. Jambi No. 61 Surabaya. The final position of the case up to the publication of this report, Agustine Ria Dewi filed an appeal on the Decision of PN Surabaya and PT East Java and Cassation in the Supreme Court

- e. Criminal Case "Alleged Crime ordered put false information and or falsification of letters or authentic acts". Report Registry No.: TBL/436/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum

PT. PELNI (Persero) reported the alleged criminal act as regulated in Article 266 of the Criminal Code and or 263 of the Criminal Code and or 264 of the Criminal Code. The final position of the case up to the publication of this report, Investigation Process.

- f. PKPU PT Rolika Caterindo. Commercial State Court Verdict No: 17/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst.

PT Rolika Caterindo is a partner of PT.PELNI (Persero) which has bad debts, and in its development sued by BNI Syariah as Creditor. The final position of the case up to the publication of this report, Central Jakarta State Court Verdict No.: 17/ Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- g. Freelance Daily Worker. Industrial Dispute Case at PN No 10/Pdt.SUSPHI/2016/PN.Amb Termination at PELNI Cabang Ambon.

PELNI owns Assets with SHGB No: 7 /Lirung, Sangihe Talud, Currently sued by claiming party as the heir. The final position of the case up to the publication of this report, Tahuna State Court Verdict No 57/PDT.G/2-16/PN.THN.

- h. Action Against the Law Case by Star Power Bussines Pte Ltd. Case at PN No. :378/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst.

PELNI conducted he procurement of spare parts of vessels through auction process, in which one of the participants filed suit. The final position of the case up to the publication of this report, Awaiting Verdict of Central Jakarta District Court.



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2018, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017, dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

*As of December 31, 2018, and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2017, and
for the Year Then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

**44. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI
KEUANGAN**

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

44. SUBSEQUENT EVENTS

There are no important events / events after the statement of financial position date (balance sheet) that have a significant effect on the financial statements.

**45. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 22 April 2019.

**45. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL
OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements are the responsibility of management and have been approved by the Board of Directors for issue on the date 22 April 2019.



INFORMASI TAMBAHAN/ ADDITIONAL INFORMATION



Informasi Tambahan / Additional Information

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(NERACA) INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2018
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(BALANCE SHEETS) PARENT ONLY
As of December 31, 2018
(With Comparative as of December 31, 2017)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	01 Jan./Jan. 2017 31 Desember/ December 2016	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	1.355.531.265.726	1.212.866.533.901	787.943.514.532	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha <i>(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.3.098.956.587, Rp.2.022.898.695 dan Rp.9.282.853.975)</i>	79.746.449.868	132.335.265.231	231.570.047.706	Accounts Receivables <i>(Net of provision for impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively Rp.3.098.956.587, Rp.2.022.898.695 and Rp.9.282.853.975)</i>
Aset Keuangan Lancar Lainnya <i>(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.176.105.864, Rp.174.460.475 dan Rp.222.551.921)</i>	404.963.478.595	541.264.278.130	768.213.597.000	Other Current Financial Assets <i>(Net of provision for impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively Rp.176.105.864, Rp.174.460.475 and Rp.222.551.921)</i>
Persediaan	445.738.060.116	459.274.548.331	453.345.558.806	Inventories
Pajak Dibayar Dimuka	18.332.904.321	15.307.135.538	8.326.116.061	Prepaid Taxes
Uang Muka	40.333.669.836	35.082.808.811	21.752.032.951	Advances Payment
Biaya Dibayar Dimuka	18.298.101.829	15.954.686.236	13.111.611.145	Prepaid Expenses
Akun Antar Entitas Dalam 1 Grup Pelni	23.347.043.890	50.365.164.256	54.308.052.767	Inter-Entity Account in 1 PELNI Group
Jumlah Aset Lancar	2.386.290.974.181	2.462.450.420.434	2.338.570.530.968	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non - Current Assets
Investasi Pada Entitas Asosiasi	618.756.661.229	451.258.424.014	337.286.700.336	Investment in Associated Entities
Properti Investasi <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.23.007.389.696, Rp.21.982.967.567 dan Rp.20.960.976.697)</i>	108.366.500.000	9.009.866.558	9.383.467.502	Investment Properties <i>(Net of accumulated depreciation and impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively for Rp.23.007.389.696, Rp.21.982.967.567 and Rp.20.960.976.697)</i>
Alat Produksi <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.5.197.459.401.632, Rp.4.859.148.638.141 dan Rp.4.553.559.324)</i>	3.048.365.774.736	3.205.175.256.051	3.228.703.512.764	Production Equipment <i>(Net of accumulated depreciation and impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively Rp.5.197.459.401.632, Rp.4.859.148.638.141 and Rp.4.553.559.324)</i>
Aset Tetap <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp.199.524.431.190, Rp.191.926.489.398 dan Rp.199.302.331.526)</i>	130.942.794.420	129.592.044.766	142.813.445.980	Fixed Assets <i>(Net of accumulated depreciation and impairment as of December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively Rp.199.524.431.190, Rp.191.926.489.398 and Rp.199.302.331.526)</i>
Aset Tidak Berwujud	23.102.352.079	16.653.166.723	4.166.667.144	Intangible Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	305.678.012	47.946.320	10.663.122.609	Other Non Current Assets
Aset Pajak Tangguhan	39.087.707.791	38.238.970.693	32.812.034.981	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.968.927.468.267	3.849.975.675.125	3.765.828.951.316	Total Non Current Assets
TOTAL ASET	6.355.218.442.448	6.312.426.095.559	6.104.399.482.284	TOTAL ASSETS



PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(NERACA) INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2018
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(BALANCE SHEETS) PARENT ONLY
As of December 31, 2018
(With Comparative as of December 31, 2017)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	01 Jan./Jan. 2017 31 Desember/ December 2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Jangka Pendek				Short-Term Liabilities
Utang Usaha	127.755.715.838	152.480.454.118	125.302.981.925	Accounts Payable
Beban Akruwal	69.954.217.924	158.854.933.432	260.361.024.818	Accrued Expenses
Utang pajak	37.500.184.255	40.906.923.594	27.113.553.259	Tax Payable
Bagian Lancar atas				Current Portion of
Liabilitas Jangka Panjang	5.440.380.353	5.440.380.353	70.500.915.190	Long term Liabilities
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	36.480.255.801	40.303.614.329	5.440.380.353	Prepaid Revenues/ Deposit/Deposit Guarantee
Liabilitas Keuangan				Other Short Term
Jangka Pendek Lainnya	40.208.335.114	48.366.878.147	36.365.263.036	Financial Assets
Sub Jumlah	317.339.089.285	446.353.183.973	525.084.118.580	Sub Total
Liabilitas Jangka Panjang				Long-Term Liabilities
Utang Non Usaha Jangka Panjang	31.113.840.160	37.687.297.741	43.523.055.567	Long-Term Non Operating Payables
Liabilitas Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	114.496.226.847	125.404.248.861	71.947.877.294	Long Term Employee Benefits
Sub Jumlah	145.610.067.007	163.091.546.602	115.470.932.861	Sub Total
Jumlah Liabilitas	462.949.156.292	609.444.730.575	640.555.051.441	Total Liabilities
Ekuitas				Equity
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, Modal dasar 13.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.065.092 saham per 31 Desember 2018 dan 2017	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	Capital Stock - par value of Rp.1000.000 per share, Authorized - 13.000.000 share Issued and fully paid - 7.065.092 shares as of December 31, 2018 and 2017
Penyertaan Modal Pemerintah	564.951.174.642	564.951.174.642	564.951.174.642	Government Equity
Cadangan	689.012.343.748	412.593.309.421	164.190.404.981	Reserves
Saldo Rugi (Defisit)	(2.323.632.341.006)	(2.527.263.527.054)	(2.277.574.901.722)	Retained Earnings (Deficits)
Komponen Ekuitas Lainnya	(103.153.891.228)	187.608.407.975	(52.814.247.058)	Other Component Equity
Jumlah Ekuitas	5.892.269.286.156	5.702.981.364.984	5.463.844.430.844	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6.355.218.442.448	6.312.426.095.559	6.104.399.482.284	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES



Informasi Tambahan / Additional Information

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME PARENT ONLY
For The Year Ended December 31, 2018
(With Comparative for the Year Ended
December 31, 2017)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
Pendapatan Usaha	3.762.344.809.512	4q; 31	3.733.250.039.396	<i>Operating Revenues</i>
Reduksi Pendapatan Usaha	(15.922.131.296)	4q; 31	(20.846.904.014)	<i>Reduction in Operating Revenues</i>
Pendapatan Usaha Bersih	<u>3.746.422.678.216</u>		<u>3.712.403.135.382</u>	<i>Net Operating Revenues</i>
Beban Pokok Usaha	3.499.515.785.816	4q; 32	3.284.710.494.886	<i>Operating Expenses</i>
Laba Kotor	<u>246.906.892.400</u>		<u>427.692.640.496</u>	<i>Gross Profit</i>
Beban Pemasaran dan Distribusi	31.360.529.673	4q; 33	21.902.907.842	<i>Distribution and Marketing Expenses</i>
Beban Umum dan Administrasi	295.390.795.711	4q; 34	286.686.613.203	<i>General and Administrative Expenses</i>
Laba Usaha	<u>(79.844.432.984)</u>		<u>119.103.119.451</u>	<i>Operating Profit</i>
Pendapatan Non Usaha, Bersih	328.433.571.077	4q; 35	198.891.820.306	<i>Non Operating Income, Net</i>
Laba Sebelum Pajak	<u>248.589.138.093</u>		<u>317.994.939.757</u>	<i>Profit Before Tax</i>
Manfaat (Beban) Pajak				<i>Tax Benefits (Expense)</i>
Beban Pajak Kini	(45.806.689.143)	4u; 10c	(47.052.182.560)	<i>Current Tax Expenses</i>
Manfaat Pajak Tangguhan	848.737.098	4u; 10d	5.476.277.129	<i>Deferred Tax Benefits</i>
Jumlah Beban Pajak	<u>(44.957.952.045)</u>		<u>(41.575.905.431)</u>	<i>Total Tax Expenses</i>
Laba Tahun Berjalan	<u>203.631.186.048</u>		<u>276.419.034.326</u>	<i>Profit for the Current Year</i>
Penghasilan Komprehensif Lain				<i>Other Comprehensive Income</i>
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				<i>Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss</i>
- Keuntungan (Kerugian) Akturia	(14.343.264.877)	4t	(35.996.379.293)	<i>Actuarial Gain (Loss) -</i>
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	<u>189.287.921.171</u>		<u>240.422.655.033</u>	<i>Total Comprehensive Income of the Current Year</i>
Laba Bersih Per Saham Dasar	<u>28.822,16</u>	4w	<u>39.124,62</u>	<i>Basic Earnings Per Share</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

Informasi Tambahan / Additional Information

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
PARENT ONLY STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the Year Ended December 31, 2018
 (With Comparative for the Year Ended December 31, 2017)
 (Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INDUK SAJA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017)
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Additional Paid In Capital	Penyerahan Modal Pemerintah/ Government Capital	Cadangan/ Reserve	Saldo Rugi (Defisit)/ Retained Earnings (Deficits)	Komponen Ekuitas lainnya/ Other Equity Components	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo Akhir per 31 Desember 2016/Ending Balance as of December 31, 2016	7.065.092.000.000	564.951.174.642	164.190.404.981	(2.277.574.901.721)	(52.814.247.058)	5.463.844.430.844
Laba Tahun Berjalan/Profit for the Current Year	-	-	-	276.419.034.328	-	276.419.034.328
Retained Earnings Adjustment	-	-	-	(1.285.720.894)	-	(1.285.720.894)
Cadangan/Reserve	-	-	248.402.904.439	(248.402.904.439)	-	-
Kerugian Aktuarial/Actuarial Losses	-	-	-	-	(35.996.379.293)	(35.996.379.293)
Saldo Akhir per 31 Desember 2017/Ending Balance as of December 31, 2017	7.065.092.000.000	564.951.174.642	412.593.309.420	(2.250.844.492.726)	(88.810.626.351)	5.702.981.364.985
Laba Tahun Berjalan/Profit for the Current Year	-	-	-	203.631.186.048	-	203.631.186.048
Cadangan/Reserve	-	-	276.419.034.328	(276.419.034.328)	-	-
Kerugian Aktuarial/Actuarial Losses	-	-	-	-	(14.343.264.876)	(14.343.264.876)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018/Ending Balance as of December 31, 2018	7.065.092.000.000	564.951.174.642	689.012.343.748	(2.323.632.341.006)	(103.153.891.227)	5.892.269.286.156



Informasi Tambahan / Additional Information

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018

(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**STATEMENT OF CASH FLOWS - PARENT ONLY**

As of December 31, 2018

(With Comparative as of December 31, 2017)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2018	2017	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan dan pihak terkait	1.342.352.887.517	1.235.329.385.180	Receipt from Customer
Penerimaan Public Service Obligation & Subsidi	2.403.998.420.099	2.461.769.659.728	Receipt from Public Service Obligation
Pembayaran kepada pemasok	(2.946.064.030.466)	(2.962.992.938.351)	Payment to Suppliers
Penerimaan kas Lain-lain	67.018.115.871	43.502.628.691	Cash Receipt Others
Pembayaran Biaya Operasional	(357.302.530.484)	(384.127.303.312)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Biaya Overhead	(23.257.049.546)	(21.902.907.842)	Payment of Overhead Expenses
Pembayaran Biaya Lain-lain	(15.682.974.311)	(11.894.116.293)	Payment of Other Expenses
Penerimaan Uang Jaminan dari Pelanggan	3.823.358.528	3.938.351.294	Receipt of Cash Collateral from Customer
Pembelian Persediaan	(13.536.488.215)	(5.928.989.525)	Purchase of Inventories
Penerimaan Bunga	25.911.026.417	41.647.721.097	Interest Receipt
Pembayaran Pajak	(54.691.041.978)	(56.960.225.351)	Tax Payment
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktifitas Operasi	432.569.693.432	342.381.265.316	Net Cash Provided from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Cash Flows from Operating Activities
Hasil Penjualan Aktiva Tetap	-	11.818.181.818	Sale of Fixed Assets
Perolehan Aset Tetap	(236.565.790.582)	(213.937.876.776)	Purchase of Fixed Assets
Perolehan Aset Dalam Konstruksi	(10.938.221.761)	(62.335.982.670)	Construction in Progress
Perolehan Aset Tak Berwujud	(13.633.924.009)	(13.361.666)	Purchase of Intangible Assets
Pembelian Aset Lain-lain	(241.501.980)	(129.000.000)	Purchase of Assets
Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktifitas Investasi	(261.379.438.332)	(264.598.039.294)	Net Cash Used in Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan Pemerintah	-	-	Receipt from Government
Penerimaan pinjaman bank / pihak ketiga	-	-	Receipt from Bank Loan / Third Parties
Penerimaan (Pengeluaran) Deviden	-	-	Receipt (Issuance) Deviden
Pembayaran Utang Bank	-	-	Payment of Bank Loan
Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktifitas Pendanaan	-	-	Net Cash Provided from (Used in) Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	171.190.255.100	77.783.226.022	INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.546.726.740.554	1.468.943.514.532	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.717.916.995.654	1.546.726.740.554	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING

Halaman ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank



Laporan Tahunan 2018 Annual Report



PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
Jl. Gajah Mada No.14, Jakarta Pusat, 10130
Telp: (021) 6334342
Fax: (021) 63854130
infopelni162@pelni.co.id
www.pelni.co.id

 Pelayaran Nasional Indonesia  @pelni162  Pelni 162  Pelni 162

 Call Center : 162 / 021 162  Whatsapp : 0822 8888 9162